BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

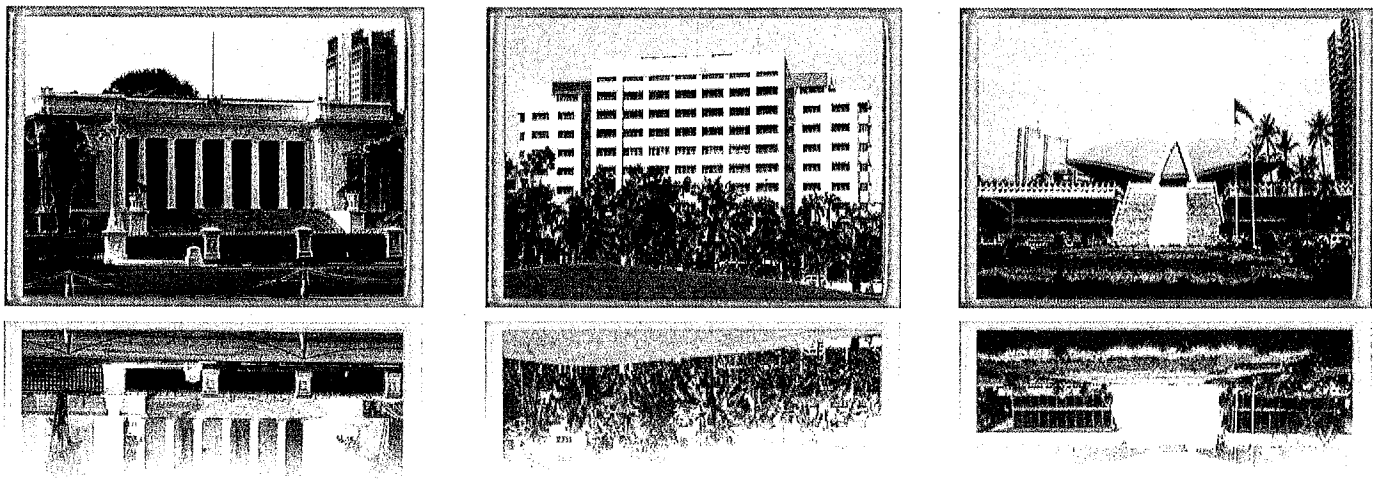

Nomor : 24a/LHP/XV/05/2012

Tanggal : 24 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 25549000

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ii

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 iii

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 4

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011 terdiri dari lima laporan pokok dan satu laporan tambahan sebagai berikut.

1. **Ringkasan Eksekutif**

   Ringkasan Eksekutif memuat lingkup pemeriksaan, opini BPK atas LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2011 dan 2010, temuan-temuan signifikan berupa kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan, serta rekomendasi.

2. **Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan**

   Laporan I memuat:
   a. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK,
   b. LKPP Tahun 2011, dan
   c. Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL.

3. **Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern**

   Laporan II memuat:
   a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern; dan
   b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

4. **Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

   Laporan III memuat:
   a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
   b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.

5. **Laporan IV: Laporan Pemantauan Tindak Lanjut**

   Laporan IV memuat:
   a. Resume Pemantauan Tindak Lanjut; dan
   b. Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2005 - 2010.

6. **Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal**

   Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:
   a. Kejelasan aturan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah;
   b. Keterbukaan proses penganggaran;
   c. Ketersediaan informasi bagi publik; dan
   d. Integritas data yang dilaporkan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011

01 Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

02 Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 04 – 05 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

03 Dalam Laporan BPK Nomor 27a/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 Mei 2011, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2010 karena permasalahan yang berkaitan dengan 1) ketidakjelasan transaksi pengganti atas transaksi pembatalan penerimaan perpajakan (*reversal*), penetapan dan penagihan PBB Migas tidak sesuai UU PBB dan UU Migas, dan penyelesaian PPN melalui Pajak Ditanggung Pemerintah yang tidak sesuai dengan UU PPN; 2) pencatatan Uang Muka BUN yang tidak dapat mengidentifikasi transaksi talangan dan penggantian yang berpengaruh pada pencatatan SAL; 3) permasalahan pencatatan dan pelaporan Piutang Pajak; dan 4) permasalahan pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap.

Dalam tahun 2011, Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan penagihan PBB Migas sesuai UU PBB, perbaikan metodologi rekonsiliasi data dan penelitian atas *reversal* penerimaan perpajakan, penyelesaian PPN atas BBM sehingga sesuai dengan UU dan ketentuan berlaku, pemetaan dan penelusuran data rincian Uang Muka BUN, serta perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan Piutang Pajak.

04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.28 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing senilai Rp1.567,97 triliun dan Rp1.184,30 triliun yang merupakan nilai Aset Tetap berdasar Neraca Kementerian Negara/Lembaga (KL) dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan belum memperhitungkan penyusutan. Pemerintah telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum Neraca Awal per 31 Desember 2004, tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil IP sebagai berikut: 1) Aset Tetap pada sepuluh KL dengan nilai perolehan Rp4,13 triliun belum dilakukan IP; 2) Aset Tanah Jalan Nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109,06 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum selesai dilakukan IP dan hasil IP tidak memadai; 3) Aset Tetap hasil IP pada tiga KL senilai Rp3,88 triliun dicatat ganda; 4) pencatatan hasil IP pada 40 KL masih selisih senilai Rp1,54 triliun dengan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 5) Aset Tetap pada 14 KL senilai Rp6,89 triliun tidak diketahui keberadaannya; dan 6) Pelaksanaan IP belum mencakup penilaian masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan Aset Tetap. Nilai Aset Tetap yang dilaporkan bisa berbeda secara signifikan jika Pemerintah menyelesaikan dan mencatat seluruh hasil IP.

05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.29 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing senilai Rp438,63 triliun dan Rp278,20 triliun. Aset Lainnya tersebut termasuk Aset Eks BPPN dengan nilai per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing senilai Rp67,54 triliun dan Rp29,20 triliun. Kenaikan Aset Eks BPPN senilai Rp38,34 triliun berasal dari hasil inventarisasi, perhitungan, dan penilaian yang dilakukan Pemerintah. Pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks BPPN tersebut masih mengandung kelemahan yaitu: 1) Pemerintah belum menemukan dokumen *cessie* atas Aset Eks BPPN berupa Aset Kredit senilai Rp18,25 triliun; 2) Aset eks BPPN yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) senilai Rp11,18 triliun tidak didukung oleh dokumen sumber yang valid; 3) Aset Eks BPPN berupa tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) senilai Rp8,68 triliun belum didukung kesepakatan dengan Pemegang Saham; 4) Aset Eks BPPN berupa aset properti sebanyak 917 item belum dinilai; dan 5) Pemerintah belum dapat menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Aset Eks BPPN yang berupa piutang. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo Aset Eks BPPN.

06 Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan dan mencatat seluruh hasil IP Aset Tetap serta mencatat Aset Eks BPPN berdasarkan dokumen yang valid dan menyajikannya sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, laporan keuangan yang kami sebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 dan 2010 serta realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

07 Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran LKPP Tahun 2011, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan APBN TA 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24b/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 dan Nomor 24c/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 24 Mei 2012
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

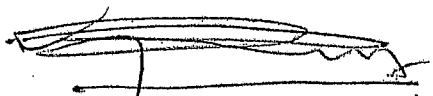

Drs. Hadi Poernomo, Ak
Register Negara No. D-786

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. **Dasar Hukum Pemeriksaan**

   Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

   a) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   b) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
   c) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
   d) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. **Standar Pemeriksaan**

   Pemeriksaan atas LKPP TA 2011 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

3. **Tujuan Pemeriksaan**

   Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan memperhatikan:

   a) Kesesuaian LKPP dengan SAP;
   b) Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP;
   c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
   d) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. **Entitas yang Diperiksa**

   Pemeriksaan dilakukan atas LKPP TA 2011 yang meliputi 79 Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara (BUN), dan 7 BA BUN.

5. **Lingkup Pemeriksaan**

   Lingkup pemeriksaan adalah LKPP TA 2011 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 29 Maret 2012.

6. **Sasaran Pemeriksaan**

   Pemeriksaan LKPP TA 2011 meliputi pengujian atas saldo akun-akun yang ada di Neraca serta transaksi-transaksi pada LRA serta SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

7. **Metodologi Pemeriksaan**

   Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dengan pendekatan berdasarkan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern untuk menentukan area risiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Dalam menganalisis dan menguji proses penyusunan dan penyajian LKPP, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini.

1) Menguji sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
2) Menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian dan kewajaran LKPP.

Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2005-2010.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 70 hari sesuai dengan Surat Tugas Anggota Nomor 55/ST/IV-XV.2/02/2012 tanggal 03 Februari 2012, dari 13 Februari 2012 sampai dengan 24 Mei 2012.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan LKPP merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2011 yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011.

Hasil pemeriksaan atas 79 LKKL Tahun 2011 (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik), LK Bendahara Umum Negara (BUN), dan tujuh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) menunjukkan terdapat 53 KL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 14 KL mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), 18 KL mendapatkan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), 2 KL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Rincian Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2009 s.d. 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Rincian Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009, 2010 dan 2011

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL		
			2009	2010	2011
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	TMP	WDP	WDP
5.	006	Kejaksaan Agung	WDP	WDP	WTP-DPP
6.	007	Sekretariat Negara	WDP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WTP-DPP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	TMP	TMP
17.	024	Kementerian Kesehatan	TMP	TMP	WDP
18.	025	Kementerian Agama	WDP	WDP	WTP-DPP
19.	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WTP-DPP
21.	029	Kementerian Kehutanan	WDP	WDP	WTP-DPP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	WDP	WDP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WDP	WDP	WDP
28.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP
29.	042	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP
30.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	WDP	WTP-DPP
31.	044	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WTP	WTP
32.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP
33.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL		
			2009	2010	2011
34.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP
35.	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
36.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
37.	054	Badan Pusat Statistik	WDP	WDP	WTP
38.	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP
39.	056	Badan Pertanahan Nasional	TMP	WDP	WDP
40.	057	Perpustakaan Nasional	WDP	WTP	WTP
41.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP
42.	060	Kepolisian RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
43.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WTP-DPP	WTP
44.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
45.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP
46.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
47.	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP
48.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WDP	WTP-DPP
49.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP
50.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP	WTP
51.	076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	WDP	WDP
52.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP
53.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
54.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WTP	WTP
55.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP
56.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP
57.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP
58.	083	Badan Informasi Geopasial (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WDP	WTP
59.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP
60.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP-DPP	WDP
61.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP
62.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP
63.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP
64.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP
65.	090	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
66.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP
67.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WTP	WDP	WDP
68.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP
69.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP
70.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL		
			2009	2010	2011
71.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	WDP	WTP
72.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP
73.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
74.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	*	WTP	WTP
75.	107	Badan SAR Nasional	*	WDP	WTP-DPP
76.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	*	WTP	WDP
77.	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	****	****	WDP
78.	110	Ombudsman RI	****	****	WTP
79.	111	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	****	****	TMP
80.	999.01	Pengelolaan Utang	WTP	WTP	WTP
81.	999.02	Pengelolaan Hibah	WDP	WDP	WDP
82.	999.03	Investasi Pemerintah	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP
83.	999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	WDP	WTP
84.	999.05	Transfer ke Daerah	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
85.	999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain- Lain	WDP	**	**
86.	999.07	Belanja Subsidi	*	WDP	WTP
87.	999.08	Belanja Lain-lain	*	WDP	WTP-DPP
88.		Bendahara Umum Negara	***	WDP	WDP

Keterangan

WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
*	:	Dibentuk Tahun 2010
**	:	BA.999.06 pada Tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08
***	:	Diberikan Opini mulai Tahun 2010
****	:	Dibentuk Tahun 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011

(Audited)

MEI 2012

INDEKS ISI

INDEKS ISI iii

INDEKS TABEL iv

INDEKS GRAFIK v

INDEKS DAFTAR vii

INDEKS SINGKATAN viii

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xi

RINGKASAN 1

I. LAPORAN REALISASI APBN 5

II. NERACA 8

III. LAPORAN ARUS KAS 11

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 14

A. PENJELASAN UMUM 15

A.1. DASAR HUKUM 15

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO 15

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 54

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 58

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 74

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 74

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 75

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 96

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 99

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 99

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 100

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA 158

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN 177

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 178

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 178

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 181

DAFTAR 200

INDEKS TABEL

1.	Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2007 – 2011	32
2.	Perkembangan Belanja Negara tahun 2007-2011	46
3.	Fiscal Space terhadap PDB Tahun 2007-2011	47
4.	Dampak APBN Terhadap Sektor Riil Tahun 2007-2011	52
5.	Presentase Anggaran dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2011	52
6.	Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2007-2011	53
7.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2011 dan TA 2010	81
8.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak	105
9.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai	106
10.	Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*	151
11.	Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing	151
12.	Saldo Anggaran Lebih TA 2011 dan TA 2010	152
13.	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2011 dan 2010	158
14.	Jenis dan Outstanding SPN Tahun 2011	375
15.	Debtswitch Tahun 2011	376
16.	Transaksi Buyback Tahun 2011	377
17.	Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN Tahun 2011	379
18.	Nilai Outstanding SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011	380
19.	Jatuh Tempo SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011	381
20.	Kupon SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011	382
21.	Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2011	383
22.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN seri Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011	384
23.	Nilai dan Jatuh Tempo SBN Seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2011	385
24.	Nilai dan Outstanding Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2011	387
25.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2011	388
26.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas dalam Rupiah per 31 Desember 2011	390
27.	Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2011	392

INDEKS GRAFIK

1. Sumber-sumber Pertumbuhan PDB 2008-2011 16
2. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2007 – 2011 17
3. Tren PDB Harga Berlaku Tahun 2007-2011 18
4. Struktur PDB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2010 dan 2011 19
5. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011 19
6. Perbandingan Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011 20
7. Perkembangan PDB Per Kapita Tahun 2007 – 2011 20
8. Laju Inflasi Tahun 2010 dan 2011 21
9. Andil Inflasi Tahun 2010 dan 2011 22
10. Perbandingan Ekspor Impor Tahun 2010 dan 2011 24
11. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Tahun 2011 24
12. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2011 27
13. Tren CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2011 27
14. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2009-2011 28
15. Cadangan Devisa Triwulanan 2009-2011 28
16. Tren Tax Ratio Tahun 2007-2011 35
17. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2007-2011 35
18. Realisasi PNBP Lainnya tahun 2007-2011 36
19. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2007-2011 37
20. Target dan Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2007-2011 38
21. K/L Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar 39
22. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2011 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 40
23. Tren Belanja Negara Bulanan TA 2011 dan TA 2010 41
24. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2011 41
25. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2011 42
26. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2011 42
27. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2011 43
28. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2011 44
29. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2011 44
30. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2011 45
31. Grafik Belanja Tidak Terikat dan Belanja Terikat Tahun 2007-2011 47
32. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2011 48
33. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2011 48
34. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2007-2011 50

35. Defisit dan Keseimbangan Primer Tahun 2007-2011 50
36. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2007-2011 51
37. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2007 - 2011 74
38. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2007 – 2011 75
39. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 75
40. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 80
41. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2011 81
42. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2011 82
43. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011 86
44. Komposisi Pendapatan BLU TA 2011 98
45. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2011 98
46. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2007 – 2011 99
47. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 166
48. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas 179
49. Struktur Surat Berharga Negara 374
50. Struktur *Outstanding* ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2011 380
51. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2011 381
52. Tingkat Kupon Seri FR per 31 Desember 2011 382
53. Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2011 383
54. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2011 384
55. Struktur *Outstanding* Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011 384
56. Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011 385
57. Struktur *Outstanding* VR per 31 Desember 2011 386
58. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2011 386
59. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2011 387
60. Struktur *Outstanding* SUP per 31 Desember 2011 387
61. Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2011 388
62. Struktur *Outstanding* Fixed Rate SBSN per 31 Desember 2011 389
63. Tingkat Imbalan SBSN per 31 Desember 2011 389
64. Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2011 389
65. Struktur *Outstanding* SBN Valas per 31 Desember 2011 (dalam rupiah) 390
66. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2011 391
67. Tingkat Kupon/Imbalan SBN Valas per 31 Desember 2011 391
68. Struktur Outstanding SUN dan SBSN Rupiah per 31 Desember 2011 391

INDEKS DAFTAR

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2011 201
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 211
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2011 223
4. Daftar Rekening Khusus per 31 Desember 2011 266
5. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2011 273
6. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2011 278
7. Rekening Pemerintah Lainnya Tahun 2011 279
8. 7Kas pada K/L per 31 Desember 2011 280
9. Piutang PNBP per 31 Desember 2011 282
10. Bagian Lancar Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011 283
11. Uang Muka Belanja pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011 284
12. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi 285
13. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011 286
14. Penyertaan Modal Negara Pada BUMN 288
15. Penyertaan Modal Negara Pada Non BUMN 297
16. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional 298
17. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011 299
18. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011 301
19. Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011 302
20. Aset KKKS per 31 Desember 2011 011 304
21. Aset Eks BPPN yang Dikelola Tim Koordinasi 315
22. Ringkasan Aset Negara yang Dikelola PPA per 31 Desember 2 316
23. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011 317
24. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2011 320
25. Surat Berharga Negara Jangka Pendek Dalam Negeri per 31 Desember 2011 323
26. Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2011 324
27. Ikhtisar laporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada K/L per 31 Desember 2011 327
28. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2011 328
29. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan 334
30. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2011 339
31. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2009 341
32. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2011 374

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BPMIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CBN	:	Cadangan Benih Nasional
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CFO	:	*Chief Financial Officer*
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
COO	:	*Chief Operating Officer*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
EDI	:	*Electronic Data Exchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency*
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L		Kementerian Negara/Lembaga

KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUT	:	Kredit Usaha Tani
LAK	:	Laporan Arus Kas
LBMN	:	Laporan Barang Milik Negara
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	*Non-Performing Loan*
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	*Past Service Liability*
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
SA-BUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDHI	:	Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	:	Sistem Akuntansi Pusat

SIBOR	:	*Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USD	:	*United State Dolar*
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

			Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah			
Catatan	B.2.1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	75
Catatan	B.2.1.1	**Penerimaan Perpajakan**	76
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	76
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	76
Catatan	B.2.1.2	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	77
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	77
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	78
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	78
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	79
Catatan	B.2.1.3	**Penerimaan Hibah**	79
Belanja Negara			
Catatan	B.2.2	**Belanja Negara**	79
Catatan	B.2.2.1	**Belanja Pemerintah Pusat**	79
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	82
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	82
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	83
Catatan	B.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang	83
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi	84
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	85
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	85
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	86
Catatan	B.2.2.2	**Transfer ke Daerah**	86
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan	87
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil	87
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alokasi Umum	87
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	88
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	88
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	88
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	88
Catatan	B.2.2.3	Suspen	89
Surplus (Defisit) Anggaran			
Catatan	B.2.3	**Surplus (Defisit) Anggaran**	89
Pembiayaan			
Catatan	B.2.4	**Pembiayaan**	89
Catatan	B.2.4.1	**Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)**	89
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah	90
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	90
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	90
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	91
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	91
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	91

Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	92
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	92
Catatan	B.2.4.2	**Pembiayaan Luar Negeri (Neto)**	93
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	93
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	93
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	93
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	94
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	94
SiLPA (SiKPA)			
Catatan	B.2.5	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)**	95
CATATAN PENTING LAINNYA			
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	96
NERACA			
ASET			
		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	100
Catatan	C.2.2	Rekening Kas di KPPN	100
Catatan	C.2.3	Rekening Pemerintah Lainnya	100
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	101
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	101
Catatan	C.2.6	Kas Lainnya dan Setara Kas	102
Catatan	C.2.7	Kas Pada BLU	103
Catatan	C.2.8	Uang Muka dari Rekening BUN	103
Catatan	C.2.9	Piutang Pajak	104
Catatan	C.2.10	Piutang Bukan Pajak	107
Catatan	C.2.11	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	109
Catatan	C.2.12	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	109
Catatan	C.2.13	Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	109
Catatan	C.2.14	Uang Muka Belanja	110
Catatan	C.2.15	Piutang dari Kegiatan BLU	110
Catatan	C.2.16	Piutang Lain-lain	111
Catatan	C.2.17	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	114
Catatan	C.2.18	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	114
Catatan	C.2.19	Investasi Jangka Pendek BLU	115
Catatan	C.2.20	Investasi Jangka Pendek Lainnya	116
Catatan	C.2.21	Persediaan	116
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.22	Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	117
Catatan	C.2.23	Dana Bergulir	117
Catatan	C.2.24	Investasi Non Permanen Lainnya	118
Catatan	C.2.25	Investasi Permanen PMN	119
Catatan	C.2.26	Investasi Permanen BLU	123
Catatan	C.2.27	Investasi Permanen Lainnya	123
Catatan	C.2.28	Aset Tetap	124
Catatan	C.2.29	Aset Lainnya	124
Catatan	C.2.30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya	139

KEWAJIBAN

		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	C.2.31	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	139
Catatan	C.2.32	Utang Kepada Pihak Ketiga	140
Catatan	C.2.33	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	141
Catatan	C.2.34	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	142
Catatan	C.2.35	Utang Biaya Pinjaman	143
Catatan	C.2.36	Utang Subsidi	144
Catatan	C.2.37	Utang SBN Jangka Pendek	144
Catatan	C.2.38	Pendapatan Diterima di Muka	144
Catatan	C.2.39	Utang Jangka Pendek Lainnya	144
Catatan	C.2.40	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara	146
Catatan	C.2.41	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	147
Catatan	C.2.42	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	147
Catatan	C.2.43	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	148
Catatan	C.2.44	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	150
Catatan	C.2.45	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	150
		Ekuitas Dana Lancar	
Catatan	C.2.46	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian	152
Catatan	C.2.47	SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	153
Catatan	C.2.48	Dana Lancar Lainnya	153
Catatan	C.2.49	Cadangan Piutang	154
Catatan	C.2.50	Cadangan Persediaan	154
Catatan	C.2.51	Pendapatan yang Ditangguhkan	154
Catatan	C.2.52	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	154
Catatan	C.2.53	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	155
Catatan	C.2.54	Barang/Jasa yang Harus Diterima	155
Catatan	C.2.55	Selisih Kurs Bagian Lancar	155
		Ekuitas Dana Investasi	
Catatan	C.2.56	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	156
Catatan	C.2.57	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	156
Catatan	C.2.58	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	156
Catatan	C.2.59	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	156
Catatan	C.2.60	Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	157

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	158

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Catatan	C.4	Kejadian Penting Setelah Tanggal Pelaporan	177

LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	181
Catatan	D.2.2	PNBP	184
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	187
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	187
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	187
Catatan	D.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	187
Catatan	D.2.7	Subsidi	188

Catatan	D.2.8	Belanja Hibah	189
Catatan	D.2.9	Bantuan Sosial	189
Catatan	D.2.10	Belanja Lain-Lain	189
Catatan	D.2.11	Dana Bagi Hasil Pajak	190
Catatan	D.2.12	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	190
Catatan	D.2.13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	190
Catatan	D.2.14	Dana Alokasi Umum	190
Catatan	D.2.15	Dana Alokasi Khusus	191
Catatan	D.2.16	Dana Otonomi Khusus	191
Catatan	D.2.17	Dana Penyesuaian	191

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	D.2.18	Penjualan Aset	191
Catatan	D.2.19	Belanja Modal	192

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.20	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	193
Catatan	D.2.21	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	194
Catatan	D.2.22	Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	195
Catatan	D.2.23	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	195
Catatan	D.2.24	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	195
Catatan	D.2.25	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	196
Catatan	D.2.26	Penerusan Pinjaman	196

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.27	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	197
Catatan	D.2.28	PFK Prefinancing dan PFK Lainnya (Neto)	197
Catatan	D.2.29	Kiriman Uang (Neto)	198
Catatan	D.2.30	Transito (Neto)	198

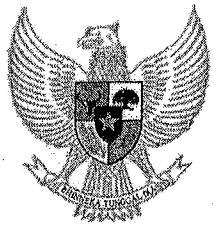

REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2011, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

LKPP Tahun 2011 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2011 - 31 Desember 2011.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.210,60 triliun atau 103,48 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.295,00 triliun atau 98,05 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp883,72 triliun atau 97,30 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp411,32 triliun atau 99,71 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2011 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp44,50 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2011 sebesar Rp84,40 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2011 adalah sebesar Rp130,95 triliun atau 86,82 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp46,55 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)			TA 2010 (*Audited*)
	Anggaran (UU No. 11/2011)	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.169,91	1.210,60	103,48	995,27
Belanja Negara	1.320,75	1.295,00	98,05	1.042,12
Belanja Pemerintah Pusat	908,24	883,72	97,30	697,41
Transfer ke Daerah	412,51	411,32	99,71	344,73
Suspen Belanja Negara	-	(0,05)	-	(0,02)
Surplus (Defisit) Anggaran	(150,84)	(84,40)	55,99	(46,85)
Pembiayaan Neto	150,84	130,95	86,82	91,55
SiLPA (SiKPA)		46,55		44,71

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.023,44 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp266,81 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp750,03 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.567,97 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp438,63 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.947,37 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp246,44 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.700,93 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.076,07 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp40,81 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.035,26 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Aset	**3.023,44**	**2.423,69**
Aset Lancar	266,81	254,78
Investasi Jangka Panjang	750,03	706,41
Aset Tetap	1.567,97	1.184,30
Aset Lainnya	438,63	278,20
Kewajiban	**1.947,37**	**1.796,08**
Kewajiban Jangka Pendek	246,44	201,34
Kewajiban Jangka Panjang	1.700,93	1.594,74
Ekuitas Dana Neto	**1.076,07**	**627,61**
Ekuitas Dana Lancar	40,81	83,46
Ekuitas Dana Investasi	1.035,26	544,15

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2011 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2011.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp98,98 triliun, sedangkan pada awal tahun 2011 terjadi koreksi tambah sebesar Rp0,03 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2011 menjadi Rp99,01 triliun.

Selama TA 2011 terjadi kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp32,78 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp117,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp131,39 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp1,31 triliun, penurunan karena penggunaan SAL sebesar Rp40,32 triliun, dan kenaikan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp1,29 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2011 menjadi Rp107,84 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp6,61 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,29 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,25 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6,33 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,10 triliun. Selama tahun 2011 terdapat deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp0,17 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp121,26 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2011 dan TA 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung *)	**98,98**	**46,06**
Koreksi Saldo Awal	0,03	20,99
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi	**99,01**	**67,05**
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	32,78	33,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(117,62)	(80,04)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	131,39	91,55
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	1,31	2,93
Pengunaan SAL	(40,32)	(17,35)
Penyesuaian Pembukuan	1,29	(1,18)
Kenaikan (Penurunan) Kas	**8,83**	**29,11**
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	**107,84**	**96,16**

**) Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2011 sebesar Rp98,98 triliun berasal dari Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU Tahun 2010 sebesar Rp96,16 triliun ditambah dengan Rekening Khusus Rp2,82 triliun.*

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

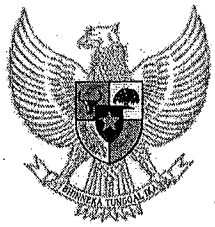

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN
(*AUDITED*)

I. LAPORAN REALISASI APBN (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2011 (*Audited*)			TA 2010 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**B.2.1**				
I. Penerimaan Perpajakan	**B.2.1.1**	**878.685.216.762.000**	**873.873.892.399.381**	99,45	**723.306.668.621.739**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	831.745.348.636.000	819.752.426.342.423	98,56	694.392.134.931.291
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	46.939.868.126.000	54.121.466.056.958	115,30	28.914.533.690.448
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**286.567.317.002.000**	**331.471.821.098.730**	115,67	**268.941.856.208.841**
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	191.976.022.718.000	213.823.349.552.827	111,38	168.825.442.320.286
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	28.835.823.000.000	28.183.973.126.600	97,74	30.096.932.694.265
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	50.339.436.023.000	69.360.502.832.532	137,79	59.428.639.159.020
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	15.416.035.261.000	20.103.995.586.771	130,41	10.590.842.035.270
III. Penerimaan Hibah	**B.2.1.3**	**4.662.105.508.000**	**5.253.939.861.304**	112,69	**3.022.986.560.763**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		**1.169.914.639.272.000**	**1.210.599.653.359.415**	**103,48**	**995.271.511.391.343**
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**908.243.422.687.800**	**883.721.886.196.519**	**97,30**	**697.406.380.187.177**
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	184.088.939.020.000	175.737.918.419.015	95,46	148.078.084.098.609
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	142.335.864.901.000	124.639.479.502.304	87,57	97.596.838.399.825
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	144.571.840.017.000	117.854.532.071.332	81,52	80.287.065.685.665
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	106.583.810.504.000	93.261.919.810.886	87,50	88.383.233.764.097
5. Subsidi	B.2.2.1.5	238.466.978.142.000	295.358.229.636.324	123,86	192.707.049.527.199
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	426.192.193.000	300.108.798.353	70,42	70.008.777.575
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	77.467.135.177.000	71.104.328.162.347	91,79	68.611.111.986.287
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	14.302.662.733.800	5.465.369.795.958	38,21	21.672.987.947.920
II. Transfer ke Daerah	**B.2.2.2**	**412.507.891.828.200**	**411.324.764.631.790**	**99,71**	**344.727.611.830.379**
1. Dana Perimbangan	**B.2.2.2.1**	**347.538.605.495.000**	**347.246.213.954.316**	**99,92**	**316.711.293.029.068**
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	96.772.092.547.000	96.908.991.981.316	100,14	92.183.491.233.868
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	225.533.712.048.000	225.533.712.048.000	100,00	203.571.490.627.200
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	25.232.800.900.000	24.803.509.925.000	98,30	20.956.311.168.000

Uraian	Catatan	TA 2011 (*Audited*)			TA 2010 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	B.2.2.2.2	**64.969.286.333.200**	**64.078.550.677.474**	**98,63**	**28.016.318.801.311**
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	10.421.312.993.000	10.421.312.993.000	100,00	9.099.613.680.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	54.547.973.340.200	53.657.237.684.474	98,37	18.916.705.121.311
III. Suspen Belanja Negara	B.2.2.3	-	(47.504.353.285)		(16.772.272.739)
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		**1.320.751.314.516.000**	**1.294.999.146.475.024**	**98,05**	**1.042.117.219.744.817**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	**(150.836.675.244.000)**	**(84.399.493.115.609)**	**55,95**	**(46.845.708.353.474)**
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	**153.613.307.023.000**	**148.748.034.850.068**	96,83	**96.118.516.369.932**
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	40.574.043.832.000	40.319.043.049.000	99,37	22.189.312.607.078
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	8.176.680.057.000	8.608.845.495.456	105,29	-
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	1.390.690.442.000	1.597.981.517.178	114,91	3.232.148.153.135
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	126.653.893.000.000	119.864.365.459.065	94,64	91.102.598.250.248
Penerimaan Surat Berharga Negara			207.136.113.196.150		167.634.217.942.000
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(87.271.747.737.085)		(76.531.619.691.752)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	1.452.125.992.000	619.382.641.633	42,65	393.606.359.471
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(21.112.426.300.000)	(19.643.883.312.264)	93,04	(19.799.149.000.000
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(904.000.000.000)	-	-	-
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(2.617.700.000.000)	(2.617.700.000.000)	100,00	(1.000.000.000.000)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**(2.776.631.779.000)**	**(17.799.165.225.648)**	**641,03**	**(4.566.504.969.317)**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	56.182.884.835.000	33.747.178.723.921	60,07	54.794.790.200.207
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	19.201.800.000.000	15.266.144.513.219	79,50	28.974.644.489.116
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	36.981.084.835.000	18.481.034.210.702	49,97	25.820.145.711.091
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(11.724.776.614.000)	(4.223.841.471.298)	36,02	(8.728.763.587.688)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(47.234.740.000.000)	(47.322.502.478.271)	100,19	(50.632.531.581.836)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**150.836.675.244.000**	**130.948.869.624.420**	**86,82**	**91.552.011.400.615**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA (SiKPA) (D+C)	B.2.5	-	**46.549.376.508.811**	-	**44.706.303.047.141**

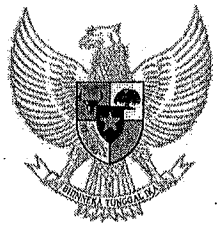

REPUBLIK INDONESIA

NERACA
(*AUDITED*)

II. NERACA (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2011 (*Audited*)	31 Des 2010 (*Audited*)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	82.453.918.298.407	82.430.710.192.763
Rekening Kas di KPPN	C.2.2	11.870.556.947.661	9.218.612.887.732
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.3	6.615.552.720.213	8.539.601.162.593
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	292.795.937.959	518.919.028.152
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	6.756.875.778.441	8.652.179.999.211
Kas pada BLU	C.2.7	13.019.388.257.063	7.340.595.820.681
Jumlah Kas dan Bank		121.261.988.260.868	117.332.963.445.378
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	1.408.995.648.910	1.876.259.417.429
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.9	108.063.462.383.641	70.945.271.446.620
Piutang Bukan Pajak	C.2.10	19.885.890.412.635	9.020.978.486.579
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.11	-	65.404.443
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.12	60.470.939.992	38.591.410.963
Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	C.2.13	-	4.842.752.393.007
Uang Muka Belanja	C.2.14	1.279.165.315.147	614.122.632.355
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.15	1.216.391.989.142	1.121.930.274.893
Piutang Lain-lain	C.2.16	24.977.956.337.945	12.589.882.121.588
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	C.2.17	4.462.395.347.776	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang	C.2.18	(75.330.131.480.506)	-
Jumlah Piutang (Bersih)		84.615.601.245.772	99.173.594.170.448
Investasi Jangka Pendek			
Investasi Jangka Pendek BLU	C.2.19	170.553.016.059	30.750.000.000
Investasi Jangka Pendek Lainnya	C.2.20	135.839.486.878	-
Jumlah Investasi Jangka Pendek		306.392.502.937	30.750.000.000
Persediaan	C.2.21	59.214.846.453.160	36.366.060.681.005
Jumlah Aset Lancar		**266.807.824.111.647**	**254.779.627.714.260**
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	C.2.22	-	43.367.037.927.876
Dana Bergulir	C.2.23	8.195.256.111.510	3.891.209.869.656
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.24	4.749.737.167.996	98.464.787.895
Jumlah Investasi Non Permanen		12.944.993.279.506	47.356.712.585.427
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.25	736.991.554.233.014	564.087.107.302.153
Investasi Permanen BLU	C.2.26	6.637.194.500	6.637.194.500
Investasi Permanen Lainnya	C.2.27	87.609.772.784	94.959.618.306.997
Jumlah Investasi Permanen		737.085.801.200.298	659.053.362.803.650
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**750.030.794.479.804**	**706.410.075.389.077**
Aset Tetap	C.2.28		
Tanah		806.436.356.598.744	565.920.545.473.098
Peralatan dan Mesin		184.852.199.595.042	150.868.673.195.411
Gedung dan Bangunan		152.228.086.918.162	137.042.921.053.205
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		347.164.628.245.286	276.682.171.786.874
Aset Tetap Lainnya		11.517.129.897.802	7.748.128.178.913
Konstruksi Dalam Pengerjaan		65.780.773.332.765	46.038.727.718.084
Jumlah Aset Tetap		**1.567.974.174.587.750**	**1.184.301.167.405.585**
Aset Lainnya	C.2.29		
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan Penjualan Angsuran		1.375.031.741	1.377.994.323
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		249.626.424.418	38.234.179.361
Piutang Jangka Panjang Lainnya		3.787.310.550.736	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		3.988.312.006.895	39.612.173.684
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		212.907.765.825	212.609.665.200

Uraian	Catatan	31 Des 2011 (*Audited*)	31 Des 2010 (*Audited*)
Penerusan Pinjaman		46.540.275.969.109	2.070.158.163.656
Aset Tak Berwujud		12.406.618.813.595	9.351.448.050.646
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		37.253.051.374.408	40.987.103.326.394
Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan		19.320.332.310.233	18.459.000.085.715
Dana Penjaminan		75.371.634.076	71.135.792.697
Aset KKKS		150.508.980.296.216	68.224.330.326.991
Aset Eks BPPN		67.543.984.466.405	29.203.047.197.602
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		14.762.445.010.365	-
Aset Lain-lain		105.992.977.283.250	109.579.037.246.507
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya	C.2.30	(19.970.874.008.883)	
Jumlah Aset Lainnya		**438.634.382.921.494**	**278.197.482.029.092**
JUMLAH ASET		**3.023.447.176.100.695**	**2.423.688.352.538.014**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	C.2.31	1.755.574.695.265	1.575.434.547.871
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.32	31.780.634.369.020	31.370.392.714.561
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.33	704.437.258.982	3.547.727.872.825
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.34	106.777.089.696.825	88.286.391.827.798
Utang Biaya Pinjaman	C.2.35	21.924.038.335.465	20.261.543.289.213
Utang Subsidi	C.2.36	29.767.908.989.742	22.161.795.155.886
Utang SBN Jangka Pendek	C.2.37	39.408.181.897.000	29.235.009.035.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.38	8.639.914.082.680	119.116.551.668
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.39	5.687.095.323.943	4.786.549.847.266
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**246.444.874.649.922**	**201.343.960.842.088**
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	C.2.40	1.095.324.545.750.551	987.172.961.936.007
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	C.2.41	11.822.231.724.875	8.389.364.871.001
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	C.2.42	877.330.765.232	367.365.935.506
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.43	5.033.082.825.744	3.095.222.852.622
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		1.103.057.191.066.402	999.024.915.595.136
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.44	571.982.048.619.444	569.983.008.549.466
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.45	25.889.179.304.040	25.726.322.825.757
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		597.871.227.923.484	595.709.331.375.223
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**1.700.928.418.989.886**	**1.594.734.246.970.359**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.947.373.293.639.708**	**1.796.078.207.812.447**
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.46	58.656.722.496.062	52.382.103.135.529
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.47	46.432.649.228.692	46.527.600.199.917
Dana Lancar Lainnya	C.2.48	451.838.601.148	1.540.934.451.110
Cadangan Piutang	C.2.49	84.574.619.543.073	100.141.379.244.383
Cadangan Persediaan	C.2.50	59.214.846.453.160	36.366.060.681.005
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.51	3.810.469.839.678	4.210.269.507.402
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.52	(204.483.878.830.570)	(149.918.772.353.919)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.2.53	(6.321.674.677.095)	(119.116.551.668)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.2.54	1.276.458.004.389	614.122.632.355
Selisih Kurs Bagian Lancar	C.2.55	(2.798.692.210.245)	(8.282.009.832.937)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		**40.813.348.448.286**	**83.462.571.113.177**
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.56	750.030.794.479.804	702.836.007.101.463
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.57	1.567.974.174.587.750	1.184.301.167.405.585
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.58	417.130.365.123.476	246.554.471.882.238
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.59	(1.679.033.615.946.059)	(1.498.908.975.231.842)
Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	C.2.60	(20.841.184.232.370)	(90.635.097.545.054)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		**1.035.260.534.012.601**	**544.147.573.612.390**
EKUITAS DANA NETO		**1.076.073.882.460.887**	**627.610.144.725.567**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**3.023.447.176.100.695**	**2.423.688.352.538.014**

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
(*AUDITED*)

III. LAPORAN ARUS KAS (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan		431.121.712.728.316	354.152.324.675.100
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		277.800.076.679.384	219.538.218.197.355
c. Pajak Bumi dan Bangunan		29.898.164.324.396	28.580.589.978.740
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		(730.151.679)	8.026.429.073.342
e. Cukai		77.010.010.613.795	66.165.922.512.567
f. Pajak Lainnya		3.928.192.148.211	3.371.209.407.180
g. Pajak Perdagangan Internasional		54.121.466.056.958	28.656.900.712.960
Total Penerimaan Perpajakan		873.873.892.399.381	708.491.594.557.244
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam		213.823.349.552.827	168.825.442.320.286
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		28.183.973.126.600	30.096.932.694.265
c. PNBP Lainnya		69.226.130.305.985	59.164.762.520.535
d. Penerimaan BLU		20.103.995.586.771	10.590.842.035.270
Total PNBP		331.337.448.572.188	268.677.979.570.356
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	4.258.217.536.874	3.022.986.560.763
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**1.209.469.558.508.440**	**980.192.560.688.363**
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	175.745.947.140.204	148.072.602.131.332
2. Belanja Barang	D.2.5	124.159.163.392.116	97.587.913.734.089
3. Bunga Utang	D.2.6	93.260.261.464.346	88.381.042.974.663
4. Subsidi	D.2.7	295.358.422.916.324	177.891.975.462.704
5. Belanja Hibah	D.2.8	300.108.798.365	70.008.777.575
6. Bantuan Sosial	D.2.9	71.076.290.233.168	68.595.466.637.272
7. Belanja Lain-Lain	D.2.10	5.464.234.053.592	21.666.884.908.929
8. Bagi Hasil Pajak	D.2.11	41.525.561.096.164	45.815.708.635.828
9. Bagi Hasil Cukai	D.2.12	1.408.448.764.184	1.202.111.025.283
10. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.13	53.974.986.297.954	45.165.743.030.463
11. Dana Alokasi Umum	D.2.14	225.533.712.048.000	203.570.976.808.500
12. Dana Alokasi Khusus	D.2.15	24.802.229.752.980	20.956.311.168.000
13. Dana Otonomi Khusus	D.2.16	10.421.312.993.000	9.099.613.680.000
14. Dana Penyesuaian	D.2.17	53.657.183.069.474	18.918.610.308.811
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**1.176.687.862.019.860**	**946.994.969.283.449**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		**32.781.696.488.577**	**33.197.591.404.914**
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset	D.2.18	134.372.526.547	263.876.638.486
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		134.372.526.547	**263.876.638.486**
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Modal	D.2.19	117.759.087.730.733	80.307.176.396.873
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**117.759.087.730.733**	**80.307.176.396.873**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		**(117.624.715.204.186)**	**(80.043.299.758.387)**

Uraian	Catatan	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.20	249.672.520.403.961	193.449.285.061.684
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.21	33.747.178.723.921	54.794.790.200.206
3. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.22	8.608.845.495.456	57.631.763.320
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**292.028.544.623.338**	**248.301.707.025.210**
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.23	89.889.447.737.085	77.531.619.691.752
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.24	47.322.502.478.271	50.632.531.581.836
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	D.2.25	19.200.357.712.264	19.799.149.000.000
4. Penerusan Pinjaman	D.2.26	4.223.841.471.298	8.786.395.351.008
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**160.636.149.398.918**	**156.749.695.624.596**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)		**131.392.395.224.420**	**91.552.011.400.614**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	D.2.27	1.081.050.588.567	619.814.108.170
2. PFK Prefinancing dan PFK Lainnya (Neto)	D.2.28	-	(34.367.584.001)
3. Kiriman Uang (Neto)	D.2.29	12.817.535.129	2.110.479.145.563
4. Transito (Neto)	D.2.30	219.674.491.857	231.461.078.546
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		**1.313.542.615.553**	**2.927.386.748.278**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		**47.862.919.124.364**	**47.633.689.795.419**
Penggunaan SAL		(40.319.043.049.000)	(17.347.946.818.000)
Penyesuaian Pembukuan		1.287.457.711.323	(1.178.259.859.686)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI		**8.831.333.786.686**	**29.107.483.117.733**
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN, BLU, DAN HIBAH LANGSUNG		**98.985.089.736.159**	**46.062.746.044.414**
Koreksi Saldo Awal		26.188.864.543	20.990.525.740.042
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN, BLU, DAN HIBAH LANGSUNG SETELAH KOREKSI		**99.011.278.600.702**	**67.053.271.784.456**
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, BLU, DAN HIBAH LANGSUNG		**107.842.612.387.387**	**96.160.754.902.189**
Rekening Khusus	C.2.3		2.824.334.833.970
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.4	6.615.552.720.213	8.539.601.162.593
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.5	292.795.937.969	518.919.028.152
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.6	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.7	6.327.755.216.087	8.603.994.085.726
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	D.1	100.924.694.157	53.015.078.502
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	C.2.19	(170.553.016.059)	-
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		**121.261.988.260.868**	**117.332.963.445.378**

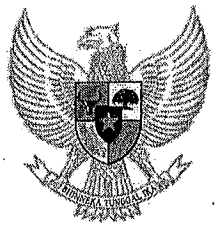

REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(*AUDITED*)

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN *(AUDITED)*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/20011.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Indonesia dan Perekonomian Global

Dengan semakin terkoneksinya perekonomian antar negara dan antar kawasan, kinerja perekonomian nasional dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global. Dalam tahun 2011 perekonomian dunia belum menunjukkan perbaikan, bahkan beberapa negara di kawasan Eropa semakin memburuk kondisinya, sehingga merevisi target pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Belum pulihnya kondisi perekonomian kawasan Eropa ditunjukkan oleh masih tingginya angka pengangguran yang mencapai 10,4 persen pada akhir tahun 2011 dan rasio utang terhadap PDB di beberapa negara Eropa semakin meningkat selama tahun 2011. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi negara-negara maju disesuaikan hanya 2,8 persen, negara-negara berkembang 6,4 persen, dan negara-negara ASEAN 5 dapat tumbuh sebesar 4,8 persen.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan volume perdagangan global mencapai 6,9 persen pada tahun 2011 lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 7,5 persen. Melemahnya permintaan global menyebabkan ekspor negara-negara kawasan Asia mengalami tekanan sehingga ekspor China menurun 13,4 persen dan ekspor Jepang turun 2,7 persen dari tahun sebelumnya.

Tekanan pada perekonomian Eropa dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global juga menyebabkan pergeseran arus modal mengalami penyesuaian. Perbedaan respon kebijakan antar negara-negara maju terkait krisis Eropa mengakibatkan masih derasnya arus modal masuk ke

negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia, terutama dalam bentuk portofolio.

Walaupun terjadi perlambatan ekonomi global di tahun 2011, perekonomian nasional mampu berakselerasi, yang didukung oleh tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar Rupiah yang stabil, dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Pencapaian ini juga didukung oleh kinerja neraca pembayaran yang surplus. Selain didukung oleh perkembangan ekonomi makro yang cukup baik, hal ini tidak lepas dari keberhasilan berbagai langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengamankan pelaksanaan APBN 2011 dengan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat dan memperlancar pelaksanaan belanja negara, maupun mengupayakan pemenuhan sasaran pembiayaan anggaran dengan risiko rendah selama tahun 2011, sehingga realisasi anggaran negara tahun 2011 tetap dapat dijaga pada tingkat yang aman.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011

Pada tahun 2011 perekonomian nasional mampu tumbuh 6,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN seperti Singapura (6,5 persen), Malaysia dan Vietnam masing-masing tumbuh 5,1 dan 5,7 persen, Thailand (0,5 persen), dan Philipina (3,5 persen).

Di sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 didorong oleh meningkatnya investasi, ekspor dan konsumsi. Dalam periode tersebut investasi tumbuh 8,8 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,7 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 3,2 persen, ekspor tumbuh 13,6 persen, dan impor tumbuh 13,3 persen. Membaiknya kinerja ekspor didorong oleh meningkatnya harga komoditas di pasar global, masih kuatnya permintaan eskpor komoditas primer, serta deversifikasi pasar ekspor ke negara *emerging market*. Sementara tingginya pertumbuhan investasi terutama didukung oleh investasi langsung (PMA). Konsumsi masyarakat tetap kuat seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya belanja pemerintah.

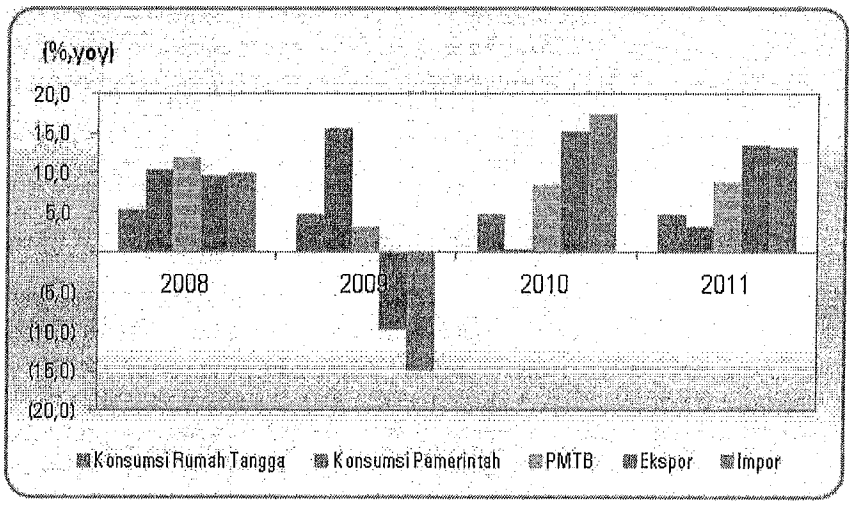

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1: Sumber-Sumber Pertumbuhan PDB 2008-2011

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung keyakinan konsumen yang cukup tinggi seperti tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen oleh BI yang naik menjadi 116,1 pada Oktober 2011. Tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah turut mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2011. Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh peran investasi dan ekspor yang meningkat walaupun tingkat ekspor di triwulan.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011

Pada tahun 2011 perekonomian nasional mampu tumbuh 6,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN seperti Singapura (6,5 persen), Malaysia dan Vietnam masing-masing tumbuh 5,1 dan 5,7 persen, Thailand (0,5 persen), dan Philipina (3,5 persen).

Di sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 didorong oleh meningkatnya investasi, ekspor dan konsumsi. Dalam periode tersebut investasi tumbuh 8,8 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,7 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 3,2 persen, ekspor tumbuh 13,6 persen, dan impor tumbuh 13,3 persen. Membaiknya kinerja ekspor didorong oleh meningkatnya harga komoditas di pasar global, masih kuatnya permintaan eskpor komoditas primer, serta diversifikasi pasar ekspor ke negara *emerging market*. Sementara tingginya pertumbuhan investasi terutama didukung oleh investasi langsung (PMA). Konsumsi masyarakat tetap kuat seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya belanja pemerintah.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung keyakinan konsumen yang cukup tinggi seperti tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen oleh BI yang naik menjadi 116,1 pada Oktober 2011. Tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah turut mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2011. Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh peran investasi dan ekspor yang meningkat walaupun tingkat ekspor di triwulan terakhir menghadapi tantangan akibat penurunan akselerasi perekonomian global. Sementara itu tingkat pertumbuhan impor melambat walaupun masih tetap pada level yang tinggi. Kinerja ekspor didukung oleh pertumbuhan Industri Pengolahan yang menghasilkan komoditas yang diperdagangkan secara internasional juga ditunjang oleh sektor lainnya seperti sektor Pertanian serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Tingkat pertumbuhan di tahun 2011 ini semakin berkualitas yang diindikasikan salah satunya dengan berkurangnya jumlah pengganggguran terbuka menjadi 6,56 persen dari total jumlah penduduk.

Tren pertumbunan ekonomi tahun 2007-2011

Selama periode 2007 – 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sebesar 5,9 persen. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di atas 6 persen, kecuali tahun 2009 yang mengalami perlambatan sebagai dampak dari krisis global tahun 2008-2009. Pada tahun 2007, perekonomian nasional tumbuh sebesar 6,3 persen, kemudian sedikit mengalami penurunan di tahun 2008 menjadi 6,1 persen. Di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5 persen dan di tahun berikutnya kembali meningkat menjadi 6,1 persen dan 6,5 persen di tahun 2011.

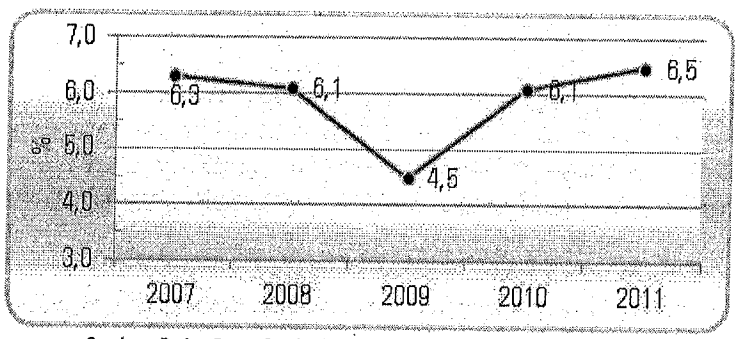

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2007 – 2011

PDB atas harga yang berlaku 2011

Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dinyatakan dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sesuai dengan pendekatan produksi, penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usaha/sektor.

Dari pendekatan pendapatan, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dari pendekatan pengeluaran, PDB adalah gabungan dari jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto.

Walaupun nilai PDB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 senilai Rp2.463,2 triliun, PDB atas harga berlaku mencapai Rp7.427,1 triliun, lebih besar dari target di APBN-P 2011 sebesar Rp7.227,9 triliun. Nilai PDB harga berlaku tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 15,6 persen dibandingkan tahun 2010 yang mencapai nilai sebesar Rp6.422,9 triliun.

PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Kedua jenis PDB ini menjadi indikator yang digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi (PDB atas dasar harga berlaku), dan mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (PDB atas dasar harga konstan).

Apabila dilihat dari trennya, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, nilai PDB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan 87 persen dengan rata-rata pertumbuhan 17,05 persen per tahun. Pada tahun 2007 nilai PDB sebesar Rp3.957,4 triliun kemudian meningkat menjadi Rp4.954,0 triliun pada tahun 2008. Di tahun 2009 PDB tumbuh sebesar Rp5.613,4 triliun, Rp6.422,9 triliun pada tahun 2010, dan di tahun 2011 PDB Indonesia tumbuh menjadi Rp7.427,1 triliun (lihat Grafik 3).

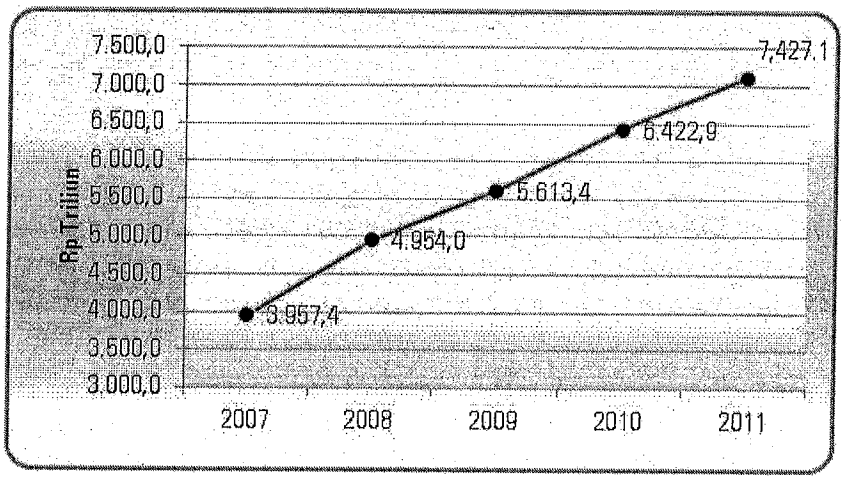

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 3: Tren PDB Harga Berlaku Tahun 2007-2011

Struktur PDB menurut komponen penggunaan

Sementara itu bila dilihat dari struktur PDB menurut penggunaan, konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar, walaupun konstribusinya mengalami penurunan dari 56,7 persen dalam tahun 2010 menjadi 54,6 persen dalam tahun 2011. Peran konsumsi pemerintah relatif turun dari 9,1 persen di tahun 2010 menjadi 9 persen di tahun 2011, begitu juga pembentukan modal tetap bruto/investasi turun dibanding tahun lalu dari sebesar 32,1 persen menjadi 32,0 persen. Komponen ekspor dan impor meningkat dari masing-masing sebesar 24,6 persen dan 22,9 persen menjadi 26,3 persen dan 24,9 persen.

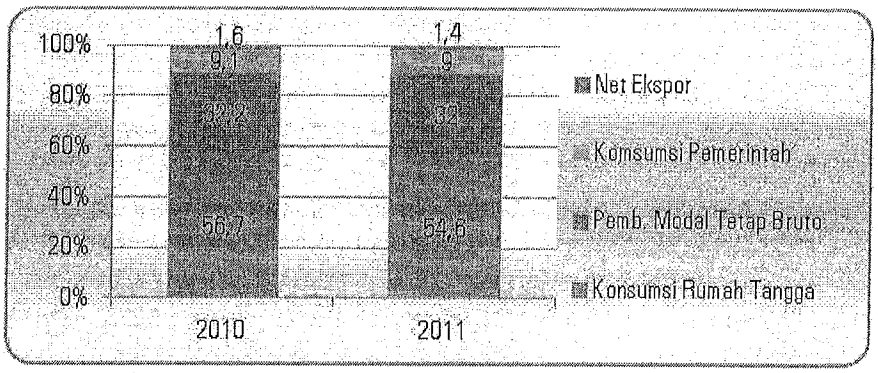

Sumber : Badan Pusat Statistik/BKF

Grafik 4. Struktur PDB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2010 dan 2011

Konsumsi rumah tangga pada 2011 tetap kuat yang didukung oleh meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen, tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah, serta relatif stabilnya rupiah dengan kecenderungan menguat, turut pula mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat di tahun 2011. Selain itu rendahnya inflasi dan menurunnya suku bunga kredit juga mendorong meningkatnya pertumbuhan konsumsi. Salah satu indikator yang mendukung akselerasi pertumbuhan konsumsi antara lain penjualan motor dan mobil yang tetap tinggi yaitu sebesar 11,9 persen dan 16,4 persen. Konsumsi pemerintah dalam tahun 2011 tumbuh 3,2 persen yang didukung oleh meningkatnya penyerapan anggaran, terutama belanja yang telah terikat seperti belanja pegawai dan subsidi.

Laju Pertumbuhan dan Struktur PDB menurut lapangan usaha

Dari sisi produksi, semua sektor mengalami pertumbuhan. Dua sektor yang padat tenaga kerja yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan tumbuh cukup kuat. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (10,7 persen), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (9,2 persen), sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan (6,8 persen), serta sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa masing-masing 6,7 persen. Sektor-sektor lainnya tumbuh antara 1,4 persen sampai dengan 6,2 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh meningkatnya pertumbuhan subsektor alat angkut, subsektor makanan dan minuman, dan subsektor tekstil. Faktor lain yang ikut mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain meningkatnya konsumsi, pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi. Laju pertumbuhan masing-masing sektor dalam membentuk PDB (harga konstan) menurut lapangan usaha terlihat pada Grafik 5.

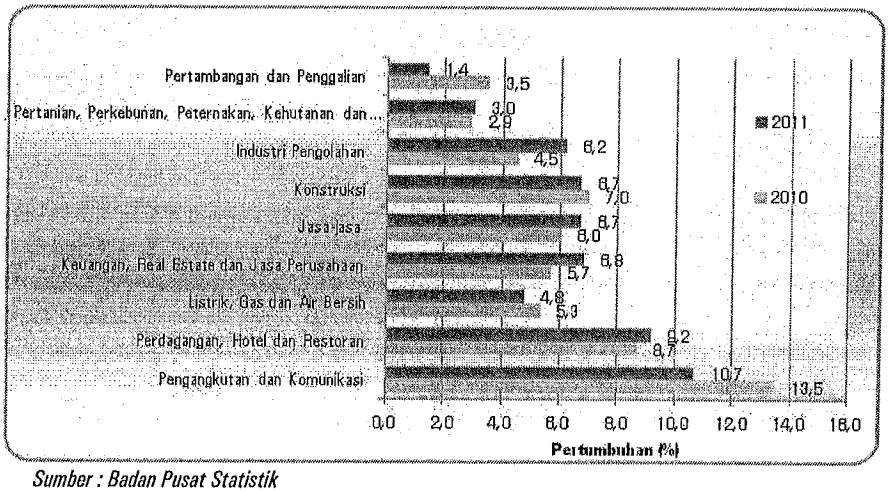

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 5. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011

Struktur pembentukan PDB menurut lapangan usaha, dalam tahun 2011 masih didominasi oleh

sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perikanan, sektor hotel dan restoran, serta sektor pertambangan dan penggalian. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan peranan pada beberapa sektor yaitu peran sektor industri pengolahan turun dari 24,8 persen menjadi 24,3 persen, sektor pertanian turun dari 15,3 persen menjadi 14,7 persen, dan sektor konstruksi turun dari 10,3 persen menjadi 10,2 persen. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan peranannya terhadap pembentukan PDB yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang peranan terhadap pembentukan PDB tidak berubah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa. Rincian kontribusi masing-masing sektor pada perekonomian atau struktur PDB menurut lapangan usaha pada tahun 2010 dan 2011 terlihat pada Grafik 6.

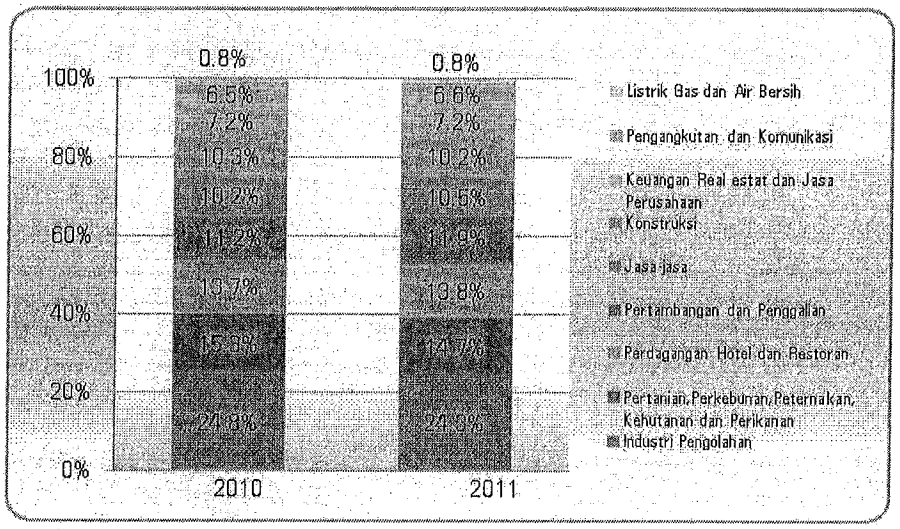

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Perbandingan Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011

PDB per kapita tahun 2011

Kebijakan-kebijakan pemerintah juga ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat sebagaimana tercermin dalam pertumbuhan PDB per kapita. PDB per kapita yang merupakan PDB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk, pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 13,8 persen menjadi Rp30,8 juta atau USD3.542,9, dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2010 sebesar Rp27,0 juta atau USD3.004,9 (lihat Grafik 7)

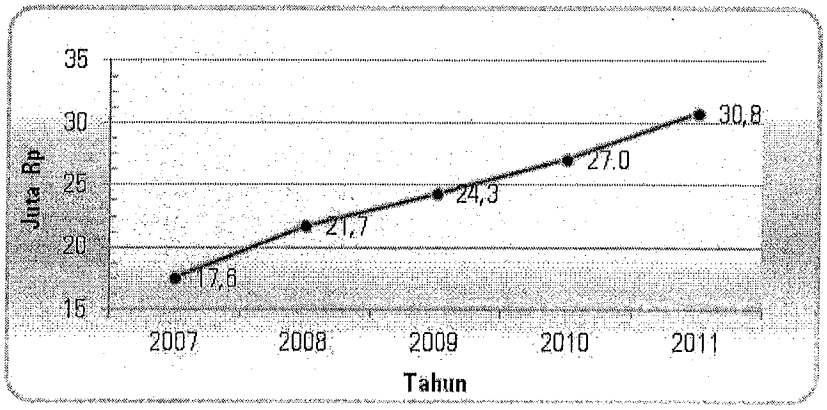

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 7. Perkembangan PDB Per Kapita Tahun 2007 – 2011

Inflasi

Stabilitas ekonomi makro tercermin pada tingkat inflasi yang rendah serta stabilnya nilai tukar rupiah. Dalam tahun 2011, laju inflasi dapat dikendalikan pada level yang rendah yaitu 3,79

persen (yoy), dan berada dibawah sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar 5,7 persen. Selain itu, inflasi dalam tahun 2011 jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Rendahnya inflasi tersebut bersumber dari terjaganya inflasi inti dan inflasi pangan pada level yang rendah, serta minimalnya inflasi *administered prices*. Dalam tahun 2011, inflasi inti mencapai 4,3 persen (yoy) jauh lebih rendah dari inflasi tahun-tahun sebelumnya sebesar 6,5 persen (yoy). Hal ini dikarenakan menguatnya nilai tukar rupiah serta menurunnya ekspektasi inflasi. Sementara rendahnya inflasi pangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi serta stabilisasi harga pangan. Dalam tahun 2011, volume impor bahan pangan khususnya bawang merah, bawang putih, dan kentang meningkat cukup tinggi. Selain itu, kondisi cuaca yang lebih kondusif juga ikut mendorong peningkatan produksi komoditas pangan terutama aneka bumbu-bumbuan seperti cabai dan bawang. Cabai merah yang dalam tahun sebelumnya menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi, dalam tahun 2011 ini harganya relatif terjaga seiring dengan melimpahnya pasokan dari dalam negeri. Terkendalinya inflasi tersebut utamanya didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang semakin baik, yang antara lain dilakukan melalui forum TPI (Tim Pengendalian Inflasi) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).

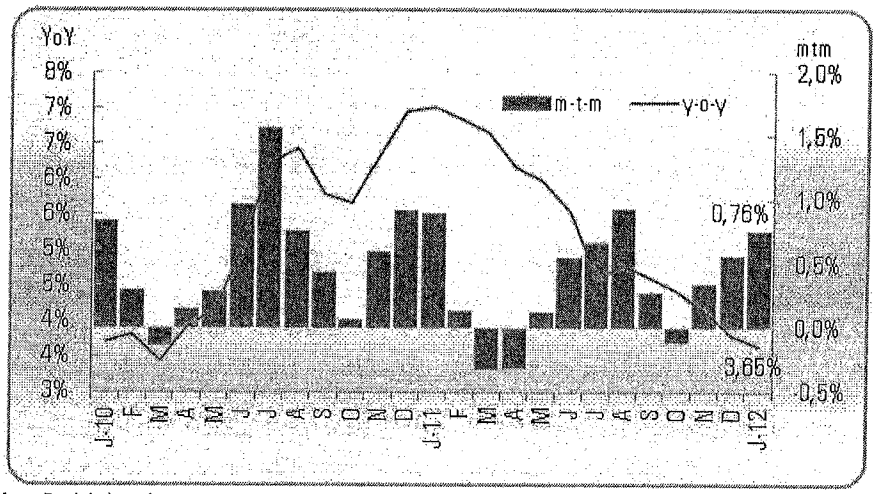

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 8. Laju Inflasi Tahun 2010 dan 2011

Andil inflasi tahun 2011

Sementara itu bila dilihat dari andil/sumbangan inflasi selama tahun 2011 sebesar 3,79 persen, kelompok bahan makanan memberikan andil 0,84 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,78 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,78 persen, kelompok sandang sebesar 0,52 persen, kelompok sandang Rp. 0.18 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,35 persen, serta kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil inflasi sebesar 0,34 persen. Andil inflasi kelompok bahan makanan menurun cukup signifikan dibandingkan andil di tahun 2010 sebesar 3,50 persen.

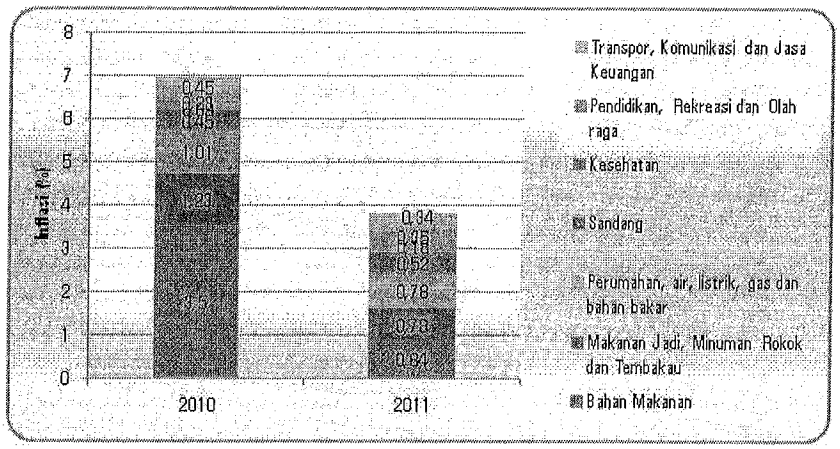

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 9. Andil Inflasi Tahun 2010 dan 2011

Lebih spesifik, jenis barang dan jasa yang berkontribusi utama terhadap inflasi selama tahun 2011 di antaranya adalah harga komoditas beras dan emas perhiasan, sama seperti tahun 2010 serta rokok kretek filter, tarif sewa rumah, tarif angkutan udara, dan ikan segar.

Inflasi di beberapa (66) Kabupaten/ kota tahun 2011

Dari survei yang dilakukan oleh BPS terhadap 66 kabupaten/kota, pada bulan Desember 2011 seluruh kabupaten/kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Kupang sebesar 2,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 138,37 dan terendah terjadi di kota Tanjung Pinang sebesar 0,02 persen dengan IHK 129,86. Dari 66 kabupaten/kota basis perhitungan inflasi, 64 kabupaten/kota mencatat inflasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya bahkan beberapa daerah di Jawa, Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia mengalami penurunan laju inflasi yang lebih dalam dibandingkan nasional. Faktor koreksi harga yang terjadi pada komoditas bahan makanan berdampak pada meredanya tekanan kenaikan inflasi. Dukungan dari masuknya pasokan pangan dari sumber lainnya yang cenderung meningkat turut mempengaruhi terjaganya pasokan bahan makanan. Selain itu, peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) turut menjaga kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan terutama bahan pangan pokok dan pengendalian inflasi secara keseluruhan.

Boks 1. Penerbitan SPN 3 bulan

SUN seri *variable rate* (VR) adalah salah satu jenis Surat Berharga Negara (SBN) yang memiliki tingkat bunga mengambang yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 yang merupakan bagian program rekapitalisasi perbankan. Sesuai dengan ketentuan dan persyaratannya, tingkat bunga yang digunakan mengacu pada hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan.

Namun demikian, kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan derasnya modal asing yang masuk dalam pasar keuangan di Indonesia dan untuk melakukan mitigasi risiko volatilitas nilai tukar dan tingkat bunga, antara lain: (1) secara bertahap BI tidak lagi melakukan lelang SBI 1, 3 dan 6 bulan secara regular (penonaktifan) dan fokus pada penerbitan SBI 9 bulan; (2) penerapan *one-month holding period* atas SBI, yang dilanjutkan dengan *six-month holding period* atas SBI; dan (3) memperkenalkan instrumen moneter jangka pendek yang tidak dapat diperdagangkan berupa *Term Deposit* (TD) dengan tenor tertentu, khusus untuk bank domestik. Akibat penerapan kebijakan tersebut, lelang SBI 3 bulan dihentikan sejak lelang terakhir tanggal 13 Oktober 2010 dengan tingkat bunga SBI 3 bulan sebesar 6,37 persen. Oleh karena itu diperlukan tingkat bunga acuan baru untuk pembayaran kupon SUN seri VR sebagai pengganti SBI 3 bulan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan SUN jenis VR sebagai berikut:

1. Apabila selama 6 (enam) bulan kalender berturut-turut tidak terdapat suatu hasil lelang atas Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu 3 bulan, maka penentuan tingkat bunga obligasi didasarkan pada hasil lelang surat utang lain dari Pemerintah dengan jangka waktu 3 bulan

(catatan: SPN 3 bulan) dimana sistem pelelangannya setara dengan lelang Sertifikat Bank Indonesia dimaksud.

2. Apabila pelelangan surat utang lainnya dari Pemerintah tersebut tidak dilakukan maka hasil pelelangan Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu 3 bulan yang terakhir digunakan untuk menghitung tingkat bunga obligasi dimaksud.
3. Dasar perhitungan tingkat bunga obligasi tersebut akan diumumkan melalui media elektronik dan media cetak selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum diberlakukannya tingkat bunga obligasi pengganti.

Setelah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, pelaku pasar, serta investor SBN, Pemerintah pada akhirnya menetapkan penggunaan SPN 3 bulan sebagai acuan baru pembayaran bunga SUN jenis VR. Adapun pertimbangan penggunaan SPN 3 bulan adalah:

1. Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan SUN jenis VR.
2. Langkah awal untuk mengembangkan pasar SPN jangka pendek (3 bulan).
3. Suku bunga yang terbentuk transparan, akuntabel dan kompetitif.
4. Dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN.
5. Dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti acuan tingkat bunga dalam asumsi makro APBN.

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2012

Kinerja SBN

Meskipun perekonomian global masih diliputi ketidakpastian, namun pasar SBN tetap tumbuh positif. Dengan meredanya sentimen global, mendorong pelaku asing menambah eksposurnya di pasar SBN. Aksi beli asing terutama terjadi pada instrumen SBN jangka pendek dan menegah. Selain didukung oleh faktor makro dan risiko fiskal yang terkendali, minat beli asing juga terkait dengan imbal hasil yang menarik, baik secara nominal maupun riil serta pencapaian *investment grade*. Secara keseluruhan, pergerakan imbal hasil SBN cenderung turun untuk keseluruhan tenor yang mencapai 146 bps menjadi 5,88 persen jika dibandingkan dengan akhir tahun 2010 sebesar 7,3 persen. Penurunan BI rate sebesar 25 bps pada saat gejolak eksternal mulai mereda turut mendorong penurunan imbal hasil SBN. Secara rata-rata bulanan, imbal hasil SBN selama tahun 2011 untuk tenor jangka pendek, menengah, dan panjang masing-masing turun sebesar 37 bps, 59 bps dan 56 bps. Menurunnya *yield* tersebut berdampak pada kewajiban Pemerintah untuk membayar biaya bunga menjadi lebih rendah dalam penerbitan surat utang yang baru, sehingga mengurangi beban pembayaran bunga pada APBN.

Kinerja ekspor dan impor

Walaupun pada akhir tahun 2011 kinerja ekspor mengalami perlambatan, namun secara keseluruhan ekspor tumbuh 29,0 persen. Peningkatan ekspor ini didukung oleh meningkatnya harga dan permintaan barang primer serta diversifikasi negara tujuan ekspor ke *emerging market*. Komoditi ekspor yang meningkat signifikan antara lain bahan bakar mineral (16,9 persen), lemak dan minyak hewan/nabati (13,4 persen), karet dan barang dari karet (8,9 persen), mesin/peralatan listrik (6,9 persen), dan bijih, kerak, dan abu logam (4,5 persen). Sementara itu, berdasarkan pangsanya ekspor terbesar ditujukan ke China (13,3 persen), Jepang (11,3 persen), Amerika Serikat (9,7 persen), India (8,2 persen), dan Singapura (6,9 persen).

Nilai impor tahun 2011 meningkat sebesar 30,69 persen bila dibandingkan dengan impor pada periode yang sama tahun 2010. Komoditi impor yang mengalami peningkatan cukup sinifikan antara lain impor mesin dan peralatan mekanik, mesin dan peralatan listrik, besi dan baja, kendaraan bermotor dan bagiannya, plastik dan barang dari plastik, serta bahan kimia organik. Peningkatan impor komoditi-komoditi tersebut sejalan dengan meningkatnya kegiatan dalam negeri dan ekspor. Dilihat dari pangsanya, selama tahun 2011 impor didominasi oleh komoditi-komoditi yang berasal dari China sebesar 18,69 persen, diikuti oleh Jepang sebesar 14,14 persen, Amerika Serikat sebesar 7,81 persen, Singapura sebesar 7,64 persen, Thailand sebesar 7,51 persen, Korea Selatan 5,44 persen, dan Malaysia sebesar 4,22 persen.

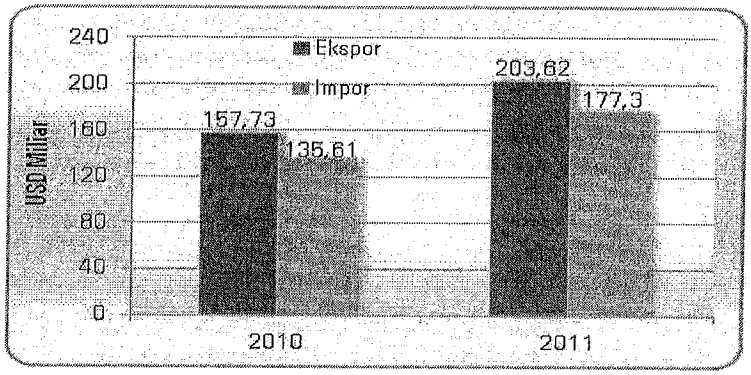

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 10. Perbandingan Ekspor Impor Tahun 2010 dan 2011

Nilai tukar rupiah

Nilai tukar Rupiah pada semester I 2011 mengalami apresiasi terkait dengan melimpahnya ekses likuiditas global dan masih menariknya imbal rupiah. Namun pada semester II, apresiasi rupiah tersebut tertahan oleh meningkatnya kebutuhan valas di dalam negeri dan imbas meningkatnya risiko global sebagai akumulasi oleh berlarutnya krisis utang di Eropa, dan melemahnya perekonomian Amerika Serikat. Selama tahun 2011, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp 8.742/USD, atau menguat 3,84 persen dibandingkan dengan rata-rata tahun 2010 sebesar Rp9.078/USD. Untuk menjaga keseimbangan pasar domestik, Bank Indonesia terus memonitor perkembangan nilai tukar Rupiah dan memastikan kecukupan likuiditas Rupiah dan valas. Membaiknya fundamental ekonomi serta meningkatnya kepercayaan investor global telah memberikan sentimen positif terhadap penguatan rupiah dan inflasi dalam beberapa tahun terakhir.

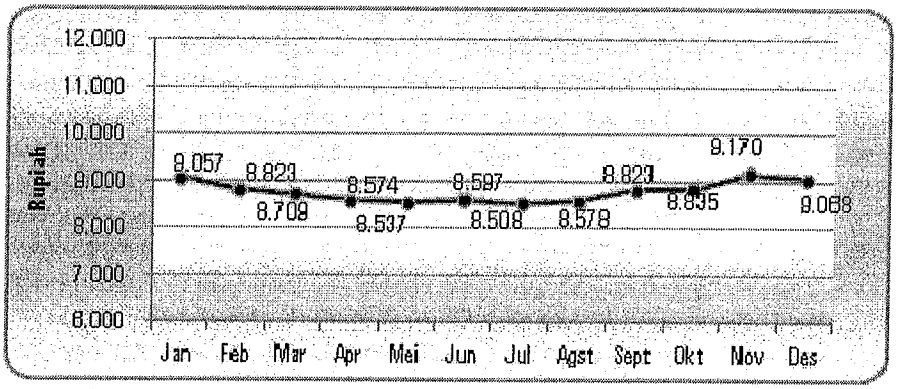

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 11. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Tahun 2011

Boks 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Pasal 23B Amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23B Undang Undang Dasar 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri walaupun pengaturan mata uang pernah diatur dalam UUDS tahun 1950. Terkait Mata Uang, diatur tersebar dalam berbagai aturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 yang mengatur Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Negara dengan sistem bank sentral yang independen, penandatangan mata uang umumnya dilakukan oleh bank sentral bersama dengan pemerintah. Indonesia menganut sistem perekonomian dimana Bank Sentral bersifat independen, sehingga penandatanganan mata uang dilakukan bersama antara Pemerintah dengan Bank Sentral.. Kemudian penyebutan Republik Indonesia dan penggunaan lambang Negara Indonesia pada Mata Uang, sepatutnya Pemerintah sebagai wakil negara turut menandatangani Mata Uang.

RUU tentang Mata Uang disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 3 Mei 2011. UU Nomor 7 Tentang Mata Uang mengatur bahwa BI perlu berkoordinasi dengan Pemerintah dalam perencanaan, pencetakan dan pemusnahan Rupiah. Namun aturan pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan Rupiah akan tetap menjadi otoritas penuh Bank Indonesia, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan di bidang moneter. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan Rupiah, BPK melakukan audit secara periodik paling tidak satu kali dalam satu tahun. Keberadaan UU ini tidak akan memangkas kewajiban utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, misalnya terkait pelemahan atau penguatan. UU tentang Mata Uang juga mengatur bahwa pemberantasan Rupiah palsu akan dilakukan oleh sebuah badan tersendiri. Badan tersebut terdiri atas unsur Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Pengaturan macam dan harga mata uang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh Negara. Penggunaan Rupiah dalam UU ini pada dasarnya bertujuan untuk mendorong dan mengajak orang/badan menggunakan Rupiah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan martabat bangsa di tingkat nasional maupun internasional.

Sumber: NK RAPBN 2012

Boks 3. *Tax Holiday* 2011

Kebijakan pemerintah mengenai pemberian *tax holiday* yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 telah ditunggu oleh investor potensial. Fasilitas ini terbatas untuk investasi industri-industri 'pionir' yang meliputi industri metal dasar, industri refinerasi minyak dan turunannya, industri mesin, industri sumber daya yang terbaharukan, serta industri peralatan telekomunikasi.

Kebijakan ini ditujukan untuk perusahaan yang telah didirikan setelah tanggal 15 Agustus 2010 (satu tahun sebelum kebijakan ini dikeluarkan) dan total investasi harus melebihi Rp1 triliun dan disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Minimum 10 persen dari investasi ini harus didepositokan di bank di Indonesia dan tidak ditarik sampai produksi secara komersial dimulai.

Adapun fasilitas yag diberikan adalah:

1. Dikecualikan dari pajak penghasilan untuk perusahaan antara 5 sampai dengan 10 tahun sejak produksi secara komersial dimulai.
2. Tambahan insentive akan diberikan selama 2 tahun setelah berakhirnya masa pertama pemberian *tax holiday* dalam bentuk pengurangan 50% pajak penghasilan untuk perusahaan.

Ruang lingkup dari insentif ini dapat diperluas untuk industri lain dan waktu untuk insentif ini masih dapat diperpanjang.

Keadaan domestik dan laju investasi

Kinerja investasi selama tahun 2011 dipertahankan dengan iklim investasi yang kondusif, kuatnya fundamental perekonomian dan optimisme pelaku usaha. Pencapaian tersebut juga didukung oleh makin baiknya pelayanan investasi di daerah dengan semakin banyaknya Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang telah diimplementasikan oleh berbagai pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta koordinasi pusat dan daerah yang semakin baik. Kemajuan implementasi program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) secara umum memberikan optimisme terhadap kinerja perekonomian domestik ke depan. Implementasi proyek-proyek besar juga memberikan stimulus bagi perekonomian daerah di tengah risiko rambatan dari tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Berbagai proyek infrastruktur, khususnya terkait transportasi, yang telah diinisiasi pada tahun 2011 menunjukan kuatnya komitmen terhadap pembenahan konektivitas.

Peningkatan realisasi investasi tersebut disamping peningkatan penanaman modal dalam negeri dan pemerataan sebaran wilayah koridor ekonomi juga terdapat hilirisasi atau pengembangan nilai tambah dari kegiatan investasi seperti sektor pertanian dan pertambangan.

Di kuartal keempat tahun 2011, Indonesia mendapatkan *Investment grade* dengan rating BBB- dari *Fitch Rating* yang naik satu peringkat dari sebelumnya BB+, lebih cepat dari ekspektasi. Di awal tahun 2012, lembaga rating lainnya, yaitu *Moody's rating*, menaikan rating Indonesia dari BA1 menjadi BAA3. Kenaikan *Investment grade* ini membuat risiko investasi berkurang dan semakin memikat investor asing ke pasar Indonesia. Pencapaian tersebut menunjukan keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain didasarkan pada kinerja perekonomian dan likuiditas eksternal yang lebih kuat, hal ini didukung oleh rasio utang publik yang rendah dengan tren yang terus menurun serta kebijakan makro yang berhati-hati. Dengan peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi *Investment Grade* akan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia dalam menghadapi gejolak perekonomian global.

Selain itu, kinerja investasi didukung juga oleh sumber pembiayaan. Di tahun 2011, kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jenis kredit lainnya. Sebagai sumber pembiayaan investasi, masih didukung oleh modal sendiri dan penyisihan laba yang memberikan konstribusi sebesar 65,2 persen. Pertumbuhan investasi masih didominasi oleh investasi bangunan, investasi mesin, dan investasi alat angkut.

Indeks Harga Saham Gabungan

Fundamental makro ekonomi yang kuat berdampak positif terhadap perkembangan pasar saham domestik dan tercapainya *investment grade* juga menciptakan optimisme di pasar saham. Arus modal asing yang masuk ke pasar finansial baik ke pasar saham maupun pasar obligasi terus mengalami peningkatan secara persisten. Kinerja pasar saham domestik mampu tumbuh positif meskipun pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) diwarnai oleh beberapa gejolak akibat dari peningkatan risiko eksternal. Kinerja positif IHSG ini terutama selain didukung oleh kondisi makro ekonomi yang kondusif juga didorong oleh kinerja emiten yang stabil serta kebijakan perekonomian yang akomodatif. IHSG pada akhir tahun 2011 ditutup pada level 3.822, meningkat 3,2 persen dari posisi tahun sebelumnya sebesar 3.704. Pencapaian tersebut menempatkan IHSG pada level yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja indeks di negera kawasan setelah Filipina (4,1%).

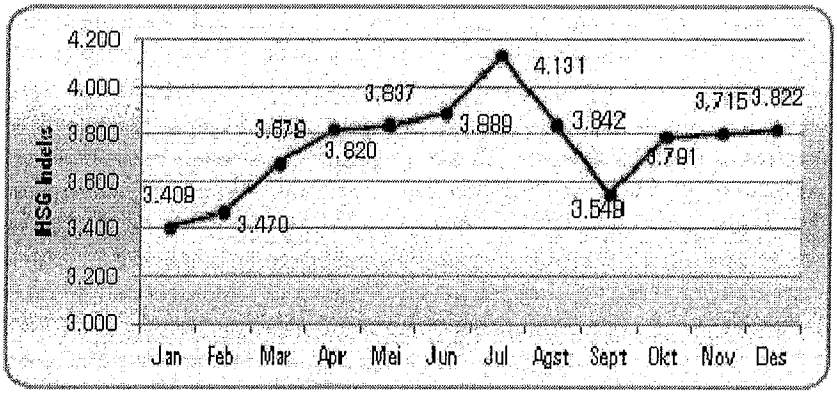

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 12. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2011

Kinerja perbankan

Meskipun terjadi riak di pasar global, stabilitas sistem perbankan tetap terjaga dan industri perbankan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Hal ini tercermin dari tingginya rasio kecukupan modal *(CAR/Capital Adequacy Ratio)* perbankan yang mencapai 16,1 persen pada Desember 2011 dengan rata-rata sebesar 17,25 persen. Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) per Desember 2011 mencapai 80,0 persen dengan rata-rata sebesar 80,77 persen, angka ini lebih baik apabila dibandingkan pencapaian tahun 2010 sebesar 77,16 persen. Kemudian untuk rasio kredit bermasalah *(NPL/Non Performing Loan)* terkendali di bawah 5,0 persen yakni berada di kisaran 3,0 persen sampai dengan 3,2 persen dan pada Desember 2011 berada pada level 2,6 persen dengan rata-rata 3,1 persen. Angka ini lebih baik apabila dibandingkan dengan NPL tahun 2010 yang berada di kisaran 2,9 persen sampai dengan 4,0 persen dan pada Desember 2010 berada pada level 2,9 persen dengan rata-rata 3,51 persen. Sementara itu, intermediasi perbankan juga semakin membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir Desember 2011 angka pertumbuhan kredit berada pada level 24,5 persen (yoy), lebih besar dari pertumbuhan tahun sebelumnya (22,8 persen). Sampai dengan Desember 2011, kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 33,2% (yoy), 21,4% (yoy), dan 24,1 % (yoy). Meningkatnya kredit perbankan ini sejalan dengan menurunnya suku bunga kredit modal kerja (KMK) turun menjadi 12,16 persen, kredit investasi (KI) turun menjadi 12,04 persen, dan kredit konsumsi turun menjadi 14,15 persen.

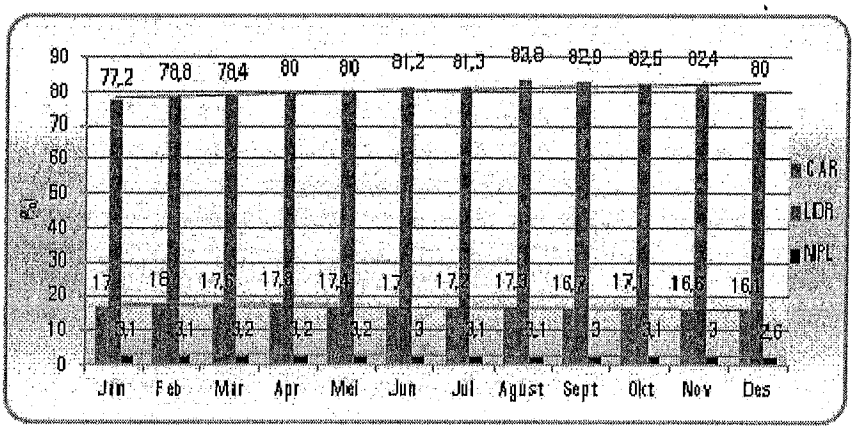

Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 13. Tren CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2011

Neraca Pembayaran Indonesia

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) selama tahun 2011 masih mencatat surplus yang cukup besar meski menghadapi tekanan pada semester kedua. Tekanan tersebut terutama terjadi pada transaksi modal dan finansial seiring dengan masih terjadinya ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit di akhir triwulan ketiga yang lebih banyak disebabkan oleh imbas negatif dari pasar utang di Eropa yang

memicu sebagian investor asing keluar dari pasar saham dan surat utang negara. Peningkatan volume impor di triwulan terakhir 2011 menambah tekanan terhadap neraca. Akan tetapi kenaikan peringkat Indonesia menjadi *investment grade* dan prospek ekonomi Indonesia yang cukup kuat, turut menahan keluarnya dana asing jangka pendek dan masih meningkatnya aliran FDI (*Foreign Direct Investment*) di triwulan terakhir 2011. Di sisi lain, minat investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi langsung dan pemberian kredit kepada sektor swasta masih tetap tinggi. Level arus masuk modal langsung yang cukup tinggi mampu menahan laju penurunan kinerja transaksi modal dan finansial menjadi tidak terlalu dalam.

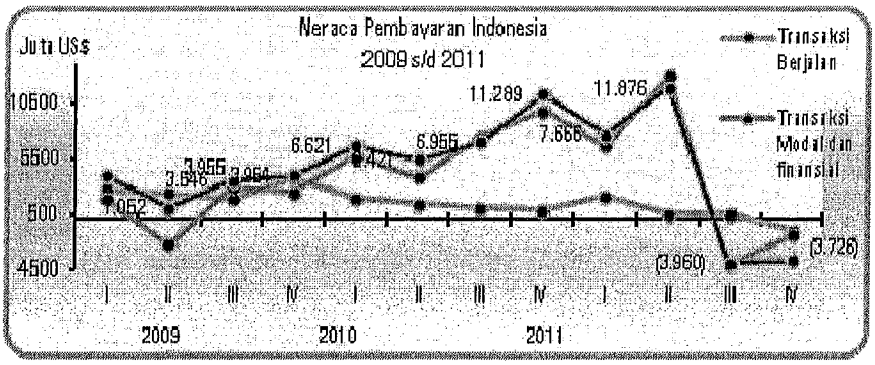

Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 14. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2009-2011

Cadangan devisa di akhir tahun setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah

Kinerja perekonomian yang cukup kuat telah menjadi salah satu pendorong kepercayaan investor asing dan derasnya aliran dana internasional ke pasar domestik. Derasnya arus modal asing masuk ke Indonesia baik investasi portofolio maupun FDI, telah mampu meningkatkan posisi cadangan devisa Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2011, cadangan devisa mencapai USD110,1 miliar atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah. Cadangan devisa ini secara nominal naik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar USD96,2 miliar walaupun menurun dari nominal cadangan devisa pada akhir semester pertama 2011 sebesar USD119,66 miliar. Cadangan devisa yang dimiliki tersebut sebagian besar berbentuk surat-surat berharga *(securities) dan* sisanya ditempatkan dalam bentuk *currency and deposits, monetary gold* dan *special drawing rights.*

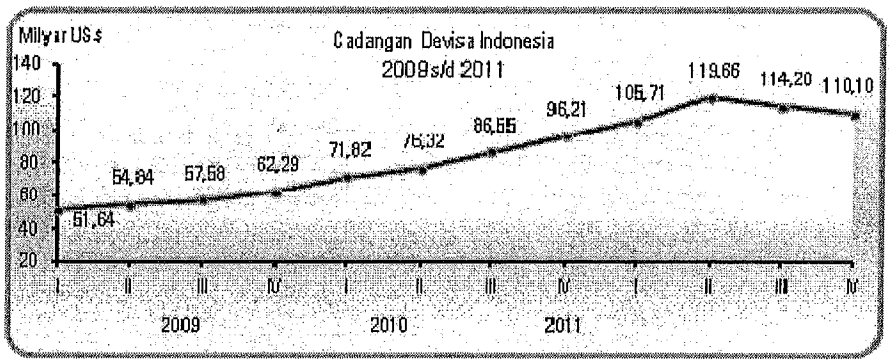

Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 15. Cadangan Devisa Triwulanan 2009-2011

Lifting minyak

Meskipun produksi minyak meningkat setelah selesainya perbaikan beberapa sumur produksi yang sebelumnya mengalami gangguan seperti pada ladang minyak Belisa – Conoco Philips, West Madura – Pertamina EP, dan Blok Mahakam, realisasi lifting minyak mentah Indonesia dalam tahun 2011 sebesar 898 ribu barel per hari, lebih rendah dari target APBN-P 2011 sebesar 945 ribu barel per hari dan juga lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 954 ribu barel per hari. Penyebab utama tidak tercapainya target lifting dikarenakan antara lain karena penghentian produksi secara tidak terduga (*unplanned shutdown*), penurunan kinerja sumur secara alamiah, serta belum beroperasi sepenuhnya blok migas Cepu seperti yang diharapkan.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak internasional pada awal tahun 2011 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meiningkat jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2010. [2]Realisasi harga minyak mentah Indonesia dalam tahun 2011 rata-rata mencapai USD111,5/barel, lebih tinggi dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar USD95,0/barel dan rata-rata harga minyak mentah Indonesia tahun 2010 yang sebesar USD79,4 per barel. Harga rata-rata ICP di bulan April 2011 mencapai angka tertinggi yaitu USD123,36/barel dan terendah di bulan Januari 2011 sebesar USD97,09/barel. Walaupun lifting minyak tidak dapat tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, peningkatan ICP ini mendukung penerimaan pajak penghasilan migas di tahun 2011.

Rasio utang terhadap PDB

Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2011 sebesar 25,4 persen. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 26 persen dan tahun 2009 sebesar 28 persen. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang turut menopang kesinambungan fiskal.

Tema RKP 2011 dan percepatan prioritas pembangunan nasional

APBN 2011 yang disusun sepenuhnya berdasarkan RPJM 2010-2014 dan RKP 2011 menjadi lebih bermakna dikarenakan melanjutkan pelaksanaan reformasi gelombang kedua seiring dengan masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

RKP 2011 disusun dengan tujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang, dengan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, peningkatan daya saing perekonomian, serta visi misi, agenda, dan prioritas pembangunan. Berkaitan dengan itu, RKP 2011 menetapkan tema "Percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan didukung oleh pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah".

Terkait tema dimaksud, RKP 2011 menetapkan 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan sebagai landasan operasional yaitu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintah yang baik, dan gender. Sejalan dengan itu ditetapkan juga sebelas prioritas pembangunan nasional yang meliputi (1) reformasi birokrasi dan tata kelola, (2) pendidikan, (3) kesehatan dan kependudukan, (4) penanggulangan kemiskinan, (5) ketahanan pangan, (6) infrastruktur, (7) iklim investasi dan iklim usaha, (8) energi, (9) lingkungan hidup, (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik, serta (11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2011 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dengan tetap fokus kepada tiga sasaran utama yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas *(pro growth)*, menciptakan dan memperluas lapangan kerja *(pro job)*, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin *(pro poor)*. Tiga pilar pembangunan tersebut menjadi strategi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang mampu memacu pertumbuhan sektor riil sekaligus menopang pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan upaya untuk mencapai keseimbangan fiskal ditempuh melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja negara, pengelolaan defisit anggaran melalui

pembiayaan yang *manageable*, serta penurunan rasio utang secara bertahap.

Beberapa poin penting dari strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi 2011 dilakukan melalui: (1) peningkatan daya tarik investasi, (2) penguatan daya saing ekspor, (3) revitalisasi industri manufaktur (4) revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, (5) peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, dan (6) peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif. [7] Selain dari itu Pemerintah menyusun Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan harapan akan menjaga sektor riil tetap tumbuh.

Boks 4. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Pemerintah bertekad mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan *"Not Business as Usual"*, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang kongkrit dan terukur. MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan adanya MP3EI, diharapkan Indonesia mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan, terutama mendorong nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek.

MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. MP3EI juga dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) karena merupakan komitmen nasional yang berkenaan dengan perubahan iklim global.

MP3EI menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam serial diskusi dan dialog yang sifatnya interaktif dan partisipatif. Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, MP3EI mengembangkan tiga strategi utama yaitu strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, strategi memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara local dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*) serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Terkait penguatan konektivitas nasional, terdapat tiga prinsip, Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui *inter-moda supplay chain system* yang menghubungkan *hinterland* dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Konektivitas nasional yang lemah bukan hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga akan melemahkan daya saing, yang pada akhirnya menyebabkan penanggulangan kemiskinan berjalan relatif lambat. Penguatan konektivitas nasional diselenggarakan sejalan dengan

pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada, maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Sehingga kedepannya di setiap wilayah akan dikembangkan produk yang menjadi unggulan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, sebanyak 94 proyek kegiatan ekonomi utama dan infrastuktur telah diground breaking dengan nilai Rp. 490,5 triliun dan 22 peraturan yang sudah diperbaiki. Implementasi MP3EI direncanakan untuk dilaksanakan di dalam tiga fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:

Fase 1 (2011 – 2015), kegiatan difokuskan untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI. Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada pelaksanaan berbagai rencana aksi yang harus diselesaikan hingga 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa inisiatif strategik dapat terlaksana serta menjadi dasar bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada fase-fase berikutnya.

Fase 2 (2016-2020), kegiatan akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah.

Fase 3 (2021-2025), kegiatan MP3EI lebih difokuskan untuk pemantapan daya saing industri dalam rangka memenangkan persaingan global serta penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Bappenas

RKP, Kemiskinan dan Pengangguran

Ketiga pilar pembangunan ini (*pro growth, pro job* dan *pro poor*) merupakan pendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan banyak kesempatan kerja sehingga makin banyak keluarga Indonesia yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan keluar dari kemiskinan. Di tahun 2011 Pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi perekonomian melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan program-program perbaikan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa untuk tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 29,89 juta orang (12,36 persen dari total penduduk). Angka ini menurun dibandingkan dengan angka di tahun 2010 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 31,02 juta orang (13,33 persen dari total penduduk). Penurunan ini didukung oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin di desa dari 19,93 juta di tahun 2010 menjadi 18,97 juta di tahun 2011. Hal ini menunjukan berhasilnya program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara bertahap, terutama di pedesaan. Penurunan penduduk miskin di pedesaan tersebut berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat pedesaan sebagaimana terlihat dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Indeks NTP menunjukkan daya tukar dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP meningkat dari 102,75 pada tahun 2010 menjadi 105,75 pada Desember 2011.

Dalam hal program pengurangan pengangguran, prosentase tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,14 persen (8,32 juta orang) di periode Agustus 2010 menjadi 6,56 persen (7,70 juta orang) pada periode yang sama di 2011. Tingkat pengangguran ini jauh berkurang dari presentase tingkat pengangguran terbuka di tahun 2007 (9,11 persen).

KOMPOSISI REALISASI APBN TAHUN ANGGARAN 2011

Realisasi konsumsi pemerintah di tahun 2011 tercapai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sampai dengan akhir Desember 2011, belanja pemerintah mencapai 98,05 persen, lebih tinggi dari penyerapan di tahun 2010 sebesar 92,5 persen. Belanja mengikat seperti belanja

pegawai, subsidi, dan pembayaran bunga tetap memperlihatkan daya serap yang tinggi. Di tahun 2011, beban fiskal dalam bentuk subsidi melebihi pagu anggaran, hal ini disebabkan oleh peningkatan harga ICP dan peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi akibat belum diterapkannya pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi. Secara nominal, total realisasi belanja pemerintah mencapai Rp1.295 triliun, lebih tinggi 24,26 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp1.042,1 triliun.

Sedangkan untuk defisit angaran, yang dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp150,8 triliun (2,09 persen terhadap PDB), realisasinya mencapai Rp84,40 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Lebih rendahnya realisasi defisit anggaran dalam pelaksanaan APBN-P 2011 tersebut terutama berkaitan dengan terlampauinya target pendapatan negara dan hibah, dan realisasi belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pagunya.

1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah

Dalam tahun 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.210,60 triliun atau 103,48 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,91 triliun. Jumlah ini berarti mengalami kenaikan Rp215,3 triliun (21.64 persen) dari realisasi 2010 sebesar Rp995,27 triliun.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2007-2011) pendapatan negara dan hibah cenderung mengalami peningkatan (lihat tabel 1). Kecuali tahun 2009 yang mengalami perlambatan, peningkatan tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi yang baik selama 5 tahun terakhir dan didukung oleh pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,7 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 38,68 persen sebelum mengalami penurunan 13,53 persen di tahun berikutnya.

Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2007 – 2011
(triliun Rupiah)

Uraian	2007		2008		2009		2010		2011	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah	**694,08**	**707,81**	**894,99**	**981,60**	**871,00**	**848,76**	**992,40**	**995,27**	**1.169,91**	**1.210,60**
1. Penerimaan Perpajakan	492,01	490,99	609,23	658,70	651,95	619,92	743,33	723,31	878,68	873,87
a. Pajak Dalam Negeri	474,55	470,05	580,25	622,36	631,93	601,25	720,76	694,39	831,74	819,75
b. Pajak Perdagangan Internasional	17,46	20,94	28,98	36,34	20,02	18,67	22,56	28,91	46,94	54,12
2. PNBP	198,25	215,12	282,81	320,60	218,04	227,17	247,18	268,94	286,56	331,47
a. Penerimaan SDA	115,05	132,89	192,79	224,46	138,65	138,96	164,73	168,83	191,98	213,82
b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	21,80	23,22	31,24	29,09	28,61	26,05	29,50	30,10	28,84	28,18
c. PNBP Lainnya	47,71	42,86	58,78	63,32	44,88	53,80	43,46	59,43	50,34	69,36
d. Pendapatan BLU		2,13		3,73	5,89	8,37	9,49	10,59	15,42	20,10
3. Hibah	3,82	1,70	2,95	2,30	1,01	1,67	1,90	3,02	4,66	5,25

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Peningkatan realisasi pendapatan negara terutama didorong oleh dipertahankannya pertumbuhan ekonomi nasional serta didukung oleh pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan perpajakan dalam negeri, perpajakan perdagangan internasional dan penerimaan sumber daya alam sebagai penyumbang pendapatan terbesar.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011

Di tahun 2011 perpajakan tetap menunjukan sebagai kontributor utama realisasi pendapatan negara dan hibah. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp873,87 triliun (99,45 persen dari

sasaran APBN-P 2011 sebesar Rp878,69 triliun), atau naik sebesar Rp150,6 triliun (20,82 persen) dari realisasi 2010 sebesar Rp723,3 triliun.

Membaiknya kondisi perekonomian domestik yang didukung dengan penerapan beberapa kebijakan perpajakan serta kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) berdampak pada meningkatnya tingkat penerimaan negara. Dari sektor perpajakan semua komponen penerimaan mencatat perbaikan. PPh dan PPN mengalami peningkatan kinerja sejalan dengan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini didukung juga oleh penggalian potensi perpajakan baik melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan juga terjadi pada pajak perdagangan internasional yaitu bea masuk dan bea keluar seiring dengan kenaikan realisasi impor dan penyesuaian tarif bea masuk. Selain itu, meningkatnya rata-rata harga minyak mentah dari USD79,4 per barel pada tahun 2010 menjadi USD111,5 per barel pada tahun 2011 mendorong peningkatan pendapatan pajak penghasilan migas.

Kebijakan umum di bidang perpajakan

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pertumbuhan penerimaan perpajakan juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan perpajakan secara konsisten. Secara umum, kebijakan perpajakan ditujukan untuk optimalisasi penerimaan melalui upaya perbaikan sistem dan administrasi perpajakan, termasuk di dalamnya kepabeanan dan cukai. Upaya perbaikan sistem dan administrasi perpajakan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan: (1) reformasi di bidang administrasi; (2) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan; dan (3) reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan di tahun 2011, Pemerintah melanjutkan beberapa kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain: (a) penggalian potensi perpajakan, termasuk Sensus Pajak Nasional (SPN); (b) peningkatan kualitas pemeriksaan pajak; (c) penyempurnaan mekanisme atas keberatan dan banding dalam proses pengadilan pajak; (d) peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; (e) perbaikan sistem informasi; (f) konsistensi pelaksanaan Road Map Cukai Hasil Tembakau; dan (g) pemberian insentif perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Dalam upaya mendukung dunia usaha dan sektor-sektor tertentu yang bersifat strategis, Pemerintah memberikan insentif berupa pajak ditanggung Pemerintah (DTP) atas PPh, PPN dan bea masuk guna mendorong investasi dan kegiatan dunia usaha serta stabilisasi harga di dalam negeri. Insentif PPh DTP di antaranya ditujukan untuk pengembangan usaha stabilisasi harga di dalam negeri. Insentif PPh DTP di antaranya ditujukan untuk pengembangan usaha panas bumi (*geothermal*), dan untuk menarik investor asing yang akan berinvestasi pada obligasi Pemerintah. Sedangkan fasilitas PPN DTP ditujukan untuk menarik investasi di sektor eksplorasi migas, maupun untuk mengurangi beban masyarakat terkait dengan pemberian fasilitas PPN DTP untuk BBM bersubsidi. Namun dalam perkembangannya, sesuai dengan rekomendasi BPK dan persetujuan DPR RI, pemberian fasilitas dalam bentuk PPN DTP dihapuskan sejak pertengahan tahun 2011. Sementara itu, insentif berupa bea masuk DTP diberikan untuk industri-industri yang mempunyai kriteria tertentu: (a) memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen; (b) meningkatkan daya saing: (c) meningkatkan penyerapan tenaga kerja: dan (d) meningkatkan pendapatan negara.

Pada bulan Agustus 2011, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk penanaman modal berupa *tax holiday* bagi industri pionir melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.011/2011 dan pada bulan Desember 2011 Pemerintah juga menambahkan alternatif fasilitas pajak selain *tax holiday*, dengan diterbitkannya PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga pangan yang terjadi sejak awal tahun, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan, di antaranya berupa kebijakan penyesuaian 57 pos tarif bea masuk atas biji gandum, bahan baku

ternak, pupuk, produk pangan dan bahan baku pangan menjadi nol persen. Selain itu dalam upaya meningkatkan daya saing dan melindungi industri dalam negeri, Pemerintah telah memberikan insentif bea masuk berupa penyesuaian 190 pos tarif bea masuk atas bahan baku industri tertentu, jasa pelayaran, dan industri perfilman

Boks 5. Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak adalah kegiatan penyisiran dan pencacahan terhadap potensi pajak (wajib pajak dan objek pajak) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka ekstensifikasi (menjaring wajib pajak yang belum terdaftar dan objek pajak yang belum dipajaki) serta intensifikasi (optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki). Kegiatan Sensus Pajak ini merupakan perluasan/pengembangan ke arah yang lebih komprehensif dari kegiatan *canvassing* pajak yang telah dilakukan DJP selama ini.

LATAR BELAKANG

Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia (wajib pajak orang pribadi maupun badan) yang melaporkan SPT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan populasi orang pribadi maupun badan usaha.

HASIL YANG AKAN DICAPAI

1. Perluasan basis pajak (WP dan objek pajak).
2. Peningkatan penerimaan pajak.
3. Peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa.
4. Pemutakhiran dan pertukaran data WP.

SASARAN

1. Yang belum ber-NPWP, diberikan NPWP.
2. Yang belum menyerahkan SPT, dihimbau untuk menyerahkan SPT (membayar pajak).
3. Yang sudah membayar namun belum optimal, agar membayar sesuai dengan ketentuan.
4. Memperluas basis pemajakan (semua lapisan kelompok dan bidang usaha).

Tax ratio

Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB *(tax ratio)* tahun 2011 mencapai 11,77 persen mengalami Peningkatan jika dibanding tahun 2010 sebesar 11,26 persen dan tahun 2009 sebesar 11,04 persen. Kenaikan *tax ratio* di tahun 2011 ini didukung oleh realisasi penerimaan PPh Non-migas mencapai Rp354,68 triliun atau 96,7 persen dari target APBN-P sebesar Rp366,75 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010 sebesar Rp298,17 triliun, kinerja penerimaan PPh Non-Migas tahun 2011 tersebut lebih tinggi sebesar Rp56,5 triliun (18,95 persen). Sedangkan untuk penerimaan PPN, realisasi mencapai Rp277,80 triliun atau 93,08 persen dari target APBN-P 2011 sebesar Rp298,44 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010 sebesar Rp230,6 triliun, kinerja penerimaan PPN tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp47,2 triliun (20,47 persen). Kenaikan *tax ratio* juga ditunjang oleh realisasi penerimaan cukai yang mencapai Rp77,01 triliun (113,1 persen dari target), pajak perdagangan internasional Rp54,12 triliun (115,3 persen dari target), PBB Rp29,89 triliun (102,8 persen dari target), dan pajak lainnya Rp3,9 triliun (93,8 persen dari target).

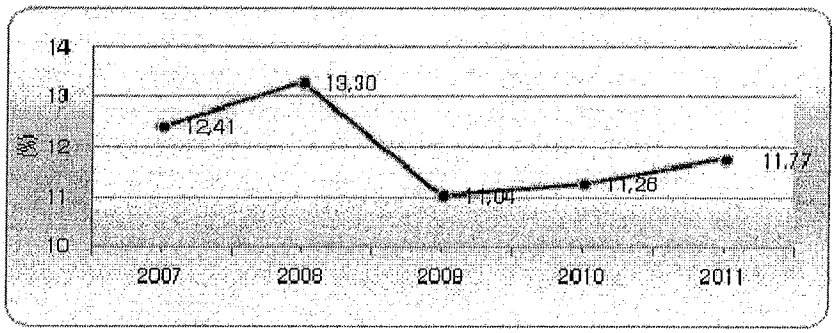

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 16. Tren Tax Ratio Tahun 2007-2011

Tren realisasi penerimaan perpajakan selama 5 tahun terakhir

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan perpajakan sangat mendominasi penerimaan negara walaupun jika dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan perpajakan, sedikit mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp873,87 triliun atau meningkat sebesar 77,98 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2007 yang sebesar Rp490,99 triliun. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2008 yaitu sebesar 108,12 persen akan tetapi pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi menjadi sebesar 95,09 persen. Di tahun 2010 terjadi sedikit peningkatan realisasi penerimaan perpajakan menjadi 97,3 persen, dan di tahun 2011 meningkat menjadi 99,45 persen. Target dan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2007-2011 dapat dilihat pada grafik 17.

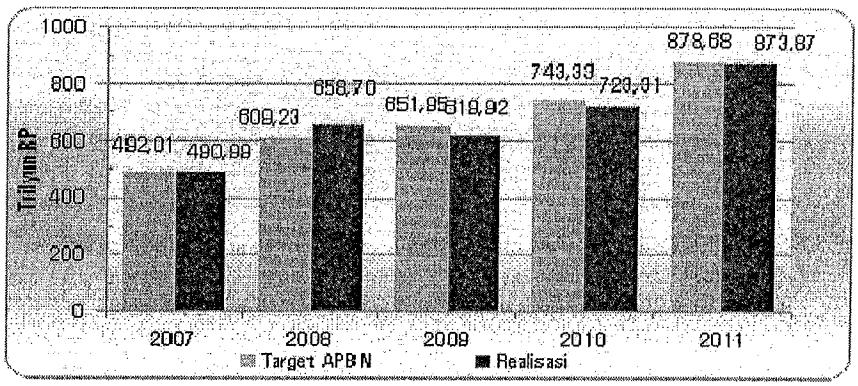

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 17. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2007-2011

Realisasi PNBP tahun 2011

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp331,47 triliun (115,67 persen dari sasaran APBN-P 2011 sebesar Rp286,57 triliun). Jumlah ini naik Rp62,5 triliun (23,25 persen) dari realisasi PNBP tahun 2010 sebesar Rp268,94 triliun. Pencapaian realisasi PNBP yang cukup signifikan tersebut, terutama berkaitan dengan terlampauinya sasaran hampir semua jenis PNBP, baik yang berasal dari sumber daya alam (SDA) migas dan non-migas, maupun PNBP lainnya.

Nilai realisasi PNBP tahun 2011 tersebut berasal dari realisasi penerimaan SDA sebesar Rp213,82 triliun yang merupakan sumber utama penerimaan PNBP, realisasi penerimaan laba BUMN senilai Rp28,18 triliun, realisasi PNBP lainnya sebesar Rp69,37 triliun dan realisasi pendapatan BLU sebesar Rp20,10 triliun.

Realisasi PNBP tersebut adalah hasil dari berbagai kebijakan Pemerintah di bidang PNBP tahun 2011 diantaranya (1) peningkatan sumber daya alam yang didukung insentif fiskal; (2) pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif; (3) meningkatkan fungsi pelayanan pada PNBP K/L; dan (4) melakukan penyempurnaan peraturan mengenai tarif PNBP

pada K/L (lihat tabel 1).

Boks 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2007, pada umumnya PNBP lainnya cenderung berfluktuasi (lihat Grafik 18). Tren peningkatan semenjak tahun 2009 mencerminkan kontribusi keberhasilan kebijakan-kebijakan Pemerintah menyangkut PNBP, juga mengindikasikan masih terdapatnya potensi PNBP lainnya yang dapat terus ditingkatkan.

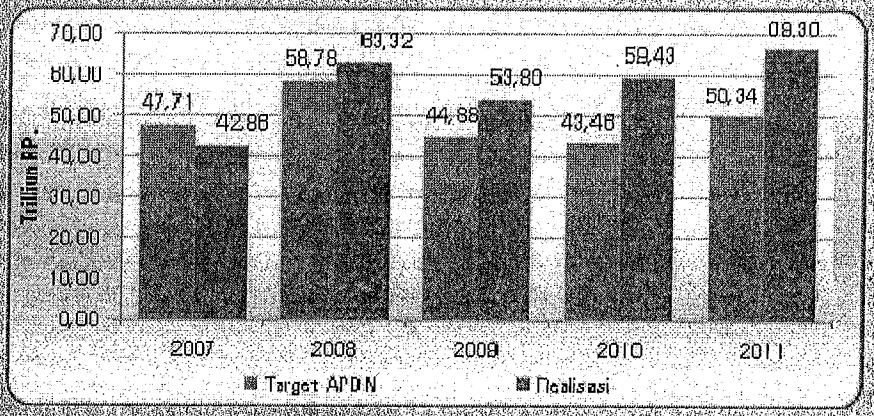

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 18. Realisasi PNBP Lainnya tahun 2007-2011

PNBP lainnya terdiri atas: (1) pendapatan penjualan dan sewa; (2) pendapatan jasa; (3) pendapatan bunga; (4) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (5) pendapatan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (7) pendapatan iuran dan denda; dan (8) pendapatan lain-lain. Pengelolaan atas sumber PNBP lainnya tersebut dilaksanakan oleh K/L terkait, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi PNBP lainnya dari K/L antara lain: (1) jumlah objek pengenaan PNBP; (2) tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah; (3) kualitas pelayanan yang diberikan dan administrasi pengelolaan PNBP yang secara tidak langsung meningkatkan jumlah objek pengenaan; dan (4) upaya optimalisasi yang dapat dilakukan melalui peningkatan pengelolaan dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Selama tahun 2007–2011, PNBP lainnya yang sebagian besar merupakan bagian dari kelompok penerimaan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,97 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 47,73 persen. Selama kurun waktu tersebut, secara khusus Pemerintah melakukan optimalisasi PNBP lainnya melalui (1) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing K/L; (2) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP pada K/L; dan (3) peningkatan akurasi target dan penyusunan pagu penggunaan PNBP dari K/L yang realistis serta pelaporannya.

Di tahun 2011 target PNBP lainnya yang tercantum dalam APBN-P tahun 2011 sejumlah Rp50,34 triliun dengan realisasi senilai Rp69,36 triliun (137,8 persen). Realisasi PNBP lainnya pada tahun 2011 ini didominasi oleh realisasi pendapatan jasa yang mencapai Rp26,63 triliun, pendapatan penjualan dan sewa yang mencapai Rp21,65 triliun, pendapatan bunga sebesar Rp4,9 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp11,56 triliun. Keempat sumber penerimaan PNBP lainnya ini berkontribusi sebesar 93,34 persen dari total penerimaan PNBP lainnya.

Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2011 dan 2012/Kementerian Keuangan

Tren realisasi PNBP selama 5 tahun terakhir

Dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan PNBP, selama tahun 2007-2011 secara umum realisasi penerimaan PNBP melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-P. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan PNBP meningkat menjadi 108,51 persen dari pagu sebesar Rp198,25 triliun. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2008 yaitu sebesar 113,36 persen dari pagu sebesar Rp282,81 triliun, sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi penerimaan PNBP menjadi sebesar 104,19 persen dari pagu sebesar Rp218,04 triliun. Kemudian untuk tahun 2010 realisasi penerimaan PNBP kembali meningkat menjadi 108,80 persen dari pagu sebesar Rp247,18 triliun. Sedangkan pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 115,67 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp331,47 triliun. Sebagai kontributor terbesar untuk penerimaan PNBP, SDA migas menjadi faktor penting yang menentukan naik turunnya penerimaan PNBP. Tren peningkatan SDA migas tersebut dipengaruhi oleh perkembangan beberapa faktor, seperti (a) jumah rata-rata lifting minyak bumi harian, (b) peningkatan ICP,dan (c) penguatan nilai rupiah.

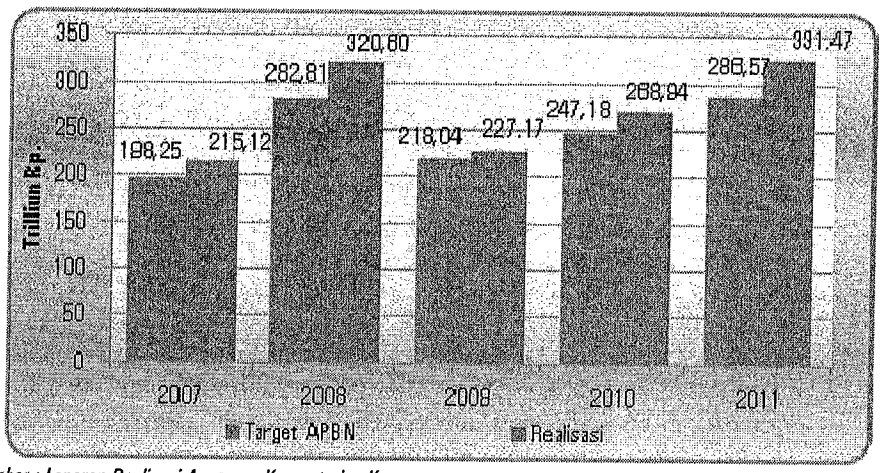

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 19. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2007-2011

Realisasi hibah tahun 2011

Komitmen akan kesediaan negara atau lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia adalah penentu besarnya penerimaan hibah. Di samping itu penerimaan hibah harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman *(memorandum of understanding)* antara Pemerintah Indonesia dengan pihak donor. Realisasi penerimaan hibah di tahun 2011 mencapai Rp5,25 triliun yang berarti mencapai 112,6 persen dari sasaran APBN-P 2011 sebesar Rp4,66 triliun, atau naik 73,8 persen dari realisasi hibah tahun 2010 sebesar Rp3,0 triliun. Lebih tingginya realisasi penerimaan hibah juga dikarenakan semakin baiknya mekanisme pelaporan dan pengesahan hibah-hibah langsung kepada K/L.

Tren realisasi penerimaan hibah 2007-2011

Selama tahun 2007-2011 realisasi penerimaan hibah secara nominal dan tingkat pencapaian targetnya mengalami fluktuasi. Setelah realisasi turun menjadi Rp1,70 triliun (44,50 persen) di tahun 2007, realisasi hibah meningkat menjadi Rp2,30 triliun (77,97 persen) pada tahun 2008. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan hibah kembali mengalami penurunan menjadi Rp1,67 triliun (165,35 persen), dan naik kembali pada 2010 menjadi sebesar Rp3,02 triliun (158,95 persen) selanjutnya di tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi Rp5,25 triliun (112,66 persen) . Di samping komitmen dari pemberi bantuan terutama terkait perubahan iklim *(climate change)*, faktor yang mendorong meningkatnya realisasi penerimaan hibah antara lain bersumber dari penerapan kebijakan Pemerintah tentang sistem akuntansi hibah yang mewajibkan semua penerimaan hibah dicatat dalam APBN

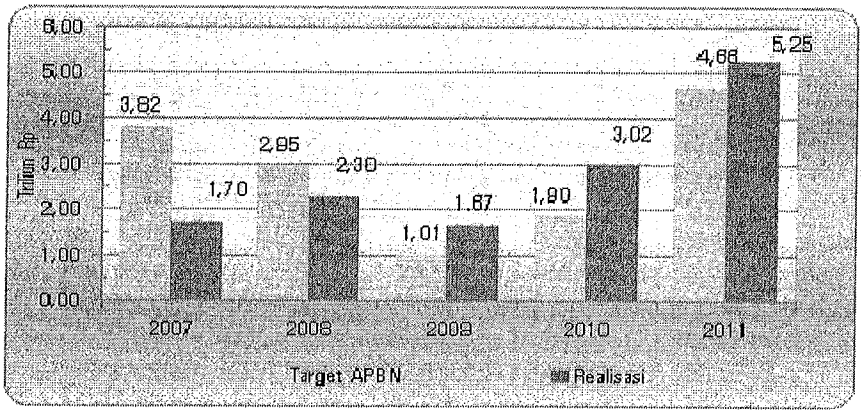

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 20. Target dan Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2007-2011

2. BELANJA NEGARA

Hubungan belanja negara dengan kondisi eksternal

Target maupun realisasi belanja negara memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Kecenderungan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang terkait dengan ekonomi makro seperti harga minyak mentah (ICP), nilai tukar Rupiah, dan perkembangan tingkat suku bunga, juga banyak ditentukan oleh kebijakan di bidang pembelanjaan yang diambil oleh Pemerintah. Apabila kondisi perekonomian sedang mengalami kelesuan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi, Pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat ekspansif dengan meningkatkan volume belanja khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, agar mampu berperan dalam memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental ekonomi makro. Sedangkan dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat tingginya permintaan agregat, Pemerintah akan meluncurkan kebijakan kontraktif yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sangat berperan dalam stabilisasi bagi perekonomian atau menjadi *counter cyclical* yang efektif dalam meredam gejolak ekonomi.

Realisasi belanja negara tahun 2011

Dalam tahun 2011, realisasi belanja negara mencapai Rp1.295,00 triliun, atau 98,05 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,75 triliun. Jumlah tersebut naik Rp252,9 triliun atau 24,26 persen dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp1.042,12 triliun.

Belanja Pemerintah menurut organisasi

Belanja Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh masing-masing K/L yang merupakan *entitas* pengelola anggaran Pemerintah. Eksekusi belanja Pemerintah pusat menurut organisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Sesuai dengan prinsip *let the managers manage,* setelah reformasi manajamen keuangan negara, setiap K/L bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan realisasi anggaran belanja yang dikelolanya.

10 K/L yang memiliki alokasi anggaran belanja terbesar dalam APBN-P tahun 2011

Dalam melaksanakan ketiga pilar pembangunan (*pro growth, pro job* dan *pro poor*) dan melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan, anggaran dialokasikan kepada kementrian negara/lembaga. Adapun sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar adalah:

1). Kementerian Pendidikan Nasional alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp67,74 triliun – (14,68 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,14 persen atau Rp61,06 triliun

2). Kementerian Pekerjaan Umum alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp56,54 triliun (12,25 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,73 persen atau Rp51,30 triliun

3). Kementerian Pertahanan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp50,03 triliun (10,84

persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 102,34 persen atau Rp51,20 triliun

4). Kementerian Agama alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp35,40 triliun (7,67 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 93,81 persen atau Rp33,21 triliun

5). Kepolisian Negara Republik Indonesia alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp31.26 triliun (6.77 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 110,01 persen atau Rp34,39 triliun

6). Kementerian Kesehatan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp29,45 triliun (6,38 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 91,24 persen atau Rp26,87 triliun

7). Kementerian Perhubungan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp23.13 triliun (5,01 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 86,94 persen atau Rp20,11 triliun

8). Kementerian Pertanian alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp17,74 triliun (3,78 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,08 persen atau Rp15,98 triliun

9). Kementerian Keuangan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp17,46 triliun (3,84 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 92,21 persen atau Rp16,1 triliun

10). Kementerian Dalam Negeri alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp16,79 triliun (3,63 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 79,75 persen atau Rp13,39 triliun.

Kementerian Pendidikan Nasional tetap merupakan kementerian yang memperoleh alokasi anggaran terbesar, walaupun untuk peringkat kedua diduduki oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah di tahun sebelumnya ada di peringkat ketiga setelah Kementerian Pertahanan. Grafik K/L yang menerima alokasi anggaran belanja terbesar menurut organisasi dapat dilihat pada grafik 21.

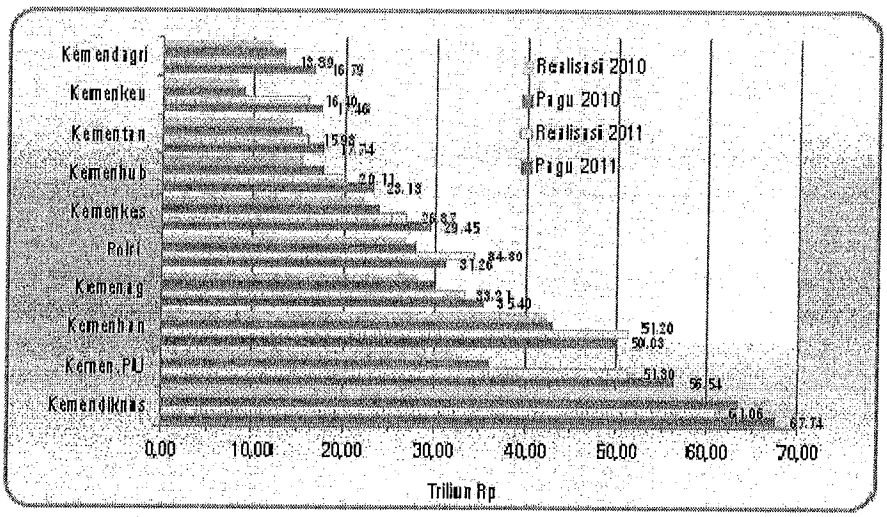

Sumber: LKKL

Grafik 21. K/L Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar

Realisasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi

Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp883,72 triliun, atau secara nominal naik sebesar Rp186,3 triliun (26,7 persen) dari realisasi 2010 sebesar Rp697,4 triliun. Realisasi tersebut menunjukkan daya serap anggaran sebesar 97,30 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp908,2. triliun. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp175,74 triliun (95,46 persen dari target) (lihat grafik 22). Sedangkan realisasi belanja barang Rp124,64 triliun (87,57 persen dari pagu). Realisasi belanja modal Rp117,85 triliun (81.52 persen dari pagu), lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2010 (84,5 persen terhadap pagu). Hal ini antara lain berkaitan dengan kebijakan optimalisasi dan efisiensi terhadap pembangunan gedung kantor; rendahnya realisasi penyerapan pinjaman luar negeri dan adanya reorganisasi di beberapa KL.

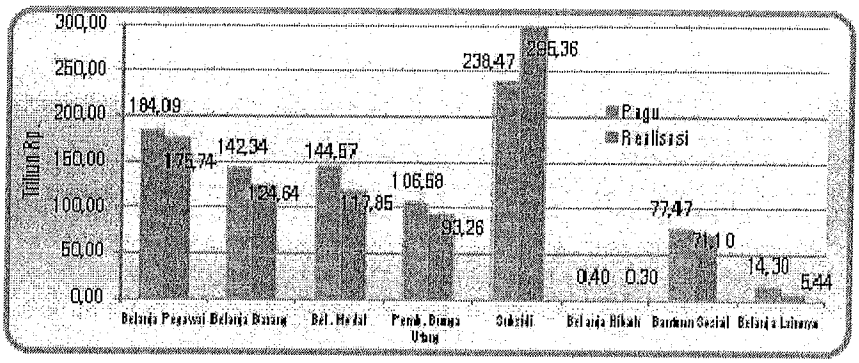

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 22 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2011 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Sedangkan realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp93,26 triliun (87,5 persen dari pagu) antara lain berkaitan dengan lebih rendahnya tingkat bunga SPN 3 bulan, penghematan beban bunga akibat pengurangan target penerbitan SBN dan lebih rendahnya penarikan pinjaman luar negeri.

Terkait subsidi, realisasi subsidi mencapai Rp295,36 triliun (123,86 persen dari pagu) atau naik Rp102,7 triliun dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp192,7 triliun, terutama berkaitan dengan lebih tingginya beban subsidi listrik dan subsidi BBM serta subsidi pangan. Hal ini terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi ICP (USD111,6 per barel) dibandingkan dengan asumsi APBN-P 2011 (USD95,0 per barel), tidak terpenuhinya rencana penggunaan energi input subsidi listrik dan adanya tambahan raskin ke-13.

Realisasi bantuan sosial mencapai Rp71,10 triliun (91,79 persen dari pagu) terutama berkaitan dengan tidak terealisasinya kegiatan PNPM mandiri dan pembatalan kegiatan yang tidak prioritas. Sedangkan realisasi belanja lain-lain mencapai Rp5,47 triliun (38,21 persen terhadap pagu), lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp21,7 triliun (65,8 persen terhadap pagu). Hal ini antara lain berkaitan dengan tidak terserapnya cadangan anggaran risiko fiskal, lebih rendahnya penyerapan cadangan anggaran keperluan mendesak dan belanja penunjang serta dilakukannya realokasi anggaran dari bagian anggaran (BA) belanja lainnya ke BA belanja subsidi dan BA K/L.

Secara persentase, kontribusi belanja Pemerintah Pusat terbesar berdasarkan klasifikasi ekonomi selama tahun 2011 adalah realisasi belanja subsidi sebesar 33,42 persen (lebih besar dibandingkan proporsi di tahun 2010 sebesar 27,63 persen) diikuti oleh realisasi belanja pegawai sebesar 19,89 persen, diikuti dengan belanja barang sebesar 14,10 persen, belanja modal sebesar 13,34 persen. Sedangkan belanja pembayaran bunga utang sebesar 10,55 persen, belanja bantuan sosial sebesar 8,05 persen, belanja lain-lain sebesar 0,62 persen dan belanja hibah 0,03 persen dari total belanja. Persentase belanja lain-lain semakin berkurang dari 3,11 persen di tahun sebelumnya menjadi 0,62 persen dikarenakan antara lain banyaknya belanja lainnya yang dapat reklasifikasi.

Tren realisasi belanja berdasarkan jenis belanja selama 5 tahun terakhir

Sejak tahun 2007, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh belanja bersifat mengikat, yakni belanja pegawai, transfer ke daerah, subsidi, dan pembayaran bunga, rata-rata mencapai 73,55 persen dari total belanja Pemerintah Pusat. Di tahun 2011 khususnya belanja mengikat tersebut mencapai 75,34 persen dari total belanja Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya merupakan realisasi belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, belanja hibah dan belanja lain-lain. Besarnya kontribusi realisasi belanja dimaksud menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, belanja Pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengeluaran-pengeluaran yang bersifat belum mengikat terbatas. Dengan keterbatasan dimaksud Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan *quality of spending* agar tepat sasaran dan juga memperluas ruang gerak *(fiscal space)* Pemerintah dalam rangka melakukan intervensi fiskal, yang antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara.

Boks 7. Tren Penyerapan Anggaran Belanja TA 2011

Kecenderungan peningkatan belanja Pemerintah dari tahun ke tahun memiliki implikasi terhadap makro ekonomi yakni pada sektor riil yang berpengaruh pada konsumsi, investasi dan pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seharusnya dibarengi dengan pola penyerapan dana yang responsif terkait peran APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Fenomena kecenderungan penyerapan anggaran tereskalasi pada akhir tahun menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan anggaran. Salah satu kendala yang ditengarai menjadi penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja negara adalah kesiapan K/L dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta kesiapan dalam menyediakan berbagai dokumen pencairan.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah berupaya terus memperbaiki tren pencairan dana yang antara lain dilakukan melalui percepatan proses kerja dalam area pelaksanaan anggaran serta melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja K/L.

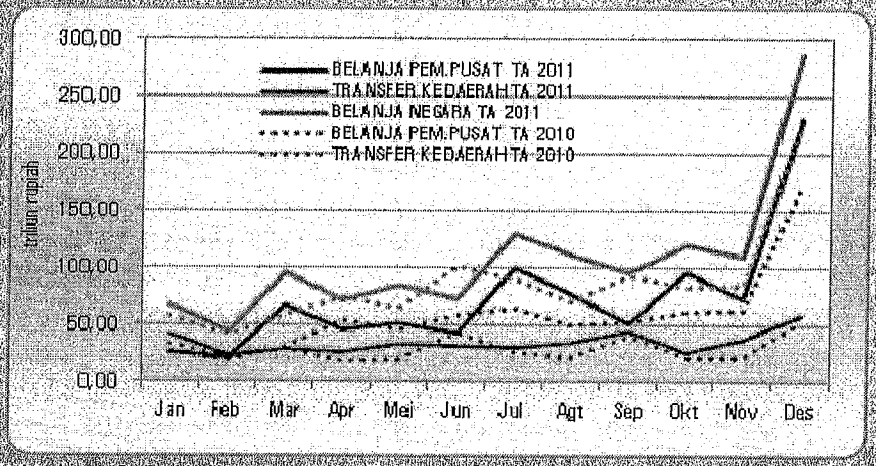

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 23. Tren Belanja Negara Bulanan TA 2011 dan TA 2010

Dari grafik di atas belanja negara yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah memperlihatkan pergerakan secara perlahan pada awal tahun hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli, selanjutnya mengalami penurunan hingga bulan September dan meningkat tajam kembali dari bulan November dengan nilai realisasi tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp290,643triliun dan rata-rata nilai serapan per bulan sebesar Rp107,92 triliun.

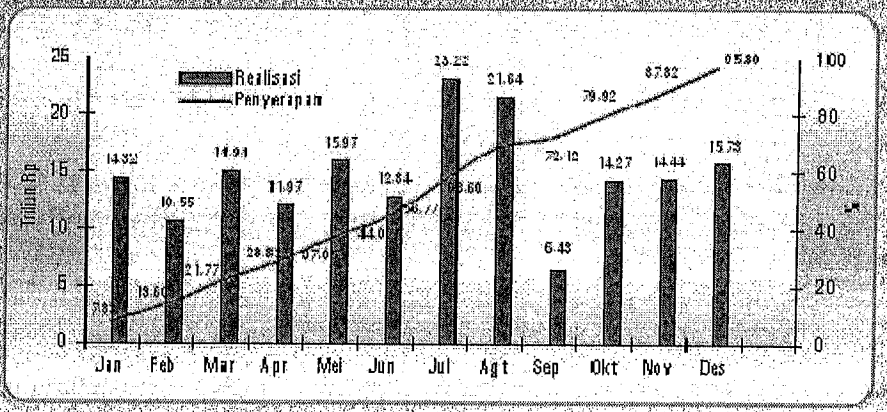

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 24. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2011

Belanja pegawai pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp175,74 triliun atau 95,46 persen dari

pagu APBN-P sebesar Rp184,09 triliun, secara nominal, meningkat sebesar Rp27,7 triliun atau 18,68 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp148,08 triliun. Hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi belanja pegawai tahun 2011 di antaranya adalah adanya penghematan cadangan anggaran pegawai baru, honorarium dan vakasi, serta belum terserapnya anggaran remunerasi K/L. Dari bulan Januari sampai dengan Juni 2011 tren belanja pegawai berfluktuasi tipis dengan nominal yang hampir sama, dan pada bulan Juli dan Agustus 2011 mengalami peningkatan cukup tajam yang dipengaruhi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara serta pembayaran gaji bulan September dilakukan di bulan Agustus dikarenakan libur cuti bersama terkait hari raya dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp23,22 triliun dan 21,64 triliun. Selanjutnya dari bulan Oktober sampai Desember tingkat serapan cenderung mendatar atau meningkat tipis. Secara umum tren ini tidak jauh berbeda dengan tren tahun sebelumnya.

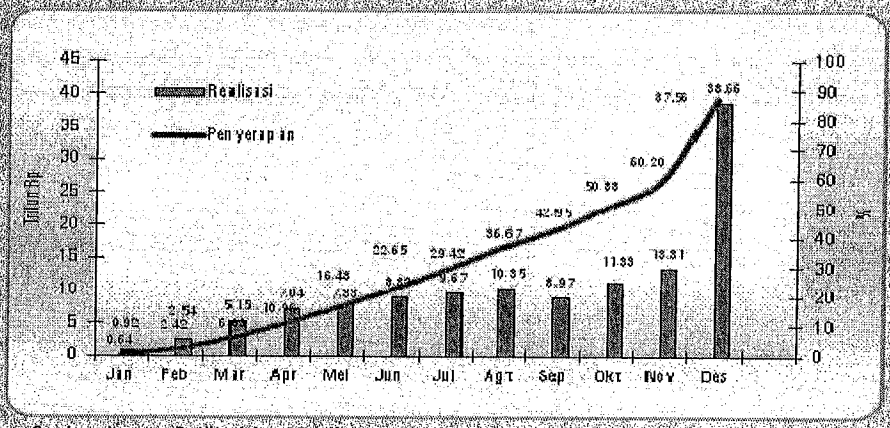

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 25. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2011

Pagu belanja barang pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp142,34 triliun atau meningkat sebesar Rp29,75 triliun atau 26,42 persen dibanding pagu tahun 2010 sebesar Rp112,59 triliun. Belanja barang terealisasi sebesar Rp124,64 triliun atau 87,57 persen dari pagu, yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang terealisasi sebesar Rp97,60 triliun. Adapun tren belanja barang pada tahun 2011 tidak banyak berbeda dengan tren tahun sebelumnya, terutama terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran. Secara nominal, realisasi terendah terjadi pada awal tahun anggaran (bulan Januari) sebesar Rp0,92 triliun, lebih rendah dari realisasi periode sebelumnya Rp0,74 triliun. Sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp38,66 triliun, jauh lebih tinggi dari realisasi Desember tahun sebelumnya sebesar Rp25,63 triliun. Rendahnya tingkat serapan belanja barang ditengarai masih terkait dengan kesiapan K/L dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta tingginya tingkat kehati-hatian pejabat pengadaan dalam mengambil keputusan.

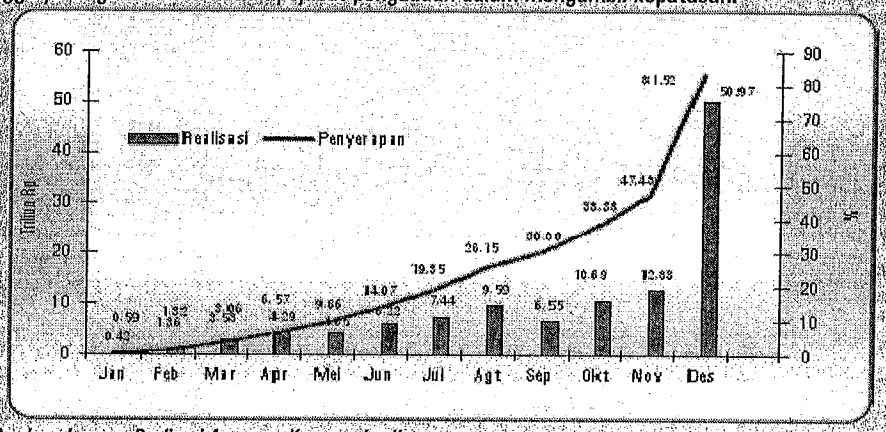

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 26. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2011

Alokasi anggaran belanja modal pada tahun 2011 sebesar Rp144,57 triliun yang berarti naik tajam sebesar Rp49,55 triliun atau 52,15 persen dibanding pagu tahun 2010 sebesar Rp95,02 triliun. Adapun realisasi belanja modal tahun 2011 sebesar Rp117,85 triliun atau 81,52 persen dari pagunya, lebih rendah dari penyerapan tahun sebelumnya sebesar 84,50 persen. Secara umum tren realisasi belanja modal tidak jauh berbeda dengan tren realisasi belanja barang yakni sepanjang tahun mengalami fluktuasi dan meningkat secara signifikan pada bulan Desember. Realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,59 triliun, relatif tidak jauh berbeda dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya dan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp50,97 triliun, jauh lebih besar dibandingkan realisasi Desember 2010 sebesar Rp32,63 triliun. Rata-rata realisasi bulanan di tahun 2011 sebesar Rp9,96, sudah jauh lebih besar dibandingkan kemampuan rata-rata penyerapan tahun sebelumnya sebesar Rp6,69 triliun. Rendahnya tingkat realisasi belanja modal pada tahun 2011 terjadi antara lain karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan/proyek yang terkendala iklim/cuaca, bencana alam dan masalah dalam pengadaan/pembebasan lahan, serta penghematan anggaran dari pelaksanaan tender.

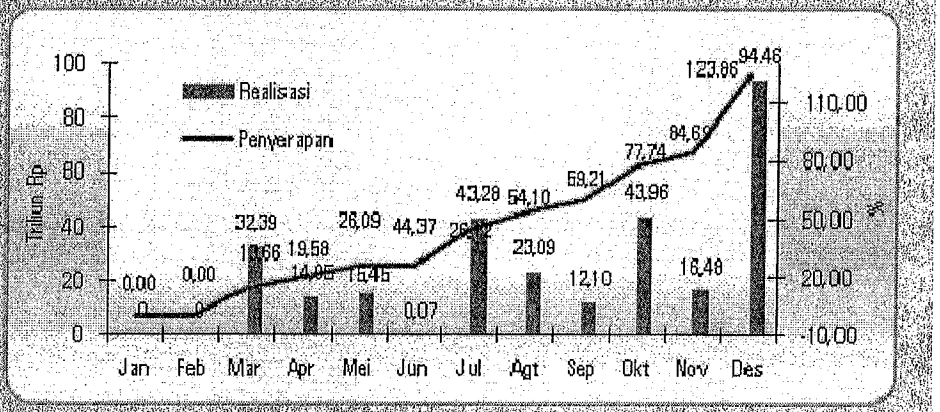

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 27. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2011

Pagu belanja subsidi pada tahun 2011 senilai Rp238,47 triliun atau meningkat sebesar Rp37,21 triliun (18,49 persen) dibanding yang dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp201,26 triliun. Realisasi belanja subsidi mencapai Rp295,36 triliun atau 123,86 persen dari pagu APBN-P 2011 yang berarti mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp102,7 triliun atau 53,27 persen dibanding realisasi tahun lalu yang berada pada level Rp192,71 triliun. Adapun tren penyerapan belanja subsidi sepanjang tahun 2011 berfluktuasi. Penyerapan baru mulai terealisasi pada bulan Maret dan kemudian turun sampai bulan Juni serta meningkat secara tajam pada bulan Desember sebesar Rp94,46 triliun atau 39,61 persen dari total pagu. Penyerapan terendah terjadi pada bulan Juni sebesar Rp0,07 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp94,46 triliun. Secara umum, nilai serapan per bulan untuk belanja subsidi rata-rata Rp24,61 triliun. Realisasi subsidi melampaui pagu terutama terkait dengan lebih tingginya beban subsidi energi, terutama dengan naiknya harga ICP di akhir periode, dan subsidi non-energi yang diakibatkan antara lain oleh tambahan subsidi kewajiban pelayanan umum (*public service obligation/PSO*) dan tambahan subsidi pajak.

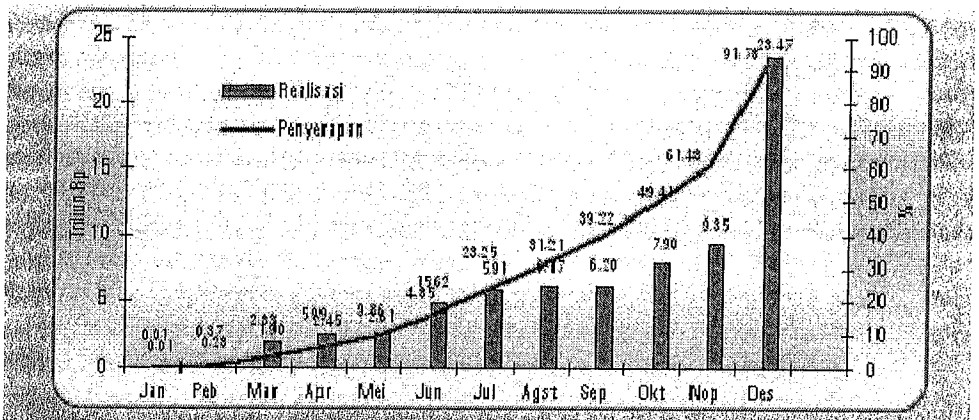

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 28. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2011

Pada tahun 2011 belanja bantuan sosial menerima alokasi anggaran sebesar Rp77,47 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp6,30 triliun atau 8,85 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp71,17 triliun. Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp71,10 triliun atau 91,79 persen dari pagu APBN-P 2011 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2,49 triliun atau 3,63 persen dibanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp68,61 triliun. Tren belanja bantuan sosial berfluktuasi sepanjang tahun 2011, penyerapan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,01 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp23,47 triliun dan secara rata-rata penyerapan belanja bantuan sosial per bulan Rp5,93 triliun.

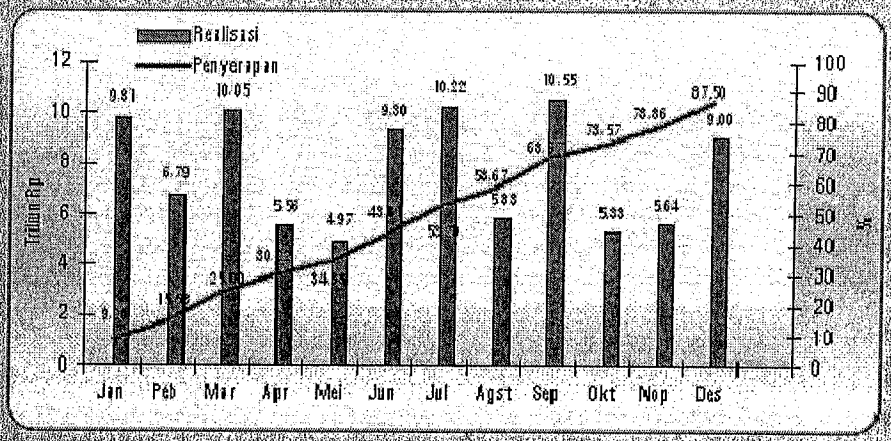

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 29. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2011

Alokasi anggaran belanja pembayaran bunga utang pada tahun 2011 mencapai Rp106,58 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp0,93 triliun atau 0,88 persen bila dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp105,65 triliun. Realisasi belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp93,26 triliun atau 87,50 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2011 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4,9 triliun atau 5,52 persen dibanding realisasi tahun 2010 yang mencapai Rp88,38 triliun. Peningkatan besaran pembayaran bunga utang seiring dengan peningkatan *outstanding* utang dari tahun ke tahun, dimana sebagai konsekuensinya, beban utang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Realisasi pembayaran bunga utang tahun 2011 berfluktuasi dengan rata-rata bulanan sebesar Rp7,77 triliun.

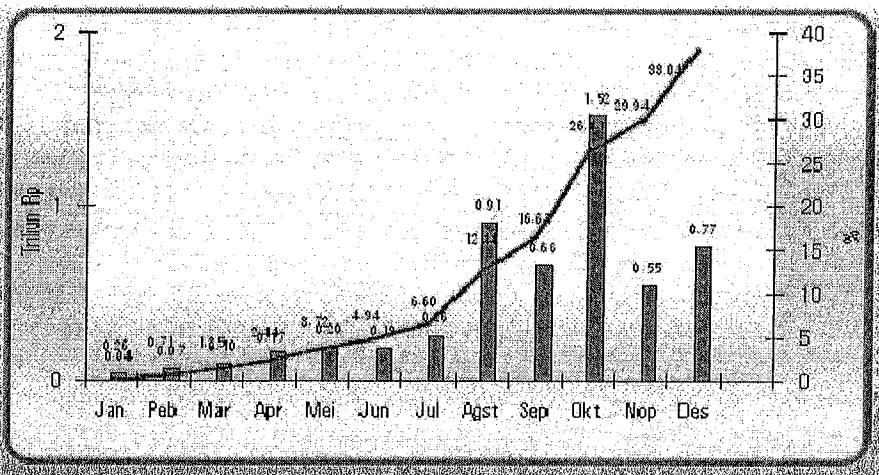

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 30. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2011

Pada tahun 2011 belanja lain-lain mendapatkan alokasi sebesar Rp14,30 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp18,62 triliun atau 56,56 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp32,92 triliun. Belanja lain-lain terealisasi sebesar Rp5,47 triliun atau 38,21 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2011 atau mengalami penurunan sebesar Rp16,2 triliun atau 74,78 persen dibanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp21,67 triliun. Tren penyerapan belanja lain-lain sepanjang tahun 2011 berfluktuasi dan realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,04 triliun, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp1,52 triliun. Secara rata-rata penyerapan belanja lain-lain per bulan selama tahun 2011 adalah sebesar Rp0,45 triliun. Secara nominal rendahnya realisasi anggaran belanja lain-lain tahun 2011 dibanding realisasi tahun 2010 disebabkan antara lain karena telah direalokasikannya beberapa pos anggaran dari belanja lain-lain ke belanja K/L, seperti pendanaan untuk biaya pemungutan PBB, anggaran beberapa komite/lembaga dan sebagian belanja penunjang.

Kontribusi belanja Pemerintah dan Belanja Modal terhadap perekonomian

Sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan RPJMN tahun 2010-2014 yang menetapkan 3 (tiga) agenda yang menjadi misi pembangunan yaitu (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Agenda yang dituangkan dalam besaran dan kebijakan alokasi belanja negara memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan. Sejalan dengan itu, maka baik pagu maupun realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2011 diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pencapaian misi tersebut. Peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk melakukan stimulus bagi perekonomian terutama melalui belanja negara, dengan rata-rata kontribusi 17,88 persen terhadap PDB di lima tahun terakhir. Kebijakan fiskal yang ekspansif bagi perekonomian terlihat dari perkembangan realisasi belanja negara dan defisit (lihat tabel 2).

Realisasi belanja negara tahun 2007 sebesar Rp757,65 triliun atau sekitar 19,15 persen PDB. . Sementara itu, pada tahun 2008, realisasi belanja negara menjadi 19,90 persen PDB, secara nominal meningkat sebesar 30,10 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja negara tahun 2007. Kemudian belanja negara tahun 2009 (16,70 persen PDB) turun sebesar 4,90 persen dibanding tahun sebelumnya dan meningkat di tahun 2010 sebesar 11,17 persen (16,23 persen PDB). Di tahun 2011, realisasi belanja naik 24,27 persen menjadi Rp1.295,00 triliun (17,4 persen PDB) yang terdiri dari belanja Pemerintah pusat Rp883,72 triliun (11,9 persen PDB), dan transfer ke daerah mencapai Rp411,32 triliun (5,5 persen PDB.)

Kontribusi pos belanja modal dalam APBN memiliki dampak yang cukup besar terhadap sektor riil

terutama melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Secara nominal realisasi belanja modal tahun 2007-2011 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, [tetapi rasio belanja modal terhadap PDB mengalami penurunan walaupun kembali naik di tahun 2011]. Keterbatasan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal seiring dengan semakin sempitnya ruang gerak yang dimiliki Pemerintah terkait dengan *fiscal space*. *Fiscal space* terhadap PDB selama periode 2007-2011 berturut-turut adalah 5,48 persen, 4,93 persen, 5,17 persen, 4,86 persen, dan 5,14 persen. Sedangkan rasio realisasi belanja modal terhadap PDB dalam kurun waktu 2007-2011 adalah 1,62 persen, 1,47 persen, 1,35 persen, 1,25 persen, dan 1,63 persen. Walaupun secara nominal realisasi belanja modal meningkat dari tahun ke tahun, namun secara rata-rata rasio belanja modal terhadap PDB telah mencapai sekitar 1,46 persen.

Tabel 2. Perkembangan Belanja Negara tahun 2007-2011
(triliun Rupiah)

Uraian	2007		2008		2009		2010		2011	
	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB
Belanja Negara	757,65	19,15	985,73	19,90	937,38	16,70	1.042,12	16,23	1.295,00	17,4
Belanja Pemerintah Pusat	504,62	12,75	693,36	14,00	628,81	11,20	697,41	10,86	883,72	11,9
Transfer ke Derah	253,26	6,40	292,43	5,90	308,59	5,50	344,73	5,37	411,32	5,5
Suspen	(0,24)	(0,01)	(0,06)	0,00	(0,02)	0,00	(0,02)	0,00	(0,05)	0,01
Surplus/Defisit	(49,84)	(1,26)	(4,12)	(0,08)	(88,62)	(1,58)	(46,85)	(0,73)	(84,38)	(1,1)
Belanja Modal	64,29	1,62	72,77	1,47	75,87	1,35	80,29	1,25	117,85	1,6
PDB	3.957,4		4.954		5.613,4		6.422,9		7.427,1	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Boks 8. Fiscal Space

Fiscal space secara umum merupakan ketersediaan alokasi anggaran yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu tanpa mengakibatkan permasalahan terhadap kesinambungan posisi keuangan Pemerintah. Dalam konteks APBN, fiscal space dihitung dari pengurangan total anggaran belanja dengan jumlah belanja yang telah terikat, seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah. Fiscal space berguna untuk melihat kemampuan Pemerintah dalam mengalokasikan pengeluaran negara pada belanja-belanja yang bersifat belum terikat seperti pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perluasan fiscal space antara lain dapat ditempuh dengan: (1) meningkatkan pendapatan negara; (2) menajamkan prioritas belanja negara antara lain melalui pemotongan belanja negara yang bukan prioritas, penurunan belanja subsidi dan penyesuaian berkala pembayaran bunga utang; dan (3) meningkatkan efisiensi melalui peningkatan good governance dan pemberantasan korupsi.

Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar realisasi belanja Pemerintah Pusat merupakan belanja terikat. Anggaran belanja terikat selama kurun waktu 2007–2011 menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata sebesar 13,32 persen terhadap PDB, yang berturut-berturut mulai dari tahun 2007 adalah Rp535,66 triliun (13,54 persen terhadap PDB), Rp745,15 triliun (15,04 persen terhadap PDB), Rp710,73 triliun (12,66 persen terhadap PDB), Rp814,18 triliun (12,68 persen terhadap PDB), dan Rp.941,65 triliun (12,68 persen terhadap PDB). Secara nominal, anggaran belanja terikat pada tahun 2011 meningkat tajam sebesar lebih dari 75 persen dibanding nominal tahun 2007. Sedangkan fiscal space selama kurun waktu 2007-2011 mengalami peningkatan, pada tahun 2007 sebesar Rp216,71 triliun, kemudian pada tahun 2008 menjadi Rp244,34 triliun, pada tahun 2009 sebesar Rp290,11 triliun, pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp311,97 triliun, dan di tahun 2011 meningkat menjadi Rp379,1 triliun. Angka ini mengindikasikan bahwa tren fiscal space terhadap PDB, sepanjang periode 2007-2011 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata 5,11 persen terhadap PDB dan di tahun 2011 rasio mencapai 5,10 persen.

Mencermati masih terbatasnya space yang dimiliki, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dari belanja negara *(quality of spending)*. Diharapkan melalui kualitas belanja negara yang memadai, maka instrumen fiskal menjadi lebih efektif yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Tabel 3. Fiscal Space terhadap PDB Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011 (A/D)
		(triliun Rp)				
1	Total Belanja Negara	752,37	989,49	1.000,84	1.126,15	1.320,75
2	Total Belanja Terikat (Non-discretionary spending)	535,66	745,15	710,73	814,18	941,65
	a. Belanja Pegawai	92,84	123,54	133,71	162,66	184,09
	b. Belanja Pembayaran Bunga	83,55	94,79	109,59	105,65	106,58
	c. Belanja Subsidi	105,07	234,40	158,12	201,26	238,47
	d. Transfer ke Daerah	254,20	292,42	309,31	344,61	412,51
3	Total Belanja Negara - Total Belanja Terikat	216,71	244,34	290,11	311,97	379,1
4	Rasio Belanja Terikat terhadap Total Belanja Negara	71,20	75,31	71,01	72,30	71,30
5	Rasio Belanja Tidak Terikat terhadap Total Belanja Negara	28,80	24,69	28,99	27,70	28,70
6	Pendapatan Domestik Bruto/PDB (triliun Rupiah)	3.957,4	4.954,0	5.613,4	6.422,9	7.427,1
7	Rasio Belanja Terikat terhadap PDB (%)	13,54	15,04	12,66	12,68	12,68
8	Rasio Belanja Tidak Terikat (Fiscal Space) terhadap PDB (%)	5,48	4,93	5,17	4,86	5,10

Sumber : Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

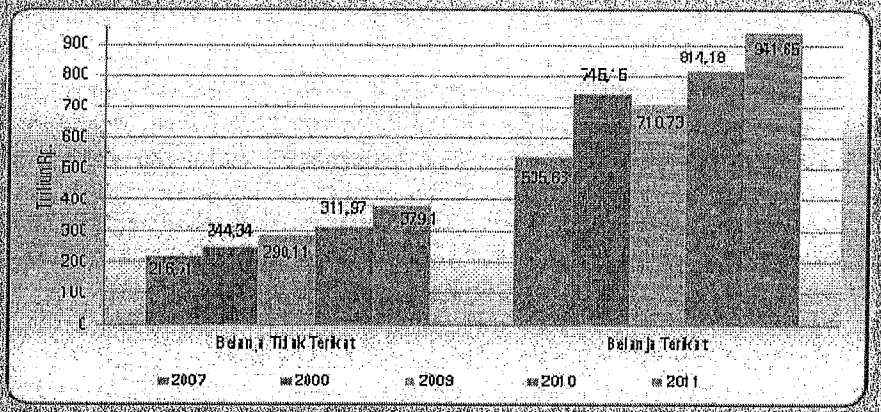

Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 31. Belanja Tidak Terikat dan Belanja Terikat Tahun 2007-2011

Realisasi transfer ke daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal telah memasuki dasawarsa yang kedua. Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal yang dianut Pemerintah antara lain untuk mengurangi vertical dan horizontal fiscal imbalance, meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, membangun tata kelola pelaksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendukung *fiscal sustainability* dalam kebijakan ekonomi makro. Transfer ke daerah yang salah satu sumber pendanaan daerah semakin meningkat seiring dengan naiknya pendapatan negara.

Realisasi transfer ke daerah dalam tahun 2011 mencapai Rp411,3 triliun (99,7 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp412,5 triliun), atau naik Rp66,6 triliun (19,36 persen) dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp344,7 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut terdiri dari dana perimbangan, dana Otsus dan penyesuaian. Realisasi dana Perimbangan sebesar Rp347,25 triliun atau hampir sama dengan pagu APBN-P 2011 sebesar Rp347,5 triliun. Hal ini terutama berkaitan

dengan sedikit lebih rendahnya realisasi DAK berkenaan dengan adanya beberapa daerah yang tidak memenuhi persyaratan sedangkan realisasi DAU sesuai dengan pagu, sementara realisasi DBH sedikit di atas pagu.

Untuk dana otsus dan penyesuaian terealisasi sebesar Rp64,1 triliun atau 98,6 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp64,97 triliun. Realisasi otsus sesuai pagu, selisih terutama berkaitan dengan lebih rendahnya realisasi dana penyesuaian, khususnya dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID), dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID), dan bantuan operasional sekolah (BOS).

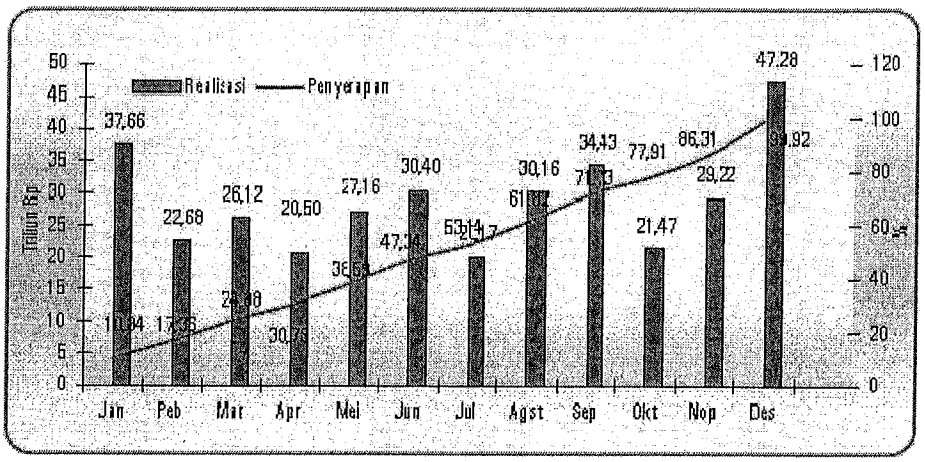

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 32. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2011

Tren serapan transfer ke daerah tersebut tidak berbeda jauh dengan tren belanja Pemerintah Pusat yakni berfluktuasi sepanjang tahun 2011. Untuk dana perimbangan, pada awal tahun terjadi penyerapan sebesar Rp37,66 triliun atau 10,84 persen terhadap total realisasi dana perimbangan, selanjutnya berfluktuasi dengan kenaikan di bulan terakhir pada masing-masing triwulan dan pada akhir tahun terjadi penyerapan tertinggi sebesar Rp47,28 triliun atau13,61 persen dari total pagu dana perimbangan. Secara nominal, dana perimbangan terserap sebesar Rp347,25 triliun dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp28,94 triliun, lebih besar dari ata-rata tahun sebelumnya sebesar Rp26,39 triliun.

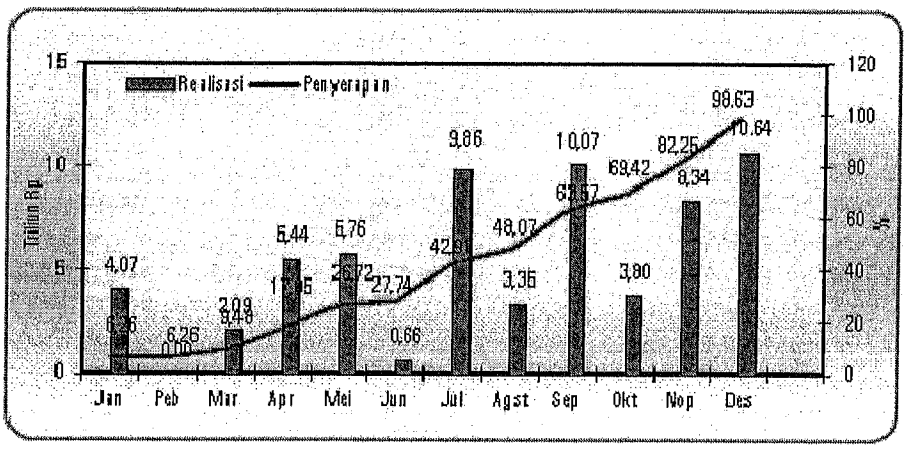

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 33. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2011

Untuk penyerapan dana otonomi khusus dan penyesuaian, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mulai direalisasikan di bulan Pebruari, di tahun 2011 dapat direalisasikan mulai awal tahun.

Penyerapan tertinggi ada di bulan Juli (Rp9,86 triliun), September (Rp10,07 triliun), dan Desember (Rp10,64 triliun). Secara nominal, dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp5,34 triliun . Dana otonomi khusus dan penyesuaian terserap sebesar Rp64,08 triliun, jauh lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp28,02 triliun.

3. PEMBIAYAAN

Dampak kebijakan stimulus fiskal terhadap defisit APBN

Peningkatan defisit fiskal utamanya merupakan implikasi dari kebijakan stimulus fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun kebijakan fiskal ekspansif memiliki kecenderungan terjadinya defisit, Pemerintah terus berupaya menjaga defisit fiskal pada tingkat yang relatif rendah. Di samping itu, upaya perhitungan besaran dan realisasi defisit ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan tanpa merusak indikator makroekonomi seperti inflasi. Defisit yang meningkat juga diseimbangkan dengan kebijakan di bidang pendapatan yang mengupayakan peningkatan pendapatan negara terutama yang berasal dari dalam negeri. Defisit anggaran meningkat secara tajam di tahun 2007 antara lain terkait erat dengan meningkatnya harga-harga komoditas internasional terutama harga minyak dunia yang mengakibatkan meningkatnya beban subsidi Pemerintah. Stimulus fiskal Pemerintah diberikan dalam bentuk (1) insentif perpajakan; (2) optimalisasi belanja negara untuk pembangunan; (3) pengalokasian belanja negara dalam rangka meningkatkan *purchasing power* dari masyarakat yang berpenghasilan rendah; dan (4) dukungan Pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui *Public-Private Partnership* (PPP).

Sumber-sumber pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan terus digali untuk menutup defisit anggaran. Sumber pembiayaan itu sendiri berasal dari sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian, Pemerintah menekankan sumber pembiayaan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan APBN. Adapun sumber pembiayaan luar negeri juga digali dengan memperhatikan dan mempertahankan penurunan rasio utang terhadap PDB secara berkesinambungan (*debt sustainability*).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan pembiayaan dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan utang dan non utang. Pada tahun 2011 sumber pembiayaan didominasi oleh sumber pembiayaan utang yang diakibatkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan non utang yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan penerimaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk sumber yang berasal dari utang, Pemerintah menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Utang Negara (SUN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen utama.

Realisasi pembiayaan APBN

Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2011 mencapai Rp130,95 triliun, lebih rendah Rp19,88 triliun (13,18 persen) dari target APBN-P 2011 sebesar Rp150,8 triliun. Untuk realisasi pembiayaan dalam negeri mencapai Rp148,75 triliun, lebih rendah Rp4,86 triliun (3,16 persen) dari target APBN-P 2011 sebesar Rp153,6 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh pengurangan target penerbitan SBN neto sebesar Rp19,15 triliun, lebih rendahnya penarikan pinjaman dalam negeri, dan tidak ada realisasi untuk kewajiban penjaminan.

Realisasi pembiayaan luar negeri mencapai negatif Rp17,80 triliun, turun Rp15,02 triliun dari target APBN-P 2011 sebesar negatif Rp2,78 triliun. Hal ini terutama berkaitan dengan pembatalan penarikan pinjaman program Low Carbon and Resilient Development Program, lebih rendahnya penarikan pinjaman proyek, dan lebih rendahnya penarikan penerusan pinjaman.

Selain itu di tahun 2011 Pemerintah juga berusaha mengurangi jumlah pinjaman luar negerinya dengan cara melakukan debt swap, seperti realisasi pengalihan pinjaman untuk proyek Junior Secondary Education (23 juta Euro), Housing and Settlement (1,8 juta euro dan USD7,5 juta), Debt2Health (AUD7,5 juta), Global Fund to Fight AIDS, Tubercololosis and Malaria (10 juta Euro), dan Tropical Forest Conservation (USD6,4 juta).

Rasio defisit terhadap PDB

Rasio defisit terhadap PDB menunjukkan salah satu indikator kesinambungan fiskal. Selama tahun 2007-2011 rasio tersebut berada di bawah level 3 persen dengan rata-rata sebesar 0,96 persen. Rasio defisit terhadap PDB berfluktuatif dengan defisit terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp4,12 triliun atau 0,08 persen terhadap PDB atau 4,36 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp94,50 triliun, sedangkan defisit tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp88,62 triliun atau 1,58 persen terhadap PDB atau 68,25 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P 2009 sebesar Rp129,84 triliun. Untuk tahun 2011 rasio defisit terhadap PDB sebesar 1,14 persen.

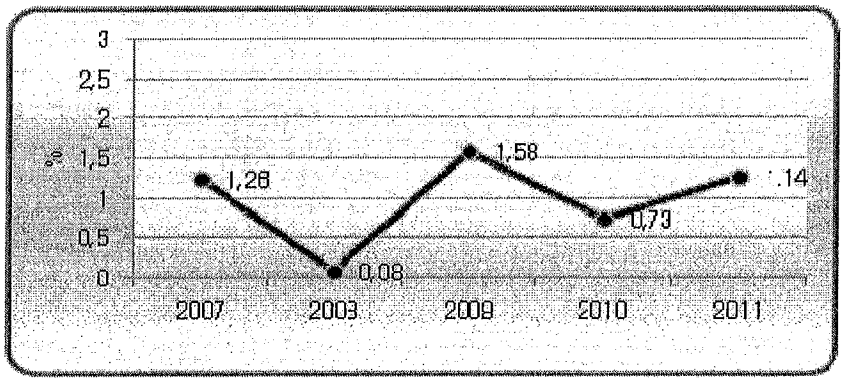

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 34. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2007-2011

Keseimbangan primer

Keseimbangan primer diperoleh dari pendapatan termasuk hibah dikurangi dengan pengeluaran yang tidak memiliki komponen bunga (pinjaman neto). Pada tahun 2011, keseimbangan primer terealisasi sebesar Rp8,88 triliun yang berarti mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yang berada pada posisi Rp41,53 triliun. Perubahan ini dipengaruhi antara lain oleh naiknya pembayaran kewajiban bunga utang dan membesarnya defisit anggaran. Pembayaran bunga utang pada tahun 2011 sebesar Rp93,26 triliun yang berarti mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yang mencapai Rp88,38 triliun. Sementara itu, defisit anggaran pada tahun 2011 berada pada level Rp84,38 triliun yang lebih tinggi dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp46,77 triliun.

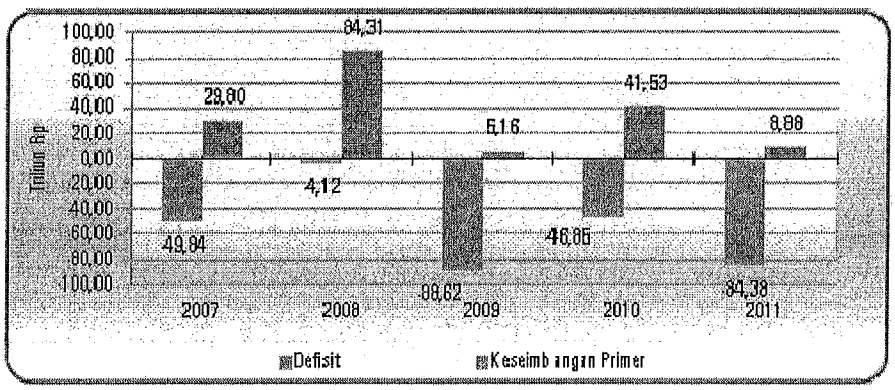

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 35. Defisit dan Keseimbangan Primer Tahun 2007-2011

Perkembangan surplus/defisit, pembiayaan, SiKPA/SiLPA

Surplus/defisit menunjukkan perbedaan antara seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran. Sedangkan SiLPA (selisih lebih pembiayaan anggaran)/SiKPA (selisih kurang pembiayaan anggaran) merupakan selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan. Secara umum, dalam beberapa tahun terakhir realisasi anggaran pemerintah pusat menghasilkan

SiLPA. SiLPA yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya. Penambahan SiLPA tahun anggaran berjalan dengan saldo SiLPA tahun sebelumnya menghasilkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah.

Pada tahun 2007 realisasi APBN mengalami SiKPA sebesar Rp7,39 triliun, sedangkan SiLPA tahun 2008 sebesar Rp79,95 triliun. SiLPA tersebut menjadi SAL tahun 2008 yang digunakan untuk kegiatan tahun 2009 yakni terutama terkait dengan PNPM. Pada tahun 2009, realisasi pembiayaan lebih tinggi dibanding realisasi defisit sehingga terjadi SiLPA sebesar Rp23,96 triliun dan pada tahun 2010 realisasi APBN mengalami SiLPA sebesar Rp44,71 triliun. Untuk tahun 2011 jumlah SiLPA berkurang menjadi Rp46.55 triliun. Selama tahun 2007 - 2011, SiLPA rata-rata sebesar Rp37,56 triliun.

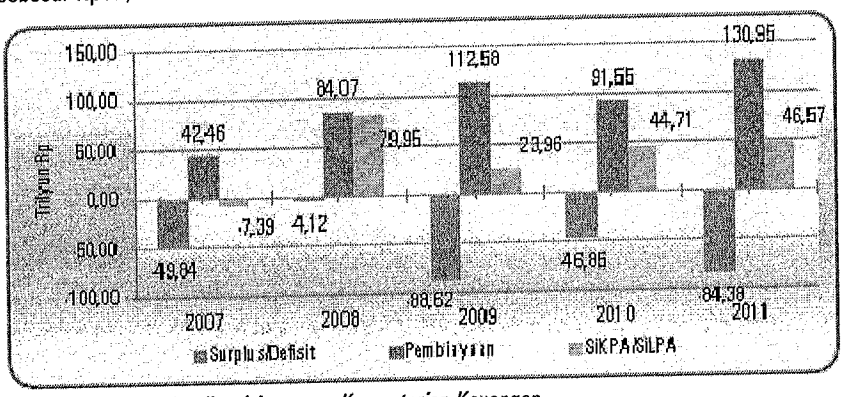

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 36. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2007-2011

Suspen

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah, diperlukan keandalan data dan informasi yang antara lain tercermin dari besaran nilai suspen. Suspen merupakan selisih pencatatan transaksi keuangan antara Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan walaupun mekanisme saling uji (*check and balance*) terus diupayakan. Pada tahun 2011 nilai suspen berada pada posisi negatif Rp47,50 miliar atau sebesar 0,0037 persen dari total realisasi belanja negara.

Boks 9. Dampak APBN Terhadap Sektor Riil Tahun 2007-2011

APBN sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal, digunakan Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan APBN dapat mempengaruhi kondisi perekonomian melalui peran strategis yang dimiliki berupa kebijakan yang bersifat ekspansif pada saat ekonomi lesu ataupun kontraktif pada saat ekonomi sedang *overheating*. Besaran dan alokasi pada APBN berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor riil, sektor moneter, dan sektor lainnya. Kebijakan anggaran pada sisi penerimaan bertujuan untuk mendorong aktivitas perekonomian melalui kebijakan perpajakan, sedangkan yang dilakukan dari sisi belanja diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Implikasi besaran APBN utamanya terhadap sektor riil dapat diketahui terutama dari dua komponen yakni konsumsi Pemerintah dan pembentukan modal domestik bruto. Pada tahun 2011, komponen konsumsi Pemerintah berada di level Rp588,08 triliun atau 7,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini mengalami peningkatan 16,16 persen dari realisasi konsumsi Pemerintah tahun 2010. Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp202,171 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB yang bersumber dari realisasi belanja modal Pemerintah Pusat yang mencapai Rp117,85 triliun (1,6 persen PDB) dan realisasi belanja modal dari anggaran yang ditransfer ke daerah sebesar Rp84,32 triliun (1,1 persen PDB). Dengan demikian, dampak APBN TA 2011 terhadap sektor riil mencapai Rp790,26 triliun atau sebesar 10,64 persen dari PDB,

naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 10,2 persen dari PDB.

Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB pada tahun 2011 sebesar 32 persen atau Rp2.378,3 triliun, hal ini berarti kontribusi Pemerintah dalam membentuk PDB adalah sebesar 2,7 persen atau sebesar Rp202,17 triliun dan selebihnya sebesar Rp2.176,13 triliun disumbang oleh sektor swasta.

Tabel 4. Dampak APBN Terhadap Sektor Riil Tahun 2007-2011

1. Konsumsi Pemerintah (a-b)	306,22	7,7	362,99	7,3	463,05	8,2	506,40	7,9	588,08	7,9
a Belanja Barang & Jasa	327,62	8,3	396,51	8,0	494,13	8,8	541,41	8,4	632,82	8,5
Belanja Pegawai	90,31	2,3	112,83	2,3	127,67	2,3	148,08	2,3	175,74	2,4
Belanja Barang	52,93	1,3	55,96	1,1	80,67	1,4	97,60	1,5	124,64	1,7
Belanja Rutin Daerah	169,01	4,3	197,39	4,0	246,86	4,4	274,06	4,3	327,00	4,4
Belanja Lainnya	15,58	0,4	30,33	0,6	38,93	0,7	21,67	0,3	5,44	0,07
b Pendapatan Barang & Jasa	21,40	0,5	33,53	0,7	31,09	0,6	35,01	0,5	44,74	0,6
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto	146,85	3,7	167,81	3,4	137,59	2,5	150,96	2,4	202,17	2,7
Pemerintah Pusat	64,13	1,6	72,77	1,5	75,87	1,4	80,29	1,3	117,85	1,6
Pemerintah Daerah	81,37	2,1	95,04	1,9	61,72	1,1	70,67	1,1	84,32	1,1
Jumlah 1 dan 2	452,07	11,4	530,80	10,7	600,64	10,7	657,36	10,2	790,26	10,64

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Tabel 5. Presentase Anggaran Dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2011

Pendapatan Negara dan Hibah	**1.169,91**	**15,8**	**1.210,60**	**16,3**
1. Penerimaan Perpajakan	878,69	11,8	873,87	11,8
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	831,75	11,2	819,75	11,0
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	46,94	0,6	54,12	0,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	286,57	3,9	331,47	4,5
a. Penerimaan SDA	191,98	2,6	213,83	2,9
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	28,84	0,4	28,18	0,4
c. Pendapatan PNBP lainnya	50,34	0,7	69,37	0,9
d. Pendapatan BLU	15,42	0,2	20,10	0,3
3. Penerimaan Hibah	4,66	0,1	5,25	0,07
Belanja Negara	**1.320,75**	**17,8**	**1.294,99**	**17,4**
1. Belanja Pemerintah Pusat	908,24	12,2	883,72	11,9
a. Belanja Pegawai	184,09	2,5	175,74	2,4
b. Belanja Barang	142,34	1,9	124,64	1,7
c. Belanja Modal	144,57	1,9	117,85	1,6
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	106,58	1,4	93,26	1,3
e. Belanja Subsidi	238,47	3,2	295,36	4,0
f. Belanja Hibah	0,43	0,01	0,30	0,004
g. Belanja Bantuan Sosial	77,47	1,1	71,10	1,0
h. Belanja Lain-lain	14,30	0,2	5,47	0,1
2. Transfer ke Daerah	**412,51**	**5,6**	**411,32**	**5,5**
a. Dana Perimbangan	347,54	4,7	347,25	4,7
i. Dana Bagi Hasil	96,77	1,3	96,91	1,3
ii. Dana Alokasi Umum	225,53	3,0	225,53	3,0
iii. Dana Alokasi Khusus	25,23	0,3	24,80	0,3
b. Otonomi Khusus dan Penyesuaian	64,97	0,9	64,08	0,9
i. Dana Otonomi Khusus	10,42	0,1	10,42	0,1
ii. Dana Penyesuaian	54,59	0,7	53,66	0,7
Defisit Anggaran	**(150,84)**	**(2,0)**	**(84,40)**	**(1,1)**
Pembiayaan	**150,84**	**2,0**	**130,95**	**1,8**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Tabel 6
Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Sumber
1	Nilai PDB Harga Konstan (Rp Triliun)	1.964,0	2.082,1	2.177,0	2.310,7	2.463,2	(1)
2	Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	3.957,4	4.954,0	5.613,4	6.422,9	7.427,1	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	16,4	21,7	24,3	27,0	30,8	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	6,3	6,1	4,5	6,1	6,5	(1)
5	Inflasi (%)	6,6	11,1	2,78	6,96	3,79	(1)
6	Total ekspor (USD miliar)	113,9	136,8	116,49	157,73	203,62	(1)
7	Ekspor Non Migas (USD miliar)	91,9	107,8	97,47	129,68	162,02	(1)
8	Total Impor (USD miliar)	74,4	128,8	96,86	135,61	177,30	(1)
9	Impor Non Migas (USD miliar)	52,5	98,3	77,87	108,24	136,61	(1)
10	Cadangan Devisa (USD Miliar, akhir tahun)	56,9	51,6	66,1	96,2	110,1	(2)
11	Rupiah/USD	9.419,0	10.950	10.408	9.078	8.775	(2)
12	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	707,81	981,60	848,76	995,27	1.210,60	(4)
13	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	757,65	985,73	937,38	1.042,12	1.294,98	(4)
14	Defisit Anggaran (Rp Triliun)	(49,84)	(4,12)	(88,62)	(46,85)	(84,38)	(4)
15	Uang Beredar (Rp Triliun)						
	a. Arti Sempit (M1)	460,8	466,4	506,06	518,45	613,49	(2)
	b. Arti Luas (M2)	1.888,1	1.883,9	1.865,06	2.206,02	2.707,81	(2)
16	Kredit Perbankan (Rp Triliun)	787,1	1.315,7	1.408,67	1.796,0	2.117,96	(2)
17	Suku Bunga (% per tahun)						
	a. SBI 1 bulan	9,75	9,2	6,46	6,32		(2)
	b. SBI 3 bulan		10,75	6,59	6,57		(2)
	c. Deposito 1 bulan	8,96	8,2	6,87	6,78	6,35	(2)
	d. Kredit Modal Kerja	15,1	15,2	13,69	12,83	12,16	(2)
	e. Kredit Investasi	15,1	14,4	12,96	12,28	12,04	(2)
18	IHSG BEJ	1.805,5	1.355,0	2.534,0	3.704	3.822	(2)
19	Harga Minyak (USD/Barrel)	72,3	96,13	61,5	79,4	111,5	(5)
20	Lifting Minyak (Barrel/hari)	909	931	952	954	898	(3)
21	Rasio Utang terhadap PDB (DSR, %)	36,0	33	28	26	25,4	(3)

Keterangan:
Sumber :
(1) Badan Pusat Statistik
(2) Bank Indonesia
(3) Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
(4) Laporan Realisasi APBN, Kementerian Keuangan
(5) Kementerian ESDM

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga (K/L), beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Untuk LKPP Tahun 2011, entitas pelaporan keuangan tingkat K/L dan BUN, serta entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup, meliputi:

Daftar entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2011	2010
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	70	36
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.602	802
5	BA 006	Kejaksaan Agung	517	517
6	BA 007	Sekretariat Negara	17	17
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	763	750
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	142	142
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	256	244
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	753	756
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.067	1.069
12	BA 018	Kementerian Pertanian	2.733	1.967
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	109	176
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	93	92
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	680	676
16	BA 023	Kementerian Pendidikan Nasional	396	377
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.185	448
18	BA 025	Kementerian Agama	6.961	4.381
19	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.009	802
20	BA 027	Kementerian Sosial	284	206
21	BA 029	Kementerian Kehutanan	403	358
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	745	698
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.024	1.072
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	1
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	1
27	BA 040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	210	88
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset dan Teknologi	5	11
30	BA 043	Kementerian Lingkungan Hidup	48	48
31	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	36	44
32	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7
33	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	1
34	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
35	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1	1
36	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
37	BA 054	Badan Pusat Statistik	484	484
38	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1	1
39	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	461	460
40	BA 057	Perpustakaan Nasional	35	34

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2011	2010
41	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	60	59
42	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.133	1.072
43	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	39	39
44	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
45	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	39	39
46	BA 066	Badan Narkotika Nasional	74	11
47	BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	40	175
48	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
49	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
50	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	183	187
51	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	531	532
52	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
53	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
54	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50	50
55	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	21	22
56	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
57	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	19	19
58	BA 083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1	4
59	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
60	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
61	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	13	13
62	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	34	33
63	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	13	13
64	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	31	31
65	BA 090	Kementerian Perdagangan	311	165
66	BA 091	Kementerian Perumahan Rakyat	42	40
67	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	34	34
68	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
69	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
70	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
71	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
72	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	24	24
73	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	1
74	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
75	BA 107	Badan SAR Nasional	25	25
76	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
77	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu *)	1	-
78	BA 110	Ombudsman RI *)	1	-
79	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan *)	32	-
80	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.01	Pengelolaan Utang **)	1	1
	BA 999.02	Hibah **)	1	2
	BA 999.03	Investasi Pemerintah **)	4	1
	BA 999.04	Penerusan Pinjaman **)	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah **)	3	3
	BA 999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain **)	-	127
	BA 999.07	Belanja Subsidi **)	15	7
	BA 999.08	Belanja Lain-lain **)	180	664
	BA 999.99	Transaksi Khusus **)	-	-
	BA 999.-	Badan Lainnya	-	-
		Jumlah Satker	**25.143**	**20.246**

**) Bagian Anggaran tersebut baru terbentuk sejak tahun anggaran 2011*

***) BA tersebut merupakan entitas pelaporan, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LKBUN.*

LKPP Tahun 2011 ini mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi Pemerintah, seperti pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), Otorita Asahan, LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI); dan
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, seperti Badan Pengelola Minyak dan Gas (BPMIGAS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini Indonesia.

LKPP Tahun 2011 ini tidak mencakup entitas:

- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- Unit Badan Lainnya yang belum menyajikan/menyampaikan laporan keuangan.

Namun, penyertaan modal (investasi) pemerintah pada perusahaan negara (BUMN dan Non BUMN), dan BHMN, nilainya disajikan sebagai investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI. Selain Laporan Arus Kas, Menteri Keuangan selaku BUN juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca atas transaksi Utang Pemerintah, Hibah, Penerusan Pinjaman, Investasi/Penyertaan Modal, Transfer ke Daerah, Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, dan Pembiayaan yang dikonsolidasikan ke dalam LKPP.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada

diagram di bawah ini.

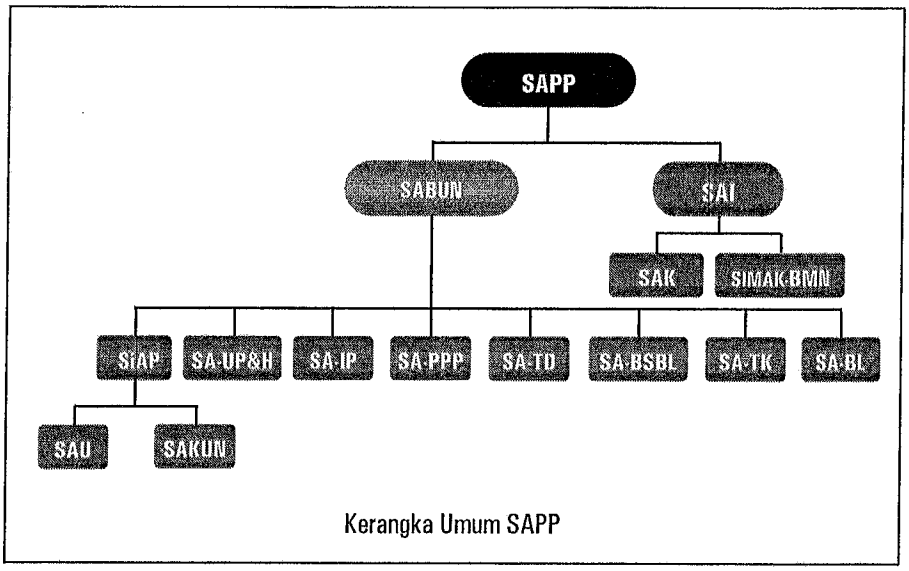

Kerangka Umum SAPP

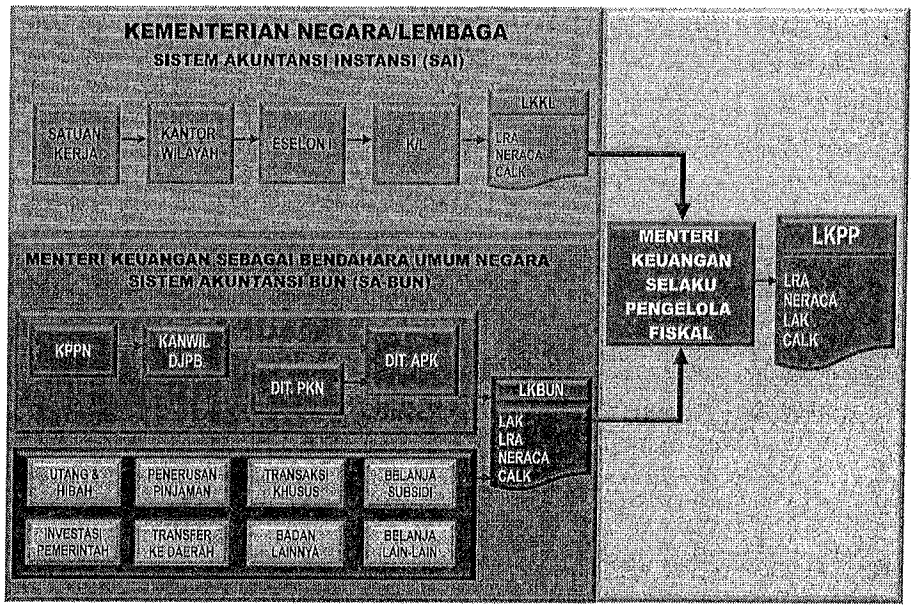

Alur Penyusunan LKPP

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

   Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

   - Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2011 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan

data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN.

- Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2011 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja K/L. Apabila terjadi perbedaan antara realisasi belanja berdasarkan data K/L dengan data BUN, perbedaan tersebut disajikan pada Laporan Realisasi APBN sebagai "Suspen."
- Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2011 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang riil masuk ke atau keluar dari Kas Negara.

2. Neraca

   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh K/L dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kas Umum Negara (KUN) dan Neraca Bagian Anggaran – Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2011 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening 502.000000980, rekening 600.502411980, rekening 600.502111980, rekening 519.000122980, rekening 608.001411980, rekening 608.000111980, rekening SAL, dan rekening Penempatan Uang Negara), termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah, serta pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II (Pernyataan SAP (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual). Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap azas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2011 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *Domestic Market Obligation* (DMO) *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun

saat kas diterima/keluar dari KUN

pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Utang. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

(4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.
- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kas dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara disajikan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.
- Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan, dana lancar BLU, serta kas dari hibah langsung dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Termasuk dalam Kas

Lainnya dan Setara Kas adalah rekening cadangan subsidi/PSO dan Dana Bagi Hasil yang sampai dengan akhir Februari 2012 disetorkan ke kas negara.

- Kas pada BLU yang disajikan merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Temasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun 2011 ini telah menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lembar muka Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan pada Uang Muka Belanja.

  Piutang macet K/L yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan pada LKPP Tahun 2011 disajikan dalam kelompok piutang awalnya (sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya) dengan penyisihan 100%, sedangkan pada LKPP Tahun 2010 disajikan dalam kelompok Aset Lain-lain.
- Termasuk dalam persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan didasarkan pada perhitungan fisik pada tanggal pelaporan, kecuali untuk persediaan dalam bentuk beras.

  Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang ada di BLU.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR, kelompok petani, nelayan, dan kelompok usaha lainnya.
- Investasi Non Permanen Lainnya berupa dana pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang telah diinvestasikan.

Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha atau badan hukum lainnya.

- Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Bada Hukum Milik Negara (BHMN), dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN pada perusahaan negara yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.
- PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan).
- Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari belanja K/L yang diserahkelolakan kepada BUMN di masing-masing sektor. Pengalihan BMN dari K/L menjadi aset BUMN berdasarkan dokumen Berita Serah Terima Operasi (BASTO). Metode pencatatan BPYBDS masih variatif, sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai hasil *review* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- PMN pada BHMN Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor) disajikan sebesar kekayaan bersih (ekuitas) PTN tersebut posisi per 31 Desember 2010 dikurangi dengan kas yang telah disahkan sebagai pendapatan tahun anggaran 2011 pada Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional.

- PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes.* Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.
- Pada LKPP Tahun 2010, investasi pada badan-badan lainnya yang tidak termasuk perusahaan negara, seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran disajikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Pada LKPP Tahun 2011, investasi pada BI dan LPS disajikan sebagai bagian dari Investasi Permanen PMN, sedangkan investasi pada Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran direklasifikasi sebagai bagian dari Aset Lainnya.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L per 31 Desember 2011 dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2011.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didepresiasi.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2011, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan penyusutan, serta umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap belum ditetapkan. Penerapan penyusutan aset tetap akan dilaksanakan mulai pelaporan keuangan tahun 2013. Untuk tahun 2011, penyusutan aset tetap dilaksanakan untuk satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU yang telah melaksanakan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Nilai perolehan, penyusutan, dan nilai buku atas aset tetap pada satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU diungkapkan dalam CaLK.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Piutang Jangka Panjang Lainnya, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).
- Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang

disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, Dana Abadi Umat, dana Biaya Penyelenggaraan Iuran Haji, dan kas besi perwakilan RI di luar negeri, serta dana lain yang sejenis.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada rekening cadangan subsidi/PSO dan rekening cadangan Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2011 disajikan sebesar dana cadangan yang sampai dengan akhir Februari 2012 telah disalurkan kepada pihak ketiga/pemerintah daerah. Sementara itu, rekening cadangan subsidi/PSO dan Dana Bagi Hasil yang sampai dengan akhir Februari 2012 disetorkan ke kas negara disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas dengan akun lawan Pendapatan yang Ditangguhkan.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, serta hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.
- Aset KKKS dan Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) pada LKPP Tahun 2010 disajikan pada kelompok Aset Lain-lain, sedangkan pada LKPP Tahun 2011 disajikan terpisah dari Aset Lain-lain.
- Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun 2011 adalah aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum diserahkan kepada Pemerintah, dan dapat diyakini keberadaan dan keandalan nilainya. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, serta yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diyakini, tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

  Terhadap pengakuan Aset KKKS, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan Aset KKKS.
- Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), seperti Otorita Batam, maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

  Pada LKPP Tahun 2010, nilai kekayaan bersih (ekuitas) pada Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran disajikan sebagai Investasi Permanen Lainnya.
- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunanya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan, seluruh piutang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang. Pada LKPP Tahun 2010, penerusan pinjaman yang berasal dari NPPP tahun 2009 dan setelah tahun 2009 disajikan sebagai Aset Lainnya, sedangkan penerusan pinjaman yang berasal dari NPPP sebelum tahun 2009 disajikan sebagai Investasi Non Permanen. Pada LKPP Tahun 2011, termasuk dalam kelompok Penerusan Pinjaman adalah reklasifikasi Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) dari Investasi Jangka Panjang.

- Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 pada LKPP tahun sebelumnya disajikan sebagai Dana Bergulir, dan pada LKPP Tahun 2011 disajikan sebagai Aset Lainnya.
- TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun 2011 ini telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lembar muka Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.
- Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds, zero coupon bonds, international bonds,* Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2011 disajikan sebagai bagian lancar.

- ***Fixed Rate (FR) Bonds*** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Obligasi Negara Ritel (ORI)*** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Variable Rate (VR) Bonds*** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Zero Coupon (ZC) Bonds*** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi 31 Desember 2011, terdapat 2 seri ZC dengan *outstanding* berkisar dari Rp1,25 triliun dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Zero Coupon dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)*** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU002, SU004, SU007, dan SRBI01
- ***SU-002 dan SU-004*** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen

per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

- ***SU-007*** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. angsuran pokok SU007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- ***SRBI-01*** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun.
- ***International Bonds*** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

  Pada akhir tahun 2011, terdapat 11 seri *fixed rate* SBSN dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,15% sampai dengan 12%. Selain itu terdapat 7 seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2021 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampai dengan 8,00%

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liablility* (*unfunded liability*) berupa kewajiban pensiun PNS diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan *Past service*

liablility terkait Tabungan Hari Tua PNS disajikan dalam Neraca.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Khusus untuk akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya (kelompok Aset Lainnya-aset tidak lancar) berupa dana pihak ketiga yang dikelola Pemerintah seperti dana Bapertarum, serta dana yang akan diserahkan kepada pihak ketiga seperti dana rekening cadangan Dana Bagi Hasil dan rekening cadangan subsidi, mempunyai akun lawan kewajiban jangka pendek.

(8) Kurs Mata Uang Asing

Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
  b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, seperti USD dan Yen, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan. Namun, transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (*spot rate*) pada tanggal transaksi. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011:

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	9.068,00	8.991,00
Dolar Australia [AUD]	1	9.202,68	9.142,51
Dolar Canada [CAD]	1	8.881,50	8.986,97
Franc Swiss [CHF]	1	9.636,07	9.600,14
Yuan China [CNY]	1	1.439,16	1.357,61
Kroner Denmark [DKK]	1	1.579,22	1.603,79
EURO [EUR]	1	11.738,99	11.955,79
Poundsterling Inggris [GBP]	1	13.969,27	13.893,80
Yen Jepang [JPY]	100	11.680,32	11.028,53
Korean Won [KRW]	1	7,84	7,97

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2011 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan kas dalam valas, bagian lancar penerusan pinjaman dan utang luar negeri disajikan pada ekuitas dana lancar, sedangkan selisih kurs yang terkait dengan penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri dan SBN Valas disajikan pada ekuitas dana investasi.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas):

a. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:
   - kurs transaksi pada saat konversi dikurangi kurs tengah BI hari sebelumnya dikalikan dengan mata uang asing yang dikonversi;

- ditambah dengan proporsi akumulasi selisih kurs yang belum terealisasi sampai dengan hari sebelumnya dari mata uang asing yang dikonversi terhadap total mata uang asing.

Selisih kurs untung diakui sebagai PNBP Lainnya, sedangkan selisih kurs rugi diakui sebagai Belanja Lain-lain, dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

b. Selisih kurs yang belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang belum terealisasi tersebut disajikan pada Neraca sebagai penambah atau pengurang ekuitas setelah memperhitungkan proporsi selisih kurs dari mata uang asing yang telah terealisasi.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas:

Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

a. *Outstanding* valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi *outstanding* valas dikali kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan.
b. Kurs penarikan terakhir penarikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   - *Loan* yang penarikan terakhirnya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2004
   - *Loan* yang penarikan terakhirnya tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan kurs dengan membagi nilai rupiah dengan valas pada tanggal penarikan terakhir.
   - Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *outstanding* (2011) maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.

Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

(9) Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah 4 (empat) tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR-NAD Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2011, Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias yang disajikan pada LKPP Tahun 2011 ini adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK dikurangi dengan aset/kewajiban yang telah diserahkan kepada pihak lain sampai dengan 31 Desember 2011.

Daftar Perubahan Kebijakan Akuntansi

(10) Daftar Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada LKPP Tahun 2011 terdapat beberapa perubahan kebijakan akuntansi dari LKPP Tahun 2010, yaitu:

No.	Kebijakan Akuntansi	LKPP Tahun 2011	LKPP Tahun 2010
1.	Transaksi Pajak Ditanggung Pemerintah (Pajak DTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP)	Pendapatan Pajak DTP, Pendapatan BM-DTP, Belanja Subsidi Pajak DTP, dan Belanja Subsidi BM-DTP dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas	Pendapatan Pajak DTP, Pendapatan BM-DTP, Belanja Subsidi Pajak DTP, dan Belanja Subsidi BM-DTP hanya dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak dilaporkan pada Laporan Arus Kas
2.	Transaksi Pendapatan Hibah dalam Bentuk Barang/Jasa	Pendapatan Hibah dan Belanja Barang/Modal atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak dilaporkan pada Laporan Arus Kas	Hanya diungkapkan di CaLK
3.	Pengembalian Dana Talangan (*reimburse*) Uang Muka dari Rekening BUN	Dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan.	Dicatat sebagai Kiriman Uang Masuk dan menambah penyesuaian SiLPA
4.	Kas di rekening: • Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan dan Pencairan Aset BPR (Nomor 500.000004980) • Menteri Keuangan Pengeluaran untuk SBN (Nomor 502.000001980) • Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham PT Telkom di Pasar Domestik (Nomor 510.000239980) • BUN Untuk Obligasi dalam Rangka Penjaminan (Nomor 502.000002980) • Rekening Depkeu U/Penampungan Hibah Dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD (Nomor 602.074411980)	Disajikan pada Aset Lainnya sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya"	Disajikan pada Aset Lancar sebagai "Kas di Rekening Pemerintah Lainnya"
5.	Dana Cadangan Subsidi/PSO dan Dana Bagi Hasil	Dana Cadangan Subsidi/ PSO dan Dana Bagi Hasil yang sampai dengan akhir Februari 2012 disetorkan ke kas negara disajikan sebagai "Kas Lainnya dan Setara Kas" dengan akun lawan "Pendapatan yang Ditangguhkan" Dana Cadangan Subsidi/ PSO dan Dana Bagi Hasil yang sampai dengan akhir Februari 2012 disalurkan kepada pihak ketiga disajikan sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" dengan akun lawan "Utang Subsidi" dan "Utang Kepada Pihak Ketiga"	Seluruhnya disajikan pada "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" dengan akun lawan "Utang Subsidi" dan "Utang Kepada Pihak Ketiga"

6.	Piutang macet K/L yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan	Disajikan dalam kelompok piutang awalnya (sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya) dengan penyisihan 100%	Disajikan dalam kelompok Aset Lain-lain
7.	Investasi pada BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran	Investasi pada BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) disajikan sebagai "Investasi Permanen PMN" Aset/kewajiban Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran disajikan sebagai "Aset Lainnya pada Unit Pemerintah Lainnya" dengan akun lawan "Diinvestasikan pada Aset Lainnya"	Seluruhnya disajikan sebagai "Investasi Permanen Lainnya"
8.	Rekening Dana Investasi/ Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD)	Disajikan pada kelompok Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	Disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang
9.	Ekuitas Bapertarum	Hanya diungkapkan dalam CaLK sebagaimana perlakukan untuk Dana Pensiun pada PT Taspen	Disajikan sebagai "Aset yang Dibatasi Penggunaannya" dengan akun lawan "Utang Kepada Pihak Ketiga"
10.	Aset KKKS dan Aset Eks BPPN	Disajikan pada Aset Lainnya namun terpisah dari kelompok Aset Lain-lain	Disajikan dalam kelompok "Aset Lain-lain"
11.	Aset KUMK, KKPA Bagi Hasil Bank Muamalat, Dana Induk Lingkungan	Disajikan pada Aset Lainnya sebagai "Piutang Jangka Panjang"	Disajikan pada pada Aset Lainnya sebagai "Aset Lain-lain"
12.	*Endowment Fund* (Dana Pengembangan Pendidikan)	Disajikan pada Aset Lainnya sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya"	Disajikan pada pada Aset Lainnya sebagai "Aset Lain-lain"
13.	Metode penghitungan selisih kurs kas dalam mata uang asing	Lihat Kebijakan Akuntansi Mata Uang Asing	Selisih kurs terealisasi dihitung dari: kurs transaksi pada saat konversi dikurangi kurs tengah BI hari sebelumnya dikalikan dengan mata uang asing yang dikonversi. Kurs yang belum terealisasi pada tanggal pelaporan dihitung dari penjabaran kurs tengah BI pada tanggal pelaporan dibandingkan dengan penjabaran kurs tengah BI hari sebelumnya.
14.	Metode penghitungan selisih kurs utang dalam mata uang asing	Lihat Kebijakan Akuntansi Mata Uang Asing	Selisih kurs yang belum terealisasi dihitung dari selisih nilai buku utang pada tanggal pelaporan (dengan kurs tengah BI) dibandingkan dengan nilai buku penambahan dan pengurangan utang (kurs transaksi).

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2011 adalah sebesar Rp1.210.599.653.359.415 atau mencapai 103,48 persen dari target APBN-P TA 2011 sebesar Rp1.169.914.639.272.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp873.873.892.399.381, PNBP sebesar Rp331.471.821.098.730, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.253.939.861.304. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp3.415.120.010.085 serta dalam Pendapatan Hibah termasuk Pendapatan Hibah non kas (barang/jasa/surat berharga) sebesar Rp995.722.324.430.

Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 mengalami kenaikan Rp215.328.141.968.072 atau 21,64 persen jika dibandingkan dengan TA 2010. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP sejak TA 2007 terlihat pada Grafik 37.

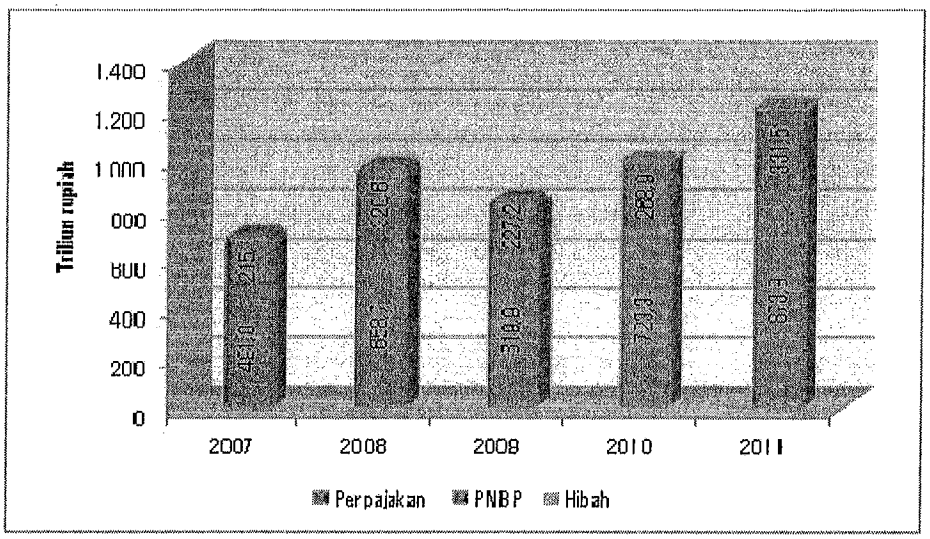

Grafik 37: Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2007 - 2011

Realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.294.999.146.475.024 atau 98,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2011 sebesar Rp1.320.751.314.516.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2010 adalah sebesar Rp1.042.117.219.744.817. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp883.721.886.196.519, Transfer ke Daerah sebesar Rp411.324.764.631.790, dan terdapat Suspen sebesar minus Rp47.504.353.285. Suspen tersebut merupakan selisih Belanja Negara menurut catatan Kas Negara dan menurut Kementerian Negara/Lembaga. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2007 dapat dilihat pada Grafik 38.

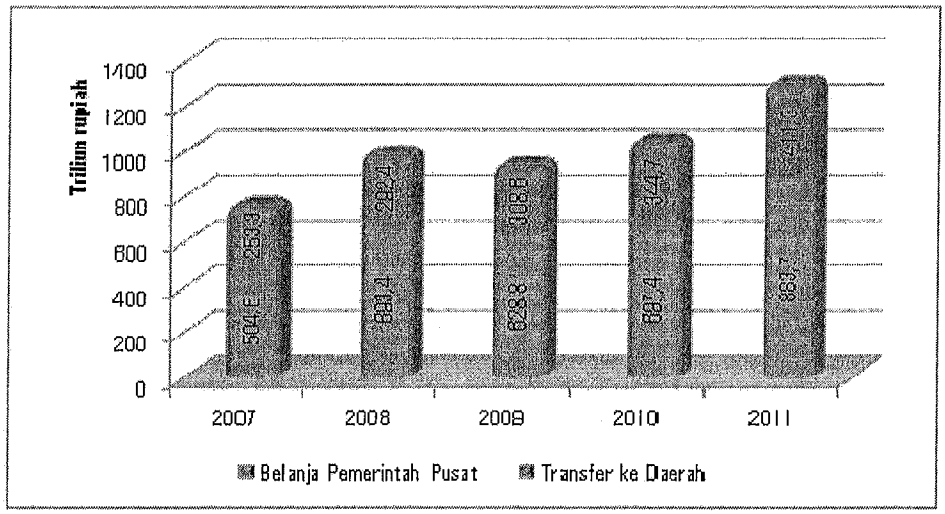

Grafik 38: Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2007 - 2011

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.210.599.653.359.415 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.294.999.146.475.024, maka terjadi Defisit Anggaran pada TA 2011 sebesar Rp84.399.493.115.609

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2011 adalah sebesar Rp130.948.869.624.420, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp148.748.034.850.068 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp17.799.165.225.648.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2011 sebesar Rp46.549.376.508.811.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.210,60 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 adalah sebesar Rp1.210.599.653.359.415, berarti mencapai 103,48 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.169.914.639.272.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 39.

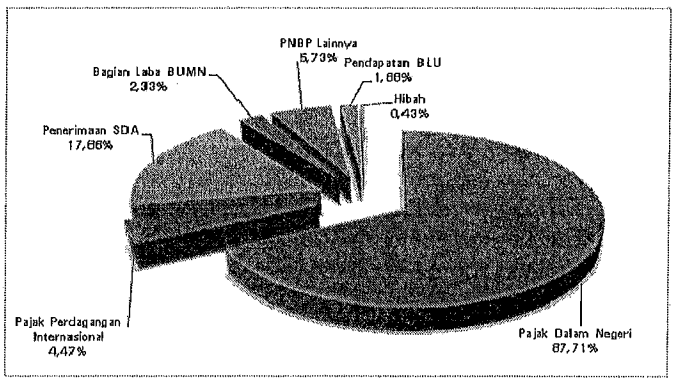

Grafik 39: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan Rp873,87 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2011 adalah sebesar Rp873.873.892.399.381 atau mencapai 99,45 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp878.685.216.762.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2011 lebih besar Rp150.567.223.777.642 atau 20,82 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.338.636.314.000, dan Bea Masuk DTP sebesar Rp76.483.696.085.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Penerimaan Pajak Dalam Negeri Rp819,75 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp819.752.426.342.423 atau mencapai 98,56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp831.745.348.636.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2011 lebih besar Rp125.360.291.411.132 atau 18,05 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
PPh Migas	73.095.496.754.938	58.872.731.112.807
PPh Nonmigas	354.683.553.082.514	295.268.135.134.989
PPh Fiskal	4.026.576.864	11.458.427.304
PPh Ditanggung Pemerintah	3.338.636.314.000	2.893.212.477.088
PPN dan PPnBM	277.800.076.679.384	230.604.864.967.823
PBB	29.893.164.324.396	28.580.589.978.740
BPHTB	(730.151.679)	8.026.429.073.342
Cukai	77.010.010.613.795	66.165.922.512.567
Pajak Lainnya	3.928.192.148.211	3.968.791.246.631
Jumlah	**819.752.426.342.423**	**694.392.134.931.291**

Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan atas Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.338.636.314.000 dalam bentuk Subsidi.

Peningkatan Pendapatan Pajak Dalam Negeri disebabkan antara lain oleh kenaikan PPh Migas karena adanya pertumbuhan positif pada penerimaan yang berasal dari penerimaan PPh Minyak Bumi dan Gas Alam berupa kenaikan harga minyak dunia.

Pada TA 2011 tidak terdapat penerimaan BPHTB, karena sejak TA 2011 pemungutan BPHTB telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah setempat. Realisasi negatif atas BPHTB merupakan pengembalian atas BPHTB tahun anggaran sebelumnya.

Kenaikan Pendapatan Cukai pada TA 2011 disebabkan oleh peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Januari 2011 sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.011/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Selain itu, kenaikan juga disebabkan peningkatan efektivitas pengawasan peredaran MMEA melalui pelekatan pita cukai.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional Rp54,12 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 adalah sebesar Rp54.121.466.056.958, atau mencapai 115,30 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp46.939.868.126.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 lebih besar Rp25.206.932.366.510 atau naik 87,18 persen dibandingkan dengan realisasi

TA 2010. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Bea Masuk	26.265.863.309.375	20.016.826.394.532
Bea Keluar	28.855.602.747.583	8.897.707.295.916
Jumlah	**54.121.466.056.958**	**28.914.533.690.448**

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2011, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp76.483.696.085.

Kenaikan Pendapatan Bea Masuk pada TA 2011 tersebut disebabkan oleh meningkatnya importasi yang ditunjukkan dengan naiknya *Dutiable impor* sebesar USD30,46 miliar atau 27,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dimana nilai *Dutiable Import* tahun 2011 sebesar USD140,83 miliar sedangkan tahun 2010 sebesar USD110,37 miliar.

Kenaikan Pendapatan Bea Keluar pada TA 2011 disebabkan kenaikan tarif Bea Keluar CPO pada tahun 2011, kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO dan turunannya sebagai dampak meningkatnya harga CPO di pasar internasional, dan kenaikan volume ekspor CPO dan turunannya pada tahun 2011.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp331,47 triliun

Realisasi PNBP TA 2011 adalah sebesar Rp331.471.821.098.730 atau mencapai 115,67 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp286.567.317.002.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2011 lebih besar Rp62.529.964.889.888 atau 23,25 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp213,82 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2011 adalah sebesar Rp213.823.349.552.827, atau mencapai 111,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp191.976.022.718.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2011 lebih besar Rp44.997.907.232.541 atau 26,65 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	141.303.493.452.283	111.814.923.202.135
Pendapatan Gas Alam	52.187.085.923.633	40.918.314.502.416
Pendapatan Pertambangan Umum	16.369.789.735.678	12.646.750.881.580
Pendapatan Kehutanan	3.216.476.006.406	3.009.672.120.638
Pendapatan Perikanan	183.802.161.080	91.995.180.732
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	562.702.273.747	343.786.432.785
Jumlah	**213.823.349.552.827**	**168.825.442.320.286**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Peningkatan Pendapatan Minyak Bumi pada TA 2011 terutama disebabkan oleh naiknya harga rata-rata minyak mentah Indonesia, yaitu tahun 2010 rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapai USD78.07/barrel sementara pada tahun 2011 harganya naik hingga pada level USD109.94/barrel. Peningkatan Pendapatan Gas Alam pada TA 2011 antara lain disebabkan peningkatan pada penerimaan LNG sebagai akibat kenaikan rata-rata ICP tahun 2011 dari tahun 2010.

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp28,18 triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2011 adalah sebesar Rp28.183.973.126.600 atau mencapai 97,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp28.835.823.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2011 lebih kecil Rp1.912.959.567.665 atau turun 6,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	3.627.944.571.970	3.622.669.340.835
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	24.556.028.554.630	26.474.263.353.430
Jumlah	**28.183.973.126.600**	**30.096.932.694.265**

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2011 tersebut, sebesar 78,50 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

1	PT Pertamina	5.623.103.550.000
2	PT PLN	4.545.000.000.000
3	PT Telkom	3.056.196.863.756
4	PT Perusahaan Gas Negara	2.141.920.001.444
5	PT Freeport Indonesia	1.761.137.250.000
6	PT Bank Mandiri	1.688.383.760.000
7	PT Bank Rakyat Indonesia	980.560.000.000
8	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	838.674.325.125
9	PT Semen Gresik	751.098.836.530
10	PT Bank Negara Indonesia	738.263.011.873
Total 10 BUMN		**22.124.337.598.728**

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya Rp69,36 triliun

Realisasi PNBP Lainnya TA 2011 adalah sebesar Rp69.360.502.832.532 atau 137,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp50.339.436.023.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2011 lebih besar Rp9.931.863.673.512 atau naik 16,71 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pendapatan Penjualan dan Sewa	21.650.214.589.444	16.498.911.495.199
Pendapatan Jasa	26.634.516.584.922	25.416.545.489.101
Pendapatan Bunga	4.893.238.511.754	7.352.406.187.064
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	240.761.503.805	166.607.987.382
Pendapatan Pendidikan	2.965.915.235.801	2.983.449.553.759
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	92.848.578.390	213.767.299.728
Pendapatan Iuran dan Denda	1.319.106.624.583	704.797.429.654
Pendapatan Lain-lain	11.563.901.203.833	6.092.153.717.133
Jumlah	**69.360.502.832.532**	**59.428.639.159.020**

Pendapatan lain-lain dari penerimaan bukan pajak lainnya berasal dari pendapatan penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp7.986.615.365.380, pendapatan pelunasan piutang sebesar Rp26.715.895.818, pendapatan dari penutupan rekening sebesar Rp628.093.309.285, pendapatan dari selisih kurs sebesar Rp2.713.540.544.637 serta pendapatan lain-lain sebesar Rp208.936.088.712.

Pendapatan BLU Rp20,10 triliun

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Pendapatan BLU TA 2011 adalah sebesar Rp20.103.995.586.771 atau 130,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp15.416.035.261.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2011 lebih besar Rp9.513.153.551.501 atau naik 89,82 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	17.215.810.979.582	9.509.402.889.281
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	102.760.116.486	85.209.252.626
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	503.261.094.628	312.384.162.758
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	**17.821.832.190.696**	**9.906.996.304.665**
Pendapatan Hibah BLU	167.462.819.227	34.976.353.539
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	647.563.491.201	172.630.678.219
Pendapatan BLU Lainnya	1.467.137.085.647	476.238.698.847
Jumlah	**20.103.995.586.771**	**10.590.842.035.270**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Peningkatan Pendapatan BLU TA 2011 terutama disebabkan diakuinya pendapatan pada 7 (tujuh) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pada Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sebagai Pendapatan BLU sebesar Rp5.484.567.614.814.

Penerimaan Hibah Rp5,25 triliun

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2011 adalah sebesar Rp5.253.939.861.304 atau 112,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.662.105.508.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2011 lebih besar Rp2.230.953.300.541 atau naik 73,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2011 termasuk realisasi Pendapatan Hibah Non Kas (barang dan jasa) sebesar Rp552.196.724.430. Pendapatan Hibah Non Kas tersebut dicatat dengan jumlah yang sama pada sisi belanja. Pendapatan Hibah Non Kas tidak dicatat pada Laporan Arus Kas.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Belanja Negara Rp1.294,98 triliun

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2011 adalah sebesar Rp1.294.999.146.475.024 atau 98,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.320.751.314.516.000. Belanja Negara TA 2011 lebih besar Rp252.881.926.730.207 atau naik 24,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Belanja Pemerintah Pusat Rp883,70 triliun

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 adalah sebesar Rp883.721.886.196.519 atau 97,30 persen dari APBN-P sebesar Rp908.243.422.687.800. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 lebih besar Rp186.315.506.009.342 atau 26,72 persen dari

Realisasi TA 2010.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp464.848.316.511.891 atau 52,60 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp418.873.569.684.629. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp61.060.518.204.464 atau 14,57 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.
Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 40.

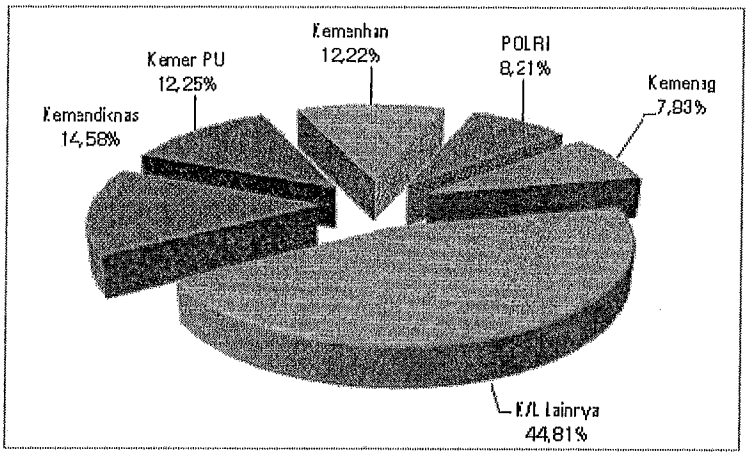

Grafik 40: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2011

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2011 dan 2010 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 8.

Tabel 7
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2011 dan TA 2010
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
01	Pelayanan Umum	508.945.453.627.554	471.557.571.038.693
02	Pertahanan	51.120.989.252.897	17.080.482.218.813
03	Ketertiban dan Keamanan	21.691.237.865.477	13.835.412.297.355
04	Ekonomi	87.246.161.514.834	52.178.365.068.333
05	Lingkungan Hidup	8.615.095.671.607	6.549.610.988.550
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	22.937.807.929.477	20.053.181.892.237
07	Kesehatan	14.088.769.256.193	18.793.019.106.219
08	Pariwisata dan Budaya	3.553.453.017.287	1.408.681.931.374
09	Agama	1.424.732.819.450	878.756.933.633
10	Pendidikan	97.854.046.904.341	90.818.313.946.039
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	3.906.376.361.526	3.341.614.948.781
00	Tidak ada fungsi	62.337.761.975.876	911.369.817.150
	Total	**883.721.886.196.519**	**697.406.380.187.177**

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2011 dapat terlihat pada Grafik 41.

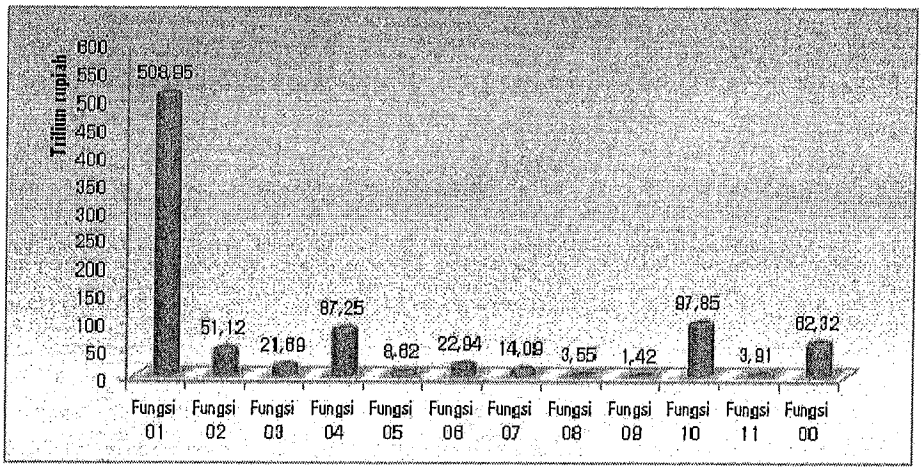

Grafik 41: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2011

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 42.

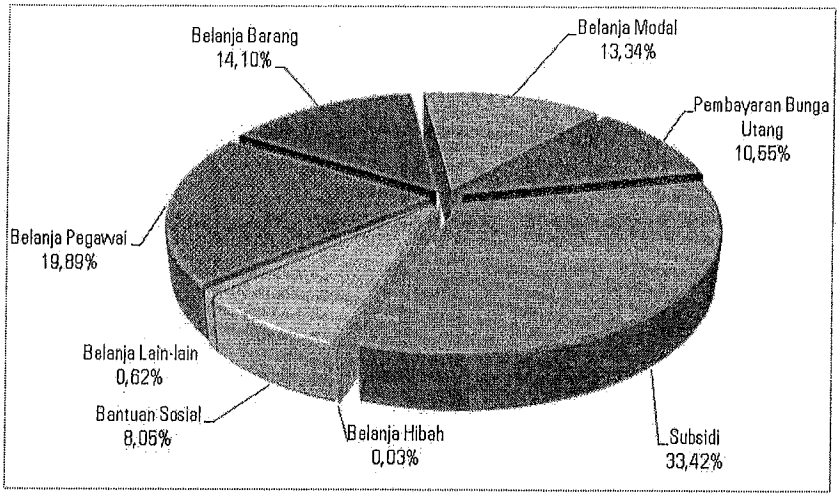

Grafik 42: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2011

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp175,74 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2011 adalah sebesar Rp175.737.918.419.015 yang berarti 95,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp184.088.939.020.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2011 lebih besar Rp27.659.834.320.406 atau 18,68 persen dari realisasi TA 2010. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	49.445.102.508.675	42.378.927.317.781
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	40.263.378.647.670	37.026.799.873.139
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	819.043.606.833	727.848.865.884
Belanja Gaji Dokter PTT	771.007.436.015	690.976.740.462
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	248.850.447.822	165.773.820.773
Belanja Honorarium	1.369.522.161.066	1.453.910.313.846
Belanja Lembur	501.542.768.155	468.392.462.505
Belanja Vakasi	217.880.587.087	248.540.481.180
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	20.337.994.683.749	12.163.454.097.369
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	59.472.181.551.185	50.605.032,969.737
Belanja Asuransi Kesehatan	2.141.251.233.920	1.816.913.001.200
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	150.576.864.996	129.299.057.338
Belanja Cadangan Perubahan Sharing	(374.730.220)	-
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dep. Hub. Pada PT KAI	(39.347.938)	202.215.097.395
Jumlah	**175.737.918.419.015**	**148.078.084.098.609**

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp124,64 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2011 adalah sebesar Rp124.639.479.502.304 yang berarti 87,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp142.335.864.901.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2011 lebih besar Rp27.042.641.102.479 atau naik 27,71 persen dari Realisasi TA 2010. Dalam Belanja Barang TA 2011 termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp469.912.832.050. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Barang Operasional	21.729.366.193.581	20.052.908.959.051
Belanja Barang Non Operasional	42.942.839.212.826	31.489.642.277.566
Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK/TP	82.251.235.675	-
Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan	2.054.644.291.841	-
Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah	2.167.190.771	-
Belanja Jasa	16.360.913.536.031	12.122.304.052.583
Belanja Pemeliharaan	9.284.590.642.833	7.809.477.752.715
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.919.945.204.322	16.772.900.020.797
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.719.352.848.549	1.542.375.569.738
Belanja Barang BLU	12.543.409.145.875	7.807.229.767.375
Jumlah	**124.639.479.502.304**	**97.596.838.399.825**

Belanja Barang BLU sebesar Rp12.543.409.145.875 terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan	4.336.578.718.401	2.544.506.232.879
Belanja Barang	4.590.288.645.438	2.754.048.722.902
Belanja Jasa	1.498.345.274.987	1.086.257.340.653
Belanja Pemeliharaan	421.634.028.720	299.313.699.206
Belanja Perjalanan	346.829.623.278	175.855.804.442
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.349.732.855.051	947.247.967.293
Jumlah	**12.543.409.145.875**	**7.807.229.767.375**

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp117,85 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2011 adalah sebesar Rp117.854.532.071.332 yang berarti 81,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp144.571.840.017.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2011 lebih besar Rp37.567.466.385.667 atau 46,79 persen dari Realisasi TA 2010. Dalam Belanja Modal TA 2011 tidak termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp82.283.892.380.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	3.488.566.777.978	1.783.053.775.727
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.946.011.361.882	28.282.275.864.330
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.705.816.487.069	16.553.253.478.159
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.586.433.921.962	30.165.754.367.386
Belanja Modal Fisik Lainnya	3.342.382.032.693	2.326.404.969.088
Belanja Modal BLU	1.785.321.489.748	1.176.323.230.975
Jumlah	**117.854.532.071.332**	**80.287.065.685.665**

Belanja Modal BLU terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	60.615.528.743	79.579.479.251
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	802.897.438.638	565.857.865.060
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	707.869.155.393	479.744.809.743
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.102.737.074	14.313.393.755
Belanja Modal Fisik Lainnya	181.836.629.900	36.827.683.166
Jumlah	**1.785.321.489.748**	**1.176.323.230.975**

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp93,26 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2011 adalah sebesar Rp93.261.919.810.886 yang berarti 87,50 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp106.583.810.504.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2011 lebih besar Rp4.878.686.046.789 atau lebih besar 5,52 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	57.210.627.839.839	64.560.273.982.091
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	25.547.248.269.356	26.212.133.864.479
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	4.768.589.586.200	2.750.995.750.000
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN LN	514.676.089.450	513.199.205.250
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	3.236.157.597.300	2.073.333.477.100
Belanja Pembayaran Discount SUN LN	373.905.900.000	177.338.000.000
Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	310.612.680.000	737.473.500.000
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	51.466.619.000	36.998.773.200
Belanja Pembayaran Denda (Imbalan Bunga Pajak)	1.247.399.871.387	1.321.487.211.977
Belanja Pembayaran Biaya Penerimaan Hibah	1.235.358.354	-
Jumlah	**93.261.919.810.886**	**88.383.233.764.097**

B.2.2.1.5. Subsidi

Subsidi Rp295,36 triliun

Realisasi Subsidi TA 2011 adalah sebesar Rp295.358.229.636.324 yang berarti 123,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp238.466.978.142.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2011 ini lebih besar Rp102.651.180.109.125 atau 53,27 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Subsidi Premium	79.782.409.098.742	38.137.806.140.189
Subsidi Minyak Solar	53.345.090.871.434	21.851.903.691.510
Subsidi Minyak Tanah	9.441.089.427.448	7.509.557.317.106
Subsidi Elpiji	22.592.749.583.351	14.852.055.677.068
Subsidi Pangan	16.539.282.621.000	15.153.810.327.000
Subsidi Listrik	90.447.485.461.331	57.601.620.070.361
Subsidi Benih	96.913.542.095	2.177.487.699.740
Subsidi Pupuk	16.344.587.997.389	18.410.887.781.046
Belanja Subsidi PPh	3.338.636.314.000	2.893.212.477.088
Belanja Subsidi PPN	-	11.066.646.770.468
Belanja Subsidi Pajak Lainnya	-	597.581.839.451
Belanja Subsidi BM	73.117.396.000	257.632.977.488
Belanja Subsidi PT KAI	630.870.912.779	535.000.000.000
Belanja Subsidi PT PELNI	872.752.505.000	600.000.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	256.944.900.000	175.000.000.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	73.359.751.500	63.894.220.390
Subsidi Bunga KPR	611.843.137.443	415.998.562.859
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	179.386.459.289	132.059.678.059
Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	10.070.776.218	-
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	74.504.074.566	42.323.334.937
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	624.165.242.603	223.163.797.257
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	-	2.303.401.468
Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	2.760.047.151	3.442.236.760
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	20.080.545.778	3.660.340.105
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	128.971.207	1.186.849
Jumlah	**295.358.229.636.324**	**192.707.049.527.199**

Terlampauinya realisasi Belanja Subsidi dari anggaran dalam APBN-P dapat terjadi sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang

APBN TA 2011, yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Dalam realisasi subsidi TA 2011 terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2011, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi/PSO sebesar Rp8.895.590.963.425. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dokumen penagihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima. Rincian penempatan dana atas realisasi subsidi TA 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Subsidi Premium	33.101.320.803
Subsidi Minyak Tanah	249.585.387.648
Subsidi Minyak Solar	112.845.701.482
Subsidi LPG	348.690.214.595
Subsidi Listrik	284.141.726.597
Subsidi Pupuk	3.344.529.740.510
Subsidi Benih	60.942.296.990
Subsidi PT Pos Indonesia	64.260.500.000
Subsidi PT PELNI	136.752.505.000
Subsidi PT KAI	159.902.285.000
Subsidi Pangan	4.100.839.284.800
Jumlah	**8.895.590.963.425**

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp300,11 miliar

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp300.108.798.353 yang berarti 70,42 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp426.192.193.000. Realisasi belanja Hibah tersebut terdiri dari:

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Local Basic Education Capacity (L-BEC)	45.937.448.826
Air Minum	161.677.000.000
Air Limbah Terpusat	16.030.000.000
Water and Sanitation Program, Sub Program D-Sanitation City Pilot Projects (Wasap-D)	6.297.150.700
Investment Enchancement Grant (IEG)	43.389.800.400
Mass Rapid Transit (MRT)	6.777.398.429
Pembangunan Cardiac Centre at Shifa Hospital Gaza	19.999.999.998
Jumlah	**300.108.798.353**

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp71,10 triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2011 adalah sebesar Rp71.104.328.162.347 yang berarti 91,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp77.467.135.177.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2011 lebih besar Rp2.493.216.176.060 atau lebih besar 3,63 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	6.246.014.999.528	4.608.123.632.500
Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah/ Lembaga/Guru	32.091.722.341.802	37.605.677.677.567
Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	3.729.510.000	965.937.110.000
Belanja Bantuan Beasiswa	4.685.060.980.695	4.779.029.074.747
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	146.690.983.500	79.921.402.400
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	27.931.109.346.822	20.572.423.089.073
Jumlah	**71.104.328.162.347**	**68.611.111.986.287**

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp5,44 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2011 adalah sebesar Rp5.465.369.795.958 yang berarti 38,21 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp14.302.662.733.800. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2011 lebih kecil Rp16.207.618.151.962 atau lebih kecil 74,78 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian Belanja lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja untuk Rekonstruksi Aceh	-	1.076.511.756
Belanja Kerjasama Teknis Internasional	13.893.595.128	-
Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri	9.778.482.000	
Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	-	946.476.175.056
Belanja Non Modal-Otorita Batam	557.785.893	845.925.755
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs	360.991.025.539	909.200.000.000
Jasa Surveyor	-	232.979.742.237
Jasa Perbendaharaan	199.847.380.770	102.072.122.675
Belanja TVRI	685.547.340.402	571.871.726.475
Belanja RRI	677.104.143.519	558.912.123.288
Dana Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah	406.145.000.000	358.183.000.000
Belanja Lain-lain	3.111.505.042.707	17.991.370.620.678
Jumlah	**5.465.369.795.958**	**21.672.987.947.920**

Penurunan realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2011 disebabkan adanya penataan akun-akun pada Belanja Lain-lain sesuai dengan *nature of transaction*-nya, bahwa kegiatan yang tidak memenuhi karakteristik dibiayai dari Belanja Lain-lain harus dianggarkan pada belanja K/L yang bersangkutan.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp411,32 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011 adalah sebesar Rp411.324.764.631.790, yang berarti 99,71 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp412.507.891.828.200. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011 ini lebih besar Rp66.597.152.801.411 atau 19,32 persen dari Realisasi TA 2010. Transfer ke Daerah terdiri dari *(i)* Dana Perimbangan, dan *(ii)* Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Komposisi realisasi Transfer untuk Daerah TA 2011 disajikan pada Grafik 43.

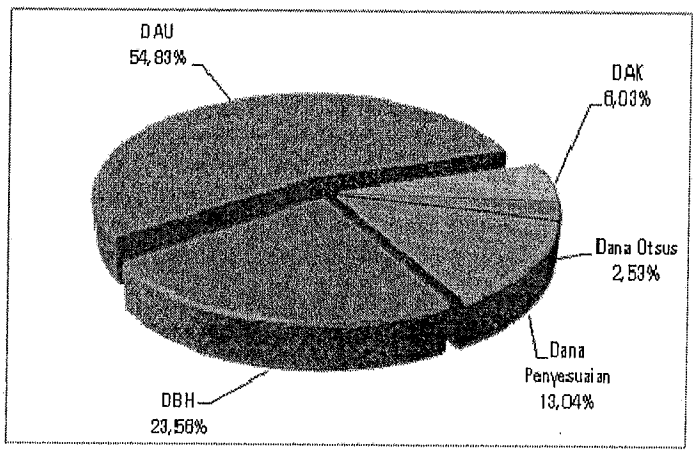

Grafik 43: Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Rp347,25 triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2011 adalah sebesar Rp347.246.213.954.316 yang berarti 99,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp347.538.605.495.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2011 ini lebih besar Rp30.534.920.925.248 atau 9,64 persen dari realisasi TA 2010. Dana Perimbangan terdiri dari *(i)* Dana Bagi Hasil (DBH), *(ii)* Dana Alokasi Umum (DAU), dan *(iii)* Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

DBH Rp96,91 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2011 adalah sebesar Rp96.908.991.981.316 atau 100,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp96.772.092.547.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2011 ini lebih besar Rp4.725.500.747.448 atau naik 5,13 persen dari realisasi TA 2010. Terlampauinya realisasi DBH dari anggarannya tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dibagihasilkan yang melampaui anggarannya. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp41.525.556.919.178, Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp1.408.448.764.184 dan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp53.974.986.297.954.

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	13.287.326.489.261	10.931.465.581.702
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	28.281.482.553.025	27.146.941.959.903
DBH Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.747.876.892	7.737.248.068.834
Jumlah DBH Pajak	**41.525.556.919.178**	**45.815.655.610.439**
DBH Cukai	**1.408.448.764.184**	**1.202.111.025.283**
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	20.634.080.736.284	20.567.117.652.257
DBH SDA Gas Bumi	16.672.249.758.993	14.629.244.504.747
DBH SDA Pertambangan Umum	14.498.126.522.475	7.790.420.800.000
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	519.987.115.194	305.837.001.838
DBH SDA Kehutanan	1.512.465.063.891	1.753.104.639.304
DBH SDA Perikanan	138.077.102.117	120.000.000.000
Jumlah DBH SDA	**53.974.986.297.954**	**45.165.724.598.146**
Total DBH	**96.908.991.981.316**	**92.183.491.233.868**

Dalam realisasi DBH SDA sebesar Rp53.974.986.297.954, terdapat Rp9.899.647.659.901 yang sampai dengan akhir TA 2011 dananya masih tersimpan pada rekening dana cadangan (*escrow account*), karena masih menunggu identifikasi daerah penerima. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena masih dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi daerah penerima oleh DJPK, pemerintah daerah, dan pihak/kementerian terkait. Setelah rekonsiliasi/verifikasi selesai, maka dana cadangan DBH tersebut akan dibayarkan kepada pemerintah daerah.

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

DAU Rp225,53 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2011 adalah sebesar Rp225.533.712.048.000, atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp225.533.712.048.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2011 ini lebih besar Rp21.962.221.420.800 atau naik 10,79 persen dari realisasi TA 2010.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

DAK Rp24,80 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2011 adalah sebesar Rp24.803.509.925.000, atau 98,30 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp25.232.800.900.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2011 ini lebih besar Rp3.847.198.757.000 atau 18,36 persen dari realisasi TA 2010.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pada TA 2011, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, serta sarana dan prasarana perdesaan.

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp64,08 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2011 adalah sebesar Rp64.078.550.677.474 atau 98,63 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp64.969.286.333.200. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2011 ini lebih besar Rp36.062.231.876.163 atau lebih besar 128,72 persen dari realisasi TA 2010. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari *(i)* Dana Otonomi Khusus, dan *(ii)* Dana Penyesuaian.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Rp10,42 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2011 adalah sebesar Rp10.421.312.993.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp10.421.312.993.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2011 ini lebih besar Rp1.321.699.313.000 atau lebih besar 14,52 persen dari realisasi TA 2010.

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Transfer Dana Otsus Untuk NAD	4.510.656.496.500	3.849.806.840.000
Transfer Otsus Untuk Papua	3.957.459.547.550	3.494.864.788.000
Transfer Dana Otsus untuk Papua Barat	1.953.196.948.950	1.754.942.052.000
Jumlah	**10.421.312.993.000**	**9.099.613.680.000**

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian Rp53,66 triliun

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2011 adalah sebesar Rp53.657.237.684.474, yang berarti 98,37 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp54.547.973.340.200. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2011 ini lebih besar Rp34.740.532.563.163 atau lebih besar 183,65 persen dari realisasi TA 2010. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dana Penyesuaian TA 2011 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dana Penyesuaian Lainnya	78.907.877.152
Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	3.678.526.736.060
Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000
Dana Tunjangan Profesi Guru	18.510.236.637.649
Dana Bantuan Operasional Sekolah	16.329.888.218.250
Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	7.535.043.988.000
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	6.136.834.227.363
Jumlah	**53.657.237.684.474**

B.2.2.3. Suspen

Suspen minus Rp50,03 miliar

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah suspen belanja TA 2011 adalah sebesar minus Rp50.030.175.403, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga *)	Selisih (BUN – K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	175.745.947.140.204	175.737.918.419.015	8.028.721.189
Belanja Barang	124.159.163.392.116	124.169.566.670.254	(10.403.278.138)
Belanja Modal	117.759.087.730.733	117.772.248.178.952	(13.160.448.219)
Pembayaran Bunga Utang	93.260.261.464.346	93.261.919.810.886	(1.658.346.540)
Subsidi	295.358.422.916.324	295.358.229.636.324	193.280.000
Belanja Hibah	300.108.798.355	300.108.798.353	2
Belanja Bantuan Sosial	71.076.290.233.168	71.104.328.162.347	(28.037.929.179)
Belanja Lain-lain	5.464.234.053.592	5.465.369.795.958	(1.135.742.366)
Total	**883.123.515.728.838**	**883.169.689.472.089**	**(46.173.743.251)**
Transfer keDaerah			
Dana Bagi Hasil	96.908.996.158.302	96.908.991.981.316	4.176.986
Dana Alokasi Umum	225.533.712.048.000	225.533.712.048.000	0
Dana Alokasi Khusus	24.802.229.752.980	24.803.509.925.000	(1.280.172.020)
Dana Otonomi Khusus	10.421.312.993.000	10.421.312.993.000	0
Dana Penyesuaian	53.657.183.069.474	53.657.237.684.474	(54.615.000)
Total	**411.323.434.021.756**	**411.324.764.631.790**	**(1.330.610.034)**
Suspen			**(47.504.353.285)**

**) Data K/L tidak termasuk Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pendapatan Hibah Non Kas (Barang/Jasa)*

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran Rp84,40 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2011 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2011 adalah sebesar Rp84.399.493.115.610, yang berarti 55,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp150.836.675.244.000, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.210.599.653.359.415	995.271.511.391.343
Belanja Negara	(1.294.999.146.475.020)	(1.042.117.219.744.817)
Defisit Anggaran	**(84.399.493.115.605)**	**(46.845.708.353.474)**

B.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan (Neto) Rp130,95 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2011 adalah sebesar Rp130.948.869.624.420 yang berarti 86,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp150.836.675.244.000. Pembiayaan terdiri dari *(i)* Pembiayaan Dalam Negeri, dan *(ii)* Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Pembiayaan Dalam Negeri Rp148,75 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp148.748.034.850.068, yang berarti 96,83 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar

Rp153.613.307.023.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari *(i)* Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman *(iii)* Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, *(iv)* Surat Berharga Negara (Neto), *(v)* Pinjaman Dalam Negeri (Neto), *(vi)* Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, *(vii)* Kewajiban Penjaminan, dan *(viii)* Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah Rp40,32 triliun

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang terkait dengan penerimaan dan pengembaliannya dari rekening-rekening pemerintah lainnya yang dikelola/dikuasai oleh Menteri Keuangan sebagai BUN. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah TA 2011 adalah sebesar Rp40.319.043.049.000, yang berarti 99,37 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp40.574.043.832.000. Rincian pembiayaan Rekening Pemerintah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penerimaan dari Rekening SAL	40.319.043.049.000	17.347.946.818.000
Penerimaan dari Rekening Dana Investasi		4.841.365.789.078
Jumlah	**40.319.043.049.000**	**22.189.312.607.078**

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Rp8,61 triliun

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2011 adalah sebesar Rp8.608.845.495.456, yang berarti 105,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp8.176.680.057.000. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	47.857.604.646
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	353.489.013.568
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	6.873.012.681.436
Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	18.972.303.278
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	75.477.991.357
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	479.070.633.171
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	760.965.268.000
Total	**8.608.845.495.456**

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada LKPP Tahun 2010 sebesar Rp57.631.763.320 disajikan sebagai pengurang dari Penerusan Pinjaman (Pembiayaan Luar Negeri).

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Pembiayaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp1,6 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2011 sebesar Rp1.597.981.517.178 atau 114,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.390.690.442.000.

Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penerimaan Hasil Privatisasi	425.044.145.867
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	330.323.053
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	801.228.042.527
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	371.379.005.731
Jumlah	**1.597.981.517.178**

Surat Berharga Negara (Neto) Rp119,86 triliun

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2011 adalah sebesar Rp119.864.365.459.065 atau 94,64 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp126.653.893.000.000. Pembiayaan dari SBN mencakup Penerbitan SBN dalam valas sesuai dengan penjelasan UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 yang menyatakan bahwa Surat Berharga Negara (Neto) merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar Internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	40.000.000.000.000	29.795.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	110.514.000.000.000	84.020.000.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.817.637.491.000	1.701.033.244.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	22.951.410.000.000	26.966.860.000.000
Imbalan Dibayar di muka SBSN – Jangka Panjang	56.028.850.000	109.996.698.000
Penerbitan/Penjualan SUN Perbendaharaan – DN	1.320.000.000.000	-
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	21.441.986.660.150	25.041.328.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	9.035.050.295.000	-
Imbalan Dibayar dimuka SBSN – DN		-
Total Penerimaan	**207.136.113.196.150**	**167.634.217.942.000**
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(38.045.000.000.000)	(24.700.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(42.980.975.945.085)	(40.154.415.022.752)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(4.163.986.000.000)	(7.120.565.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(2.029.197.406.000)	(1.750.849.667.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Pendek		(2.350.000.000.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang		(336.000.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(52.588.386.000)	(119.790.002.000)
Total Pengeluaran	**(87.271.747.737.085)**	**(76.531.619.691.752)**
Jumlah SBN (Neto)	**119.864.365.459.065**	**91.102.598.250.248**

Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Rp619,38 miliar

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp619.382.641.633, yang berarti 42,65 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar minus Rp1.452.125.992.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN. Pada TA 2011 belum ada pembayaran cicilan Pinjaman Dalam Negeri tersebut.

PMN/ Investasi Pemerintah Rp19,64 triliun

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2011 adalah sebesar Rp19.643.883.312.264, yang berarti 93,04 persen dari jumlah yang

dianggarkan APBN-P sebesar Rp21.112.426.300.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2011 adalah:

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	9.295.783.312.264	6.038.600.000.000
Investasi Pemerintah	1.000.000.000.000	927.500.000.000
Investasi Pemerintah untuk Dana Geothermal	1.126.500.000.000	-
Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	550.000.000.000	-
Investasi Pemerintah yang dipinjamkan kepada BUMN	-	7.500.000.000.000
Dana Bergulir	7.671.600.000.000	5.333.049.000.000
Jumlah	**19.643.883.312.264**	**19.799.149.000.000**

PMN untuk BUMN sebesar Rp9.295.783.312.264, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	1.500.000.000.000
Penyertaan pada PT Pupuk Iskandar Muda	1.338.047.600.800
Penyertaan pada PT Sarana Multigriya Financial	1.000.000.000.000
Penyertaan pada PT Geo Dipa Energy (Pendapatan Hibah Surat Berharga)	443.525.600.000
Penyertaan pada PT Inhutani I	5.000.000.000
Penyertaan pada PT Dirgantara Indonesia	1.188.496.918.621
Penyertaan pada PT PAL (Persero)	648.330.000.000
Penyertaan pada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	561.000.000.000
Penyertaan pada PT Askrindo	800.000.000.000
Penyertaan pada Perum Jamkrindo	1.200.000.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit SBSN III	100.000.000
Penyertaan pada Lembaga Internasional	611.283.192.842
Jumlah	**9.295.783.312.263**

Investasi Pemerintah sebesar Rp1.000.000.000.000 dialokasikan kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah dan ditujukan untuk mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan lainnya.

Dana Bergulir sebesar Rp7.671.600.000.000 dikelola oleh beberapa BLU, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BLU Pusat Pembiyaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat	3.571.600.000.000
BLU LPDB Kementerian Koperasi dan UKM	250.000.000.000
BLU Bidang Pendanaan Sekretarian BPJT Kementerian PU	3.850.000.000.000
Jumlah	**7.671.600.000.000**

Kewajiban Penjaminan Rp0

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Pada TA 2011 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Kewajiban Penjaminan, sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp904.000.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp2,62 triliun

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Realisasi pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2011 adalah sebesar Rp2.617.700.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.617.700.000.000. Alokasi dana pengembangan pendidikan nasional adalah untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak. Dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

Pembiayaan LN (Neto) minus Rp17,80 triliun

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2011 adalah sebesar minus Rp17.799.165.225.648, yang berarti 641,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp2.776.631.779.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Penarikan Pinjaman LN Rp33,75 triliun

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp33.747.178.723.921 yang berarti 60,07 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp56.182.884.835.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari *(i)* penarikan pinjaman program, dan *(ii)* penarikan pinjaman proyek.

Penarikan Pinjaman Program Rp15,27 triliun

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2011 adalah sebesar Rp15.266.144.513.219, yang berarti 79,50 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp19.201.800.000.000.

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2011 dan TA 2010 (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	873.396.325.700	4.586.102.579.700
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya		2.709.900.000.000
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	10.758.748.187.519	15.338.031.909.416
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	3.634.000.000.000	6.340.610.000.000
Jumlah	**15.266.144.513.219**	**28.974.644.489.116**

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp12.802.085.740. Selisih ini disebabkan dan adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman (selisih kurs) antara Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran 999.01. Rincian perbedaan tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	873.396.325.700	873.396.740.250	(414.550)
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	10.758.748.187.519	10.729.345.687.229	29.402.500.290
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	3.634.000.000.000	3.650.600.000.000	(16.600.000.000)
Jumlah	**15.266.144.513.219**	**15.253.342.427.429**	**12.802.085.740**

Penarikan Pinjaman Proyek Rp18,48 triliun

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2011 adalah sebesar Rp18.481.034.210.702, yang berarti 49,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp36.981.084.835.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah

menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun BAPPENAS berdasarkan usulan dari kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2011 dan TA 2010 (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	9.046.106.089.582	13.648.925.389.889
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.246.144.127.735	7.995.636.711.316
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.188.783.993.385	3.972.357.132.656
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	-	203.227.477.230
Jumlah	**18.481.034.210.702**	**25.820.145.711.091**

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.02 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp41.086.303.118 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	9.046.106.089.582	9.699.904.555.330	(653.798.465.748)
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.246.144.127.735	4.540.756.344.868	705.387.782.867
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.188.783.993.385	2.486.245.426.970	1.702.538.566.415
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	0	1.713.041.580.416	(1.713.041.580.416)
Jumlah	**18.481.034.210.702**	**18.439.947.907.584**	**41.086.303.118**

Perbedaan penarikan pinjaman luar negeri disebabkan oleh:

Uraian	Jumlah
NoD 2010 SP3 2011	59.202.012.292
NoD 2011 yang tidak dapat diidentifikasi sehingga tdk diterbitkan Sp3	(13.543.343.534)
SP3 atas WA 2010 belum diterbitkan karena tidak ada DIPA 2011	(4.514.331.286)
Selisih Kurs	(58.034.353)
Total	**41.086.303.119**

Penerusan Pinjaman Rp4,22 triliun

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2011 adalah sebesar Rp4.223.841.471.298, yang berarti 36,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp11.724.776.614.000. Rincian Penerusan Pinjaman (Neto) adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(116.927.902.866)	(68.078.795.670)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	-	(8.155.932.230)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(4.106.913.568.432)	(8.238.430.908.741)
Penerusan Pinjaman LN TAYL kepada BUMN	-	(471.729.714.367)
Total	**(4.223.841.471.298)**	**(8.786.395.351.008)**

Penerusan Pinjaman TA 2010 di atas tidak termasuk Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada tahun 2010 sebesar Rp57.631.763.320. Penerusan Pinjaman Tahun 2010 yang disajikan pada LKPP Tahun 2010 adalah sebesar Rp8.728.763.587.688, yang berasal dari Penerusan Pinjaman Rp8.786.395.351.008 dikurangi dengan Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebesar Rp57.631.763.320.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN Rp47,32 triliun

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2011. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

dalam TA 2011 adalah sebesar minus Rp47.322.502.478.271 yang berarti 100,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp47.234.740.000.000

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2011 dan TA 2010 (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program	391.155.555.858	10.503.057.712
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program	9.038.453.328.006	8.950.355.684.638
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	2.275.910.434.365	6.557.490.862.982
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	35.616.983.160.042	35.114.181.976.504
Jumlah	**47.322.502.478.271**	**50.632.531.581.836**

SiLPA Rp46,57 triliun

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp84.399.493.115.609 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp130.948.869.624.420 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp46.549.376.508.811, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.210.599.653.359.415	995.271.511.391.343
Belanja Negara	1.294.999.146.475.024	1.042.117.219.744.817
Surplus (Defisit)	(84.399.493.115.609)	(46.845.708.353.474)
Pembiayaan Neto	130.948.869.624.420	91.552.011.400.615
SiLPA (SiKPA)	**46.549.376.508.811**	**44.706.303.047.141**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 47 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2011.

2. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2011, dengan rincian sebagai berikut:

010	Kementerian Dalam Negeri	1.033.811.543.094	255.207.054.598	8.118.064.292.749
018	Kementerian Pertanian	1.480.874.049.267	6.075.012.950.725	-
019	Kementerian Perindustrian	96.264.273.677	-	-
020	Kementerian ESDM	32.367.349.596	-	-
023	Kementerian Pendidikan Nasional	14.191.386.782.646	41.008.439.950	-
024	Kementerian Kesehatan	582.432.992.437	3.447.961.989.043	-
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	207.251.401.688	1.194.553.375.834	-
027	Kementerian Sosial	490.491.171.537	113.964.694.797	-
029	Kementerian Kehutanan	143.578.827.164	1.099.826.462	-
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	271.323.466.646	693.653.406.868	-
033	Kementerian Pekerjaan Umum	145.806.625.084	1.566.117.430.446	4.740.000.000
040	Kementerian Kebudayaan & Pariwisata	61.504.993.399	166.471.344.156	-
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	14.823.442.466	-	-
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	120.516.461.791	-	-
057	Perpustakaan Nasional	122.248.417.243		
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	9.283.963.552	-	-
067	Kementerian PDT	917.934.375	294.176.069.460	-
068	BKKBN	11.414.521.815	-	-
090	Kementerian Perdagangan	52.584.428.359	640.465.446.924	-
091	Kementerian Perumahan Rakyat	42.904.672.458	-	-
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	171.437.223.266	-	-
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	7.839.029.561	128.134.934.600	-
	Total	19.291.063.571.121	14.617.826.963.863	8.122.804.292.749

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep *"enterprising the government"* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2011, terdapat 124 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK BLU. Seratus dua puluh empat Satker BLU tersebut berasal dari 19 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Keuangan	2
3	kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	4
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
6	Kementerian Perhubungan	7
7	Kementerian Pendidikan Nasional	22
8	Kementerian Kesehatan	51
9	Kementerian Agama	12
10	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
11	Kementerian Kehutanan	1
12	Kementerian Pekerjaan Umum	1
13	Kenterian Negara Riset dan Teknologi	1
14	Kementerian Koperasi dan UKM	2

15	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
16	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
17	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
18	Kementerian Perumahan Rakyat	1
19	POLRI	9
	Jumlah BLU	**124**

Ditinjau dari bidang layanan, dari 124 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:
a. 117 BLU bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
b. 2 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
c. 5 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus.

Berdasarkan laporan keuangan 124 BLU, total pendapatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp26.603.187.141.683. Komposisi pendapatan BLU pada TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 44.

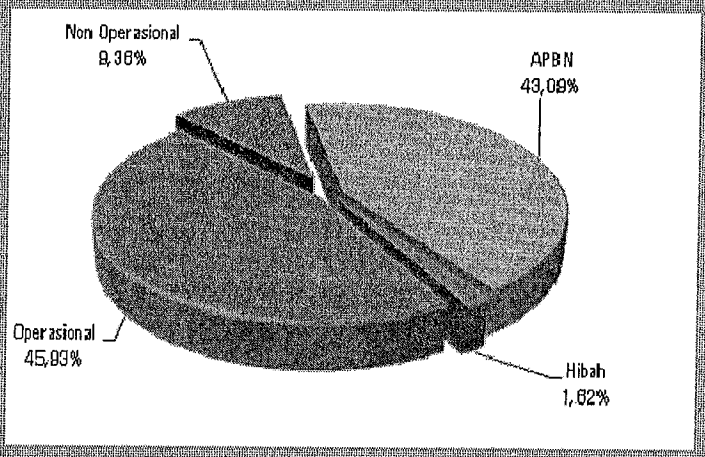

Grafik 44: Komposisi Pendapatan BLU TA 2011

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2011 dapat dilihat pada Grafik 45.

(dalam miliar rupiah)

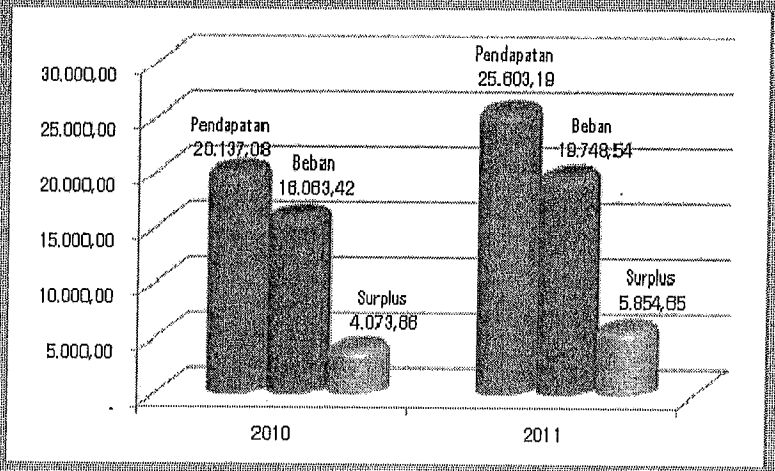

Grafik 45: Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2011

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada **Daftar 37.**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Aset Lancar	266.807.824.111.647	254.779.627.714.260
Investasi Jangka Panjang	750.080.794.479.804	706.410.075.389.077
Aset Tetap	1.567.974.174.587.750	1.184.301.167.405.585
Aset Lainnya	438.634.382.921.494	278.197.482.029.092
Jumlah Aset	**3.023.447.176.100.695**	**2.423.688.352.538.014**
Kewajiban Jangka Pendek	246.444.874.649.922	201.343.960.842.088
Kewajiban Jangka Panjang	1.700.928.418.989.886	1.594.734.246.970.359
Jumlah Kewajiban	**1.947.373.293.639.708**	**1.796.078.207.812.447**
Ekuitas Dana Lancar	40.813.348.448.286	83.462.571.113.177
Ekuitas Dana Investasi	1.035.260.534.012.601	544.147.573.612.390
Jumlah Ekuitas Dana Neto	**1.076.073.882.461.887**	**627.610.144.725.567**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**3.023.447.176.100.695**	**2.423.688.352.538.014**

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Grafik 46.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

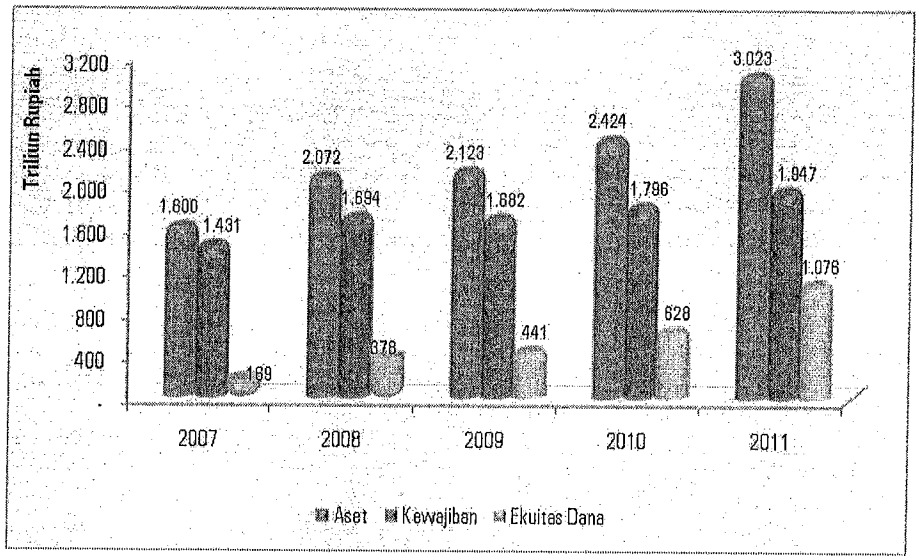

Grafik 46: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2007 – 2011

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun berturut-turut, nilai Ekuitas Dana selalu meningkat. Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 naik 71,76% persen dari posisi 31 Desember 2010.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

Rekening Kas BUN di BI Rp82,45 triliun

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp82.453.918.298.407 dan Rp82.430.710.192.763 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Rekening	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Rekening BUN No. 502.000000980	2.381.060.659.952	2.120.438.712.433
Rekening KUN dalam Valuta USD No. 600.502411980	8.471.861.156	15.198.974.591
Rekening KUN dalam Valuta YEN No. 600.502111980	1.068.162.472.870	-
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah No. 519.000122980	4.790.148.672.956	9.320.901.792.905
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD No. 608.001411980	23.301.620.886.188	15.985.142.164.422
Rekening Penempatan dalam Valuta YEN No. 608.000111980		2.300.652.032.330
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah No. 519.000124980	8.492.000.706	606.723.757
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD No. 609.022411980		425.642.936.125
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO No. 609.000991980		35.322.305
Rekening SAL No.500.000002980	48.505.945.197.525	49.437.756.699.925
Rekening Khusus	2.390.016.547.054	2.824.334.833.970
Rekening RDI/RPD	-	-
Jumlah	**82.453.918.298.407**	**82.430.710.192.763**

Seluruh saldo Rekening Kas BUN di BI merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada **Daftar 4.**

C.2.2. Rekening Kas di KPPN

Rekening Kas di KPPN Rp11,87 triliun

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp11.870.556.947.661 dan Rp9.218.612.887.732 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas di KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Daftar 5.**

C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya

RPL Rp6,62 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp6.615.552.720.213 dan Rp8.539.601.162.593 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Bank	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. Bank Indonesia	6.558.844.586.613	7.744.826.703.919
2. Bank Umum	56.708.133.600	794.774.458.674
Jumlah	**6.615.552.720.213**	**8.539.601.162.593**

Seluruh saldo RPL bukan merupakan bagian dari SAL.

1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari (dalam Rp):

Rekening	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Rekening RDI/RPD	-	106
Rekening Panas Bumi (No. 508.000084980)	197.960.188.008	208.604.971.388
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (No.600.000411980)	6.237.138.752.226	7.308.488.402.783
Rekening Pemerintah Lain	123.745.646.379	227.733.329.642
Jumlah	**6.558.844.586.613**	**7.744.826.703.919**

Pada LKPP Tahun 2010, Rekening RDI/RPD merupakan bagian dari Rekening Pemerintah Lainnya di BI. Pada LKPP Tahun 2011, Rekening RDI/RPD direklasifikasikan menjadi bagian dari Rekening Kas BUN di Bank Indonesia.

Rincian lebih lengkap masing-masing RPL di BI dapat dilihat pada **Daftar 6.**

Khusus Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp6.237.138.752.226 merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000411.908, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya.**

2. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Umum sebesar Rp56.708.133.600 merupakan Kas pada BA 999.04 (Penerusan Pinjaman) yang tersimpan di berbagai Bank Umum berupa:
   - Rekening Induk Dana Lingkungan (RIDL) sebesar Rp7.113.244.925,59.
   - Rekening KUMK sebesar Rp40.775.802.226,33.
   - 15 rekening lainnya merupakan rekening pemerintah lainnya sebagai penampungan transaksi dari program/kegiatan yang masih berlangsung sebesar Rp8.819.086.447,79.

   Rincian saldo RPL pada Bank Umum dapat dilihat pada **Daftar 7.**

C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp292,80 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp292.795.937.959 dan Rp518.919.028.152 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/ dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 8.**

C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp252,90 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp252.900.321.124 dan Rp632.344.354.246 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di

bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 8.**

C.2.6. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp6,76 triliun

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp6.756.875.778.441 dan Rp8.652.179.999.211 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dana lancar BLU, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang Belum Disetor ke Kas Negara	2.367.515.283.864	684.910.710.051
Kas yang Belum Dibayarkan kepada Pihak Ketiga	3.943.049.644.201	7.524.295.136.562
Dana Lancar Lainnya (termasuk hibah langsung K/L)	443.660.163.197	440.323.355.419
Dana Lancar BLU	2.650.797.179	2.650.797.179
Jumlah	**6.756.875.778.441**	**8.652.179.999.211**

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. K/L	1.830.725.363.653	1.328.563.654.746
2. BUN	4.926.150.414.788	7.323.616.344.465
Jumlah	**6.756.875.778.441**	**8.652.179.999.211**

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Daftar 8.**

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp4.926.150.414.788 terdiri dari:

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Bagian Anggaran (BA) 999.03 sebesar Rp1.912.974.670 merupakan kas atas pengembalian program dana bergulir yang saat ini masih tertampung dalam rekening LPT Indak;
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.05 sebesar Rp393.906.986.740 merupakan kas yang terdapat pada Rekening Dana Cadangan DBH sebagai sisa atas dana cadangan yang tidak disalurkan ke RKUD, dan telah disetor ke Kas Negara pada akhir Februari 2012;
3. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp1.371.744.022.079 merupakan kas yang terdapat pada Rekening Dana Cadangan PSO/SUbsidi sebagai sisa atas dana cadangan yang tidak disalurkan ke pihak ketiga, dan telah disetor ke Kas Negara pada akhir Februari 2012;
4. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp3.158.586.431.299. Kas tersebut sebagian besar merupakan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan disalurkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Instansi yang menangani bencana dalam TA 2011 dan pengembalian belanja tunjangan kinerja dari beberapa K/L serta pendapatan bunga dan jasa giro yang belum disetor ke kas negara.

C.2.7. Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp13,02 triliun

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp13.019.388.257.063 dan Rp7.340.595.820.681 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L, yang terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	529.314.721.403	479.821.501.506
2. BLU di Kementerian Keuangan	2.168.961.124.597	1.085.722.227.076
3. BLU di Kementerian Pertanian	3.466.155.684	2.556.669.136
4. BLU di Kementerian Perindustrian	20.011.012.451	15.834.915.124
5. BLU di Kementerian ESDM	18.498.791.562	15.443.187.078
6. BLU di Kementerian Perhubungan	132.850.346.828	93.038.372.566
7. BLU di Kementerian Pendidikan Nasional	4.497.383.942.144	1.161.521.456.378
8. BLU di Kementerian Kesehatan	1.066.474.212.524	972.325.591.499
9. BLU di Kementerian Agama	160.067.061.688	132.236.879.094
10. BLU di Tenaga Kerja dan Transmigrasi	714.674.920	594.424.868
11. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum	311.877.696.631	133.025.374.471
12. BLU di Kementerian Ristek	1.587.736.326	734.444.972
13. BLU di Kementerian Negara KUKM	222.839.464.602	132.325.739.980
14. BLU di Kementerian Kominfo	3.710.216.950.149	3.083.819.144.970
15. BLU di Kepolisian RI	31.085.827.403	13.845.569.596
16. BLU di BPPT	7.013.147.667	7.949.782.111
17. BLU di LAPAN	1.956.045.700	1.518.809.599
18. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	145.069.354.794	8.281.730.667
Jumlah	**13.019.388.257.063**	**7.340.595.820.681**

Berdasarkan data BUN, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar Rp13.089.016.578.965 (lihat ***Catatan D.1***). Dari Kas pada BLU tersebut sebesar Rp170.553.016.059 telah didepositokan dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan (disajikan pada Investasi Jangka Pendek BLU - lihat ***Catatan C.2.19).*** Dengan demikian, terdapat Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp100.924.694.157, yaitu berasal dari (Rp13.019.388.257.063+Rp170.553.016.059 - Rp13.089.016.578.965).

C.2.8 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka dari Rekening BUN Rp1,41 triliun

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.408.995.648.910 dan Rp1.876.259.417.429 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Lender	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. IBRD	434.796.198.957	887.745.480.535
2. ADB	557.243.342.772	361.921.824.683
3. OECF/JBIC	14.116.106.369	36.290.835.084
4. Lainnya	402.840.000.812	590.301.277.127
Jumlah	**1.408.995.648.910**	**1.876.259.417.429**

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1.408.995.648.910 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Saldo tersebut berasal dari saldo akhir tahun 2010 sebesar Rp1.876.259.417.429 ditambah dengan koreksi saldo awal tahun 2011 sebesar Rp445.511.277.373 dikurangi dengan penggunaan Uang Muka dari Rekening BUN selama tahun 2011 sebesar Rp912.775.045.892.

C.2.9. Piutang Pajak

Piutang Pajak Rp108,06 triliun

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp108.063.462.383.641 dan Rp70.945.271.446.620. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah Rp60.246.153.293.302 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp108.063.462.383.641 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp47.817.309.090.339. Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	86.801.366.456.341	54.008.060.540.425
Penyisihan	(46.205.692.087.023)	-
Nilai Bersih	40.595.674.369.318	
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	21.262.095.927.300	16.937.210.906.195
Penyisihan	(1.611.617.003.316)	-
Nilai Bersih	19.650.478.923.984	
Piutang Pajak (Bruto)	**108.063.462.383.641**	**70.945.271.446.620**
Penyisihan	(47.817.309.090.339)	-
Piutang Pajak (Bersih)	**60.246.153.293.302**	

Piutang Pajak pada Ditjen Pajak

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp86.801.366.456.341 dan Rp54.008.060.540.425 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2011. Rincian Piutang Pajak (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 8.**

Tabel 8
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak
(Dalam Rp)

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.085.067.767.115	1.266.406.447.889
2.	Piutang PPh Pasal 22	466.665.742.712	483.960.766.219
3.	Piutang PPh Pasal 23	1.971.736.365.857	2.203.941.784.322
4.	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.011.913.424.152	1.011.934.207.339
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	14.272.978.070.717	14.375.139.273.281
6.	Piutang PPh Pasal 26	2.831.091.117.252	1.707.425.467.877
7.	Piutang PPh Final dan Fiskal LN	517.874.742.847	756.662.431.444
8.	Piutang PPN Dalam Negeri	42.235.408.566.549	13.758.554.551.125
9.	Piutang PPnBM Dalam Negeri	208.754.851.900	279.736.078.186
10.	Piutang PBB Pedesaan	2.401.365.978.916	1.617.432.556.023
11.	Piutang PBB Perkotaan	11.291.484.268.102	9.391.433.663.020
12.	Piutang PBB Perkebunan	394.209.918.227	388.198.560.617
13.	Piutang PBB Kehutanan	630.580.993.822	617.951.905.189
14.	Piutang PBB Pertambangan	5.602.915.906.581	4.029.788.497.473
15.	Piutang BPHTB		101.220.473.265
16.	Piutang PTLL	691.914.937	2.240.673.790
17.	Piutang Bunga Penagihan PPh	1.878.627.837.655	2.016.033.203.366
	Jumlah	**86.801.366.456.341**	**54.008.060.540.425**

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Umur Piutang	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Kurang dari 1 Tahun	19.470.734.026.870	17.268.606.805.698
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	37.888.573.687.081	11.089.759.076.321
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	8.508.983.799.836	7.425.345.018.956
5 Tahun atau Lebih	20.938.074.992.554	18.224.349.638.997
Jumlah	**86.801.366.456.341**	**54.008.060.540.425**

1) Dari nilai piutang pajak sebesar Rp86.801.366.456.341 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp46.205.692.087.023. Nilai piutang yang disisihkan tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp6.217.999.181.660. Selama tahun 2011 atas nilai piutang pajak yang telah daluwarsa tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp489.005.652.771. Selama tahun 2011, tidak ada nilai piutang pajak yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan.

2) Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp43.454.095.270.562.

3) Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak

sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang sebesar Rp889.285.399.952 dan dari piutang pajak sebesar Rp1.559.625.674.452. Dari aset wajib pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp237.636.727.323.

Piutang Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp21.262.095.927.300 dan Rp16.937.210.906.195 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak (nilai awal sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 9.**

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Umur Piutang	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
Kurang dari 1 Tahun	19.648.918.985.526	15.549.337.791.645
1 Tahun s.d 2 Tahun	217.266.179.964	156.485.135.015
2 Tahun s.d 3 Tahun	103.555.167.066	409.426.853.939
Di atas 3 Tahun	1.292.355.594.744	821.961.125.596
Jumlah	**21.262.095.927.300**	**16.937.210.906.195**

Tabel 9
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai
(Dalam Rp)

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
1	Piutang PPh Pasal 22 Impor	45.892.299.214	57.174.673.159
2	Piutang PPN Dalam Negeri	3.146.910.248.970	2.609.131.603.212
3	Piutang PPN Impor	240.562.578.649	264.640.361.368
4	Piutang PPN Lainnya	13.975.000	24.934.000
5	Piutang PPnBM Impor	26.715.140.404	20.402.870.685
6	Piutang PPnBM Lainnya	-	-
7	Piutang Cukai Hasil Tembakau	15.612.436.025.861	12.646.209.694.700
8	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	889.000.000	-
9	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.108.046.600	2.969.589.180
10	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	102.598.902.174	2.899.526.340
11	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	46.830.933.374	1.100.946.557
12	Piutang Bunga Penagihan PPN	9.710.326.332	5.821.060.805
13	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	16.682.000	-
14	Piutang Bea Masuk	851.036.853.853	700.809.407.559
15	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	773.536.556.838	445.108.152.433
16	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	173.032.494.314	179.085.323.897
17	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	222.278.975.975	1.623.559.853
18	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	6.238.348.382	33.897.172
19	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	288.539.360	175.305.275
	Jumlah	21.262.095.927.300	16.937.210.906.195

C.2.10. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp19,89 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp19.885.890.412.635 dan Rp9.020.978.486.579. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp9.632.493.510.011, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp19.885.890.412.635 dikurangi penyisihan sebesar Rp10.253.396.902.624. Piutang tersebut terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	13.796.526.308.176	3.442.928.032.948
Penyisihan	(9.935.371.734.586)	-
Nilai Bersih	**3.861.154.573.590**	
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	6.089.364.104.459	5.578.050.453.631
Penyisihan	(318.025.168.038)	-
Nilai Bersih	**5.771.338.936.421**	
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	**19.885.890.412.635**	**9.020.978.486.579**
Penyisihan	(10.253.396.902.624)	-
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	**9.632.493.510.011**	

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada **Daftar 9.**

Piutang Bukan Pajak di BUN Rp6,09 triliun

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2011 terdiri dari (dalam Rp):

	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. Piutang Deviden dan Denda pada BA 999.03:		
Nilai Bruto	54.914.355.161	169.176.974.099
Penyisihan	(51.548.429.777)	-
Nilai Bersih	3.365.925.384	-
2. Piutang pada BA 999.07:		
Nilai Bruto	878.939.094.800	960.768.242.276
Penyisihan	(4.394.695.474)	-
Nilai Bersih	874.544.399.326	-
3. Piutang pada BA 999.08:		
Nilai Bruto	7.438.160.200	167.584.222.817
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	7.438.160.200	-
4. Piutang PT PPA pada BA 999.99:		
Nilai Bruto I	2.786.071.531	2.121.512.481
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	2.786.071.531	-
5. Piutang Migas pada BA 999.99:		
Nilai Awal	5.145.286.422.767	4.278.399.501.958
Penyisihan	(262.082.042.787)	-
Nilai Bersih	4.883.204.379.980	-
Piutang PNBP (Bruto)	**6.089.364.104.459**	**5.578.050.453.631**
Penyisihan	(318.025.168.038)	-
Piutang PNBP (Bersih)	**5.771.338.936.421**	-

1. Piutang Dividen dan Denda (BA 999.03) terdiri dari:

   a. Piutang Lancar sebesar Rp3.382.839.582 terdiri dari (dalam Rp):

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (0,5%)	Nilai Bersih
1. PT PDI P Batam	85.865.000	429.325	85.435.675
2. PT. Kawasan Industri Wijayakusuma	26.854.203	134.271	26.719.932
3. PT. Perkebunan Nusantara IX	1.450.120.379	7.250.602	1.442.869.777
4. Perum Perumnas	600.000.000	3.000.000	597.000.000
5. PT. Perkebunan Nusantara II	800.000.000	4.000.000	796.000.000
6. PT Inhutani I	300.000.000	1.500.000	298.500.000
7. PT Inhutani V	120.000.000	600.000	119.400.000
Jumlah	**3.382.839.582**	**16.914.198**	**3.365.925.384**

   b. Piutang Macet sebesar Rp51.531.515.579 terdiri dari (dalam Rp):

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (100%)	Nilai Bersih
1. PT. Istaka karya	6.391.154.934	6.391.154.934	-
2. PT. Bina Karya	566.628.402	566.628.402	-
3. PT. Balai Pustaka	986.749.799	986.749.799	-
4. PT. Industri Sandang Nusantara	43.586.982.444	43.586.982.444	-
Jumlah	**51.531.515.579**	**51.531.515.579**	-

2. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) terdiri dari:
   a. Piutang pada Kementerian Keuangan sebesar Rp387.038.918.793 yang merupakan kelebihan pembayaran terhadap subsidi Minyak Tanah kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2010.
   b. Piutang pada Kementerian Pertanian sebesar Rp56.786.969.165 merupakan kelebihan pembayaran subsidi pupuk berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2010 yang berasal dari BUMN Operator Subsidi Pupuk PT Pupuk Iskandar Muda.
   c. Piutang pada Perum Bulog sebesar Rp435.113.206.842 merupakan kelebihan pembayaran atas subsidi pangan berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2011.

3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp7.438.160.200 merupakan piutang pada Perum BULOG.

4. Piutang PT PPA sebesar Rp2.786.071.531 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Saldo Awal (1)	**2.121.512.481**	**6.632.512.481**
Koreksi Saldo Awal (2)	755.838	
Penerimaan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Divestasi saham yang dikelola	38.000.000.000	300.000.000.000
Dividen atas saham yang dikelola	466.040.291	7.752.000.000
Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola	-	-
Pokok dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola	156.974.861.111	116.517.000.000
Redemption Obligasi		
Penjualan dari right saham		364.000.000
HPA aset lainnya		67.000.000
Jumlah HPA	**195.440.901.402**	**431.332.512.481**
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan	2.627.252.574	
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	690.648.835	2.519.000.000
Jumlah Penerimaan (3)	**198.756.802.811**	**433.851.512.481**

Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	100.414.305	212.000.000
Imbalan Pengelolaan Aset	50.337.375.239	52.731.000.000
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset	5.033.737.524	5.273.000.000
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan	10.041.430	21.000.000
Biaya aset periode sebelumnya		26.026.000.000
Imbalan Kinerja	1.363.997.000	9.868.000.000
PPN Imbalan Kinerja	136.399.700	986.000.000
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penugasan khusus		-
Jumlah Pengurangan (4)	**56.981.965.198**	**95.117.000.000**
HPA yang harus disetor ke Pemerintah ((5)=(1)+(2) + (3) –(4))	143.899.105.932	338.734.512.481
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (6)	141.113.034.401	336.613.000.000
Jumlah HPA yang masih harus disetor (7) = (5) – (6)	**2.786.071.531**	**2.121.512.481**

5. Piutang Migas pada BA 999.99 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Piutang pada PT Pertamina	625.801.393.360	1.315.721.773.272
Piutang Migas Lainnya	4.519.485.029.407	2.962.677.728.686
Piutang Migas (Bruto)	**5.145.286.422.767**	**4.278.399.501.958**
Penyisihan	(262.082.042.787)	-
Piutang Migas (Netto)	**4.883.204.379.980**	-

C.2.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp0

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp65.404.443. Pada tahun 2010, Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca yang berada di BAPPENAS dan untuk tahun 2011 seluruhnya sudah dilunasi.

C.2.12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TGR Rp60,47 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp60.470.939.992 dan Rp38.591.410.963 merupakan saldo Tagihan TGR pada K/L dan BUN yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp9.225.983.342 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp60.470.939.992 dikurangi penyisihan sebesar Rp51.244.956.650.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dan BUN dapat dilihat pada **Daftar 10.**

C.2.13. Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang

Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Rp0

Jumlah Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp4.842.752.393.007. Saldo per 31 Desember 2010 merupakan bagian lancar Rekening Dana Investasi/Rekening Pemerintah Daerah (RDI/RPD) dan SLA kepada pemda, BUMN, dan BUMD yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Jangka Panjang RDI/RPD direklasifikasi menjadi Aset Lainnya (***lihat Catatan C.2.28.***), sehingga bagian lancarnya tidak lagi disajikan pada akun Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang, melainkan pada akun Bagian Lancar Penerusan Pinjaman.

Uang Muka Belanja Rp1,28 triliun

C.2.14. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.279.165.315.147 dan Rp614.122.632.355 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa K/L. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Uang Muka Belanja. Rincian Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Daftar 11.**

Piutang dari Kegiatan BLU Rp1,22 triliun

C.2.15. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.216.391.989.142 dan Rp1.121.930.274.893. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.016.932.672.808 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.216.391.989.142 dikurangi penyisihan sebesar Rp199.459.316.334. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari piutang kegiatan operasional BLU sebesar Rp1.177.422.667.288, dan non operasional BLU sebesar Rp38.969.321.854.

Piutang Kegiatan Operasional BLU terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	250.789.471.050	259.176.487.979
2. BLU di Kementerian Keuangan	14.938.119.944	1.800.000
3. BLU di Kementerian Perindustrian	2.465.869.970	1.585.267.809
4. BLU di Kementerian ESDM	14.319.049.849	
5. BLU di Kementerian Perhubungan	409.502.500	-
6. BLU di Kementerian Diknas	170.476.463.630	42.200.054.389
7. BLU di Kementerian Kesehatan	651.984.000.111	751.575.087.776
8. BLU di Kementerian Agama	1.911.791.625	2.640.363.334
9. BLU di Kementerian PU	46.058.787.010	30.669.411.038
10. BLU di Kementerian Ristek		92.820.000
11. BLU di Kementerian KUKM	2.298.548.194	566.979.362
12. BLU di Kepolisian RI	13.590.873.945	6.819.067.311
13. BLU di BPPT	5.779.508.380	1.745.454.370
14. BLU di LAPAN	246.647.687	-
15. BLU di Kemen Perumahan Rakyat	2.164.038.443	7.769.980.831
Jumlah Nilai Bruto	**1.177.422.667.288**	**1.104.842.774.199**
Penyisihan	(198.298.929.059)	-
Jumlah Nilai Bersih	**979.123.738.229**	-

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	13.078.384.966	10.463.985.064
2. BLU di Kementerian Keuangan	22.027.746.408	6.146.237.068
3. BLU di Kementerian Perhubungan	62.895.200	-
4. BLU di Kementerian Kesehatan	3.462.783.610	223.938.493
5. BLU di Kementerian Agama	335.446.062	253.340.069
6. BLU di LAPAN	2.065.608	-
Jumlah Nilai Awal	**38.969.321.854**	**17.087.500.694**
Penyisihan	(1.160.387.275)	-
Jumlah Nilai Bersih	**37.808.934.579**	-

Piutang lain-lain Rp24,98 triliun

C.2.16. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp24.977.956.337.945 dan Rp12.589.882.121.588 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp7.991.547.100.126 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.977.956.337.945 dikurangi penyisihan sebesar Rp16.986.409.237.819. Piutang Lain-lain terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Piutang di K/L:		
Nilai Bruto	12.678.235.141.724	296.809.311.019
Penyisihan	(6.040.484.808.807)	-
Nilai Bersih	6.637.750.332.917	-
Piutang di BUN:		
Nilai Bruto	12.299.721.196.221	12.293.072.810.569
Penyisihan	(10.945.924.429.012)	-
Nilai Bersih	1.353.796.767.209	-
Nilai Bruto	**24.977.956.337.945**	**12.589.882.121.588**
Penyisihan	(16.986.409.237.819)	-
Nilai Bersih	**7.991.547.100.126**	-

1. Piutang di K/L terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. BPK		408.856
2. Kejaksaan Agung	12.678.235.141.724	287.253.500.095
3. BRR NAD - Nias		516.968.200
4. Badan SAR		9.038.433.868
Nilai Piutang Bruto	**12.678.235.141.724**	**296.809.311.019**
Penyisihan	(6.040.484.808.807)	-
Nilai Piutang Bersih	**6.637.750.332.917**	-

2. Piutang yang berada di BUN terdiri dari (dalam Rp):

Piutang pada BUN	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
a. Piutang pada BA 999.04		
Nilai Bruto	716.768.609.336	677.748.511.676
Penyisihan	(33.351.190.394)	(53.567.541.189)
Nilai Bersih	683.417.418.942	624.180.970.487
b. Piutang pada BA 999.05		
Nilai Bruto	419.570.214.233	359.541.843.144
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	419.570.214.233	-
c. Piutang pada BA 999.07		
Nilai Bruto	-	171.965.009.662
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	-	-
d. Piutang pada BA 999.08		
Nilai Bruto	174.775.083.006	-
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	174.775.083.006	-

e. Piutang pada BA 999.99 - Bank Dalam Likuidasi		
Nilai Bruto	10.953.666.946.224	11.137.384.987.276
Penyisihan	(10.912.573.238.618)	-
Nilai Bersih	41.093.707.606	-
f. Piutang pada BA 999.99 - Belanja Pensiun		
Nilai Bruto	34.940.343.422	-
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	34.940.343.422	-
Nilai Piutang Bruto	**12.299.721.196.221**	**12.293.072.810.569**
Penyisihan	10.945.924.429.012	-
Nilai Piutang Bersih	**1.353.796.767.209**	-

a. Piutang Lain-lain pada BA 999.04 per 31 Desember 2011 sebesar Rp716.768.609.336 merupakan piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman, terdiri dari:

- Potensi Tunggakan dapat ditagih sebesar Rp302.910.522.083 yang merupakan bagian hak tagih pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk dapat ditagih pada 2011. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No. 12/PB/2011 mengenai kualitas dan penyisihan piutang, piutang disajikan berdasarkan umur piutang. Piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di bawah 12 (dua belas) bulan per tanggal neraca dikategorikan sebagai potensi tunggakan yang dapat ditagih. Sedangkan piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di atas 12 (dua belas) bulan per tanggal neraca diklasifikasikan pada aset lainnya RDI. Jumlah potensi tunggakan yang dapat ditagih terdiri dari piutang pada:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	139.127.816.604
BUMD	109.830.433.263
Pemda	40.842.037.443
Lainnya	13.110.234.773
Nilai Bruto	**302.910.522.083**
Penyisihan	(31.281.899.958)
Nilai Bersih	**271.628.622.125**

- Piutang Bunga sebesar Rp341.086.208.549 berdasarkan debitur, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	290.339.333.795
BUMD	24.581.038.281
Pemda	9.703.257.611
Lainnya (*Channeling* dan KUMK SUP 005)	16.462.578.862
Nilai Bruto	**341.086.208.549**
Penyisihan	(1.705.431.043)
Nilai Bersih	**339.380.777.506**

- Piutang Denda yang telah diterbitkan Surat Tagihannya sebesar Rp72.771.878.704.

b. Piutang Lain-lain pada BA 999.05 sebesar Rp419.570.214.233 terdiri dari piutang lebih salur DBH Pajak sebesar Rp10.388.396.634, piutang lebih salur DBH SDA sebesar Rp110.600.169.551, dan piutang atas sisa DPPID yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp298.581.648.048.

c. Piutang Lain-lain pada BA 999.08 per 31 Desember 2011 sebesar Rp174.775.083.006 merupakan piutang pada Kementerian Pertanian berupa cadangan benih yang berada di penangkaran yang merupakan nilai stock Cadangan

Benih Nasional (CBN) yang sementara digunakan oleh PT Sang Hyang Seri (SHS) sebanyak 9.334.187 kg dalam 4 (empat) komoditas. Berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2010, persediaan di penangkaran dan benih yang rusak dimasukkan di akun Piutang Lain-lain pada Ditjen Tanaman Pangan yang semula disajikan BA 999.07 di ubah menjadi BA 999.08. Nilai per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp171.965.009.662.

d. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang pada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah	8.298.487.312.747	8.382.155.353.798
5 BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah	2.655.229.633.477	2.755.229.633.478
Nilai Bruto	**10.953.666.946.224**	**11.137.384.987.276**
Penyisihan	(10.912.573.238.618)	-
Nilai Bersih	**41.093.707.606**	-

1). Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
Dana BLBI BDL yang di-*cessie*-kan	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi:		
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.645.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353.977)	(228.053.353.977)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.463.070)	(323.144.463.070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.168.751)	(140.764.168.751)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.667.811)	(84.175.667.811)
- Pengembalian tahun 2011	(83.718.041.051)	-
Nilai Bruto	**8.298.437.312.747**	**8.382.155.353.798**
Penyisihan	(8.257.343.605.141)	-
Nilai Bersih	**41.093.707.606**	-

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah cq. Kementerian Keuangan dengan, 1 (satu) BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada **Daftar 12.**

2). Piutang pada 5 BDL Eks Dana Penjaminan merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap 5 BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
Total dana BLBI BDL yang di-*cessie*-kan	3.921.282.950.812	3.921.282.950.812
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.664.470)	(366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010	(146.889.652.865)	(146.889.652.865)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2011	(100.000.000.000)	-
Nilai Bruto	**2.655.229.633.477**	**2.755.229.633.477**
Penyisihan	(2.655.229.633.477)	-
Nilai Bersih		-

Seluruh Piutang pada 5 BDL diklasifikasikan pada kelompok dengan kualitas macet, sehingga disisihkan seluruhnya.

e. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang Belanja Pensiun sebesar Rp34.940.343.422 terdiri dari:

1). Kelebihan droping ke PT Taspen (Persero) bulan November 2011 ke PT Taspen (Persero) sebesar Rp2.580.094.035 yang terdiri dari belanja PNS Daerah Rp1.813.828.466, TNI/Polri (lama) Rp335.240.048, Hakim Rp50.466.468, Tunjangan veteran Rp277.288.840, dan Tunjangan PKRI/KNIP Rp103.270.213. Kelebihan pencairan ini telah disetor ke Kas Negera oleh PT Taspen (Persero) dengan bukti SSBP No. 2/TSP/112011 tanggal 25 Januari 2012.

2). Kelebihan droping ke PT Taspen (Persero) Desember 2011 sebesar Rp5.513.193 yang terdiri dari Hakim Rp1.292.429 dan Tunjangan PKRI/KNIP Rp4.220.764. Kelebihan pencairan ini telah disetor ke Kas Negara oleh PT Taspen (Persero) dengan bukti SSBP No. 1/TSP/112011 tanggal 4 Januari 2012.

3). Kelebihan pencairan iuran asuransi kesehatan veteran non tuvet sebesar Rp22.674.141.694. Kelebihan pencairan ini telah disetor ke Kas Negara oleh PT Askes (Persero) dengan bukti SSBP No. 1/ASK/0212 tanggal 16 Februari 2012.

4). Saldo uang pensiun yang tidak diambil melalui PT Asabri (Persero) untuk bulan Januari s/d Desember 2011 sebesar Rp9.680.594.500.

C.2.17. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman Rp4,46 triliun

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.462.395.347.776 merupakan potensi kewajiban pokok Penerusan Pinjaman yang jatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2012. Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Jangka Panjang RDI/RPD direklasifikasi menjadi Aset Lainnya (***lihat Catatan C.2.29.***), sehingga bagian lancarnya disajikan pada akun Bagian Lancar Penerusan Pinjaman. Pada LKPP Tahun 2010, Bagian Lancar Penerusan Pinjaman disajikan pada akun Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.440.083.371.037 yang berasal dari nilai bruto Rp4.462.395.347.776 dikurangi penyisihan sebesar Rp22.311.976.739, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
BUMN	3.822.754.353.377
BUMD	453.602.028.304
Pemda	76.293.160.709
Lainnya	109.745.805.386
Nilai Bruto	**4.462.395.347.776**
Penyisihan	(22.311.976.739)
Nilai Bersih	**4.440.083.371.037**

C.2.18. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp75,33 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2011 sebesar Rp75.330.131.480.506 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. Piutang Pajak	47.817.309.090.339
2. Piutang Bukan Pajak	10.253.396.902.624
3. Bagian Lancar TP/TGR	51.244.956.650
4. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	22.311.976.739
5. Piutang dari kegiatan BLU	199.459.316.334
6. Piutang Lain-Lain	16.986.409.237.820
Penyisihan Piutang	**75.330.131.480.506**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp47.817.309.090.339 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp10.253.396.902.624 dapat dilihat pada **Daftar 9.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp51.244.956.650 dapat dilihat pada **Daftar 10.**
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp22.311.976.739 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp199.459.316.334 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. BLU di Sekretariat Negara	16.892.151.606
2. BLU di Kementerian Keuangan	648.629.749
3. BLU di Kementerian Perindustrian	311.975.577
4. BLU di Kementerian ESDM	2.980.684.333
5. BLU di Kementerian Perhubungan	42.224.176
6. BLU di Kementerian Diknas	2.733.427.360
7. BLU di Kementerian Kesehatan	175.665.158.976
8. BLU di BPPT	28.897.542
9. BLU di LAPAN	145.396.848
10. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	10.770.167
Jumlah	**199.459.316.334**

6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Lain-Lain sebesar Rp16.986.409.237.820 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. Kejaksaan Agung	6.040.484.808.808
2. BA 999.04	33.351.190.394
3. BA 999.99 – Piutang Bank Dalam Likuidasi	10.912.573.238.618
Jumlah	**16.986.409.237.820**

C.2.19. Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU Rp170,55 miliar

Jumlah Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp170.553.016.059 dan Rp30.750.000.000, merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam tahun 2011 berupa Deposito berjangka 12 bulan. Nilai Investasi Jangka Pendek tersebut berada di BLU pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp70.553.016.059 dan BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp100.000.000.000.

C.2.20. Investasi Jangka Pendek Lainnya

Investasi Jangka Pendek Lainnya Rp135,84 miliar

Jumlah Investasi Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp135.839.486.878 dan Rp0. Nilai Investasi Jangka Pendek tersebut berada pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp135.839.486.878 yang terdapat pada Universitas Indonesia sebesar Rp11.992.500.000, Universitas Gadjah Mada sebesar Rp17.151.108.203, dan Institut Teknologi Bandung Rp106.695.878.675.

C.2.21. Persediaan

Persediaan Rp59,21 triliun

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp59.214.846.453.160 dan Rp36.366.060.681.005 dan merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Persediaan	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
Persediaan di K/L	56.048.198.411.852	33.071.754.378.769
Persediaan di BLU	590.795.321.790	457.683.029.189
Persediaan di BUN	2.575.857.719.518	2.836.623.273.047
Jumlah	**59.214.846.453.160**	**36.366.060.681.005**

Persediaan di K/L per 31 Desember 2011 terbesar berada di Kementerian Pertahanan sebesar Rp46.209.249.007.353, POLRI sebesar Rp2.458.580.229.680, Kementerian Perhubungan sebesar Rp749.249.628.830, Kementerian Kesehatan sebesar Rp490.573.034.841, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp745.794.093.746, BKKBN sebesar Rp666.545.768.411, Komisi Pemilihan Umum Rp485.017.642.483. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Daftar 13.**

Persediaan di BUN per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.575.857.719.518 terdiri dari:

1. Persediaan pada BA 999.07 sebesar Rp4.841.100.000. Penurunan Persediaan disebabkan mulai tahun 2011 nilai persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) yang berada di gudang PT Sang Hyang Seri (Persero) pada Satker Ditjen Tanaman Pangan (Kode Satker 969380) BA 999.07 dipindahkan ke Satker Ditjen Tanaman Pangan (Kode Satker 956099) BA 999.08.
2. Persediaan pada BA 999.08 sebesar Rp2.571.016.619.518, merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca K/L dan Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), yaitu:
   a. Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Perum Bulog per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.443.505.411.611, setara dengan Kuantum 378.838.048,31 Kg dikalikan dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir yaitu Rp6.450/Kg. Sedangkan nilai stock CBP berdasarkan harga perolehan per tahun dapat dirinci sebagi berikut:

No.	Tahun	Kuatum (Kg)	Harga Perolehan per Kg (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2007	0	4.619,99	0
2	2008	41.981.106,62	4.900,00	205.707.422.438
3	2009	181.818.182,00	5.500,00	1.000.000.001.000
4	2011	155.038.759,69	6.450,00	1.000.000.000.000
Jumlah		**378.838.048,31**		**2.205.707.423.438**

Realisasi penyaluran CBP pada Tahun 2011 sebesar 235.739.492,66 kg berdasarkan

Delivery Order (DO) terdiri dari penyaluran Bencana Alam sebanyak 14.767.990,20 Kg dan penyaluran Operasi Pasar Murni Tahun 2011 sebanyak 221.795.094,46 Kg.

b. Persediaan di berbagai instansi lainnya pengguna BA 999.08 sebesar Rp127.511.207.907.

C.2.22. Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD)

RDI/RPD direklasifikasi sebagai bagian Aset Lainnya

Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 31 Desember 2011 disajikan pada kelompok Aset Lainnya (***lihat Catatan C.2.29.).*** Sedangkan saldo per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp43.367.037.927.876, berasal dari nilai bruto Rp43.584.962.741.584 dikurangi penyisihan Rp217.924.813.708.

C.2.23. Dana Bergulir

Dana Bergulir Rp8,19 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp8.195.256.111.510 dan Rp3.891.209.869.656 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. Kementerian Perindustrian		3.469.232.868
2. Kementerian Kehutanan	4.223.566.054	466.591.360
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan		12.206.756.931
4. Kementerian Lingkungan Hidup	49.306.342.015	49.447.128.945
5. Kementerian Koperasi dan UKM	2.050.276.290.126	2.113.145.137.627
6. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	3.872.785.113.151	246.832.814.636
7. Kementerian Pekerjaan Umum	2.218.664.800.164	1.465.642.207.289
Jumlah	**8.195.256.111.510**	**3.891.209.869.656**

Dari Dana Bergulir sebesar Rp8.195.256.111.510, terdapat Dana Bergulir yang sumber pembiayaannya berasal dari BA 999.03 sebesar Rp7.293.444.736.358 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Koperasi dan KUKM, dan Kementerian Kehutanan.

Penjelasan masing-masing dana bergulir adalah:

1. Dana bergulir di Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp3.469.232.868. Dana bergulir ini merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil yang dikelola oleh 15 LPT-Indag. Pada Tahun 2011, Dana Bergulir di Kementerian Perindustrian direklasifikasi menjadi Aset lain-lain karena sudah tidak memenuhi karakteristik dana bergulir.
2. Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.223.566.054 adalah dana bergulir yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang berasal dari BA 999.03.
3. Dana Bergulir di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp12.206.756.931. Dana Bergulir tersebut merupakan bagian dari Progran Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang digulirkan melalui koperasi usaha bersama (KUB) pada 13 pelabuhan. Pada Tahun 2011, Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

direklasifikasi menjadi Aset lain-lain karena Program penyaluran dana bergulir tersebut sudah berhenti dan dananya tidak digulirkan lagi.

4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp49.306.342.015 dan Rp49.447.128.945 merupakan dana KLH yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri yang akan disalurkan kepada Usaha Ekonomi Lemah sebagai kredit untuk membiayai investasi di bidang lingkungan hidup. Dana ini berasal dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS).

5. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.050.276.290.126. Dari dana tersebut, dana bergulir sebesar Rp852.505.033.137 merupakan dana pemerintah yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga koperasi sebagai stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM juga mengelola dana bergulir yang berasal dari BA 999.03 sebesar Rp1.197.771.256.989 yang disalurkan kepada Lembaga Pengelolaan Dana bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

   Nilai yang disajikan tersebut berdasarkan hasil inventarisasi pihak independen atas perkembangan nilai dana bergulir sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah yang terdapat dalam rekening perguliran dan tagihan yang diperkirakan dapat tertagih. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, bahwa seluruh dana bergulir harus diinventarisasi dan disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jumlah dana bergulir tersebut semula disajikan pada tahun 2007 sebesar Rp3.085.849.168.850 yang berasal antara lain dari belanja bantuan sosial, belanja subsidi, dan belanja modal dari APBN TA 2000 s.d. 2007 yang tidak jelas perlakuannya sebagai dana bergulir atau bantuan sosial sehingga perlu dilakukan koreksi pembukuan.

6. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.872.785.113.151 merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan yang berasal dari BA 999.03. Pembiayaan perumahan ini merupakan dana yang digulirkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah untuk Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH).

7. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.218.664.800.164 merupakan hak tagihan BLU BPJT kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol.

C.2.24. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Rp4,75 triliun

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp4.749.737.167.996 dan Rp98.464.787.895 merupakan investasi yang dikelola oleh beberapa K/L atau BUN, yaitu (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Kementerian Perindustrian	37.380.370.139	49.464.787.895
BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kemenkeu	4.701.776.528.784	49.000.000.000
Perguruan Tinggi Eks BHMN	10.680.269.073	-
Jumlah	**4.749.737.167.996**	**98.464.787.895**

Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dengan jangka waktu pengembalian sampai dengan 5 (lima) tahun.

Nilai Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) merupakan nilai investasi atau pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan operasi BLU PIP. Rincian investasi non permanen lainnya pada BLU PIP adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
Pinjaman kepada PT Nindya Karya (Persero) untuk proyek rehabilitasi Bendungan Gintung dan Pekerjaan Sipil Bendungan dan Jaringan Irigasi Utama pada Sub Proyek Irigasi Batang Anai	2.000.000.000
Pinjaman kepada PT Nindya Karya (Persero) untuk proyek pembangunan Jalan dan Jembatan Molibagu-Mamalia-Taludaa Provinsi Sulawesi Utara	2.000.000.000
Pinjaman kepada Pemprov Sulawesi Tenggara untuk proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B di Provinsi Sulawesi Tenggara	190.000.000.000
Pinjaman kepada Pemkot Surakarta untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type C di Kota Surakarta	7.799.999.000
Pinjaman kepada PT PLN (Persero)	4.499.976.529.784
Jumlah	**4.701.776.528.784**

Investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Eks Badan Hukum Milik Negara sebesar Rp10.580.269.073. Perguruan Tinggi Eks. BHMN yang memiliki investasi jangka panjang yang dilaporkan sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah:

a. Universitas Indonesia dengan nilai sebesar Rp1.602.144.073 terdiri dari investasi pada obligasi sebesar Rp763.125.000 dan investasi pada reksadana sebesar Rp839.019.073.
b. Institut Teknologi Bandung dengan nilai sebesar Rp8.978.125.000 merupakan investasi dalam bentuk obligasi.

C.2.25. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

PMN Rp736,99 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp736.991.554.233.014 dan Rp564.087.107.302.153 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, BHMN, Lembaga Internasional, Badan Usaha Lainnya, BI, dan LPS dengan jumlah (dalam Rp):

PMN	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. BUMN	589.766.661.926.137	523.294.056.365.721
2. BHMN	1.168.034.176.846	2.193.481.021.163
3. Non BUMN	4.261.956.608.163	3.969.599.282.340
4. Lembaga Internasional	35.495.913.032.610	34.629.850.632.929
5. Badan Usaha Lainnya	224.634.258	120.000.000
6. Bank Indonesia	89.572.275.000.000	-
7. Lembaga Penjamin Simpanan	16.726.488.855.000	-
Jumlah	**736.991.554.233.014**	**564.087.107.302.153**

1. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp589.766.661.926.137 dan Rp523.294.056.365.721 disajikan berdasarkan metode

PMN pada BUMN

ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 tersebut merupakan nilai PMN pada 141 BUMN sebesar Rp573.317.888.010.561 dan 5 BUMN/Lembaga dibawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp16.448.773.915.576. Status laporan keuangan pada 141 BUMN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	Jumlah
Audited 2011	119	560.647.212.986.595
Unaudited 2011	17	11.103.091.629.773
LK Audited 2010	3	1.630.723.136.338
Unaudited 2010	1	7.247.892.217
Audited 2005	1	(70.387.634.362)
Jumlah	**141**	**573.317.888.010.561**

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Daftar 14.A.**

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 24 BUMN dengan nilai sebesar Rp44.364.558.169.478,40.

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 termasuk PMN pada 5 BUMN sebesar Rp16.448.773.915.576 yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp2.195.528.404.151, PT Sarana Multigriya Financial sebesar Rp2.508.007.653.072, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp6.963.944.000.000, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp3.703.788.479.000, dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp1.077.505.379.353. **(Daftar 14.B.)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam **Daftar 14.A.**

PMN pada BHMN

2. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebesar Rp1.168.034.176.846 merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

BHMN	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
a. Institut Pertanian Bogor (IPB)	879.080.915.526	1.101.497.542.000
b. Universitas Airlangga	412.443.985.336	1.188.424.915.202
c. BP MIGAS	(123.490.724.016)	(96.441.436.039)
Jumlah	**1.168.034.176.846**	**2.193.481.021.163**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP, untuk itu seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memutuskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga

menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan antara lain PTN BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menetapkan perubahan PT BHMN menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), namun pelaksanaan pengalihan status tersebut masih memerlukan langkah-langkah, yaitu:

- Penetapan melalui Peraturan Pemerintah mengenai PTN BHMN Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Pendidikan Indonesia menjadi instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU.
- Penetapan pengalihan seluruh kekayaan masing-masing PTN BHMN menjadi kekayaan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU.

Mengingat penerapan pelaksanaan PPK BLU masih memerlukan proses lebih lanjut, maka selama masa transisi nilai PMN pada PTN BHMN tetap disajikan dalam laporan keuangan BA 999.03 sebesar nilai aktiva bersih. Nilai investasi pada IPB dan Unair per 31 Desember 2011 merupakan nilai investasi berdasarkan aktiva bersih (ekuitas) per 31 Desember 2010 setelah ditambah/dikurangi dengan penyesuaian yang diperlukan. Aset dan kewajiban yang diperoleh IPB dan Unair selama tahun 2011 telah disajikan pada Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN)

3. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) sebesar Rp4.261.956.608.163, merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*).

   Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 31 Desember 2011 disebabkan oleh:

   a. Perubahan total ekuitas pada Non-BUMN dengan kepemilikan Pemerintah antara 20% sampai dengan 50%, karena perhitungan Pemerintah menggunakan metode ekuitas;

   b. Penjualan kepemilikan Pemerintah pada PT Jakarta International Hotel Development, Tbk senilai Rp18.539.927.809, dan penjualan kepemilikan Pemerintah pada PT Kertas Basuki Rachmat senilai Rp2.632.500.000;

   c. Pengurangan persentase kepemilikan Negara pada PT Kertas Padalarang, diakibatkan pelaksanaan *debt swap* hutang PT Kertas Padalarang menjadi modal Perum Peruri, sehingga kepemilikan pemerintah pada PT Kertas Padalarang menjadi terdilusi.

   d. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Dollar Amerika. Per tanggal 30 Desember 2011 kurs tengah BI adalah USD=Rp9.068, sedangkan per tanggal 31 Desember 2010 adalah USD=Rp8.991. Perubahan kurs tengah BI berpengaruh pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freeport dan PT Indonesia Asahan Alumunium. Pada kedua perusahaan tersebut, Laporan Keuangan disajikan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga harus dilakukan konversi

ke dalam mata uang Rupiah, untuk menghitung nilai kepemilikan Pemerintah;

e. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Ringgit Malaysia. Per tanggal 30 Desember 2011 kurs tengah BI adalah MYR=Rp2.852,925, sedangkan per tanggal 31 Desember 2010 adalah MYR= Rp2.915,85. Perubahan kurs tengah BI untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di Asean Bintulu Fertilizer, mengingat nilai kepemilikan Pemerintah disajikan pada mata uang Ringgit Malaysia.

Pada non-BUMN dengan kepemilikan Negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada Non-BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan oleh Pemerintah, mengingat perhitungan kepemilikan negara menggunakan metode biaya. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak terpengaruh pada status laporan keuangan non-BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas pada Non-BUMN tersebut dapat dilihat pada **Daftar 15.**

Penyertaan pada Lembaga Internasional

4. Penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp35.495.913.032.610 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk *promissory notes*. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2011. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Daftar 16.**

Sampai dengan 31 Desember 2011, dari total penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp35.495.913.032.610, termasuk penyertaan dalam bentuk *promissory notes* sebesar Rp25.928.353.496.005 di antaranya sebesar Rp25.871.090.740.489 kepada *International Monetary Fund* (IMF). Rincian *promissory notes* per Lembaga International adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No.	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)
1.	International Monetary Fund	25.871.090.740.489
2.	International Bank for Reconstruction and Development	39.174.191.965
3.	International Development Association	5.173.139.668
4.	Multilateral Investment Guarantee Agency	10.292.343.224
5.	Common Fund for Commodities	2.623.080.659
	Jumlah total	**25.928.353.496.005**

Penyertaan dalam bentuk *Promissory Notes* disajikan sebagai bagian utang. Lihat Catatan **C.2.38** dan Catatan **C.2.44.**

PMN pada Badan Usaha Lainnya

5. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebesar Rp224.634.258 merupakan Investasi Permanen Pemerintah pada perusahaan penerbit SBSN. Perusahaan penerbit SBSN terdiri atas 4 (empat) perusahaan, yaitu Perusahaan Penerbit SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN I, Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III. Nilai kepemilikan Negara pada masing-masing perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000, Rp10.000.000, Rp104.634.258, dan Rp100.000.000.

PMN pada BI

6. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp89.572.275.000.000 dan Rp0 (nilai PMN pada Bank Indonesia per 31 Desember 2010 sebesar Rp68.798.801.000.000 dilaporkan sebagai Investasi Permanen Lainnya. ***Lihat Catatan C.2.27).*** Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.

PMN pada LPS

7. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp16.726.488.855.000 dan Rp0 (nilai PMN pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2010 sebesar Rp11.298.734.420.000 dilaporkan

sebagai Investasi Permanen Lainnya. ***Lihat Catatan C.2.27).*** Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan.

C.2.26. Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp6,64 miliar

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 yang berjumlah Rp6.637.194.500 dan Rp6.637.194.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%.

C.2.27. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp87,61 triliun

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp87.609.772.784 dan Rp94.959.618.306.997 merupakan nilai PMN pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method)*. Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp87.609.772.784 merupakan penyertaan atau kepemilikan Perguruan Tinggi Eks. BHMN pada beberapa Perusahaan, yaitu Universitas Gajah Mada sebesar Rp60.556.530.103, Institut Teknologi Bandung sebesar Rp26.465.824.601, dan Universitas Indonesia sebesar Rp587.418.080 (setelah dikurangi hak minoritas sebesar Rp3.690.732).

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp94.959.618.306.997 merupakan investasi pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Taman Mini Indonesia Indah, Otorita Asahan, BP Gedung, Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran.

Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Permanen Lainnya pada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) direklasifikasi menjadi Investasi Permanen PMN (***Lihat Catatan C.2.25***), sedangkan Investasi Permanen Lainnya pada Taman Mini Indonesia Indah, Otorita Asahan, BP Gedung, Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya (***Lihat Catatan C.2.29***). Rincian Investasi Permanen Lainnya pada lembaga-lembaga tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. Bank Indonesia		68.798.801.000.000
2. Otorita Batam		14.058.084.887.589
3. LPS		11.298.734.420.000
4. Taman Mini Indonesia Indah		33.041.277.896
5. Otorita Asahan		737.240.235.575
6. BP Gedung Manggala Wanabakti		23.634.260.978
7. Yayasan Gedung Veteran		10.082.224.959
Jumlah		**94.959.618.306.997**

C.2.28. Aset Tetap

Aset Tetap Rp1.567,97 triliun

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.567.974.174.587.750 dan Rp1.184.301.167.405.585 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan).

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Tanah	806.436.356.598.744	565.920.545.473.098
Peralatan dan Mesin	184.852.199.595.042	150.868.673.195.411
Gedung dan Bangunan	152.223.086.918.162	137.042.921.053.205
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	347.164.628.245.235	276.682.171.786.874
Aset Tetap Lainnya	11.517.129.897.802	7.748.128.178.913
Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.780.773.332.765	46.038.727.718.084
Jumlah	**1.567.974.174.587.750**	**1.184.301.167.405.585**

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp142.559.447.179.471, dengan rincian (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Tanah	108.693.570.123.457	107.957.793.253.986
Peralatan dan Mesin	12.275.080.859.622	8.490.665.409.433
Gedung dan Bangunan	16.536.052.792.384	13.083.319.031.365
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.128.925.602.545	968.311.649.972
Aset Tetap Lainnya	458.589.026.465	429.004.262.220
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.507.228.774.998	2.651.180.143.537
Jumlah	**142.559.447.179.471**	**133.580.273.750.513**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp383.673.007.182.165 atau 32,40% dari nilai per 31 Desember 2010. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp117,85 triliun, koreksi penambahan saldo awal hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada Kementerian Pekerjaan Umum berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, koreksi penambahan hasil IP pada Kementerian Perhubungan berupa Tanah dan Jalan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap yang diperoleh dari hibah dan lain-lain.

Nilai Aset Tetap yang disajikan dalam LKPP merupakan konsolidasian dari LKKL dan LKBUN, yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Laporan BMN dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Perbedaan nilai antara LKKL dengan LBMN disajikan pada **Catatan Penting Lainnya.**

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Daftar 17.**

C.2.29. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp438,63 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp438.634.382.921.494 dan Rp278.197.482.029.092. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 berasal dari nilai bruto sebesar Rp458.605.047.654.502 dikurangi penyisihan sebesar Rp19.970.874.008.883.

Aset Lainnya terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	1.375.031.741	1.377.994.323
2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	249.626.424.418	38.234.179.361
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	3.737.310.550.736	-
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	212.907.765.825	212.609.665.200
5. Penerusan Pinjaman	46.540.275.969.109	2.070.158.163.656
6. Aset Tak Berwujud	12.406.618.813.595	9.351.448.050.646
7. Aset yang Dibatasi Penggunaannya	37.253.051.374.408	40.987.103.326.394
8. Dana Kelolaan BLU	19.320.392.310.233	18.459.000.085.715
9. Dana Penjaminan	75.371.634.076	71.135.792.697
10. Aset KKKS *)	150.508.980.296.216	68.224.330.326.991
11. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi) *)	67.543.984.466.405	29.203.047.197.602
12. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	14.762.445.010.365	-
13. Aset Lain-lain	105.992.977.283.250	109.579.037.246.507
Jumlah	**458.605.256.930.377**	**278.197.482.029.092**
Penyisihan	(19.970.874.008.883)	-
Nilai Bersih	**438.634.382.921.494**	-

**) Saldo Aset KKKS dan Aset Eks BPPN per 31 Desember 2010 disajikan pada kelompok Aset Lain-lain*

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

TPA Rp1,38 miliar

Saldo TPA per 31 Desember 2011 adalah Rp1.375.031.741, sedangkan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.377.994.323. Saldo per 31 Desember 2011 tersebut berada di Kementerian Kementerian Negara KUKM sebesar Rp1.375.031.741.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan TGR Rp249,63 miliar

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp249.626.424.418 dan Rp38.234.179.361. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp92.616.345.025 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp249.626.424.418 dikurangi penyisihan sebesar Rp157.010.079.393. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 18.**

3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp3,74 triliun

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.737.310.550.736 dan Rp0 merupakan piutang jangka panjang yang berada pada Kementerian Kehutanan dan BA 999.04. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp3.340.385.470.226, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.737.310.550.736 dikurangi penyisihan sebesar Rp396.925.080.510. Pada LKPP Tahun 2010, Piutang Jangka Panjang Lainnya dilaporkan dalam Aset Lain-lain. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya:

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. Kementerian Kehutanan	758.821.015.245	-
2. BA BUN 999.04	2.978.489.535.491	-
Nilai Bruto	**3.737.310.550.736**	-
Penyisihan pada BA 999.04	(396.925.080.510)	-
Nilai Bersih	**3.340.385.470.226**	

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp758.821.015.245. Nilai tersebut terdiri dari piutang Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mendapatkan *reschedule* pembayaran sebesar Rp445.483.161.236 dan yang tidak mendapatkan *reschedule* pembayaran sebesar Rp313.337.854.009. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Kehutanan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp376.788.382.412, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp758.821.015.245 dikurangi penyisihan sebesar Rp382.032.632.833.
2. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.04 sebesar Rp2.978.489.535.491 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. KUMK	2.929.780.000.000
2. KKPA Bagi Hasil Bank Muamalat	9.000.000.000
3. Dana Induk Lingkungan	39.709.535.491
Nilai Bruto	**2.978.489.535.491**
Penyisihan piutang tidak tertagih	(14.892.447.678)
Nilai Bersih	2.963.597.087.813

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp212,91 miliar

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp212.907.765.825 dan Rp212.609.665.200 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. Kementerian Pendidikan Nasional	298.100.625	
2. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	128.962.165.200	128.962.165.200
3. Kementerian Negara PPN/ BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
Jumlah	**212.907.765.825**	**212.609.665.200**

5. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman Rp46,54 triliun

Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp46.540.275.969.109 dan Rp2.070.158.163.656 merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Meningkatnya nilai Penerusan Pinjaman tersebut karena adanya reklasifikasi dari Investasi RDI/RPD yang pada LKPP Tahun 2010 disajikan pada Investasi Non Permanen. Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 tersebut terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	44.093.413.855.680
Penerusan Pinjaman kepada BUMD	1.406.255.914.320
Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	422.494.717.139
Penerusan Pinjaman Lainnya	618.111.481.970
Nilai Bruto	**46.540.275.969.109**
Penyisihan	(232.701.379.846)
Nilai Bersih	**46.307.574.589.263**

6. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp12,41 triliun

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp12.406.618.813.595 dan Rp9.351.448.050.646 merupakan aset yang berupa *software*, biaya survei/penelitian, dan hak paten yang berada di K/L dan BUN. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Daftar 19.**

7. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp37,25 triliun

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp37.253.051.374.408 dan Rp40.987.103.326.394, terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
1. Kementerian Luar Negeri	325.201.782.094	366.254.294.334
2. Kementerian Pertahanan	5.763.321.157.149	2.549.198.826.943
3. Kementerian ESDM	-	6.225.158.015
4. Kementerian Pendidikan Nasional	266.446.173.044	-
5. Kementerian Kesehatan	2.033.538.302.485	-
6. Kementerian Agama	3.244.412.872.236	2.617.237.058.588
7. Kementerian Kehutanan	50.000.899	5.996.376.112
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	87.114.525.722	87.380.711.730
9. Kementerian Lingkungan Hidup	-	23.480.476.922
10. BUN	25.532.966.560.779	35.331.330.423.750
Jumlah	**37.253.051.374.408**	**40.987.103.326.394**

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp325.201.782.094 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila remise (*cash supply*) terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/ instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.763.321.157.149 merupakan dana devisa berupa L/C yang belum dicairkan oleh pihak ketiga.
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp266.446.173.044 adalah Dana Abadi pada Universitas Airlangga.
4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.033.538.302.485 merupakan dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2011.
5. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar

Rp3.244.412.872.236 terdiri dari:

a. Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp2.077.597.299.329, merupakan dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji.

b. Aset bersih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp1.166.815.572.907. BPIH mengelola setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program BPIH atau adanya keputusan dari pejabat yang berwenang.

6. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp50.000.899 merupakan Deposito Terbeku Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS).

7. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp87.114.525.722 berupa Dana Penguatan Modal (DPM) dan Dana Ekonomi Produktif (DEP) merupakan bagian dari program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat.

8. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp25.532.966.560.779, terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Rekening Retur	-	410.881.635.675
Rekening Cadangan	21.576.465.725.102	31.077.734.977.042
Escrow Bank Mutiara	156.694.824.182	155.364.266.014
Aset Bersih Bapertarum		3.551.726.799.482
Rekening Lainnya	149.466.989.003	-
BA 999.03	3.643.972.716.732	-
BA 999.08	6.367.305.761	135.622.745.537
Jumlah	**25.532.966.560.779**	**35.331.330.423.750**

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

a. Saldo Rekening Retur pada akhir tahun 2011 disetorkan ke Kas BUN di BI, sehingga bersaldo nihil per 31 Desember 2011.

b. Rekening Cadangan sebesar Rp21.576.465.725.102 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Rekening Cadangan Reboisasi	4.546.878.110.595	4.546.878.110.596
Rekening Cadangan Subsidi/PSO	7.523.846.941.346	16.767.875.871.035
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	9.505.740.673.161	8.374.050.605.673
Rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG		1.388.930.389.738
Jumlah	**21.576.465.725.102**	**31.077.734.977.042**

- Rekening Cadangan Reboisasi sebesar Rp4.546.878.110.595 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan

No. 06.1/PMK.01/2007 dan No. 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

- Rekening Cadangan Subsidi/PSO adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa pagu DIPA subsidi/PSO yang belum dapat dicairkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Pencairan dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Subsidi/PSO dibatasi sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam PMK No. 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, kecuali rekening cadangan Subsidi/PSO yang berkaitan dengan BULOG pencairannya menunggu hasil audit BPK.

  Rincian Rekening Cadangan Subsidi yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
Subsidi Premium	31.666.361.825	2.113.237.391.817
Subsidi Minyak Tanah	238.206.878.679	595.985.914.429
Subsidi Minyak Solar	110.794.727.694	974.289.783.407
Subsidi LPG	348.690.214.595	1.043.741.129.751
Subsidi Listrik	284.141.726.597	271.474.935.307
Subsidi Pangan	3.880.034.638.700	4.234.526.934.429
Subsidi Benih	38.607.101.708	1.457.523.458.172
Subsidi Pupuk	2.250.617.999.430	5.067.111.215.930
Subsidi Minyak Goreng	-	-
Subsidi PELNI	124.457.849.390	50.000.000.000
Subsidi PT KAI	152.468.942.728	134.350.003.664
Subsidi PT Pos dan Giro	64.260.500.000	43.750.000.000
PSO Perum BULOG	-	14.061.909.276
Subsidi Bunga Kredit Program	-	767.823.194.853
Jumlah	**7.523.846.941.346**	**16.767.875.871.035**

Total rekening Dana Cadangan Subsidi/PSO adalah sebesar Rp8.895.590.963.425. Dari jumlah tersebut, yang disajikan dalam Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebesar Rp7.523.846.941.346 karena telah disalurkan kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Februari 2012, sementara sisanya sebesar Rp1.371.744.022.079 disajikan dalam Kas Lainnya dan Setara Kas karena telah disetorkan ke Kas Negara sampai akhir Februari 2012.

- Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil sebesar Rp9.505.740.673.161 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa penerimaan sumber daya alam setiap tahun yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan yang belum disalurkan kepada Pemerintah Daerah karena belum teridentifikasi daerah penghasilnya. Rincian Rekening Cadangan DBH yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut

Jenis Transfer	Jumlah (Rp)
1. Dana Cadangan DBH Minyak Bumi 15%	3.127.743.501.674
2. Dana Cadangan DBH Gas Bumi 30%	3.555.354.558.735
3. Dana Cadangan DBH Iuran Tetap	19.230.900.313
4. Dana Cadangan DBH Royalti	2.527.994.480.676
5. Dana Cadangan DBH IIUPH/IHPH	23.157.369.419
6. Dana Cadangan DBH PSDH	114.471.796.956
7. Dana Cadangan DBH Dana Reboisasi	122.439.418.268
8. Dana Cadangan DBH Perikanan	15.348.647.120
Total	**9.505.740.673.161**

Total Rekening Cadangan DBH adalah sebesar Rp9.899.647.659.901. Dari jumlah tersebut, yang disajikan dalam Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebesar Rp9.505.740.673.161 karena telah disalurkan kepada pemda sampai dengan akhir Februari 2012, sementara sisanya sebesar Rp393.906.986.740 disajikan dalam Kas Lainnya dan Setara Kas karena telah disetorkan ke Kas Negara sampai akhir Februari 2012.

c. Rekening *escrow* Bank Mutiara sebesar Rp156.694.824.182 adalah Rekening *escrow* pada rekening No. 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (dulu Bank Century) yang setara dengan USD17,279,976.20. Rekening tersebut digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat.

d. Rekening Lainnya yang digunakan untuk tujuan tertentu adalah sebesar Rp149.465.989.003 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Rekening	Jumlah (Rp)
1. Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR Nomor 500.000004980	62.085.362.115
2. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara nomor 502.000001980	0
3. BUN Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan nomor 502.000002980	83.469.078.439
4. Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham PT Telkom Di Pasar Domestik nomor 510.000239980	1.339.289.645
5. Rekening Depkeu U/Penampungan Hibah Dari luar Negeri Dlm Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD nomor 602.074411980	2.572.258.804
Total	**149.465.989.003**

e. Aset Bapertarum tidak disajikan lagi dalam neraca. ***Lihat Catatan Penting Lainnya.***

f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 terdiri dari:

1) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* sebesar Rp24.911.006.842,93 yang terdiri atas:

- Dana pada rekening penampungan anggaran *Debt Nature Swap* Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp452.994.640,06 yang terdiri dari sisa anggaran Debt Nature Swap Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp1.933.128,38, dan jasa giro setelah dikurangi administrasi sebesar Rp451.061.511,68.
- Dana pada rekening penampungan dana pokok dan bagi hasil sebesar Rp24.458.012.202,87 yang terdiri dari dana pengembalian dana pokok dan bagi hasil sebesar Rp24.219.632.050,87, dan dana jasa giro setelah dikurangi administrasi sebesar Rp238.380.152.

Pada LKPP Tahun 2010, dana *Debt Nature Swap* disajikan pada Dana Bergulir. Karena dana tersebut sudah tidak digulirkan kembali maka pada LKPP Tahun 2011 disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp3.617.700.000.000 yang merupakan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.

Endowment Fund (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) bersumber dari realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan pada Bagian Anggaran 999.03.

Sesuai dengan PMK Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan, dinyatakan bahwa BLU di bidang pendidikan yang mengelola DPPN adalah satuan kerja (satker) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

Pada LKPP Tahun 2010, dana pengembangan pendidikan nasional dilaporkan sebagai bagian dari Aset Lain-lain. Pada LKPP Tahun 2011, dana pengembangan pendidikan nasional direklasifikasi menjadi Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

3) Setoran dividen PT Sarinah sebesar Rp1.361.709.888,90.

Setoran dividen PT Sarinah oleh Bank Mandiri disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya dengan nomor rekening 502.000.002, dimana seharusnya disetorkan ke rekening kas umum negara 502.000.000.980. Berdasarkan hal tersebut, setoran dividen sarinah tersebut tertampung terlebih dahulu pada Rekening Pemerintah Lainnya, dan akan dilaporkan sebagai pendapatan dan dapat digunakan sebagai kas pemerintah setelah dana tersebut dipindahkan ke Rekening Kas Umum Negara.

g. Dana sebesar Rp6.367.305.761 pada BA 999.08 merupakan dana devisa berupa L/C yang belum dicairkan oleh pihak ketiga pada Kementerian Pertahanan yang sumber dananya berasal dari BA 999.08.

8. Dana Kelolaan BLU Yang Belum Digulirkan/Disalurkan

Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan Rp19,32 triliun

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp19.320.332.310.233 dan Rp18.459.000.085.715 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. Kementerian Keuangan	10.352.269.122.760	12.878.500.000.000
2. Kementerian Kehutanan	2.010.359.132.946	2.014.116.107.640
3. Kementerian Koperasi dan UKM	644.594.967.842	295.810.000.000
4. Kementerian Perumahan Rakyat	2.381.863.886.849	2.436.216.185.364
5. Kementerian Pekerjaan Umum	3.931.335.199.836	834.357.792.711
Jumlah	**19.320.332.310.233**	**18.459.000.085.715**

Dana kelolaan pada masing-masing BLU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Kelolaan pada Kementerian Keuangan berada di BLU Pusat Investasi Pemerintah yang disimpan pada rekening giro dan deposito, dengan rincian (dalam Rp):

Nama Bank	Saldo
1. Giro di Bank BRI (RIDI)	953.471.216
2. Giro di Bank BRI (Geothermal)	500.000.000
3. Giro Dollar AS di Bank BRI*	1.815.651.544
4. Deposito BRI (9 Bilyet)	4.245.000.000.000
5. Deposito Bank Mandiri (5 Bilyet)	2.086.000.000.000
6. Deposito BTN (5 Bilyet)	800.000.000.000
7. Deposito BNI (4 Bilyet)	698.000.000.000
8. Deposito Bank Bukopin (8 Bilyet)	1.215.500.000.000
9. Deposito Bank Sumut (1 Bilyet)	458.500.000.000
10. Deposito Bank BJB (2 Bilyet)	575.000.000.000

11. Deposito Bank Bukopin Syariah (1 Bilyet)	10.000.000.000
12. Deposito Bank Muamalat (3 Bilyet)	252.000.000.000
13. Deposito Bank Nagari (1 Bilyet)	9.000.000.000
Jumlah	**10.352.269.122.760**

2. Dana Kelolaan pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.010.359.132.946 berada di BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang disimpan di 1 rekening Bank BRI.

3. Dana Kelolaan pada Kementerian Koperasi UKM berada di BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM. Dana ini terdapat pada 32 rekening giro sebanyak Rp244.504.967.842, dan 5 rekening deposito sebesar Rp400.000.000.000.

4. Dana Kelolaan pada Kementerian Perumahan Rakyat berada di BLU Pusat Pembiayaan Perumahan dengan sebagai berikut (dalam Rp):

Nama Bank	Saldo
1. BTN	26.752.277
2. BTN Syariah	7.102.056
3. BUKOPIN	2.288.472
4. Mandiri	1.000.000
5. Bank Riau Kepri	276.732.600
6. Bank Riau Kepri Syariah	1.000.000
7. Bank Sumut	1.271.785.664
8. Bank Sumut Syariah	350.687.250
9. Bank Kaltim	1.891.413.500
10. Bank Sumsel Babel	103.107.449
11. Bank NTT	88.564.652
12. Bank DIY	51.889.700
13. BNI	196.334.003
14. BUKOPIN	660.000.000
15. BUKOPIN	1.049.220.000.000
16. BTN	404.960.000.000
17. BTN	1.670.000.000
18. BTN	8.870.000.000
19. BTN Syariah	260.790.000.000
20. BTN Syariah	1.460.000.000
21. Mandiri	100.000.000.000
22. Mandiri	50.000.000.000
23. BNI	500.000.000.000
24. Pendapatan dari pengelolaan kas rekening Dana Kelolaan	(34.770.774)
Total	**2.381.863.886.849**

5. Dana Kelolaan pada Kementerian Pekerjaan Umum berada di BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT adalah (dalam Rp):

Nama Bank	Saldo
1. Giro Bank Mandiri Acc. No. 126-00-0 481 9396	7.556.478.929
2. Giro BRI Acc. No. 00000193-01-000751-30-3	20.723.449.446
3. Giro BNI Acc. No. 5522522235	10.055.271.461
4. Deposito Bank Mandiri	965.000.000.000
5. Deposito BNI	150.000.000.000
6. Deposito BTN	200.000.000.000
7. Deposito BRI	2.325.000.000.000
8. Deposito BRI Syarian	253.000.000.000
Jumlah	**3.931.335.199.836**

9. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan Rp75,37 miliar

Dana Penjaminan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp75.371.634.076 dan Rp71.135.792.697 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai penjaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin. Dana penjaminan tersebut dikelola oleh perusahaan penjamin, yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia.

10. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS Rp150,51 triliun

Aset KKKS per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp150.508.980.296.216 dan Rp68.224.330.326.991. Nilai Aset KKKS per 31 Desember 2011 tersebut berupa tanah dengan luas 667.919.254 m2 sebesar Rp14.362.284.169.984 yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS sebagai hasil inventarisasi terhadap 44 KKKS, dan aset lain non tanah sebesar Rp136.146.696.126.232 berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian pada 76 KKKS.

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2011 disajikan pada **Daftar 20.**

Terdapat aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian, namun tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2011, yaitu:

1. Aset sumur yang tidak digunakan sebanyak 623 sumur pada 19 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.119.972.096.205.
2. Aset *Subsequent Expenditure* sebanyak 13.897 item pada 34 KKKS dengan nilai sebesar Rp44.345.555.350.377.
3. Aset Kondisi Rusak Berat 21.505 item pada 52 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.313.308.913.398.
4. Aset yang dalam proses penghapusan pada KKKS Pertamina Hulu Energi West Madura *Offshore* (dh. Kodeco Energy) senilai Rp.927.406.395.
5. Aset Non Tanah sejumlah 368 item pada 5 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.382.453.216.163.
6. Aset perolehan di atas tahun 2011 52 KKKS senilai USD2,383,329,180 belum dimasukkan dalam Neraca.
7. Aset dengan nilai wajar negatif sejumlah 209 item dengan nilai perolehan negatif sebesar USD24,019,980 yang merupakan koreksi atas nilai perolehan aset.

11. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN Rp67,54 triliun

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp67.543.984.466.405 dan Rp29.203.047.197.602 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih), sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero).

Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2011 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
Pinjaman yang Diberikan	7.585	35.465.120.460.776
Tagihan PKPS	23	29.606.876.725.368
Aset Non Inti-Properti	1.643	1.981.229.805.153
Aset Non Inti-Inventaris	36.985	12.135.475.108
Penempatan Antar Bank dan Nostro	n.a.	478.622.000.000
Jumlah		**67.543.984.466.405**

Termasuk di dalam Aset Eks BPPN tersebut adalah tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebesar Rp29.606.876.725.368 yang merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA), *Master of Refinancing and Notes Inssuence Agreement* (MRNIA), dan piutang BPPN kepada eks PSP Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan *Bank Take Over* (BTO) II dalam perjanjian Akta Pengakuan Uang (APU).

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Daftar 21.**

12. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Rp14,76 triliun

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp14.762.445.010.365 dan Rp0. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. Otorita Batam	13.922.723.215.421	-
2. Taman Mini Indonesia Indah	42.277.377.168	-
3. Otorita Asahan	746.947.319.389	-
4. BP Gedung Manggala Wanabakti	21.352.989.643	-
5. Yayasan Gedung Veteran	11.120.585.877	-
6. Badan Amil Zakat	16.313.704.645	-
7. Badan Wakaf Indonesia	1.709.818.222	-
Jumlah	**14.762.445.010.365**	-

Pada LKPP Tahun 2010, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya pada Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah, Otorita Asahan, BP Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran dilaporkan pada Investasi Non Permanen Lainnya. Nilai yang disajikan pada Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya tersebut merupakan nilai ekuitas.

13. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp105,99 triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp105.992.977.283.250 dan Rp109.579.037.246.507 merupakan aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp86.808.739.814.116, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp105.992.977.283.250 dikurangi penyisihan atas piutang pada BA 999.04 sebesar Rp19.184.237.469.134. Berikut rincian Aset Lain-lain (dalam Rp):

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. K/L	36.908.907.616.802	56.966.506.583.499
2. BA BUN 999.03	142.127.657.545	1.000.000.000.000
3. BA BUN 999.04	19.419.108.122.985	2.934.591.997.850
4. BA BUN 999.08	46.701.991.689	30.415.353.808
5. BA BUN 999.99	49.476.131.894.229	48.647.523.311.350
Nilai Bruto	**105.992.977.283.250**	**109.579.037.246.507**
Penyisihan pada BA 999.04	(19.184.237.469.134)	-
Nilai Bersih	**86.808.739.814.116**	

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp36.908.907.616.802. Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Daftar 19.**
2. Aset lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp142.127.657.545 terdiri dari:
   a. Piutang PNBP berupa dividen sebesar Rp99.272.957.696.

      Piutang Dividen yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun terdiri dari pokok sebesar Rp70.002.808.923 dan denda sebesar 29.270.148.773. Piutang ini merupakan piutang pada 6 BUMN, yaitu PT Pengelolaan Daerah Industri Batam, PTPN IX, Perum Perumnas, PTPN II, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V.

   b. Reklasifikasi dari dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp12.206.756.931.

      Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan sejak tahun 2004. Program PUPTSK tersebut adalah Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI), Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI), Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS), dan Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

   c. Aset eks dana bergulir pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp30.647.942.918

      Piutang pada Kementerian Perindustrian merupakan piutang atas program dana bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh LPT Indag. Sampai dengan 31 Desember 2011, piutang pada LPT Indag yang telah diserahkan kepada KPKNL adalah sebesar Rp5.583.933.590 dan yang belum diserahkan ke KPKNL adalah sebesar Rp25.064.009.328.

3. Aset Lain-Lain BA BUN 999.04 per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp19.419.108.122.985, sedangkan nilai bersih yang dapat direlisasikan adalah sebesar Rp234.870.653.851 berasal dari nilai bruto sebesar Rp19.419.108.122.985 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp19.184.237.469.134. Rincian Aset lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut:
   - Aset Lainnya RDI sebesar Rp18.482.484.946.746 yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1.Tunggakan yang akan diselesaikan melalui restrukturisasi dan piutang yang tertunggak lebih dari satu tahun	16.187.787.909.715
2.Tunggakan dalam proses PMN	44.767.779.048
3.Tunggakan macet dari tunggakan BBO/BBKU/BDL	2.138.723.193.764
4.Tunggakan Eks Timor Timur	16.308.184
5.Tunggakan koperasi/proyek	111.189.756.036
Nilai Bruto	**18.482.484.946.746**
Penyisihan	(18.416.218.955.190)
Nilai Bersih	**66.265.991.556**

- Aset Lainnya Kredit Program Non Subsidi sebesar Rp936.623.176.238, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. PIR Perkebunan	337.969.601.909
2. UPP Perkebunan	324.585.393.783
3. Peternakan	97.279.441.643
4. Kredit Listrik Pedesaan	2.066.512.000
5. Pengembangan Pendidikan Akuntansi	5.270.305.000
6. Dana Cadangan Risiko	100.560.171.016
7. Dana Jaminan Ulang	48.824.352.738
8. Dana Kelolaan	4.342.720.062
9. Dana Risiko	15.724.678.088
Nilai Bruto	**936.623.176.238**
Penyisihan	(768.018.513.945)
Nilai Bersih	**168.604.662.293**

4. Aset Lain-lain yang berasal dari Bagian Anggaran 999.08 sebesar Rp46.701.991.689 berada di beberapa K/L atau lembaga sebagai berikut (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
1. Kementerian Pertanian		550.074.000
2. Kementerian Perhubungan		9.403.159.995
3. LPP TVRI	4.129.603.585	343.084.000
4. LPP RRI	26.767.898.211	4.352.223.463
5. Otorita Batam	15.766.812.350	15.766.812.350
6. Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP	37.677.543	-
Jumlah	**46.701.991.689**	**30.415.353.808**

5. Aset Lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp49.476.131.894.229, terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
1. PT PPA (Persero)	2.644.490.527.174	2.614.411.741.232
2. Aset PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	1.484.449.098.120	1.749.873.770.941
3. Aset eks Pertamina	43.984.876.166.228	44.283.237.799.177
4. Piutang Migas	1.362.316.162.707	-
Jumlah	**49.476.131.894.229**	**48.647.523.311.350**

1). Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp2.644.490.527.174 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PT PPA (Persero) menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada **Daftar 22.**

2). Aset lain-lain eks PT PPA sebesar Rp1.484.449.098.120 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap pertama diselesaikan. Mutasi aset tersebut selama tahun 2011 sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Saldo Awal		Mutasi Kurang		Saldo Akhir	
		Unit	Jumlah (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)
1	Aset Kredit	294	183.061.417.948	7	143.657	287	183.061.274.291
2	Aset Properti	3.179	1.527.676.061.720	27	265.424.529.164	3.152	1.262.250.532.556
3	Surat Berharga	9	16.657.242.209	-	-	9	16.657.242.209
4	Aset Saham Non Bank	21	22.490.049.064	-	-	21	22.490.049.064
	Jumlah	3.503	1.749.873.770.941	34	265.424.672.821	3.469	1.484.449.098.120

3). Aset eks Pertamina sebesar Rp43.984.876.106.228 merupakan nilai aset sebagai akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset eks Pertamina per 31 Desember 2011 tersebut terdiri atas:

a. Aktiva Tetap LNG BADAK-Bontang Rp16.302.447.401.562 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp11.029.729.944.488.

Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (saat itu bertindak selaku Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2011 untuk pembangunan LNG Badak, sedangkan untuk pembangunan LNG Arun sudah lunas. Adapun sumber dana untuk pembayaran pinjaman dimaksud berasal dari hasil penjualan gas LNG Arun dan LNG Badak sehingga kemungkinan *default* atas pembayaran tersebut sangat kecil.

Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008.

Nilai aset kilang LNG Arun berdasarkan hasil penilaian DJKN per 17 Maret 2011 dan kilang LNG Badak hasil penilaian DJKN per 12 Nopember 2011. Inventarisasi dan penilaian terhadap aktiva kilang LNG Arun dilakukan oleh PT Arun NGL, Kanwil I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sejak tanggal 15 Desember 2010, sedangkan terhadap aktiva kilang LNG Badak dilakukan oleh PT Badak NGL, Kanwil XIII DJKN Samarinda dan KPKNL Bontang sejak tanggal 1 Nopember 2010. Saat ini Laporan Inventarisasi dan Penilaian aktiva kilang LNG Arun dan LNG Badak sedang dalam tahap penyelesaian oleh masing-masing Tim Pelaksana.

b. Aktiva Tetap yang tidak dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) pada 1 lokasi dengan nilai sebesar Rp15.379.053.000 di Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat yang telah dinilai oleh Tim Penilai DJKN.

c. Aset Eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp16.242.092.564.001:

Aset Eks PT Pertamina yang tidak disajikan dalam LKPP Tahun 2011 adalah Aset yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp16.242.092.564.001 karena belum dilakukan IP. Terhadap aset ini Menteri Keuangan melalui surat Nomor:S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Isu-Isu Penting Pertamina, Pertamina diminta untuk melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tersebut. Hasil inventarisasi dan penilaian aset dimaksud telah dimintakan kepada PT Pertamina dengan surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor 3865/KN/2010 tanggal 1 Juli 2010, namun PT Pertamina belum menyampaikan rincian aset hasil inventarisasi, melainkan masih berupa pengelompokan aset.

Aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tersebut dikenakan sewa karena Pertamina EP dalam hal ini selaku KKKS. Pihak PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 mengenai permohonan PT Pertamina untuk menerapkan skema sewa atas penggunaan BMN berupa aset eks KKKS Pertamina atas sebagian dari BMN senilai Rp16.226.357.000.000 dan kemudian telah disetujui permohonan pengenaan sewa tersebut oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 yang menjelaskan bahwa Pemerintah menyetujui usulan Pertamina untuk

menerapkan skema sewa atas sebagian aset yang digunakan oleh Pertamina EP.

Kemudian berdasarkan surat Nomor S-533/KN/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks KKKS Pertamina Senilai Rp16.226.357.000.000, dijelaskan bahwa pihak PT Pertamina telah membukukan Beban Sewa atas peralatan yang harus disewa pada Laporan Keuangan Audited PT Pertamina (Persero) tahun 2003 sampai dengan 2009. Namun pihak PT Pertamina sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran atas nilai sewa tersebut kepada negara, sehingga Pemerintah meminta PT Pertamina untuk dengan segera menyetorkan beban sewa tersebut ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang (Kode Akun 423151). Namun pihak Pertamina (Persero) belum dapat melakukan pembayaran karena belum adanya kontrak perjanjian sewa menyewa antara pemerintah dengan Pertamina (Persero). Saat ini Pemerintah sedang melakukan kajian atas permasalahan ini.

d. Aset Eks PT Pertamina berupa 9 (sembilan) Aset Tetap sebesar Rp395.227.143.177 terdiri dari:

(1). Aset di Jalan Abdul Muis 68:

Menteri Keuangan dengan surat Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 telah memutuskan pengenaan sewa atas penggunaan sebagian aset di Jl. Abdul Muis 68 untuk SPBU COCO Pertamina. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga telah menyampaikan surat permintaan kepada PT Pertamina c.q. Pertamina Retail (untuk SPBU COCO Pertamina) dan kantor PT Mitra Tours & Travel sebagai pengguna BMN agar melakukan penyetoran uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara.

(2). BMN Lain yang digunakan oleh Pertamina (Bandung, Rawamangun, dsb):

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menyampaikan surat permintaan kepada PT Pertamina agar melakukan penyetoran uang sewa BMN ke Rekening Kas Umum Negara sebagai kompensasi atas digunakannya BMN dimaksud dalam kegiatan operasional Pertamina.

(3). Aset di Jalan Tarogong yang digunakan Jakarta International School (JIS):

Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada JIS nomor S-341/MK.6/2010 tanggal 27 September 2010 bahwa usulan JIS untuk mendapatkan diskon tarif sewa sebesar 80% dari nilai sewa tanah belum dapat disetujui. Sewa BMN yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp118.275.283.825. Pihak JIS hanya bersedia melakukan pembayaran sewa Rp23.655.056.765 sebagai niat baik untuk melanjutkan pemanfaatan BMN tersebut sambil menunggu penetapan tarif definitif. Pada tanggal 4 Oktober 2011, JIS menyampaikan permohonan pembayaran sewa 50% dari tarif PMK 96/2007 dengan pembayaran tahunan. Pada tanggal 11 Januari 2012, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan usulan penyelesaian:

- Sewa periode 1 Mei 2008 - 30 April 2012, JIS membayar sewa sebesar Rp94.620.227.060 (sesuai 96/PMK.06/2007).
- Dalam hal JIS hanya mampu membayar 50%, sisa tagihan sewa akan diserahkan penagihannya ke PUPN untuk dicicil sesuai kemampuan JIS.
- Sewa 1 Mei 2012 - 30 April 2017, sesuai ketentuan PMK Tarif Sewa, yaitu Tarif 50% untuk Lembaga Pendidikan Asing yang Nirlaba (Revisi RPMK Tarif Sewa sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan).

Terhadap permasalahan ini, Kementerian Keuangan akan menyampaikan surat kepada Presiden untuk meminta persetujuan pemberian keringanan (dispensasi) tarif sewa BMN oleh JIS.

Aset Eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp16.242.092.564.001 dan berupa 9 (sembilan) Aset Tetap sebesar Rp395.227.143.177 belum dilakukan IP.

4). Aset Lain-Lain berupa Piutang Migas sebesar Rp1.362.316.162.707 merupakan piutang jangka panjang yang berasal dari reklasifikasi piutang migas jangka pendek pada satker PNBP Khusus DJA. Aset tersebut berasal dari saldo piutang TPPI tahun 2010 yang direklasifikasi berdasarkan skema pembayaran oleh TPPI melalui cicilan sebesar USD1,5 juta per bulan yang disepakati dalam *Amandement Sales Agreement*.

C.2.30. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya Rp19,97 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp19.970.874.008.883 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	157.010.079.393
2. Penerusan Pinjaman	232.701.379.846
3. Piutang Jangka Panjang	396.925.080.510
4. Aset Lain-lain	19.184.237.469.134
Jumlah	**19.970.874.008.883**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lainnya.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp157.010.079.393 dapat dilihat pada **Daftar 18.**
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Penerusan Pinjaman sebesar Rp232.701.379.846 merupakan Penyisihan Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang sebesar Rp396.925.080.510 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Kementerian Kehutanan sebesar Rp382.032.632.833 dan pada Piutang Jangka Panjang BA 999.04 sebesar Rp14.892.447.677.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lain-lain sebesar Rp19.184.237.469.134 merupakan Penyisihan Aset Lain-lain pada BA 999.04.

C.2.31. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Rp1,76 triliun

Utang PFK per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.755.574.696.265 dan Rp1.575.434.547.871 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 *)	Transaksi Tahun 2011		31 Desember 2011
		Penerimaan	Pengeluaran	
PFK 10% Gaji PNS	1.305.644.926.549	16.207.157.999.699	16.122.953.921.019	1.389.849.005.229
PFK 2% Gaji Terusan	(3.335.330.078)	4.396.570.710	3.340.112.176	(2.278.871.544)
PFK 2% Iuran Kes. Pemda	241.956.007.438	2.167.163.934.328	2.090.764.143.102	318.355.798.664
PFK 2% As. Bidan/Dokter PTT	5.288.012.948	11.729.264.864	12.096.157.458	4.921.120.354
PFK 2% Askes TNI/Polri	95.806.188	9.249.709.210	9.699.476.930	(353.961.532)
PFK Lain-Lain	36.369.776.459	382.412.086.403	390.758.777.027	28.023.085.835
PFK Bulog	(2.135.080.026)	221.858.524.310	202.664.925.025	17.058.519.259
JUMLAH	**1.583.884.119.478**	**19.003.968.089.524**	**18.832.277.512.737**	**1.755.574.696.265**

Perbedaan posisi saldo akhir tahun 2010 pada LKPP Tahun 2010 dengan saldo awal tahun 2011 terjadi karena ada koreksi penambahan Penerimaan PFK eks PNS PT KAI sebesar Rp8.449.571.069 dan koreksi PFK Penutupan Rekening sebesar Rp538.

C.2.32. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp31,78 triliun

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp31.780.634.369.020 dan Rp31.370.392.714.561 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
K/L	8.854.090.097.568	2.671.573.478.397
BUN	22.926.544.271.452	28.698.819.236.164
Jumlah	**31.780.634.369.020**	**31.370.392.714.561**

1. Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp8.854.090.097.568 antara lain berupa dana yang harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Daftar 23.**
2. Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp22.926.544.271.452, terdiri dari (dalam Rp):

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
BA 999.05	18.292.725.677.411	15.798.435.847.230
BA 999.08	3.495.984.368.048	8.709.596.834.582
BA 999.99 (Transaksi Khusus)		3.551.726.799.482
Utang terkait Retur SP2D	1.137.834.225.993	639.059.754.870
Jumlah	**22.926.544.271.452**	**28.698.819.236.164**

a. Utang pada BA 999.05 (Utang Transfer ke Daerah) merupakan utang kekurangan Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada pemda penerima sebesar Rp18.292.725.677.411. Dari jumlah utang tersebut, sebesar Rp9.505.740.673.161 merupakan kewajiban terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan yang dananya masih disimpan pada Rekening Cadangan. ***Lihat Catatan C.2.29)***

Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp18.292.725.677.411, adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Jenis Kewajiban	Jumlah
1.	Kurang Salur DBH BP PBB 2009, 2010, dan 2011	12.085.015.695
2.	Kurang Salur DBH PBB TA 2011	204.929.989.242
3.	Kurang Salur DBH PBB TA 2010	46.852.747.492
4.	Kurang Salur DBH BPHTB TA 2010	238.813.021.056
5.	Kurang Salur DBH CHT 2010	48.725.346.608
6.	Dana Cadangan TA 2011	9.505.740.673.161
7.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH SDA Migas	3.837.974.325.181
8.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH SDA Pertambangan Umum	700.000.145.345
9.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH SDA Kehutanan	24.470.448.544
10.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH SDA Panas Bumi	24.569.958.292
11.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH SDA Perikanan	6.476.333.602
12.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH PPh TA 2008-2010	2.679.064.626.378
13.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH Pajak TA 2011	871.438.363.103
14.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH CHT TA 2011	91.584.683.712
	Total	**18.292.725.677.411**

b. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.495.984.368.048, diantaranya berupa:
   - Utang Kepada Pihak Ketiga pada BNPB sebesar Rp3.156.450.194.500 merupakan dana yang akan disalurkan kepada BPBD atau Instansi yang menangani bencana tahun 2011.
   - Utang Kepada Pihak Ketiga pada Sekretariat Negara sebesar Rp339.296.000.000 berupa utang pembayaran termin III dalam rangka pengadaan Pesawat Kepresidenan BBJ-2.
   - Utang Kepada Pihak Ketiga pada LPP TVRI dan LPP RRI sebesar Rp120.128.875 dan Rp104.030.673.
   - Utang Kepada Pihak Ketiga pada LPP RRI sebesar Rp14.014.000 merupakan kekurangan rapel beras.

c. Utang pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) berada di BAPERTARUM tidak disajikan lagi dalam neraca. ***Lihat Catatan Penting Lainnya.***

d. Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Retur SP2D merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening yaitu retur SP2D sebesar Rp1.137.834.225.993. Jumlah ini berasal dari Utang s.d Tahun 2010 sebesar Rp228.178.119.195 ditambah penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening tahun berjalan sebesar Rp5.156.956.594.762 dikurangi pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening sebesar Rp4.247.596.582.982, dan utang kepada pihak ketiga yang disetor ke rekening retur yang berasal dari retur SP2D karena kesalahan nama dan nomor rekenig yang tercantum dalam SP2D sebesar Rp296.095.018 ***Catatan D.2.2.*** Pada tahun 2010, Utang terkait Retur SP2D terdapat pada Rekening BUN di BI dan Rekening Retur.

C.2.33. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp704,44 miliar

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp704.437.258.982 dan Rp3.547.727.872.825 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya pada Kementerian Keuangan	704.320.653.776	329.105.858.431
Kelebihan atas pembayaran Jasa Kenavigasian oleh PT Admiral Lines pada Kementerian Perhubungan	116.106.388	-
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian Agama	501.818	-
Kelebihan Pendapatan Dividen Interim BUMN (BA 999.03)	-	3.218.622.014.394
Jumlah	**704.437.258.982**	**3.547.727.872.825**

Kelebihan Pendapatan Dividen Interim BUMN (BA 999.03) untuk tahun 2011 disajikan sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

C.2.34. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp106,78 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp106.777.089.696.825 dan Rp88.286.391.827.798 merupakan utang Pemerintah yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Bagian Lancar Utang Luar Negeri:		
BA 999.01	48.296.753.806.497	46.875.144.953.748
BA 999.08		92.000.000.000
Subtotal	**48.296.753.806.497**	**46.967.144.953.748**
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:		
BA 999.01 - Surat Berharga Negara (SBN)	58.344.607.418.456	41.292.929.030.085
BA 999.01 - Pinjaman Dalam Negeri	135.658.235.872	26.240.423.965
Utang pada POLRI	70.236.000	77.420.000.
Subtotal	**58.480.335.890.328**	**41.319.246.874.050**
Jumlah	**106.777.089.696.825**	**88.286.391.827.798**

Bagian Lancar Pinjaman pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2010 sebesar Rp92.000.000.000 terdapat pada Sekretariat Negara untuk pengadaan *green aircraft* pesawat kepresidenan. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tahun 2011, sehingga saldo per 31 Desember 2011 nihil.

Bagian Lancar SBN yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis SBN	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
I. Fixed Rate Bonds dan ORI		
Nominal	27.683.468.000.000	22.570.875.000.000
Unamortized Premium (*Discount*)	(67.374.007.000)	(36.046.915.000)
Nilai bersih (nilai buku)	27.616.093.993.000	22.534.828.085.000
II. Variable Rate		
Nominal	4.368.483.000.000	6.031.666.000.000
Unamortized Premium (*Discount*)		-
Nilai bersih (nilai buku)	4.368.483.000.000	6.031.666.000.000
III. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Nominal yg harus diamortisasi	4.184.803.289.456	3.795.739.945.085
Accrued Indexation		-
Nilai bersih (nilai buku)	4.184.803.289.456	3.795.739.945.085
IV. ORI		
Nominal	21.026.495.000.000	8.930.695.000.000
Unamortized Premium (*Discount*)		-
Nilai bersih (nilai buku)	21.026.495.000.000	8.930.695.000.000
V. ZERO COUPON		
Nominal	1.249.000.000.000	-
Unamortized Premium (*Discount*)	(100.267.864.000)	-
Nilai bersih (nilai buku)	1.148.732.136.000	-
Total SBN (I + II + III+IV+V)	**58.344.607.418.456**	**41.292.929.030.085**

Catatan:

- *Fixed Rate Bond terdiri dari 4 seri Fixed Rate Bond;*
- *ORI terdiri dari 2 seri, yaitu ORI003 dan ORI004;*

- *Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004 dan SU-007*

Rincian lebih lanjut Bagian Lancar Utang Obligasi Dalam Negeri dapat dilihat pada **Daftar 24.A.**

Bagian Lancar Pinjaman Dalam Negeri merupakan bagian lancar pinjaman antara Pemerintah RI sebagai penerima pinjaman dengan PT BNI Persero dan PT BRI Persero dalm rangka pengadaaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan POLRI.

Bagian Lancar Utang pada POLRI merupakan bagian lancar atas utang terkait perolehan kendaraan pada BLU di POLRI.

C.2.35. Utang Biaya Pinjaman

Utang Biaya Pinjaman Rp21,92 triliun

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp21.924.038.335.465 dan Rp20.261.543.289.213 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman DN	19.275.822.333.294	17.691.280.724.779
Utang Bunga Pinjaman LN	2.648.216.002.171	2.570.262.564.434
Jumlah	**21.924.038.335.465**	**20.261.543.289.213**

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut:

Utang Bunga Obligasi dan pinjaman dalam negeri

1. Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman Dalam Negeri (DN) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp19.275.822.333.294 dan Rp17.691.280.724.779 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Fixed Rate Bonds	13.328.508.988.302	11.903.224.814.209
ORI	180.003.432.785	188.952.890.315
SBSN	796.615.939.740	559.492.461.220
Variable Rate Bonds	723.777.587.150	1.041.801.480.732
SUP kepada BI	82.027.721.892	82.972.507.969
SBN Valas	4.163.545.829.445	3.914.829.855.620
Pinjaman Dalam Negeri	1.342.833.980	6.714.714
Jumlah	**19.275.822.333.294**	**17.691.280.724.779**

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada **Daftar 24.B.**

Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp2.648.216.002.171 dan Rp2.570.262.564.434 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Utang Bilateral	1.233.987.416.238	1.099.068.332.647
Kredit Komersial	59.850.881.093	57.013.952.710
Kredit Ekspor	394.040.640.947	392.096.139.330
Multilateral	960.337.063.893	1.022.084.139.747
Jumlah	**2.648.216.002.171**	**2.570.262.564.434**

C.2.36. Utang Subsidi

Utang Subsidi Rp29,77 triliun

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp29.767.908.989.742 dan Rp22.161.795.155.886, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
Utang Subsidi PSO yang Belum Disalurkan (BULOG, PT Pelni, PT KAI, PT Pos)	4.221.221.930.818	3.859.013.047.361
Utang Subsidi Listrik	12.101.668.180.781	9.358.746.506.021
Utang Subsidi BBM dan LPG	8.966.000.950.449	5.229.785.718.162
Utang Subsidi Pupuk dan Benih	4.077.250.619.191	3.524.386.273.599
Utang Subsidi Bunga Kredit Program KLBI	401.767.308.503	189.863.610.743
Jumlah	**29.767.908.989.742**	**22.161.795.155.886**

Dari Utang Subsidi per 31 Desember 2011 sebesar Rp29.767.908.989.742, sebesar Rp8.895.590.963.425 dananya sudah dicairkan dari Kas Negara namun belum dibayarkan dan masih disimpan pada Rekening Cadangan. ***(Lihat Catatan C.2.29)***

C.2.37. Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek Rp39,41 triliun

Jumlah SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp39.408.181.897.000 dan Rp29.235.009.035.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek ini terdiri dari utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sampai akhir tahun 2011, terdapat 17 (tujuh belas) seri SPN dan 2 (dua) SBSN. Rincian SBN Jangka Pendek dapat dilihat dalam **Daftar 25.**

C.2.38. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp8,64 triliun

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp8.639.914.082.680 dan Rp119.116.551.668 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2011 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.040.228.256.095 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi.

Termasuk dalam Pendapatan Diterima di Muka adalah penerimaan dividen interim BUMN sebesar Rp2.318.040.768.528, yaitu pada:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. PT Freeport	1.761.137.250.000
2. PT Socfin Indonesia	101.807.134.500
3. Perum Pegadaian (Persero)	150.000.000.000
4. PT Bukit Asam (Persero)	154.992.132.750
5. PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	150.104.251.278
Jumlah	2.318.040.768.528

Rncian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada **Daftar 23.**

C.2.39. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp5,69 triliun

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp5.687.095.323.943 dan Rp4.786.549.847.266, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
1. MA	3.000.000	19.618.900
2. Kementerian Pertahanan	35.170.771.795	5.448.966.363
3. Kementerian Hukum dan HAM	9.578.250	-
4. Kementerian Keuangan	4.155.000	4.155.000
5. Kementerian Pertanian	16.000.000	52.000.000
6. Kementerian Pendidikan Nasional	33.980.928.430	
7. Kementerian Kesehatan	580.449.931	688.273.071
8. Kementerian Agama	36.373.668	4.042.740
9. Kementerian Kehutanan		2.500.000.000
10. Kementerian Pekerjaan Umum	14.766.663.694	10.975.304.123
11. Dewan Ketahanan Nasional	107.425.414	22.006.020
12. Perpustakaan Nasional RI		13.654.600
13. BKKBN	10.456.764	-
14. KPU	6.699.168	544.180
15. Kementerian Perumahan Rakyat	1.333.290	-
16. BNP2TKI		15.538.380
17. BPLS	29.321.813.475	30.879.257
18. BA 999.03	39.174.191.965	40.000.000.000
19. BA 999.08		32.279.769.182
20. BA 999.99	212.342.089.646	-
21. Kewajiban terkait Rekening Migas	5.321.563.393.453	4.694.495.095.450
Jumlah	**5.687.095.323.943**	**4.786.549.847.266**

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.03 merupakan Utang *Promissory Notes* yang terkait dengan penyertaan Pemerintah pada lembaga-lembaga keuangan internasional yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal neraca. *Promissory Notes* sebesar Rp39.174.191.965 adalah yang akan dibayarkan kepada *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* pada tahun 2012.

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.99 per 31 Desember 2011 sebesar Rp212.342.089.646 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Kekurangan droping belanja pensiun ke PT Taspen, November 2011	5.346.876.480
2. Kekurangan droping belanja pensiun ke PT Taspen, Desember 2011	49.731.527.841
3. Imbalan jasa/fee bank/pos yang belum dibayarkan	157.263.685.325
Jumlah	**212.342.089.646**

Kewajiban terkait Rekening Migas (No.600.000411.980) 31 Desember 2011 sebesar Rp5.321.563.393.453 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS berupa *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.000411.980 per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp6.237.138.752.226. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp5.321.563.393.453 dan sisanya sebesar Rp915.575.358.773 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero)	2.311.460.414.904	1.461.702.617.856
DMO Fee dan *Fee* lainnya	1.049.837.098.788	379.216.579.658
DMO Fee PT Pertamina EP	811.426.338.364	1.994.285.015.542
Underlifting KKKS	574.361.770	6.019.436.827

Reimbursment PPN	957.364.561.751	839.199.601.438
PDRD	3.911.179.881	10.005.175.358
Retur atas penyelesaian kewajiban kontraktual pemerintah yang belum dibayarkan kembali		4.066.668.771
PBB Migas	186.989.438.000	-
Jumlah	**5.321.563.393.453**	**4.694.495.095.450**

C.2.40. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara

Utang Jangka Panjang DN SBN Rp1.085,32 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.085.324.545.750.551 dan Rp987.172.961.936.007 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2011 ini terdiri dari SBN Berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp889.420.622.052.551 dan SBN Internasional (valas) sebesar Rp195.903.923.698.000.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis SBN	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
I. Fixed Rate Bonds		
Principle Outstanding	446.842.288.000.000	377.152.742.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(4.169.639.225.000)	(5.646.008.629.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	442.672.648.775.000	371.506.733.371.000
II. ORI		
Principle Outstanding	21.589.875.000.000	31.741.370.000.000
Unamortized Premium (Discount)		-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	21.589.875.000.000	31.741.370.000.000
III. Zero Coupon Bonds		
Principle Outstanding	1.263.000.000.000	2.512.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(104.765.143.000)	(373.721.119.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	1.158.234.857.000	2.138.278.881.000
IV. Variable Rate Bonds		
Principle Outstanding	130.694.938.000.000	136.763.416.000.000
Unamortized Premium (Discount)		-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	130.694.938.000.000	136.763.416.000.000
V. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Principle Outstanding	240.451.634.074.551	244.636.437.364.007
Unamortized Premium (Discount)		-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	240.451.634.074.551	244.636.437.364.007
VI. SBSN		
Principle Outstanding	52.552.970.000.000	38.499.850.000.000
Unamortized Premium (Discount)	300.326.346.000	55.583.479.000
Nilai Bersih (Nilai Buku))	52.853.296.346.000	38.555.433.479.000
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	**889.420.622.052.551**	**825.341.669.095.007**
VII. Obligasi Negara dalam Valas		
Principles Outstanding	207.278.012.102.053	176.800.327.246.903
Accrued Indexation	(11.648.212.102.053)	(14.824.427.246.903)
Net Unamortized Premium (Discount)	274.123.698.000	(144.607.159.000)
Subtotal Obligasi Negara dalam (Valas	**195.903.923.698.000**	**161.831.292.841.000**
Total SBN Jangka Panjang	**1.085.324.545.750.551**	**987.172.961.936.007**

Catatan:

- *Fixed Rate Bonds* terdiri dari 34 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2041.
- ORI terdiri dari 3 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2013.
- *Zero Coupon Bonds* terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 dan 2013.
- *Variable Rate Bonds* terdiri dari 14 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2020.

- *Fixed Rate Bonds,* ORI, *Zero Coupon Bonds,* dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007 dan SRBI01, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 – 2033. SUP tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*).
- Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus BI yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter BI kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar *charge* kepada BI sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.
- SBSN terdiri dari 9 seri *fixed rate* dengan masa jatuh tempo tahun 2013 – 2036, 6 seri SDHI dengan masa jatuh tempo 2012-2021 dan 2 seri Sukuk Ritel (SR-001 dan SR-002) dengan dengan masa jatuh tempo tahun 2013 -2014.
- Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 12 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2038, 2 seri berdenominasi JPY yang jatuh tempo tahun 2019 dan 2020, dan 1 seri SBSN berdenominasi USD yang jatuh tempo tahun 2014.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada **Daftar 26.**

C.2.41. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp11,82 triliun

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp11.822.231.724.875 dan Rp8.389.364.871.001 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Unfunded Liability akibat PP No. 9 Tahun 2007	1.638.443.906.070
Unfunded Liability akibat PP No. 14 Tahun 2008	2.450.505.392.359
Unfunded Liability akibat PP No. 8 Tahun 2009	3.024.845.340.493
Unfunded Liability akibat PP No. 25 Tahun 2010	1.275.570.232.079
Unfunded Liability akibat PP No.11 Tahun 2011	3.432.866.853.874
Jumlah	**11.822.231.724.875**

Nilai *Unfunded Liability* atas Program THT sebesar Rp11.822.231.724.875 merupakan nilai yang ditetapkan PT Taspen per 31 Desember 2011. Pemerintah dapat menyesuaikan besaran *Unfunded Liability* tersebut. Pelunasan *Unfunded Liability* akan dilakukan Pemerintah apabila dinilai perlu setelah dilakukan:

a. Audit menyeluruh (*due diligence*) atas PT Tapen (Persero) oleh auditor dan aktuaris independen; dan
b. Pemisahan kekayaan dan kewajiban Program THT non-PNS dari kekayaan dan kewajiban Program THT PNS sesuai dengan PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua PNS.

C.2.42. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang DN Perbankan Rp877,33 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp877.330.765.232 dan Rp367.365.935.506. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan (BUMN) yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang tersebut adalah pinjaman antara Pemerintah RI sebagai penerima pinjaman dengan PT. BNI Persero dan PT. BRI Persero dalm rangka pengadaaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan POLRI.

Perhitungan saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2010 Jangka Panjang	367.365.935.506
Saldo per 31 Desember 2010 Bagian Lancar	26.240.423.965
Total Pinjaman per 31 Desember 2010	393.606.359.471
Penarikan Pinjaman Tahun 2011	619.382.641.633
Pelusanan Tahun 2011	-
Saldo per 31 Desember 2011	1.012.989.001.104
Bagian Lancar (Disajikan pada Kewajiban Jangka Pendek)	(135.658.235.872)
Utang Jangka Panjang	**877.330.765.232**

C.2.43. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp5,03 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp5.033.082.825.744 dan Rp3.095.222.852.622, yang terdiri dari:

Jenis Utang	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional	2.826.956.396.636	2.826.956.396.636
Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	-
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	294.198.701.949	268.266.455.986
Jumlah	**5.033.082.825.744**	**3.095.222.852.622**

- Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional

  Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, sejak tahun 1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.635, termasuk diantaranya Rp2.764.860.843.169 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbit UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyepakati nilai dan status dana talangan/piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat No. S-08/MK.11/2010 tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Kementerian Keuangan telah melakukan pertemuan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010, dan sesuai kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dan talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan.

  Pemerintah dan BI telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati bahwa jumlah sebesar Rp2.780.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen yang memadai yaitu Rekening Koran, Warkat transaksi, Surat dari BI ke Kementerian Keuangan dan sebaliknya, faksimili, SWIFT, dan Teleks. Sementara untuk jumlah

Rp46.356.797.131 hanya didukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut.

- Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

  Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

  Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5,00% ditanggung Perum Jamkrindo.

  Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1999/1998 adalah sebesar Rp7.677.429.744.359,79, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.699,61, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660,18. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235,53. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar RpRp3.659.191.822.314,56. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 (52,25% x Rp3.659.191.822.314,56).

  Pemerintah dapat menyesuaikan nilai Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

  Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp294.198.701.949 adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp105.400.185.359, Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp70.531.073.604, Kementerian Kehutanan sebesar Rp118.153.090.986, dan POLRI sebesar Rp114.352.000.

  - Utang pada Kementerian Luar Negeri merupakan sisa cicilan sewa beli yang belum dibayarkan.
  - Utang pada Kementerian Pendidikan Nasional merupakan Utang Jangka Panjang pada UI sebesar Rp64.239.125.494 dan ITB sebesar Rp6.291.948.110.
  - Utang pada Kementerian Kehutanan merupakan utang yang timbul berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1731K/Pdt/2006 tanggal 29 November 2007 yang memutuskan Tergugat (Menteri Kehutanan) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp118.153.090.986. Putusan tersebut berdasarkan gugatan dari PT Benua Indah yang kepada Menteri Kehutanan yang menerbitkan keputusan penghentian

sementara Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

- Utang pada POLRI merupakan utang terkait perolehan kendaraan pada BLU di POLRI.

C.2.44. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp571,98 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp571.982.048.619.444 dan Rp569.983.008.549.466 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Bilateral	306.805.893.874.544	304.131.160.950.816
Multilateral	197.266.978.813.746	192.151.937.241.684
Kredit Ekspor	68.382.838.534.316	69.553.738.449.152
Kredit Komersial	4.526.337.396.838	4.146.171.907.814
Jumlah	**571.982.048.619.444**	**569.983.008.549.466**

C.2.45. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp25,89 triliun

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp25.889.179.304.040 dan Rp25.726.322.825.757, dengan rincian (dalam Rp):

	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya untuk pengadaan *green aircraft* pesawat kepresidenan	0	339.296.000.000
Utang *Promissory Notes*		
International Monetary Fund	25.871.090.740.489	25.329.806.542.486
International Bank for Reconstruction and Development	[illegible]	39.174.191.965
International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
Multilateral Investment Guarantee Agency	10.292.343.224	10.204.946.838
Common Fund for Commodities	2.623.080.659	2.668.004.800
Subtotal Utang *Promissory Notes*	**25.889.179.304.040**	**25.387.026.825.757**
Total Utang Jangka Panjang Lainnya	**25.889.179.304.040**	**25.726.322.825.757**

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya untuk pengadaan *green aircraft* pesawat kepresidenan sebesar Rp339.296.000.000 pada tahun 2011 telah direklasifikasi sebagai bagian dari Utang Kepada Pihak Ketiga.

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya dalam bentuk *Promissory Notes* terkait dengan Penyertaan Pemerintah Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh tempo/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan, sedangkan yang akan jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rekapitulasi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes* dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Posisi Utang Luar negeri, SBN, dan PN

Tabel 10
Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*
(Dalam Rp Juta)

Jenis Utang	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)
Utang Luar Negeri (LN):			
Utang LN – Bagian Lancar	48.296.758,81	46.875.144,95	1.421.608,86
Utang LN – Jangka Panjang	571.982.048,62	569.983.008,55	1.999.040,07
Utang Bunga LN	2.648.216,00	2.570.262,56	77.953,44
Total Utang LN	**622.927.018,43**	**619.428.416,06**	**3.498.602,37**
Surat Berharga Negara (SBN):			
Bagian Lancar SBN-Rupiah	58.344.607,42	41.292.929,03	17.051.678,39
SPN	30.509.891,90	29.235.009,04	1.274.882,86
SBSN Jangka Pendek-Rupiah	8.898.290,00	-	8.898.290,00
SBN Jangka Panjang-Rupah	836.567.325,71	786.786.235,62	49.781.090,09
SBN Jangka Panjang-Valas	180.667.600,00	155.987.142,84	24.680.457,16
SBSN Jangka Panjang-Rupiah	52.853.296,35	38.555.433,48	14.297.862,87
SBSN Jangka Panjang-Valas	14.962.200,00	5.844.150,00	9.118.050,00
Utang Bunga SBN	19.275.822,33	17.691.274,01	1.584.548,32
Total SBN dan Bunga	**1.202.079.033,71**	**1.075.392.174,02**	**126.686.859,69**
***Promissory Notes* (PN):**			
PN Jangka Pendek	39.174,19	40.000,00	(825,71)
PN Jangka Panjang	25.889.179,30	25.387.026,83	502.152,47
Total PN	**25.928.353,50**	**25.427.026,83**	**501.326,67**

Posisi Utang Luar negeri Menurut Valuta Asing

Tabel 11
Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Valuta	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)
ACU	279.847.434	266.422.922	13.424.512
ADB	109.582.229	144.585.129	(35.002.900)
AUD	351.410.728	291.268.328	60.142.400
CAD	138.742.057	157.186.495	(18.444.438)
CHF	240.740.150	295.245.679	(54.505.529)
CNY	1.550.083.480	1.428.321.707	121.761.773
DKK	42.745.717	51.754.947	(9.009.230)
EUR	4.429.525.292	5.436.029.192	(1.006.503.900)
GBP	363.492.315	458.110.017	(94.617.702)
JPY	2.307.420.817.502	2.603.746.051.062	(296.325.233.560)
KRW	189.956.918.440	191.059.958.110	(1.103.039.670)
KWD	8.756.800	11.538.000	(2.781.200)
SAR	100.075.674	117.640.333	(17.564.659)
SDR	2.144.885.272	2.154.118.494	(9.233.222)
USD	21.811.471.753	22.927.432.636	(1.115.960.883)
WBD	206.130.040	710.366.276	(504.236.236)

C.2.46. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian

SAL Setelah Penyesuaian Rp58,66 triliun

Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2011 dan TA 2010 adalah sebesar Rp58.656.722.496.062 dan Rp52.382.103.135.529. SAL TA 2011 setelah penyesuaian tersebut berasal dari saldo awal SAL TA 2011 sebesar Rp98.909.703.335.446, ditambah selisih lebih kas tahun lalu Rp39.873.345.073, dikurangi penggunaan SAL sebesar Rp40.319.043.049.000, dan ditambah penyesuaian lainnya sebesar Rp26.188.864.543. Pada TA 2011 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp45.549.376.508.811 dan selisih kurs sebesar Rp235.078.083.137, sehingga SAL per 31 Desember 2011 setelah selisih kurs adalah sebesar Rp105.324.449.807.891. Sementara itu, SAL menurut fisik adalah sebesar Rp105.341.875.060.003, sehingga terdapat selisih lebih fisik SAL dibandingkan catatannya sebesar Rp17.425.252.112.
Rincian penghitungan SAL sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Saldo Anggaran Lebih TA 2011 dan TA 2010

Uraian	TA 2011 (Rp)	TA 2010 (Rp)
Saldo Awal SAL	**98.909.703.335.446**	**66.523.922.425.799**
Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu	39.873.345.073	261.781.092.126
Penggunaan SAL	(40.319.043.049.000)	(17.347.946.818.000)
Koreksi Saldo Awal Kas KPPN	(205.049.095)	7.566.397.318
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	26.564.437.138	112.445.204.316
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah di K/L	(160.523.500)	-
Penyesuaian Rekening Khusus		2.824.334.833.970
SAL setelah Penyesuaian	**58.656.722.496.062**	**52.382.103.135.529**
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	**46.549.376.508.811**	**44.706.303.047.141**
Penyesuaian SiLPA (SiKPA):		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(102.364.746.513)	(168.929.200.391)
Penyesuaian Uang Persediaan	(561.052.742)	159.535.528.423
Penyesuaian Rekening Retur	(216.316.651)	241.745.699
Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain	(62.302)	(1.024.810)
Penyesuaian Dana Talangan *(Backlog) 1)*		1.830.450.103.855
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	(372.360.700)	-
Penyesuaian Kas KPPN	212.666.914	-
Penyesuaian Transfer	4.176.986	-
Penyesuaian Kas pada BLU	(375.080.500)	-
Penyesuaian Kas di BUN	(13.064.014.611)	-
Total Penyesuaian SiLPA	**(116.727.280.119)**	**1.821.297.152.776**
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian (A)	**46.432.649.228.692**	**46.527.600.199.917**
Saldo Akhir SAL	**105.089.371.724.754**	**98.909.703.335.446**
Selisih Kurs		
Selisih Kurs s.d. periode sebelumnya	(1.169.106.908.608)	-
Selisih Kurs Kas di BUN	1.374.044.061.456	(1.143.806.183.819)
Selisih Kurs Kas Hibah Sumatera	-	(21.203.033.895)
Selisih Kurs Kas Hibah ESSP		(4.097.690.894)
Selisih Kurs Rekening Khusus Pinjaman dan Hibah	29.340.930.289	-
Selisih Kurs	**235.078.083.137**	**(1.169.106.908.608)**
Saldo Akhir SAL dan Selisih Kurs	**105.324.449.807.891**	**97.740.596.426.838**
Fisik Kas SAL:		
Rekening SAL di BI	48.505.945.197.525	49.437.756.699.925
Rekening BUN di BI	31.557.956.553.828	30.168.618.668.868
Rekening KPPN *2)*	11.870.566.947.661	9.218.612.887.732
Rekening Khusus	2.390.016.547.054	2.824.334.833.970
Kas di Bendahara Pengeluaran	232.791.782.959	518.914.873.152
Kas pada BLU yang telah Disahkan *3)*	10.089.016.578.965	7.287.580.742.179
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan *4)*	429.120.562.354	48.185.913.485
Total Fisik Kas	**108.135.404.170.346**	**99.504.004.609.311**
Penyesuaian Fisik Kas		
Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	99.879.811.915	80.077.829.666
Utang PFK	(1.755.574.696.265)	(1.575.434.547.871)
Utang Kepada Pihak Ketiga (SP2D Retur)	(1.137.884.225.993)	(228.178.119.195)
Total Penyesuaian Fisik Kas	**(2.793.529.110.343)**	**(1.723.534.837.400)**
Fisik Kas setelah Penyesuaian (B)	**105.341.875.060.003**	**97.780.469.771.911**
Selisih Kas (Lebih) Kurang (A-B)	**(17.425.252.112)**	**(39.873.345.073)**

Catatan:

1). Penyesuaian Uang Muka BUN pada tahun 2011 tidak dilaporkan sebagai penambah/pengurang SiLPA karena sudah diakui sebagai pembiayaan.

2). Kas di KPPN termasuk kas yang terdapat di rekening penampungan Rp291.857,46 juta.

3). Kas BLU sebesar Rp13.089.016.678.965 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D Pengesahan dan koreksi saldo awal.

4). Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan berdasarkan laporan KPPN yang melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung K/L dan belanja yang dilakukan atas pendapatan hibah tersebut.

C.2.47. SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian

SiLPA setelah Penyesuaian Rp46,43 triliun

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp46.432.649.228.692 dan Rp46.527.600.199.917 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA 2011 setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.210.599.653.359.415	1.016.730.832.666.817
Belanja Negara	1.294.999.146.475.020	1.063.576.541.020.291
Surplus (Defisit)	**(84.399.493.115.610)**	**(46.845.708.353.474)**
Pembiayaan Neto	130.948.869.624.420	91.552.011.400.615
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	**46.549.376.508.811**	**44.706.303.047.141**
Penyesuaian SiLPA:		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(102.364.746.513)	(168.929.200.391)
Penyesuaian Uang Persediaan	(551.052.742)	159.535.528.423
Penyesuaian Rekening Retur	(216.316.651)	241.746.699
Penyesuaian Dana Talangan (*Backlog*)	-	1.830.450.103.855
Pendapatan Anggaran Lain-lain	(52.302)	(1.024.810)
Penyesuaian Hibah Langsung	(372.860.700)	-
Penyesuaian Kas KPPN	212.666.914	-
Penyesuaian Transfer	4.176.986	-
Penyesuaian Kas pada BLU	(375.080.500)	-
Penyesuaian Kas di BUN	(13.064.014.611)	-
Total Penyesuaian SiLPA	**(116.727.280.119)**	**1.821.297.152.776**
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	**46.432.649.228.692**	**46.527.600.199.917**

C.2.48. Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya Rp451,83 miliar

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp451.833.601.148 dan Rp1.540.934.451.110, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Rekening Pemerintah Lainnya (Rek. Penerimaan Pertambangan dan perikanan, dan RPL pada BA 999.04)	180.453.779.979	1.022.507.788.422
Investasi Jangka Pendek pada Kem. Pendidikan Nasional	135.839.486.878	
Kas lainnya setara kas pada Kem. Koperasi dan UKM	2.650.797.179	-
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SiLPA	100.924.694.157	55.665.875.681
Investasi Jangka Pendek BLU	-	30.750.000.000
Kas Hibah Langsung yang belum disahkan *)	12.626.616.173	392.137.441.936
Koreksi akun dana yang digunakan untuk pembayaran utang jangka pendek - Kementerian Koperasi dan UKM		-
Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.03	1.912.974.670	-
Selisih Kas Lebih (Kurang) Tahun ini	17.425.252.112	39.873.345.073
Jumlah	**451.833.601.148**	**1.540.934.451.110**

Catatan:

**) Kas Hibah Langsung yang belum disahkan merupakan selisih antara Kas Hibah Langsung pada neraca dengan kas hibah langsung yang disahkan KPPN.*

C.2.49. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang Rp84,57 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp84.574.619.543.073 dan Rp100.141.379.244.383 merupakan akun lawan dari Piutang (setelah penyisihan) dikurangi dengan Uang Muka Belanja selain Persekot Gaji, dan ditambah Uang Muka dari Rekening BUN, dan selisih kurs atas Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dalam valas.

C.2.50. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan Rp59,21 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp59.214.846.453.160 dan Rp36.366.060.681.005 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

C.2.51. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp 3,81 triliun

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.810.469.839.673 dan Rp4.210.269.507.402 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas (dalam Rp):

Akun Lawan	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Kas di Bendahara Penerimaan	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas [1)]	2.367.515.283.864	684.910.710.051
Rek. Migas No. 600.000411.980	915.575.358.774	2.613.993.307.333
Rek. Penerimaan Panas Bumi	197.960.188.008	208.604.971.388
Aset Lainnya [2)]	75.156.978.014	70.416.164.384
Setoran dividen PT Sarinah[3)]	1.361.709.889	-
Jumlah	**3.810.469.839.673**	**4.210.269.507.402**

Catatan:

1). Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disahkan, pengembalian belanja, pungutan pajak dan bunga jasa giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara Pengeluaran. ***(lihat Catatan C.2.6)***

2). Merupakan aset lain-lain BLU PIP Kementerian Keuangan berupa bunga deposito 12 bulanan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp1 triliun sebesar Rp70.000.000.000 dan bunga diterima dimuka dari deposito 1 bulanan Rp70 miliar sebesar Rp5.156.978.014.

3). Setoran dividen PT Sarinah oleh Bank Mandiri disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya dengan nomor rekening 502.000.002, di mana seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara 502.000.000.980. Berdasarkan hal tersebut, setoran dividen Sarinah tersebut tertampung terlebih dahulu pada Rekening Pemerintah Lainnya, dan akan dilaporkan sebagai pendapatan dan dapat digunakan sebagai kas pemerintah setelah dana tersebut dipindahkan ke Rekening Kas Umum Negara.

C.2.52. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek minus Rp204,48 triliun

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp204.483.878.830.570 dan minus Rp149.918.772.353.919. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Total Utang Jangka Pendek	246.444.874.649.922	201.343.960.842.088
Dikurangi:		
Utang PFK	(1.755.574.695.265)	(1.575.434.547.871)
Utang karena Kesalahan Pemindahbukuan Rekening BUN dan Rekening Retur	(1.137.834.225.993)	(639.059.754.870)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lainnya dan Setara Kas	(3.943.053.699.201)	(7.530.524.449.577)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan RPL (Rek. Migas)	(5.321.563.393.453)	(4.694.495.095.450)
Utang Subsidi yang merupakan akun lawan Rekening Cadangan Subsidi	(7.523.846.941.346)	(16.144.595.658.372)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	(9.505.740.673.161)	(8.374.050.605.673)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG		(1.388.930.389.738)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Aset Bersih Bapetarum		(3.551.726.799.482)
Pendapatan Diterima di Muka yang merupakan akun Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	(6.321.674.677.095)	(119.116.551.668)
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(3.207.294.640.602)	(7.407.264.635.468)
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPIH	(1.166.815.572.907)	-
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada DAU	(2.077.597.299.329)	-
Jumlah	**204.483.878.830.570**	**149.918.772.353.919**

C.2.53. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan minus Rp6,32 triliun

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp6.321.674.677.095 dan minus Rp119.116.551.668. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 merupakan akun lawan dari total Pendapatan Diterima di Muka yang sebesar Rp8.639.914.082.680 dikurangi dengan penerimaan dividen interim BUMN sebesar Rp2.318.040.768.528 dan Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Keuangan (BLU PIP) sebesar Rp198.637.057 berupa kelebihan pembayaran cicilan pinjaman dari Provinsi Sulawesi Tenggara.

C.2.54. Barang/Jasa yang Harus Diterima

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp1,28 miliar

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.276.453.004.389 dan Rp614.122.632.355 merupakan akun lawan dari Uang Muka Belanja. Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2011 merupakan akun lawan dari Uang Muka Belanja sebesar Rp1.279.165.315.147 dikurangi Persekot Gaji pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.712.310.768.

C.2.55. Selisih Kurs Bagian Lancar

Selisih Kurs Bagian Lancar minus Rp2,80 triliun

Selisih Kurs Bagian Lancar per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp2.798.692.210.245 dan minus Rp8.282.009.832.937 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih kurs terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang luar negeri dan dalam negeri	(3.207.294.640.602)
Selisih kurs atas Rekening BUN di BI dalam valas *)	235.078.083.137
Selisih kurs pada aset Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	173.524.347.220
Jumlah	**(2.798.692.210.245)**

Catatan:

**) Selisih kurs ini termasuk Selisih Kurs sampai dengan periode sebelumnya (31 Desember 2010) sebesar minus Rp1.169.106.908.608 dan selisih kurs tahun berjalan untuk Rekening KUN sebesar Rp1.374.844.061.456 dan selisih kurs tahun berjalan untuk Rekening Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp29.340.930.289.*

C.2.56. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp750,03 triliun

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp750.030.794.479.804 dan Rp702.836.007.101.463 merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

C.2.57. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1.567,97 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.567.974.174.587.750 dan Rp1.184.301.167.405.585 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

C.2.58. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp417,13 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp417.130.365.123.476 dan Rp246.554.471.882.238 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya. Jumlah tersebut merupakan akun lawan dari Aset Lainnya dikurangi dengan bagian Aset Lainnya yang merupakan kontra akun dari utang, seperti rekening cadangan, dan selisih kurs atas Penerusan Pinjaman dalam valas.

C.2.59. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang minus Rp1.679,03 triliun

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp1.679.033.615.946.059 dan minus Rp1.498.908.975.231.842 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (*Audited*)	31 Desember 2010 (*Audited*)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.103.057.191.066.402	999.024.915.595.136
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	597.871.227.923.484	595.709.331.375.223
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	(21.894.803.043.827)	(95.825.271.738.517)
Jumlah	**1.679.033.615.946.059**	**1.498.908.975.231.842**

C.2.60. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang minus Rp20,84 triliun

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp20.841.184.232.370 dan minus Rp90.635.097.545.054 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas *)	(21.894.803.043.827)
Selisih kurs pada aset atas Investasi Jangka Panjang dan Aset Lainnya dalam Penerusan Pinjaman	1.053.618.811.457
Jumlah	**(20.841.184.232.370)**

*) *Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas terdiri dari selisih kurs Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar minus Rp33.542.367.145.880 dan selisih kurs Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Valas sebesar Rp11.647.564.102.053.*

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Migas

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp6.237.138.752.226. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening No. 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2011.

Tabel 13
Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2011 dan 2010

URAIAN	31.12.2011 (*Audited*)		31.12.2010 (*Audited*)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	812.867.134,11	7.308.488,40	927.520.455,69	8.718.692,28
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas dan Penerimaan Bag Pemerintah	19.181.932.011,17	168.160.986,59	15.912.325.738,86	144.239.197,04
2. Koreksi Kurs Pembukuan Kredit/Debit (b)	269.772.216,00	2.334.484,48	-	11.313.460,37
3. Retur/Pengembalian karena salah rekening (c)	3.333.274,19	29.410,87	-	-
4. Pengembalian Dana Talangan			-	-
5. Koreksi Pembukuan			714.025.664,68	311.828,36
6. Penerimaan lain-lain			4.332.618,86	39.644,96
7. Selisih Kurs Pembukuan Kredit (d)		8.556.944,39		
Total Penerimaan	19.455.037.501,36	179.081.826,33	16.630.684.022,39	155.904.130,72
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	2.311.753.834,64	20.276.871,77	2.150.329.632,00	19.296.722,52
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	9.359.470,36	82.349,55	7.719.815,46	69.419,03
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN No.600.602411980				
• PPh Minyak Bumi (411111)	2.967.907.000,67	25.941.792,13	2.610.283.110,16	22.833.941,09
• PPh Gas Alam (411112)	5.376.349.944,17	47.168.704,63	3.967.161.671,40	36.039.390,02
• Pendapatan Minyak Bumi (421111)	199.810.490,95	1.761.732,30	767.666.850,30	6.993.373,37
• Pendapatan Gas Alam (421211)	5.955.495.802,78	52.187.086,92	4.628.692.964,56	40.918.314,60
• Pendapatan Migas lainnya (423139)	5.271.780,82	46.102,47	16.771.764,59	156.037,90
• PPh Pasal 25 (411126)				-
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	16.765.948.124,39	148.949.638,77	13.948.625.708,47	126.306.598,43
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. Reimbursement PPN ke Kontraktor	866.595.050,75	7.593.672,55	835.313.981,16	7.658.317,68
b. Pembayaran DMO Fee KKKS (e)	1.356.737.746,19	11.985.167,64	853.250.000,40	7.692.409,99
c. Pembayaran Fee Penjualan Migas Tahun 2007 & 2008 kepada PT Pertamina (Persero)			147.363.664,22	1.324.946,71
d. Pembayaran Fee / Anggaran BPMIGAS	158.721.823,43	1.365.624,92	120.982.831,97	1.100.419,71
e. Pembayaran Underlifting KKKS	161.345.921,45	1.455.529,62	124.797.310,19	1.127.042,04
f. Pengembalian Sisa Dana *White & Case* kepada PT Pertamina (Persero)			-	-
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	2.540.400.641,82	22.399.994,73	2.081.707.796,94	18.903.136,03
3. Koreksi Pembukuan Debit (f)	269.772.216,00	2.324.516,07	713.938.620,06	304.947,31
4. Koreksi Kurs Pembukuan Debit		8.443.926,17	-	11.890.051,04
5. Pengeluaran lain-lain (g)	631.784,04	5.688,22	1.065.135,00	9.595,80
6. Administrasi Bank (h)	129,50	2,25	84,50	6,99
7. Retur/Pengembalian karena salah rekening	3.333.274,19	29.409,77		
Total Pengeluaran	19.580.086.069,93	180.153.175,98	16.745.337.343,97	157.314.334,60
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	(125.048.568,57)	(1.071.349,65)	(114.653.321,58)	(1.410.203,88)
V. Saldo Akhir (I + IV) i)	687.818.565,54	6.237.138,75	812.867.134,11	7.308.488,40

Penjelasan:

a) Rekening valas No.600.000411980 merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh penerimaan negara dalam valuta asing yang berasal dari hasil

kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan untuk membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

b) Koreksi Pembukuan Kredit oleh Bank Indonesia

Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD269,772,216.00 atau setara dengan Rp2.334.484.482.709 merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda atau koreksi karena kesalahan posting, yang terdiri dari :

- Koreksi atas *double* pembukuan/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran penerimaan migas dari KKKS sebesar US$116,132,704.00 atau setara dengan Rp1.019.645.141.120.
- Koreksi pembukuan karena salah posting oleh BI (seharusnya penerimaan ini tidak masuk ke rekening migas No.600.000411980 karena peruntukkannya bukan sebagai penerimaan migas) yaitu sebesar US$15,631,601.00 atau setara dengan Rp134.181.662.984.
- Koreksi atas double pembukuan/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran PPh migas bulan Juli 2011 sebesar USD138,007,911.00 atau setara dengan Rp1.180.657.678.605.

Atas penerimaan-penerimaan tersebut, telah dikoreksi kembali oleh Bank Indonesia dan menjadi koreksi pembukuan debit sebagaimana dijelaskan pada poin e)

c) Retur/Pengembalian Kredit/Debit karena salah rekening

Retur/Pengembalian Kredit/Debit karena salah rekening sebesar USD3,333,274.19 atau ekuivalen Rp29.410.874.996 merupakan transaksi retur atas pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas yang disebabkan karena kesalahan rekening pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

- Retur pembayaran *reimbursement* PPN Migas sebesar USD3,216,764.91 atau setara dengan Rp28.373.689.574.
- Retur pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD116,509.28 atau setara dengan Rp1.037.185.422.

d) Selisih Kurs Pembukuan Kredit/Debit

Merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas No.600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

e) Pembayaran DMO Fee KKKS

Dalam pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD1,356,737,746.19 atau setara dengan Rp11.985.167.638.753,00 termasuk didalamnya pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina (Persero) yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD542,582,127.05 atau setara dengan Rp4.729.970.475.662, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Oktober 2010 s.d.Maret 2011 sebesar USD366,551,681.41 yang sebagian diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD353,465,153.21, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN No.600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD353,465,153.21 atau setara Rp3.015.057.756.881
- Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Juli s.d. Oktober 2011 sebesar USD296,715,938.72 yang sebagian diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD189,116,973.84, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Valas No.600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD189,116,973.84 atau setara Rp1.714.912.718.781.

f) Koreksi Pembukuan Debit oleh Bank Indonesia

Adalah pembetulan/jurnal koreksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai tindak lanjut atas

koreksi pembukuan kredit sebagaimana dimaksud pada poin b) sebesar USD269,772,216.00 ekuivalen Rp2.324.516.072.015 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi atas *double* pencatatan/ dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran penerimaan migas dari KKKS sehingga perlu didebit kembali atas double pencatatan tersebut yaitu sebesar US$116,132,704.00 atau setara dengan Rp1.012.793.311.584.
- Koreksi pembukuan karena salah posting oleh Bank Indonesia sebesar US$15,631,601.00 atau setara dengan Rp134.791.295.423.
- Koreksi atas *double* pembukuan/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran PPh migas bulan Juli 2011 sebesar USD138,007,911.00 atau setara dengan Rp1.180.657.678.605.

g) Pengeluaran Lain-lain

Pengeluaran lain-lain sebesar USD631,784.04 atau setara dengan Rp5.689.215.280 merupakan pengeluaran pemindahbukuan ke rekening Pajak No.600.500411980 sebagai PPh Uplift (MAP 411126) dalam rangka Sunset Policy (Pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2006) atas KKKS BUT Pacific Oil and Gas Jambi Merang Ltd.

h) Administrasi Perbankan

Biaya administrasi perbankan sebesar USD129.50 atau setara dengan Rp2.253.645 merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.

i) Saldo Akhir

Saldo akhir sebesar USD687,818,565.53 atau setara dengan Rp6.237.138.752.226 (ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp9.068/USD), termasuk pendapatan yang ditunda sebesar USD100,967,728.14 dan sisanya sebesar USD586,850,837.39 akan digunakan sebagai cadangan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kontraktual dan kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2011 yang belum diselesaikan sampai akhir Desember 2011.

2. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan C.2.3 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp197.960.188.008 dan Rp208.604.971.388. Rekening Panas Bumi (No. 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

	URAIAN	31 Desember 2011	31 Desember 2010
I.	**Saldo Awal** [1]	**208.604.971.388**	**190.638.768.899**
II.	**Penerimaan:**		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	898.462.528.861	803.357.658.926
	2. Koreksi Pembukuan Kredit	-	-
	Total Penerimaan	**898.462.528.861**	**803.357.658.926**
III.	**Pengeluaran:**		
	1. Pembayaran PBB Panas Bumi	200.894.853.819	180.258.219.624
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi [2]	145.510.184.676	261.346.804.029
	3. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN [3]	562.702.273.747	343.786.432.784
	4. Pinjaman untuk Dana Talangan	-	-
	5. Koreksi Pembukuan debit	-	-
	Total Pengeluaran	**909.107.312.242**	**785.391.456.438**
IV.	**Kenaikan/Penurunan (II - III)**	**(10.644.783.380)**	**17.966.202.488**
V.	**Saldo Akhir (I + IV)** [4]	**197.960.188.008**	**208.604.971.388**

Penjelasan:

1) Rekening No. 508.000084980 adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.
2) Pembayaran kembali PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp145.510.184.676 adalah Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya pada Tahun 2010.
3) Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rekening KUN sebesar Rp562.702.273.747
4) Saldo awal sebesar Rp208.604.971.388 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:
   a. Cadangan pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN panas bumi kepada Pengusaha panas bumi yaitu PT Pertamina (Persero) Area Geothermal Hulu Kamojang, Chevron Geothermal Salak,Ltd, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd dan Dayabumi Salak Pratama, Ltd sebesar Rp204.832.699.830
   b. Cadangan Pembayaran PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 untuk Wilayah Kerja Panas Bumi PT Geodipa Energy sebesar Rp3.772.271.558. PBB atas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PT Geodipa Energi belum dapat dibayarkan karena masih diperlukan klarifikasi landasan hukum atas pembayaran PBB untuk badan usaha tersebut.
5) Saldo akhir sebesar Rp197.960.188.008 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:
   a. Cadangan untuk pembayaran kembali (reimbursement) PPN panas bumi tahun 2010 dan 2011 kepada pengusaha panas bumi yaitu PT Pertamina (Persero), Chevron Geothermal Salak, Ltd, dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd sebesar Rp189.874.992.053.
   b. Cadangan untuk Pembayaran PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp8.085.195.955 untuk Wilayah Kerja Panas Bumi PT Geodipa Energy yang belum dapat dibayarkan karena masih diperlukan klarifikasi landasan hukum atas pembayaran PBB untuk badan usaha tersebut dengan rincian:
      1). PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 sebesar Rp3.772.271.558 dan;
      2). PBB pertambangan panas bumi Tahun 2011 sebesar Rp4.312.924.397

3. Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka melanjutkan penertiban rekening Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta untuk memenuhi amanat undang-undang yang menjadi landasan bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah lanjutan penertiban rekening pemerintah pada seluruh instansi K/L melalui penerbitan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu:

- PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;
- PMK Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Kementerian Keuangan melalui Tim Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang dibentuk oleh Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah penertiban rekening yaitu:

a. Mendata rekening-rekening di 76 (K/L) dan BUN yang berjumlah 46.586 rekening, dan dari jumlah tersebut telah ditutup 9.275 rekening, dan yang masih tidak selesai proses pembahasan/penyelesaiannya adalah sebanyak 3.007 rekening .
b. Rekening operasional K/L (untuk digunakan permanen dan/atau sementara/masih perlu ditindaklanjuti) yang dikelola oleh K/L per 31 Desember 2011 sebanyak 34.304 rekening. Masih terdapat rekening operasional yang belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN. Pada tahun 2011, TPRP ditugaskan untuk terus mencari keterangan terhadap rekening operasional K/L yang belum mendapat persetujuan dari BUN.
c. Terhadap rekening yang dibekukan sebanyak 3.096 rekening, 195 rekening diaktifkan kembali, 1.344 rekening sudah ditutup dan 1.557 rekening yang masih dibekukan karena belum ada klarifikasi dan permintaan pengaktifan kembali dari K/L yang bersangkutan atau rekening tersebut tidak memenuhi syarat untuk diaktifkan kembali. Dari rekening yang masih dibekukan diusulkan ditutup. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Atas Pengenaan Sanksi Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, Tim akan segera mengusulkan penutupan terhadap rekening yang masih dibekukan dan tidak mendapatkan tanggapan/respons dari K/L sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
d. Rekening yang diinvestigasi 4.774 rekening, 3.921 rekening dinyatakan telah selesai, dan 853 rekening masih dalam proses, karena belum semua APIP K/L telah tuntas melakukan penyelidikan terhadap keseluruhan rekening yang diserahkan oleh Tim maupun rekening tambahan yang ditemukan dalam proses penyelidikan.

Rekening pada 76 KL akan segera diserahkan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) - Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang secara struktural bertugas membina dan memonitor ketertiban KL dalam mengelola rekening Pemerintah agar tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Penertiban Rekening Pemerintah pada TA 2011 dikhususkan untuk perbaikan/*Updating* data; Tindak lanjut terhadap rekening-rekening diinvestigasi; Penyusunan daftar rekening yang telah disetujui; Inventarisasi Rekening Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk Rekening Kas Umum Negara (RKUN); Percepatan penyelesaian data rekening pada 43 K/L, antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian RI; dan Pengujian/pengkajian ulang rekening-rekening yang telah diberi persetujuan.

Laporan lengkap mengenai Penertiban Rekening Pemerintah Tahun 2011 disajikan tersendiri dalam bentuk Suplemen.

4. <u>Penertiban Barang Milik Negara</u>

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (iv) sistem pengendalian intern

pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 jo. Keppres 13 Tahun 2009 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, fisik maupun hukum.

Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam temuan BPK. Pelaksanaan penertiban BMN dilakukan mulai Oktober 2007 s.d. 31 Maret 2011 terhadap 74 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-lain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Hasil inventarisasi dan penilaian sampai dengan 31 Desember 2011 telah dibukukan pada LKKL sebesar Rp440.902.630.297.224. Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN disajikan pada **Daftar 27.**

5. Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2011, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih sebesar Rp3.025.983.193.491, dengan rincian (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL *)	Data LBMN *)	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)
Tanah	798.895.004.632.352	799.062.941.390.530	(167.936.758.178)
Peralatan dan Mesin	181.679.638.279.745	182.424.429.459.802	(744.791.180.057)
Gedung dan Bangunan	150.137.352.355.416	150.963.232.507.670	(825.880.152.254)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	344.701.632.477.202	346.443.268.369.488	(1.741.635.892.286)
Aset Tetap Lainnya	11.466.797.338.012	11.607.019.883.044	(140.222.545.032)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	63.692.939.001.971	63.098.664.943.530	594.274.058.441
Jumlah	**1.550.573.364.084.700**	**1.553.599.556.554.060**	**(3.026.192.469.366)**

**) tidak termasuk aset tetap yang ada di BRR NAD-Nias* dan BA BUN .

Penjelasan selisih:

1. Selisih pada Tanah, antara lain:
   - Tanah pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp83.763.886.845 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.
   - Tanah pada LBMN Bappenas sebesar Rp83.647.500.000 direklasifikasi sebagai Aset Lainnya pada Neraca karena merupakan aset kemitraan.
2. Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:
   - Peralatan dan Mesin pada LBMN Kementerian Kesehatan sebesar Rp596.298.315.540 dicatat sebagai KDP pada Neraca.
   - Peralatan dan Mesin pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp148.120.150.190 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.
3. Gedung dan Bangunan, antara lain:

- Gedung dan Bangunan pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp924.308.143.329 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.
- Gedung dan Bangunan pada Neraca Kementerian Keuangan sebesar Rp92.620.304.120 masih dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya dalam LBMN.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain:
   - Jalan Irigasi dan Jaringan pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp1.081.596.037.491 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.
   - Jalan Irigasi dan Jaringan pada LBMN Kementerian ESDM sebesar Rp659.004.283.359 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.
5. Aset Tetap Lainnya, antara lain:
   - Aset Tetap Lainnya pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp49.369.926.181 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.
   - Aset Tetap Lainnya pada LBMN Kementerian Keuangan sebesar Rp92.620.304.120 dicatat sebagai Gedung dan Bangunan dalam Neraca.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:
   - KDP sebesar Rp596.298.315.540 pada Neraca Kementerian Kesehatan dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada LBMN.
   - KDP pada LBMN Kementerian Diknas sebesar Rp154.827.447.604 tidak tercatat pada Neraca.

6. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

a. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK RI, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.

b. Kementerian Perhubungan berupa Dua Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.

c. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah. Berdasarkan buku barang bersejarah Museum KAA Bandung Aset bersejarah di museum tersebut dikelompokkan menjadi 6 kelompok:
   - Koleksi dengan bahan dasar logam sebanyak 17 unit
   - Koleksi dengan bahan dasar kayu sebanyak 64 unit
   - Koleksi dengan bahan dasar tekstil sebanyak 498 unit
   - Koleksi dengan bahan dasar kertas sebanyak 207 unit
   - Koleksi dengan bahan dasar audio visual sebanyak 139 unit
   - Koleksi dengan bahan dasar lain-lain sebanyak 16 unit

d. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
   - Arsip Konvensional sebanyak 27.910 km linier.
   - Arsip Kartografi dan Kearsitekturan sebanyak 110.736 lembar.
   - Arsip Film sebanyak 58.800 reel.

- Arsip Mikrofilm sebanyak 13.648 reel.
- Arsip Video sebanyak 30.250 kaset.
- Arsip Rekaman Suara sebanyak 37.369 kaset.
- Arsip Optical Disc sebanyak 427 keping.
- Arsip foto sebanyak 341.131 lembar (negatif foto) dan 200.000 lembar (positif foto).
- Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.

e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffless, Makam Belanda (Santiong) dan Patung Kepala Sapi.

f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

g. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan 598 Benda Cagar Budaya (BCB), yang dikelompokkan menjadi:

- Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb).
- Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.

Aset Bersejarah yang dikelola Kementerian Budpar sebanyak 27.031 unit yang tergolong dalam Candi, Tugu Peringatan, Bangunan Bersejarah, tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi serta aset tetap lainnya.

h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.733 eksemplar naskah kuno.

i. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah dengan rincian:
- Tugu Peringatan sebanyak 1 Unit
- Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 4 Unit
- Eksakta sebanyak 13 Unit.

j. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan sebanyak 5 unit serta 1 Unit Makam Bersejarah.

k. Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.

l. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
- Tugu Peringatan sebanyak 14 unit
- Bangunan Bersejarah sebanyak 4 unit
- Aset Eksakta sebanyak 2 unit
- Aset Non-Eksakta sebanyak 7 unit.

7. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disajikan dalam grafik di bawah ini:

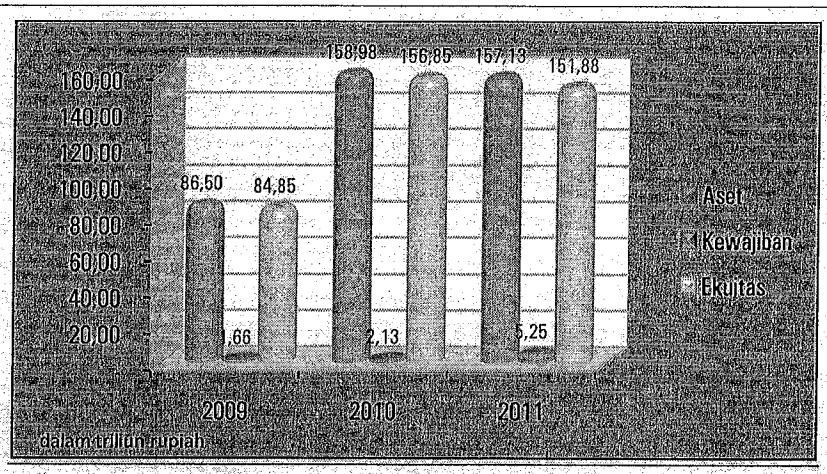

Grafik 47: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada **Daftar 28.**

8. Penerapan Penyusutan Aset Tetap pada Badan Layanan Umum

Sesuai dengan amanat PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, seluruh Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Untuk penerapan penyusutan Aset Tetap telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Untuk Tahun 2011 yang diwajibkan untuk menerapkan penyusutan Aset Tetap adalah Satuan Kerja dengan pola pengelolaan keuangan BLU yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan. Penyusutan Aset Tetap Satker BLU tersebut diungkapkan pada CaLK masing-masing LKKL. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap pada 65 Satuan Kerja Badan Layanan Umum disajikan pada **Daftar 28.**

9. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias)

BRR-NAD Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Masa tugas BRR berlaku 4 (empat) tahun dan pengakhiran masa Tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 16 April 2009.

Dalam rangka penyelesaian Aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR-NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2011, LK Likuidasi belum diterbitkan, namun LK Penutup per 31 Desember 2011 telah disusun, sehingga Neraca BRR NAD-

Nias yang disajikan dalam LKPP Tahun 2011 masih merupakan Neraca Penutup per 31 Desember 2011. Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (Audited) dan Neraca penutup per 31 Desember 2011.

NERACA
BRR NAD-NIAS

Aset		
Aset Lancar		
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200	-
Uang Muka Belanja	24.546.204.400	-
Belanja Dibayar Di Muka	2.149.584.510	-
Persediaan	78.951.123.713	78.951.123.713
Jumlah Aset Lancar	106.163.880.823	78.951.123.713
Aset Tetap	-	
Tanah	572.821.719.812	526.785.787.623
Peralatan Dan Mesin	1.538.503.845.802	771.847.366.434
Gedung Dan Bangunan	3.351.099.589.510	1.191.902.923.099
Jalan Irigasi Dan Jaringan	4.771.805.420.047	1.894.182.520.918
Aset Tetap Lainnya	27.483.007.111	20.906.386.326
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.049.831.238.560	1.026.146.271.124
Jumlah Aset Tetap	11.311.544.820.842	5.431.771.255.523
Aset Lainnya		
Aset Lain-Lain	661.364.926.291	485.603.480.566
Jumlah Aset Lainnya	661.364.926.291	485.603.480.566
Jumlah Aset	**12.079.073.627.956**	**5.996.325.859.802**
Kewajiban	-	-
Ekuitas Dana		
Ekuitas Dana Lancar		
Cadangan Piutang	27.212.757.110	-
Cadangan Persediaan	78.951.123.713	78.951.123.713
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	106.163.880.823	78.951.123.713
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	11.311.544.820.842	5.431.771.255.523
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	661.364.926.291	485.603.480.566
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.972.909.747.133	5.917.374.736.089
Jumlah Ekuitas Dana	**12.079.073.627.956**	**5.996.325.859.802**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	**12.079.073.627.956**	**5.996.325.859.802**

Perubahan nilai aset tetap dan aset lainnya dari Neraca per 31 Desember 2008 (*Audited*) menjadi Neraca Penutup per 31 Desember 2011 adalah karena adanya koreksi dan penghapusbukuan.

10. Unit Badan Lainnya

Dalam rangka penataan pelaporan keuangan Unit Badan Lainnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Badan Lainnya. Unit Badan Lainnya (UBL) didefinisikan sebagai unit organisasi yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi K/L di mana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab langsung kepada pimpinan K/L tertentu. Nomenklatur UBL tersebut bermacam-macam, antara lain akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja. Termasuk dalam UBL adalah yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Pembentukan ini ada yang bersifat jangka pendek, namun ada pula yang bersifat jangka panjang mengingat pembentukan UBL tergantung dari kebutuhan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Hingga akhir tahun 2011, Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi 101 lembaga non struktural atau terdapat peningkatan 11 lembaga non struktural yang sebagian besar baru dibentuk pada tahun 2011. Dari 101 lembaga tersebut, lebih dari sepertiganya (35 lembaga) merupakan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang. Menilik legalitas pembentukannya. sebanyak 20% dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden sebanyak 60% dan 20 % berdasarkan peraturan presiden.

Komposisi sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional LNS bisa dikategorikan dalam 3 jenis:

1. Sekitar 75% (68 LNS) dibiayai dari APBN. Sebanyak 43 Sekretariat LNS merupakan Satker yang berada dibawah Kementerian Negara/Lembaga (K/L). sedangkan 25 Sekretariat LNS dibiayai dari Kegiatan K/L. Dari 43 satker tersebut. diantaranya adalah 13 Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET) yang didanai APBN melalui Dana Dekonsentrasi di SKPD Dinas PU & Kimpraswil.
2. Tiga LNS yakni: Bapertarum, Badan Pengelola Dana Abadi Umat, dan Otorita Asahan. mendanai kegiatannya dari penerimaan tertentu tanpa kucuran dana dari APBN.
3. Empat Lembaga Non Struktural yang menerima dana dari APBN dan Non APBN yakni: Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).

Enam LNS saat ini sudah tidak aktif lagi namun peraturan perundang-undangan tentang pembentukan LNS tersebut belum dicabut. Sedangkan 8 LNS belum aktif karena belum lama dibentuk pemerintah dan 10 LNS yang baru dibentuk pada tahun 2011 .

Lembaga Non Struktural yang dibiayai dari APBN murni, akuntansi atas transaksi keuangan dan laporan keuangannya sudah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lembaga non struktural yang menjadi satuan kerja atau entitas akuntansi tersendiri, pengurusan administrasi keuangannya ditangani oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau pejabat struktural K/L yang menaungi dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Yayasan di lingkungan K/L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 memasukkan yayasan di lingkungan K/L dalam ruang lingkup keuangan negara. Terdapat kata "pihak lain" pada butir g dan I yaitu:

- "Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/daerah".

- "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah".

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 2 butir I UU 17/2003 meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan negara di atas, yayasan di lingkungan kementerian/lembaga adalah yayasan yang terafiliasi dengan kementerian negara/lembaga. yang menurut Akta Notaris dan Anggaran Dasarnya didirikan atau dipimpin oleh pejabat pemerintah aktif di kementerian negara/lembaga tertentu atau yayasan yang menerima dan memanfaatkan aset negara dalam melaksanakan kegiatannya. Identifikasi atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga ini diperlukan untuk kemajuan tata kelola pemerintahan melalui transparasi dan akuntabilitas sektor publik.

Identifikasi lebih lanjut atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga dipisahkan dari yayasan-yayasan yang bernaung dibawah institusi TNI. Hal ini karena karena Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini ada 900-an unit bisnis baik berupa yayasan maupun koperasi di bawah naungan TNI yang telah teridentifikasi oleh Badan Pengelola Transformasi Bisnis TNI yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya yayasan maupun koperasi tersebut ditransformasikan dalam korporasi atau dimasukkan dalam mekanisme APBN, sehingga TNI bisa berkonsentrasi mengembangkan profesionalitas tentara dan meninggalkan bisnis.

Sejauh ini, yayasan dalam lingkup keuangan negara yang sudah teridentifikasi dan sebagian menyampaikan laporan keuangan yakni:

1. Yayasan Harapan Kita dalam hal ini Badan Pengelola dan Pengembangan TMII yang mengelola Taman Mini Indonesia Indonesia Indah.
2. Yayasan Sarana Wana Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti yang berada di Kementerian Kehutanan.
3. Yayasan Gedung Veteran RI yang mengelola gedung "Graha Purna Yudha" di Jalan Sudirman. Semanggi – Jakarta Pusat.
4. Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumibhakti Adhiguna di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
5. Yayasan Gedung Arsip Nasional RI
6. Yayasan Yustitia Dharmayukti Karini di lingkungan Mahkamah Agung
7. Yayasan Purna Bhakti (YARNATI) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
8. Yayasan Pengembangan BUMN di lingkungan Kementerian Negara BUMN

Penyajian UBL dalam Laporan Keuangan

Berikut adalah perlakuan penyajian UBL pada LKPP disesuaikan dengan karakteristik/jenis dari UBL dimaksud, yaitu:

No.	Jenis UBL	Penyajian Dalam LKPP
1	UBL Sebagai Satuan Kerja K/L	Laporan Keuangan tergabung dalam LKKL yang bersangkutan
2	UBL Sebagai Bagian dari Satker K/L	Laporan Keuangan tergabung dalam LKKL yang bersangkutan
3	UBL Non Satker yang juga bertindak sebagai Satuan Kerja/Bagian Satuan Kerja	- UBL tersebut Otorita Batam dan Badan Wakaf Indonesia. - Sebagai Satuan Kerja/Bagian Satuan Kerja Laporan Keuangannya tergabung dalam LKKL yang bersangkutan. - Nilai ekuitas di luar yang diperoleh dari APBN disajikan pada Neraca sebagai "Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya"
3	UBL Non Satker	- Terdapat 2 UBL yang seharusnya tidak termasuk dalam definisi UBL, yaitu LPS dan BPMIGAS karena merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Permanen. - 2 UBL, yaitu Otorita Asahan dan Baznas, disajikan pada Neraca sebagai "Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya' - 1 UBL, yaitu BAPERTARUM-PNS hanya diungkapkan dalam CaLK. - 1 UBL, yaitu BP DAU, sebagai pengelola dana masyarakat disajikan sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" melalui Laporan Keuangan Kementerian Agama (BA 025).
4	UBL sudah menjadi Bagian Anggaran tersendiri untuk TA 2011	UBL tersebut adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
5	Yayasan	Disajikan pada Neraca sebagai "Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Pemerintah Lainnya" Baru 3 Yayasan yang disajikan pada LKPP Tahun 2011, yaitu Yayasan Harapan Kita dalam hal ini Badan Pengelola dan Pengembangan TMII yang mengelola TMII, Yayasan Sarana Wana Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran RI yang mengelola gedung "Graha Purna Yudha"
6	Tidak Aktif	Hanya diungkapkan dalam CaLK

Sampai dengan akhir Tahun 2011, total Aset Bersih UBL sebesar Rp34,32 triliun. Pemilik aset terbesar: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS, LPP RRI, dan LPP TVRI.

Pada tahun anggaran 2012 untuk LPP TVRI dan LPP RRI juga telah ditetapkan menjadi Bagian Anggaran tersendiri.

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya disajikan dalam **Daftar 29.**

11. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara yang berasal dari bekas:

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubark an dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK No. 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK No. 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
2. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
3. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
4. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
5. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Sampai dengan 31 Desember 2011, dari total 1.010, telah diselesaikan sebanyak 61 aset dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2009: 2 aset menjadi BMN dan 3 aset dilepaskan ke pihak ketiga/swasta (total 5 aset)
2. Tahun 2010: 6 aset menjadi BMN dan 14 aset menjadi BMD (total 20 aset)
3. Tahun 2011: 7 aset menjadi BMN, 28 aset menjadi BMD, dan 1 aset dilepas ke pihak ketiga (total 36 aset).

Rincian ABMA/C disajikan pada **Daftar 30.**

12. Kewajiban Kontinjensi

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan mempertimbangkan besarnya kebutuhan dana investasi, Pemerintah memberikan dukungan berupa:

a. Jaminan kewajiban pembayaran BUMN/BUMD kepada kreditur atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
b. Jaminan pembayaran BUMN kepada investor swasta atas kewajiban –kewajiban tertentu dalam perjanjian jual beli listrik.

Jaminan atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur bertujuan memberikan kepastian pembayaran kembali sehingga dapat menarik minat investor/kreditor untuk menyalurkan dananya. Disamping itu dengan adanya Jaminan Pemerintah, maka risiko investor/kreditor dalam pemberian pinjaman menjadi lebih rendah yang pada akhirnya

dapat menurunkan biaya pinjaman/harga jual beli listrik.

Proyek-proyek yang telah mendapatkan penjaminan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (FTP I) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero)
2. Program percepatan penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh PDAM
3. Program pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (FTP II) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero)
4. Proyek Central Java Power Plant (CJPP) yang merupakan salah satu project show case program kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha Swasta (KPS)

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada investor/kreditur akan timbul jika pihak yang dijamin (PT PLN (Persero) dan PDAM) tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian atas timbulnya kewajiban Pemerintah baik dari sisi kapan terjadinya maupun nilai kewajiban yang timbul. Oleh karena itu, perhitungan alokasi anggaran dalam APBN didasarkan pada estimasi besaran jumlah kewajiban PT PLN (Persero) dan PDAM kepada kreditur pada tahun berjalan dikalikan dengan probabilitas gagal bayar dari kewajiban tersebut.

Pengelolaan Kewajiban Kontijensi TA 2011

Sampai dengan Desember 2011, bentuk penjaminan Pemerintah yang telah dilakukan untuk keempat program pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Untuk program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, telah diterbitkan sebanyak 30 surat jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit dan 4 surat jaminan Pemerintah untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp36.216.962.894.355 dan USD3,958,718,574.
2. Untuk program percepatan penyediaan air minum, telah diterbitkan sebanyak 3 Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk 3 PDAM (Kab. Bogor, Kab. Ciamis dan Kab. Lombok Timur). Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp50.187.000.000 (lima puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
3. Untuk proyek Central Java Power Plant (CJPP), berupa *Guarantee Agreement* yang telah ditandatangani antara PT PII dan Pemerintah selaku penjamin dengan PT Bhimasena Power Indonesia, dimana PT PII menjamin maksimal sebesar Rp300 miliar, sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah sebesar asumsi nilai proyek Rp30 triliun dikurangi penjaminan PT PII Rp300 miliar. Sampai dengan saat ini, penjaminan proyek PLTU Jawa Tengah belum efektif mengingat PT Bhimasena Power Indonesia belum mendapatkan pendanaan (financial close) dan masih terdapat syarat administratif yang belum dipenuhi.
4. Untuk program pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas, sampai saat ini masih dalam proses evaluasi dan penerbitan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU).

Alokasi anggaran kewajiban kontijensi penjaminan Pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

Program	Exposure (Rp)	x	Probability Default	x	(100 %	-	Recovery Rate)	=	Expected Loss (Rp)
Penjaminan PT PLN	5.927 miliar	x	15 %	x	(100 %	-	0 %)	=	889 miliar

Penjaminan PDAM	28 miliar	x	16.98%	x	(100 %	-	0 %	)	=	4,75 miliar

Exposure pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara pada tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp5.927 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 15% dan *recovery rate* sebesar 0% maka *expected loss* kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp889 miliar sehingga anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk PT PLN (Persero) yang dialokasikan dalam APBN TA 2011 adalah sebesar Rp889 miliar.

Exposure pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan penyediaan air minum untuk tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp28 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 16,98% dan recovery rate sebesar 0% serta pertimbangan risiko lainnya, maka *expected loss* kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul di tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp4,75 miliar. Namun untuk meningkatkan kepercayaan perbankan atas penjaminan Pemerintah untuk PDAM, maka alokasi anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk program percepatan penyediaan air minum dalam APBN TA 2011 ditetapkan menjadi sebesar Rp10 Miliar.

Untuk penjaminan proyek FTP II, Pemerintah menyediakan dana penjaminan pemerintah dalam APBN terkait jaminan kelayakan usaha melalui dana subsidi listrik (PSO). Sedangkan alokasi anggaran penjaminan untuk proyek Central Java Power Plant (CJPP), akan mulai dilakukan tahun 2013 dengan asumsi penjaminan Pemerintah efektif pada Oktober 2012 (setelah *financial close* tercapai).

Sampai dengan Desember 2011, alokasi anggaran penjaminan Pemerintah dalam APBN tidak dicairkan, dengan kata lain tidak terjadi gagal bayar pihak yang dijamin (PT PLN (Persero) dan PDAM).

13. *Unfunded Liability* atas Program Tabungan Hari Tua (THT)

Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil, disamping Negara dapat menanggung pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan PNS, juga melibatkan PNS dalam menanggung pembiayaan untuk penyelenggaraannya melalui iuran PNS bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1974, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran 10% dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3¼% dari 10% tersebut merupakan iuran THT. Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 PP No. 25 Tahun 1981, Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima peserta setiap bulan tanpa pangan, satu dan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 478/KMK.06/2002, skema THT adalah manfaat pasti, di mana setiap PNS pada saat pensiun atau meninggal dunia akan menerima manfaat asuransi dwiguna dan atau manfaat asuransi kematian dan formulanya sudah ditetapkan.

Pasal 14 PP 25 Tahun 1981 menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara asuransi sosial yaitu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggung jawab penuh untuk itu.

Sesuai dengan Pasal 1 poin 3 PMK 65 Tahun 2008, Utang Kepada Dana Pensiun dan THT adalah pos belanja yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah dalam rangka penyesuaian perhitungan besarnya manfaat THT PNS dan Hakim.

Pada Laporan Keuangan PT TASPEN (program THT) Tahun 2011 diungkapkan bahwa terdapat Piutang *Past Service Liability* (PSL) Pemberi Kerja atas THT yang diestimasi,

akibat kenaikan gaji pokok PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
PSL Pemberi Kerja akibat PP 9/2007	1.638.443.906.070
PSL Pemberi Kerja akibat PP 14/2008	2.450.505.392.359
PSL Pemberi Kerja akibat PP 8/2009	3.024.845.340.493
PSL Pemberi Kerja akibat PP 25/2010	1.275.570.232.079
PSL Pemberi Kerja akibat PP 11/2011	3.432.866.853.874
Total	**11.822.231.724.875**

Pelunasan *Unfunded Liability* tersebut akan dilakukan Pemerintah apabila dinilai perlu setelah dilakukan:

a. Audit menyeluruh (*due diligence*) atas PT Tapen (Persero) oleh auditor dan aktuaris independen; dan

b. Pemisahan kekayaan dan kewajiban Program THT non-PNS dari kekayaan dan kewajiban Program THT PNS sesuai dengan PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua PNS.

Selanjutnya, guna meningkatkan kemanfaatan program pensiun dan program THT bagi PNS, Pemerintah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Perumusan dan penetapan program THT PNS baru yang mampu meningkatkan manfaat THT bagi PNS;

b. Perumusan dan penetapan mekanisme program THT PNS baru yang lebih efisien dan akuntabel serta sesuai dengan *international best practices*;

c. Pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif atas PT Taspen (Persero).

14. *Past Service Liabilities* Program Pensiun

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun. Pada APBN-P TA 2011 pembayaran pensiun 100% beban APBN. Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2008, Pemerintah meminta PT TASPEN melakukan *sharing* terhadap pembayaran manfaat pensiun seperti pada tabel berikut ini:

No	Periode	Sharing (%)		Sharing (Rp)	
		APBN	TASPEN	APBN	TASPEN
1	Januari - Maret 1994	0%	100%	-	684.484.404.672
2	April 1994 - Maret 1997	77,50%	22,50%	10.320.490.467.535	3.251.694.491.666
3	April 1997 - Desember 1998	77%	23%	4.166.973.000.000	1.443.702.023.854
4	Januari 1999 - Desmeber 2002	75%	25%	38.808.429.790.889	10.629.716.358.793
5	Januari 2003 - Desember 2005	79%	21%	45.267.251.395.247	10.369.704.931.390
6	Januari - Desember 2006	82,50%	17,50%	18.983.960.941.237	3.772.133.279.016
7	Januari - Desember 2007	85,50%	14,50%	23.342.832.127.554	3.476.843.628.139
8	Januari - Desember 2008	91%	9%	30.715.182.682.604	2.630.389.180.583
Total				**171.605.120.405.066**	**36.258.668.298.113**

Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan

pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT. Berdasarkan Hasil Valuasi Aktuaria Independen per 31 Desember 2010 terdapat kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebesar Rp1.809,42 triliun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara.

Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa *past service liabilities* (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp70,22 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo *past service liabilities* untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp1.879,64 triliun. Saldo *past service liabilities* ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Tahun 2011.

Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2011 diketahui bahwa jumlah dana titipan atas iuran program pensiun sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp42,20 triliun. Rincian Dana Program pensiun per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

A. Saldo per 31 Desember 2010	28.722.730.784.872
B. Penerimaan:	
Penerimaan Iuran Peserta	6.603.299.627.280
Penerimaan Dana dari Pemerintah	51.851.747.090.690
Hasil Investasi	3.146.394.364.877
Kenaikan Nilai Investasi	4.628.274.904.132
Pendapatan Lain-lain	13.138.741.576
Total Penerimaan	66.242.854.728.555
C. Pengeluaran:	
Pembayaran Manfaat Pensiun	51.843.550.831.851
Beban Operasional	600.975.111.740
Total Pengeluaran	52.444.525.943.591
D. Perubahan Dana (B-C)	13.798.328.784.964
E. Koreksi Dana Bersih	(317.603.038.071)
F. Saldo per 31 Desember 2011 (A+D+E)	**42.203.456.531.765**

15. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum)

Bapertarum PNS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994. Tabungan Perumahan diwajibkan kepada setiap PNS yang dipotong dari gaji masing-masing PNS. Untuk mengelola tabungan tersebut dibentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS dengan tujuan membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan. Pemotongan gaji untuk tabungan perumahan tersebut efektif pada pemotongan gaji bulan Februari 1993 untuk pemotongan gaji bulan Januari dan Februari 1993 dan berakhir bulan yang bersangkutan berhenti menjadi PNS.

Dana yang terkumpul dari pemotongan tabungan tersebut disetor ke rekening Menteri Keuangan untuk dan atas nama Bapertarum PNS pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dana tabungan tersebut setinggi-tingginya sebesar 60% dari jumlah dana tabungan dipergunakan untuk membantu seluruh PNS untuk uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilik Rumah bagai pegawai yang belum memiliki rumah maupun membantu sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat bekerja. Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah

tabungan disimpan dalam bentuk deposito atau jenis lain yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pada LKPP Tahun 2011, Aset Bersih Bapetarum tidak disajikan lagi di Neraca, hal ini konsisten dan sama dengan perlakuan akuntansi untuk dana iuran pensiun yang dikelola PT TASPEN dan PT ASKES. Berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum-PNS Tahun 2011, aset sebesar Rp6.807.063.950.338,73, kewajiban Rp2.860.286.664.356,29, dan ekuitas bersih sebesar Rp3.946.777.285.982,44.

16. Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL BUMN)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, dan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Dana Program Kemitraan BUMN bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%, jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, dan dari pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Untuk Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% dan hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Pelaksanaan dan Pengelolaan dana tersebut berada di BUMN Pembina (BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL), Koordinator BUMN Pembina (BUMN yang ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu), BUMN Penyalur (BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran), atau Lembaga Penyalur (badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran) namun otoritas penggunaannya berada pada Kementerian Negara BUMN. Sampai dengan 31 Desember 2011 Dana PKBL BUMN berjumlah Rp833.328.094.726.

Selain dana PKBL BUMN juga terdapat Dana Bantuan Tunai BUMN Peduli, yaitu Dana yang dikumpulkan dari dana BL BUMN Peduli dan merupakan bagian dari Dana Program Bina Lingkungan pada BUMN Pembina. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, saldo Dana Bantuan Tunai BUMN Peduli adalah sebesar Rp14.180.502.976.

17. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2010

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemerintah telah melakukan tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010. Tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada **Daftar 31.**

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pencairan Dana Cadangan Subsidi/PSO dan Dana Cadangan DBH

Sampai dengan tanggal 29 Februari 2012, dari total dana cadangan subsidi/PSO dan dana cadangan DBH sebesar Rp18.795.238.623.326, yang telah disalurkan kepada pihak ketiga sebesar Rp17.029.587.614.507 dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.765.651.008.819, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

No.	Jenis Cadangan	Jumlah Yang Telah Dicairkan Kepada Pihak Ke-3	Dana Cadangan yang Disetor ke Kas Negara	Jumlah Cadangan
1	Subsidi POS	64.260.500.000	0	64.260.500.000
2	Subsidi PT PELNI	124.457.849.390	12.294.655.610	136.752.505.000
3	Subsidi PERUM BULOG	3.880.034.638.700	220.804.646.100	4.100.839.284.800
4	Subsidi PT KERETA API	152.468.942.728	7.433.342.272	159.902.285.000
5	Subsidi Energi	1.013.499.909.390	14.864.441.735	1.028.364.351.125
6	Subsidi Pupuk	2.250.517.999.430	1.094.011.741.080	3.344.529.740.510
7	Subsidi Benih	38.607.101.708	22.335.195.282	60.942.296.990
8	DBH Perikanan	15.348.647.120	0	15.348.647.120
9	DBH Pertambangan Umum	2.547.225.380.989	381.340.670.725	2.928.566.051.714
10	DBH Kehutanan	260.068.584.643	12.566.316.015	272.634.900.658
11	DBH SDA	6.683.098.060.409	0	6.683.098.060.409
Jumlah		**17.029.587.614.507**	**1.765.651.008.819**	**18.795.238.623.326**

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2011 sebesar Rp99,01 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2011 adalah sebesar Rp99.011.278.600.702 yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2010 setelah disesuaikan dengan koreksi saldo awal kas pada TA 2011. Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU:		
Kas BUN di BI	79.606.375.358.793	32.185.520.242.213
Kas di KPPN	9.218.612.887.732	8.309.379.301.258
Kas Rekening Khusus	2.824.334.883.970	-
Kas pada BLU	7.287.680.742.179	5.567.846.500.943
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	48.185.913.485	-
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Sebelum Penyesuaian	**98.985.089.736.159**	**46.062.746.044.414**
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Saldo Awal Rekening SAL	-	5.870.514.138.408
Penyesuaian Saldo Awal Rekening Penempatan pada Bank Umum	-	15.000.000.000.000
Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU *)	26.554.437.138	112.445.204.316
Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN **)	(365.572.595)	7.566.397.318
Total Penyesuaian Saldo Awal	**26.188.864.543**	**20.990.525.740.042**
Saldo Awal Kas BUN, KKPN & BLU Setelah Koreksi	**99.011.278.600.702**	**67.053.271.784.456**

Keterangan:

*) Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU sebesar Rp26.554.437.138 merupakan penyesuaian atas Kas pada BLU berdasarkan data dari KPPN setempat, yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Padang	(23.171.136)
KPPN Serang	(79.313.662)
KPPN Bandung I	(279.729.486)
KPPN Manado	(490.728.973)
KPPN Bengkulu	(319.298.813)
KPPN Mataram	3.672.732.535
KPPN Tegal	753.018.497
KPPN Semarang II	4.021.931.355
KPPN Semarang I	968.870.991
KPPN Surabaya II	460.938.396
KPPN Makassar II	6.325.196.394
KPPN Jakarta II	8.281.761.667
KPPN Jakarta III	3.262.229.373
Total	**26.554.437.138**

**) Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN sebesar minus Rp365.572.595 merupakan penyesuaian atas Kas KPPN, yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Balikpapan	3.050.150
KPPN Palopo	(78.444.835)

KPPN Sijunjung	(146.700.000)
KPPN Manna	(10.523.500)
KPPN Mamuju	(132.954.410)
Total	**(365.572.595)**

PERUBAHAN KAS

Kenaikan Kas pada TA 2011 sebesar Rp8,83 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2011 dan TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (*Audited*)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	32.781.696.488.577	33.197.591.404.914
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(117.624.715.204.186)	(80.043.299.758.387)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan	131.392.395.224.420	91.552.011.400.614
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran	1.313.542.615.553	2.927.386.748.278
Koreksi Pembukuan:		
Penggunaan SAL *)	(40.319.043.049.000)	(17.347.946.818.000)
Penyesuaian Pembukuan **)	1.287.457.711.323	(1.178.259.859.686)
Kenaikan (Penurunan) Kas	**8.831.333.786.686**	**29.107.483.117.733**

*) Penggunaan SAL pada saat yang bersamaan diakui juga sebagai Penerimaan Pembiayaan.

**) Penyesuaian Pembukuan terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (*Audited*)
Pengembalian Pendapatan TA yang lalu	(102.364.746.513)	(168.929.200.391)
Koreksi Uang Persediaan	(551.052.742)	159.535.528.423
Koreksi Rekening 'rr'	(216.316.651)	241.745.699
Selisih Kurs Kas BUN	1.404.184.991.745	(1.169.106.908.607)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	(52.302)	(1.024.810)
Koreksi Kas Hibah Langsung	(372.860.700)	-
Koreksi Kas pada BLU	(375.080.500)	-
Koreksi Transfer	4.176.986	-
Koreksi Kas KPPN	212.666.534	-
Koreksi Pembulatan	77	-
Koreksi Kas di BUN	(13.064.014.611)	
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**1.287.457.711.323**	**(1.178.259.859.686)**

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 48.

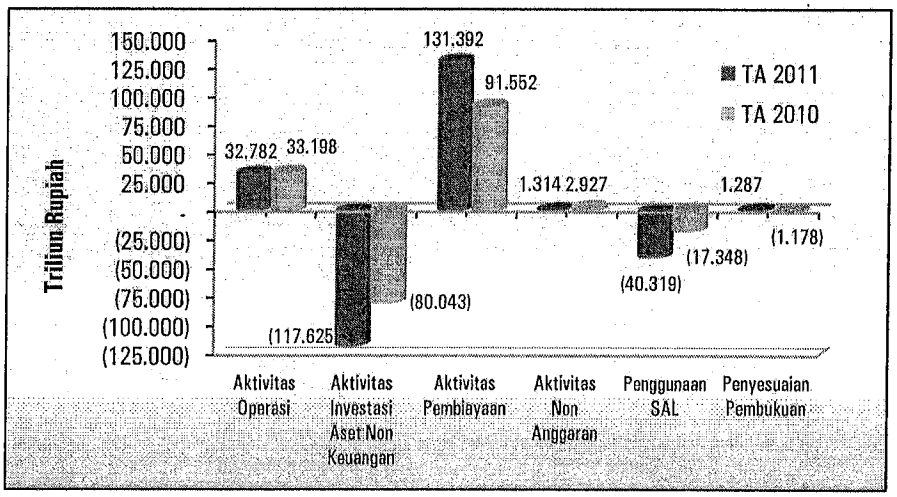

Grafik 48: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2011 sebesarRp121,26 triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2011 sebesar Rp121.261.988.260.868 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (*Audited*)
Kas BUN, KPPN, BLU & Hibah Langsung*)	107.842.612.387.387	96.160.754.902.189
Rekening Khusus	-	2.824.334.833.970
Rekening Pemerintah Lainnya	6.615.552.720.213	8.539.601.162.593
Kas di Bendahara Pengeluaran	292.795.937.959	518.919.028.152
Kas di Bendahara Penerimaan	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas**)	6.327.755.216.087	8.603.994.085.726
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	100.924.694.157	53.015.078.502
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(170.553.016.059)	-
Jumlah Saldo Akhir Kas	**121.261.988.260.868**	**117.332.963.445.378**

*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan Hibah Langsung terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (*Audited*)
Rekening Kas BUN di BI	82.453.918.298.407	79.606.375.358.793
Rekening Kas di KPPN	11.870.556.947.661	9.218.612.887.732
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	13.089.016.578.965	7.287.580.742.179
Hibah Kas Langsung K/L yang Sudah Disahkan	429.120.562.354	48.185.913.485
Jumlah	**107.842.612.387.387**	**96.160.754.902.189**

Rekening Kas BUN di BI pada TA 2011 termasuk Rekening Khusus sebesar Rp2.390.016.546.991.

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2011 sebesar Rp13.089.016.578.965 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek) sebesar Rp143.539.893.732 oleh Satker BLU.

**) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6.327.755.216.087 berasal dari saldo sebesar Rp6.756.875.778.441 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung K/L yang sudah disahkan sebesar Rp429.120.562.354.

***) Kas pada BLU sebesar Rp100.924.694.157 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN dan beberapa koreksi, dengan perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (*Audited*)
Total Kas pada BLU menurut K/L	13.019.388.257.063	7.340.595.820.681
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disepositokan	(170,553,016,059)	-
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	13.089.016.578.965	7.287.580.742.179
Kas pada BLU yang belum disahkan KPPN	**100.924.694.157**	**53.015.078.502**

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp13.089.016.578.965 berasal dari perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (*Audited*)
Saldo awal BLU	7.287.580.742.179	5.567.846.500.943
Koreksi Tambah Saldo Awal Kas pada BLU	26.554.437.138	112.445.204.316
Pendapatan BLU	20.103.995.586.771	10.590.842.035.270
Belanja BLU	(14.328.739.106.623)	(8.983.552.998.350)
Koreksi Pembukuan Kas pada BLU	(375.080.500)	-
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	**13.089.016.578.965**	**7.287.580.742.179**

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2011 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp32,78 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2011. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp32.781.696.488.577, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	1.209.469.558.508.440	980.192.560.688.363
Dikurangi Arus Kas Keluar	(1.176.687.862.019.860)	(946.994.969.283.449)
Arus Kas Bersih	**32.781.696.488.577**	**33.197.591.404.914**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2010, terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp415.894.916.338.

D.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan Rp873,87 triliun

Penerimaan Perpajakan pada TA 2011 sebesar Rp873.873.892.399.381 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp819.752.426.342.423 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp54.121.466.056.958. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2011 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	431.121.712.728.316	354.152.324.675.100
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	277.800.076.679.384	219.538.218.197.355
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.893.164.324.396	28.580.589.978.740
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(730.151.679)	8.026.429.073.342
Cukai	77.010.010.613.795	66.165.922.512.567
Pajak Lainnya	3.928.192.148.211	3.371.209.407.180
Jumlah Penerimaan Pajak DN	**819.752.426.342.423**	**679.834.693.844.284**
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	25.265.863.309.375	19.759.193.417.044
Bea Keluar	28.855.602.747.583	8.897.707.295.916
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	**54.121.466.056.958**	**28.656.900.712.960**
Penerimaan Perpajakan	**873.873.892.399.381**	**708.491.594.557.244**

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan dalam TA 2011 lebih besar Rp165.382.297.842.137 atau 23,34 persen dari Penerimaan Perpajakan dalam TA 2010.

a. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2011 adalah sebesar Rp431.121.712.728.316 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas.

Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2011 dan TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	25.941.792.126.888	22.833.341.093.125
PPh Gas Alam	47.153.704.628.050	36.039.390.019.682
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah *)	3.338.636.314.000	-
Jumlah PPh Migas	**76.434.133.068.938**	**58.872.731.112.807**
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	66.751.563.274.222	55.331.533.581.255
PPh Pasal 22	4.946.488.944.246	4.737.703.749.312
PPh Pasal 22 Impor	28.291.747.589.939	23.601.167.040.565
PPh Pasal 23	18.702.757.359.018	16.277.579.888.579
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3.287.028.613.473	2.934.981.111.137
PPh Pasal 25/29 Badan	154.609.563.560.736	131.480.615.289.276
PPh Pasal 26	27.239.272.558.180	20.958.300.304.414
PPh Final dan Fiskal LN	50.818.584.952.948	39.926.176.715.682
PPh Non Migas Lainnya	40.572.806.616	31.535.882.073
Jumlah PPh Non Migas	**354.687.579.659.378**	**295.279.593.562.293**
Jumlah Pajak Penghasilan	**431.121.712.728.316**	**354.152.324.675.100**

*) *Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) pada TA 2010 tidak disajikan pada Laporan Arus Kas, namun hanya disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. PPh DTP pada TA 2011 dicatat dan disajikan pada Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.*

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2011 lebih besar Rp76.969.388.053.216 atau 21,73 persen dari penerimaan TA 2010.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN &PPnBM) untuk TA 2011 adalah sebesar Rp277.800.076.679.384. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	165.218.964.383.262	131.879.564.017.016
PPN dan PPnBM Impor	112.374.211.359.301	87.495.388.460.763
PPN dan PPnBM lainnya	206.900.936.821	163.265.719.576
Jumlah PPN dan PPnBM	**277.800.076.679.384**	**219.538.218.197.355**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2011 lebih besar Rp58.261.858.482.029 atau 26,54 persen dari TA 2010.

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2011 adalah sebesar Rp29.893.164.324.396. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
PBB Pedesaan	1.177.346.608.822	1.231.724.607.759
PBB Perkotaan	6.603.174.032.018	6.379.133.976.045
PBB Perkebunan	985.954.945.312	906.563.035.437
PBB Kehutanan	251.302.697.483	231.794.826.611
PBB Pertambangan	397.619.412.898	499.103.659.423
PBB Migas	20.477.766.627.863	19.332.269.873.465
Jumlah PBB (Neto)	**29.893.164.324.396**	**28.580.589.978.740**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2011 lebih besar Rp1.312.574.345.656 atau 4,59 persen dari TA 2010.

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2011 adalah sebesar minus Rp730.151.679, sedangkan Penerimaan TA 2010 sebesar Rp8.026.429.073.342. Realisasi Penerimaan BPHTB TA 2011 merupakan pengembalian BPHTB tahun anggaran yang lalu. Penerimaan BPHTB tidak dicatat lagi dikarenakan mulai tahun 2011 Penerimaan BPHTB diserahkan ke pemerintah daerah.

e. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2011 adalah sebesar Rp77.010.010.613.795, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Cukai Hasil Tembakau	73.251.428.868.906	63.295.281.573.097
Cukai Ethyl Alkohol	152.953.431.380	145.871.055.229
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.583.211.248.830	2.697.254.271.105
Denda Administrasi Cukai	11.381.400.196	12.995.359.858
Cukai Lainnya	11.035.664.483	14.520.253.278
Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)	**77.010.010.613.795**	**66.165.922.512.567**

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2011 lebih besar Rp10.844.088.101.228 atau 16,39 persen dari Penerimaan Cukai TA 2010.

f. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2011 adalah sebesar Rp3.928.192.148.211. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penjualan Benda dan Bea Materai	3.609.605.363.070	3.340.690.298.876
Pendapatan PPn Batubara	61.093.244	5.049.944
Pajak Tidak Langsung	1.826.035.698	907.491.220
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	84.726.712.822	(18.094.935.596)
- Bunga Penagihan PPN	224.199.680.642	47.163.985.911
- Bunga Penagihan PPnBM	204.067.285	443.759.337
- Bunga Penagihan PTLL	7.569.195.450	93.757.488
Jumlah Pajak Lainnya	**3.928.192.148.211**	**3.371.209.407.180**

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2011 lebih besar Rp556.982.741.031 atau 16,52 persen dari TA 2010.

g. Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2011 adalah sebesar Rp54.121.466.056.958, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp25.265.863.309.375 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp28.855.602.747.583. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Bea Masuk		
Bea Masuk	23.783.424.990.710	18.599.690.058.915
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	3.173.020.085	2.061.591.716
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	391.846.604.781	540.590.656.021
Bea Masuk dalam rangka KITE	946.668.042.226	566.917.871.634
Denda atas sanksi administrasi	15.000.000	10.000.000
Bea Masuk – Ditanggung Pemerintah *)	73.310.676.000	-
Pabean Lainnya	67.424.975.573	49.923.238.758
Jumlah Bea Masuk	**25.265.863.309.375**	**19.759.193.417.044**
Bea Keluar	**28.855.602.747.583**	**8.897.707.295.916**
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	**54.121.466.056.958**	**28.656.900.712.960**

*) *Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) pada TA 2010 tidak disajikan pada Laporan Arus Kas, namun hanya disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. BM DTP pada TA 2011 dicatat dan disajikan pada Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.*

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 lebih besar Rp25.464.565.343.998 atau 88,86 persen dari TA 2010.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP sebesar Rp331,34 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2011 adalah sebesar Rp331.337.448.572.183, yang berarti lebih besar Rp62.659.469.001.827 atau 23,32 persen dari TA 2010 sebesar Rp268.677.979.570.356.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan dari Sumber Daya Alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2011 adalah sebesar Rp213.823.349.552.827. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	141.303.493.452.283	111.814.923.202.135
Pendapatan Gas Alam	52.187.085.923.633	40.918.314.502.416
Pendapatan Pertambangan Umum	16.369.789.735.678	12.646.750.881.580
Pendapatan Kehutanan	3.216.476.006.406	3.009.672.120.638
Pendapatan Perikanan	183.802.161.080	91.995.180.732
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	562.702.273.747	343.786.432.785
Jumlah Penerimaan SDA	**213.823.349.552.827**	**168.825.442.320.286**

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2011 lebih besar Rp44.997.907.232.541 atau 26,65 persen dari TA 2010.

b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2011 adalah sebesar Rp28.183.973.126.600, yang berarti lebih kecil Rp1.912.959.567.665 atau 6,36 persen dari TA 2010 sebesar Rp30.096.932.694.265. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

c. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2011 adalah sebesar Rp69.226.130.305.985. Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	9.525.540.319.958	6.304.681.982.846
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	11.803.490.967.212	9.782.852.016.185
Pendapatan Sewa	186.810.775.728	147.500.857.682
Pendapatan Jasa I	16.222.029.858.308	16.735.427.684.773
Pendapatan Jasa II	1.371.622.057.319	1.667.532.340.637
Pendapatan Jasa Luar Negeri	454.063.043.127	688.636.910.955
Pendapatan Jasa Perbankan	698.213.800	596.750.769
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	4.935.359.321.429	3.468.219.982.039
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.295.511.200.017	2.551.632.939.516
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol		144.628.206.659
Pendapatan Jasa Kepolisian II	95.921.998.922	43.535.283.500
Pendapatan Jasa Lainnya	259.310.892.000	116.335.390.253
Pendapatan Bunga	2.169.804.446.254	3.858.459.830.064
Pendapatan Gain On Bond Redemption	760.000.000	48.397.000.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.722.674.065.500	3.445.549.357.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	240.761.503.805	166.607.987.382
Pendapatan Pendidikan	2.965.915.235.801	2.983.449.553.759
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	92.848.578.390	213.767.299.728
Pendapatan Iuran dan Denda	1.319.106.624.583	704.797.429.654
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	7.986.615.365.380	5.763.384.770.255
Pendapatan Pelunasan Piutang	26.715.895.818	47.908.471.893
Pendapatan dari Penutupan Rekening	628.093.309.285	11.769.234.305
Pendapatan Selisih Kurs	2.713.540.544.637	64.500.000.000
Pendapatan Lain-lain	208.936.088.712	204.591.240.681
Jumlah PNBP Lainnya	**69.226.130.305.985**	**59.164.762.520.535**

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2011 lebih besar Rp10.061.367.785.450 atau 17,01 persen dari TA 2010.

d. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2011 adalah sebesar Rp20.103.995.586.771, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	17.821.832.190.696	9.906.996.304.665
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	167.462.819.227	34.976.353.539
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	647.563.491.201	172.630.678.219
Pendapatan BLU Lainnya	1.467.137.085.647	476.238.698.847
Jumlah Penerimaan BLU	**20.103.995.586.771**	**10.590.842.035.270**

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2011 lebih besar Rp9.513.153.551.501 atau 89,82 persen dari TA 2010.

Penerimaan Hibah sebesar Rp4,26 triliun

D.2.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp4.258.217.536.874. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri – Perorangan	34.102.500	-
Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha		25.000.000
Hibah Dalam Negeri Lainnya		254.107.349.174
Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha	166.310.915.813	98.867.782.983
Hibah Dalam negeri Langsung Bentuk Uang - Pemda	287.158.580.076	70.238.704.605
Hibah Dalam Negeri Langsung - Pemda	10.000.000.000	-
Jumlah Hibah Dalam Negeri	**463.503.598.389**	**423.238.836.762**
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Perorangan		235.708.020
Hibah Luar Negeri – Bilateral	323.935.838.288	253.114.464.189
Hibah Luar Negeri – Multilateral	2.389.885.678.488	1.804.053.783.311
Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	7.198.973.228	542.343.768.481
Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan		-
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	112.795.828.856	-
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	918.255.266.945	-
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	42.642.352.680	-
Jumlah Hibah Luar Negeri	**3.794.713.938.485**	**2.599.747.724.001**
Jumlah Hibah	**4.258.217.536.874**	**3.022.986.560.763**

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2011 lebih besar Rp1.235.230.976.111 atau 40,86 persen dari TA 2010.

Penerimaan Hibah tersebut tidak termasuk Pendapatan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp552.196.724.430 serta Pendapatan Hibah dalam bentuk Surat Berharga sebesar Rp433.525.600.000. Pendapatan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa dan Surat Berharga tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja Pegawai sebesar Rp175,75 triliun

D.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2011 adalah sebesar Rp175.745.947.140.204, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	49.438.707.054.822	42.465.549.827.688
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	40.253.949.624.738	36.935.432.979.430
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	819.040.106.833	727.783.954.393
Belanja Gaji Dokter PTT	771.007.436.015	690.958.920.462
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	248.984.377.220	165.688.295.443
Belanja Honorarium	1.368.820.236.166	1.444.890.460.937
Belanja Lembur	501.557.316.855	470.289.735.805
Belanja Vakasi	217.977.946.087	248.539.701.180
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	20.363.825.257.336	12.171.280.231.935

Transito		
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	59.470.665.084.274	50.603.760.868.126
Belanja Asuransi Kesehatan	2.141.251.233.920	1.816.913.001.200
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	150.576.864.996	129.299.057.338
Belanja Cadangan Perubahan *Sharing*	(374.730.220)	-
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI	(40.668.838)	202.215.097.395
Total Belanja Pegawai	**175.745.947.140.204**	**148.072.602.131.332**

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2011 lebih besar Rp27.673.345.008.872 atau18,69 persen dari TA 2010.

Belanja Barang sebesar Rp124,16 triliun

D.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2011 adalah sebesar Rp124.159.163.392.116 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	**TA 2011 (*Audited*)**	**TA 2010 (*Audited*)**
Belanja Barang	66.807.696.651.991	51.545.119.265.391
Belanja Jasa	15.888.779.363.493	12.122.676.491.698
Belanja Pemeliharaan	9.284.459.416.087	7.809.363.490.993
Belanja Perjalanan	19.635.213.116.970	18.303.524.718.632
Belanja Barang BLU	12.543.014.843.575	7.807.229.767.375
Jumlah Belanja Barang	**124.159.163.392.116**	**97.587.913.734.089**

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2011 ini lebih besar Rp26.571.249.658.027 atau 27,23 persen dari TA 2010.

Belanja Barang tersebut tidak termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp469.912.832.050. Belanja Barang dari hibah dalam bentuk Barang/Jasa tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp93,26 triliun

D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2011 sebesar Rp93.260.261.464.346 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(outstanding principal)*, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp4.879.218.489.683 atau 5,52 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2010 sebesar Rp88.381.042.974.663.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp79.615.326.431.749 dan Rp13,644,935,032,597 dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp79.615.326.431.749 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara DN	57.210.627.839.839	54.560.273.982.091
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	4.768.589.586.200	2.750.995.750.000
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara DN	3.236.157.597.300	2.073.333.477.100
Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption*	310.612.680.000	737.473.500.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN DN	51.466.619.000	36.998.773.200
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	11.900.654.889.691	11.633.182.927.198
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Valas	514.676.089.450	513.199.205.250
Belanja Pembayaran *Discount* Obligasi Negara Valas	373.905.900.000	177.338.000.000
Belanja Pembayaran Denda	1.247.399.871.387	1.319.296.422.615
Belanja Terkait Pendapatan Hibah	1.235.358.882	-
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	**79.615.326.431.749**	**73.802.092.037.454**

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp13.644.935.032.597 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Bunga Pinjaman Program	3.540.016.135.917	3.551.962.345.689
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	10.104.918.896.680	11.026.988.591.520
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	**13.644.935.032.597**	**14.578.950.937.209**

D.2.7. Subsidi

Subsidi sebesar Rp295,36 triliun

Belanja Subsidi pada TA 2011 sebesar Rp295.358.422.916.324 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	165.161.338.980.975	82.351.322.825.873
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	123.428.269.621.815	93.343.805.878.147
Subsidi Non BBM – Pajak *)	3.411.946.990.000	-
Subsidi Non BBM - Lainnya	-	-
Subtotal	126.840.216.611.815	93.343.805.878.147
Subsidi dalam Rangka PSO	1.833.928.069.279	1.373.894.220.390
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	293.835.483.662.069	177.069.022.924.410
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	1.522.939.254.255	822.952.538.294
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	1.522.939.254.255	822.952.538.294
Jumlah Belanja Subsidi	**295.358.422.916.324**	**177.891.975.462.704**

**) Subsidi Pajak (PPh Ditanggung Pemerintah dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) tidak disajikan pada Laporan Arus Kas TA 2010, namun hanya disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Subsidi Pajak pada TA 2011 dicatat dan disajikan pada Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.*

Dengan demikian, Subsidi TA 2011 ini lebih besar Rp117.466.447.453.620 atau 66,03 persen dari Subsidi TA 2010.

D.2.8. Belanja Hibah

Belanja Hibah sebesar Rp300,11 miliar

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2011terdapat belanja hibah negara kepada pemerintah daerah sebesar Rp300.108.798.355. Belanja hibah TA 2011 lebih besar Rp230.100.020.780 atau 328,67 persen dari TA 2010 sebesar Rp70.008.777.575.

D.2. 9. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial sebesar Rp71,08 triliun

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp71.076.290.233.168 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Kompensasi Kenaikan Harga BBM	6.244.225.314.365	4.608.087.845.000
Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru	32.069.345.814.817	37.604.432.063.192
Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	3.830.500.000	965.889.642.762
Beasiswa	4.684.535.971.423	4.775.195.414.218
Lembaga Peribadatan	146.686.993.700	79.907.018.360
Lembaga Sosial Lainnya	27.927.665.638.863	20.561.954.653.740
Jumlah Bantuan Sosial (Neto)	**71.076.290.233.168**	**68.595.466.637.272**

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2011 ini lebih besar Rp2.480.823.595.896 atau 3,62 persen dari TA 2010.

D.2.10. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain sebesar Rp5,46 triliun

Belanja Lain-lain pada TA 2011 adalah sebesar Rp5.464.234.053.592, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Rekonstruksi Aceh	-	1.052.074.256
Kerjasama Teknis Internasional	10.000.000.000	-
Pemilu Tahunan	-	(2.040.000)
Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	9.778.482.000	-
Cadangan Dana Reboisasi	-	(3.325)
Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	(10.650.875)	942.264.497.985
Belanja Dana Penunjang (PHLN)	-	1.199.027.080
Belanja Non Modal-Otorita Batam	557.785.893	845.925.755
Belanja karena rugi selisih kurs	360.991.026.539	909.200.000.000
Jasa Surveyor	-	232.979.742.237
Jasa Perbendaharaan	199.847.380.770	102.072.122.675
Belanja untuk LPP TVRI	685.547.340.402	571.869.960.625
Belanja untuk LPP RRI	677.107.093.980	558.918.956.130
Dana Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah	406.145.000.000	358.183.000.000
Belanja Lainnya	3.114.270.595.883	17.988.301.645.511
Jumlah Belanja Lain-lain	**5.464.234.053.592**	**21.666.884.908.929**

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2011 mengalami penurunan sebesar Rp16.202.650.855.337 atau 74,78 persen dari TA 2010. Penurunan realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2011 disebabkan adanya penataan akun-akun pada Belanja Lain-lain sesuai dengan *nature of transaction*-nya, bahwa kegiatan yang tidak memenuhi karakteristik dibiayai dari Belanja Lain-lain harus dianggarkan pada belanja K/L yang bersangkutan.

D.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak

DBH Pajak sebesar Rp41,53 triliun

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2011 adalah sebesar Rp41.525.561.096.164, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	13.237.326.489.261	10.931.465.581.702
Bagi Hasil PBB	28.281.486.730.011	27.108.379.095.361
Bagi Hasil BPHTB	6.747.876.892	7.775.863.958.765
Jumlah Bagi Hasil Pajak	**41.525.561.096.164**	**45.815.708.635.828**

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2011 lebih kecil Rp4.290.147.539.664 atau 9,36 persen dari TA 2010.

D.2.12. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

DBH Cukai Tembakau sebesar Rp1,41 triliun

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.408.448.764.184, sedangkan pada TA 2010 sebesar Rp1.202.111.025.283. Dengan demikian DBH Cukai Tembakau TA 2011 lebih besar Rp206.337.738.901 atau 17,17 persen dibandingkan DBH Cukai Tembakau TA 2010.

D.2.13. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH SDA sebesar Rp53,97 triliun

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2011 adalah sebesar Rp53.974.986.297.954, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Bagi Hasil Minyak Bumi	20.634.080.735.284	20.567.117.652.257
Bagi Hasil Gas Alam	16.672.249.758.993	14.629.244.504.747
Bagi Hasil Pertambangan Umum	14.498.126.522.475	7.790.420.800.000
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	519.987.115.194	305.855.434.155
Bagi Hasil Kehutanan	1.512.465.063.891	1.753.104.639.304
Bagi Hasil Perikanan	138.077.102.117	120.000.000.000
Jumlah Bagi Hasil SDA	**53.974.986.297.954**	**45.165.743.030.463**

Dengan demikian, DBH SDA TA 2011 lebih besar Rp8.809.243.267.491 atau 19,50 persen dari TA 2010.

D.2.14. Dana Alokasi Umum

DAU sebesar Rp225,53 triliun

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2011 sebesar Rp225.533.712.048.000, jumlah tersebut lebih besar Rp21.962.735.239.500 atau 10,79 persen dari TA 2010 sebesar Rp203.570.976.808.500.

DAK sebesar Rp24,80 triliun

D.2.15. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2011 sebesar Rp24.802.229.752.980, jumlah tersebut lebih besar Rp3.845.918.584.980 atau 18,35 persen dari TA 2010 sebesar Rp20.956.311.168.000.

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10,42 triliun

D.2.16. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2011 sebesar Rp10.421.312.993.000, jumlah tersebut lebih besar Rp1.321.699.313.000 atau 14,53 persen dari TA 2010 sebesar Rp9.099.613.680.000.

Dana Penyesuaian sebesar Rp53,66 triliun

D.2.17. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2011 adalah sebesar Rp53.657.183.069.474, lebih besar Rp34.738.572.760.663 atau 183,62 persen dari TA 2010 sebesar Rp18.918.610.308.811.

Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar Rp117,62 triliun

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2011 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp117.624.715.204.186, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Arus Masuk	134.372.526.547	263.876.638.486
Dikurangi Arus Keluar	117.759.087.730.733	80.307.176.396.873
Arus Kas Bersih	**(117.624.715.204.186)**	**(80.043.299.758.387)**

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2011 lebih besar Rp37.581.415.445.799 atau 46,95 persen dari TA 2010.

Penjualan Aset sebesar Rp134,37 miliar

D.2.18. Penjualan Aset

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah, gedung, bangunan dan tanah, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2011 adalah sebesar Rp134.372.526.547, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	2.725.200.373	92.412.745.784
Penjualan Kendaraan Bermotor	1.807.702.673	2.169.006.285
Penjualan Sewa Beli	40.584.546.231	43.296.161.610
Penjualan Aset Tetap Lainnya	898.345.500	143.252.500
Penjualan Aset Lainnya	88.356.731.770	125.855.472.307
Jumlah Penjualan Aset	**134.372.526.547**	**263.876.638.486**

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2011 lebih kecil Rp129.504.111.939 atau 49,08 persen dari TA 2010.

D.2.19. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp117,76 triliun

Belanja Modal pada TA 2011 adalah sebesar Rp117.759.087.730.733 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	3.174.518.573.375	1.801.599.831.427
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.589.152.098.168	28.288.339.011.692
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.296.677.877.838	16.534.548.831.437
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.570.778.106.938	30.184.518.770.901
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.342.236.811.366	2.321.846.720.441
Belanja Modal BLU	1.785.724.263.048	1.176.323.230.975
Jumlah Belanja Modal	**117.759.087.730.733**	**80.307.176.396.873**

Belanja Modal ini padaTA 2011 lebih besar Rp37.451.911.333.860 atau 46,64 persen dari TA 2010.

Belanja Modal tersebut tidak termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp82.283.892.380. Belanja Modal dari hibah dalam bentuk Barang/Jasa tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp32.781.696.488.577 dan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp117.624.715.204.186 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp84.843.018.715.609 Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Kenaikan kas dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp131,39 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2011 adalah sebesar Rp131.392.395.224.420, yang berasal dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Arus Masuk	292.028.544.623.338	248.301.707.025.210
Dikurangi Arus Keluar	(160.636.149.398.918)	(156.749.695.624.596)
Arus Kas Bersih	**131.392.395.224.420**	**91.552.011.400.614**

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2011 lebih besar Rp39.840.383.823.806 atau 43,52 persen dari TA 2010.

D.2.20. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan DN sebesar Rp249,67 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2011 adalah sebesar Rp249.672.520.403.961, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Rekening Pemerintah	40.319.043.049.000	22.189.312.607.078
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	1.597.981.517.178	3.232.148.153.135
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	207.136.113.196.150	167.634.217.942.000
Pinjaman Dalam Negeri	619.382.641.633	393.606.359.471
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	**249.672.520.403.961**	**193.449.285.061.684**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2011 lebih besar Rp56.223.235.342.277 atau 29,06 persen dibandingkan dengan TA 2010.

a. Rekening Pemerintah

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah pada TA 2011 sebesar Rp40.319.043.049.000 merupakan penerimaan pembiayaan karena penggunaan SAL, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penerimaan dari Rekening SAL	40.319.043.049.000	17.347.946.818.000
Penerimaan dari Rekening Dana Investasi		4.841.365.789.078
Total Penerimaan dari Rekening Pemerintah	**40.319.043.049.000**	**22.189.312.607.078**

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah TA 2011 lebih besar Rp18.129.730.441.922 atau 81,71 persen dari TA 2010.

b. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.597.981.517.178, berarti lebih kecil Rp1.634.166.635.957 atau 50,56 persen dari penerimaan pada TA 2010 sebesar Rp3.232.148.153.135. Penerimaan ini berasal dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi dan penjualan/penyelesaian aset eks BPPN dan aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Rincian Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Privatisasi	425.044.145.867	2.098.694.387.048
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	330.323.053	133.448.541.746
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian aset eks BPPN	801.228.042.527	747.760.020.064
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	371.379.005.731	252.245.204.277
Total Penerimaan	**1.597.981.517.178**	**3.232.148.153.135**

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valas. Penerimaan pembiayaan SBN pada

TA 2011 sebesar Rp207.136.113.196.150, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penerbitan/Penjualan SPN	40.000.000.000.000	29.795.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	110.514.000.000.000	84.020.000.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.817.637.491.000	1.701.033.244.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - DN	24.327.438.850.000	27.076.856.698.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - Valas	30.477.036.855.150	25.041.328.000.000
Total Penerimaan SBN	**207.136.113.196.150**	**167.634.217.942.000**

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2011 lebih besar Rp39.501.895.254.150 atau 23,56 persen dibanding TA 2010.

d. Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri merupakan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dari BUMN dan dari Pemerintah Daerah. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri pada TA 2011 sebesar Rp619.382.641.633, lebih besar Rp225.776.282.162 atau 57,36 persen dari TA 2010 sebesar Rp393.606.359.471.

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan LN sebesar Rp33,75 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2011 sebesar Rp33.747.178.723.921 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pinjaman Program	15.266.144.513.219	28.974.644.489.116
Pinjaman Proyek	18.481.034.210.702	25.820.145.711.090
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**33.747.178.723.921**	**54.794.790.200.206**

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2011 lebih kecil Rp21.047.611.476.285 atau 38,41 persen dari TA 2010.

a. Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2011 adalah sebesar Rp15.266.144.513.219, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Program Bilateral	873.396.325.700	7.296.002.579.700
Program Mutilateral	14.392.748.187.519	21.678.641.909.416
Jumlah Pinjaman Program	**15.266.144.513.219**	**28.974.644.489.116**

Dengan demikian, Pinjaman Program TA 2011 lebih kecil Rp13.708.499.975.897 atau 47,31 persen dari TA 2010.

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2011 adalah sebesar Rp18.481.034.210.702, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	9.046.106.089.582	13.648.925.389.888
Pinjaman Proyek dari Multilateral	5.246.144.127.735	7.995.635.711.316
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.188.783.993.385	3.972.357.132.656
Pinjaman Proyek Lainnya	-	203.227.477.230
Jumlah Pinjaman Proyek	**18.481.034.210.702**	**25.820.145.711.090**

Dengan demikian. Pinjaman Proyek TA 2011 lebih kecil Rp7.339.111.500.388 atau 28,42 persen dibandingkan TA 2010.

D.2.22. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebesar Rp8,61 triliun

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2011 sebesar Rp8.608.845.495.456 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	1.334.486.195.806	57.631.271.296
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	7.274.359.299.650	492.024
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	**8.608.845.495.456**	**57.631.763.320**

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2011 lebih besar Rp8.551.213.732.136 atau 14.837,68 persen dari TA 2010.

D.2.23. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp89,89 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2011 adalah sebesar Rp89.889.447.737.085 yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan pendidikan nasional, pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, dengan rincian sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Pengembangan Pendidikan Nasional	2.617.700.000.000	1.000.000.000.000
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	38.045.000.000.000	24.700.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	49.174.159.351.085	49.025.829.689.752
Pelunasan SBSN	52.588.386.000	2.805.790.002.000
Jumlah Pembiayaan Dalam Negeri	**89.889.447.737.085**	**77.531.619.691.752**

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2011 lebih besar Rp12.357.828.045.333 atau 15,94 persen dibandingkan TA 2010.

D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp47,32 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2011 sebesar Rp47.322.502.478.271 merupakan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Pinjaman Program	9.429.608.883.864	8.960.858.742.350
Pinjaman Proyek	37.892.893.594.407	41.671.672.839.486
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**47.322.502.478.271**	**50.632.531.581.836**

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2011 lebih kecil Rp3.310.029.103.565 atau 6,54 persen dibandingkan dengan TA 2010.

D.2.25. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/Investasi Pemerintah sebesar Rp19,20 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta investasi dalam bentuk dana bergulir. PMN/Investasi Pemerintah dalam TA 2011 adalah sebesar Rp19.200.357.712.264, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	8.240.874.519.422	4.038.500.000.000
Penyertaan Modal Negara untuk Badan Internasional	611.283.192.842	-
Penyertaan Modal Negara Lainnya	100.000.000	2.000.100.000.000
Investasi Pemerintah untuk BLU PIP	2.676.500.000.000	8.427.500.000.000
Dana Bergulir	7.671.600.000.000	5.333.049.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	**19.200.357.712.264**	**19.799.149.000.000**

Dengan demikian, PMN/Investasi Pemerintah TA 2011 lebih kecil Rp598.791.287.736 atau 3,02 persen dari TA 2010.

D.2.26. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan Pinjaman sebesar Rp4,22 triliun

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2011adalah sebesar Rp4.223.841.471.298. Jumlah tersebut lebih kecil Rp4.562.553.879.710 atau 51,93 persen dibandingkan dengan TA 2010 sebesar Rp8.786.395.351.008.

Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp131.392.395.224.420 dan defisit anggaran sebesar Rp84.843.018.715.609, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2011 sebesar Rp46.549.376.508.811.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

Kenaikan Kas dari Aktivitas Nonanggaran sebesar Rp1,31 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2011, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp1.313.542.615.553, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	1.081.050.588.567	619.814.108.170
PFK *Prefinancing* (Neto)	-	(34.367.584.001)
Kiriman Uang (Neto)	12.817.535.129	2.110.479.145.563
Transito (Neto)	219.674.491.857	231.461.078.546
Arus Kas Bersih	**1.313.542.615.553**	**2.927.386.748.278**

Dengan demikian, Arus Keluar Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2011 lebih kecil Rp1.613.844.132.725 atau 55,13 persen dari TA 2010.

D.2.27. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

PFK (Neto) sebesar Rp1,08 triliun

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2011 sebesar Rp1.081.050.588.567 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya, serta penerimaan dan pengeluaran karena kesalahan rekening pihak ketiga. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
PFK terkait Pengakuan Utang PFK		
Penerimaan		
Penerimaan PFK 10% Gaji	16.206.213.609.950	14.364.213.100.694
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	4.188.354.646	2.603.737.089
Penerimaan PFK Beras BULOG	221.858.477.499	194.517.894.374
Penerimaan PFK 2% Pemda	2.188.134.244.756	1.957.723.651.041
Penerimaan PFK Penutupan Rekening	0	538
Penerimaan PFK Lain-lain	382.182.686.930	380.422.971.142
Jumlah Penerimaan PFK	**19.002.577.373.781**	**16.899.481.354.878**
Pengeluaran		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	(16.122.009.531.270)	(13.748.624.194.032)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	(3.131.896.112)	(6.197.747.721)
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	(202.664.878.214)	(196.652.974.400)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda	(2.112.551.113.844)	(1.914.952.896.918)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(390.529.377.554)	(363.707.083.683)
Jumlah Pengeluaran PFK	**(18.830.886.796.994)**	**(16.230.134.896.754)**
Jumlah PFK terkait Pengakuan Utang PFK (Neto)	**171.690.576.787**	**669.346.458.124**
PFK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur		
Penerimaan Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	5.156.956.594.762	303.806.199.164
Pengeluaran Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	(4.247.596.582.982)	(353.338.549.118)
Jumlah PFK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur (Neto)	**909.360.011.780**	**(49.532.349.954)**
PFK (Neto)	**1.081.050.588.567**	**619.814.108.170**

Dengan demikian, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2011 lebih besar Rp461.236.480.397 atau 74,42 persen dari TA 2010.

Jumlah PFK terkait Pengakuan Utang PFK (Neto) sebesar positif Rp171.690.576.787 menjadi perhitungan penambahan saldo Utang PFK pada Neraca. Sedangkan jumlah PFK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur (Neto) sebesar positif Rp909.360.011.780 menjadi perhitungan penambahan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada Neraca.

D.2.28. PFK *Prefinancing* dan PFK Lainnya

PFK Prefinancing sebesar Rp0

PFK Prefinancing dan PFK Lainnya merupakan transaksi yang dilakukan BUN berupa *prefinancing* (pembiayaan pendahuluan), penerimaan/pengembalian dana talangan, dan pembayaran rekening khusus kosong (reksus kosong). Dalam TA 2011 tidak terdapat transaksi PFK Prefinancing dan PFK Lainnya, sedangkan pada TA 2010 sebesar minus Rp34.367.584.001, yang berasal dari Pembayaran dari Rekening BUN ke Reksus Kosong.

D.2.29. Kiriman Uang

Kiriman Uang sebesar Rp12,82 miliar

Kiriman Uang (KU) Neto TA 2011 sebesar Rp12.817.535.129 antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan sebagai Kuasa BUN dan sebaliknya, pemindahbukuan intern rekening BUN, dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KU TA 2011 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan adanya transaksi kiriman uang antar rekening pada akhir tahun, belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, dan ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian KU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penerimaan Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Penerimaan Kiriman Uang	1.614.190.734.757.419	1.325.889.913.002.688
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	2.610.402.584.608.159	1.836.812.447.294.623
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	7.707.811.003.417	422.936.887.167
Penerimaan Pemindahbukuan	1.220.031.858.891.484	953.561.129.420.368
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	3.194.663.329.067.827	2.430.648.501.857.462
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	78.142.922.443	300.188.447.031
Jumlah Penerimaan KU	**8.647.074.461.250.749**	**6.547.635.116.909.339**
Pengeluaran Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Pengeluaran Kiriman Uang	(1.614.187.503.062.304)	(1.325.909.445.857.022)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	(2.610.420.628.968.605)	(1.836.821.363.734.337)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	(7.674.627.347.317)	(189.533.624.804)
Pengeluaran Pemindahbukuan	(1.220.037.708.442.152)	(951.654.706.149.508)
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	(3.194.663.329.067.817)	(2.430.648.501.857.463)
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(77.846.827.425)	(301.086.540.642)
Jumlah Pengeluaran KU	**(8.647.061.643.715.620)**	**(6.545.524.637.763.776)**
Jumlah KU (Neto)	**12.817.535.129**	**2.110.479.145.563**

Dengan demikian, KU masuk neto dalam TA 2011 lebih kecil Rp2.097.661.610.434 atau 99,39 persen dari TA 2010.

D.2.30. Transito

Transito Rp219,67 miliar

Transito (Neto) TA 2011 sebesar Rp219.674.491.857 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (*Audited*)	TA 2010 (*Audited*)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah	16.851.328.468.000	14.615.755.922.810
Penerimaan Pengembalian UP Dana PHLN	191.628.475.989	180.924.620.174
Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PNBP (Swadana)	1.088.585.569.046	800.285.940.550
Penerimaan Pengembalian UP TAYL	530.588.235.864	921.474.650.732
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak	490.558.929	75.345.533
Jumlah Penerimaan Transito	**18.662.621.307.827**	**16.518.516.479.799**
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran UP Dana Rupiah	(17.109.390.321.510)	(15.292.755.972.415)
Pengeluaran UP Dana PHLN	(190.367.646.485)	(183.710.889.707)
Pengeluaran UP Pengguna PNBP (Swadana)	(1.164.453.438.445)	(823.849.322.851)
Pengeluaran Pengemb Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP TAYL	21.774.590.470	13.660.783.720
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak	(510.000.000)	(400.000.000)
Jumlah Pengeluaran Transito	**(18.442.946.815.970)**	**(16.287.055.401.253)**
Jumlah Transito (Neto)	**219.674.491.857**	**231.461.078.546**

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2011 lebih kecil Rp11.786.586.689 atau 5,09 persen dari TA 2010.

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR

Daftar 1. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2010
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TA 2011			TA 2010	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		ANGGARAN	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 - 3
4	**PENDAPATAN NEGARA HIBAH**	**1.169.914.639.272.000**	**1.210.599.653.359.410**	**103,48%**	**995.271.511.391.343**	**215.328.141.968.071**	**21,64%**
41	**Penerimaan Perpajakan**	**878.685.216.762.000**	**873.873.892.399.381**	**99,45%**	**723.306.668.621.739**	**150.567.223.777.642**	**20,82%**
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	831.745.348.636.000	819.752.426.342.423	98,56%	694.392.134.931.291	125.360.291.411.132	18,05%
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	431.977.019.922.000	431.121.712.728.316	99,80%	357.045.537.152.188	73.630.751.739.216	20,62%
41111	Pendapatan Pajak PPh Migas	65.230.670.000.000	73.095.496.754.938	112,06%	58.872.731.112.807	14.222.765.642.131	24,16%
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	24.122.940.000.000	25.941.792.126.888	107,54%	22.833.341.093.125	3.108.451.033.763	13,61%
411112	Pendapatan PPh Gas Alam	41.107.730.000.000	47.153.704.628.050	114,71%	36.039.390.019.682	11.114.314.608.368	30,84%
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	-	-		-	-	
41112	Pendapatan PPh Non-Migas	366.746.349.922.000	354.683.553.082.514	96,71%	295.268.135.134.989	59.415.417.947.525	20,12%
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	62.079.503.344.000	66.751.563.274.222	107,53%	55.331.533.581.255	11.420.029.692.967	20,64%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	4.884.138.687.000	4.946.488.944.246	101,28%	4.737.703.749.312	208.785.194.934	4,41%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	31.158.099.424.000	28.291.747.589.939	90,80%	23.601.167.040.565	4.690.580.549.374	19,87%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	19.072.291.982.000	18.702.757.359.018	98,06%	16.277.579.888.579	2.425.177.470.439	14,90%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3.575.574.528.000	3.287.028.613.473	91,93%	2.934.981.111.137	352.047.502.336	11,99%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	165.588.406.540.000	154.609.563.560.736	93,37%	131.480.615.289.276	23.128.948.271.460	17,59%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	32.159.917.267.000	27.239.272.558.180	84,70%	20.958.300.304.414	6.280.972.253.766	29,97%
411128	Pendapatan PPh Final	48.199.482.643.000	50.814.558.376.084	105,43%	39.914.718.288.378	10.899.840.087.706	27,31%
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	28.935.487.000	40.572.806.616	140,22%	31.535.882.073	9.036.924.543	28,66%
41113	Pendapatan PPh Fiskal	-	4.026.576.864	-	11.458.427.304	(7.431.850.440)	-64,86%
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri		4.026.576.864	-	11.458.427.304	(7.431.850.440)	-64,86%
41114	Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah	-	3.338.636.314.000	-	2.893.212.477.088	445.423.836.912	-340,71%
411141	Pendapatan PPh psl 21 ditanggung Pemerintah		-	-	13.443.203.890	(13.443.203.890)	-100,00%
411142	Pendapatan PPh psl 22 ditanggung Pemerintah		-	-	20.887.691	(20.887.691)	-100,00%
411144	Pendapatan PPh psl 23 ditanggung Pemerintah		-	-	13.610.253.027	(13.610.253.027)	-100,00%
411146	Pendapatan PPh psl 25/29 ditanggung Pemerintah		898.462.528.000	-	646.917.431.460	251.545.096.540	38,88%
411147	Pendapatan PPh psl 26 ditanggung Pemerintah		2.440.173.786.000	-	2.026.558.132.445	413.615.653.555	20,41%
411148	Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah		-	-	192.662.568.575	(192.662.568.575)	-100,00%
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	298.441.393.727.000	277.800.076.679.384	93,08%	230.604.864.967.823	47.195.211.711.561	20,47%
41121	Pendapatan PPN	-	264.377.821.470.207	-	207.134.899.640.327	57.242.921.829.880	27,64%
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	-	157.178.437.931.519	-	124.270.086.028.947	32.908.351.902.572	26,48%
411212	Pendapatan PPN Impor	-	107.000.114.903.086	-	82.705.863.862.547	24.294.251.040.539	29,37%
411219	Pendapatan PPN Lainnya	-	199.268.635.602	-	158.949.748.833	40.318.886.769	25,37%
41122	Pendapatan PPnBM	-	13.422.255.209.177	-	12.403.318.557.028	1.018.936.652.149	8,22%
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	-	8.040.526.451.743	-	7.609.477.988.069	431.048.463.674	5,66%
411222	Pendapatan PPnBM Impor	-	5.374.096.456.215	-	4.789.524.598.216	584.571.857.999	12,21%
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	-	7.632.301.219	-	4.315.970.743	3.316.330.476	76,84%
41123	Pendapatan PPN ditanggung Pemerintah	-	-	-	11.066.646.770.468	(11.066.646.770.468)	-300,00%
411231	Pendapatan PPN Dalam Negeri Ditanggung Pemerintah			-	9.601.076.564.662	(9.601.076.564.662)	-100,00%
411232	Pendapatan PPN Impor Ditanggung Pemerintah			-	1.457.726.880.227	(1.457.726.880.227)	-100,00%
411239	Pendapatan PPN Lainnya Ditanggung Pemerintah			-	7.843.325.579	(7.843.325.579)	-100,00%
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	29.057.780.000.000	29.893.164.324.396	102,87%	28.580.589.978.740	1.312.574.345.656	4,59%
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	29.893.164.324.396	-	28.580.589.978.740	1.312.574.345.656	4,59%
411311	Pendapatan PBB Pedesaan	-	1.177.346.608.822	-	1.231.724.607.759	(54.377.998.937)	-4,41%
411312	Pendapatan PBB Perkotaan	-	6.603.174.032.018	-	6.379.133.976.045	224.040.055.973	3,51%
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	-	985.954.945.312	-	906.563.035.437	79.391.909.875	8,76%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	-	251.302.697.483	-	231.794.826.611	19.507.870.872	8,42%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan	-	397.619.412.898	-	499.103.659.423	(101.484.246.525)	-20,33%
411316	Pendapatan PBB Migas	-	20.477.766.627.863	-	19.332.269.873.465	1.145.496.754.398	5,93%
411319	Pendapatan PBB Lainnya	-	-	-	-	-	

Daftar 1. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2010
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TA 2011			TA 2010	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/
4114	Pendapatan BPHTB	-	(730.151.679)	-	8.026.429.073.342	(8.027.159.225.021)	-100,01%
41141	Pendapatan BPHTB	-	(730.151.679)	-	8.026.429.073.342	(8.027.159.225.021)	-100,01%
411411	Pendapatan BPHTB	-	(730.151.679)	-	8.026.429.073.342	(8.027.159.225.021)	-100,01%
4115	Pendapatan Cukai	68.075.339.103.000	77.010.010.613.795	113,12%	66.165.922.512.567	10.844.088.101.228	16,39%
41151	Pendapatan Cukai	68.075.339.103.000	77.010.010.613.795	113,12%	66.165.922.512.567	10.844.088.101.228	16,39%
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	65.381.864.902.000	73.251.428.868.908	112,04%	63.295.281.573.097	9.956.147.295.809	15,73%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	281.712.973.000	152.953.431.380	54,29%	145.871.055.229	7.082.376.151	4,86%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	2.411.761.228.000	3.583.211.248.830	148,57%	2.697.254.271.105	885.956.977.725	32,85%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	-	11.381.400.196	-	12.995.359.858	(1.613.959.662)	-12,42%
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	-	11.035.664.483	-	14.520.253.278	(3.484.588.795)	-24,00%
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	4.193.815.884.000	3.928.192.148.211	93,67%	3.968.791.246.631	(40.599.098.420)	-1,02%
41161	Pendapatan Pajak Lainnya	-	3.611.492.492.012	-	3.341.602.840.040	269.889.651.972	8,08%
411611	Pendapatan Bea Meterai	-	1.060.800.868.721	-	952.366.711.391	108.434.157.330	11,39%
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai	-	2.548.804.494.349	-	2.388.323.587.485	160.480.906.864	6,72%
411613	Pendapatan PPn Batubara	-	61.093.244	-	5.049.944	56.043.300	1109,78%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	1.826.035.698	-	907.491.220	918.544.478	101,22%
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	-	316.699.656.199	-	29.606.567.140	287.093.089.059	969,69%
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	-	84.726.712.822	-	(18.094.935.596)	102.821.648.418	
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	-	224.199.680.642	-	47.163.985.911	177.035.694.731	375,36%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	-	204.067.285	-	443.759.337	(239.692.052)	-54,01%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	-	7.569.195.450	-	93.757.488	7.475.437.962	7973,16%
41163	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Ditanggung Pemerintah	-	-	-	597.581.839.451	(597.581.839.451)	-200,00%
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-	383.768.113.579	(383.768.113.579)	-100,00%
411632	Pendapatan Bunga Penagihan PPN Ditanggung Pemerintah			-	213.813.725.872	(213.813.725.872)	-100,00%
				-			
412	**Pajak Perdagangan Internasional**	**46.939.868.126.000**	**54.121.466.056.958**	**115,30%**	**28.914.533.690.448**	**25.206.932.366.510**	87,18%
4121	Pendapatan Bea Masuk	21.500.792.207.000	25.265.863.309.375	117,51%	20.016.826.394.532	5.249.036.914.843	26,22%
41211	Pendapatan Bea Masuk		25.265.863.309.375	-	20.016.826.394.532	5.249.036.914.843	26,22%
412111	Pendapatan Bea Masuk		23.783.424.990.710	-	18.599.690.058.915	5.183.734.931.795	27,87%
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)		3.173.020.085	-	2.061.591.716	1.111.428.369	53,91%
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean		391.846.604.781	-	540.590.656.021	(148.744.051.240)	-27,52%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		946.668.042.226	-	566.917.871.634	379.750.170.592	66,99%
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya		15.000.000	-	10.000.000	5.000.000	50,00%
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DPT) transaksi non kas		73.310.676.000	-	257.632.977.488	(184.322.301.488)	-71,54%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya		67.424.975.573	-	49.923.238.758	17.501.736.815	35,06%
4122	Pendapatan Bea Keluar	25.439.075.919.000	28.855.602.747.583	113,43%	8.897.707.295.916	19.957.895.451.667	224,30%
41221	Pendapatan Bea Keluar		28.855.602.747.583	-	8.897.707.295.916	19.957.895.451.667	224,30%
412211	Pendapatan Bea Keluar		28.839.607.612.305	-	8.896.400.417.873	19.943.207.194.432	224,17%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar		12.094.053.103	-	591.535.995	11.502.517.108	1944,52%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar		3.901.082.175	-	715.342.048	3.185.740.127	445,35%
				-			
42	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	**286.567.317.002.000**	**331.471.821.098.730**	**115,67%**	**268.941.856.208.841**	**62.529.964.889.888**	23,25%
421	**Penerimaan Sumber Daya Alam**	**191.976.022.718.000**	**213.823.349.552.827**	**111,38%**	**168.825.442.320.286**	**44.997.907.232.541**	26,65%
4211	Pendapatan Minyak Bumi	123.051.030.000.000	141.303.493.452.283	114,83%	111.814.923.202.135	29.488.570.250.148	26,37%
421111	Pendapatan Minyak Bumi	123.051.030.000.000	141.303.493.452.283	114,83%	111.814.923.202.135	29.488.570.250.148	26,37%
4212	Pendapatan Gas Bumi	50.116.240.000.000	52.187.085.923.633	104,13%	40.918.314.502.416	11.268.771.421.217	27,54%
421211	Pendapatan Gas Bumi	50.116.240.000.000	52.187.085.923.633	104,13%	40.918.314.502.416	11.268.771.421.217	27,54%
4213	Pendapatan Pertambangan Umum	15.394.499.766.000	16.369.789.735.678	106,34%	12.646.750.881.580	3.723.038.854.098	29,44%
421311	Pendapatan Iuran Tetap	273.160.000.000	261.174.194.719	95,61%	160.826.175.155	100.348.019.564	62,40%
421312	Pendapatan Royalti	15.121.339.766.000	16.108.615.540.959	106,53%	12.485.924.706.425	3.622.690.834.534	29,01%
4214	Pendapatan Kehutanan	2.908.142.940.000	3.216.476.006.406	110,60%	3.009.672.120.638	206.803.885.768	6,87%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2010
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TA 2011			TA 2010	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	1.279.176.477.000	1.796.009.923.150	140,40%	1.764.961.490.127	31.048.433.023	1,76%
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.279.176.477.000	1.796.009.923.150	140,40%	1.764.961.490.127	31.048.433.023	1,76%
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.359.053.335.000	868.650.766.502	63,92%	797.327.294.898	71.323.471.604	8,95%
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.359.053.335.000	868.650.766.502	63,92%	797.327.294.898	71.323.471.604	8,95%
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	94.894.432.000	119.264.958.237	125,68%	271.537.761.764	(152.272.803.527)	-56,08%
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	5.409.150.000	-	0,00%	10.164.000	(10.164.000)	-100,00%
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu	-	-	-	-	-	
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan	-	-	-	-	-	
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	89.485.282.000	119.264.958.237	133,28%	271.527.597.764	(152.262.639.527)	-56,08%
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	175.018.696.000	432.550.358.517	247,15%	175.845.573.849	256.704.784.668	145,98%
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	175.018.696.000	432.550.358.517	247,15%	175.845.573.849	256.704.784.668	145,98%
4215	Pendapatan Perikanan	150.000.012.000	183.802.161.080	122,53%	91.995.180.732	91.806.980.348	99,80%
42151	Pendapatan Perikanan	150.000.012.000	183.802.161.080	122,53%	91.995.180.732	91.806.980.348	99,80%
421511	Pendapatan Perikanan	150.000.012.000	183.802.161.080	122,53%	91.995.180.732	91.806.980.348	99,80%
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	356.110.000.000	562.702.273.747	158,01%	343.786.432.785	218.915.840.962	63,68%
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	356.110.000.000	562.702.273.747	158,01%	343.786.432.785	218.915.840.962	63,68%
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	356.110.000.000	562.702.273.747	158,01%	343.786.432.785	218.915.840.962	63,68%
				-			
422	**Pendapatan Bagian Laba BUMN**	**28.835.823.000.000**	**28.183.973.126.600**	**97,74%**	**30.096.932.694.265**	**(1.912.959.567.665)**	**-6,36%**
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	28.835.823.000.000	28.183.973.126.600	97,74%	30.096.932.694.265	(1.912.959.567.665)	-6,36%
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	3.627.944.570.000	3.627.944.571.970	100,00%	3.622.669.340.835	5.275.231.135	0,15%
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	3.627.944.570.000	3.627.944.571.970	100,00%	3.622.669.340.835	5.275.231.135	0,15%
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	25.207.878.430.000	24.556.028.554.630	97,41%	26.474.263.353.430	(1.918.234.798.800)	-7,25%
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	25.207.878.430.000	24.556.028.554.630	97,41%	26.474.263.353.430	(1.918.234.798.800)	-7,25%
				-			
423	**Pendapatan PNBP Lainnya**	**50.339.436.023.000**	**69.360.502.832.532**	**137,79%**	**59.428.639.159.020**	**9.931.863.673.512**	**16,71%**
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa	17.499.492.441.000	21.650.214.589.444	123,72%	16.498.911.495.199	5.151.303.094.245	31,22%
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	6.190.038.100.000	9.525.540.319.958	153,89%	6.304.681.982.846	3.220.858.337.112	51,09%
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	3.851.971.000	8.852.552.173	229,82%	8.840.385.090	12.167.083	0,14%
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	16.395.167.000	18.054.793.335	110,12%	18.250.910.450	(196.117.115)	-1,07%
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	6.134.953.376.000	7.874.419.017.285	128,35%	5.905.303.304.231	1.969.115.713.054	33,34%
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	25.000.000.000	229.776.103.763	919,10%	102.967.451.962	126.808.651.801	123,15%
423115	Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya		277.289.024	-	123.802.711	153.486.313	123,98%
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, dan Hasil Cetakan Lainnya	7.226.645.000	56.696.904.982	784,55%	49.661.606.824	7.035.298.158	14,17%
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	293.120.000	286.085.900	97,60%	7.547.704.451	(7.261.618.551)	-96,21%
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni		1.330.536.272.413	-	199.653.660.148	1.130.882.612.265	566,42%
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	2.317.821.000	6.641.301.083	286,53%	12.333.156.979	(5.691.855.896)	-46,15%
42312	Pendapatan Penjualan Aset	28.179.909.000	134.372.526.547	476,84%	263.876.638.486	(129.504.111.939)	-49,08%
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	25.057.596.000	2.725.200.373	10,88%	92.412.745.784	(89.687.545.411)	-97,05%
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor	1.190.165.000	1.807.702.673	151,89%	2.169.006.285	(361.303.612)	-16,66%
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli		40.584.546.231	-	43.296.161.610	(2.711.615.379)	-6,26%
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing		898.345.500	-	143.252.500	755.093.000	527,11%
423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih / Rusak / Dihapuskan	1.932.148.000	88.356.731.770	4572,98%	125.855.472.307	(37.498.740.537)	-29,80%
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	11.196.660.000.000	11.803.490.967.212	105,42%	9.782.852.016.185	2.020.638.951.027	20,65%
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak		1.375.672	-	401.655.452.053	(401.654.076.381)	-100,00%
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	11.196.660.000.000	11.757.359.720.968	105,01%	9.225.099.856.939	2.532.259.864.029	27,45%
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas		46.129.870.572	-	156.096.707.193	(109.966.836.621)	-70,45%
42314	Pendapatan Sewa	84.614.432.000	186.810.775.728	220,78%	147.500.857.682	39.309.918.046	26,65%
423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	24.932.707.000	45.451.619.659	182,30%	41.289.230.015	4.162.389.644	10,08%
423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	45.683.327.000	100.928.367.267	220,93%	81.303.753.392	19.624.613.875	24,14%
423143	Pendapatan Sewa Benda-Benda Bergerak	4.518.952.000	4.032.068.912	89,23%	3.855.865.338	176.203.574	4,57%

Daftar 1. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2010
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TA 2011			TA 2010	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/
423149	Pendapatan Sewa Benda-Benda Tak Bergerak Lainnya	9.479.446.000	36.398.719.890	383,98%	21.052.008.937	15.346.710.953	72,90%
4232	Pendapatan Jasa	22.535.629.257.000	26.634.516.584.922	118,19%	25.416.545.489.101	1.310.212.587.058	5,15%
42321	Pendapatan Jasa I	14.608.482.522.000	16.222.029.858.308	111,05%	16.735.427.684.773	(513.397.826.465)	-3,07%
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	18.451.836.000	23.088.984.569	125,13%	26.972.219.206	(3.883.234.637)	-14,40%
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	14.620.905.000	18.435.005.544	126,09%	13.507.952.838	4.927.052.706	36,48%
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor dan SIM, STNK, dan BPKB	1.761.667.244.000	1.728.221.763.186	98,10%	1.584.435.643.363	143.786.119.823	9,07%
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	9.588.725.032.000	10.079.440.234.990	105,12%	12.007.236.137.331	(1.927.795.902.341)	-16,06%
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	106.652.655.000	141.487.021.280	132,66%	128.633.605.374	12.853.415.906	9,99%
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC	866.658.695.000	1.730.985.001.598	199,73%	2.156.973.962.184	(425.988.960.586)	-19,75%
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	77.220.510.000	69.425.648.122	89,91%	67.695.346.723	1.730.301.399	2,56%
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	647.024.960.000	1.176.013.919.573	181,76%	749.972.817.754	426.041.101.819	56,81%
423219	Pendapatan pelayanan pertanahan	1.527.460.685.000	1.254.932.279.446	82,16%	-	1.254.932.279.446	
42322	Pendapatan Jasa II	789.661.637.000	1.371.622.057.319	173,70%	1.667.532.340.637	(295.910.283.318)	-17,75%
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	77.452.776.000	559.885.378.409	722,87%	899.577.361.700	(339.691.983.291)	-37,76%
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	594.606.826.000	608.899.747.166	102,40%	577.840.430.288	31.059.316.878	5,38%
423223	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin		6.466.867	-	1.603.830	4.863.037	303,21%
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil		-	-	-	-	
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	4.026.275.000	988.174.444	24,54%	1.684.334.872	(696.160.428)	-41,33%
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	1.500.000.000	1.106.880.702	73,79%	2.302.525.000	(1.195.644.298)	-51,93%
423227	Pendapatan Bea Lelang	47.575.760.000	111.461.806.567	234,28%	98.718.053.134	12.743.753.433	12,91%
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	47.000.000.000	77.259.612.769	164,38%	83.638.067.511	(6.378.454.742)	-7,63%
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	17.500.000.000	12.013.990.395	68,65%	3.769.964.302	8.244.026.093	218,68%
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri	430.496.501.000	454.063.043.127	105,47%	688.636.910.955	(234.573.867.828)	-34,06%
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	388.658.644.000	324.666.971.475	83,54%	222.950.631.794	101.716.339.681	45,62%
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	32.176.888.000	63.057.780.745	195,97%	63.855.938.116	(798.157.371)	-1,25%
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	9.660.969.000	66.338.290.907	686,66%	401.830.341.045	(335.492.050.138)	-83,49%
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	858.000	698.213.800	81376,90%	596.750.769	101.463.031	17,00%
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	858.000	698.213.800	81376,90%	596.750.769	101.463.031	17,00%
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	3.008.103.524.000	4.935.359.321.429	164,07%	3.468.219.982.039	1.467.139.339.390	42,30%
423251	Pendapatan Atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA	8.103.524.000	74.666.280.250	921,41%	54.670.833.438	19.995.446.812	36,57%
423252	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	900.000.000.000	3.528.360	0,00%	859.561.688.137	(859.558.159.777)	-100,00%
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	100.000.000.000	193.977.521.312	193,98%	119.679.649.746	74.297.871.566	62,08%
423254	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	2.000.000.000.000	4.666.711.991.507	233,34%	2.434.307.810.718	2.232.404.180.789	91,71%
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian	3.149.809.295.000	3.295.511.200.017	104,63%	2.551.632.939.516	743.878.260.501	29,15%
423261	Pendapatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)	949.471.545.000	956.633.348.681	100,75%	772.317.121.152	184.316.227.529	23,87%
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	885.170.000.000	882.208.725.500	99,67%	659.827.930.000	222.380.795.500	33,70%
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	466.800.000	4.328.630.000	927,30%	2.821.285.000	1.507.345.000	53,43%
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)	738.350.680.000	896.525.547.151	121,42%	708.817.183.264	187.708.363.887	26,48%
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	519.836.320.000	522.356.460.000	100,48%	377.401.460.100	144.954.999.900	38,41%
423266	Pendapatan Klinik Pengemudi (KLIPENG)	54.098.750.000	31.081.543.685	57,45%	27.332.620.000	3.748.923.685	13,72%
423267	Pendapatan Senjata Api (SENPI)	2.415.200.000	2.376.945.000	98,42%	3.115.340.000	(738.395.000)	-23,70%
42327	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	-	-	-	144.628.206.659	(144.628.206.659)	-100,00%
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu	-	-	-	144.628.206.659	(144.628.206.659)	-100,00%
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	480.348.970.000	95.921.998.922	19,97%	43.535.283.500	52.386.715.422	120,33%
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	171.078.300.000	47.653.063.281	27,85%	19.896.244.000	27.756.819.281	139,51%
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	33.056.320.000	36.189.833.800	109,48%	19.339.550.000	16.850.283.800	87,13%
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri	6.050.000.000	10.211.880.000	168,79%	3.033.595.000	7.178.285.000	236,63%
423284	Pendapatan Penerbitan Karti Sidik Jari (Inafis Card)	44.352.000.000	20.885.000	0,05%	216.055.000	(195.170.000)	-90,33%
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	225.812.350.000	1.846.336.841	0,82%	1.049.839.500	796.497.341	75,87%
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	68.725.950.000	259.310.892.000	377,31%	116.335.390.253	142.975.501.747	122,90%

Daftar 1. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2010
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TA 2011			TA 2010	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	68.725.950.000	259.310.892.000	377,31%	116.335.390.253	142.975.501.747	122,90%
4233	Pendapatan Bunga	2.000.000.000.000	4.893.238.511.754	244,66%	7.352.406.187.064	(2.459.167.675.310)	-33,45%
42331	Pendapatan Bunga	2.000.000.000.000	2.169.804.446.254	108,49%	3.858.459.830.064	(1.688.655.383.810)	-43,77%
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi		740	-	11.453	(10.713)	-93,54%
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi		59.100	-	11.250.499	(11.191.399)	-99,47%
423313	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	2.000.000.000.000	1.870.775.465.826	93,54%	3.855.810.466.950	(1.985.035.001.124)	-51,48%
423314	Pengembalian Pendpatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah		7.200	-	-	7.200	
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan		296.540.178.998	-	-	296.540.178.998	
423319	Pendapatan Bunga Lainnya		2.488.734.390	-	2.638.101.162	(149.366.772)	-5,66%
42332	Pendapatan Gain On Bond Redemption	-	760.000.000	-	48.397.000.000	(47.637.000.000)	-98,43%
423321	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang		760.000.000	-	48.397.000.000	(47.637.000.000)	-98,43%
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	-	2.722.674.065.500	-	3.445.549.357.000	(722.875.291.500)	-20,98%
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah		2.435.801.308.500	-	3.329.814.211.000	(894.012.902.500)	-26,85%
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing		-	-	-	-	
423333	Pendapatan Fee atas Securities Lending SUN		286.872.757.000	-	115.735.146.000		
42334	Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara	-	-	-	-	-	
423341	Pendapatan Fee Lainnya atas Transaksi Securities lending SUN		-	-	-	-	
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	36.537.377.000	240.761.503.805	658,95%	166.607.987.382	74.153.516.423	44,51%
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	36.537.377.000	240.761.503.805	658,95%	166.607.987.382	74.153.516.423	44,51%
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	565.000.000	2.398.961.316	424,59%	2.011.001.870	387.959.446	19,29%
423412	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	200.000.000	329.737.000	164,87%	396.657.500	(66.920.500)	-16,87%
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	180.000.000	6.554.804.355	3641,56%	6.661.900.797	(107.096.442)	-1,61%
423414	Pendapatan Hasil Denda/Denda Tilang dan Sebagainya	25.500.000.000	191.196.684.305	749,79%	123.908.626.474	67.288.057.831	54,30%
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	8.298.550.000	15.554.504.145	187,44%	13.603.572.312	1.950.931.833	14,34%
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	1.100.000.000	6.767.713.500	615,25%	2.907.120.280	3.860.593.220	132,80%
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi		48.955.000	-	1.215.000	47.740.000	3929,22%
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	693.827.000	17.910.144.184	2581,36%	17.117.893.149	792.251.035	4,63%
4235	Pendapatan Pendidikan	3.699.840.928.000	2.965.915.235.801	80,16%	2.983.449.553.759	(17.534.317.958)	-0,59%
42351	Pendapatan Pendidikan	3.699.840.928.000	2.965.915.235.801	80,16%	2.983.449.553.759	(17.534.317.958)	-0,59%
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	2.822.020.955.000	2.335.962.221.221	82,78%	2.516.227.138.711	(180.264.917.490)	-7,16%
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	95.127.880.000	65.785.580.265	69,15%	67.063.416.310	(1.277.836.045)	-1,91%
423513	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	52.261.935.000	50.851.274.636	97,30%	37.736.732.419	13.114.542.217	34,75%
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	730.430.158.000	513.316.159.679	70,28%	362.422.266.319	150.893.893.360	41,63%
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	47.800.000.000	92.848.578.390	194,24%	213.767.299.728	(120.918.721.338)	-56,57%
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	47.800.000.000	92.848.578.390	194,24%	213.767.299.728	(120.918.721.338)	-56,57%
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan	18.000.000.000	19.288.796.467	107,16%	141.609.772.505	(122.320.976.038)	-86,38%
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	2.800.000.000	3.183.654.370	113,70%	3.093.293.049	90.361.321	2,92%
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan Negara		145.460.900	-	732.520.810	(587.059.910)	-80,14%
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan	27.000.000.000	70.114.738.636	259,68%	68.214.118.624	1.900.620.012	2,79%
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	115.928.017	-	117.594.740	(1.666.723)	-1,42%
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	467.527.975.000	1.319.106.624.583	282,14%	704.797.429.654	614.309.194.929	87,16%
42371	Pendapatan Iuran Badan Usaha	436.378.544.000	861.670.014.154	197,46%	520.140.157.960	341.529.856.194	65,66%
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	359.090.305.000	632.396.034.868	176,11%	365.403.000.729	266.993.034.139	73,07%
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	77.288.239.000	151.050.193.216	195,44%	93.987.176.082	57.063.017.134	60,71%
423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan		78.223.786.070	-	60.749.981.149	17.473.804.921	28,76%
42372	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	-	733.007.131	-	9.368.074.970	(8.635.067.839)	-92,18%
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan		733.007.131	-	9.368.074.970	(8.635.067.839)	-92,18%
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	28.886.331.000	140.713.701.218	487,13%	60.837.427.669	79.876.273.549	131,29%
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati	10.036.694.000	6.215.444.231	61,93%	6.137.191.414	78.252.817	1,28%
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	1.056.374.000	102.922.500	9,74%	294.319.660	(191.397.160)	-65,03%

Daftar 1. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2010
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TA 2011			TA 2010	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)		-	-	-	-	
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)		300.000	-	1.000.000	(700.000)	-70,00%
423735	Pungutan masuk Obyek Wisata Alam	17.155.263.000	36.984.234.576	215,59%	19.453.445.176	17.530.789.400	90,12%
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	638.000.000	118.212.233	18,53%	1.079.637.218	(961.424.985)	-89,05%
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)		175.000	-	2.000.000	(1.825.000)	-91,25%
423738	Pendapaatan Penggantian Nilai Tegakan		97.292.412.678	-	33.869.834.201	63.422.578.477	187,25%
42374	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	-	-	-	-	-	
423741	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan		-	-	-	-	
42375	Pendapatan Denda I	2.263.100.000	315.818.319.492	13955,12%	114.312.598.855	201.505.720.637	176,28%
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan		4.281.304.178	-	151.279.640	4.130.024.538	2730,06%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.263.100.000	140.752.619.522	6219,46%	93.517.541.919	47.235.077.603	50,51%
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB		239.219.700	-	12.535.755	226.683.945	1808,30%
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal		16.082.817.184	-	12.912.271.452	3.170.545.732	24,55%
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha		150.962.722.445	-	1.665.686.288	149.297.036.157	8963,09%
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA		517.649.929	-	191.778.669	325.871.260	169,92%
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia		-	-	35.382.723	(35.382.723)	-100,00%
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		1.554.710	-	22.100	1.532.610	6934,89%
423759	Pendapatan Denda Atas Kekurangan/Keterlambatan Penyetoran Penerimaan Negara Oleh Bank/Pos Persepsi	-	2.980.431.824	-	5.826.100.309	(2.845.668.485)	-48,84%
42376	Pendapatan Denda II	-	171.582.588	-	139.170.200	32.412.388	23,29%
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I		5.934.346	-	662.223	5.272.123	796,13%
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB/BPHTB oleh BO III PBB/BPHTB		165.648.242	-	138.507.977	27.140.265	19,59%
4239	Pendapatan Lain-Lain	4.052.608.045.000	11.563.901.203.833	285,34%	6.092.153.717.133	5.471.747.486.699	89,82%
42391	Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	4.045.768.599.000	7.986.615.365.380	197,41%	5.763.384.770.255	2.223.230.595.125	38,58%
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	166.250.299.000	184.534.308.201	111,00%	112.128.272.229	72.406.035.972	64,57%
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	57.193.102.000	74.070.662.833	129,51%	171.940.148.523	(97.869.485.690)	-56,92%
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni TAYL	423.577.387.000	1.353.153.920.438	319,46%	552.554.329.449	800.599.590.989	144,89%
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lain Pinjaman Luar Negeri TAYL	9.892.766.000	44.901.246.343	453,88%	15.612.303.420	29.288.942.923	187,60%
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	4.023.045.000	8.219.282.585	204,31%	1.716.092.506	6.503.190.079	378,95%
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL		1.291.921.495	-	2.151.705.140	(859.783.645)	-39,96%
423917	Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL	1.587.596.360.000	1.744.388.203.373	109,88%	1.760.505.873.461	(16.117.670.088)	-0,92%
423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	1.797.235.640.000	4.576.055.820.112	254,62%	3.146.776.045.527	1.429.279.774.585	45,42%
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang	3.300.404.000	26.715.895.818	809,47%	47.908.471.893	(21.192.576.074)	-44,24%
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	56.000.000	1.500.847.472	2680,08%	10.199.938.763	(8.699.091.291)	-85,29%
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara	3.244.404.000	25.215.048.346	777,19%	37.708.533.130	(12.493.484.784)	-33,13%
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	628.093.309.285	-	11.769.234.305	616.324.074.980	5236,74%
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening		628.093.309.285	-	11.769.234.305	616.324.074.980	5236,74%
42394	Pendapatan dari Selisih Kurs	-	2.713.540.544.637	-	64.500.000.000	2.649.040.544.637	4101,57%
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan RKUN		2.710.010.534.060	-	64.500.000.000	2.645.510.534.060	4101,57%
423942	Pendapatan dari untung selisih kurs UP Satker Perwakilan RI di Luar Negeri		3.530.010.577	-	-	3.530.010.577	
42399	Pendapatan Lain-Lain	3.539.042.000	208.936.088.712	5903,75%	204.591.240.681	4.344.848.031	2,12%
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	1.763.955.000	10.792.715.501	611,85%	9.104.301.811	1.688.413.690	18,55%
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	16.868.000	311.181.400	1844,80%	106.242.546	204.938.854	192,90%
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)		195.600.000	-	88.284.316	107.315.684	121,56%
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah		838.000	-	-	838.000	
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia		-	-	-	-	
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/pos Persepsi		1.575	-	6.979.189	(6.977.614)	-99,98%
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	1.758.219.000	197.635.752.236	11240,68%	195.285.432.819	2.350.319.417	1,20%
				-			
424	**Pendapatan Badan Layanan Umum**	**15.416.035.261.000**	**20.103.995.586.771**	**130,41%**	**10.590.842.035.270**	**9.513.153.551.501**	**89,82%**
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	14.260.359.871.000	17.821.832.190.696	124,97%	9.906.996.304.665	7.914.835.886.031	79,89%
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	13.784.287.191.000	17.215.810.979.582	124,89%	9.509.402.889.281	7.706.408.090.301	81,04%

Daftar 1. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2010
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TA 2011			TA 2010	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	4.133.094.298.000	4.911.963.939.356	118,84%	3.988.992.788.405	922.971.150.951	23,14%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	7.811.044.548.000	9.483.689.653.299	121,41%	3.719.660.590.566	5.764.029.062.733	154,96%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	217.360.435.000	155.212.582.826	71,41%	103.733.581.373	51.479.001.453	49,63%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	2.045.100.000	91.120.980	4,46%	-	91.120.980	
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian		-	-	-	-	
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.449.183.488.000	1.423.253.556.524	98,21%	1.366.551.545.167	56.702.011.357	4,15%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	141.995.120.000	785.289.559	0,55%	1.077.380.011	(292.090.452)	-27,11%
424118	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang	-	8.862.033.195	-	2.979.868.036	5.882.165.159	197,40%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	29.564.202.000	1.231.952.803.843	4167,04%	326.407.135.723	905.545.668.120	277,43%
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	128.539.809.000	102.760.116.486	79,94%	85.209.252.626	17.550.863.860	20,60%
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita		-	-	-	-	
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Terpadu Pengembangan Ekonomi Terpadu		-	-	-	-	
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	3.651.200.000	-	0,00%	-	-	
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	124.888.609.000	102.760.116.486	82,28%	85.209.252.626	17.550.863.860	20,60%
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	347.532.871.000	503.261.094.628	144,81%	312.384.162.758	190.876.931.870	61,10%
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan		-	-	-	-	
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah		-	-	-	-	
424133	Pendapatan Program Modal Ventura		6.854.420.592	-	7.680.184.851	(825.764.259)	-10,75%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	159.947.777.000	233.121.199.136	145,75%	86.683.499.197	146.437.699.939	168,93%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	3.742.715.000	14.356.562.257	383,59%	1.916.662.340	12.439.899.917	649,04%
424136	Pendapatan Investasi	183.842.379.000	248.303.299.963	135,06%	204.465.814.770	43.837.485.193	21,44%
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya		625.612.680	-	11.638.001.600	(11.012.388.920)	-94,62%
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	32.297.550.000	167.462.819.227	518,50%	34.976.353.539	132.486.465.688	378,79%
42421	Pendapatan Hibah Terkait	23.120.000.000	55.720.275.237	241,00%	33.177.838.534	22.542.436.703	67,94%
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan	300.000.000	98.005.000	32,67%	760.325.000	(662.320.000)	-87,11%
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	20.595.000.000	11.161.892.904	54,20%	32.417.513.534	(21.255.620.630)	-65,57%
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	2.000.000.000	43.878.108.803	2193,91%	-	43.878.108.803	
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan		-	-	-	-	
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	225.000.000	582.268.530	258,79%	-	582.268.530	
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara		-	-	-	-	
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya		-	-	-	-	
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat	9.177.550.000	111.742.543.990	1217,56%	1.798.515.005	109.944.028.985	6113,04%
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan	2.075.000.000	-	0,00%	287.690.005	(287.690.005)	-100,00%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha		2.936.983.000	-	9.000.000	2.927.983.000	32533,14%
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda	6.530.000.000	108.550.000.000	1662,33%	1.500.000.000	107.050.000.000	7136,67%
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan		-	-	-	-	
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha		215.560.990	-	-	215.560.990	
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara		-	-	-	-	
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya	572.550.000	40.000.000	6,99%	1.825.000	38.175.000	2091,78%
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	654.899.620.000	647.563.491.201	98,88%	172.630.678.219	474.932.812.982	275,11%
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	654.899.620.000	647.563.491.201	98,88%	172.630.678.219	474.932.812.982	275,11%
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	1.563.496.000	13.794.581.510	882,29%	910.654.575	12.883.926.935	1414,80%
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	649.243.174.000	805.800.871.861	93,31%	166.269.392.277	439.531.479.584	264,35%
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	4.092.950.000	27.968.037.830	683,32%	5.450.631.367	22.517.406.463	413,12%
4249	Pendapatan BLU Lainnya	468.478.220.000	1.467.137.085.647	313,17%	476.238.698.847	990.898.386.800	208,07%
42491	Pendapatan BLU Lainnya	468.478.220.000	1.467.137.085.647	313,17%	476.238.698.847	990.898.386.800	208,07%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	468.478.220.000	1.467.137.085.647	313,17%	476.238.698.847	990.898.386.800	208,07%
				-			
43	**Penerimaan Hibah**	**4.662.105.508.000**	**5.253.939.861.304**	**112,69%**	**3.022.986.560.763**	**2.230.953.300.541**	73,80%
431	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri**	-	**5.253.939.861.304**	-	**3.022.986.560.763**	**2.230.953.300.541**	73,80%
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	960.021.567.110	-	-423.238.836.762	**536.782.730.348**	126,83%

Daftar 1. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2010
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TA 2011			TA 2010	KENAIKAN/PENURUNAN	% KENAIKAN/
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	34.102.500	-	254.132.349.174	(254.098.246.674)	-99,99%
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan		34.102.500	-	-	34.102.500	
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha			-	25.000.000	(25.000.000)	-100,00%
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya		-	-	254.107.349.174	(254.107.349.174)	-100,00%
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas		496.517.968.721	-		**496.517.968.721**	
431121	Pendapatan Hibah Berupa Barang		52.992.368.721	-		52.992.368.721	
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Surat Berharga		443.525.600.000			443.525.600.000	
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung		463.469.495.889	-	169.106.487.588	**294.363.008.301**	174,07%
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha		166.310.915.813	-	98.867.782.983	67.443.132.830	68,22%
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		287.158.580.076	-	70.238.704.605	216.919.875.471	308,83%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Bentuk Uang Lainnya		10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri		4.293.918.294.194	-	2.599.747.724.001	1.694.170.570.193	65,17%
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	2.721.020.490.004	-	2.599.747.724.001	121.272.766.003	4,66%
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan		-	-	235.708.020	(235.708.020)	-100,00%
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral		323.935.838.288	-	253.114.464.189	70.821.374.099	27,98%
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral		2.389.885.678.488	-	1.804.053.783.311	585.831.895.177	32,47%
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya		7.198.973.228	-	542.343.768.481	(535.144.795.253)	-98,67%
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Non Kas		499.204.355.709	-	-	499.204.355.709	
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Barang		31.458.714.430	-	-	31.458.714.430	
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Jasa		467.745.641.279	-	-	467.745.641.279	
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung		1.073.693.448.481	-	-	1.073.693.448.481	0,00%
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan		-	-	-	-	
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral		112.795.828.856	-	-	112.795.828.856	
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral		918.255.266.945	-	-	918.255.266.945	
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya		42.642.352.680	-	-	42.642.352.680	
				-			
	Jumlah Penerimaan	**1.169.914.639.272.000**	**1.210.599.653.359.410**	**103,48%**	**995.271.511.391.343**	**215.328.141.968.071**	**21,64%**

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
A	**BUMN Perbankan**	
1	PT. Bank Bukopin	22.537.414.557,42
2	PT. Bank Mandiri	1.688.383.760.000,00
3	PT. Bank Negara Indonesia	738.263.011.872,50
4	PT. Bank Rakyat Indonesia	980.560.000.000,00
5	PT. Bank Tabungan Negara	198.200.385.540,00
	JUMLAH DIVIDEN BUMN PERBANKAN	**3.627.944.571.969,92**
B	**BUMN NON PERBANKAN**	
1	Perum Jamkrindo	29.677.776.000,00
2	Perum Pegadaian	678.883.612.131,00
3	Perum Perumnas	600.000.000,00
4	Perum Peruri	60.000.000.000,00
5	PT. Adhi Karya	29.719.000.000,00
6	PT. Aneka Tambang	438.402.000.000,00
7	PT. Angkasa Pura I	122.799.940.000,00
8	PT. Angkasa Pura II	436.112.126.213,00
9	PT. ASDP	14.425.305.000,00
10	PT. ASEI	14.436.450.000,00
11	PT. Balai Pustaka	300.000.000,00
12	PT. Bhanda Ghara Reksa	3.079.813.139,00
13	PT. Bio Farma	24.567.251.500,00
14	PT. Biro Klasifikasi Indonesia	7.244.871.025,00
15	PT. Bukit Asam	838.674.325.125,00
16	PT. Dahana	5.944.000.000,00
17	PT. Freeport Indonesia	1.761.137.250.000,00
18	PT. Indosat	46.248.018.750,00
19	PT. Inhutani I	5.300.000.000,00
20	PT. Inhutani V	20.000.000,00
21	PT. INTI	458.569.151,00
22	PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung	6.255.868.370,50
23	PT. Jasa Marga	503.078.702.408,00
24	PT. Jasa Raharja	304.492.000.000,00
25	PT. Jasindo	38.850.324.400,00
26	PT. Kawasan Berikat Nusantara	10.627.784.434,00
27	PT. Kawasan Industri Makassar	356.262.112,00
28	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma	284.462.692,00
29	PT. KIM	1.348.186.085,00
30	PT. Kimia Farma	41.856.500.000,00
31	PT. Kliring Berjangka Indonesia	10.337.089.272,00
32	PT. Krakatau Steel	75.720.000.000,00

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
33	PT. LEN Industri	2.750.213.964,00
34	PT. Pelabuhan Indonesia I	28.133.591.000,00
35	PT. Pelabuhan Indonesia II	525.279.569.000,00
36	PT. Pelabuhan Indonesia III	224.219.482.000,00
37	PT. Pelabuhan Indonesia IV	55.087.363.000,00
38	PT. Pembangunan Perumahan	35.994.151.719,00
39	PT. Pengembangan Pariwisata Bali	10.016.729.218,00
40	PT. Perkebunan Nusantara II	600.000.000,00
41	PT. Perkebunan Nusantara III	284.304.741.340,00
42	PT. Perkebunan Nusantara IV	217.107.566.539,00
43	PT. Perkebunan Nusantara IX	25.018.120.379,31
44	PT. Perkebunan Nusantara V	68.312.383.172,01
45	PT. Perkebunan Nusantara VI	48.399.875.120,00
46	PT. Perkebunan Nusantara VII	75.973.160.102,00
47	PT. Perkebunan Nusantara VIII	29.243.355.702,00
48	PT. Perkebunan Nusantara X	27.156.410.428,00
49	PT. Perkebunan Nusantara XI	6.030.021.137,00
50	PT. Perkebunan Nusantara XII	20.199.006.644,90
51	PT. Perkebunan Nusantara XIII	50.623.490.000,00
52	PT. Permodalan Nasional Madani	2.067.000.000,00
53	PT. Persero Batam	85.865.000,00
54	PT. Pertamina	5.623.103.550.000,00
55	PT. Pertani	4.179.187.952,00
56	PT. Perusahaan Gas Negara	2.141.920.001.443,72
57	PT. Perusahaan Pengelola Aset	24.394.757.376,00
58	PT. PLN	4.545.000.000.000,00
59	PT. Pupuk Sriwidjaya	589.257.000.000,00
60	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	21.366.216.000,00
61	PT. Rekayasa Industri	192.196.900,00
62	PT. Sang Hyang Seri	4.317.284.530,66
64	PT. Semen Baturaja	50.192.161.252,42
65	PT. Semen Gresik	751.098.836.530,00
66	PT. Socfin Indonesia	101.807.134.500,00
67	PT. Sucofindo	1.908.884.698,00
68	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut	7.853.182.866,00
69	PT. Surveyor Indonesia	8.767.635.143,00
70	PT. Telkom	3.056.196.863.756,28
71	PT. Timah	308.079.200.000,00
72	PT. Wijaya Karya	68.336.000.000,00
73	PT. Yodya Karya	218.878.408,00
JUMLAH DIVIDEN BUMN NON PERBANKAN		**24.556.028.554.628,80**
JUMLAH SELURUHNYA		**28.183.973.126.598,70**

DAFTAR 2. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
001	**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**	**416.101.940.000**	**320.896.132.887**	**329.568.597**	**320.566.564.290**	**(95.535.375.710)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	88.965.050.000	69.128.590.515	6.233.470	69.122.357.045	(19.842.692.955)
02	MAJELIS	327.136.890.000	251.767.542.372	323.335.127	251.444.207.245	(75.692.682.755)
002	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**	**2.445.484.134.000**	**1.757.248.941.921**	**14.332.688.220**	**1.742.916.253.701**	**(702.567.880.299)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	696.385.549.000	573.616.317.984	187.710.104	573.428.607.880	(122.956.941.120)
02	DEWAN	1.749.098.585.000	1.183.632.623.937	14.144.978.116	1.169.487.645.821	(579.610.939.179)
004	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**	**2.820.103.133.000**	**2.104.838.166.343**	**17.571.137.294**	**2.087.267.029.049**	**(732.836.103.951)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.066.839.825.000	1.614.584.361.765	7.162.042.670	1.607.422.319.095	(459.417.505.905)
02	B.P.K. PUSAT	753.263.308.000	490.253.804.578	10.409.094.624	479.844.709.954	(273.418.598.046)
005	**MAHKAMAH AGUNG**	**6.056.363.901.000**	**4.740.631.554.073**	**5.690.196.748**	**4.734.941.357.325**	**(1.321.422.543.675)**
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5.624.681.001.000	4.396.471.774.570	3.663.543.691	4.392.808.230.879	(1.231.872.770.121)
02	KEPANITERAAN	93.056.600.000	75.068.529.676	38.348.300	75.030.181.376	(18.026.418.624)
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	149.561.000.000	103.842.120.820	863.521.896	102.978.598.924	(46.582.401.076)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	65.088.800.000	62.347.981.306	204.719.711	62.143.261.595	(2.945.538.405)
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	19.886.500.000	18.403.978.447	139.329.740	18.264.648.707	(1.621.851.293)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN P	78.690.000.000	63.607.173.348	484.500.386	63.122.672.962	(15.567.327.038)
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	25.400.000.000	20.889.995.906	296.233.024	20.593.762.882	(4.806.237.118)
006	**KEJAKSAAN AGUNG**	**2.845.923.986.000**	**3.312.360.296.612**	**1.042.045.435**	**3.311.318.251.177**	**465.394.265.177**
01	KEJAKSAAN AGUNG	2.845.923.986.000	3.312.360.296.612	1.042.045.435	3.311.318.251.177	465.394.265.177
007	**SEKRETARIAT NEGARA**	**1.938.949.269.000**	**1.613.084.972.799**	**2.081.540.769**	**1.611.003.432.030**	**(327.945.836.970)**
01	SEKRETARIAT NEGARA	1.009.952.800.000	841.560.428.919	577.964.461	840.982.464.458	(168.970.335.542)
02	SEKRETARIAT KABINET	87.356.124.000	60.558.352.576	431.442.091	60.126.910.485	(27.229.213.515)
03	RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN	410.935.828.000	378.768.256.549	18.529.356	378.749.727.193	(32.186.100.807)
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	163.918.190.000	127.758.816.938	-	127.758.816.938	(36.159.373.062)
05	SEKRETARIAT MILITER	52.479.649.000	50.382.375.954	44.529.250	50.337.846.704	(2.141.802.296)
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	45.267.721.000	44.867.521.016	-	44.867.521.016	(400.199.984)
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	44.284.945.000	31.218.731.065	57.337.734	31.161.393.331	(13.123.551.669)
08	UNIT KERJA PRESIDEN BD.PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP-PPP)	70.754.012.000	47.300.771.271	529.605.816	46.771.165.455	(23.982.846.545)
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	54.000.000.000	30.669.718.511	422.132.061	30.247.586.450	(23.752.413.550)
010	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**16.792.683.173.000**	**13.391.560.972.637**	**5.307.663.201**	**13.386.253.309.436**	**(3.406.429.863.564)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.186.169.812.000	1.124.220.169.655	455.735.655	1.123.764.434.000	(62.405.378.000)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	88.536.627.000	41.353.338.963	402.815.128	40.950.523.835	(47.586.103.165)
03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	159.808.581.000	148.932.340.320	36.946.813	148.895.393.507	(10.913.187.493)
04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	396.973.173.000	412.422.294.796	1.018.179.423	411.404.115.373	14.430.942.373
05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.622.701.048.000	9.597.854.249.675	1.434.974.791	9.596.419.274.884	(2.026.281.773.116)
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	216.463.866.000	212.759.500.865	799.753.534	211.959.747.331	(4.504.118.669)
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	310.907.632.000	259.332.713.117	993.066.293	258.339.646.824	(52.567.985.176)
08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.566.893.316.000	1.369.713.463.908	52.900.431	1.369.660.563.477	(1.197.232.752.523)
09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	61.501.000.000	52.244.773.772	79.528.923	52.165.244.849	(9.335.755.151)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	33.191.800.000	31.998.376.455	11.006.880	31.987.369.575	(1.204.430.425)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	149.536.318.000	140.729.751.111	22.755.330	140.706.995.781	(8.829.322.219)
011	**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**	**5.669.861.782.000**	**4.015.063.532.205**	**9.613.610.944**	**4.005.449.921.261**	**(1.664.411.860.739)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.931.251.572.000	3.421.125.905.284	7.364.282.772	3.413.761.622.512	(1.517.489.949.488)
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	42.080.000.000	36.803.261.219	444.677.859	36.358.583.360	(5.721.416.640)

DAFTAR 2. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	36.150.000.000	28.975.874.137	131.897.510	28.843.976.627	(7.306.023.373)
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	85.788.239.000	81.297.088.380	403.336.259	80.893.752.121	(4.894.486.879)
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	343.962.899.000	281.935.306.849	252.339.185	281.682.967.664	(62.279.931.336)
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	64.749.789.000	56.812.214.036	413.882.727	56.398.331.309	(8.351.457.691)
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	35.360.000.000	29.593.931.429	196.240.394	29.397.691.035	(5.962.308.965)
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	85.665.247.000	41.613.631.693	146.143.165	41.467.488.528	(44.197.758.472)
09	INSPEKTORAT JENDERAL	22.425.320.000	19.198.160.623	177.309.946	19.020.850.677	(3.404.469.323)
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	22.428.716.000	17.708.158.555	83.501.127	17.624.657.428	(4.804.058.572)
012	**KEMENTERIAN PERTAHANAN**	**50.033.873.531.000**	**51.360.069.533.453**	**158.477.103.100**	**51.201.592.430.353**	**1.167.718.899.353**
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4.030.859.244.000	3.500.881.004.915	33.455.672.488	3.467.425.332.427	(563.433.911.573)
21	MARKAS BESAR TNI	5.808.159.102.000	5.822.146.217.668	18.748.875.221	5.803.397.342.447	(4.761.759.553)
22	MARKAS BESAR TNI AD	22.412.419.208.000	24.491.988.420.375	82.141.567.766	24.409.846.852.609	1.997.427.644.609
23	MARKAS BESAR TNI AL	10.294.278.844.000	9.463.783.329.824	12.554.577.387	9.451.228.752.437	(843.050.091.563)
24	MARKAS BESAR TNI AU	7.488.157.133.000	8.081.270.560.671	11.576.410.238	8.069.694.150.433	581.537.017.433
013	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**	**5.211.691.018.000**	**6.441.068.572.429**	**66.228.482.394**	**6.374.840.090.035**	**1.163.149.072.035**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.970.823.192.000	5.138.253.363.152	62.362.260.344	5.075.891.102.808	1.105.067.910.808
02	INSPEKTORAT JENDERAL	28.800.000.000	26.750.510.389	108.099.651	26.642.410.738	(2.157.589.262)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	68.223.330.000	81.811.229.696	328.317.257	81.482.912.439	13.259.582.439
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	106.248.864.000	198.906.425.814	110.210.664	198.796.215.150	92.547.351.150
06	DITJEN IMIGRASI	582.446.386.000	717.028.759.401	1.639.805.216	715.388.954.185	132.942.568.185
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	226.199.806.000	74.644.402.417	218.890.177	74.425.512.240	(151.774.293.760)
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	52.449.440.000	36.567.591.080	67.476.204	36.500.114.876	(15.949.325.124)
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	28.800.000.000	28.002.719.920	5.311.822	27.997.408.098	(802.591.902)
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	45.800.000.000	41.421.420.528	25.488.949	41.395.931.579	(4.404.068.421)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM	23.800.000.000	22.419.447.413	695.000	22.418.752.413	(1.381.247.587)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	78.100.000.000	75.262.702.619	1.361.927.110	73.900.775.509	(4.199.224.491)
015	**KEMENTERIAN KEUANGAN**	**17.457.667.482.000**	**16.125.999.666.457**	**25.666.446.168**	**16.100.333.220.289**	**(1.357.334.261.711)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.949.864.249.000	5.963.937.082.788	19.157.091.669	5.944.779.991.119	(1.005.084.257.881)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	102.690.573.000	93.791.092.203	412.606.877	93.378.485.326	(9.312.087.674)
03	DITJEN ANGGARAN	123.126.257.000	114.765.543.793	325.166.662	114.440.377.131	(8.685.879.869)
04	DITJEN PAJAK	5.035.815.413.000	5.397.033.396.680	1.572.804.454	5.395.460.592.226	359.645.179.226
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	2.067.901.797.000	1.726.841.144.537	1.400.339.689	1.725.440.804.848	(342.460.992.152)
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	139.950.000.000	115.201.678.220	359.971.060	114.841.707.160	(25.108.292.840)
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	116.900.000.000	107.415.130.754	419.764.136	106.995.366.618	(9.904.633.382)
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	1.452.342.000.000	1.385.436.301.213	827.633.459	1.384.608.667.754	(67.733.332.246)
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	653.148.000.000	543.878.523.670	442.766.123	543.435.757.547	(109.712.242.453)
10	BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN	199.236.145.000	144.049.448.653	33.927.618	144.015.521.035	(55.220.623.965)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	434.311.614.000	396.304.767.440	692.884.228	395.611.883.212	(38.699.730.788)
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	182.381.434.000	137.345.556.506	21.490.193	137.324.066.313	(45.057.367.687)
018	**KEMENTERIAN PERTANIAN**	**17.740.623.889.000**	**15.997.955.035.311**	**11.968.155.354**	**15.985.986.879.957**	**(1.754.637.009.043)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	555.520.608.000	466.526.264.954	566.348.154	465.959.916.800	(89.560.691.200)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	67.510.000.000	61.276.241.213	158.324.783	61.117.916.430	(6.392.083.570)
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	2.839.938.681.000	2.665.151.190.068	1.217.107.245	2.663.934.082.823	(176.004.598.177)
04	DITJEN HOLTIKULTURA	606.335.773.000	543.737.069.128	111.769.780	543.625.299.348	(62.710.473.652)
05	DITJEN PERKEBUNAN	1.975.106.211.000	1.648.386.250.040	1.367.653.171	1.647.018.596.869	(328.087.614.131)
06	DITJEN PETERNAKAN	2.297.274.340.000	2.072.764.580.860	788.766.994	2.071.975.813.866	(225.298.526.134)
07	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	404.067.660.000	381.208.034.649	84.397.735	381.123.636.914	(22.944.023.086)

DAFTAR 2. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

08	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	5.319.000.097.000	4.812.385.238.769	3.177.247.995	4.809.207.990.774	(509.792.106.226)
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.180.810.747.000	1.081.586.018.998	894.942.235	1.080.691.076.763	(100.119.670.237)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.319.925.150.000	1.200.486.231.032	3.146.757.500	1.197.339.473.532	(122.585.676.468)
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	628.970.000.000	560.954.862.661	131.552.300	560.823.310.361	(68.146.689.639)
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	546.164.622.000	503.493.052.939	323.287.462	503.169.765.477	(42.994.856.523)
019	**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**	**2.245.563.367.000**	**1.960.086.211.713**	**2.120.501.910**	**1.957.965.709.803**	**(287.597.657.197)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	440.930.740.000	407.381.510.528	664.817.545	406.716.692.983	(34.214.047.017)
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	360.251.127.000	311.584.005.004	860.343.676	310.723.661.328	(49.527.465.672)
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	406.423.594.000	367.599.976.403	24.223.621	367.575.752.782	(38.847.841.218)
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	147.402.199.000	95.935.103.973	33.196.929	95.901.907.044	(51.500.291.956)
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	377.106.832.000	290.843.374.419	216.638.578	290.626.735.841	(86.480.096.159)
06	INSPEKTORAT JENDERAL	45.500.000.000	42.897.578.439	22.467.254	42.875.111.185	(2.624.888.815)
07	BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	364.391.478.000	361.380.701.688	202.916.086	361.177.785.602	(3.213.692.398)
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	55.000.000.000	45.652.229.043	21.129.490	45.631.099.553	(9.368.900.447)
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	48.557.397.000	36.811.732.216	74.768.731	36.736.963.485	(11.820.433.515)
020	**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**15.674.931.659.000**	**9.020.074.438.861**	**2.573.323.313**	**9.017.501.115.548**	**(6.657.430.543.452)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.088.390.579.000	823.930.565.683	153.809.516	823.776.756.167	(264.613.822.833)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	115.436.600.000	84.059.829.759	299.902.869	83.759.926.890	(31.676.673.110)
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	802.618.934.000	675.461.968.871	30.681.419	675.431.287.452	(127.187.646.548)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	9.668.416.907.000	5.095.121.439.426	107.072.197	5.095.014.367.229	(4.573.402.539.771)
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	400.379.820.000	223.179.461.728	212.231.760	222.967.229.968	(177.412.590.032)
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	52.307.396.000	45.695.356.110	13.430.000	45.681.926.110	(6.625.469.890)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	739.465.085.000	547.427.428.053	500.309.239	546.927.118.814	(192.537.966.186)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	751.003.380.000	534.818.237.004	253.884.847	534.564.352.157	(216.439.027.843)
13	BADAN GEOLOGI	873.592.272.000	677.590.532.725	924.679.766	676.665.852.959	(196.926.419.041)
14	BPH MIGAS	235.913.473.000	134.121.813.238	-	134.121.813.238	(101.791.659.762)
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	947.407.213.000	178.667.806.264	77.321.700	178.590.484.564	(768.816.728.436)
022	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**	**23.134.555.994.000**	**20.117.377.019.153**	**7.333.785.339**	**20.110.043.233.814**	**(3.024.512.760.186)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	437.036.700.000	349.450.316.219	282.356.674	349.167.959.545	(87.868.740.455)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	75.517.800.000	54.261.669.260	33.327.095	54.228.342.165	(21.289.457.835)
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	2.114.266.194.000	2.012.965.839.085	99.856.417	2.012.865.982.668	(101.400.211.332)
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	7.324.999.831.000	6.600.733.388.782	909.656.266	6.599.823.732.516	(725.176.098.484)
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	5.350.268.703.000	4.929.679.880.544	5.420.730.207	4.924.259.150.337	(426.009.552.663)
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	4.954.517.271.000	3.686.258.172.404	54.947.720	3.686.203.224.684	(1.268.314.046.316)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	136.568.900.000	117.895.776.905	10.994.833	117.884.782.072	(18.684.117.928)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	2.741.380.595.000	2.366.131.975.954	521.916.127	2.365.610.059.827	(375.770.535.173)
023	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**	**67.740.999.089.000**	**61.227.298.236.750**	**166.780.032.286**	**61.060.518.204.464**	**(6.680.480.884.536)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.265.495.899.000	1.154.671.587.352	1.429.505.921	1.153.242.081.431	(112.253.817.569)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	210.900.000.000	131.389.784.082	12.973.967.486	118.415.816.596	(92.484.183.404)
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR	17.070.056.621.000	15.736.926.812.322	27.311.678.724	15.709.615.133.598	(1.360.441.487.402)
04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	32.150.771.392.000	29.225.266.832.978	34.319.373.202	29.190.947.459.776	(2.959.823.932.224)
05	DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL	3.655.771.153.000	3.256.537.690.526	25.392.125.162	3.231.145.565.364	(424.625.587.636)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	1.311.983.929.000	1.154.837.294.992	18.486.658.059	1.136.350.636.933	(175.633.292.067)
12	DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH	8.405.413.620.000	7.261.158.676.355	22.144.110.836	7.239.014.565.519	(1.166.399.054.481)
13	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	153.621.300.000	137.105.038.703	54.599.948	137.050.438.755	(16.570.861.245)
14	BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	3.516.985.175.000	3.169.404.519.440	24.668.012.948	3.144.736.506.492	(372.248.668.508)
024	**KEMENTERIAN KESEHATAN**	**29.447.738.602.000**	**26.962.234.887.439**	**90.939.948.989**	**26.871.294.938.450**	**(2.576.443.663.550)**

DAFTAR 2. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.823.001.430.000	2.441.628.728.186	6.491.043.503	2.435.137.684.683	(387.863.745.317)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	88.352.641.000	72.660.647.087	1.986.428.028	70.674.219.059	(17.678.421.941)
03	DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.878.615.647.000	1.555.452.513.292	6.829.524.201	1.548.622.989.091	(329.992.657.909)
04	DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN	18.112.080.779.000	17.276.209.431.729	49.635.177.961	17.226.574.253.768	(885.506.525.232)
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	1.711.073.267.000	1.553.525.175.883	979.672.467	1.552.545.503.416	(158.527.763.584)
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	1.450.886.581.000	1.316.114.758.190	4.082.682.692	1.312.032.075.498	(138.854.505.502)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	546.408.596.000	451.737.461.149	3.841.735.675	447.895.725.474	(98.512.870.526)
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	2.837.319.661.000	2.294.906.171.923	17.093.684.462	2.277.812.487.461	(559.507.173.539)
025	**KEMENTERIAN AGAMA**	**35.403.526.052.000**	**33.248.990.855.694**	**40.673.554.974**	**33.208.317.300.720**	**(2.195.208.751.280)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.487.097.382.000	1.403.087.253.614	5.116.538.892	1.397.970.714.722	(89.126.667.278)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	103.247.630.000	101.234.706.992	2.630.186.914	98.604.520.078	(4.643.109.922)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	2.166.245.249.000	2.285.323.588.481	3.506.998.109	2.281.816.590.372	115.571.341.372
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	28.885.890.048.000	27.005.940.274.169	25.415.649.035	26.980.524.625.134	(1.905.365.422.866)
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	839.504.139.000	750.936.759.323	187.850.876	750.748.908.447	(88.755.230.553)
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	472.722.291.000	413.059.696.171	91.137.102	412.968.559.069	(59.753.731.931)
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	406.691.706.000	380.151.467.419	211.398.825	379.940.068.594	(26.751.637.406)
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	145.834.804.000	126.155.569.915	1.265.605.284	124.889.964.631	(20.944.839.369)
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	362.011.366.000	306.823.710.916	1.079.266.272	305.744.444.644	(56.266.921.356)
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	534.281.437.000	476.277.828.694	1.168.923.665	475.108.905.029	(59.172.531.971)
026	**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**4.656.436.291.000**	**3.686.185.699.631**	**4.059.743.927**	**3.682.125.955.704**	**(974.310.335.296)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	356.507.255.000	326.588.977.065	205.380.498	326.383.596.567	(30.123.658.433)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	41.200.000.000	36.707.880.035	69.675.100	36.638.204.935	(4.561.795.065)
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	887.840.000.000	498.972.356.408	740.102.357	498.232.254.051	(389.607.745.949)
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	240.680.000.000	198.878.621.437	1.277.305.569	197.601.315.868	(43.078.684.132)
06	DITJEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	683.253.000.000	629.786.614.229	965.040.158	628.821.574.071	(54.431.425.929)
07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	724.133.700.000	647.138.638.977	140.096.949	646.998.542.028	(77.135.157.972)
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	337.200.000.000	277.382.136.612	47.923.100	277.334.213.512	(59.865.786.488)
11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI	73.100.000.000	70.274.534.058	35.054.774	70.239.479.284	(2.860.520.716)
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	1.312.522.336.000	1.000.455.940.810	579.165.422	999.876.775.388	(312.645.560.612)
027	**KEMENTERIAN SOSIAL**	**4.121.567.362.000**	**3.969.246.356.874**	**11.797.820.461**	**3.957.448.536.413**	**(164.118.825.587)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	235.053.295.000	218.444.026.839	905.799.910	217.538.226.929	(17.515.068.071)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	23.457.978.000	20.983.155.635	398.624.000	20.584.531.635	(2.873.446.365)
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	727.735.674.000	694.560.180.985	4.881.902.598	689.678.278.387	(38.057.395.613)
04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	785.988.524.000	771.037.466.718	2.904.574.146	768.132.892.572	(17.855.631.428)
05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.159.246.515.000	2.086.454.459.200	2.098.705.671	2.084.355.753.529	(74.890.761.471)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	190.085.376.000	177.767.067.497	608.214.136	177.158.853.361	(12.926.522.639)
029	**KEMENTERIAN KEHUTANAN**	**5.872.740.532.000**	**4.763.623.216.699**	**6.917.384.993**	**4.756.705.831.706**	**(1.116.034.700.294)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	411.547.456.000	305.383.412.293	739.860.848	304.643.551.445	(106.903.904.555)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	54.240.000.000	45.976.787.375	1.292.584.219	44.684.203.156	(9.555.796.844)
03	DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN	311.076.831.000	228.690.204.070	80.689.401	228.609.514.669	(82.467.316.331)
04	DITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	2.991.704.723.000	2.390.664.794.914	1.053.256.394	2.389.611.538.520	(602.093.184.480)
05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	1.273.334.731.000	1.024.050.153.533	1.538.378.404	1.022.511.775.129	(250.822.955.871)
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	355.759.644.000	333.795.985.654	1.760.477.150	332.035.508.504	(23.724.135.496)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN	241.162.806.000	217.386.782.156	318.534.017	217.068.248.139	(24.094.557.861)
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN	233.914.341.000	217.675.096.704	133.604.560	217.541.492.144	(16.372.848.856)
032	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**5.559.205.102.000**	**5.179.927.910.145**	**3.924.583.803**	**5.176.003.326.342**	**(383.201.775.658)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	358.827.190.000	326.094.642.314	837.587.554	325.257.054.760	(33.570.135.240)

DAFTAR 2. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

02	INSPEKTORAT JENDERAL	61.139.000.000	61.970.824.361	10.957.360	61.959.867.001	820.867.001
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	1.240.080.542.000	1.097.688.700.582	810.748.527	1.096.877.952.055	(143.202.589.945)
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	1.099.614.653.000	1.048.147.168.521	412.336.227	1.047.734.832.294	(51.879.820.706)
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	362.704.000.000	353.762.861.579	438.891.860	353.323.969.719	(9.380.030.281)
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	615.951.000.000	576.737.621.880	540.069.195	576.197.552.685	(39.753.447.315)
07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	683.673.000.000	630.325.094.003	148.779.370	630.176.314.633	(53.496.685.367)
11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)	481.104.415.000	445.521.708.002	170.925.240	445.350.782.762	(35.753.632.238)
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	441.018.400.000	424.359.440.949	359.030.883	424.000.410.066	(17.017.989.934)
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	215.092.902.000	215.319.847.954	195.257.587	215.124.590.367	31.688.367
033	**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**	**56.535.308.562.000**	**51.373.641.072.646**	**67.707.412.284**	**51.305.933.660.362**	**(5.229.374.901.638)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	843.898.817.000	783.334.029.527	285.553.187	783.048.476.340	(60.850.340.660)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	122.863.414.000	65.247.191.447	335.984.090	64.911.207.357	(57.952.206.643)
03	DITJEN PENATAAN RUANG	669.016.729.000	592.377.904.470	262.854.400	592.115.050.070	(76.901.678.930)
04	DITJEN BINA MARGA	27.845.892.353.000	25.369.181.571.070	62.830.390.899	25.306.351.180.171	(2.539.541.172.829)
05	DITJEN CIPTA KARYA	13.717.108.268.000	12.445.564.422.142	704.119.323	12.444.860.302.819	(1.272.247.965.181)
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	12.586.195.793.000	11.439.501.279.223	1.342.098.638	11.438.159.180.585	(1.148.036.612.415)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	435.566.460.000	414.427.176.792	692.568.389	413.734.608.403	(21.831.851.597)
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI	314.766.728.000	264.007.497.975	1.253.843.358	262.753.654.617	(52.013.073.383)
034	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**	**586.027.530.000**	**467.909.496.632**	**455.240.080**	**467.454.256.552**	**(118.573.273.448)**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	586.027.530.000	467.909.496.632	455.240.080	467.454.256.552	(118.573.273.448)
035	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**	**248.543.363.000**	**235.172.521.070**	**1.717.514.786**	**233.455.006.284**	**(15.088.356.716)**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	248.543.363.000	235.172.521.070	1.717.514.786	233.455.006.284	(15.088.356.716)
036	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**233.575.535.000**	**211.496.835.506**	**146.935.342**	**211.349.900.164**	**(22.225.634.836)**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	233.575.535.000	211.496.835.506	146.935.342	211.349.900.164	(22.225.634.836)
040	**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**	**2.209.254.803.000**	**1.906.943.302.395**	**943.737.436**	**1.905.999.564.959**	**(303.255.238.041)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	172.200.000.000	158.336.025.376	85.905.890	158.250.119.486	(13.949.880.514)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	35.900.000.000	32.227.473.573	5.892.920	32.221.580.653	(3.678.419.347)
03	DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN	257.764.671.000	246.156.431.268	50.271.761	246.106.159.507	(11.658.511.493)
04	DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA	545.982.069.000	441.163.253.317	93.589.704	441.069.663.613	(104.912.405.387)
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	289.000.000.000	247.051.181.817	266.738.307	246.784.443.510	(42.215.556.490)
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN	592.100.000.000	500.494.585.464	305.678.800	500.188.906.664	(91.911.093.336)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	316.308.063.000	281.514.351.580	135.660.054	281.378.691.526	(34.929.371.474)
041	**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**	**144.341.195.000**	**112.033.272.473**	**2.063.499.582**	**109.969.772.891**	**(34.371.422.109)**
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	144.341.195.000	112.033.272.473	2.063.499.582	109.969.772.891	(34.371.422.109)
042	**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**	**675.382.614.000**	**633.166.415.198**	**2.986.032.181**	**630.180.383.017**	**(45.202.230.983)**
01	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	675.382.614.000	633.166.415.198	2.986.032.181	630.180.383.017	(45.202.230.983)
043	**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**	**974.319.067.000**	**856.394.479.962**	**730.723.840**	**855.663.756.122**	**(118.655.310.878)**
01	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	974.319.067.000	856.394.479.962	730.723.840	855.663.756.122	(118.655.310.878)
044	**KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**	**1.015.669.666.000**	**938.282.858.239**	**34.519.775**	**938.248.338.464**	**(77.421.327.536)**
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.015.669.666.000	938.282.858.239	34.519.775	938.248.338.464	(77.421.327.536)
047	**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**161.597.425.000**	**157.140.679.778**	**1.045.130.891**	**156.095.548.887**	**(5.501.876.113)**
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	161.597.425.000	157.140.679.778	1.045.130.891	156.095.548.887	(5.501.876.113)
048	**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**	**154.370.104.000**	**94.560.212.636**	**1.144.137.734**	**93.416.074.902**	**(60.954.029.098)**
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	154.370.104.000	94.560.212.636	1.144.137.734	93.416.074.902	(60.954.029.098)
050	**BADAN INTELIJEN NEGARA**	**1.323.109.943.000**	**1.297.871.894.586**	**97.159.562**	**1.297.774.735.024**	**(25.335.207.976)**
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.323.109.943.000	1.297.871.894.586	97.159.562	1.297.774.735.024	(25.335.207.976)
051	**LEMBAGA SANDI NEGARA**	**750.583.593.000**	**721.097.680.857**	**1.935.955.193**	**719.161.725.664**	**(31.421.867.336)**

DAFTAR 2. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

01	LEMBAGA SANDI NEGARA	750.583.593.000	721.097.680.857	1.935.955.193	719.161.725.664	(31.421.867.336)
052	**DEWAN KETAHANAN NASIONAL**	**37.371.709.000**	**36.298.241.939**	**27.488.220**	**36.270.753.719**	**(1.100.955.281)**
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	37.371.709.000	36.298.241.939	27.488.220	36.270.753.719	(1.100.955.281)
054	**BADAN PUSAT STATISTIK**	**2.294.489.349.000**	**2.482.809.329.097**	**568.662.104**	**2.482.240.666.993**	**187.751.317.993**
01	BADAN PUSAT STATISTIK	2.294.489.349.000	2.482.809.329.097	568.662.104	2.482.240.666.993	187.751.317.993
055	**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**	**716.705.700.000**	**543.377.684.110**	**1.287.149.751**	**542.090.534.359**	**(174.615.165.641)**
01	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	716.705.700.000	543.377.684.110	1.287.149.751	542.090.534.359	(174.615.165.641)
056	**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**	**3.695.403.143.000**	**2.661.777.208.537**	**3.878.094.137**	**2.657.899.114.400**	**(1.037.504.028.600)**
01	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.695.403.143.000	2.661.777.208.537	3.878.094.137	2.657.899.114.400	(1.037.504.028.600)
057	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**431.909.310.000**	**401.956.860.949**	**106.545.219**	**401.850.315.730**	**(30.058.994.270)**
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	431.909.310.000	401.956.860.949	106.545.219	401.850.315.730	(30.058.994.270)
059	**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**3.452.268.828.000**	**2.647.396.118.796**	**5.271.207.068**	**2.642.124.911.728**	**(810.143.916.272)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	217.048.789.000	189.682.620.477	133.924.360	189.548.696.117	(27.500.092.883)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	19.833.500.000	18.920.123.028	1.663.233	18.918.459.795	(915.040.205)
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	789.150.469.000	616.666.103.220	2.028.542.305	614.637.560.915	(174.512.908.085)
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	188.199.748.000	164.376.325.053	213.010.168	164.163.314.885	(24.036.433.115)
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	1.918.171.233.000	1.307.059.365.075	2.420.037.726	1.304.639.327.349	(613.531.905.651)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	159.119.652.000	140.100.565.419	465.261.617	139.635.303.802	(19.484.348.198)
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	160.745.437.000	210.591.016.524	8.767.659	210.582.248.865	49.836.811.865
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**31.261.146.996.000**	**34.457.645.481.637**	**62.996.105.816**	**34.394.649.375.821**	**3.133.502.379.821**
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	31.261.146.996.000	34.457.645.481.637	62.996.105.816	34.394.649.375.821	3.133.502.379.821
063	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**928.800.000.000**	**770.522.335.478**	**5.700.096.701**	**764.822.238.777**	**(163.977.761.223)**
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	928.800.000.000	770.522.335.478	5.700.096.701	764.822.238.777	(163.977.761.223)
064	**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**	**233.626.628.000**	**208.361.903.306**	**463.474.576**	**207.898.428.730**	**(25.728.199.270)**
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	233.626.628.000	208.361.903.306	463.474.576	207.898.428.730	(25.728.199.270)
065	**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**510.893.146.000**	**457.765.698.681**	**1.122.289.249**	**456.643.409.432**	**(54.249.736.568)**
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	510.893.146.000	457.765.698.681	1.122.289.249	456.643.409.432	(54.249.736.568)
066	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**	**976.968.478.000**	**770.996.042.744**	**619.213.042**	**770.376.829.702**	**(206.591.648.298)**
01	PELAKSANA HARIAN BNN	976.968.478.000	770.996.042.744	619.213.042	770.376.829.702	(206.591.648.298)
067	**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**	**1.263.357.152.000**	**1.013.870.059.545**	**488.768.830**	**1.013.381.290.715**	**(249.975.861.285)**
01	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.263.357.152.000	1.013.870.059.545	488.768.830	1.013.381.290.715	(249.975.861.285)
068	**BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL**	**2.506.382.067.000**	**2.356.038.937.597**	**2.736.955.152**	**2.353.301.982.445**	**(153.080.084.555)**
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.506.382.067.000	2.356.038.937.597	2.736.955.152	2.353.301.982.445	(153.080.084.555)
074	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**	**58.588.258.000**	**55.685.893.710**	**207.127.683**	**55.478.766.027**	**(3.109.491.973)**
01	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	58.588.258.000	55.685.893.710	207.127.683	55.478.766.027	(3.109.491.973)
075	**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**	**1.317.346.332.000**	**1.108.726.825.789**	**166.970.384**	**1.108.559.855.405**	**(208.786.476.595)**
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.317.346.332.000	1.108.726.825.789	166.970.384	1.108.559.855.405	(208.786.476.595)
076	**KOMISI PEMILIHAN UMUM**	**1.009.397.750.000**	**764.775.823.522**	**3.109.645.555**	**761.666.177.967**	**(247.731.572.033)**
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.009.397.750.000	764.775.823.522	3.109.645.555	761.666.177.967	(247.731.572.033)
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	**287.996.206.000**	**237.476.521.448**	**305.248.604**	**237.171.272.844**	**(50.824.933.156)**
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	287.996.206.000	237.476.521.448	305.248.604	237.171.272.844	(50.824.933.156)
078	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**	**98.285.406.000**	**48.017.333.116**	**394.500.235**	**47.622.832.881**	**(50.662.573.119)**
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	98.285.406.000	48.017.333.116	394.500.235	47.622.832.881	(50.662.573.119)
079	**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**	**616.703.293.000**	**664.794.758.554**	**1.483.109.269**	**663.311.649.285**	**46.608.356.285**
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	616.703.293.000	664.794.758.554	1.483.109.269	663.311.649.285	46.608.356.285
080	**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**	**603.356.536.000**	**572.658.258.515**	**727.595.177**	**571.930.663.338**	**(31.425.872.662)**
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	603.356.536.000	572.658.258.515	727.595.177	571.930.663.338	(31.425.872.662)

DAFTAR 2. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

081	**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**	**983.767.268.000**	**1.002.358.476.097**	**927.576.257**	**1.001.430.899.840**	**17.663.631.840**
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	983.767.268.000	1.002.358.476.097	927.576.257	1.001.430.899.840	17.663.631.840
082	**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**	**465.501.154.000**	**403.513.189.496**	**194.865.305**	**403.318.324.191**	**(62.182.829.809)**
01	LAPAN	465.501.154.000	403.513.189.496	194.865.305	403.318.324.191	(62.182.829.809)
083	**BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL**	**510.441.000.000**	**437.134.145.535**	**655.394.117**	**436.478.751.418**	**(73.962.248.582)**
01	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	510.441.000.000	437.134.145.535	655.394.117	436.478.751.418	(73.962.248.582)
084	**BADAN STANDARISASI NASIONAL**	**82.814.151.000**	**75.118.408.007**	**160.048.418**	**74.958.359.589**	**(7.855.791.411)**
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	82.814.151.000	75.118.408.007	160.048.418	74.958.359.589	(7.855.791.411)
085	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**	**76.768.461.000**	**69.932.780.868**	**605.711.134**	**69.327.069.734**	**(7.441.391.266)**
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	76.768.461.000	69.932.780.868	605.711.134	69.327.069.734	(7.441.391.266)
086	**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**	**244.595.472.000**	**250.633.984.493**	**268.766.619**	**250.365.217.874**	**5.769.745.874**
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	244.595.472.000	250.633.984.493	268.766.619	250.365.217.874	5.769.745.874
087	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**152.185.589.000**	**141.247.503.019**	**489.790.092**	**140.757.712.927**	**(11.427.876.073)**
01	ARSIP NASIONAL	152.185.589.000	141.247.503.019	489.790.092	140.757.712.927	(11.427.876.073)
088	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**	**474.562.299.000**	**451.067.319.222**	**503.120.414**	**450.564.198.808**	**(23.998.100.192)**
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	474.562.299.000	451.067.319.222	503.120.414	450.564.198.808	(23.998.100.192)
089	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**	**716.426.873.000**	**744.072.064.712**	**4.065.730.121**	**740.006.334.591**	**23.579.461.591**
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	716.426.873.000	744.072.064.712	4.065.730.121	740.006.334.591	23.579.461.591
090	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**	**2.449.876.300.000**	**2.375.141.662.791**	**3.228.467.892**	**2.371.913.194.899**	**(77.963.105.101)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	520.484.278.000	395.646.276.683	1.234.678.212	394.411.598.471	(126.072.679.529)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	975.814.470.000	1.044.289.574.996	562.667.404	1.043.726.907.592	67.912.437.592
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	118.928.457.000	169.209.220.608	290.962.257	168.918.258.351	49.989.801.351
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	111.727.859.000	91.311.364.665	96.041.603	91.215.323.062	(20.512.535.938)
05	INSPEKTORAT JENDERAL	30.018.188.000	26.690.088.675	93.784.508	26.596.304.167	(3.421.883.833)
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	326.043.022.000	338.840.723.509	52.652.788	338.788.070.721	12.745.048.721
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	93.588.450.000	75.402.832.434	30.915.260	75.371.917.174	(18.216.532.826)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	62.212.662.000	53.451.060.703	118.771.910	53.332.288.793	(8.880.373.207)
09	DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	211.058.914.000	180.300.520.518	747.993.950	179.552.526.568	(31.506.387.432)
091	**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT**	**3.462.021.148.000**	**2.362.779.354.598**	**569.043.604**	**2.362.210.310.994**	**(1.099.810.837.006)**
01	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	3.462.021.148.000	2.362.779.354.598	569.043.604	2.362.210.310.994	(1.099.810.837.006)
092	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**4.343.389.000.000**	**4.028.509.905.712**	**2.588.158.249**	**4.025.921.747.463**	**(317.467.252.537)**
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.343.389.000.000	4.028.509.905.712	2.588.158.249	4.025.921.747.463	(317.467.252.537)
093	**KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI**	**576.589.258.000**	**300.942.372.719**	**713.956.294**	**300.228.416.425**	**(276.360.841.575)**
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	576.589.258.000	300.942.372.719	713.956.294	300.228.416.425	(276.360.841.575)
095	**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**	**1.157.001.772.000**	**562.236.813.736**	**9.155.836.067**	**553.080.977.669**	**(603.920.794.331)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	799.960.000.000	289.477.660.667	182.380.544	289.295.280.123	(510.664.719.877)
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	357.041.772.000	272.759.153.069	8.973.455.523	263.785.697.546	(93.256.074.454)
100	**KOMISI YUDISIAL RI**	**79.719.292.000**	**68.962.247.320**	**350.699.075**	**68.611.548.245**	**(11.107.743.755)**
01	KOMISI YUDISIAL RI	79.719.292.000	68.962.247.320	350.699.075	68.611.548.245	(11.107.743.755)
103	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**	**938.850.322.000**	**1.242.355.744.449**	**9.455.308.542**	**1.232.900.435.907**	**294.050.113.907**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	938.850.322.000	1.242.355.744.449	9.455.308.542	1.232.900.435.907	294.050.113.907
104	**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI**	**423.705.787.000**	**376.493.062.130**	**1.493.777.428**	**374.999.224.702**	**(48.706.562.298)**
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	423.705.787.000	376.493.062.130	1.493.777.428	374.999.224.702	(48.706.562.298)
105	**BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**	**1.286.090.317.000**	**572.176.807.324**	**283.013.250**	**571.893.794.074**	**(714.196.522.926)**
01	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.286.090.317.000	572.176.807.324	283.013.250	571.893.794.074	(714.196.522.926)
106	**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**	**210.402.629.000**	**173.491.279.425**	**2.022.140.533**	**171.469.138.892**	**(38.933.490.108)**
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	210.402.629.000	173.491.279.425	2.022.140.533	171.469.138.892	(38.933.490.108)

DAFTAR 2. A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

107	**BADAN SAR NASIONAL**	**1.329.199.103.000**	**1.053.837.844.993**	**83.080.182**	**1.053.754.764.811**	**(275.444.338.189)**
01	BADAN SAR NASIONAL	1.329.199.103.000	1.053.837.844.993	83.080.182	1.053.754.764.811	(275.444.338.189)
108	**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**	**181.620.344.000**	**68.775.571.145**	**710.805.150**	**68.064.765.995**	**(113.555.578.005)**
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	181.620.344.000	68.775.571.145	710.805.150	68.064.765.995	(113.555.578.005)
109	**BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU**	**292.500.000.000**	**69.254.835.319**	**54.825.000**	**69.200.010.319**	**(223.299.989.681)**
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	292.500.000.000	69.254.835.319	54.825.000	69.200.010.319	(223.299.989.681)
110	**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**	**16.312.430.000**	**15.578.284.181**	**29.682.250**	**15.548.601.931**	**(763.828.069)**
01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	16.312.430.000	15.578.284.181	29.682.250	15.548.601.931	(763.828.069)
111	**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**	**454.000.000.000**	**314.535.278.529**	**2.356.080.656**	**312.179.197.873**	**(141.820.802.127)**
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	454.000.000.000	314.535.278.529	2.356.080.656	312.179.197.873	(141.820.802.127)
999	**BENDAHARA UMUM NEGARA**	**446.735.411.743.800**	**465.165.573.723.491**	**317.257.211.600**	**464.848.316.511.891**	**18.112.904.768.091**
01	PENGELOLA UTANG PEMERINTAH	106.583.810.504.000	92.016.168.401.189	2.883.820.044	92.013.284.581.145	(14.570.525.922.855)
02	PENGELOLA HIBAH	238.466.978.142.000	301.344.156.709	2	301.344.156.707	(238.165.633.985.293)
07	PENGELOLA BELANJA SUBSIDI	426.192.193.000	295.358.229.636.324	-	295.358.229.636.324	294.932.037.443.324
08	PENGELOLA BELANJA LAINNYA	101.258.430.904.800	14.914.431.400.306	87.654.781.554	14.826.776.618.752	(86.431.654.286.048)
99	TRANSAKSI KHUSUS		62.575.400.128.963	226.718.610.000	62.348.681.518.963	62.348.681.518.963
		908.243.422.687.800	**884.908.206.848.445**	**1.186.320.651.926**	**883.721.886.196.519**	**(24.521.536.491.281)**

DAFTAR 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	18.664.844.282	282.206.190.286	19.695.529.722	-	-	-	-	-	320.566.564.290
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	481.473.680.871	1.154.722.563.609	106.720.009.221	-	-	-	-	-	1.742.916.253.701
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	575.538.741.844	877.435.418.289	634.292.868.916	-	-	-	-	-	2.087.267.029.049
005	MAHKAMAH AGUNG	2.873.676.563.971	686.120.110.288	1.175.144.683.066	-	-	-	-	-	4.734.941.357.325
006	KEJAKSAAN AGUNG	1.617.487.333.250	1.037.765.075.495	656.065.842.432	-	-	-	-	-	3.311.318.251.177
007	SEKRETARIAT NEGARA	304.554.148.850	1.108.882.116.660	196.104.691.520	-	-	-	1.462.475.000	-	1.611.003.432.030
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	292.056.559.730	3.085.191.518.739	1.954.908.569.131	-	-	-	8.054.096.661.836	-	13.386.253.309.436
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	1.748.815.647.984	2.078.636.685.078	177.997.588.199	-	-	-	-	-	4.005.449.921.261
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	27.414.104.248.092	10.116.482.958.635	13.671.005.223.626	-	-	-	-	-	51.201.592.430.353
013	DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	2.890.996.749.741	2.149.969.120.505	1.333.874.219.789	-	-	-	-	-	6.374.840.090.035
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	7.490.514.041.094	5.277.837.278.247	2.084.582.029.561	1.247.399.871.387	-	-	-	-	16.100.333.220.289
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	1.017.365.626.604	5.504.239.870.938	706.630.473.974	-	-	-	8.757.750.908.441	-	15.985.986.879.957
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	293.155.865.822	1.301.255.628.640	363.554.215.341	-	-	-	-	-	1.957.965.709.803
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	499.012.632.048	2.395.083.091.493	6.123.405.392.007	-	-	-	-	-	9.017.501.115.548
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1.326.418.456.631	3.519.221.932.184	15.264.402.844.999	-	-	-	-	-	20.110.043.233.814
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	7.763.165.912.166	16.939.570.282.770	9.040.681.041.954	-	-	-	27.317.100.967.574	-	61.060.518.204.464
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	3.869.772.819.590	11.266.754.842.529	5.523.834.779.049	-	-	-	6.410.932.497.282	-	26.871.294.938.450
025	DEPARTEMEN AGAMA	15.845.666.787.785	5.585.188.101.506	3.045.969.015.978	-	-	-	8.731.493.395.451	-	33.208.317.300.720
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	235.093.677.198	2.578.448.155.602	867.798.115.904	-	-	-	786.007.000	-	3.682.125.955.704
027	DEPARTEMEN SOSIAL	205.725.000.134	1.277.225.057.956	149.723.648.933	-	-	-	2.324.774.829.390	-	3.957.448.536.413
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	785.565.446.502	3.526.258.949.484	340.366.049.520	-	-	-	104.515.386.200	-	4.756.705.831.706
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	451.854.239.038	3.332.234.354.362	983.732.610.442	-	-	-	408.182.122.500	-	5.176.003.326.342
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	1.104.493.828.307	7.626.316.479.193	39.344.867.399.399	-	-	-	3.230.255.953.463	-	51.305.933.660.362
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	33.772.186.496	222.552.677.129	211.129.392.927	-	-	-	-	-	467.454.256.552
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	30.658.493.537	187.166.214.285	15.630.298.462	-	-	-	-	-	233.455.006.284
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.184.912.887	99.961.156.330	92.170.030.947	-	-	-	33.800.000	-	211.349.900.164
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	271.636.006.864	1.414.236.822.165	176.936.735.930	-	-	-	43.190.000.000	-	1.905.999.564.959
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	16.539.910.190	84.483.895.109	8.945.967.592	-	-	-	-	-	109.969.772.891
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	29.534.621.264	276.020.493.067	324.625.268.686	-	-	-	-	-	630.180.383.017
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	48.247.181.557	743.575.242.903	63.841.331.662	-	-	-	-	-	855.663.756.122
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	47.075.951.483	568.037.141.390	166.505.063.350	-	-	-	156.630.182.241	-	938.248.338.464
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	13.760.036.496	137.660.959.341	3.276.590.050	-	-	-	1.397.963.000	-	156.095.548.887
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	24.427.747.391	60.846.349.491	8.141.978.020	-	-	-	-	-	93.416.074.902
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	70.581.993.040	885.302.744.794	341.889.997.190	-	-	-	-	-	1.297.774.735.024
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	41.952.303.203	107.398.923.815	569.810.498.646	-	-	-	-	-	719.161.725.664
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	5.851.043.045	26.385.519.314	4.034.191.360	-	-	-	-	-	36.270.753.719
054	BADAN PUSAT STATISTIK	674.851.220.122	1.468.004.025.014	339.385.421.857	-	-	-	-	-	2.482.240.666.993
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	90.388.212.746	413.100.423.658	38.601.897.955	-	-	-	-	-	542.090.534.359
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	990.357.107.988	1.396.522.146.439	271.019.859.973	-	-	-	-	-	2.657.899.114.400
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	37.005.090.916	309.584.818.939	55.260.405.875	-	-	-	-	-	401.850.315.730
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	182.027.910.160	2.121.203.316.825	320.090.860.135	-	-	-	18.802.824.608	-	2.642.124.911.728
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	23.329.211.360.786	7.095.002.549.972	3.970.435.465.063	-	-	-	-	-	34.394.649.375.821
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	164.660.021.610	367.460.977.784	232.701.239.383	-	-	-	-	-	764.822.238.777
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	24.640.619.233	84.970.898.302	95.651.911.195	-	-	-	2.635.000.000	-	207.898.428.730
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	33.766.460.095	411.284.579.368	11.592.369.969	-	-	-	-	-	456.643.409.432
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	27.620.560.612	285.041.978.432	457.714.290.658	-	-	-	-	-	770.376.829.702
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	15.109.458.537	448.194.452.099	3.011.508.595	-	-	-	547.065.871.484	-	1.013.381.290.715
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	178.143.896.559	2.081.356.508.492	93.801.577.394	-	-	-	-	-	2.353.301.982.445
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	18.270.412.809	35.424.529.513	1.783.823.705	-	-	-	-	-	55.478.766.027
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	189.624.188.613	418.000.870.320	500.934.796.472	-	-	-	-	-	1.108.559.855.405

DAFTAR 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	336.895.040.203	396.765.597.933	28.005.539.831	-	-	-	-	-	761.666.177.967
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	10.807.804.808	198.761.957.421	27.601.510.615	-	-	-	-	-	237.171.272.844
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	16.842.778.687	24.323.118.688	6.456.935.506	-	-	-	-	-	47.622.832.881
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	231.699.250.370	292.784.445.536	138.827.953.379	-	-	-	-	-	663.311.649.285
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	203.390.317.831	206.169.971.718	162.370.373.789	-	-	-	-	-	571.930.663.338
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	177.850.234.803	396.407.534.606	427.173.130.431	-	-	-	-	-	1.001.430.899.840
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	63.591.219.990	153.506.625.911	186.220.478.290	-	-	-	-	-	403.318.324.191
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	33.387.915.284	123.433.881.750	279.656.954.384	-	-	-	-	-	436.478.751.418
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	11.088.186.190	62.979.520.032	890.653.367	-	-	-	-	-	74.958.359.589
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	23.114.166.302	39.708.278.480	6.504.624.952	-	-	-	-	-	69.327.069.734
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	40.907.632.826	124.794.457.410	84.663.127.638	-	-	-	-	-	250.365.217.874
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	28.154.764.041	77.376.202.687	35.226.746.199	-	-	-	-	-	140.757.712.927
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	152.252.722.776	143.354.800.275	154.956.675.757	-	-	-	-	-	450.564.198.808
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	361.138.496.692	361.516.245.902	17.351.591.997	-	-	-	-	-	740.006.334.591
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	196.761.970.079	1.404.717.969.198	768.956.410.622	-	-	-	1.476.845.000	-	2.371.913.194.899
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	25.853.258.104	415.531.847.005	1.360.447.460.591	-	-	-	560.377.745.294	-	2.362.210.310.994
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	29.163.033.743	3.556.170.297.533	439.288.416.187	-	-	-	1.300.000.000	-	4.025.921.747.463
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	179.116.718.923	102.433.595.841	18.678.101.661	-	-	-	-	-	300.228.416.425
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	140.356.022.145	382.458.803.568	30.266.151.956	-	-	-	-	-	553.080.977.669
100	KOMISI YUDISIAL RI	7.520.168.706	56.268.448.617	4.822.930.922	-	-	-	-	-	68.611.548.245
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	11.509.048.215	664.248.051.843	113.054.864.316	-	-	-	444.088.471.533	-	1.232.900.435.907
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	37.506.885.760	284.255.296.718	48.779.293.974	-	-	-	4.457.748.250	-	374.999.224.702
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	12.473.984.200	110.749.911.737	445.482.546.137	-	-	-	3.187.352.000	-	571.893.794.074
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	9.341.694.593	84.835.571.581	77.291.872.718	-	-	-	-	-	171.469.138.892
107	BADAN SAR NASIONAL	117.762.768.290	248.040.281.105	687.951.715.416	-	-	-	-	-	1.053.754.764.811
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	21.206.274.158	44.818.394.857	2.040.096.980	-	-	-	-	-	68.064.765.995
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	4.126.440.000	55.507.519.896	9.566.050.423	-	-	-	-	-	69.200.010.319
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	6.338.684.361	8.466.982.100	742.935.470	-	-	-	-	-	15.548.601.931
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.933.990.205	163.267.895.578	146.977.312.090	-	-	-	-	-	312.179.197.873
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	67.731.755.186.957	-	-	92.014.519.939.499	295.358.229.636.324	300.108.798.353	3.978.333.154.800	5.465.369.795.958	464.848.316.511.891
	JUMLAH	175.737.918.419.015	124.639.479.502.304	117.854.532.071.332	93.261.919.810.886	295.358.229.636.324	300.108.798.353	71.104.328.162.347	5.465.369.795.958	883.721.886.196.519

DAFTAR 2.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	**PELAYANAN UMUM**	**560.455.105.162.800**	**509.315.715.371.399**	**370.261.743.845**	**508.945.453.627.554**	**(51.509.651.535.246)**
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN	90.717.658.981.000	86.033.575.494.757	192.248.278.071	85.841.327.216.686	(4.876.331.764.314)
01.03	PELAYANAN UMUM	12.153.725.130.000	11.831.351.642.161	72.424.487.713	11.758.927.154.448	(394.797.975.552)
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	2.976.361.010.000	2.802.897.649.489	5.919.206.823	2.796.978.442.666	(179.382.567.334)
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH	106.983.579.418.000	92.067.667.828.075	2.937.965.041	92.064.729.863.034	(14.918.849.554.966)
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	2.279.221.703.000	1.765.405.451.596	3.516.723.905	1.761.888.727.691	(517.332.975.309)
01.07	LITBANG PELAYANANAN UMUM	208.513.217.000	119.946.982.470	110.639.239	119.836.343.231	(88.676.873.769)
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	345.136.045.703.800	314.692.057.192.851	93.104.443.053	314.598.952.749.798	(30.537.092.954.002)
01.02	SUBFUNGSI TIDAK ADA		2.813.130.000	-	2.813.130.000	2.813.130.000
02	**PERTAHANAN**	**49.954.107.640.000**	**51.278.348.264.189**	**157.359.011.292**	**51.120.989.252.897**	**1.166.881.612.897**
02.01	PERTAHANAN NEGARA	45.010.455.298.000	46.953.957.031.962	144.861.910.718	46.809.095.121.244	1.798.639.823.244
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	4.835.038.182.000	4.216.828.376.469	11.841.284.274	4.204.987.092.195	(630.051.089.805)
02.04	LITBANG PERTAHANAN	108.614.160.000	107.562.855.758	655.816.300	106.907.039.458	(1.707.120.542)
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**24.328.742.207.000**	**21.717.819.061.668**	**26.581.196.191**	**21.691.237.865.477**	**(2.637.504.341.523)**
03.01	KEPOLISIAN	11.808.495.061.000	10.559.453.219.660	6.878.726.919	10.552.574.492.741	(1.255.920.568.259)
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA	938.850.322.000	1.242.355.744.449	9.455.308.542	1.232.900.435.907	294.050.113.907
03.03	PEMBINAAN HUKUM	2.915.975.450.000	2.730.538.051.943	3.311.691.701	2.727.226.360.242	(188.749.089.758)
03.04	PERADILAN	6.111.363.901.000	4.795.562.713.770	5.550.470.770	4.790.012.243.000	(1.321.351.658.000)
03.06	LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN\	25.478.501.000	24.041.491.223	28.147.423	24.013.343.800	(1.465.157.200)
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	2.528.578.972.000	2.365.867.840.623	1.356.850.836	2.364.510.989.787	(164.067.982.213)
04	**EKONOMI**	**103.317.697.524.000**	**87.344.489.761.352**	**98.328.246.518**	**87.246.161.514.834**	**(16.071.536.009.166)**
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	2.688.161.788.000	2.673.773.461.664	2.260.799.367	2.671.512.662.297	(16.649.125.703)
04.02	TENAGA KERJA	2.104.128.084.000	1.509.391.218.546	3.123.761.150	1.506.267.457.396	(597.860.626.604)
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	17.219.931.211.000	15.503.130.966.765	11.114.814.312	15.492.016.152.453	(1.727.915.058.547)
04.04	PENGAIRAN	12.080.302.743.000	10.996.799.232.330	983.613.996	10.995.815.618.334	(1.084.487.124.666)
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	10.975.569.171.000	5.790.616.836.116	295.385.464	5.790.321.450.652	(5.185.247.720.348)
04.06	PERTAMBANGAN	1.299.709.684.000	957.241.017.508	973.708.145	956.267.309.363	(343.442.374.637)
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	2.582.532.532.000	2.282.853.001.614	3.005.561.480	2.279.847.440.134	(302.685.091.866)
04.08	TRANSPORTASI	46.198.744.787.000	41.044.887.052.154	67.734.991.016	40.977.152.061.138	(5.221.592.725.862)
04.09	TELEKOMUNIKASI	1.450.000.000	1.405.373.303	9.801.200	1.395.572.103	(54.427.897)
04.10	LITBANG EKONOMI	2.377.180.311.000	2.193.955.681.310	2.408.976.379	2.191.546.704.931	(185.633.606.069)
04.90	EKONOMI LAINNYA	5.789.987.213.000	4.390.435.920.042	6.416.834.009	4.384.019.086.033	(1.405.968.126.967)
05	**LINGKUNGAN HIDUP**	**10.935.886.150.000**	**8.623.011.178.792**	**7.915.507.185**	**8.615.095.671.607**	**(2.320.790.478.393)**
05.01	MANAJEMEN LIMBAH	2.874.823.340.000	2.239.841.711.337	103.916.700	2.239.737.794.637	(635.085.545.363)
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI	220.309.981.000	183.340.974.228	272.030.185	183.068.944.043	(37.241.036.957)
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	4.500.321.643.000	3.705.431.633.720	3.032.200.665	3.702.399.433.055	(797.922.209.945)
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	2.943.620.359.000	2.100.350.216.746	3.875.317.559	2.096.474.899.187	(847.145.459.813)
05.90	LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	396.810.827.000	394.046.642.761	632.042.076	393.414.600.685	(3.396.226.315)
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**26.721.269.261.000**	**22.942.320.216.173**	**4.512.286.696**	**22.937.807.929.477**	**(3.783.461.331.523)**
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	2.380.538.406.000	1.393.577.040.733	250.095.400	1.393.326.945.333	(987.211.460.667)
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	3.712.239.967.000	3.573.557.990.367	101.742.300	3.573.456.248.067	(138.783.718.933)
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM	3.128.922.558.000	3.022.517.279.917	168.313.156	3.022.348.966.761	(106.573.591.239)
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	17.499.568.330.000	14.952.667.905.156	3.992.135.840	14.948.675.769.316	(2.550.892.560.684)

DAFTAR 2.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
07	**KESEHATAN**	**14.815.386.764.000**	**14.163.368.877.065**	**74.599.620.872**	**14.088.769.256.193**	**(726.617.507.807)**
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	1.786.870.278.000	1.537.219.171.546	8.775.445.097	1.528.443.726.449	(258.426.551.551)
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	8.704.574.701.000	8.235.507.488.576	47.329.513.353	8.188.177.975.223	(516.396.725.777)
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	921.657.751.000	1.322.359.924.747	3.044.376.228	1.319.315.548.519	397.657.797.519
07.04	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.506.382.067.000	2.356.038.937.597	2.736.955.152	2.353.301.982.445	(153.080.084.555)
07.05	LITBANG KESEHATAN	414.043.418.000	343.410.983.656	2.050.845.534	341.360.138.122	(72.683.279.878)
07.90	KESEHATAN LAINNYA	481.858.549.000	368.832.370.943	10.662.485.508	358.169.885.435	(123.688.663.565)
08	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**3.899.821.825.000**	**3.556.625.656.443**	**3.172.639.156**	**3.553.453.017.287**	**(346.368.807.713)**
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA	1.458.562.895.000	1.252.171.096.987	569.936.611	1.251.601.160.376	(206.961.734.624)
08.03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN	8.406.100.000	7.843.198.990	-	7.843.198.990	(562.901.010)
08.04	LITBANG PARIWISATA DAN BUDAYA	66.750.000.000	64.695.910.812	23.149.148	64.672.761.664	(2.077.238.336)
08.05	PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI	1.913.569.000.000	1.842.225.244.944	2.316.905.586	1.839.908.339.358	(73.660.660.642)
08.90	PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA	452.533.830.000	389.690.204.710	262.647.811	389.427.556.899	(63.106.273.101)
09	**AGAMA**	**1.553.970.493.000**	**1.429.527.981.237**	**4.795.161.787**	**1.424.732.819.450**	**(129.237.673.550)**
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	754.754.880.000	708.299.501.566	2.630.079.234	705.669.422.332	(49.085.457.668)
09.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA	60.426.262.000	58.276.767.893	139.451.450	58.137.316.443	(2.288.945.557)
09.03	LITBANG AGAMA	71.736.439.000	61.800.821.582	515.581.652	61.285.239.930	(10.451.199.070)
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	667.052.912.000	601.150.890.196	1.510.049.451	599.640.840.745	(67.412.071.255)
10	**PENDIDIKAN**	**107.676.658.574.000**	**98.044.256.001.272**	**190.209.096.931**	**97.854.046.904.341**	**(9.822.611.669.659)**
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	290.319.727.000	-	-	-	(290.319.727.000)
10.02	PENDIDIKAN DASAR	22.460.494.964.000	20.505.808.921.226	28.171.241.403	20.477.637.679.823	(1.982.857.284.177)
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH	9.739.623.484.000	8.479.451.895.997	22.427.963.639	8.457.023.932.358	(1.282.599.551.642)
10.04	PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	4.848.607.847.000	4.473.641.889.622	25.594.710.505	4.448.047.179.117	(400.560.667.883)
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	566.639.369.000	555.234.480.637	377.648.038	554.856.832.599	(11.782.536.401)
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	39.920.709.536.000	35.733.732.463.832	39.245.726.532	35.694.486.737.300	(4.226.222.798.700)
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	8.783.278.249.000	8.086.320.859.193	38.242.881.110	8.048.077.978.083	(735.200.270.917)
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	3.323.198.572.000	3.004.076.063.119	5.636.053.605	2.998.440.009.514	(324.758.562.486)
10.09	LITBANG PENDIDIKAN	1.311.983.929.000	1.154.837.294.992	13.906.223.263	1.140.931.071.729	(171.052.857.271)
10.10	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.133.390.000.000	1.921.582.327.373	247.334.600	1.921.334.992.773	(212.055.007.227)
10.90	PENDIDIKAN LAINNYA	14.298.412.897.000	14.129.569.805.281	16.359.314.236	14.113.210.491.045	(185.202.405.955)
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**4.584.777.087.000**	**3.917.323.843.892**	**10.947.482.366**	**3.906.376.361.526**	**(678.400.725.474)**
11.01	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT	259.480.994.000	254.092.620.807	942.258.853	253.150.361.954	(6.330.632.046)
11.02	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA	109.271.092.000	106.935.137.691	32.272.189	106.902.865.502	(2.368.226.498)
11.04	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA	483.922.499.000	467.590.727.201	2.551.814.516	465.038.912.685	(18.883.586.315)
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	121.990.425.000	122.100.296.258	766.210.730	121.334.085.528	(656.339.472)
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	76.503.108.000	39.527.830.925	56.418.700	39.471.412.225	(37.031.695.775)
11.09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL	244.321.311.000	220.725.896.470	202.248.508	220.523.647.962	(23.797.663.038)
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	3.289.287.658.000	2.706.351.334.540	6.396.258.870	2.699.955.075.670	(589.332.582.330)
00.00	**Fungsi Subfungsi Tidak Ada**		**62.575.400.634.963**	**237.638.659.087**	**62.337.761.975.876**	**62.337.761.975.876**
	JUMLAH	**908.243.422.687.800**	**884.908.206.848.445**	**1.186.320.651.926**	**883.721.886.196.519**	**(24.521.536.491.281)**

DAFTAR 3.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	Total Dana Perimbangan
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9 = 6 + 7 + 8
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1.074.648.524.149	1.862.991.942.652	2.473.573.227	2.940.114.040.028	8.453.184.948.000	912.603.400.000	12.305.902.388.028
2	Provinsi Sumatera Utara	1.723.432.197.537	53.308.342.699	7.999.892.093	1.784.740.432.329	13.527.973.592.000	1.484.572.475.000	16.797.286.499.329
3	Provinsi Sumatera Barat	545.573.243.387	71.157.623.630	5.392.216.455	622.123.083.472	7.771.911.192.000	776.472.200.000	9.170.506.475.472
4	Provinsi Riau	2.031.189.110.155	11.216.366.605.461		13.247.555.715.616	4.377.855.257.000	310.834.425.000	17.936.245.397.616
5	Provinsi Kepulauan Riau	937.805.583.341	2.816.361.772.648	1.567.470.870	3.755.734.826.859	1.791.569.809.000	141.040.275.000	5.688.344.910.859
6	Provinsi Jambi	813.855.356.479	1.504.803.184.101	1.905.026.171	2.320.563.566.751	4.404.270.448.000	423.017.100.000	7.147.851.114.751
7	Provinsi Sumatera Selatan	1.781.914.678.559	5.053.951.598.825	787.670.952	6.836.653.948.336	6.814.047.400.000	697.940.100.000	14.348.641.448.336
8	Provinsi Bangka Belitung	282.292.972.557	757.686.297.147		1.039.979.269.704	2.399.448.848.000	228.657.400.000	3.668.085.517.704
9	Provinsi Bengkulu	283.669.798.568	77.512.625.042		361.182.423.610	3.651.543.902.000	421.114.300.000	4.433.840.625.610
10	Provinsi Lampung	613.875.018.593	415.762.712.880	3.207.774.182	1.032.845.505.655	7.130.492.002.000	899.252.825.000	9.062.590.332.655
11	Provinsi DKI Jakarta	8.754.626.355.409	191.616.402.131	1.720.672.475	8.947.963.430.015	209.909.442.000	-	9.157.872.872.015
12	Provinsi Jawa Barat	3.897.076.175.582	1.201.811.207.921	113.078.696.486	5.211.966.079.989	20.526.665.565.000	1.612.223.675.000	27.350.855.319.989
13	Provinsi Banten	1.288.231.795.306	16.695.542.812	1.471.581.237	1.306.398.919.355	4.845.475.192.000	444.993.050.000	6.596.867.161.355
14	Provinsi Jawa Tengah	2.202.488.433.579	53.332.678.826	342.508.847.112	2.598.329.959.517	21.562.245.605.000	2.214.392.000.000	26.374.967.564.517
15	Provinsi DI Yogyakarta	314.705.898.808	1.453.627.529	20.182.565.517	336.342.091.854	3.331.233.271.000	217.340.200.000	3.884.915.562.854
16	Provinsi Jawa Timur	3.158.546.879.738	766.962.043.583	732.343.861.394	4.657.852.784.715	23.562.294.203.000	2.219.204.275.000	30.439.351.262.715
17	Provinsi Kalimantan Barat	633.502.141.045	193.932.798.561		827.434.939.606	6.889.447.225.000	929.772.400.000	8.646.654.564.606
18	Provinsi Kalimantan Tengah	699.685.837.260	740.348.925.377	1.425.650.484	1.441.460.413.121	6.332.754.973.000	584.006.475.000	8.358.221.861.121
19	Provinsi Kalimantan Selatan	601.159.288.230	3.065.707.222.111		3.666.866.510.341	4.663.391.157.000	399.659.350.000	8.729.917.017.341
20	Provinsi Kalimantan Timur	2.930.249.883.592	20.592.777.968.129		23.523.027.851.721	3.532.280.854.000	298.748.225.000	27.354.056.930.721
21	Provinsi Sulawesi Utara	386.115.676.926	13.755.997.013	1.334.251.317	401.205.925.256	4.963.779.421.000	709.185.000.000	6.074.170.346.256
22	Provinsi Gorontalo	150.511.823.838	2.779.712.608		153.291.536.446	2.158.728.659.000	278.209.600.000	2.590.229.795.446
23	Provinsi Sulawesi Tengah	388.188.590.217	60.423.729.119	2.165.195.123	450.777.514.459	5.084.008.869.000	633.775.500.000	6.168.561.883.459
24	Provinsi Sulawesi Selatan	1.076.004.850.894	96.158.376.939	8.094.495.604	1.180.257.723.437	9.844.204.010.000	1.270.100.500.000	12.294.562.233.437
25	Provinsi Sulawesi Barat	194.351.542.759	2.827.066.505		197.178.609.264	2.083.618.468.000	300.382.600.000	2.581.179.677.264
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	350.706.258.470	122.796.517.480		473.502.775.950	4.860.899.616.000	534.954.075.000	5.869.356.466.950
27	Provinsi Bali	531.214.986.653	2.502.329.697	8.577.192.732	542.294.509.082	3.957.220.392.000	286.018.600.000	4.785.533.501.082
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	374.519.842.058	207.332.096.419	150.608.767.584	732.460.706.061	4.849.766.613.000	490.034.300.000	6.072.261.619.061
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	483.268.234.443	11.115.976.833	1.603.363.169	495.987.574.445	7.467.458.821.000	1.156.888.100.000	9.120.334.495.445
30	Provinsi Maluku	391.831.586.012	48.274.654.634		440.106.240.646	4.123.370.486.000	536.699.550.000	5.100.176.276.646
31	Provinsi Maluku Utara	393.979.926.776	265.883.393.956		659.863.320.732	3.707.376.056.000	696.916.800.000	5.064.156.176.732
32	Provinsi Papua	1.238.627.866.584	1.391.191.990.956		2.629.819.857.540	12.292.030.775.000	2.027.216.050.000	16.949.066.682.540
33	Provinsi Papua Barat	997.706.561.674	1.095.403.333.730		2.093.109.895.404	4.363.254.977.000	667.285.100.000	7.123.649.972.404
JUMLAH		**41.525.556.919.178**	**53.974.986.297.954**	**1.408.448.764.184**	**96.908.991.981.316**	**225.533.712.048.000**	**24.803.509.925.000**	**347.246.213.954.316**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**224.650.386.410**	**64.059.949.207**	**160.590.437.203**		**224.650.386.410**
2	Kab. Aceh Barat	20.166.658.763	3.782.007.960	16.384.650.803		20.166.658.763
3	Kab. Aceh Besar	28.666.888.791	6.374.412.352	22.292.476.439		28.666.888.791
4	Kab. Aceh Selatan	21.814.594.638	2.088.311.535	19.726.283.103		21.814.594.638
5	Kab. Aceh Singkil	20.338.483.324	2.772.447.475	17.566.035.849		20.338.483.324
6	Kab. Aceh Tengah	22.758.207.653	3.245.496.107	19.512.711.546		22.758.207.653
7	Kab. Aceh Tenggara	20.470.882.143	2.421.406.431	18.049.475.712		20.470.882.143
8	Kab. Aceh Timur	85.113.668.835	2.295.916.249	82.817.752.586		85.113.668.835
9	Kab. Aceh Utara	177.762.509.198	5.437.431.811	172.325.077.387		177.762.509.198
10	Kab. Bireun	35.419.061.187	3.941.045.755	31.478.015.432		35.419.061.187
11	Kab. Pidie	25.273.998.011	4.533.063.676	20.740.934.335		25.273.998.011
12	Kab. Simeulue	21.178.096.344	2.111.690.919	19.066.405.425		21.178.096.344
13	Kota Banda Aceh	37.330.534.870	19.998.532.278	17.332.002.592		37.330.534.870
14	Kota Sabang	19.860.496.573	2.112.029.044	17.748.467.529		19.860.496.573
15	Kota Langsa	23.017.919.180	4.731.368.064	18.286.551.116		23.017.919.180
16	Kota Lhokseumawe	57.820.925.470	9.060.461.305	48.760.464.165		57.820.925.470
17	Kab. Nagan Raya	27.317.713.723	3.164.061.075	24.153.652.648		27.317.713.723
18	Kab. Aceh Jaya	23.967.010.930	2.733.138.622	21.233.872.308		23.967.010.930
19	Kab. Pidie Jaya	20.150.651.723	2.153.913.242	17.996.738.481		20.150.651.723
20	Kab. Aceh Barat Daya	22.744.298.827	3.303.098.994	19.441.199.833		22.744.298.827
21	Kab. Gayo Lues	28.590.569.352	1.778.754.267	26.811.815.085		28.590.569.352
22	Kab. Aceh Tamiang	71.974.859.635	3.756.360.322	68.218.499.313		71.974.859.635
23	Kab. Bener Meriah	22.364.324.950	2.158.371.498	20.205.953.452		22.364.324.950
24	Kota Subulussalam	15.895.783.619	2.176.332.654	13.719.450.965		15.895.783.619
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**381.056.621.461**	**153.692.744.331**	**227.363.877.130**		**381.056.621.461**
26	Kab. Asahan	54.498.168.977	6.606.253.287	47.891.915.690		54.498.168.977
27	Kab. Dairi	26.614.401.127	3.580.534.114	23.033.867.013		26.614.401.127
28	Kab. Deli Serdang	108.030.360.125	11.714.826.429	96.315.533.696		108.030.360.125
29	Kab. Tanah Karo	30.315.888.963	4.414.373.312	25.901.515.651		30.315.888.963
30	Kab. Labuhan Batu	46.620.275.851	6.716.607.530	39.903.668.321		46.620.275.851
31	Kab. Langkat	130.060.530.735	5.986.332.967	124.074.197.768		130.060.530.735
32	Kab. Mandailing Natal	33.218.251.585	3.424.440.017	29.793.811.568		33.218.251.585
33	Kab. Nias	11.151.735.178	2.404.311.296	8.747.423.882		11.151.735.178
34	Kab. Simalungun	56.169.778.546	5.352.569.262	50.817.209.284		56.169.778.546
35	Kab. Tapanuli Selatan	28.938.665.125	4.278.334.927	24.660.330.198		28.938.665.125
36	Kab. Tapanuli Tengah	25.043.650.223	3.143.577.252	21.900.072.971		25.043.650.223
37	Kab. Tapanuli Utara	24.862.851.200	3.442.189.096	21.420.662.104		24.862.851.200
38	Kab. Toba Samosir	19.145.465.008	4.564.994.931	14.580.470.077		19.145.465.008
39	Kota Binjai	41.814.483.656	4.064.464.627	37.750.019.029		41.814.483.656
40	Kota Medan	275.504.838.371	91.737.793.833	183.767.044.538		275.504.838.371
41	Kota Pematang Siantar	25.855.773.197	10.165.391.797	15.690.381.400		25.855.773.197
42	Kota Sibolga	19.238.522.881	3.684.995.824	15.553.527.257		19.238.522.881
43	Kota Tanjung Balai	16.035.786.889	3.156.137.801	12.879.649.088		16.035.786.889
44	Kab. Batu Bara	26.815.667.411	5.902.939.519	20.912.727.892		26.815.667.411
45	Kab. Labuhan Batu Utara	33.158.622.515	3.906.767.942	29.249.996.025	1.858.548	33.158.622.515
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	47.488.006.970	4.971.589.558	42.514.558.864	1.858.548	47.488.006.970
47	Kab. Padang Lawas Utara	29.865.151.531	2.864.035.835	26.999.257.348	1.858.548	29.865.151.531
48	Kab. Padang Lawas	25.636.101.863	2.900.797.064	22.733.446.251	1.858.548	25.636.101.863
49	Kab. Nias Utara	10.567.068.093	2.440.168.052	8.126.900.041		10.567.068.093
50	Kab. Nias Barat	9.121.928.451	2.358.114.723	6.763.813.728		9.121.928.451
51	Kota Tebing Tinggi	19.458.135.339	3.633.580.005	15.824.555.334		19.458.135.339
52	Kota Padang Sidempuan	23.354.312.814	4.539.398.703	18.814.924.111		23.354.312.814
53	Kab. Pakpak Bharat	23.105.246.512	2.458.751.035	20.646.495.477		23.105.246.512
54	Kab. Nias Selatan	21.537.026.831	2.478.927.194	19.058.099.637		21.537.026.831
55	Kab. Humbang Hasundutan	24.956.693.634	3.016.544.123	21.940.149.511		24.956.693.634
56	Kab. Serdang Bedagai	48.197.884.553	5.082.842.253	43.115.042.300		48.197.884.553
57	Kab. Samosir	15.878.666.698	2.633.820.010	13.244.846.688		15.878.666.698
58	Kota Gunung sitoli	10.115.635.224	3.070.472.662	7.045.162.562		10.115.635.224
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**115.964.114.268**	**51.799.275.858**	**64.164.838.410**		**115.964.114.268**
60	Kab. Limapuluh Kota	24.451.537.213	2.654.820.391	21.796.716.822		24.451.537.213
61	Kab. Agam	22.109.802.537	3.890.988.486	18.218.814.051		22.109.802.537
62	Kab. Kepulauan Mentawai	19.161.412.572	1.523.302.192	17.638.110.380		19.161.412.572
63	Kab. Padang Pariaman	21.067.442.958	2.644.135.106	18.423.307.852		21.067.442.958
64	Kab. Pasaman	22.561.768.446	2.304.495.534	20.257.272.912		22.561.768.446
65	Kab. Pesisir Selatan	26.942.927.677	2.722.925.597	24.220.002.080		26.942.927.677
66	Kab. Sijunjung	21.540.308.983	2.380.262.593	19.160.046.390		21.540.308.983
67	Kab. Solok	20.987.272.649	2.755.293.204	18.231.979.445		20.987.272.649
68	Kab. Tanah Datar	17.871.015.360	3.174.145.823	14.696.869.537		17.871.015.360
69	Kota Bukit Tinggi	14.680.174.848	4.729.859.337	9.950.315.511		14.680.174.848
70	Kota Padang Panjang	16.951.846.498	2.060.226.685	14.891.619.813		16.951.846.498
71	Kota Padang	62.160.571.958	28.338.447.432	33.822.124.526		62.160.571.958
72	Kota Payakumbuh	15.283.823.935	2.719.181.408	12.564.642.527		15.283.823.935
73	Kota Sawahlunto	17.048.097.679	2.406.925.088	14.641.172.591		17.048.097.679
74	Kota Solok	14.719.293.369	2.671.327.025	12.047.966.344		14.719.293.369
75	Kota Pariaman	20.474.469.556	3.111.827.880	17.362.641.676		20.474.469.556
76	Kab. Pasaman Barat	24.586.843.168	3.127.036.527	21.459.806.641		24.586.843.168
77	Kab. Dharmasraya	22.211.876.245	2.488.044.365	19.723.831.880		22.211.876.245
78	Kab. Solok Selatan	24.798.643.468	2.236.237.283	22.562.406.185		24.798.643.468
79	**Provinsi Riau**	**467.528.017.218**	**146.617.373.404**	**320.910.643.814**		**467.528.017.218**
80	Kab. Bengkalis	276.037.822.766	49.500.781.634	226.537.041.132		276.037.822.766
81	Kab. Indragiri Hilir	66.396.694.543	9.247.989.373	57.148.705.170		66.396.694.543
82	Kab. Indragiri Hulu	80.833.948.374	9.815.615.398	71.018.332.976		80.833.948.374
83	Kab. Kampar	155.715.061.822	11.648.904.465	144.066.157.357		155.715.061.822
84	Kab. Kuantan Singingi	43.954.040.713	8.299.138.799	35.654.901.914		43.954.040.713
85	Kab. Pelalawan	124.699.143.262	10.581.798.924	114.117.344.338		124.699.143.262
86	Kab. Rokan Hilir	193.520.738.533	7.727.297.657	185.793.440.876		193.520.738.533
87	Kab. Rokan Hulu	122.814.932.991	8.505.442.484	114.309.490.507		122.814.932.991
88	Kab. Siak	217.948.910.823	22.500.856.729	195.448.054.094		217.948.910.823
89	Kota Dumai	64.455.497.862	20.467.886.779	43.987.611.083		64.455.497.862

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
90	Kota Pekanbaru	122.989.281.196	55.487.374.779	67.501.906.417		122.989.281.196
91	Kab. Kepulauan Meranti	94.295.020.052	6.912.849.827	87.382.170.225		94.295.020.052
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**218.477.362.213**	**75.796.289.898**	**142.681.072.515**		**218.477.362.213**
93	Kab. Bintan	78.722.468.587	8.639.109.722	70.083.358.865		78.722.468.587
94	Kab. Natuna	219.497.501.275	5.843.120.807	213.654.380.468		219.497.501.275
95	Kab. Karimun	65.561.429.224	10.285.630.470	55.275.798.754		65.561.429.224
96	Kota Batam	174.355.835.116	68.729.962.141	105.625.872.975		174.355.835.116
97	Kab. Kepulauan Anambas	77.603.316.655	9.600.846.362	68.000.611.745	1.858.548	77.603.316.655
98	Kota Tanjung Pinang	51.096.906.272	6.806.751.880	44.290.154.392		51.096.906.272
99	Kab. Lingga	52.490.763.999	5.516.375.555	46.974.388.444		52.490.763.999
100	**Provinsi Jambi**	**172.065.600.518**	**33.262.905.813**	**136.802.694.705**		**172.065.600.518**
101	Kab. Batanghari	93.841.498.597	2.713.794.267	91.127.704.330		93.841.498.597
102	Kab. Bungo	31.128.667.205	4.344.070.409	26.784.596.796		31.128.667.205
103	Kab. Kerinci	19.729.716.855	1.504.656.054	18.225.060.801		19.729.716.855
104	Kab. Merangin	39.570.478.656	3.722.817.271	35.847.661.385		39.570.478.656
105	Kab. Muaro Jambi	83.496.894.907	4.118.811.195	79.378.083.712		83.496.894.907
106	Kab. Sarolangun	58.812.588.306	2.385.572.908	56.427.015.398		58.812.588.306
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	90.174.944.882	3.984.197.617	86.190.747.265		90.174.944.882
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	102.738.243.002	4.031.247.942	98.706.995.060		102.738.243.002
109	Kab. Tebo	42.304.591.636	2.412.087.269	39.892.504.367		42.304.591.636
110	Kota Jambi	64.020.880.911	17.227.822.746	46.793.058.165		64.020.880.911
111	Kota Sungai Penuh	15.971.251.004	4.004.417.320	11.964.975.136	1.858.548	15.971.251.004
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**379.619.688.643**	**90.349.570.421**	**289.270.118.222**		**379.619.688.643**
113	Kab. Lahat	101.446.517.414	6.081.770.730	95.364.746.684		101.446.517.414
114	Kab. Musi Banyuasin	276.356.823.362	8.779.968.110	267.576.855.252		276.356.823.362
115	Kab. Musi Rawas	174.367.899.070	4.052.367.862	170.315.531.208		174.367.899.070
116	Kab. Muara Enim	214.912.160.928	14.578.498.392	200.333.662.536		214.912.160.928
117	Kab. Ogan Komering Ilir	42.040.004.576	4.863.849.171	37.176.155.405		42.040.004.576
118	Kab. Ogan Komering Ulu	84.336.776.798	6.889.287.987	77.447.488.811		84.336.776.798
119	Kota Palembang	125.240.722.102	52.795.770.443	72.444.951.659		125.240.722.102
120	Kota Pagar Alam	27.715.389.798	3.235.717.864	24.479.671.934		27.715.389.798
121	Kota Lubuk Linggau	30.251.122.886	5.301.027.160	24.950.095.726		30.251.122.886
122	Kota Prabumulih	58.965.411.997	9.474.760.920	49.490.651.077		58.965.411.997
123	Kab. Empat Lawang	28.475.479.752	3.071.022.090	25.404.457.662		28.475.479.752
124	Kab. Banyuasin	114.170.258.167	5.406.504.230	108.763.753.937		114.170.258.167
125	Kab. Ogan Ilir	66.782.865.392	3.969.337.092	62.813.528.300		66.782.865.392
126	Kab. OKU Timur	26.885.560.473	4.390.571.727	22.494.988.746		26.885.560.473
127	Kab. OKU Selatan	30.347.997.201	3.493.133.912	26.854.863.289		30.347.997.201
128	**Provinsi Bangka Belitung**	**56.010.817.280**	**16.435.559.888**	**39.575.257.392**		**56.010.817.280**
129	Kab. Bangka	36.995.153.529	3.227.699.971	33.767.453.558		36.995.153.529
130	Kab. Belitung	30.891.398.638	2.797.378.364	28.094.020.274		30.891.398.638
131	Kota Pangkal Pinang	33.757.488.346	6.931.236.446	26.826.251.900		33.757.488.346
132	Kab. Bangka Selatan	28.413.378.990	1.730.174.147	26.683.204.843		28.413.378.990
133	Kab. Bangka Tengah	30.410.847.032	2.673.964.469	27.736.882.563		30.410.847.032
134	Kab. Bangka Barat	35.640.670.152	3.928.733.805	31.711.936.347		35.640.670.152
135	Kab. Belitung Timur	30.173.218.590	3.364.152.625	26.809.065.965		30.173.218.590
136	**Provinsi Bengkulu**	**54.392.681.222**	**14.606.870.455**	**39.785.810.767**	**851.904**	**54.393.533.126**
137	Kab. Bengkulu Selatan	19.799.634.682	1.722.100.605	18.077.534.077		19.799.634.682
138	Kab. Bengkulu Utara	27.236.765.697	2.270.665.937	24.966.099.760		27.236.765.697
139	Kab. Rejang Lebong	22.211.553.953	2.019.777.118	20.191.776.835	672.000	22.212.225.953
140	Kota Bengkulu	27.879.030.679	8.260.139.145	19.618.891.534		27.879.030.679
141	Kab. Kaur	21.513.023.225	1.139.124.560	20.373.898.665		21.513.023.225
142	Kab. Seluma	21.537.869.075	1.379.895.389	20.157.973.686		21.537.869.075
143	Kab. Mukomuko	26.681.597.024	1.582.631.958	25.098.965.066		26.681.597.024
144	Kab. Lebong	26.689.429.617	1.074.875.781	25.614.553.856		26.689.429.617
145	Kab. Bengkulu Tengah	14.152.179.424	1.295.503.485	12.854.817.391	1.858.548	14.152.179.424
146	Kab. Kepahiang	21.571.774.460	1.186.342.278	20.385.432.172	2.736.616	21.574.510.066
147	**Provinsi Lampung**	**127.315.721.859**	**40.241.448.983**	**87.074.272.876**		**127.315.721.859**
148	Kab. Lampung Barat	31.345.581.524	2.182.732.275	29.162.849.249		31.345.581.524
149	Kab. Lampung Selatan	33.310.172.718	4.867.487.063	28.442.685.655		33.310.172.718
150	Kab. Lampung Tengah	54.926.434.818	5.895.605.584	49.030.829.234		54.926.434.818
151	Kab. Lampung Utara	36.070.507.805	3.541.079.845	32.529.427.960		36.070.507.805
152	Kab. Lampung Timur	80.399.319.427	4.024.468.543	76.374.850.884		80.399.319.427
153	Kab. Tanggamus	25.914.737.192	2.548.894.879	23.365.842.313		25.914.737.192
154	Kab. Tulang Bawang	29.733.693.577	4.268.101.902	25.465.591.675		29.733.693.577
155	Kab. Way Kanan	36.396.175.154	2.683.430.314	33.712.744.840		36.396.175.154
156	Kab. Pesawaran	20.350.648.116	2.515.055.208	17.833.734.360	1.858.548	20.350.648.116
157	Kab. Pringsewu	14.678.781.026	2.511.333.697	12.167.447.329		14.678.781.026
158	Kab. Mesuji	17.618.790.341	1.594.624.187	16.024.166.154		17.618.790.341
159	Kab. Tulang Bawang Barat	18.289.542.618	1.870.372.680	16.419.169.938		18.289.542.618
160	Kota Bandar Lampung	63.761.300.140	18.871.282.059	44.890.018.081		63.761.300.140
161	Kota Metro	23.763.612.278	3.040.319.597	20.723.292.681		23.763.612.278
162	**Provinsi DKI Jakarta**	**8.749.279.920.633**	**6.041.680.333.660**	**2.706.599.586.973**	**6.346.434.776**	**8.754.626.355.409**
163	**Provinsi Jawa Barat**	**974.458.003.779**	**500.690.356.148**	**473.767.647.631**	**38.231.503**	**974.496.235.282**
164	Kab. Bandung	123.274.142.802	22.650.524.209	100.623.618.393	122.291.069	123.396.433.671
165	Kab. Bekasi	364.636.455.609	135.856.915.901	228.779.539.708		364.636.455.609
166	Kab. Bogor	199.836.513.501	45.734.749.606	154.101.763.895		199.836.513.501
167	Kab. Ciamis	58.575.703.913	12.272.293.781	46.303.410.132		58.575.703.913
168	Kab. Cianjur	79.395.218.467	14.552.081.423	64.843.137.044	6.134.464	79.401.352.931
169	Kab. Cirebon	70.186.386.145	17.348.105.695	52.838.280.450		70.186.386.145
170	Kab. Garut	84.130.051.852	14.923.050.459	69.207.001.393	1.120.000	84.131.171.852
171	Kab. Indramayu	173.454.249.814	21.746.686.754	151.707.563.060	12.069.376	173.466.319.190
172	Kab. Karawang	250.676.124.138	52.063.643.155	198.612.480.983		250.676.124.138
173	Kab. Kuningan	48.135.936.262	12.185.750.425	35.950.185.837		48.135.936.262
174	Kab. Majalengka	80.282.684.759	11.919.968.284	68.362.716.475		80.282.684.759
175	Kab. Purwakarta	71.514.340.781	21.550.403.285	49.963.937.496		71.514.340.781
176	Kab. Subang	170.137.633.490	14.596.245.306	155.541.388.184		170.137.633.490
177	Kab. Sukabumi	88.135.332.251	12.939.398.047	75.195.934.204		88.135.332.251
178	Kab. Sumedang	53.769.279.029	14.351.780.515	39.417.498.514		53.769.279.029

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
179	Kab. Tasikmalaya	59.949.154.543	13.092.717.109	46.856.437.434		59.949.154.543
180	Kab. Bandung Barat	61.271.364.572	18.569.449.881	42.701.914.691		61.271.364.572
181	Kota Bandung	333.717.061.303	125.976.159.165	207.740.902.138	11.311.104	333.728.372.407
182	Kota Bekasi	162.650.078.303	40.670.165.591	121.979.912.712		162.650.078.303
183	Kota Bogor	96.505.112.344	29.724.686.519	66.780.425.825		96.505.112.344
184	Kota Cirebon	42.053.055.694	17.099.822.520	24.953.433.174		42.053.055.694
185	Kota Depok	106.306.002.669	27.226.464.529	79.079.538.140		106.306.002.669
186	Kota Sukabumi	32.251.507.023	17.290.138.967	14.961.368.056		32.251.507.023
187	Kota Cimahi	42.376.011.751	13.488.416.892	28.887.594.859		42.376.011.751
188	Kota Tasikmalaya	40.818.201.566	17.134.815.318	23.683.386.248		40.818.201.566
189	Kota Banjar	28.389.411.906	9.659.936.697	18.729.475.209		28.389.411.906
190	**Provinsi Banten**	**341.037.854.577**	**210.052.449.736**	**130.985.404.841**		**341.037.854.577**
191	Kab. Lebak	50.577.086.993	14.921.898.239	35.655.188.754		50.577.086.993
192	Kab. Pandeglang	50.041.903.148	15.582.866.980	34.459.036.168		50.041.903.148
193	Kab. Serang	78.638.296.729	29.144.292.527	49.494.004.202		78.638.296.729
194	Kab. Tangerang	217.250.056.897	67.041.800.338	150.208.256.559		217.250.056.897
195	Kota Cilegon	97.063.304.979	42.942.962.004	54.120.342.975		97.063.304.979
196	Kota Tangerang	253.475.278.966	80.073.364.068	173.401.914.898		253.475.278.966
197	Kota Serang	37.025.141.213	16.294.550.268	20.738.732.397	1.858.548	37.025.141.213
198	Kota Tangerang Selatan	163.122.871.804	50.313.391.294	112.809.480.510		163.122.871.804
199	**Provinsi Jawa Tengah**	**510.798.103.624**	**242.467.801.219**	**268.330.302.405**	**138.880**	**510.798.242.504**
200	Kab. Banjarnegara	40.694.174.953	6.517.215.645	34.176.959.308		40.694.174.953
201	Kab. Banyumas	68.244.566.141	14.252.565.327	53.992.000.814		68.244.566.141
202	Kab. Batang	36.698.498.776	5.912.760.856	30.785.737.920		36.698.498.776
203	Kab. Blora	74.328.024.023	7.139.068.357	67.188.955.666		74.328.024.023
204	Kab. Boyolali	39.255.541.286	7.296.420.145	31.959.121.141		39.255.541.286
205	Kab. Brebes	56.120.985.631	5.903.834.892	50.217.150.739		56.120.985.631
206	Kab. Cilacap	87.379.225.350	20.204.836.382	67.174.388.968		87.379.225.350
207	Kab. Demak	37.815.361.239	6.074.794.036	31.740.567.203		37.815.361.239
208	Kab. Grobogan	56.736.550.381	6.427.185.997	50.309.364.384		56.736.550.381
209	Kab. Jepara	50.996.168.777	9.722.621.030	41.273.547.747		50.996.168.777
210	Kab. Karanganyar	38.090.096.537	7.973.010.889	30.117.085.648		38.090.096.537
211	Kab. Kebumen	45.142.259.448	6.923.022.244	38.219.237.204		45.142.259.448
212	Kab. Kendal	44.514.609.080	7.220.926.365	37.293.682.715		44.514.609.080
213	Kab. Klaten	36.095.906.508	7.631.054.608	28.464.851.900		36.095.906.508
214	Kab. Kudus	82.277.072.415	36.023.484.133	46.253.588.282		82.277.072.415
215	Kab. Magelang	43.010.879.152	7.313.345.783	35.697.533.369		43.010.879.152
216	Kab. Pati	46.919.676.673	8.158.233.148	38.761.443.525		46.919.676.673
217	Kab. Pekalongan	30.930.380.189	5.125.951.027	25.804.429.162		30.930.380.189
218	Kab. Pemalang	40.319.731.388	6.248.335.796	34.071.395.592		40.319.731.388
219	Kab. Purbalingga	36.846.219.582	5.935.424.455	30.910.795.127		36.846.219.582
220	Kab. Purworejo	39.890.951.447	6.930.614.699	32.760.336.748	555.520	39.691.506.967
221	Kab. Rembang	39.135.669.927	5.801.715.449	33.333.954.478		39.135.669.927
222	Kab. Semarang	39.673.574.856	9.116.451.205	30.557.123.651		39.673.574.856
223	Kab. Sragen	37.912.613.465	7.275.607.327	30.637.006.138		37.912.613.465
224	Kab. Sukoharjo	42.567.007.160	11.139.367.013	31.427.640.147		42.567.007.160
225	Kab. Tegal	42.821.838.584	6.538.907.179	36.282.931.405		42.821.838.584
226	Kab. Temanggung	34.224.674.946	5.905.872.807	28.318.802.139		34.224.674.946
227	Kab. Wonogiri	39.832.354.717	6.323.142.619	33.509.212.098		39.832.354.717
228	Kab. Wonosobo	36.247.054.173	5.495.786.637	30.751.267.536		36.247.054.173
229	Kota Magelang	19.419.477.709	6.892.110.136	12.527.367.573		19.419.477.709
230	Kota Pekalongan	23.133.589.260	7.560.669.325	15.572.919.935		23.133.589.260
231	Kota Salatiga	18.029.584.721	5.392.613.539	12.636.971.182		18.029.584.721
232	Kota Semarang	198.177.345.461	66.655.109.012	131.522.236.449		198.177.345.461
233	Kota Surakarta	65.670.194.894	19.235.555.452	46.434.639.442		65.670.194.894
234	Kota Tegal	22.737.776.706	6.999.310.252	15.738.466.454		22.737.776.706
235	**Provinsi DI Yogyakarta**	**75.967.201.558**	**43.388.847.824**	**32.578.353.734**		**75.967.201.558**
236	Kab. Bantul	41.854.248.851	9.971.792.532	31.882.456.319		41.854.248.851
237	Kab. Gunung Kidul	33.672.123.129	6.486.405.261	27.085.717.868		33.672.123.129
238	Kab. Kulon Progo	26.645.872.641	5.659.794.389	20.986.078.252		26.645.872.641
239	Kab. Sleman	76.307.664.843	21.270.500.212	55.037.164.631		76.307.664.843
240	Kota Yogyakarta	60.358.787.786	22.093.568.097	38.265.219.689		60.358.787.786
241	**Provinsi Jawa Timur**	**749.274.603.282**	**362.550.431.001**	**386.724.172.281**		**749.274.603.282**
242	Kab. Bangkalan	76.918.739.890	6.620.680.556	70.298.059.334		76.918.739.890
243	Kab. Banyuwangi	65.924.346.067	8.591.135.210	57.333.210.857		65.924.346.067
244	Kab. Blitar	44.846.808.215	7.006.514.302	37.840.293.913		44.846.808.215
245	Kab. Bojonegoro	108.265.176.654	8.183.321.347	100.081.855.307		108.265.176.654
246	Kab. Bondowoso	31.878.926.172	6.288.861.023	25.590.065.149		31.878.926.172
247	Kab. Gresik	133.739.679.160	36.998.626.137	96.741.053.023		133.739.679.160
248	Kab. Jember	70.144.157.018	13.445.310.024	56.698.846.994		70.144.157.018
249	Kab. Jombang	56.131.436.013	9.293.986.594	46.837.449.419		56.131.436.013
250	Kab. Kediri	68.078.994.053	7.952.166.619	60.126.827.434		68.078.994.053
251	Kab. Lamongan	69.301.555.709	7.693.825.126	61.607.730.583		69.301.555.709
252	Kab. Lumajang	38.831.536.646	7.180.179.608	31.651.357.038		38.831.536.646
253	Kab. Madiun	37.059.972.337	6.430.508.972	30.629.463.365		37.059.972.337
254	Kab. Magetan	34.859.738.317	7.797.736.402	27.062.001.915		34.859.738.317
255	Kab. Malang	86.423.219.170	13.435.651.557	72.987.567.613		86.423.219.170
256	Kab. Mojokerto	71.070.361.953	10.851.310.239	60.219.051.714		71.070.361.953
257	Kab. Nganjuk	48.587.680.673	7.373.905.172	41.213.775.501		48.587.680.673
258	Kab. Ngawi	43.641.626.835	7.478.518.637	36.163.108.198		43.641.626.835
259	Kab. Pacitan	33.215.286.694	6.032.387.058	27.182.899.636		33.215.286.694
260	Kab. Pamekasan	52.696.819.017	6.723.283.843	45.973.535.174		52.696.819.017
261	Kab. Pasuruan	71.704.281.246	13.968.707.598	57.735.573.648		71.704.281.246
262	Kab. Ponorogo	48.460.257.412	7.013.588.652	41.446.668.760		48.460.257.412
263	Kab. Probolinggo	51.034.702.707	11.417.852.204	39.616.850.503		51.034.702.707
264	Kab. Sampang	62.135.954.338	6.245.776.842	55.890.177.496		62.135.954.338
265	Kab. Sidoarjo	188.416.912.995	41.770.935.733	146.645.977.262		188.416.912.995
266	Kab. Situbondo	33.761.310.308	6.241.715.058	27.519.595.250		33.761.310.308
267	Kab. Sumenep	139.191.163.773	7.591.790.232	131.589.933.659	9.439.882	139.191.163.773

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Pororangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
268	Kab. Trenggalek	37.987.293.302	6.806.575.892	31.180.717.410		37.987.293.302
269	Kab. Tuban	94.643.681.680	10.417.276.720	84.226.404.960		94.643.681.680
270	Kab. Tulungagung	48.145.726.169	8.462.488.876	39.683.237.293		48.145.726.169
271	Kota Blitar	22.717.457.774	5.961.962.023	16.755.495.751		22.717.457.774
272	Kota Kediri	37.234.938.258	14.167.118.526	23.067.819.732		37.234.938.258
273	Kota Madiun	26.714.560.942	8.497.990.686	18.216.570.256		26.714.560.942
274	Kota Malang	67.329.134.727	20.660.360.977	46.668.773.750		67.329.134.727
275	Kota Mojokerto	24.875.165.543	7.476.313.369	17.398.852.174		24.875.165.543
276	Kota Pasuruan	22.103.453.840	8.659.671.688	13.443.782.152		22.103.453.840
277	Kota Probolinggo	29.224.118.701	6.708.704.455	22.515.414.246		29.224.118.701
278	Kota Surabaya	205.834.217.683	163.995.617.981	41.838.599.702		205.834.217.683
279	Kota Batu	26.141.884.465	5.432.469.101	20.709.415.364		26.141.884.465
280	**Provinsi Kalimantan Barat**	**129.574.069.038**	**39.414.342.530**	**90.159.726.508**		**129.574.069.038**
281	Kab. Bengkayang	25.813.076.439	2.602.462.260	23.210.614.179		25.813.076.439
282	Kab. Landak	41.764.938.987	2.321.586.682	39.443.352.305		41.764.938.987
283	Kab. Kapuas Hulu	52.081.886.706	2.946.093.185	49.135.793.521		52.081.886.706
284	Kab. Ketapang	60.806.176.068	4.464.497.868	56.341.678.200		60.806.176.068
285	Kab. Pontianak	16.442.009.342	2.681.226.288	13.760.783.054		16.442.009.342
286	Kab. Sambas	32.128.552.334	2.965.157.672	29.163.394.662		32.128.552.334
287	Kab. Sanggau	42.567.310.256	4.225.090.956	38.342.219.301		42.567.310.256
288	Kab. Sintang	46.663.499.905	3.857.964.589	42.805.535.316		46.663.499.905
289	Kota Pontianak	51.188.828.843	19.575.058.541	31.613.770.302		51.188.828.843
290	Kota Singkawang	19.450.266.944	3.550.659.582	15.899.607.362		19.450.266.944
291	Kab. Kayong Utara	24.169.210.213	1.515.920.150	22.653.290.063		24.169.210.213
292	Kab. Kubu Raya	31.526.072.454	4.182.850.203	27.341.363.703	1.858.548	31.526.072.454
293	Kab. Sekadau	30.223.866.399	2.096.028.464	28.127.837.935		30.223.866.399
294	Kab. Melawi	29.102.377.117	2.212.095.426	26.890.281.691		29.102.377.117
295	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**139.979.020.917**	**27.773.606.017**	**112.205.414.900**		**139.979.020.917**
296	Kab. Barito Selatan	49.142.231.490	1.803.220.863	47.339.010.627		49.142.231.490
297	Kab. Barito Utara	50.501.154.094	2.130.241.855	48.370.912.239		50.501.154.094
298	Kab. Kapuas	37.447.451.526	2.040.362.828	35.407.088.698		37.447.451.526
299	Kab. Kotawaringin Barat	43.391.289.785	5.567.706.321	37.823.583.464		43.391.289.785
300	Kab. Kotawaringin Timur	51.479.322.931	5.491.495.555	45.987.827.376		51.479.322.931
301	Kota Palangkaraya	26.636.536.128	9.785.862.335	16.850.673.793		26.636.536.128
302	Kab. Barito Timur	40.617.285.111	2.500.078.771	38.117.186.340		40.617.285.111
303	Kab. Murung Raya	48.454.357.539	2.748.959.787	45.705.397.752		48.454.357.539
304	Kab. Pulang Pisau	23.798.599.488	1.540.332.057	22.258.267.431		23.798.599.488
305	Kab. Gunung Mas	27.921.732.104	1.695.923.938	26.225.808.166		27.921.732.104
306	Kab. Lamandau	36.036.222.587	1.328.450.429	34.707.772.158		36.036.222.587
307	Kab. Sukamara	31.145.622.514	1.129.843.581	30.015.778.933		31.145.622.514
308	Kab. Katingan	36.720.504.617	1.402.507.089	35.317.997.528		36.720.504.617
309	Kab. Seruyan	56.414.526.429	2.495.423.603	53.919.102.826		56.414.526.429
310	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**133.981.322.525**	**53.189.100.779**	**80.792.221.746**		**133.981.322.525**
311	Kab. Banjar	26.279.021.118	4.926.804.609	21.352.216.509		26.279.021.118
312	Kab. Barito Kuala	17.469.046.651	3.010.782.592	14.458.264.059		17.469.046.651
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	27.836.668.510	3.421.282.366	24.415.386.144		27.836.668.510
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	23.427.141.768	3.749.029.532	19.678.112.236		23.427.141.768
315	Kab. Hulu Sungai Utara	32.430.848.023	2.908.378.524	29.522.469.499		32.430.848.023
316	Kab. Kotabaru	43.761.136.753	10.822.958.952	32.938.177.801		43.761.136.753
317	Kab. Tabalong	84.652.478.443	6.994.744.008	77.657.734.435		84.652.478.443
318	Kab. Tanah Laut	30.902.909.987	5.472.759.784	25.430.150.203		30.902.909.987
319	Kab. Tapin	29.256.232.377	3.305.126.791	25.951.105.586		29.256.232.377
320	Kota Banjarbaru	25.580.835.879	6.793.303.189	18.787.532.690		25.580.835.879
321	Kota Banjarmasin	45.151.304.651	20.764.930.351	24.386.374.300		45.151.304.651
322	Kab. Balangan	47.495.703.633	3.900.627.207	43.595.076.426		47.495.703.633
323	Kab. Tanah Bumbu	32.934.637.912	5.886.474.659	27.048.163.253		32.934.637.912
324	**Provinsi Kalimantan Timur**	**689.011.005.481**	**236.758.447.999**	**452.252.557.482**		**689.011.005.481**
325	Kab. Berau	60.760.832.594	12.744.183.087	48.016.649.507		60.760.832.594
326	Kab. Bulungan	128.872.793.668	10.430.323.913	118.442.469.755		128.872.793.668
327	Kab. Kutai Kartanegara	628.803.000.908	23.257.055.052	605.545.945.856		628.803.000.908
328	Kab. Kutai Barat	83.361.115.790	17.446.688.534	65.914.427.256		83.361.115.790
329	Kab. Kutai Timur	203.128.838.090	36.344.172.214	166.784.665.876		203.128.838.090
330	Kab. Malinau	67.186.948.601	8.949.814.364	58.237.134.237		67.186.948.601
331	Kab. Nunukan	138.839.440.517	9.707.782.851	129.131.657.666		138.839.440.517
332	Kab. Pasir	71.628.963.654	14.498.691.633	57.130.272.021		71.628.963.654
333	Kota Balikpapan	201.263.407.177	102.317.304.798	98.946.102.379		201.263.407.177
334	Kota Bontang	168.161.221.208	48.592.379.247	119.568.841.961		168.161.221.208
335	Kab. Tana Tidung	43.670.715.318	8.139.596.178	35.529.260.592	1.858.548	43.670.715.318
336	Kota Samarinda	156.890.953.417	39.261.206.344	117.629.747.073		156.890.953.417
337	Kota Tarakan	152.685.763.185	14.252.015.793	138.433.747.392		152.685.763.185
338	Kab. Penajam Paser Utara	135.984.883.984	9.196.457.979	126.788.426.005		135.984.883.984
339	**Provinsi Sulawesi Utara**	**78.499.839.559**	**32.482.598.445**	**46.017.241.114**	**608.000**	**78.500.447.559**
340	Kab. Bolaang Mongondow	18.663.726.928	1.575.318.708	17.088.408.220		18.663.726.928
341	Kab. Minahasa	25.921.466.546	2.604.468.011	23.316.997.535		25.921.466.546
342	Kab. Sangihe	12.581.814.484	2.454.994.752	10.126.819.732		12.581.814.484
343	Kota Bitung	20.908.226.064	2.550.791.934	18.357.434.130		20.908.226.064
344	Kota Manado	49.203.812.214	20.319.253.584	28.884.558.630	2.432.000	49.206.244.214
345	Kab. Kepulauan Talaud	17.236.232.690	1.553.924.770	15.682.307.920		17.236.232.690
346	Kab. Minahasa Selatan	18.326.498.048	1.849.342.986	16.477.155.062		18.326.498.048
347	Kab. Minahasa Tenggara	17.552.151.875	1.551.408.705	16.000.743.170		17.552.151.875
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	15.650.780.101	1.848.242.349	13.802.537.752		15.650.780.101
349	Kota Kotamubagu	15.559.469.725	2.460.106.188	13.099.363.537		15.559.469.726
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	19.605.972.622	2.470.090.747	17.134.023.327	1.858.548	19.605.972.622
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	11.423.660.824	1.230.320.596	10.191.481.680	1.858.548	11.423.660.824
352	Kota Tomohon	24.871.926.489	2.192.632.847	22.679.293.642		24.871.926.489
353	Kab. Minahasa Utara	21.938.509.743	3.007.861.101	18.930.648.642		21.938.509.743
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	18.168.550.014	1.210.124.085	16.958.425.929		18.168.550.014
355	**Provinsi Gorontalo**	**27.089.345.823**	**9.573.778.260**	**17.515.567.563**		**27.089.345.823**
356	Kab. Boalemo	20.979.429.229	1.201.370.757	19.778.058.472		20.979.429.229

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
357	Kab. Gorontalo	18.150.344.563	3.132.451.546	15.017.893.017		18.150.344.563
358	Kota Gorontalo	21.051.511.743	5.897.090.665	15.154.421.078		21.051.511.743
359	Kab. Pohuwato	21.528.690.873	1.316.615.508	20.212.075.365		21.528.690.873
360	Kab. Gorontalo Utara	18.239.716.097	1.136.486.686	17.103.229.411		18.239.716.097
361	Kab. Bone Bolango	23.472.785.510	1.676.652.221	21.796.133.289		23.472.785.510
362	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**74.095.879.565**	**18.746.702.211**	**55.349.177.354**	**108.960**	**74.095.988.525**
363	Kab. Banggai	32.278.447.747	3.294.996.806	28.983.450.941		32.278.447.747
364	Kab. Banggai Kepulauan	26.133.466.138	1.397.404.605	24.736.061.533		26.133.466.138
365	Kab. Buol	23.718.071.770	1.490.540.216	22.227.531.554		23.718.071.770
366	Kab. Toli-Toli	20.246.319.534	1.850.940.822	18.395.378.712		20.246.319.534
367	Kab. Donggala	27.767.335.758	1.497.557.016	26.269.778.742		27.767.335.758
368	Kab. Morowali	50.550.106.420	1.597.732.811	48.952.373.609		50.550.106.420
369	Kab. Poso	32.018.091.691	1.993.957.698	30.024.133.993		32.018.091.691
370	Kota Palu	28.228.846.085	10.395.808.296	17.833.037.789	435.840	28.229.281.925
371	Kab. Parigi Moutong	26.695.609.028	1.941.328.482	24.754.280.546		26.695.609.028
372	Kab. Sigi	19.705.769.439	1.451.764.480	18.252.146.411	1.858.548	19.705.769.439
373	Kab. Tojo Una Una	26.750.102.242	1.341.093.910	25.409.016.332		26.750.102.242
374	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**228.149.178.792**	**96.747.423.919**	**131.401.754.873**	**12.167.086**	**228.161.345.878**
375	Kab. Bantaeng	25.750.697.126	2.613.574.445	23.137.122.681		25.750.697.126
376	Kab. Barru	25.682.579.586	3.011.893.179	22.670.686.407		25.682.579.586
377	Kab. Bone	48.558.668.454	5.742.365.891	42.816.302.563		48.558.668.454
378	Kab. Bulukumba	30.869.442.871	4.351.305.647	26.518.137.224		30.869.442.871
379	Kab. Enrekang	30.439.165.207	2.924.630.438	27.514.534.769		30.439.165.207
380	Kab. Gowa	34.792.384.789	4.680.945.979	30.111.438.810		34.792.384.789
381	Kab. Jeneponto	27.899.029.204	3.342.226.367	24.556.802.837		27.899.029.204
382	Kab. Luwu	25.111.212.774	2.552.692.396	22.558.520.378		25.111.212.774
383	Kab. Luwu Utara	36.510.458.428	3.054.392.300	33.456.066.128		36.510.458.428
384	Kab. Maros	30.148.155.915	5.053.616.803	25.094.539.112		30.148.155.915
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	34.112.925.491	8.506.815.434	25.606.110.057		34.112.925.491
386	Kab. Pinrang	29.592.464.881	3.594.293.614	25.998.171.267		29.592.464.881
387	Kab. Selayar	23.465.996.558	2.511.001.639	20.954.994.919		23.465.996.558
388	Kab. Sidenreng Rappang	37.270.195.213	3.747.077.852	33.523.117.361		37.270.195.213
389	Kab. Sinjai	24.704.802.191	2.942.018.122	21.762.784.069		24.704.802.191
390	Kab. Soppeng	27.209.220.060	3.350.858.878	23.858.361.182		27.209.220.060
391	Kab. Takalar	22.102.466.464	3.185.078.274	18.917.388.190		22.102.466.464
392	Kab. Tana Toraja	21.314.236.791	3.589.620.673	17.724.616.118		21.314.236.791
393	Kab. Wajo	69.005.048.217	4.124.161.768	64.880.886.449		69.005.048.217
394	Kota Pare-pare	24.657.858.284	4.803.978.917	19.853.879.367		24.657.858.284
395	Kab. Toraja Utara	17.833.415.930	2.332.647.801	15.498.909.581	1.858.548	17.833.415.930
396	Kota Makassar	124.938.419.026	44.449.259.514	80.489.159.512	48.668.344	124.987.087.370
397	Kota Palopo	20.014.404.521	4.290.512.783	15.723.891.738		20.014.404.521
398	Kab. Luwu Timur	55.811.588.691	16.548.731.196	39.262.857.495		55.811.588.691
399	**Provinsi Sulawesi Barat**	**35.299.676.103**	**7.519.328.471**	**27.780.347.632**		**35.299.676.103**
400	Kab. Majene	30.082.269.896	1.621.826.187	28.460.443.709		30.082.269.896
401	Kab. Mamuju	38.185.471.027	3.822.233.858	34.363.237.169		38.185.471.027
402	Kab. Polewali Mandar	28.822.873.918	2.095.752.814	26.727.121.104		28.822.873.918
403	Kab. Mamasa	25.936.639.517	2.140.599.574	23.796.039.943		25.936.639.517
404	Kab. Mamuju Utara	36.024.612.298	1.598.580.270	34.426.032.028		36.024.612.298
405	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**64.300.027.567**	**17.889.891.375**	**46.410.136.192**		**64.300.027.567**
406	Kab. Buton	28.401.607.017	1.647.382.099	26.754.224.918		28.401.607.017
407	Kab. Konawe	21.885.402.279	1.705.435.813	20.179.966.466		21.885.402.279
408	Kab. Kolaka	35.239.647.687	3.759.228.933	31.480.418.754		35.239.647.687
409	Kab. Muna	20.869.205.772	1.956.545.294	18.912.660.478		20.869.205.772
410	Kota Kendari	30.113.943.112	8.425.188.523	21.688.754.589		30.113.943.112
411	Kota Bau-bau	21.921.212.669	2.447.064.756	19.474.147.913		21.921.212.669
412	Kab. Konawe Selatan	27.833.606.017	1.913.328.670	25.920.277.347		27.833.606.017
413	Kab. Bombana	22.292.033.350	1.267.525.018	21.024.508.332		22.292.033.350
414	Kab. Konawe Utara	19.901.919.873	882.723.451	19.019.196.422		19.901.919.873
415	Kab. Buton Utara	11.859.370.880	784.488.680	11.074.882.200		11.859.370.880
416	Kab. Wakatobi	21.062.279.801	1.112.451.024	19.949.828.777		21.062.279.801
417	Kab. Kolaka Utara	25.026.002.446	1.029.890.448	23.996.111.998		25.026.002.446
418	**Provinsi Bali**	**125.876.815.912**	**68.003.435.898**	**57.873.380.014**		**125.876.815.912**
419	Kab. Badung	122.938.222.446	24.765.877.126	98.172.345.320		122.938.222.446
420	Kab. Bangli	21.145.051.976	4.465.805.887	16.679.246.089		21.145.051.976
421	Kab. Buleleng	34.128.234.848	7.505.435.993	26.622.798.855		34.128.234.848
422	Kab. Gianyar	28.390.935.408	8.141.488.965	20.249.446.443		28.390.935.408
423	Kab. Jembrana	21.192.434.178	5.270.827.568	15.921.606.610		21.192.434.178
424	Kab. Karangasem	26.269.698.665	6.222.898.676	20.046.799.989		26.269.698.665
425	Kab. Klungkung	16.382.046.225	4.915.363.681	11.466.682.544		16.382.046.225
426	Kab. Tabanan	29.303.333.462	6.308.435.991	22.994.897.471		29.303.333.462
427	Kota Denpasar	105.588.213.533	35.280.924.182	70.307.289.351		105.588.213.533
428	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**86.389.586.124**	**45.759.624.971**	**40.629.961.153**		**86.389.586.124**
429	Kab. Bima	20.211.150.694	2.401.767.395	17.809.383.299		20.211.150.694
430	Kab. Dompu	18.998.486.178	3.210.335.276	15.788.150.902		18.998.486.178
431	Kab. Lombok Barat	21.690.745.068	3.368.293.740	18.322.451.328		21.690.745.068
432	Kab. Lombok Tengah	34.149.757.938	4.624.217.942	29.525.539.996		34.149.757.938
433	Kab. Lombok Timur	30.600.345.040	5.387.762.894	25.212.582.146		30.600.345.040
434	Kab. Sumbawa	34.509.283.603	4.417.076.694	30.092.206.909		34.509.283.603
435	Kota Mataram	37.324.640.715	14.238.387.005	23.086.253.710		37.324.640.715
436	Kab. Lombok Utara	17.365.460.608	2.861.974.085	14.501.627.975	1.858.548	17.365.460.608
437	Kota Bima	22.368.244.751	5.061.079.401	17.307.165.350		22.368.244.751
438	Kab. Sumbawa Barat	50.912.141.339	23.125.299.679	27.786.841.660		50.912.141.339
439	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**86.267.755.947**	**28.319.405.420**	**57.948.350.527**		**86.267.755.947**
440	Kab. Alor	19.085.279.640	1.517.889.872	17.567.389.768		19.085.279.640
441	Kab. Belu	21.769.637.568	2.101.860.635	19.667.776.933		21.769.637.568
442	Kab. Ende	17.572.537.856	2.155.442.131	15.417.095.725		17.572.537.856
443	Kab. Flores Timur	19.581.563.240	1.644.876.055	17.936.687.185		19.581.563.240
444	Kab. Kupang	20.203.117.901	1.750.820.664	18.452.297.237		20.203.117.901
445	Kab. Lembata	17.230.116.846	1.224.596.760	16.005.520.086		17.230.116.846

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
446	Kab. Manggarai	15.235.717.680	2.276.385.136	12.959.332.544		15.235.717.680
447	Kab. Ngada	15.207.260.355	1.221.858.432	13.985.401.923		15.207.260.355
448	Kab. Sikka	19.572.930.458	1.677.756.245	17.895.174.213		19.572.930.458
449	Kab. Sumba Barat	14.574.098.478	1.459.439.854	13.114.658.624		14.574.098.478
450	Kab. Sumba Timur	22.794.161.942	1.759.853.176	21.034.308.766		22.794.161.942
451	Kab. Timor Tengah Selatan	25.660.377.735	1.216.070.288	24.444.307.447		25.660.377.735
452	Kab. Timor Tengah Utara	21.721.405.190	1.473.057.957	20.248.347.233		21.721.405.190
453	Kota Kupang	31.672.257.721	14.430.883.420	17.241.374.301		31.672.257.721
454	Kab. Rote Ndao	19.967.442.819	1.253.410.984	18.714.031.835		19.967.442.819
455	Kab. Nagekeo	16.782.194.539	969.062.140	15.813.132.399		16.782.194.539
456	Kab. Sumba Tengah	13.832.788.440	818.879.738	13.013.908.702		13.832.788.440
457	Kab. Sumba Barat Daya	18.344.697.375	696.067.050	17.648.630.325		18.344.697.375
458	Kab. Manggarai Timur	17.013.122.720	695.532.706	16.315.731.466	1.858.548	17.013.122.720
459	Kab. Sabu Raijua	11.642.947.018	780.051.100	10.862.895.918		11.642.947.018
460	Kab. Manggarai Barat	17.536.822.975	1.447.504.597	16.089.318.378		17.536.822.975
461	**Provinsi Maluku**	**75.165.354.347**	**13.159.146.317**	**61.994.288.030**	**11.920.000**	**75.165.354.347**
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	26.873.795.622	693.241.830	26.132.873.792	47.680.000	26.873.795.622
463	Kab. Maluku Tengah	44.708.586.662	1.722.246.011	42.986.340.651		44.708.586.662
464	Kab. Maluku Tenggara	25.412.481.203	1.598.567.662	23.813.913.541		25.412.481.203
465	Kab. Pulau Buru	19.195.803.788	653.851.582	18.541.952.206		19.195.803.788
466	Kota Ambon	31.276.356.016	9.636.467.808	21.639.887.208		31.276.356.016
467	Kab. Seram Bagian Barat	24.961.440.552	957.904.810	24.003.535.742		24.961.440.552
468	Kab. Seram Bagian Timur	62.526.135.569	773.803.758	61.752.331.811		62.526.135.569
469	Kab. Maluku Barat Daya	24.149.122.355	1.441.953.719	22.705.310.088	1.858.548	24.149.122.355
470	Kab. Buru Selatan	15.727.077.623	953.462.094	14.771.756.981	1.858.548	15.727.077.623
471	Kab. Kepulauan Aru	28.825.100.755	827.749.076	27.997.351.679		28.825.100.755
472	Kota Tual	13.010.332.520	631.305.300	12.377.168.672	1.858.548	13.010.332.520
473	**Provinsi Maluku Utara**	**67.695.365.816**	**14.808.055.305**	**52.877.310.511**	**77.664**	**67.685.443.480**
474	Kab. Halmahera Tengah	32.910.631.739	1.354.289.206	31.556.342.533		32.910.631.739
475	Kab. Halmahera Barat	27.759.098.491	1.177.810.509	26.581.287.982		27.759.098.491
476	Kota Ternate	42.803.254.861	9.054.661.261	33.748.593.600		42.803.254.861
477	Kab. Halmahera Timur	42.160.079.924	1.336.079.061	40.824.000.863		42.160.079.924
478	Kota Tidore Kepulauan	28.914.683.174	3.246.853.462	25.667.829.712	310.656	28.914.993.830
479	Kab. Kepulauan Sula	31.934.389.258	1.378.018.173	30.556.371.085		31.934.389.258
480	Kab. Pulau Morotai	14.292.876.863	824.783.508	13.468.093.355		14.292.876.863
481	Kab. Halmahera Selatan	42.305.017.823	1.525.463.825	40.779.553.998		42.305.017.823
482	Kab. Halmahera Utara	32.353.736.109	6.123.928.533	26.229.807.576		32.353.736.109
483	Kab. Yalimo	12.674.821.892	1.650.377.278	11.022.586.066	1.858.548	12.674.821.892
484	Kab. Lanny Jaya	18.185.582.506	1.658.971.989	16.524.751.969	1.858.548	18.185.582.506
485	**Provinsi Papua**	**269.220.796.195**	**93.578.012.407**	**175.642.783.788**	**4.632.000**	**269.225.428.195**
486	Kab. Biak Numfor	22.634.431.895	3.773.719.609	18.860.712.286		22.634.431.895
487	Kab. Jayapura	37.025.017.351	2.220.143.719	34.804.873.632		37.025.017.351
488	Kab. Jayawijaya	27.340.229.831	3.150.590.420	24.189.639.411		27.340.229.831
489	Kab. Merauke	51.792.324.368	4.128.510.574	47.663.813.794		51.792.324.368
490	Kab. Mimika	152.139.586.784	67.162.529.279	84.977.057.505		152.139.586.784
491	Kab. Nabire	31.531.920.369	2.825.933.061	28.705.987.308		31.531.920.369
492	Kab. Paniai	20.624.244.239	2.330.588.083	18.293.656.156		20.624.244.239
493	Kab. Puncak Jaya	29.910.320.912	1.871.288.245	28.039.032.667		29.910.320.912
494	Kab. Kepulauan Yapen	35.300.024.955	2.479.487.424	32.820.537.531		35.300.024.955
495	Kota Jayapura	36.579.911.123	15.619.702.983	20.960.208.140	18.528.000	36.598.439.123
496	Kab. Sarmi	33.596.814.038	1.773.484.298	31.823.329.740		33.596.814.038
497	Kab. Keerom	32.129.071.515	1.850.102.039	30.278.969.476		32.129.071.515
498	Kab. Yahukimo	40.964.877.219	1.568.476.488	39.396.400.731		40.964.877.219
499	Kab. Pegunungan Bintang	43.799.843.411	2.145.365.903	41.654.477.508		43.799.843.411
500	Kab. Tolikara	33.537.541.739	1.628.753.007	31.908.788.732		33.537.541.739
501	Kab. Boven Digoel	48.057.877.276	3.259.269.708	44.798.607.568		48.057.877.276
502	Kab. Mappi	48.641.355.871	2.363.746.111	46.277.609.760		48.641.355.871
503	Kab. Asmat	43.044.586.353	2.182.128.028	40.862.458.325		43.044.586.353
504	Kab. Waropen	47.431.622.579	1.621.263.661	45.810.358.918		47.431.622.579
505	Kab. Mamberamo Raya	32.311.579.169	1.467.746.627	30.843.832.542		32.311.579.169
506	Kab. Mamberamo Tengah	12.462.955.454	1.561.625.792	10.899.471.114	1.858.548	12.462.955.454
507	Kab. Nduga	13.671.421.352	1.618.966.694	12.050.596.110	1.858.548	13.671.421.352
508	Kab. Doglyai	21.410.808.504	1.604.446.976	19.804.502.980	1.858.548	21.410.808.504
509	Kab. Intan Jaya	18.736.023.523	1.884.175.767	16.851.847.756		18.736.023.523
510	Kab. Puncak	20.831.503.720	1.851.077.597	18.978.567.575	1.858.548	20.831.503.720
511	Kab. Deiyai	14.656.136.394	1.805.309.037	12.850.827.357		14.656.136.394
512	Kab. Supiori	19.221.880.445	1.530.618.901	17.691.261.544		19.221.880.445
513	**Provinsi Papua Barat**	**193.487.364.909**	**19.571.327.011**	**173.916.037.898**		**193.487.364.909**
514	Kab. Sorong	123.976.789.418	2.978.835.639	120.997.953.779		123.976.789.418
515	Kab. Manokwari	101.795.316.981	4.048.409.857	97.746.907.124		101.795.316.981
516	Kab. Fak Fak	56.497.693.999	1.962.081.389	54.535.612.610		56.497.693.999
517	Kota Sorong	51.533.298.971	5.666.622.926	45.866.676.045		51.533.298.971
518	Kab. Sorong Selatan	67.926.287.677	1.593.989.048	66.332.298.629		67.926.287.677
519	Kab. Raja Ampat	75.314.932.736	1.469.272.115	73.845.660.621		75.314.932.736
520	Kab. Teluk Bintuni	180.699.272.969	6.936.572.665	173.762.700.304		180.699.272.969
521	Kab. Teluk Wondama	36.125.045.838	1.764.183.735	34.360.862.103		36.125.045.838
522	Kab. Tambrauw	28.646.384.357	828.374.994	27.818.009.363		28.646.384.357
523	Kab. Maybrat	31.491.387.889	821.175.887	30.670.212.002		31.491.387.889
524	Kab. Kaimana	50.212.785.930	1.407.454.194	48.805.331.736		50.212.785.930
525	dana cadangan	-			0	0
526	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	-	0		0	0
	JUMLAH	**41.518.926.404.416**	**13.237.326.489.261**	**28.281.482.553.025**	**6.747.876.892**	**41.525.556.919.178**

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**1.045.679.248.163**	**461.418.591.414**	**847.632.080.961**	**1.709.192.511**	**0**	**231.964.748**	**0**	**1.310.991.829.634**
2	Kab. Aceh Barat	10.169.918.284	2.125.374.276	10.076.953.503	400.894.778	0	17.098.560	278.036.633	12.898.357.750
3	Kab. Aceh Besar	10.961.434.410	2.125.374.276	10.076.953.503	1.204.225.478	0	4.204.999	278.036.633	13.688.794.889
4	Kab. Aceh Selatan	10.974.231.123	2.125.374.276	10.076.953.503	1.557.138.703	0	57.248.641	278.036.633	14.094.751.756
5	Kab. Aceh Singkil	9.897.500.216	2.125.374.276	10.076.953.503	128.734.201	0	15.762.081	278.036.633	12.624.860.694
6	Kab. Aceh Tengah	10.590.889.069	2.125.374.276	10.076.953.503	828.280.346	0	9.604.789	278.036.633	13.318.249.547
7	Kab. Aceh Tenggara	9.876.305.919	2.125.374.276	10.076.953.503	119.096.986	0	4.204.999	278.036.633	12.603.666.397
8	Kab. Aceh Timur	12.973.198.774	2.245.466.730	11.628.877.681	135.006.997	0	115.335.707	278.036.633	14.402.723.748
9	Kab. Aceh Utara	203.115.302.038	38.876.376.805	220.761.804.554	119.096.986	0	30.065.182	278.036.633	260.065.380.160
10	Kab. Bireun	9.880.785.289	2.125.374.276	10.076.953.503	123.576.356	0	4.204.999	278.036.633	12.608.145.767
11	Kab. Pidie	9.950.107.102	2.125.374.276	10.076.953.503	176.962.801	0	25.062.601	278.036.633	12.682.389.814
12	Kab. Simeulue	9.880.350.748	2.125.374.276	10.076.953.503	119.096.986	0	8.249.828	278.036.633	12.607.711.226
13	Kota Banda Aceh	9.876.305.919	2.125.374.276	10.076.953.503	119.096.986	0	4.204.999	**278.036.633**	12.603.666.397
14	Kota Sabang	9.876.305.919	2.125.374.276	10.076.953.503	119.096.986	0	4.204.999	278.036.633	12.603.666.397
15	Kota Langsa	9.894.151.673	2.125.374.276	10.076.953.503	119.096.986	0	22.050.753	278.036.633	12.621.512.151
16	Kota Lhokseumawe	9.876.305.919	2.125.374.276	10.076.953.503	119.096.986	0	4.204.999	278.036.633	12.603.666.397
17	Kab. Nagan Raya	10.006.457.180	2.125.374.276	10.076.953.503	245.247.386	0	8.205.860	278.036.633	12.733.817.658
18	Kab. Aceh Jaya	9.882.281.112	2.125.374.276	10.076.953.503	124.845.071	0	747.271.124	278.036.633	13.352.480.607
19	Kab. Pidie Jaya	9.876.398.774	2.125.374.276	10.076.953.503	119.189.841	0	4.204.999	278.036.633	12.603.759.252
20	Kab. Aceh Barat Daya	10.036.050.025	2.125.374.276	10.076.953.503	341.974.396	0	4.922.052	278.036.633	12.827.260.860
21	Kab. Gayo Lues	10.070.243.333	2.125.374.276	10.076.953.503	313.034.400	0	4.204.999	278.036.633	12.797.603.811
22	Kab. Aceh Tamiang	16.333.210.727	9.887.139.084	10.041.936.173	123.350.606	0	19.173.182	278.036.633	20.349.635.678
23	Kab. Bener Meriah	9.963.972.865	2.125.374.276	10.076.953.503	119.096.986	0	93.547.532	278.036.633	12.693.008.930
24	Kota Subulussalam	9.887.642.654	2.125.374.276	10.076.953.503	130.433.721	0	4.204.999	278.036.633	12.615.003.132
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**4.210.104.909**	**1.243.908.431**	**654.396.105**	**311.161.085**	**0**	**3.014.376.983**		**5.223.842.604**
26	Kab. Asahan	493.814.979	78.452.026	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	585.786.975
27	Kab. Dairi	598.848.798	78.452.026	40.899.755	138.542.517	0	188.585.863	278.036.633	724.516.794
28	Kab. Deli Serdang	554.162.152	81.823.332	98.313.200		0	188.398.561	278.036.633	646.571.726
29	Kab. Tanah Karo	511.103.224	78.452.026	40.899.755	28.779.520	0	188.942.876	278.036.633	615.110.810
30	Kab. Labuhan Batu	493.814.979	78.452.026	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	585.786.975
31	Kab. Langkat	3.519.383.186	2.206.331.674	1.195.205.602		0	188.398.561	278.036.633	3.867.972.470
32	Kab. Mandailing Natal	2.095.286.672	78.452.026	40.899.755	227.410.032	0	2.238.807.206	278.036.633	2.863.605.652
33	Kab. Nias	493.814.979	78.452.026	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	585.786.975
34	Kab. Simalungun	2.311.551.694	78.452.026	40.899.755		0	2.445.972.897	278.036.633	2.843.361.311
35	Kab. Tapanuli Selatan	2.598.311.158	78.452.026	40.899.755	258.130.833	0	2.186.136.225	278.036.633	2.841.655.472
36	Kab. Tapanuli Tengah	566.958.577	78.452.026	40.899.755	73.143.598	0	188.398.561	278.036.633	658.930.573
37	Kab. Tapanuli Utara	924.625.276	78.452.026	40.899.755	441.720.357	0	268.805.930	278.036.633	1.107.914.701
38	Kab. Toba Samosir	573.417.585	78.452.026	40.899.755	30.604.800	0	249.984.619	278.036.633	677.977.833
39	Kota Binjai	942.778.121	356.585.911	244.355.600		0	188.398.561	278.036.633	1.067.356.705
40	Kota Medan	493.814.979	78.452.026	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	585.786.975
41	Kota Pematang Siantar	493.814.979	78.452.026	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	585.786.975
42	Kota Sibolga	493.814.979	78.452.026	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	585.786.975
43	Kota Tanjung Balai	493.814.979	78.452.026	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	585.786.975
44	Kab. Batu Bara	493.814.979	78.452.026	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	585.786.975
45	Kab. Labuhan Batu Utara	498.102.590	75.216.603	40.899.755		0	207.374.746	278.036.633	601.527.737
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	661.407.942	75.216.603	40.899.755		0	441.620.938	278.036.633	835.773.929
47	Kab. Padang Lawas Utara	490.579.556	75.216.603	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	582.551.552
48	Kab. Padang Lawas	7.763.088.844	75.216.603	40.899.755		0	8.886.646.285	278.036.633	9.280.799.276
49	Kab. Nias Utara	482.929.163	75.216.603	40.899.755		0	188.398.561	270.386.240	574.901.159
50	Kab. Nias Barat	482.929.163	75.216.603	40.899.755		0	188.398.561	270.386.240	574.901.159
51	Kota Tebing Tinggi	493.814.979	78.452.026	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	585.786.975

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kota Padang Sidempuan	623.216.559	78.452.026	40.899.755	129.401.580	0	188.398.561	278.036.633	715.188.555
53	Kab. Pakpak Bharat	501.544.974	78.452.026	40.899.755	7.729.995	0	188.398.561	278.036.633	593.516.970
54	Kab. Nias Selatan	3.504.973.204	78.452.026	40.899.755		0	3.563.898.038	278.036.633	3.961.286.452
55	Kab. Humbang Hasundutan	4.247.301.494	78.452.026	40.899.755	403.445	0	4.905.693.574	278.036.633	5.303.485.433
56	Kab. Serdang Bedagai	493.814.979	78.452.026	40.899.755		0	188.398.561	278.036.633	585.786.975
57	Kab. Samosir	597.157.013	78.452.026	40.899.755		0	315.434.503	278.036.633	712.822.917
58	Kota Gunung sitoli	482.929.163	75.216.603	40.899.755		0	188.398.561	270.386.240	574.901.159
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**9.044.640.793**			**7.180.770.700**	**0**	**2.758.247.102**		**9.939.017.802**
60	Kab. Limapuluh Kota	1.416.225.943			961.534.379	0	278.215.646	278.036.633	1.517.786.658
61	Kab. Agam	1.254.811.705			784.524.869	0	296.288.973	278.036.633	1.358.850.475
62	Kab. Kepulauan Mentawai	4.727.770.663			777.752.389	0	4.351.338.882	278.036.633	5.407.127.904
63	Kab. Padang Pariaman	1.232.342.848			777.752.389	0	277.706.208	278.036.633	1.333.495.230
64	Kab. Pasaman	1.367.987.805			893.803.534	0	302.296.621	278.036.633	1.474.136.788
65	Kab. Pesisir Selatan	1.349.112.859			878.684.049	0	296.099.589	278.036.633	1.452.820.271
66	Kab. Sijunjung	3.059.416.433			2.557.713.810	0	1.347.772.813	278.036.633	4.183.523.256
67	Kab. Solok	1.605.971.401			1.121.935.018	0	316.187.894	278.036.633	1.716.159.545
68	Kab. Tanah Datar	1.249.584.575			792.702.533	0	280.711.338	278.036.633	1.351.450.504
69	Kota Bukit Tinggi	1.232.342.848			777.752.389	0	277.706.208	278.036.633	1.333.495.230
70	Kota Padang Panjang	1.232.342.848			777.752.389	0	277.706.208	278.036.633	1.333.495.230
71	Kota Padang	1.232.342.848			777.752.389	0	277.706.208	278.036.633	1.333.495.230
72	Kota Payakumbuh	1.232.342.848			777.752.389	0	277.706.208	278.036.633	1.333.495.230
73	Kota Sawahlunto	8.304.443.577			7.903.615.429	0	277.706.208	278.036.633	8.459.358.270
74	Kota Solok	1.232.342.848			777.752.389	0	277.706.208	278.036.633	1.333.495.230
75	Kota Pariaman	1.232.342.848			777.752.389	0	277.706.208	278.036.633	1.333.495.230
76	Kab. Pasaman Barat	1.544.242.545			785.377.830	0	595.616.667	278.036.633	1.659.031.130
77	Kab. Dharmasraya	5.180.828.394			4.585.919.263	0	447.382.360	278.036.633	5.311.338.256
78	Kab. Solok Selatan	15.215.624.272			1.577.873.190	0	16.136.646.338	278.036.633	17.992.556.161
79	**Provinsi Riau**	**1.879.530.652.896**	**2.165.313.487.210**	**173.843.093**	**11.726.751.442**	**0**	**28.386.116.054**		**2.205.600.197.799**
80	Kab. Bengkalis	2.139.036.575.369	2.434.972.007.932	31.607.836	2.061.147.721	0	64.035.086.230	278.036.633	2.501.377.886.352
81	Kab. Indragiri Hilir	408.040.433.037	395.604.255.138	31.607.836	4.367.337.334	0	79.020.258.605	278.036.633	479.301.495.546
82	Kab. Indragiri Hulu	368.066.209.099	402.968.519.197	31.607.836	18.604.492.010	0	9.972.482.434	278.036.633	431.855.138.110
83	Kab. Kampar	701.452.268.429	820.545.657.931	31.607.836	2.159.075.341	0	5.728.974.159	278.036.633	828.743.351.900
84	Kab. Kuantan Singingi	348.977.694.406	395.604.255.138	31.607.836	5.475.036.096	0	7.382.312.839	278.036.633	408.771.248.542
85	Kab. Pelalawan	380.588.449.435	405.821.763.406	347.686.185	2.068.762.706	0	38.941.681.101	278.036.633	447.457.930.031
86	Kab. Rokan Hilir	893.311.365.950	1.038.430.795.062	31.607.836	2.061.147.721	0	7.375.610.713	278.036.633	1.048.177.197.965
87	Kab. Rokan Hulu	361.831.742.974	413.891.445.130	31.607.836	2.084.664.571	0	8.641.288.547	278.036.633	424.927.042.717
88	Kab. Siak	1.008.446.488.489	1.152.950.100.675	31.607.836	2.226.912.551	0	31.293.821.207	278.036.633	1.186.780.478.902
89	Kota Dumai	358.410.620.721	395.604.255.138	31.607.836	2.061.147.721	0	20.198.370.421	278.036.633	418.173.417.749
90	Kota Pekanbaru	343.811.119.892	395.636.531.797	31.607.836	2.061.147.721	0	5.107.706.731	278.036.633	403.115.030.718
91	Kab. Kepulauan Meranti	361.603.059.147	409.224.362.302	31.607.836	1.949.083.352	0	20.610.749.400	270.386.240	432.086.189.130
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**487.589.022.531**	**327.814.152.843**	**256.350.872.517**	**27.408.860.720**	**0**	**2.490.215**		**611.576.376.295**
93	Kab. Bintan	175.194.178.995	111.230.107.978	82.578.589.229	22.950.671.902	0	830.071	278.036.633	217.038.235.813
94	Kab. Natuna	599.974.221.199	464.760.834.102	263.801.125.308	8.591.251.699	0	830.071	278.036.633	737.432.077.813
95	Kab. Karimun	175.941.529.718	111.230.107.978	82.578.589.229	23.952.500.317	0	5.348.894	278.036.633	218.044.583.051
96	Kota Batam	162.885.591.316	111.230.107.978	82.578.589.229	8.591.251.699	0	8.327.101	278.036.633	202.686.312.640
97	Kab. Kepulauan Anambas	325.092.984.198	249.383.424.620	159.223.399.353	8.591.251.699	0	830.071	278.036.633	417.476.942.376
98	Kota Tanjung Pinang	166.205.844.489	111.230.107.978	82.578.589.229	11.974.751.036	0	830.071	278.036.633	206.062.314.947
99	Kab. Lingga	166.125.728.913	111.230.107.978	82.578.589.229	11.957.365.802	0	830.071	278.036.633	206.044.929.713
100	**Provinsi Jambi**	**245.010.599.802**	**120.842.773.633**	**162.080.234.322**	**11.557.590.947**	**0**	**3.157.914.932**		**297.638.513.834**
101	Kab. Batanghari	53.710.771.773	24.765.035.103	32.346.521.956	5.401.985.292	0	1.985.204.910	278.036.633	64.776.783.894
102	Kab. Bungo	59.832.708.992	24.351.713.521	32.573.067.569	14.554.857.584	0	1.562.575.603	278.036.633	73.320.250.910

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Kab. Kerinci	49.532.030.455	24.351.713.521	32.573.067.569	2.381.579.487	0	571.042.916	278.036.633	60.155.440.126
104	Kab. Merangin	52.743.865.177	24.351.713.521	32.573.067.569	4.624.927.437	0	1.484.241.659	278.036.633	63.311.986.819
105	Kab. Muaro Jambi	58.997.116.063	32.743.469.861	32.246.529.107	3.123.306.733	0	2.889.188.147	278.036.633	71.280.530.481
106	Kab. Sarolangun	60.921.100.884	34.667.263.078	32.159.271.351	3.986.818.566	0	2.362.595.628	278.036.633	73.453.985.256
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	339.269.514.889	168.896.207.485	241.206.576.683	2.277.686.708	0	1.292.011.025	278.036.633	413.950.518.534
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	158.686.767.516	72.348.387.623	116.101.920.780	2.183.886.865	0	1.929.263.598	278.036.633	192.841.495.499
109	Kab. Tebo	61.603.922.887	24.312.394.672	32.555.096.787	3.202.785.725	0	12.853.384.153	278.036.633	73.201.697.970
110	Kota Jambi	53.190.836.225	28.922.468.556	32.369.989.688	2.183.886.865	0	589.252.282	278.036.633	64.343.634.024
111	Kota Sungai Penuh	45.981.310.985	22.520.126.247	31.002.860.756	2.156.280.202	0	571.042.916	278.036.633	56.528.346.754
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**794.781.801.870**	**242.603.958.180**	**604.372.872.544**	**152.168.453.646**	**0**	**4.934.920.089**		**1.004.080.204.459**
113	Kab. Lahat	222.156.916.647	43.584.215.915	104.643.579.753	126.536.678.854	0	853.723.195	278.036.633	275.896.234.350
114	Kab. Musi Banyuasin	1.105.188.053.114	305.393.375.631	1.050.396.092.577	27.634.999.863	0	23.391.596.956	278.036.633	1.407.094.101.660
115	Kab. Musi Rawas	260.041.738.731	78.284.678.648	226.115.297.972	22.369.330.250	0	1.199.809.067	278.036.633	328.247.152.570
116	Kab. Muara Enim	306.145.106.030	95.180.687.524	90.639.842.319	194.014.634.736	0	1.115.018.127	278.036.633	381.228.219.339
117	Kab. Ogan Komering Ilir	114.559.751.733	34.657.708.329	86.338.981.842	21.848.782.057	0	1.517.205.918	278.036.633	144.640.714.779
118	Kab. Ogan Komering Ulu	141.760.541.417	65.254.532.220	87.323.162.519	22.699.197.208	0	792.287.293	278.036.633	176.347.215.873
119	Kota Palembang	113.348.732.928	34.657.708.329	86.338.981.842	21.256.478.442	0	704.988.584	278.036.633	143.236.193.830
120	Kota Pagar Alam	113.348.732.928	34.657.708.329	86.338.981.842	21.256.478.442	0	704.988.584	278.036.633	143.236.193.830
121	Kota Lubuk Linggau	113.348.732.928	34.657.708.329	86.338.981.842	21.256.478.442	0	704.988.584	278.036.633	143.236.193.830
122	Kota Prabumulih	116.934.012.476	39.578.542.684	85.603.916.873	21.616.073.442	0	704.988.584	278.036.633	147.781.558.216
123	Kab. Empat Lawang	113.427.057.538	34.657.708.329	86.338.981.842	21.334.803.052	0	704.988.584	278.036.633	143.314.518.440
124	Kab. Banyuasin	143.705.225.834	60.132.910.341	85.324.197.997	22.582.135.045	0	12.642.260.423	278.036.633	180.959.540.439
125	Kab. Ogan Ilir	116.841.969.133	39.163.955.573	86.152.200.854	21.313.949.177	0	704.988.584	278.036.633	147.613.130.821
126	Kab. OKU Timur	113.720.680.349	34.657.708.329	86.338.981.842	21.628.425.863	0	710.390.932	278.036.633	143.613.543.599
127	Kab. OKU Selatan	113.539.421.888	34.657.708.329	86.338.981.842	21.447.167.402	0	704.988.584	278.036.633	143.426.882.790
128	**Provinsi Bangka Belitung**	**141.197.636.769**	**10.329.119.364**		**145.601.595.520**	**0**	**15.236.642**		**155.945.951.526**
129	Kab. Bangka	128.036.557.981	2.948.534.421		138.835.722.787	0	16.763.954	278.036.633	142.079.057.795
130	Kab. Belitung	59.013.485.259	2.948.534.421		61.376.636.592	0	52.390.394	278.036.633	64.655.598.040
131	Kota Pangkal Pinang	46.055.958.489	2.948.534.421		47.703.414.750	0	4.526.974	278.036.633	50.934.512.778
132	Kab. Bangka Selatan	71.338.223.546	2.948.534.421		75.358.487.084	0	4.526.974	278.036.633	78.589.585.112
133	Kab. Bangka Tengah	89.152.905.384	2.948.534.421		95.079.136.916	0	25.677.234	278.036.633	98.331.385.204
134	Kab. Bangka Barat	89.948.268.925	2.948.534.421		96.045.203.689	0	29.051.200	278.036.633	99.300.825.943
135	Kab. Belitung Timur	61.644.180.666	2.948.534.421		64.618.282.721	0	4.526.974	278.036.633	67.849.380.749
136	**Provinsi Bengkulu**	**13.992.399.611**			**14.637.312.392**	**0**	**296.617.631**		**14.933.930.023**
137	Kab. Bengkulu Selatan	3.290.286.668			3.247.509.459	0	2.783.381	278.036.633	3.528.329.473
138	Kab. Bengkulu Utara	16.155.250.689			15.663.519.456	0	1.085.816.506	278.036.633	17.027.372.595
139	Kab. Rejang Lebong	3.251.848.182			3.209.109.459	0	2.744.895	278.036.633	3.489.890.987
140	Kota Bengkulu	3.252.171.799			3.209.109.459	0	3.068.512	278.036.633	3.490.214.604
141	Kab. Kaur	3.331.997.788			3.376.799.324	0	5.201.540	278.036.633	3.660.037.497
142	Kab. Seluma	3.428.140.541			3.382.317.948	0	5.828.765	278.036.633	3.666.183.346
143	Kab. Mukomuko	3.392.130.627			3.233.428.235	0	124.891.915	278.036.633	3.636.356.783
144	Kab. Lebong	3.391.763.916			3.349.349.459	0	2.420.629	278.036.633	3.629.806.721
145	Kab. Bengkulu Tengah	15.761.011.684			16.674.335.030	0	2.420.629	278.036.633	16.954.792.292
146	Kab. Kepahiang	3.257.667.916			3.215.253.459	0	2.420.629	278.036.633	3.495.710.721
147	**Provinsi Lampung**	**100.874.369.231**	**105.453.246.067**	**8.469.397.728**	**2.227.579.685**	**0**	**69.720.217**		**116.219.943.697**
148	Kab. Lampung Barat	15.291.238.273	15.726.334.854	1.209.319.114	338.616.325	0	10.726.187	278.036.633	17.563.033.113
149	Kab. Lampung Selatan	15.304.659.558	15.726.334.854	1.209.319.114	352.037.610	0	10.726.187	278.036.633	17.576.454.398
150	Kab. Lampung Tengah	15.348.810.748	15.726.334.854	1.209.319.114	396.188.800	0	10.726.187	278.036.633	17.620.605.588
151	Kab. Lampung Utara	15.280.798.998	15.726.334.854	1.209.319.114	328.177.050	0	10.726.187	278.036.633	17.552.593.838
152	Kab. Lampung Timur	61.748.150.990	69.840.698.180	1.209.319.114	328.177.050	0	10.726.187	278.036.633	71.666.957.164
153	Kab. Tanggamus	18.637.256.736	15.726.334.854	1.209.319.114	4.449.685.463	0	10.780.029	278.036.633	21.674.156.093

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Kab. Tulang Bawang	15.310.450.963	15.726.334.854	1.209.319.114	357.829.015	0	10.726.187	278.036.633	17.582.245.803
155	Kab. Way Kanan	15.334.236.946	15.726.334.854	1.209.319.114	358.444.954	0	36.697.601	278.036.633	17.608.833.156
156	Kab. Pesawaran	14.141.983.536	14.526.419.091	1.209.319.114	389.277.351	0	10.726.187	278.036.633	16.413.778.376
157	Kab. Pringsewu	14.073.232.842	14.526.419.091	1.209.319.114	328.177.050	0	10.726.187	278.036.633	16.345.027.682
158	Kab. Mesuji	14.203.417.169	14.526.419.091	1.209.319.114	368.105.330	0	113.415.176	270.386.240	16.487.644.951
159	Kab. Tulang Bawang Barat	14.073.232.842	14.526.419.091	1.209.319.114	328.177.050	0	10.726.187	270.386.240	16.345.027.682
160	Kota Bandar Lampung	15.282.022.661	15.726.334.854	1.209.319.114	329.400.713	0	10.726.187	278.036.633	17.553.817.501
161	Kota Metro	15.280.798.998	15.726.334.854	1.209.319.114	328.177.050	0	10.726.187	278.036.633	17.552.593.838
162	**Provinsi DKI Jakarta**	**159.701.713.195**	**164.548.315.948**	**25.399.865.367**		**0**		**1.668.220.816**	**191.616.402.131**
163	**Provinsi Jawa Barat**	**265.511.823.998**	**130.472.652.300**	**47.146.040.198**	**7.469.048.708**	**103.997.423.044**	**2.604.860.827**		**291.690.025.077**
164	Kab. Bandung	81.092.146.671	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	68.285.318.900	209.469.326	278.036.633	83.128.612.109
165	Kab. Bekasi	52.226.223.606	40.988.028.910	7.817.469.135	574.980.205	8.363.476.758	208.388.866	278.036.633	58.230.380.507
166	Kab. Bogor	93.642.325.232	10.118.391.250	3.662.415.795	13.208.772.824	70.963.228.851	249.793.817	278.036.633	98.480.639.170
167	Kab. Ciamis	22.843.960.791	10.118.391.250	3.662.415.795	612.193.313	8.363.476.758	1.889.066.810	278.036.633	24.923.580.559
168	Kab. Cianjur	22.862.212.349	10.118.391.250	3.662.415.795	669.231.021	8.363.476.758	1.827.697.340	278.036.633	24.919.248.797
169	Kab. Cirebon	21.189.610.736	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	228.599.983	278.036.633	23.225.900.624
170	Kab. Garut	48.961.950.319	10.118.391.250	3.662.415.795	875.694.806	35.976.793.604	221.228.251	278.036.633	51.132.560.339
171	Kab. Indramayu	34.566.279.683	23.059.923.834	5.705.154.408	574.980.205	8.363.476.758	535.480.738	278.036.633	38.517.052.576
172	Kab. Karawang	41.772.476.549	20.458.541.268	15.037.233.051	574.980.205	8.363.476.758	218.969.803	278.036.633	44.931.237.718
173	Kab. Kuningan	21.216.127.322	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	256.183.468	278.036.633	23.253.484.109
174	Kab. Majalengka	21.754.158.414	10.562.514.111	3.798.742.118	574.980.205	8.363.476.758	230.438.447	278.036.633	23.808.188.272
175	Kab. Purwakarta	21.362.516.684	10.118.391.250	3.662.415.795	635.232.060	8.363.476.758	341.744.078	278.036.633	23.399.296.574
176	Kab. Subang	37.349.999.648	11.292.978.264	18.486.285.247	574.980.205	8.363.476.758	247.557.317	278.036.633	39.243.314.424
177	Kab. Sukabumi	71.417.661.212	10.118.391.250	3.662.415.795	988.032.991	57.859.935.008	629.866.131	278.036.633	73.536.677.808
178	Kab. Sumedang	21.319.742.919	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	359.787.278	278.036.633	23.357.087.919
179	Kab. Tasikmalaya	22.093.827.681	10.118.391.250	3.662.415.795	1.962.413.914	8.363.476.758	319.571.565	278.036.633	24.704.305.915
180	Kab. Bandung Barat	20.104.086.348	10.118.391.250	3.662.415.795	578.062.025	7.271.403.869	232.996.538	278.036.633	22.141.306.110
181	Kota Bandung	21.169.467.432	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	208.388.866	278.036.633	23.205.689.507
182	Kota Bekasi	21.169.467.432	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	208.388.866	278.036.633	23.205.689.507
183	Kota Bogor	21.169.467.432	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	208.388.866	278.036.633	23.205.689.507
184	Kota Cirebon	21.169.467.432	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	208.388.866	278.036.633	23.205.689.507
185	Kota Depok	21.169.467.432	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	208.388.866	278.036.633	23.205.689.507
186	Kota Sukabumi	21.169.467.432	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	208.388.866	278.036.633	23.205.689.507
187	Kota Cimahi	21.169.467.432	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	208.388.866	278.036.633	23.205.689.507
188	Kota Tasikmalaya	21.174.856.998	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	208.388.866	278.036.633	23.205.689.507
189	Kota Banjar	21.499.312.948	10.118.391.250	3.662.415.795	574.980.205	8.363.476.758	214.285.576	278.036.633	23.211.586.217
190	**Provinsi Banten**	**2.258.240.953**			**2.332.440.222**	**0**	**563.339.807**		**2.895.780.029**
191	Kab. Lebak	849.641.564			576.508.783	0	237.607.645	278.036.633	1.092.153.061
192	Kab. Pandeglang	4.885.304.909			4.845.836.999	0	1.050.026.199	278.036.633	6.173.899.831
193	Kab. Serang	879.208.282			651.235.851	0	160.954.230	278.036.633	1.090.226.714
194	Kab. Tangerang	879.208.282			651.235.851	0	160.954.230	278.036.633	1.090.226.714
195	Kota Cilegon	879.208.282			651.235.851	0	160.954.230	278.036.633	1.090.226.714
196	Kota Tangerang	879.208.282			651.235.851	0	160.954.230	278.036.633	1.090.226.714
197	Kota Serang	879.208.282			651.235.851	0	160.954.230	278.036.633	1.090.226.714
198	Kota Tangerang Selatan	871.557.889			651.235.851	0	160.954.230	270.386.240	1.082.576.321
199	**Provinsi Jawa Tengah**	**7.342.287.013**	**1.095.260.692**	**151.107.094**	**804.664.872**	**0**	**6.666.511.450**		**8.717.544.108**
200	Kab. Banjarnegara	713.108.305	64.427.098	8.888.652	47.364.797	0	435.892.458	278.036.633	834.609.638
201	Kab. Banyumas	753.574.810	64.427.098	8.888.652	140.282.335	0	433.263.400	278.036.633	924.898.118
202	Kab. Batang	1.405.981.903	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	1.173.434.568	278.036.633	1.569.381.253
203	Kab. Blora	8.028.037.880	2.190.510.134	25.990.400	44.594.302	0	6.525.257.910	278.036.633	9.064.389.379
204	Kab. Boyolali	836.940.641	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	579.182.893	278.036.633	975.129.578

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Kab. Brebes	1.176.584.520	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	965.774.181	278.036.633	1.361.720.866
206	Kab. Cilacap	1.428.404.640	64.427.098	8.888.652	1.531.032.968	0	547.289.846	278.036.633	2.429.675.197
207	Kab. Demak	677.169.302	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	394.350.890	278.036.633	790.297.575
208	Kab. Grobogan	1.620.789.802	64.438.352	8.888.652	44.594.302	0	1.564.525.410	278.036.633	1.960.483.349
209	Kab. Jepara	705.687.660	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	489.778.843	278.036.633	885.725.528
210	Kab. Karanganyar	677.602.131	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	392.580.561	278.036.633	788.527.246
211	Kab. Kebumen	709.813.234	64.427.098	8.888.652	45.552.882	0	428.908.089	278.036.633	825.813.354
212	Kab. Kendal	1.087.877.234	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	860.421.795	278.036.633	1.256.368.480
213	Kab. Klaten	677.590.360	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	392.784.652	278.036.633	788.731.337
214	Kab. Kudus	677.169.302	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	392.147.731	278.036.633	788.094.416
215	Kab. Magelang	677.169.302	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	425.609.386	278.036.633	821.556.071
216	Kab. Pati	997.366.052	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	712.344.481	278.036.633	1.108.291.166
217	Kab. Pekalongan	709.371.703	64.427.098	8.888.652	47.739.962	0	426.273.849	278.036.633	825.366.194
218	Kab. Pemalang	1.274.838.908	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	1.036.531.911	278.036.633	1.432.478.596
219	Kab. Purbalingga	679.631.793	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	397.284.391	278.036.633	793.231.076
220	Kab. Purworejo	692.966.655	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	407.945.085	278.036.633	803.891.770
221	Kab. Rembang	1.880.430.369	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	1.741.337.720	278.036.633	2.137.284.405
222	Kab. Semarang	686.440.683	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	401.584.059	278.036.633	797.530.744
223	Kab. Sragen	680.854.097	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	395.832.527	278.036.633	791.779.212
224	Kab. Sukoharjo	677.169.302	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	392.147.731	278.036.633	788.094.416
225	Kab. Tegal	1.248.499.248	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	999.986.504	278.036.633	1.395.933.189
226	Kab. Temanggung	732.009.891	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	469.165.943	278.036.633	865.112.628
227	Kab. Wonogiri	791.204.732	64.427.098	8.888.652	120.482.512	0	430.294.951	278.036.633	902.129.846
228	Kab. Wonosobo	689.077.522	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	404.055.951	278.036.633	800.002.636
229	Kota Magelang	677.169.302	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	392.147.731	278.036.633	788.094.416
230	Kota Pekalongan	677.169.302	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	392.147.731	278.036.633	788.094.416
231	Kota Salatiga	677.169.302	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	392.147.731	278.036.633	788.094.416
232	Kota Semarang	1.057.210.261	64.427.098	291.757.947	44.594.302	0	489.319.395	278.036.633	1.168.135.375
233	Kota Surakarta	677.169.302	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	392.147.731	278.036.633	788.094.416
234	Kota Tegal	677.169.302	64.427.098	8.888.652	44.594.302	0	392.147.731	278.036.633	788.094.416
235	**Provinsi DI Yogyakarta**	**11.810.952**			**8.562.152**	**0**	**4.126.720**		**12.688.872**
236	Kab. Bantul	249.192.208			95.524	0	2.538.560	278.036.633	280.670.717
237	Kab. Gunung Kidul	253.428.928			95.524	0	7.778.240	278.036.633	285.910.397
238	Kab. Kulon Progo	282.644.960			33.866.516	0	2.063.360	278.036.633	313.966.509
239	Kab. Sleman	248.873.968			95.524	0	2.063.360	278.036.633	280.195.517
240	Kota Yogyakarta	248.873.968			95.524	0	2.063.360	278.036.633	280.195.517
241	**Provinsi Jawa Timur**	**129.589.653.176**	**142.663.670.254**	**12.131.146.775**	**408.373.655**	**0**	**5.806.117.258**		**161.009.307.942**
242	Kab. Bangkalan	13.754.209.987	15.016.870.850	1.567.307.787	16.435.249	0	350.816.258	278.036.633	17.229.466.777
243	Kab. Banyuwangi	9.753.343.244	7.689.480.603	641.754.358	378.477.366	0	2.784.543.033	278.036.633	11.772.291.993
244	Kab. Blitar	7.415.128.049	7.689.480.603	641.754.358	23.533.874	0	515.129.683	278.036.633	9.147.935.151
245	Kab. Bojonegoro	193.633.060.962	229.863.397.763	768.305.077	16.435.249	0	1.285.369.681	278.036.633	232.211.544.403
246	Kab. Bondowoso	7.265.776.981	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	389.730.019	278.036.633	9.015.436.862
247	Kab. Gresik	18.635.532.597	12.937.312.224	5.327.572.139	16.435.249	0	321.123.249	278.036.633	18.880.479.494
248	Kab. Jember	8.262.288.243	7.689.480.603	641.754.358	43.271.476	0	1.409.619.791	278.036.633	10.062.162.861
249	Kab. Jombang	7.545.813.956	7.689.480.603	641.754.358	285.033.141	0	397.796.996	278.036.633	9.292.101.731
250	Kab. Kediri	7.549.736.027	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	669.609.401	278.036.633	9.295.316.244
251	Kab. Lamongan	7.636.744.421	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	772.065.596	278.036.633	9.397.772.439
252	Kab. Lumajang	7.564.819.949	7.689.480.603	641.754.358	98.059.512	0	632.991.440	278.036.633	9.340.322.546
253	Kab. Madiun	8.691.179.393	7.689.480.603	641.754.358	22.523.569	0	1.846.845.234	278.036.633	10.478.640.397
254	Kab. Magetan	7.235.341.274	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	323.375.486	278.036.633	8.949.082.329
255	Kab. Malang	7.571.009.306	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	733.963.886	278.036.633	9.359.670.729

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256	Kab. Mojokerto	7.276.830.338	7.689.480.603	641.754.358	22.083.649	0	365.719.738	278.036.633	8.997.074.981
257	Kab. Nganjuk	7.603.766.492	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	715.976.094	278.036.633	9.341.682.937
258	Kab. Ngawi	8.176.009.775	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	1.307.513.680	278.036.633	9.933.220.523
259	Kab. Pacitan	7.376.833.849	7.689.480.603	641.754.358	97.079.726	0	383.020.759	278.036.633	9.089.372.079
260	Kab. Pamekasan	7.226.992.290	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	313.960.636	278.036.633	8.939.667.479
261	Kab. Pasuruan	7.267.369.772	7.689.480.603	641.754.358	35.577.573	0	334.713.599	278.036.633	8.979.562.766
262	Kab. Ponorogo	7.371.780.115	7.689.480.603	641.754.358	21.932.594	0	480.209.196	278.036.633	9.111.413.384
263	Kab. Probolinggo	7.337.932.980	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	427.266.091	278.036.633	9.052.972.934
264	Kab. Sampang	7.226.875.829	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	313.844.175	278.036.633	8.939.551.018
265	Kab. Sidoarjo	7.226.875.828	7.701.916.625	641.754.358	16.435.249	0	313.844.175	278.036.633	8.951.987.040
266	Kab. Situbondo	7.286.848.835	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	374.961.351	278.036.633	9.000.668.194
267	Kab. Sumenep	7.446.679.979	7.643.753.244	640.089.737	16.435.249	0	594.252.334	278.036.633	9.172.567.197
268	Kab. Trenggalek	7.323.273.707	7.689.480.603	641.754.358	173.757.341	0	388.991.305	278.036.633	9.172.020.240
269	Kab. Tuban	19.328.552.411	21.114.796.193	641.754.358	16.435.249	0	1.248.480.645	278.036.633	23.299.503.078
270	Kab. Tulungagung	7.275.923.271	7.689.480.603	641.754.358	58.662.031	0	376.913.813	278.036.633	9.044.847.438
271	Kota Blitar	7.226.875.829	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	313.844.175	278.036.633	8.939.551.018
272	Kota Kediri	7.226.875.829	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	313.844.175	278.036.633	8.939.551.018
273	Kota Madiun	7.226.875.829	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	313.844.175	278.036.633	8.939.551.018
274	Kota Malang	7.226.875.829	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	313.844.175	278.036.633	8.939.551.018
275	Kota Mojokerto	7.236.206.004	7.689.480.603	641.754.358	27.652.409	0	313.844.175	278.036.633	8.950.768.178
276	Kota Pasuruan	7.226.875.829	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	313.844.175	278.036.633	8.939.551.018
277	Kota Probolinggo	7.226.875.829	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	313.844.175	278.036.633	8.939.551.018
278	Kota Surabaya	7.226.875.829	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	313.844.175	278.036.633	8.939.551.018
279	Kota Batu	7.250.373.503	7.689.480.603	641.754.358	16.435.249	0	341.068.250	278.036.633	8.966.775.093
280	**Provinsi Kalimantan Barat**	**25.337.188.710**			**26.490.400.833**	**0**	**5.791.620.126**		**32.282.020.959**
281	Kab. Bengkayang	3.951.812.576			3.982.217.421	0	693.896.506	278.036.633	4.954.150.560
282	Kab. Landak	6.156.280.107			4.345.581.588	0	3.284.305.393	278.036.633	7.907.923.614
283	Kab. Kapuas Hulu	7.062.561.982			4.362.544.885	0	3.656.152.538	278.036.633	8.296.734.056
284	Kab. Ketapang	50.581.579.251			50.187.751.466	0	14.793.799.683	278.036.633	65.259.587.782
285	Kab. Pontianak	3.977.086.398			4.003.395.283	0	709.902.412	278.036.633	4.991.334.328
286	Kab. Sambas	4.037.263.004			3.990.321.936	0	784.002.147	278.036.633	5.052.360.716
287	Kab. Sanggau	7.571.063.324			8.143.392.198	0	2.506.739.958	278.036.633	10.928.168.789
288	Kab. Sintang	10.723.719.259			4.117.828.747	0	8.724.686.618	278.036.633	13.120.551.998
289	Kota Pontianak	3.717.164.072			3.742.995.527	0	690.215.211	278.036.633	4.711.247.371
290	Kota Singkawang	3.709.489.502			3.735.591.997	0	689.944.171	278.036.633	4.703.572.801
291	Kab. Kayong Utara	4.159.859.096			4.141.269.936	0	734.635.826	278.036.633	5.153.942.395
292	Kab. Kubu Raya	9.341.546.574			4.058.079.444	0	6.371.905.869	278.036.633	10.708.021.946
293	Kab. Sekadau	4.083.522.909			3.756.798.222	0	1.049.452.767	278.036.633	5.084.287.622
294	Kab. Melawi	9.379.799.557			4.179.445.122	0	6.321.411.869	278.036.633	10.778.893.624
295	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**90.787.749.479**			**96.392.277.881**	**0**	**26.304.161.138**		**122.696.439.019**
296	Kab. Barito Selatan	26.336.915.319			27.318.952.537	0	4.020.332.264	278.036.633	31.617.321.434
297	Kab. Barito Utara	47.993.080.216			33.666.876.735	0	28.385.266.716	278.036.633	62.330.180.084
298	Kab. Kapuas	39.932.704.747			34.259.673.605	0	10.920.042.554	278.036.633	45.457.752.792
299	Kab. Kotawaringin Barat	15.144.645.701			14.422.106.860	0	6.223.395.651	278.036.633	20.923.539.144
300	Kab. Kotawaringin Timur	31.358.093.912			14.994.014.964	0	23.368.383.624	278.036.633	38.640.435.221
301	Kota Palangkaraya	13.047.261.794			14.287.845.524	0	3.257.333.098	278.036.633	17.823.215.255
302	Kab. Barito Timur	25.628.264.969			26.881.227.267	0	3.895.241.868	278.036.633	31.054.505.768
303	Kab. Murung Raya	100.216.542.395			131.101.275.751	0	26.425.609.714	278.036.633	157.804.922.098
304	Kab. Pulang Pisau	13.110.472.759			14.246.946.224	0	3.367.147.071	278.036.633	17.892.129.928
305	Kab. Gunung Mas	22.641.027.153			15.102.792.257	0	13.779.339.195	278.036.633	29.160.168.085
306	Kab. Lamandau	25.217.412.237			15.763.520.377	0	16.452.531.350	278.036.633	32.494.088.360

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
307	Kab. Sukamara	13.088.060.689			14.287.307.583	0	3.393.147.213	278.036.633	17.958.491.429
308	Kab. Katingan	49.697.056.226			14.964.907.715	0	44.729.403.356	278.036.633	59.972.347.704
309	Kab. Seruyan	44.056.824.242			14.281.781.231	0	39.963.571.192	278.036.633	54.523.389.056
310	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**510.238.068.602**	**7.751.271.089**		**603.190.428.747**	**0**	**929.954.718**		**611.871.654.554**
311	Kab. Banjar	178.968.057.569	1.291.878.514		225.531.785.672	0	79.980.467	278.036.633	227.181.681.286
312	Kab. Barito Kuala	85.144.657.668	1.291.878.514		100.260.154.059	0	224.782.479	278.036.633	102.054.851.685
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	90.017.887.860	1.291.878.514		106.276.402.527	0	79.980.467	278.036.633	107.926.298.141
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	85.061.073.953	1.291.878.514		100.286.943.027	0	79.980.467	278.036.633	101.936.838.641
315	Kab. Hulu Sungai Utara	84.987.654.630	1.291.878.514		100.210.048.374	0	83.455.798	278.036.633	101.863.419.319
316	Kab. Kotabaru	164.014.027.628	1.291.878.514		197.048.266.687	0	340.056.558	278.036.633	198.958.238.392
317	Kab. Tabalong	281.189.674.466	14.540.250.999		291.778.181.903	0	3.765.106.231	278.036.633	310.361.575.766
318	Kab. Tanah Laut	255.802.461.911	1.291.878.514		332.077.584.246	0	131.152.031	278.036.633	333.778.651.424
319	Kab. Tapin	155.441.048.904	1.291.878.514		186.658.724.069	0	80.867.878	278.036.633	188.309.507.094
320	Kota Banjarbaru	85.102.585.328	1.291.878.514		100.328.454.402	0	79.980.467	278.036.633	101.978.350.016
321	Kota Banjarmasin	84.984.179.300	1.291.878.514		100.210.048.374	0	79.980.467	278.036.633	101.859.943.988
322	Kab. Balangan	239.973.515.430	2.254.169.693		261.918.666.891	0	101.713.350	278.036.633	264.552.586.567
323	Kab. Tanah Bumbu	255.820.719.270	1.291.878.514		310.226.560.418	0	1.277.149.673	278.036.633	313.073.625.238
324	**Provinsi Kalimantan Timur**	**3.901.156.105.164**	**902.843.676.632**	**2.608.147.148.367**	**1.314.586.695.762**	**0**	**35.225.234.527**		**4.860.802.755.288**
325	Kab. Berau	767.198.438.141	134.152.737.271	386.351.245.162	392.916.187.820	0	56.101.049.063	278.036.633	969.799.255.949
326	Kab. Bulungan	628.363.978.782	148.380.534.182	385.817.954.023	211.603.732.985	0	33.677.526.480	278.036.633	779.757.784.303
327	Kab. Kutai Kartanegara	3.503.917.298.678	833.847.909.620	2.448.397.268.433	1.130.949.247.026	0	13.424.035.870	278.036.633	4.426.896.497.582
328	Kab. Kutai Barat	785.379.786.716	134.152.737.271	386.351.245.162	420.506.496.023	0	58.340.420.838	278.036.633	999.628.935.927
329	Kab. Kutai Timur	1.284.574.878.590	139.576.465.680	386.197.610.205	952.489.838.099	0	33.374.896.936	278.036.633	1.511.916.847.553
330	Kab. Malinau	635.816.588.022	134.152.737.271	386.351.245.162	234.060.936.093	0	39.576.638.672	278.036.633	794.419.593.831
331	Kab. Nunukan	617.871.321.934	140.964.382.244	385.978.344.313	213.030.558.904	0	26.923.814.885	278.036.633	767.175.136.979
332	Kab. Pasir	783.529.692.761	134.152.737.270	386.351.245.162	395.405.931.209	0	13.019.525.950	278.036.633	929.207.476.224
333	Kota Balikpapan	583.141.567.145	134.152.737.270	386.351.245.162	200.872.637.043	0	4.765.860.495	278.036.633	726.420.516.603
334	Kota Bontang	611.757.707.187	150.604.642.676	402.297.332.662	201.357.300.929	0	4.756.397.184	278.036.633	759.293.710.084
335	Kab. Tana Tidung	575.096.675.693	127.816.716.947	366.395.888.743	206.807.150.923	0	23.089.287.933	278.036.633	724.387.081.179
336	Kota Samarinda	653.270.937.137	138.213.235.664	390.725.715.076	293.252.303.225	0	4.756.397.184	278.036.633	827.225.687.782
337	Kota Tarakan	587.159.421.207	156.601.877.846	386.666.920.907	200.894.069.889	0	4.756.397.184	278.036.633	749.197.302.459
338	Kab. Penajam Paser Utara	616.537.090.534	164.917.597.992	387.345.113.101	204.200.392.845	0	9.908.245.815	278.036.633	766.649.386.386
339	**Provinsi Sulawesi Utara**	**711.566.411**			**1.740.604.641**	**0**	**76.423.824**		**1.817.028.465**
340	Kab. Bolaang Mongondow	373.542.158			270.210.088	0	14.532.857	278.036.633	562.779.578
341	Kab. Minahasa	322.290.818			242.497.094	0	10.917.688	278.036.633	531.451.415
342	Kab. Sangihe	367.183.981			264.220.657	0	10.917.688	278.036.633	553.174.978
343	Kota Bitung	325.309.183			255.899.964	0	10.917.688	278.036.633	544.854.285
344	Kota Manado	322.396.273			219.432.949	0	10.917.688	278.036.633	508.387.270
345	Kab. Kepulauan Talaud	322.290.818			219.327.494	0	10.917.688	278.036.633	508.281.815
346	Kab. Minahasa Selatan	343.398.948			240.435.624	0	10.917.688	278.036.633	529.389.945
347	Kab. Minahasa Tenggara	340.085.798			237.122.474	0	10.917.688	278.036.633	526.076.795
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	322.290.818			219.327.494	0	10.917.688	278.036.633	508.281.815
349	Kota Kotamubagu	322.290.818			219.327.494	0	10.917.688	278.036.633	508.281.815
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.674.004.421			1.619.537.486	0	24.093.251	278.036.633	1.921.667.370
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	371.933.844			266.424.806	0	19.110.016	278.036.633	563.571.455
352	Kota Tomohon	322.290.818			219.327.494	0	10.917.688	278.036.633	508.281.815
353	Kab. Minahasa Utara	366.744.198			2.246.636.069	0	10.917.688	278.036.633	2.535.590.390
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	792.218.146			362.689.210	0	488.171.964	278.036.633	1.128.897.807
355	**Provinsi Gorontalo**	**151.819.310**			**105.935.510**	**0**	**84.569.207**		**190.504.717**
356	Kab. Boalemo	334.754.894			18.871.650	0	71.374.251	278.036.633	368.282.534
357	Kab. Gorontalo	413.623.151			103.735.465	0	102.459.723	278.036.633	484.231.821

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
358	Kota Gorontalo	281.133.160			7.897.120	0	28.727.046	278.036.633	314.660.799
359	Kab. Pohuwato	460.430.702			183.093.892	0	99.855.242	278.036.633	560.985.767
360	Kab. Gorontalo Utara	334.608.352			40.536.510	0	69.408.113	278.036.633	387.981.256
361	Kab. Bone Bolango	405.825.124			123.490.314	0	71.538.767	278.036.633	473.065.714
362	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**9.180.535.009**	**1.201.254.214**		**8.686.781.891**	**0**	**1.011.757.809**		**10.899.793.914**
363	Kab. Banggai	3.054.253.575	240.250.843		1.722.045.303	0	1.601.381.106	278.036.633	3.841.713.885
364	Kab. Banggai Kepulauan	1.954.491.377	240.250.843		1.547.564.359	0	203.349.415	278.036.633	2.269.201.250
365	Kab. Buol	2.243.469.333	240.250.843		1.704.538.129	0	345.125.728	278.036.633	2.567.951.333
366	Kab. Toli-Toli	2.588.601.873	240.250.843		2.100.652.206	0	351.082.441	278.036.633	2.970.022.123
367	Kab. Donggala	2.785.996.547	240.250.843		2.020.980.426	0	643.025.889	278.036.633	3.182.293.791
368	Kab. Morowali	17.090.376.589	2.402.508.428		17.323.423.572	0	570.934.183	278.036.633	20.574.902.816
369	Kab. Poso	2.509.892.340	240.250.843		1.637.284.039	0	834.594.189	278.036.633	2.990.165.704
370	Kota Palu	2.001.285.251	240.250.843		1.597.113.497	0	229.611.625	278.036.633	2.345.012.598
371	Kab. Parigi Moutong	3.174.140.184	240.250.843		1.746.556.511	0	1.369.219.685	278.036.633	3.634.063.672
372	Kab. Sigi	1.969.904.219	240.250.843		1.554.749.929	0	214.419.531	278.036.633	2.287.456.936
373	Kab. Tojo Una Una	2.443.954.893	240.250.843		1.713.483.239	0	629.380.382	278.036.633	2.861.151.097
374	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**17.235.092.109**		**1.235.122.999**	**16.371.108.265**	**0**	**99.958.417**		**17.706.189.681**
375	Kab. Bantaeng	1.711.789.997		107.402.001	1.387.545.845	0	8.692.034	278.036.633	1.781.676.513
376	Kab. Barru	1.729.581.912		107.402.001	1.404.774.990	0	9.431.624	278.036.633	1.799.645.248
377	Kab. Bone	1.804.809.159		107.402.001	1.462.425.787	0	27.008.074	278.036.633	1.874.872.495
378	Kab. Bulukumba	1.711.789.997		107.402.001	1.387.545.845	0	8.692.034	278.036.633	1.781.676.513
379	Kab. Enrekang	1.756.887.077		107.402.001	1.426.037.080	0	15.474.698	278.036.633	1.826.950.412
380	Kab. Gowa	1.711.789.997		107.402.001	1.387.545.845	0	8.692.034	278.036.633	1.781.676.513
381	Kab. Jeneponto	1.712.995.397		107.402.001	1.388.751.245	0	8.692.034	278.036.633	1.782.881.913
382	Kab. Luwu	1.954.979.451		107.402.001	1.630.264.355	0	9.339.797	278.036.633	2.025.042.786
383	Kab. Luwu Utara	1.883.392.559		107.402.001	1.628.660.776	0	18.112.603	278.036.633	2.032.212.013
384	Kab. Maros	1.745.581.011		107.402.001	1.421.336.860	0	8.692.034	278.036.633	1.815.467.528
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.733.450.840		107.402.001	1.413.032.775	0	8.692.034	278.036.633	1.807.163.443
386	Kab. Pinrang	1.711.789.997		107.402.001	1.387.545.845	0	8.692.034	278.036.633	1.781.676.513
387	Kab. Selayar	1.711.789.997		107.402.001	1.387.545.845	0	8.692.034	278.036.633	1.781.676.513
388	Kab. Sidenreng Rappang	1.748.674.032		107.402.001	1.418.835.040	0	17.714.337	278.036.633	1.821.988.011
389	Kab. Sinjai	1.714.918.612		107.402.001	1.390.674.460	0	8.692.034	278.036.633	1.784.805.128
390	Kab. Soppeng	1.712.301.997		107.402.001	1.388.057.845	0	8.692.034	278.036.633	1.782.188.513
391	Kab. Takalar	1.715.229.167		107.402.001	1.390.985.015	0	8.692.034	278.036.633	1.785.115.683
392	Kab. Tana Toraja	1.746.325.370		107.402.001	1.422.002.677	0	9.241.970	278.036.633	1.816.683.281
393	Kab. Wajo	3.222.575.435		2.470.245.998	1.389.735.235	0	8.692.034	278.036.633	4.146.709.900
394	Kota Pare-pare	1.711.789.997		107.402.001	1.387.545.845	0	8.692.034	278.036.633	1.781.676.513
395	Kab. Toraja Utara	1.784.610.501		107.402.001	1.461.121.549	0	8.692.034	278.036.633	1.855.252.217
396	Kota Makassar	1.712.626.662		107.402.001	1.387.545.845	0	9.705.519	278.036.633	1.782.689.998
397	Kota Palopo	1.723.975.737		107.402.001	1.399.731.585	0	8.692.034	278.036.633	1.793.862.253
398	Kab. Luwu Timur	34.153.245.718		107.402.001	32.805.499.064	0	1.037.659.660	278.036.633	34.228.597.358
399	**Provinsi Sulawesi Barat**	**111.516.626**			**34.202.983**	**0**	**105.450.954**		**139.653.937**
400	Kab. Majene	281.527.111			50.688	0	47.841.351	278.036.633	325.928.672
401	Kab. Mamuju	1.062.726.402			130.354.688	0	909.644.624	278.036.633	1.318.035.945
402	Kab. Polewali Mandar	287.565.751			202.752	0	53.727.927	278.036.633	331.967.312
403	Kab. Mamasa	310.399.704			6.770.868	0	70.166.076	278.036.633	354.973.577
404	Kab. Mamuju Utara	312.105.501			6.209.848	0	72.260.581	278.036.633	356.507.062
405	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**18.297.261.412**			**23.599.445.733**	**0**	**155.042.926**		**23.754.488.659**
406	Kab. Buton	3.927.957.043			10.045.673.495	0	36.258.978	278.036.633	10.359.969.106
407	Kab. Konawe	5.025.800.594			5.952.329.910	0	111.113.237	278.036.633	6.341.479.780
408	Kab. Kolaka	19.592.426.896			21.795.750.593	0	185.396.257	278.036.633	22.259.183.483

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409	Kab. Muna	3.642.124.147			4.085.271.867	0	370.762.268	278.036.633	4.734.070.768
410	Kota Kendari	3.392.468.411			4.088.649.980	0	32.605.802	278.036.633	4.399.292.415
411	Kota Bau-bau	3.473.255.758			4.169.023.748	0	29.684.849	278.036.633	4.476.745.230
412	Kab. Konawe Selatan	7.350.052.628			8.470.206.975	0	80.262.588	278.036.633	8.828.506.196
413	Kab. Bombana	8.367.089.578			10.638.071.220	0	34.342.978	278.036.633	10.950.450.831
414	Kab. Konawe Utara	8.796.029.196			9.841.264.646	0	69.995.625	278.036.633	10.189.296.904
415	Kab. Buton Utara	3.656.905.664			4.137.373.917	0	319.326.775	278.036.633	4.734.737.325
416	Kab. Wakatobi	3.387.752.528			4.083.934.097	0	28.189.622	278.036.633	4.390.160.352
417	Kab. Kolaka Utara	6.031.338.123			6.995.787.800	0	104.311.998	278.036.633	7.378.136.431
418	**Provinsi Bali**	**0**				**0**			**0**
419	Kab. Badung	247.154.044				0		278.036.633	278.036.633
420	Kab. Bangli	247.154.044				0		278.036.633	278.036.633
421	Kab. Buleleng	247.154.044				0		278.036.633	278.036.633
422	Kab. Gianyar	247.154.044				0		278.036.633	278.036.633
423	Kab. Jembrana	247.154.044				0		278.036.633	278.036.633
424	Kab. Karangasem	247.154.044				0		278.036.633	278.036.633
425	Kab. Klungkung	247.154.044				0		278.036.633	278.036.633
426	Kab. Tabanan	247.154.044				0		278.036.633	278.036.633
427	Kota Denpasar	247.154.044				0		278.036.633	278.036.633
428	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**31.161.247.193**			**40.557.621.264**	**0**	**159.365.524**		**40.716.986.788**
429	Kab. Bima	7.442.692.308			9.162.127.139	0	117.181.993	278.036.633	9.557.345.765
430	Kab. Dompu	7.148.027.478			8.940.332.882	0	51.228.360	278.036.633	9.269.597.875
431	Kab. Lombok Barat	7.169.700.821			8.971.052.024	0	35.265.621	278.036.633	9.284.354.278
432	Kab. Lombok Tengah	7.066.078.483			8.866.293.174	0	36.402.133	278.036.633	9.180.731.940
433	Kab. Lombok Timur	7.065.997.785			8.864.219.004	0	38.395.605	278.036.633	9.180.651.242
434	Kab. Sumbawa	8.022.302.083			10.114.938.633	0	56.204.261	278.036.633	10.449.179.527
435	Kota Mataram	7.062.867.801			8.864.219.004	0	35.265.621	278.036.633	9.177.521.258
436	Kab. Lombok Utara	7.063.111.679			8.864.219.004	0	35.509.499	278.036.633	9.177.765.136
437	Kota Bima	7.062.867.801			8.864.219.004	0	35.265.621	278.036.633	9.177.521.258
438	Kab. Sumbawa Barat	62.694.227.682			80.720.939.354	0	1.161.465.365	278.036.633	82.160.441.352
439	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**994.656.587**			**900.526.220**	**0**	**94.130.367**		**994.656.587**
440	Kab. Alor	422.118.300			96.283.993	0	78.680.263	278.036.633	453.000.889
441	Kab. Belu	1.003.835.102			745.774.501	0	10.906.557	278.036.633	1.034.717.691
442	Kab. Ende	408.105.522			97.294.653	0	63.656.825	278.036.633	438.988.111
443	Kab. Flores Timur	350.523.205			78.646.338	0	24.722.823	278.036.633	381.405.794
444	Kab. Kupang	360.471.204			103.555.453	0	9.761.707	278.036.633	391.353.793
445	Kab. Lembata	335.562.089			78.646.338	0	9.761.707	278.036.633	366.444.678
446	Kab. Manggarai	570.396.367			313.480.616	0	9.761.707	278.036.633	601.278.956
447	Kab. Ngada	335.562.089			78.646.338	0	9.761.707	278.036.633	366.444.678
448	Kab. Sikka	381.954.463			78.646.338	0	56.154.081	278.036.633	412.837.052
449	Kab. Sumba Barat	335.562.089			78.646.338	0	9.761.707	278.036.633	366.444.678
450	Kab. Sumba Timur	338.210.463			78.646.338	0	12.410.081	278.036.633	369.093.052
451	Kab. Timor Tengah Selatan	458.855.309			201.939.558	0	9.761.707	278.036.633	489.737.898
452	Kab. Timor Tengah Utara	1.198.211.879			941.296.128	0	9.761.707	278.036.633	1.229.094.468
453	Kota Kupang	335.562.089			78.646.338	0	9.761.707	278.036.633	366.444.678
454	Kab. Rote Ndao	362.122.217			105.206.466	0	9.761.707	278.036.633	393.004.806
455	Kab. Nagekeo	334.607.461			78.646.338	0	8.807.079	278.036.633	365.490.050
456	Kab. Sumba Tengah	334.607.461			78.646.338	0	8.807.079	278.036.633	365.490.050
457	Kab. Sumba Barat Daya	334.607.461			78.646.338	0	8.807.079	278.036.633	365.490.050
458	Kab. Manggarai Timur	540.999.629			285.186.114	0	8.659.471	278.036.633	571.882.218
459	Kab. Sabu Raijua	323.966.814			76.808.776	0	6.754.387	270.386.240	353.949.403

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
460	Kab. Manggarai Barat	407.844.664			150.928.913	0	9.761.707	278.036.633	438.727.253
461	**Provinsi Maluku**	**4.029.420.793**	**627.160.269**		**1.000.130.987**	**0**	**4.469.780.463**		**6.097.071.719**
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	3.483.586.803	125.432.055		290.568.742	0	3.791.281.700	278.036.633	4.485.319.130
463	Kab. Maluku Tengah	3.103.567.662	125.432.055		205.640.504	0	3.629.613.067	278.036.633	4.238.722.259
464	Kab. Maluku Tenggara	899.887.761	125.432.055		188.847.224	0	497.042.019	278.036.633	1.089.357.931
465	Kab. Pulau Buru	7.543.911.198	125.432.055		188.847.224	0	12.765.769.090	278.036.633	13.358.085.002
466	Kota Ambon	897.859.227	125.432.055		188.847.224	0	495.013.486	278.036.633	1.087.329.398
467	Kab. Seram Bagian Barat	1.293.852.510	125.432.055		249.395.334	0	832.862.120	278.036.633	1.485.726.142
468	Kab. Seram Bagian Timur	2.879.563.153	1.254.320.537		188.847.224	0	1.631.434.127	278.036.633	3.352.638.521
469	Kab. Maluku Barat Daya	2.648.999.110	125.432.055		1.945.919.161	0	495.013.486	278.036.633	2.844.401.335
470	Kab. Buru Selatan	5.333.671.104	125.432.055		188.847.224	0	7.266.179.177	278.036.633	7.858.495.089
471	Kab. Kepulauan Aru	1.100.708.540	125.432.055		188.847.224	0	697.862.798	278.036.633	1.290.178.710
472	Kota Tual	897.859.227	125.432.055		188.847.224	0	495.013.486	278.036.633	1.087.329.398
473	**Provinsi Maluku Utara**	**31.698.350.121**			**40.651.002.160**	**0**	**1.953.555.495**		**42.604.557.655**
474	Kab. Halmahera Tengah	10.432.745.307			10.604.863.483	0	2.637.761.298	278.036.633	13.520.661.414
475	Kab. Halmahera Barat	8.033.278.467			9.994.057.553	0	376.207.311	278.036.633	10.648.301.497
476	Kota Ternate	8.005.277.808			9.966.132.978	0	376.207.311	278.036.633	10.620.376.922
477	Kab. Halmahera Timur	49.143.584.973			57.715.986.414	0	4.543.789.678	278.036.633	62.537.812.725
478	Kota Tidore Kepulauan	8.599.755.445			9.985.057.498	0	911.951.649	278.036.633	11.175.045.780
479	Kab. Kepulauan Sula	9.651.810.615			11.170.567.679	0	778.496.638	278.036.633	12.227.100.950
480	Kab. Pulau Morotai	8.723.102.802			9.979.455.833	0	1.048.551.064	270.386.240	11.298.393.137
481	Kab. Halmahera Selatan	20.781.519.523			25.430.538.351	0	6.815.615.592	278.036.633	32.524.190.576
482	Kab. Halmahera Utara	14.999.783.334			17.828.227.920	0	1.064.086.197	278.036.633	19.170.350.750
483	Kab. Yalimo	19.588.608.560			18.794.034.487	0	706.230.155	278.036.633	19.778.301.275
484	Kab. Lanny Jaya	19.588.608.560			18.794.034.487	0	706.230.155	278.036.633	19.778.301.275
485	**Provinsi Papua**	**274.092.494.221**			**264.088.335.310**	**0**	**13.031.566.467**		**277.119.901.777**
486	Kab. Biak Numfor	19.591.196.365			18.794.034.487	0	710.761.960	278.036.633	19.782.833.080
487	Kab. Jayapura	21.064.933.518			18.826.860.672	0	3.647.916.204	278.036.633	22.752.813.509
488	Kab. Jayawijaya	19.615.807.420			18.818.645.542	0	708.817.960	278.036.633	19.805.500.135
489	Kab. Merauke	22.872.591.614			18.794.034.487	0	5.463.367.685	278.036.633	24.535.438.805
490	Kab. Mimika	532.294.699.614			527.359.401.475	0	6.794.592.007	278.036.633	534.432.030.115
491	Kab. Nabire	21.089.670.452			19.018.787.607	0	2.500.986.620	278.036.633	21.797.810.860
492	Kab. Paniai	19.923.634.947			19.126.473.069	0	708.817.960	278.036.633	20.113.327.662
493	Kab. Puncak Jaya	19.693.866.200			18.892.430.022	0	713.092.261	278.036.633	19.883.558.916
494	Kab. Kepulauan Yapen	19.615.755.509			18.810.822.167	0	719.718.338	278.036.633	19.808.577.138
495	Kota Jayapura	19.591.196.365			18.794.034.487	0	708.817.960	278.036.633	19.780.889.080
496	Kab. Sarmi	34.212.970.189			20.460.861.754	0	16.939.526.359	278.036.633	37.678.424.746
497	Kab. Keerom	21.949.497.188			18.900.895.818	0	4.023.092.033	278.036.633	23.202.024.484
498	Kab. Yahukimo	19.591.196.365			18.794.034.487	0	708.817.960	278.036.633	19.780.889.080
499	Kab. Pegunungan Bintang	19.728.185.449			19.160.630.131	0	708.817.960	278.036.633	20.147.484.724
500	Kab. Tolikara	19.658.485.195			18.861.323.317	0	708.817.960	278.036.633	19.848.177.910
501	Kab. Boven Digoel	33.705.560.883			18.794.034.487	0	15.515.692.063	278.036.633	34.587.763.183
502	Kab. Mappi	19.903.838.790			18.794.034.487	0	1.055.191.563	278.036.633	20.127.262.683
503	Kab. Asmat	20.537.119.885			18.794.034.487	0	2.039.688.225	278.036.633	21.111.759.345
504	Kab. Waropen	19.632.597.795			18.835.435.917	0	709.498.360	278.036.633	19.822.970.910
505	Kab. Mamberamo Raya	32.815.995.203			18.794.034.487	0	17.576.130.698	278.036.633	36.648.201.818
506	Kab. Mamberamo Tengah	19.588.608.560			18.794.034.487	0	706.230.155	278.036.633	19.778.301.275
507	Kab. Nduga	19.588.608.560			18.794.034.487	0	706.230.155	278.036.633	19.778.301.275
508	Kab. Dogiyai	19.588.608.560			18.794.034.487	0	706.230.155	278.036.633	19.778.301.275
509	Kab. Intan Jaya	19.575.435.693			18.794.034.487	0	700.707.681	270.386.240	19.765.128.408
510	Kab. Puncak	19.588.608.560			18.794.034.487	0	706.230.155	278.036.633	19.778.301.275

DAFTAR 3-C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511	Kab. Deiyai	19.575.435.693			18.794.034.487	0	700.707.681	270.386.240	19.765.128.408
512	Kab. Supiori	19.591.196.365			18.794.034.487	0	708.817.960	278.036.633	19.780.889.080
513	**Provinsi Papua Barat**	**340.809.204.495**	**408.770.081.005**	**62.256.500.338**	**2.178.967.360**	**0**	**12.165.002.188**		**485.370.550.891**
514	Kab. Sorong	38.189.262.553	45.279.164.887	1.926.064.662	432.182.293	0	6.239.530.929	278.036.633	54.154.979.404
515	Kab. Manokwari	9.053.138.911	4.758.087.642	1.624.082.669	680.220.563	0	4.711.443.971	278.036.633	12.051.871.478
516	Kab. Fak Fak	13.326.001.983	4.758.087.642	1.624.082.669	410.144.403	0	8.889.821.971	278.036.633	15.960.173.318
517	Kota Sorong	7.258.690.136	4.758.087.642	1.624.082.669	374.138.003	0	2.133.253.612	278.036.633	9.167.598.559
518	Kab. Sorong Selatan	7.586.103.478	4.758.087.642	1.624.082.669	513.781.361	0	2.321.023.596	278.036.633	9.495.011.901
519	Kab. Raja Ampat	11.204.057.528	5.695.072.795	1.624.082.669	3.974.876.262	0	2.393.378.611	278.036.633	13.965.446.970
520	Kab. Teluk Bintuni	42.046.009.558	6.005.994.929	15.938.844.303	602.495.763	0	22.615.785.439	278.036.633	45.441.157.067
521	Kab. Teluk Wondama	7.395.477.268	4.758.087.642	1.624.082.669	374.138.003	0	2.616.222.323	278.036.633	9.650.567.270
522	Kab. Tambrauw	10.714.419.564	4.205.802.846	1.624.082.669	500.376.083	0	6.086.187.349	270.386.240	12.686.835.187
523	Kab. Maybrat	6.542.690.785	4.205.802.846	1.624.082.669	468.720.019	0	1.977.189.450	270.386.240	8.546.181.224
524	Kab. Kaimana	19.622.810.139	4.758.087.642	1.624.082.669	501.086.783	0	17.844.679.994	278.036.633	25.005.973.721
525	Dana Cadangan	9.899.647.659.901	-	-	381.340.670.725	0	12.566.316.015	-	393.906.986.740
JUMLAH		**53.974.986.297.954**	**20.634.080.735.284**	**16.672.249.758.993**	**14.498.126.522.475**	**519.987.115.194**	**1.512.465.063.891**	**138.077.102.117**	**53.974.986.297.954**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**915.443.887**	**915.443.887**
2	Kab. Aceh Barat	50.857.993	50.857.993
3	Kab. Aceh Besar	50.857.993	50.857.993
4	Kab. Aceh Selatan	50.857.993	50.857.993
5	Kab. Aceh Singkil	50.857.993	-
6	Kab. Aceh Tengah	244.118.370	244.118.370
7	Kab. Aceh Tenggara	50.857.993	-
8	Kab. Aceh Timur	50.857.993	50.857.993
9	Kab. Aceh Utara	50.857.993	-
10	Kab. Bireun	50.857.993	-
11	Kab. Pidie	244.118.370	244.118.370
12	Kab. Simeulue	50.857.993	22.217.937
13	Kota Banda Aceh	50.857.993	50.857.993
14	Kota Sabang	50.857.993	50.857.993
15	Kota Langsa	50.857.993	50.857.993
16	Kota Lhokseumawe	50.857.993	50.857.993
17	Kab. Nagan Raya	50.857.993	-
18	Kab. Aceh Jaya	50.857.993	50.857.993
19	Kab. Pidie Jaya	244.118.370	244.118.370
20	Kab. Aceh Barat Daya	50.857.993	50.857.993
21	Kab. Gayo Lues	244.118.370	244.118.370
22	Kab. Aceh Tamiang	50.857.993	-
23	Kab. Bener Meriah	244.118.370	-
24	Kota Subulussalam	50.857.993	50.857.993
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**3.099.972.655**	**3.099.972.655**
26	Kab. Asahan	128.339.062	60.178.072
27	Kab. Dairi	337.548.484	140.836.764
28	Kab. Deli Serdang	230.557.747	102.922.474
29	Kab. Tanah Karo	714.806.666	714.806.666
30	Kab. Labuhan Batu	113.569.335	2.922.474
31	Kab. Langkat	151.299.996	2.922.474
32	Kab. Mandailing Natal	104.014.791	104.014.791
33	Kab. Nias	96.495.412	42.273.157
34	Kab. Simalungun	1.102.120.776	1.102.120.776
35	Kab. Tapanuli Selatan	103.425.339	2.922.474
36	Kab. Tapanuli Tengah	107.566.935	107.566.935
37	Kab. Tapanuli Utara	915.750.320	915.750.320
38	Kab. Toba Samosir	92.942.183	44.289.279
39	Kota Binjai	99.261.974	2.922.474
40	Kota Medan	270.029.944	270.029.944
41	Kota Pematang Siantar	716.641.290	78.062.360
42	Kota Sibolga	94.227.867	20.623.567
43	Kota Tanjung Balai	90.629.370	90.629.370
44	Kab. Batu Bara	110.779.402	4.908.099
45	Kab. Labuhan Batu Utara	107.852.126	27.017.505
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	105.504.835	105.504.835
47	Kab. Padang Lawas Utara	100.524.430	100.524.430
48	Kab. Padang Lawas	100.555.000	100.555.000
49	Kab. Nias Utara	85.049.091	-
50	Kab. Nias Barat	85.945.347	-
51	Kota Tebing Tinggi	99.626.863	99.626.863
52	Kota Padang Sidempuan	99.190.143	2.922.474
53	Kab. Pakpak Bharat	87.631.889	49.474.839
54	Kab. Nias Selatan	99.713.908	2.922.474
55	Kab. Humbang Hasundutan	329.963.015	329.963.015
56	Kab. Serdang Bedagai	171.075.042	171.075.042
57	Kab. Samosir	95.721.148	14.720.704
58	Kota Gunung sitoli	84.909.787	84.909.787
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**1.617.664.928**	**1.617.664.928**
60	Kab. Limapuluh Kota	1.358.986.141	1.358.986.141
61	Kab. Agam	224.591.161	224.591.161
62	Kab. Kepulauan Mentawai	85.140.260	85.140.260
63	Kab. Padang Pariaman	85.140.260	85.140.260
64	Kab. Pasaman	211.645.894	211.645.894
65	Kab. Pesisir Selatan	85.140.260	85.140.260
66	Kab. Sijunjung	85.140.260	85.140.260
67	Kab. Solok	243.688.205	243.688.205
68	Kab. Tanah Datar	235.376.935	235.376.935
69	Kota Bukit Tinggi	85.140.260	85.140.260
70	Kota Padang Panjang	85.140.260	85.140.260

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
71	Kota Padang	85.140.260	85.140.260
72	Kota Payakumbuh	246.365.602	246.365.602
73	Kota Sawahlunto	232.214.469	232.214.469
74	Kota Solok	85.140.260	85.140.260
75	Kota Pariaman	85.140.260	85.140.260
76	Kab. Pasaman Barat	85.140.260	85.140.260
77	Kab. Dharmasraya	85.140.260	85.140.260
78	Kab. Solok Selatan	85.140.260	85.140.260
79	**Provinsi Riau**		
80	Kab. Bengkalis		
81	Kab. Indragiri Hilir		
82	Kab. Indragiri Hulu		
83	Kab. Kampar		
84	Kab. Kuantan Singingi		
85	Kab. Pelalawan		
86	Kab. Rokan Hilir		
87	Kab. Rokan Hulu		
88	Kab. Siak		
89	Kota Dumai		
90	Kota Pekanbaru		
91	Kab. Kepulauan Meranti		
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**494.990.801**	**494.990.801**
93	Kab. Bintan	82.498.467	82.498.467
94	Kab. Natuna	82.498.467	41.249.233
95	Kab. Karimun	82.498.467	82.498.467
96	Kota Batam	659.987.735	659.987.735
97	Kab. Kepulauan Anambas	82.498.467	82.498.467
98	Kota Tanjung Pinang	82.498.467	41.249.233
99	Kab. Lingga	82.498.467	82.498.467
100	**Provinsi Jambi**	**660.702.719**	**660.702.719**
101	Kab. Batanghari	66.070.272	-
102	Kab. Bungo	66.070.272	66.070.272
103	Kab. Kerinci	880.936.959	880.936.959
104	Kab. Merangin	66.070.272	66.070.272
105	Kab. Muaro Jambi	66.070.272	33.035.135
106	Kab. Sarolangun	66.070.272	66.070.272
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	66.070.272	33.035.136
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	66.070.272	33.035.135
109	Kab. Tebo	66.070.272	-
110	Kota Jambi	66.070.272	66.070.272
111	Kota Sungai Penuh	66.070.272	-
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**628.277.573**	**-**
113	Kab. Lahat	209.425.857	-
114	Kab. Musi Banyuasin	41.885.171	-
115	Kab. Musi Rawas	41.885.171	41.885.171
116	Kab. Muara Enim	41.885.171	41.885.171
117	Kab. Ogan Komering Ilir	41.885.171	-
118	Kab. Ogan Komering Ulu	41.885.171	18.298.050
119	Kota Palembang	41.885.171	-
120	Kota Pagar Alam	209.425.857	91.490.252
121	Kota Lubuk Linggau	209.425.857	209.425.857
122	Kota Prabumulih	41.885.171	-
123	Kab. Empat Lawang	41.885.171	41.885.171
124	Kab. Banyuasin	41.885.171	41.885.171
125	Kab. Ogan Ilir	41.885.171	-
126	Kab. OKU Timur	209.425.857	91.490.252
127	Kab. OKU Selatan	209.425.857	209.425.857
128	**Provinsi Bangka Belitung**		
129	Kab. Bangka		
130	Kab. Belitung		
131	Kota Pangkal Pinang		
132	Kab. Bangka Selatan		
133	Kab. Bangka Tengah		
134	Kab. Bangka Barat		
135	Kab. Belitung Timur		
136	**Provinsi Bengkulu**		
137	Kab. Bengkulu Selatan		
138	Kab. Bengkulu Utara		
139	Kab. Rejang Lebong		
140	Kota Bengkulu		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
141	Kab. Kaur		
142	Kab. Seluma		
143	Kab. Mukomuko		
144	Kab. Lebong		
145	Kab. Bengkulu Tengah		
146	Kab. Kepahiang		
147	**Provinsi Lampung**	**983.405.224**	**983.405.224**
148	Kab. Lampung Barat	80.307.932	80.307.932
149	Kab. Lampung Selatan	142.932.742	142.932.742
150	Kab. Lampung Tengah	428.099.289	428.099.289
151	Kab. Lampung Utara	109.383.737	109.383.737
152	Kab. Lampung Timur	526.509.705	526.509.705
153	Kab. Tanggamus	215.622.254	215.622.254
154	Kab. Tulang Bawang	70.243.230	-
155	Kab. Way Kanan	79.189.632	79.189.632
156	Kab. Pesawaran	154.115.744	154.115.744
157	Kab. Pringsewu	193.256.250	193.256.250
158	Kab. Mesuji	70.243.230	70.243.230
159	Kab. Tulang Bawang Barat	70.243.230	70.243.230
160	Kota Bandar Lampung	70.243.230	70.243.230
161	Kota Metro	84.221.983	84.221.983
162	**Provinsi DKI Jakarta**	**1.720.672.475**	**1.720.672.475**
163	**Provinsi Jawa Barat**	**33.979.946.712**	**33.979.946.712**
164	Kab. Bandung	2.559.627.924	2.559.627.924
165	Kab. Bekasi	13.102.566.290	13.102.566.290
166	Kab. Bogor	1.204.883.863	1.204.883.863
167	Kab. Ciamis	1.870.886.933	1.870.886.933
168	Kab. Cianjur	1.883.825.209	1.883.825.209
169	Kab. Cirebon	2.177.297.251	2.177.297.251
170	Kab. Garut	6.966.425.304	6.966.425.304
171	Kab. Indramayu	1.315.414.755	1.128.931.474
172	Kab. Karawang	8.478.123.889	8.478.123.889
173	Kab. Kuningan	1.718.649.622	1.718.649.622
174	Kab. Majalengka	5.534.696.136	5.534.696.136
175	Kab. Purwakarta	1.824.190.888	1.824.190.888
176	Kab. Subang	2.137.569.140	2.137.569.140
177	Kab. Sukabumi	1.545.714.460	1.545.714.460
178	Kab. Sumedang	6.363.375.894	6.363.375.894
179	Kab. Tasikmalaya	1.757.456.561	1.757.456.561
180	Kab. Bandung Barat	1.464.262.342	1.464.262.342
181	Kota Bandung	1.642.420.499	1.642.420.499
182	Kota Bekasi	1.388.240.610	1.388.240.610
183	Kota Bogor	1.242.459.258	1.242.459.258
184	Kota Cirebon	5.335.707.817	5.335.707.817
185	Kota Depok	1.660.759.153	1.660.759.153
186	Kota Sukabumi	1.610.150.455	1.610.150.455
187	Kota Cimahi	1.332.113.722	1.332.113.722
188	Kota Tasikmalaya	1.615.290.976	1.615.290.976
189	Kota Banjar	1.553.124.104	1.553.124.104
190	**Provinsi Banten**	**588.632.000**	**588.632.000**
191	Kab. Lebak	98.105.400	49.052.700
192	Kab. Pandeglang	98.105.400	-
193	Kab. Serang	558.510.700	558.510.700
194	Kab. Tangerang	98.105.400	-
195	Kota Cilegon	98.105.400	-
196	Kota Tangerang	98.105.400	-
197	Kota Serang	226.333.137	226.333.137
198	Kota Tangerang Selatan	98.105.400	49.052.700
199	**Provinsi Jawa Tengah**	**102.752.820.771**	**102.752.820.771**
200	Kab. Banjarnegara	3.442.985.065	3.442.985.065
201	Kab. Banyumas	3.200.063.537	3.200.063.537
202	Kab. Batang	5.114.554.683	5.114.554.683
203	Kab. Blora	4.916.402.467	4.916.402.467
204	Kab. Boyolali	8.436.773.703	8.436.773.703
205	Kab. Brebes	3.163.886.592	3.163.886.592
206	Kab. Cilacap	3.187.630.762	3.187.630.762
207	Kab. Demak	8.499.585.182	8.499.585.182
208	Kab. Grobogan	4.712.738.509	4.712.738.509
209	Kab. Jepara	9.936.470.657	9.936.470.657
210	Kab. Karanganyar	4.736.712.795	4.736.712.795

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
211	Kab. Kebumen	3.655.839.701	3.655.839.701
212	Kab. Kendal	16.173.028.630	16.173.028.630
213	Kab. Klaten	9.866.326.884	9.866.326.884
214	Kab. Kudus	60.824.479.283	60.824.479.283
215	Kab. Magelang	7.513.895.137	7.513.895.137
216	Kab. Pati	4.485.589.900	4.485.589.900
217	Kab. Pekalongan	3.189.534.126	3.189.534.126
218	Kab. Pemalang	3.206.232.744	3.206.232.744
219	Kab. Purbalingga	3.666.558.757	3.666.558.757
220	Kab. Purworejo	3.696.282.179	3.696.282.179
221	Kab. Rembang	3.328.315.227	3.328.315.227
222	Kab. Semarang	3.868.501.033	3.868.501.033
223	Kab. Sragen	3.529.158.424	3.529.158.424
224	Kab. Sukoharjo	3.821.944.952	3.821.389.530
225	Kab. Tegal	3.480.913.618	3.480.913.618
226	Kab. Temanggung	13.765.366.902	13.765.366.902
227	Kab. Wonogiri	3.132.684.090	3.132.684.090
228	Kab. Wonosobo	5.909.799.674	5.909.799.674
229	Kota Magelang	3.085.761.481	3.085.761.481
230	Kota Pekalongan	3.653.738.877	3.653.738.877
231	Kota Salatiga	3.597.606.084	3.597.606.084
232	Kota Semarang	6.101.014.119	6.101.014.119
233	Kota Surakarta	3.661.370.677	3.661.370.677
234	Kota Tegal	3.194.835.312	3.194.835.312
235	**Provinsi DI Yogyakarta**	**6.054.769.655**	**6.054.769.655**
236	Kab. Bantul	4.036.513.103	4.036.513.103
237	Kab. Gunung Kidul	2.018.256.551	2.018.256.551
238	Kab. Kulon Progo	3.027.384.828	3.027.384.828
239	Kab. Sleman	2.825.559.173	2.825.559.173
240	Kota Yogyakarta	2.220.082.207	2.220.082.207
241	**Provinsi Jawa Timur**	**219.703.158.430**	**219.703.158.430**
242	Kab. Bangkalan	6.379.295.707	6.379.295.707
243	Kab. Banyuwangi	7.436.230.204	7.436.230.204
244	Kab. Blitar	9.929.049.772	9.929.049.772
245	Kab. Bojonegoro	20.787.912.928	20.787.912.928
246	Kab. Bondowoso	13.200.976.906	13.200.976.906
247	Kab. Gresik	6.417.976.783	6.417.976.783
248	Kab. Jember	12.866.496.343	12.866.496.343
249	Kab. Jombang	11.147.461.862	11.147.461.862
250	Kab. Kediri	27.325.003.439	27.325.003.439
251	Kab. Lamongan	12.787.520.935	12.787.520.935
252	Kab. Lumajang	7.716.040.323	7.716.040.323
253	Kab. Madiun	7.667.273.767	7.667.273.767
254	Kab. Magetan	6.943.044.757	6.943.044.757
255	Kab. Malang	32.413.320.449	32.413.320.449
256	Kab. Mojokerto	7.970.152.316	7.970.152.316
257	Kab. Nganjuk	12.117.757.947	12.117.757.947
258	Kab. Ngawi	11.034.191.617	11.034.191.617
259	Kab. Pacitan	6.636.581.326	6.636.581.326
260	Kab. Pamekasan	28.020.125.932	28.020.125.932
261	Kab. Pasuruan	26.389.414.585	26.389.414.585
262	Kab. Ponorogo	7.421.826.798	7.421.826.798
263	Kab. Probolinggo	16.599.263.842	16.599.263.842
264	Kab. Sampang	7.484.690.048	7.484.690.048
265	Kab. Sidoarjo	13.616.655.986	13.616.655.986
266	Kab. Situbondo	9.398.216.633	9.398.216.633
267	Kab. Sumenep	15.426.472.807	15.426.472.807
268	Kab. Trenggalek	6.814.737.160	6.814.737.160
269	Kab. Tuban	8.646.420.476	8.646.420.476
270	Kab. Tulungagung	16.985.226.658	16.985.226.658
271	Kota Blitar	8.105.860.495	8.105.860.495
272	Kota Kediri	53.521.067.830	53.521.067.830
273	Kota Madiun	6.118.903.304	6.118.903.304
274	Kota Malang	21.660.755.508	21.660.755.508
275	Kota Mojokerto	7.190.319.414	7.190.319.414
276	Kota Pasuruan	6.170.534.397	6.170.534.397
277	Kota Probolinggo	5.948.036.072	5.948.036.072
278	Kota Surabaya	19.806.258.084	19.806.258.084
279	Kota Batu	6.539.629.554	6.539.629.554
280	**Provinsi Kalimantan Barat**		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
281	Kab. Bengkayang		
282	Kab. Landak		
283	Kab. Kapuas Hulu		
284	Kab. Ketapang		
285	Kab. Pontianak		
286	Kab. Sambas		
287	Kab. Sanggau		
288	Kab. Sintang		
289	Kota Pontianak		
290	Kota Singkawang		
291	Kab. Kayong Utara		
292	Kab. Kubu Raya		
293	Kab. Sekadau		
294	Kab. Melawi		
295	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**567.746.039**	**567.746.039**
296	Kab. Barito Selatan	43.672.772	-
297	Kab. Barito Utara	43.672.772	-
298	Kab. Kapuas	43.672.772	-
299	Kab. Kotawaringin Barat	43.672.772	19.078.985
300	Kab. Kotawaringin Timur	43.672.772	43.672.772
301	Kota Palangkaraya	43.672.772	19.078.985
302	Kab. Barito Timur	43.672.772	19.078.985
303	Kab. Murung Raya	43.672.772	-
304	Kab. Pulang Pisau	756.994.718	756.994.718
305	Kab. Gunung Mas	43.672.772	-
306	Kab. Lamandau	43.672.772	-
307	Kab. Sukamara	43.672.772	-
308	Kab. Katingan	43.672.772	-
309	Kab. Seruyan	43.672.772	-
310	**Provinsi Kalimantan Selatan**		
311	Kab. Banjar		
312	Kab. Barito Kuala		
313	Kab. Hulu Sungai Selatan		
314	Kab. Hulu Sungai Tengah		
315	Kab. Hulu Sungai Utara		
316	Kab. Kotabaru		
317	Kab. Tabalong		
318	Kab. Tanah Laut		
319	Kab. Tapin		
320	Kota Banjarbaru		
321	Kota Banjarmasin		
322	Kab. Balangan		
323	Kab. Tanah Bumbu		
324	**Provinsi Kalimantan Timur**		
325	Kab. Berau		
326	Kab. Bulungan		
327	Kab. Kutai Kartanegara		
328	Kab. Kutai Barat		
329	Kab. Kutai Timur		
330	Kab. Malinau		
331	Kab. Nunukan		
332	Kab. Pasir		
333	Kota Balikpapan		
334	Kota Bontang		
335	Kab. Tana Tidung		
336	Kota Samarinda		
337	Kota Tarakan		
338	Kab. Penajam Paser Utara		
339	**Provinsi Sulawesi Utara**	**470.912.235**	**470.912.235**
340	Kab. Bolaang Mongondow	33.636.588	16.818.293
341	Kab. Minahasa	33.636.588	16.818.293
342	Kab. Sangihe	33.636.588	16.818.293
343	Kota Bitung	33.636.588	16.818.293
344	Kota Manado	33.636.588	16.818.293
345	Kab. Kepulauan Talaud	33.636.588	16.818.293
346	Kab. Minahasa Selatan	33.636.588	16.818.293
347	Kab. Minahasa Tenggara	33.636.588	16.818.293
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	33.636.588	16.818.293
349	Kota Kotamubagu	33.636.588	16.818.293
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	627.882.980	627.882.980

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	33.636.588	16.818.293
352	Kota Tomohon	33.636.588	16.818.293
353	Kab. Minahasa Utara	33.636.588	16.818.293
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	33.636.588	16.818.293
355	**Provinsi Gorontalo**		
356	Kab. Boalemo		
357	Kab. Gorontalo		
358	Kota Gorontalo		
359	Kab. Pohuwato		
360	Kab. Gorontalo Utara		
361	Kab. Bone Bolango		
362	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**649.558.538**	**649.558.538**
363	Kab. Banggai	81.194.817	81.194.817
364	Kab. Banggai Kepulauan	81.194.817	81.194.817
365	Kab. Buol	288.692.683	288.692.683
366	Kab. Toli-Toli	288.692.683	288.692.683
367	Kab. Donggala	81.194.817	81.194.817
368	Kab. Morowali	81.194.817	81.194.817
369	Kab. Poso	81.194.817	81.194.817
370	Kota Palu	288.692.683	288.692.683
371	Kab. Parigi Moutong	81.194.817	81.194.817
372	Kab. Sigi	81.194.817	81.194.817
373	Kab. Tojo Una Una	81.194.817	81.194.817
374	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**2.492.246.875**	**2.492.246.875**
375	Kab. Bantaeng	111.172.375	111.172.375
376	Kab. Barru	118.461.974	118.461.974
377	Kab. Bone	676.178.339	676.178.339
378	Kab. Bulukumba	169.104.153	73.875.213
379	Kab. Enrekang	103.843.619	103.843.619
380	Kab. Gowa	103.843.619	103.843.619
381	Kab. Jeneponto	103.843.619	103.843.619
382	Kab. Luwu	104.215.604	45.527.863
383	Kab. Luwu Utara	103.843.619	103.843.619
384	Kab. Maros	103.843.619	103.843.619
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	104.933.470	104.933.470
386	Kab. Pinrang	103.843.619	103.843.619
387	Kab. Selayar	103.843.619	103.843.619
388	Kab. Sidenreng Rappang	103.843.619	103.843.619
389	Kab. Sinjai	547.615.124	547.615.124
390	Kab. Soppeng	2.294.921.917	2.294.921.917
391	Kab. Takalar	103.843.619	103.843.619
392	Kab. Tana Toraja	114.911.802	114.911.802
393	Kab. Wajo	118.853.538	118.853.538
394	Kota Pare-pare	103.843.619	103.843.619
395	Kab. Toraja Utara	104.907.365	45.830.067
396	Kota Makassar	103.843.619	103.843.619
397	Kota Palopo	103.843.619	103.843.619
398	Kab. Luwu Timur	103.843.619	103.843.619
399	**Provinsi Sulawesi Barat**		
400	Kab. Majene		
401	Kab. Mamuju		
402	Kab. Polewali Mandar		
403	Kab. Mamasa		
404	Kab. Mamuju Utara		
405	**Provinsi Sulawesi Tenggara**		
406	Kab. Buton		
407	Kab. Konawe		
408	Kab. Kolaka		
409	Kab. Muna		
410	Kota Kendari		
411	Kota Bau-bau		
412	Kab. Konawe Selatan		
413	Kab. Bombana		
414	Kab. Konawe Utara		
415	Kab. Buton Utara		
416	Kab. Wakatobi		
417	Kab. Kolaka Utara		
418	**Provinsi Bali**	**2.573.157.820**	**2.573.157.820**
419	Kab. Badung	285.906.424	285.906.424
420	Kab. Bangli	306.834.774	306.834.774

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
421	Kab. Buleleng	3.369.578.755	3.369.578.755
422	Kab. Gianyar	600.517.853	600.517.853
423	Kab. Jembrana	285.906.424	285.906.424
424	Kab. Karangasem	297.571.410	297.571.410
425	Kab. Klungkung	285.906.424	285.906.424
426	Kab. Tabanan	285.906.424	285.906.424
427	Kota Denpasar	285.906.424	285.906.424
428	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**45.182.630.275**	**45.182.630.275**
429	Kab. Bima	6.925.497.449	6.925.497.449
430	Kab. Dompu	3.938.170.588	3.938.170.588
431	Kab. Lombok Barat	10.670.555.325	10.670.555.325
432	Kab. Lombok Tengah	21.084.954.823	21.084.954.823
433	Kab. Lombok Timur	39.158.552.211	39.158.552.211
434	Kab. Sumbawa	7.151.723.959	7.151.723.959
435	Kota Mataram	4.859.553.095	4.859.553.095
436	Kab. Lombok Utara	4.947.561.257	4.947.561.257
437	Kota Bima	3.091.431.648	3.091.431.648
438	Kab. Sumbawa Barat	3.598.136.954	3.598.136.954
439	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**860.054.374**	**860.054.374**
440	Kab. Alor	53.731.660	53.731.660
441	Kab. Belu	216.288.755	216.288.755
442	Kab. Ende	44.261.314	-
443	Kab. Flores Timur	40.954.970	-
444	Kab. Kupang	40.954.970	17.891.680
445	Kab. Lembata	423.415.734	-
446	Kab. Manggarai	40.954.970	-
447	Kab. Ngada	40.954.970	-
448	Kab. Sikka	117.662.484	-
449	Kab. Sumba Barat	167.511.830	167.511.830
450	Kab. Sumba Timur	69.152.835	69.152.835
451	Kab. Timor Tengah Selatan	49.005.492	-
452	Kab. Timor Tengah Utara	40.954.970	-
453	Kota Kupang	40.954.970	-
454	Kab. Rote Ndao	40.954.970	17.891.680
455	Kab. Nagekeo	40.954.970	-
456	Kab. Sumba Tengah	40.954.970	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
457	Kab. Sumba Barat Daya	310.896.961	135.819.147
458	Kab. Manggarai Timur	40.954.970	-
459	Kab. Sabu Raijua	80.295.565	-
460	Kab. Manggarai Barat	65.021.208	65.021.208
461	**Provinsi Maluku**		
462	Kab. Maluku Tenggara Barat		
463	Kab. Maluku Tengah		
464	Kab. Maluku Tenggara		
465	Kab. Pulau Buru		
466	Kota Ambon		
467	Kab. Seram Bagian Barat		
468	Kab. Seram Bagian Timur		
469	Kab. Maluku Barat Daya		
470	Kab. Buru Selatan		
471	Kab. Kepulauan Aru		
472	Kota Tual		
473	**Provinsi Maluku Utara**		
474	Kab. Halmahera Tengah		
475	Kab. Halmahera Barat		
476	Kota Ternate		
477	Kab. Halmahera Timur		
478	Kota Tidore Kepulauan		
479	Kab. Kepulauan Sula		
480	Kab. Pulau Morotai		
481	Kab. Halmahera Selatan		
482	Kab. Halmahera Utara		
483	Kab. Yalimo		
484	Kab. Lanny Jaya		
485	**Provinsi Papua**		
486	Kab. Biak Numfor		
487	Kab. Jayapura		
488	Kab. Jayawijaya		
489	Kab. Merauke		
490	Kab. Mimika		
491	Kab. Nabire		
492	Kab. Paniai		
493	Kab. Puncak Jaya		
494	Kab. Kepulauan Yapen		
495	Kota Jayapura		
496	Kab. Sarmi		
497	Kab. Keerom		
498	Kab. Yahukimo		
499	Kab. Pegunungan Bintang		
500	Kab. Tolikara		
501	Kab. Boven Digoel		
502	Kab. Mappi		
503	Kab. Asmat		
504	Kab. Waropen		
505	Kab. Mamberamo Raya		
506	Kab. Mamberamo Tengah		
507	Kab. Nduga		
508	Kab. Dogiyai		
509	Kab. Intan Jaya		
510	Kab. Puncak		
511	Kab. Deiyai		
512	Kab. Supiori		
513	**Provinsi Papua Barat**		
514	Kab. Sorong		
515	Kab. Manokwari		
516	Kab. Fak Fak		
517	Kota Sorong		
518	Kab. Sorong Selatan		
519	Kab. Raja Ampat		
520	Kab. Teluk Bintuni		
521	Kab. Teluk Wondama		
522	Kab. Tambrauw		
523	Kab. Maybrat		
524	Kab. Kaimana		
525	Dana Cadangan		
	JUMLAH	**1.415.973.003.052**	**1.408.448.764.184**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**716.646.172.000**	**716.646.172.000**	**50.611.300.000**	**50.611.300.000**
2	Kab. Aceh Barat	367.377.754.000	367.377.754.000	38.260.700.000	38.260.700.000
3	Kab. Aceh Besar	452.068.799.000	452.068.799.000	47.686.700.000	47.686.700.000
4	Kab. Aceh Selatan	389.001.539.000	389.001.539.000	44.193.700.000	44.193.700.000
5	Kab. Aceh Singkil	257.048.215.000	257.048.215.000	39.232.300.000	39.232.300.000
6	Kab. Aceh Tengah	388.865.291.000	388.865.291.000	37.495.000.000	37.495.000.000
7	Kab. Aceh Tenggara	345.178.284.000	345.178.284.000	38.866.600.000	38.866.600.000
8	Kab. Aceh Timur	441.119.241.000	441.119.241.000	51.662.200.000	51.662.200.000
9	Kab. Aceh Utara	440.388.107.000	440.388.107.000	34.513.900.000	34.513.900.000
10	Kab. Bireun	480.010.589.000	480.010.589.000	45.572.300.000	45.572.300.000
11	Kab. Pidie	487.385.829.000	487.385.829.000	38.507.600.000	38.507.600.000
12	Kab. Simeulue	260.339.629.000	260.339.629.000	50.029.300.000	50.029.300.000
13	Kota Banda Aceh	406.687.627.000	406.687.627.000	29.637.200.000	29.637.200.000
14	Kota Sabang	241.868.681.000	241.868.681.000	26.308.900.000	26.308.900.000
15	Kota Langsa	276.505.469.000	276.505.469.000	26.685.800.000	26.685.800.000
16	Kota Lhokseumawe	315.418.871.000	315.418.871.000	21.605.500.000	21.605.500.000
17	Kab. Nagan Raya	331.232.473.000	331.232.473.000	31.831.800.000	31.831.800.000
18	Kab. Aceh Jaya	255.517.560.000	255.517.560.000	38.793.200.000	38.793.200.000
19	Kab. Pidie Jaya	255.713.281.000	255.713.281.000	46.158.800.000	46.158.800.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	275.720.082.000	275.720.082.000	42.593.700.000	42.593.700.000
21	Kab. Gayo Lues	291.310.455.000	291.310.455.000	34.937.700.000	34.937.700.000
22	Kab. Aceh Tamiang	306.322.187.000	306.322.187.000	33.526.100.000	33.526.100.000
23	Kab. Bener Meriah	285.611.088.000	285.611.088.000	33.121.400.000	33.121.400.000
24	Kota Subulussalam	185.847.725.000	185.847.725.000	30.771.700.000	30.771.700.000
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**948.867.504.000**	**948.867.504.000**	**38.485.500.000**	**38.485.500.000**
26	Kab. Asahan	523.902.037.000	523.902.037.000	50.636.000.000	50.636.000.000
27	Kab. Dairi	374.323.886.000	374.323.886.000	44.159.400.000	44.159.400.000
28	Kab. Deli Serdang	889.009.680.000	889.009.680.000	67.196.300.000	67.196.300.000
29	Kab. Tanah Karo	441.830.815.000	441.830.815.000	42.463.100.000	42.463.100.000
30	Kab. Labuhan Batu	370.860.918.000	370.860.918.000	45.520.700.000	45.520.700.000
31	Kab. Langkat	689.304.684.000	689.304.684.000	53.889.600.000	53.889.600.000
32	Kab. Mandailing Natal	455.686.638.000	455.686.638.000	48.465.400.000	48.465.400.000
33	Kab. Nias	250.935.711.000	250.935.711.000	54.966.900.000	54.966.900.000
34	Kab. Simalungun	696.561.265.000	696.561.265.000	73.969.400.000	73.969.400.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	376.142.335.000	376.142.335.000	44.504.100.000	44.504.100.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	343.959.059.000	343.959.059.000	52.309.400.000	52.309.400.000
37	Kab. Tapanuli Utara	408.808.812.000	408.808.812.000	56.802.100.000	56.802.100.000
38	Kab. Toba Samosir	310.465.195.000	310.465.195.000	51.446.900.000	51.446.900.000
39	Kota Binjai	336.975.734.000	336.975.734.000	25.266.900.000	25.266.900.000
40	Kota Medan	899.927.416.000	899.927.416.000	81.594.600.000	81.594.600.000
41	Kota Pematang Siantar	352.723.110.000	352.723.110.000	24.784.000.000	24.784.000.000
42	Kota Sibolga	248.596.013.000	248.596.013.000	22.754.900.000	22.754.900.000
43	Kota Tanjung Balai	275.733.192.000	275.733.192.000	20.198.800.000	20.198.800.000
44	Kab. Batu Bara	386.180.939.000	386.180.939.000	38.945.600.000	29.211.725.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	346.964.406.000	346.964.406.000	44.467.500.000	33.352.625.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	267.177.153.000	267.177.153.000	35.441.200.000	35.441.200.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	262.768.244.000	262.768.244.000	44.769.200.000	44.769.200.000
48	Kab. Padang Lawas	249.724.117.000	249.724.117.000	40.026.800.000	40.026.800.000
49	Kab. Nias Utara	231.858.197.000	231.858.197.000	53.314.600.000	39.989.000.000
50	Kab. Nias Barat	193.665.081.000	193.665.081.000	63.821.100.000	47.867.725.000
51	Kota Tebing Tinggi	262.130.545.000	262.130.545.000	22.087.200.000	22.087.200.000
52	Kota Padang Sidempuan	308.201.364.000	308.201.364.000	25.569.600.000	25.569.600.000
53	Kab. Pakpak Bharat	198.404.616.000	198.404.616.000	28.841.500.000	28.841.500.000
54	Kab. Nias Selatan	319.188.994.000	319.188.994.000	54.201.600.000	54.201.600.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	313.663.208.000	313.663.208.000	31.613.800.000	31.613.800.000
56	Kab. Serdang Bedagai	458.449.769.000	458.449.769.000	65.764.200.000	65.764.200.000
57	Kab. Samosir	283.201.579.000	283.201.579.000	35.631.600.000	35.631.600.000
58	Kota Gunung sitoli	251.781.376.000	251.781.376.000	50.790.700.000	50.790.700.000
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**764.680.895.000**	**764.680.895.000**	**40.733.300.000**	**40.733.300.000**
60	Kab. Limapuluh Kota	467.068.452.000	467.068.452.000	46.701.600.000	46.701.600.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
61	Kab. Agam	490.438.106.000	490.438.106.000	48.994.100.000	48.994.100.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	323.157.992.000	323.157.992.000	47.204.900.000	35.403.800.000
63	Kab. Padang Pariaman	464.663.502.000	464.663.502.000	66.669.400.000	66.669.400.000
64	Kab. Pasaman	363.189.348.000	363.189.348.000	40.526.300.000	40.526.300.000
65	Kab. Pesisir Selatan	514.412.081.000	514.412.081.000	77.486.000.000	77.486.000.000
66	Kab. Sijunjung	331.619.992.000	331.619.992.000	42.072.500.000	42.072.500.000
67	Kab. Solok	440.088.302.000	440.088.302.000	52.035.000.000	52.035.000.000
68	Kab. Tanah Datar	432.695.146.000	432.695.146.000	47.837.100.000	47.837.100.000
69	Kota Bukit Tinggi	273.043.100.000	273.043.100.000	23.320.700.000	17.490.725.000
70	Kota Padang Panjang	239.871.127.000	239.871.127.000	17.883.000.000	13.412.550.000
71	Kota Padang	711.730.929.000	711.730.929.000	53.431.400.000	53.431.400.000
72	Kota Payakumbuh	260.336.050.000	260.336.050.000	21.192.800.000	21.192.800.000
73	Kota Sawahlunto	225.291.340.000	225.291.340.000	26.095.000.000	26.095.000.000
74	Kota Solok	237.285.270.000	237.285.270.000	19.327.200.000	14.495.725.000
75	Kota Pariaman	263.078.322.000	263.078.322.000	21.958.300.000	21.958.300.000
76	Kab. Pasaman Barat	405.247.973.000	405.247.973.000	58.579.800.000	43.939.525.000
77	Kab. Dharmasraya	299.721.996.000	299.721.996.000	37.728.900.000	37.728.900.000
78	Kab. Solok Selatan	264.291.269.000	264.291.269.000	37.686.800.000	28.268.175.000
79	**Provinsi Riau**	**380.051.123.500**	**380.051.123.500**	**56.823.400.000**	**56.823.400.000**
80	Kab. Bengkalis	180.413.024.000	180.413.024.000	18.685.800.000	14.018.775.000
81	Kab. Indragiri Hilir	573.462.644.000	573.462.644.000	65.771.700.000	65.771.700.000
82	Kab. Indragiri Hulu	437.199.799.000	437.199.799.000	11.366.900.000	11.366.900.000
83	Kab. Kampar	440.868.139.500	440.868.139.500	28.880.300.000	28.880.300.000
84	Kab. Kuantan Singingi	431.274.589.000	431.274.589.000	19.901.100.000	19.901.100.000
85	Kab. Pelalawan	363.741.026.000	363.741.026.000	17.970.200.000	17.970.200.000
86	Kab. Rokan Hilir	186.049.029.000	186.049.029.000	19.158.600.000	14.374.150.000
87	Kab. Rokan Hulu	375.558.605.000	375.558.605.000	4.347.300.000	4.347.300.000
88	Kab. Siak	30.912.561.000	30.912.561.000	10.485.500.000	10.485.500.000
89	Kota Dumai	249.181.340.000	249.181.340.000	4.149.700.000	4.149.700.000
90	Kota Pekanbaru	488.849.555.000	488.849.555.000	17.432.500.000	17.432.500.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	240.293.822.000	240.293.822.000	45.312.900.000	45.312.900.000
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**395.745.542.000**	**395.745.542.000**	**21.903.200.000**	**21.903.200.000**
93	Kab. Bintan	184.765.553.000	184.765.553.000	15.910.800.000	15.910.800.000
94	Kab. Natuna	71.909.237.000	71.909.237.000	36.315.600.000	27.239.200.000
95	Kab. Karimun	159.844.980.000	159.844.980.000	3.856.700.000	3.856.700.000
96	Kota Batam	316.771.074.000	316.771.074.000	39.157.300.000	39.157.300.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	208.875.222.000	208.875.222.000	34.289.600.000	25.717.375.000
98	Kota Tanjung Pinang	252.716.560.000	252.716.560.000	2.441.200.000	2.441.200.000
99	Kab. Lingga	200.941.641.000	200.941.641.000	4.814.500.000	4.814.500.000
100	**Provinsi Jambi**	**583.882.413.000**	**583.882.413.000**	**24.735.600.000**	**24.735.600.000**
101	Kab. Batanghari	344.992.857.000	344.992.857.000	31.436.000.000	31.436.000.000
102	Kab. Bungo	379.423.832.000	379.423.832.000	48.655.400.000	48.655.400.000
103	Kab. Kerinci	369.273.971.000	369.273.971.000	48.933.200.000	48.933.200.000
104	Kab. Merangin	416.377.224.000	416.377.224.000	46.366.700.000	46.366.700.000
105	Kab. Muaro Jambi	371.192.309.000	371.192.309.000	44.548.700.000	44.548.700.000
106	Kab. Sarolangun	353.195.573.000	353.195.573.000	42.177.900.000	42.177.900.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	279.502.187.000	279.502.187.000	-	-
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	281.719.586.000	281.719.586.000	8.350.900.000	8.350.900.000
109	Kab. Tebo	325.192.490.000	325.192.490.000	42.587.000.000	42.587.000.000
110	Kota Jambi	441.744.239.000	441.744.239.000	34.673.700.000	34.673.700.000
111	Kota Sungai Penuh	257.773.767.000	257.773.767.000	50.552.000.000	50.552.000.000
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**646.813.301.000**	**646.813.301.000**	**32.287.000.000**	**32.287.000.000**
113	Kab. Lahat	425.542.398.000	425.542.398.000	49.212.900.000	49.212.900.000
114	Kab. Musi Banyuasin	295.108.181.000	295.108.181.000	61.809.300.000	61.809.300.000
115	Kab. Musi Rawas	467.449.542.000	467.449.542.000	62.010.900.000	62.010.900.000
116	Kab. Muara Enim	463.445.283.000	463.445.283.000	41.740.800.000	41.740.800.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	670.313.909.000	670.313.909.000	66.445.100.000	66.445.100.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	375.426.926.000	375.426.926.000	8.177.300.000	8.177.300.000
119	Kota Palembang	787.613.179.000	787.613.179.000	47.679.100.000	47.679.100.000
120	Kota Pagar Alam	230.466.235.000	230.466.235.000	21.946.700.000	21.946.700.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
121	Kota Lubuk Linggau	267.774.782.000	267.774.782.000	26.693.100.000	20.020.000.000
122	Kota Prabumulih	247.679.377.000	247.679.377.000	22.567.100.000	22.567.100.000
123	Kab. Empat Lawang	238.437.199.000	238.437.199.000	41.633.900.000	41.633.900.000
124	Kab. Banyuasin	539.461.721.000	539.461.721.000	78.770.800.000	78.770.800.000
125	Kab. Ogan Ilir	363.061.753.000	363.061.753.000	41.697.800.000	41.697.800.000
126	Kab. OKU Timur	456.812.787.000	456.812.787.000	56.734.800.000	56.734.800.000
127	Kab. OKU Selatan	338.640.827.000	338.640.827.000	45.206.600.000	45.206.600.000
128	**Provinsi Bangka Belitung**	**481.589.915.000**	**481.589.915.000**	**23.841.200.000**	**17.880.900.000**
129	Kab. Bangka	325.189.354.000	325.189.354.000	39.897.500.000	39.897.500.000
130	Kab. Belitung	280.922.544.000	280.922.544.000	40.667.200.000	40.667.200.000
131	Kota Pangkal Pinang	277.489.696.000	277.489.696.000	23.772.100.000	17.829.225.000
132	Kab. Bangka Selatan	271.489.279.000	271.489.279.000	31.824.800.000	31.824.800.000
133	Kab. Bangka Tengah	235.398.938.000	235.398.938.000	27.724.000.000	27.724.000.000
134	Kab. Bangka Barat	265.457.548.000	265.457.548.000	31.259.300.000	23.445.475.000
135	Kab. Belitung Timur	261.911.574.000	261.911.574.000	29.388.300.000	29.388.300.000
136	**Provinsi Bengkulu**	**607.388.036.000**	**607.388.036.000**	**36.609.600.000**	**36.609.600.000**
137	Kab. Bengkulu Selatan	322.484.482.000	322.484.482.000	37.642.700.000	37.642.700.000
138	Kab. Bengkulu Utara	374.568.556.000	374.568.556.000	51.088.800.000	51.088.800.000
139	Kab. Rejang Lebong	374.729.904.000	374.729.904.000	40.064.100.000	40.064.100.000
140	Kota Bengkulu	397.878.445.000	397.878.445.000	27.371.500.000	27.371.500.000
141	Kab. Kaur	248.927.374.000	248.927.374.000	36.428.300.000	36.428.300.000
142	Kab. Seluma	287.335.154.000	287.335.154.000	38.360.200.000	38.360.200.000
143	Kab. Mukomuko	282.109.275.000	282.109.275.000	34.742.400.000	34.742.400.000
144	Kab. Lebong	241.212.067.000	241.212.067.000	26.269.900.000	26.269.900.000
145	Kab. Bengkulu Tengah	250.160.597.000	250.160.597.000	58.695.200.000	58.695.200.000
146	Kab. Kepahiang	264.750.012.000	264.750.012.000	33.841.600.000	33.841.600.000
147	**Provinsi Lampung**	**769.973.038.000**	**769.973.038.000**	**42.210.200.000**	**42.210.200.000**
148	Kab. Lampung Barat	402.798.910.000	402.798.910.000	59.226.200.000	59.226.200.000
149	Kab. Lampung Selatan	574.456.586.000	574.456.586.000	75.457.700.000	75.457.700.000
150	Kab. Lampung Tengah	785.179.586.000	785.179.586.000	104.395.300.000	104.395.300.000
151	Kab. Lampung Utara	562.565.682.000	562.565.682.000	67.467.700.000	67.467.700.000
152	Kab. Lampung Timur	637.844.599.000	637.844.599.000	62.538.300.000	46.909.925.000
153	Kab. Tanggamus	446.269.394.000	446.269.394.000	75.750.000.000	75.750.000.000
154	Kab. Tulang Bawang	400.393.837.000	400.393.837.000	77.334.400.000	77.334.400.000
155	Kab. Way Kanan	369.689.292.000	369.689.292.000	50.880.000.000	50.880.000.000
156	Kab. Pesawaran	372.847.754.000	372.847.754.000	68.638.800.000	68.638.800.000
157	Kab. Pringsewu	368.274.778.000	368.274.778.000	59.381.200.000	59.381.200.000
158	Kab. Mesuji	258.173.317.000	258.173.317.000	48.059.900.000	48.059.900.000
159	Kab. Tulang Bawang Barat	284.455.823.000	284.455.823.000	60.901.100.000	60.901.100.000
160	Kota Bandar Lampung	625.925.720.000	625.925.720.000	39.112.600.000	39.112.600.000
161	Kota Metro	271.643.686.000	271.643.686.000	23.527.800.000	23.527.800.000
162	**Provinsi DKI Jakarta**	**209.909.442.000**	**209.909.442.000**	-	-
163	**Provinsi Jawa Barat**	**1.181.553.108.000**	**1.181.553.108.000**	**45.764.600.000**	**45.764.600.000**
164	Kab. Bandung	1.203.323.247.000	1.203.323.247.000	100.055.000.000	100.055.000.000
165	Kab. Bekasi	680.732.734.000	680.732.734.000	73.837.100.000	55.382.500.000
166	Kab. Bogor	1.326.864.692.000	1.326.864.692.000	164.999.300.000	159.746.300.000
167	Kab. Ciamis	953.515.826.000	953.515.826.000	85.273.700.000	85.273.700.000
168	Kab. Cianjur	966.045.246.000	966.045.246.000	100.103.600.000	100.103.600.000
169	Kab. Cirebon	930.584.969.000	930.584.969.000	76.614.800.000	76.614.800.000
170	Kab. Garut	1.141.265.938.000	1.141.265.938.000	114.350.100.000	114.350.100.000
171	Kab. Indramayu	822.083.501.000	822.083.501.000	78.243.700.000	78.243.700.000
172	Kab. Karawang	814.982.255.000	814.982.255.000	81.771.000.000	81.771.000.000
173	Kab. Kuningan	722.473.887.000	722.473.887.000	69.431.200.000	69.431.200.000
174	Kab. Majalengka	710.740.072.000	710.740.072.000	68.334.700.000	68.334.700.000
175	Kab. Purwakarta	517.617.234.000	517.617.234.000	10.008.000.000	10.008.000.000
176	Kab. Subang	746.157.315.000	746.157.315.000	52.450.400.000	52.450.400.000
177	Kab. Sukabumi	972.025.825.000	972.025.825.000	115.497.000.000	115.497.000.000
178	Kab. Sumedang	731.141.647.000	731.141.647.000	72.084.200.000	72.084.200.000
179	Kab. Tasikmalaya	881.979.959.000	881.979.959.000	76.880.600.000	76.880.600.000
180	Kab. Bandung Barat	662.914.939.000	662.914.939.000	62.614.000.000	62.614.000.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
181	Kota Bandung	1.005.982.541.000	1.005.982.541.000	59.077.400.000	44.308.100.000
182	Kota Bekasi	737.162.222.000	737.162.222.000	52.128.000.000	39.096.025.000
183	Kota Bogor	473.156.906.000	473.156.906.000	11.366.600.000	8.524.950.000
184	Kota Cirebon	412.007.037.000	412.007.037.000	4.671.000.000	4.671.000.000
185	Kota Depok	534.107.270.000	534.107.270.000	18.980.200.000	14.235.200.000
186	Kota Sukabumi	330.918.367.000	330.918.367.000	19.645.100.000	19.645.100.000
187	Kota Cimahi	354.972.241.000	354.972.241.000	1.968.000.000	1.968.000.000
188	Kota Tasikmalaya	476.326.683.000	476.326.683.000	34.504.900.000	34.504.900.000
189	Kota Banjar	236.029.904.000	236.029.904.000	20.665.000.000	20.665.000.000
190	**Provinsi Banten**	**460.383.683.000**	**460.383.683.000**	**45.179.600.000**	**45.179.600.000**
191	Kab. Lebak	661.498.928.000	661.498.928.000	71.144.600.000	71.144.600.000
192	Kab. Pandeglang	724.364.772.000	724.364.772.000	91.799.600.000	91.799.600.000
193	Kab. Serang	629.724.102.000	629.724.102.000	64.563.300.000	64.563.300.000
194	Kab. Tangerang	720.907.086.000	720.907.086.000	68.699.100.000	51.524.350.000
195	Kota Cilegon	315.682.508.000	315.682.508.000	3.954.400.000	3.954.400.000
196	Kota Tangerang	554.331.356.000	554.331.356.000	11.618.100.000	11.618.100.000
197	Kota Serang	365.936.818.000	365.936.818.000	47.241.100.000	47.241.100.000
198	Kota Tangerang Selatan	412.645.939.000	412.645.939.000	57.968.000.000	57.968.000.000
199	**Provinsi Jawa Tengah**	**1.276.180.223.000**	**1.276.180.223.000**	**51.789.800.000**	**51.789.800.000**
200	Kab. Banjarnegara	562.584.579.000	562.584.579.000	65.376.800.000	65.376.800.000
201	Kab. Banyumas	835.991.326.000	835.991.326.000	93.907.900.000	93.907.900.000
202	Kab. Batang	472.388.323.000	472.388.323.000	57.230.900.000	57.230.900.000
203	Kab. Blora	547.437.970.000	547.437.970.000	77.114.800.000	77.114.800.000
204	Kab. Boyolali	641.787.696.000	641.787.696.000	67.173.500.000	67.173.500.000
205	Kab. Brebes	800.671.665.000	800.671.665.000	65.339.600.000	65.339.600.000
206	Kab. Cilacap	877.475.472.000	877.475.472.000	102.092.500.000	102.092.500.000
207	Kab. Demak	544.790.064.000	544.790.064.000	67.864.200.000	67.864.200.000
208	Kab. Grobogan	669.380.099.000	669.380.099.000	78.260.800.000	78.260.800.000
209	Kab. Jepara	592.496.116.000	592.496.116.000	70.705.000.000	70.705.000.000
210	Kab. Karanganyar	577.830.087.000	577.830.087.000	58.196.900.000	58.196.900.000
211	Kab. Kebumen	732.339.067.000	732.339.067.000	79.166.800.000	79.166.800.000
212	Kab. Kendal	569.535.389.000	569.535.389.000	67.357.800.000	67.357.800.000
213	Kab. Klaten	793.638.525.000	793.638.525.000	80.964.300.000	80.964.300.000
214	Kab. Kudus	489.096.655.000	489.096.655.000	38.321.200.000	38.321.200.000
215	Kab. Magelang	669.259.369.000	669.259.369.000	78.355.500.000	78.355.500.000
216	Kab. Pati	692.522.880.000	692.522.880.000	65.388.800.000	65.388.800.000
217	Kab. Pekalongan	553.949.031.000	553.949.031.000	63.713.900.000	63.713.900.000
218	Kab. Pemalang	672.819.577.000	672.819.577.000	67.464.600.000	67.464.600.000
219	Kab. Purbalingga	522.204.299.000	522.204.299.000	67.544.100.000	67.544.100.000
220	Kab. Purworejo	586.119.442.000	586.119.442.000	60.956.000.000	60.956.000.000
221	Kab. Rembang	468.987.872.000	468.987.872.000	62.341.000.000	62.341.000.000
222	Kab. Semarang	568.138.051.000	568.138.051.000	69.014.500.000	69.014.500.000
223	Kab. Sragen	618.724.280.000	618.724.280.000	71.624.300.000	71.624.300.000
224	Kab. Sukoharjo	565.131.680.000	565.131.680.000	49.172.300.000	49.172.300.000
225	Kab. Tegal	704.172.500.000	704.172.500.000	61.333.300.000	61.333.300.000
226	Kab. Temanggung	483.203.952.000	483.203.952.000	57.046.800.000	57.046.800.000
227	Kab. Wonogiri	682.359.252.000	682.359.252.000	77.852.700.000	77.852.700.000
228	Kab. Wonosobo	486.041.166.000	486.041.166.000	62.295.200.000	62.295.200.000
229	Kota Magelang	292.758.593.000	292.758.593.000	24.343.100.000	24.343.100.000
230	Kota Pekalongan	293.728.044.000	293.728.044.000	24.675.500.000	24.675.500.000
231	Kota Salatiga	262.810.281.000	262.810.281.000	23.541.400.000	23.541.400.000
232	Kota Semarang	715.959.967.000	715.959.967.000	48.401.500.000	48.401.500.000
233	Kota Surakarta	474.090.649.000	474.090.649.000	34.895.600.000	34.895.600.000
234	Kota Tegal	265.641.464.000	265.641.464.000	23.569.100.000	23.569.100.000
235	**Provinsi DI Yogyakarta**	**620.812.328.000**	**620.812.328.000**	**19.489.600.000**	**19.489.600.000**
236	Kab. Bantul	625.352.685.000	625.352.685.000	45.925.400.000	45.925.400.000
237	Kab. Gunung Kidul	572.300.004.000	572.300.004.000	59.168.700.000	59.168.700.000
238	Kab. Kulon Progo	444.247.738.000	444.247.738.000	48.343.900.000	48.343.900.000
239	Kab. Sleman	632.180.583.000	632.180.583.000	42.650.500.000	42.650.500.000
240	Kota Yogyakarta	436.339.933.000	436.339.933.000	1.762.100.000	1.762.100.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
241	**Provinsi Jawa Timur**	**1.347.501.699.000**	**1.347.501.699.000**	**55.031.200.000**	**55.031.200.000**
242	Kab. Bangkalan	565.946.178.000	565.946.178.000	88.399.500.000	88.399.500.000
243	Kab. Banyuwangi	815.653.045.000	815.653.045.000	81.931.200.000	81.931.200.000
244	Kab. Blitar	698.002.036.000	698.002.036.000	89.984.500.000	89.984.500.000
245	Kab. Bojonegoro	665.539.925.000	665.539.925.000	67.934.100.000	67.934.100.000
246	Kab. Bondowoso	540.204.725.000	540.204.725.000	66.946.700.000	66.946.700.000
247	Kab. Gresik	561.391.041.000	561.391.041.000	46.338.800.000	46.338.800.000
248	Kab. Jember	1.059.232.324.000	1.059.232.324.000	99.610.000.000	99.610.000.000
249	Kab. Jombang	664.825.242.000	664.825.242.000	43.082.600.000	43.082.600.000
250	Kab. Kediri	750.629.267.000	750.629.267.000	47.493.200.000	47.493.200.000
251	Kab. Lamongan	680.161.848.000	680.161.848.000	88.266.100.000	88.266.100.000
252	Kab. Lumajang	606.140.873.000	606.140.873.000	65.231.200.000	48.926.900.000
253	Kab. Madiun	523.294.108.000	523.294.108.000	53.130.900.000	53.130.900.000
254	Kab. Magetan	546.569.392.000	546.569.392.000	56.668.900.000	56.668.900.000
255	Kab. Malang	1.049.561.624.000	1.049.561.624.000	108.485.300.000	108.485.300.000
256	Kab. Mojokerto	598.971.886.000	598.971.886.000	57.904.300.000	57.904.300.000
257	Kab. Nganjuk	669.916.556.000	669.916.556.000	61.747.700.000	46.313.150.000
258	Kab. Ngawi	654.720.280.000	654.720.280.000	69.770.200.000	69.770.200.000
259	Kab. Pacitan	480.825.305.000	480.825.305.000	54.072.200.000	54.072.200.000
260	Kab. Pamekasan	513.549.051.000	513.549.051.000	65.844.700.000	63.861.100.000
261	Kab. Pasuruan	714.589.608.000	714.589.608.000	75.436.300.000	75.436.300.000
262	Kab. Ponorogo	634.712.282.000	634.712.282.000	74.787.300.000	74.787.300.000
263	Kab. Probolinggo	639.206.544.000	639.206.544.000	75.532.300.000	75.532.300.000
264	Kab. Sampang	499.762.274.000	499.762.274.000	68.545.500.000	68.545.500.000
265	Kab. Sidoarjo	759.043.520.000	759.043.520.000	59.774.600.000	59.774.600.000
266	Kab. Situbondo	516.044.782.000	516.044.782.000	60.953.300.000	60.953.300.000
267	Kab. Sumenep	664.759.775.000	664.759.775.000	67.764.500.000	67.764.500.000
268	Kab. Trenggalek	535.503.337.000	535.503.337.000	61.777.800.000	61.777.800.000
269	Kab. Tuban	606.247.946.000	606.247.946.000	66.440.200.000	66.440.200.000
270	Kab. Tulungagung	724.035.454.000	724.035.454.000	80.751.200.000	80.751.200.000
271	Kota Blitar	250.235.761.000	250.235.761.000	23.442.900.000	23.442.900.000
272	Kota Kediri	399.397.630.000	399.397.630.000	4.525.800.000	4.525.800.000
273	Kota Madiun	297.863.919.000	297.863.919.000	24.071.300.000	24.071.300.000
274	Kota Malang	533.803.729.000	533.803.729.000	15.578.900.000	15.578.900.000
275	Kota Mojokerto	265.654.548.000	265.654.548.000	20.392.000.000	20.392.000.000
276	Kota Pasuruan	264.131.270.000	264.131.270.000	15.245.200.000	15.245.200.000
277	Kota Probolinggo	311.527.083.000	311.527.083.000	22.575.200.000	22.575.200.000
278	Kota Surabaya	679.450.127.000	679.450.127.000	66.499.500.000	49.874.625.000
279	Kota Batu	273.688.209.000	273.688.209.000	17.584.500.000	17.584.500.000
280	**Provinsi Kalimantan Barat**	**845.483.888.000**	**845.483.888.000**	**38.369.500.000**	**38.369.500.000**
281	Kab. Bengkayang	340.823.512.000	340.823.512.000	59.129.600.000	59.129.600.000
282	Kab. Landak	403.595.524.000	403.595.524.000	61.860.500.000	61.860.500.000
283	Kab. Kapuas Hulu	602.042.118.000	602.042.118.000	99.765.400.000	99.765.400.000
284	Kab. Ketapang	671.248.725.000	671.248.725.000	75.134.400.000	75.134.400.000
285	Kab. Pontianak	350.258.317.000	350.258.317.000	60.884.600.000	60.884.600.000
286	Kab. Sambas	520.019.698.000	520.019.698.000	95.541.200.000	95.541.200.000
287	Kab. Sanggau	502.566.510.000	502.566.510.000	79.124.800.000	79.124.800.000
288	Kab. Sintang	553.592.817.000	553.592.817.000	77.616.900.000	77.616.900.000
289	Kota Pontianak	454.002.216.000	454.002.216.000	34.169.600.000	34.169.600.000
290	Kota Singkawang	309.388.293.000	309.388.293.000	36.183.000.000	36.183.000.000
291	Kab. Kayong Utara	254.802.207.000	254.802.207.000	51.222.000.000	51.222.000.000
292	Kab. Kubu Raya	460.860.606.000	460.860.606.000	66.596.400.000	66.596.400.000
293	Kab. Sekadau	288.662.775.000	288.662.775.000	44.261.300.000	44.261.300.000
294	Kab. Melawi	332.100.019.000	332.100.019.000	49.913.200.000	49.913.200.000
295	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**795.816.335.000**	**795.816.335.000**	**51.915.000.000**	**51.915.000.000**
296	Kab. Barito Selatan	385.876.629.000	385.876.629.000	42.290.900.000	31.722.675.000
297	Kab. Barito Utara	360.139.008.000	360.139.008.000	35.610.400.000	35.610.400.000
298	Kab. Kapuas	573.018.632.000	573.018.632.000	68.344.700.000	68.344.700.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	424.143.349.000	424.143.349.000	27.102.200.000	27.102.200.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	532.373.196.000	532.373.196.000	45.672.400.000	45.672.400.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
301	Kota Palangkaraya	386.622.999.000	386.622.999.000	39.739.600.000	39.739.600.000
302	Kab. Barito Timur	310.768.377.000	310.768.377.000	44.755.700.000	44.755.700.000
303	Kab. Murung Raya	442.915.042.000	442.915.042.000	14.589.900.000	14.589.900.000
304	Kab. Pulang Pisau	339.419.142.000	339.419.142.000	52.107.000.000	52.107.000.000
305	Kab. Gunung Mas	360.320.621.000	360.320.621.000	38.678.500.000	38.678.500.000
306	Kab. Lamandau	286.233.306.000	286.233.306.000	43.877.600.000	43.877.600.000
307	Kab. Sukamara	283.491.180.000	283.491.180.000	26.961.800.000	26.961.800.000
308	Kab. Katingan	449.162.914.000	449.162.914.000	23.415.100.000	23.415.100.000
309	Kab. Seruyan	402.454.243.000	402.454.243.000	39.513.900.000	39.513.900.000
310	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**504.876.152.000**	**504.876.152.000**	**37.246.400.000**	**37.246.400.000**
311	Kab. Banjar	429.561.238.000	429.561.238.000	43.195.600.000	43.195.600.000
312	Kab. Barito Kuala	351.563.383.000	351.563.383.000	58.788.800.000	58.788.800.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	324.451.416.000	324.451.416.000	36.846.000.000	36.846.000.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	322.545.858.000	322.545.858.000	35.989.600.000	35.989.600.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	284.013.888.000	284.013.888.000	40.751.600.000	40.751.600.000
316	Kab. Kotabaru	424.735.432.000	424.735.432.000	25.094.800.000	25.094.800.000
317	Kab. Tabalong	261.765.236.000	261.765.236.000	17.394.200.000	17.394.200.000
318	Kab. Tanah Laut	327.911.683.000	327.911.683.000	15.431.600.000	15.431.600.000
319	Kab. Tapin	284.609.398.000	284.609.398.000	31.810.200.000	31.810.200.000
320	Kota Banjarbaru	242.193.675.000	242.193.675.000	25.384.300.000	25.384.300.000
321	Kota Banjarmasin	444.635.637.000	444.635.637.000	11.892.700.000	11.892.700.000
322	Kab. Balangan	177.244.658.000	177.244.658.000	2.712.900.000	2.036.450.000
323	Kab. Tanah Bumbu	283.283.503.000	283.283.503.000	17.797.100.000	17.797.100.000
324	**Provinsi Kalimantan Timur**	**51.446.845.000**	**51.446.845.000**	**38.188.100.000**	**38.188.100.000**
325	Kab. Berau	340.428.344.000	340.428.344.000	9.669.200.000	7.251.925.000
326	Kab. Bulungan	245.369.101.000	245.369.101.000	6.787.000.000	6.787.000.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	1.365.820.000	1.365.820.000	50.265.600.000	37.699.200.000
328	Kab. Kutai Barat	437.834.645.000	437.834.645.000	48.299.800.000	48.299.800.000
329	Kab. Kutai Timur	311.466.164.000	311.466.164.000	13.971.900.000	13.971.900.000
330	Kab. Malinau	519.080.393.000	519.080.393.000	40.780.000.000	40.780.000.000
331	Kab. Nunukan	228.661.701.000	228.661.701.000	73.758.700.000	73.758.700.000
332	Kab. Pasir	208.204.282.000	208.204.282.000	8.658.600.000	8.658.600.000
333	Kota Balikpapan	268.229.224.000	268.229.224.000	7.928.600.000	7.928.600.000
334	Kota Bontang	93.934.545.000	93.934.545.000	4.820.300.000	4.820.300.000
335	Kab. Tana Tidung	149.598.558.000	149.598.558.000	8.835.000.000	2.650.500.000
336	Kota Samarinda	397.763.967.000	397.763.967.000	-	-
337	Kota Tarakan	160.468.978.000	160.468.978.000	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	118.428.287.000	118.428.287.000	7.953.600.000	7.953.600.000
339	**Provinsi Sulawesi Utara**	**619.711.007.000**	**619.711.007.000**	**29.288.200.000**	**29.288.200.000**
340	Kab. Bolaang Mongondow	320.510.271.000	320.510.271.000	52.680.700.000	52.680.700.000
341	Kab. Minahasa	409.491.075.000	409.491.075.000	50.651.800.000	50.651.800.000
342	Kab. Sangihe	322.078.577.000	322.078.577.000	60.701.800.000	60.701.800.000
343	Kota Bitung	304.672.494.000	304.672.494.000	27.999.800.000	27.999.800.000
344	Kota Manado	482.454.131.000	482.454.131.000	42.958.800.000	42.958.800.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	278.873.014.000	278.873.014.000	45.300.600.000	45.300.600.000
346	Kab. Minahasa Selatan	331.072.211.000	331.072.211.000	43.240.500.000	43.240.500.000
347	Kab. Minahasa Tenggara	254.095.638.000	254.095.638.000	44.095.400.000	44.095.400.000
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	256.257.512.000	256.257.512.000	46.519.800.000	46.519.800.000
349	Kota Kotamubagu	223.190.065.000	223.190.065.000	27.514.400.000	27.514.400.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	182.376.446.000	182.376.446.000	56.185.200.000	56.185.200.000
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	195.503.156.000	195.503.156.000	54.308.500.000	54.308.500.000
352	Kota Tomohon	247.393.666.000	247.393.666.000	34.559.700.000	34.559.700.000
353	Kab. Minahasa Utara	307.575.485.000	307.575.485.000	47.726.300.000	47.726.300.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	228.524.673.000	228.524.673.000	45.453.500.000	45.453.500.000
355	**Provinsi Gorontalo**	**461.118.102.000**	**461.118.102.000**	**28.057.200.000**	**28.057.200.000**
356	Kab. Boalemo	253.481.090.000	253.481.090.000	46.054.900.000	46.054.900.000
357	Kab. Gorontalo	382.676.841.000	382.676.841.000	60.782.000.000	60.782.000.000
358	Kota Gorontalo	296.633.489.000	296.633.489.000	28.678.600.000	28.678.600.000
359	Kab. Pohuwato	286.367.211.000	286.367.211.000	44.304.100.000	44.304.100.000
360	Kab. Gorontalo Utara	210.601.972.000	210.601.972.000	43.271.300.000	43.271.300.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
361	Kab. Bone Bolango	267.849.954.000	267.849.954.000	27.061.500.000	27.061.500.000
362	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**743.161.759.000**	**743.161.759.000**	**38.179.100.000**	**38.179.100.000**
363	Kab. Banggai	504.385.617.000	504.385.617.000	64.255.200.000	64.255.200.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	323.960.072.000	323.960.072.000	48.555.500.000	48.555.500.000
365	Kab. Buol	330.193.207.000	330.193.207.000	45.520.500.000	45.520.500.000
366	Kab. Toli-Toli	352.284.608.000	352.284.608.000	47.516.400.000	47.516.400.000
367	Kab. Donggala	392.426.232.000	392.426.232.000	65.306.500.000	65.306.500.000
368	Kab. Morowali	438.589.730.000	438.589.730.000	48.504.000.000	48.504.000.000
369	Kab. Poso	434.150.162.000	434.150.162.000	57.450.800.000	57.450.800.000
370	Kota Palu	422.397.157.000	422.397.157.000	39.201.900.000	39.201.900.000
371	Kab. Parigi Moutong	447.907.500.000	447.907.500.000	70.267.900.000	70.267.900.000
372	Kab. Sigi	383.717.155.000	383.717.155.000	53.930.500.000	53.930.500.000
373	Kab. Tojo Una Una	310.835.670.000	310.835.670.000	55.087.200.000	55.087.200.000
374	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**816.757.969.000**	**816.757.969.000**	**41.886.000.000**	**41.886.000.000**
375	Kab. Bantaeng	263.320.424.000	263.320.424.000	38.901.900.000	38.901.900.000
376	Kab. Barru	299.397.301.000	299.397.301.000	38.987.000.000	38.987.000.000
377	Kab. Bone	622.434.218.000	622.434.218.000	88.390.000.000	88.390.000.000
378	Kab. Bulukumba	431.348.855.000	431.348.855.000	63.052.800.000	63.052.800.000
379	Kab. Enrekang	302.521.276.000	302.521.276.000	42.179.400.000	42.179.400.000
380	Kab. Gowa	470.823.554.000	470.823.554.000	51.260.300.000	51.260.300.000
381	Kab. Jeneponto	355.798.393.000	355.798.393.000	57.899.600.000	57.899.600.000
382	Kab. Luwu	396.991.281.000	396.991.281.000	57.333.500.000	57.333.500.000
383	Kab. Luwu Utara	377.853.294.000	377.853.294.000	55.722.200.000	55.722.200.000
384	Kab. Maros	358.603.014.000	358.603.014.000	49.936.900.000	49.936.900.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	385.783.049.000	385.783.049.000	57.601.600.000	57.601.600.000
386	Kab. Pinrang	420.189.733.000	420.189.733.000	51.493.100.000	51.493.100.000
387	Kab. Selayar	304.387.519.000	304.387.519.000	46.194.100.000	46.194.100.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	369.923.301.000	369.923.301.000	46.896.800.000	46.896.800.000
389	Kab. Sinjai	345.768.216.000	345.768.216.000	51.562.900.000	51.562.900.000
390	Kab. Soppeng	376.043.287.000	376.043.287.000	40.756.100.000	40.756.100.000
391	Kab. Takalar	334.734.972.000	334.734.972.000	43.636.900.000	43.636.900.000
392	Kab. Tana Toraja	322.960.734.000	322.960.734.000	58.028.600.000	58.028.600.000
393	Kab. Wajo	413.968.242.000	413.968.242.000	63.257.200.000	63.257.200.000
394	Kota Pare-pare	276.566.812.000	276.566.812.000	29.405.800.000	29.405.800.000
395	Kab. Toraja Utara	287.449.218.000	287.449.218.000	65.058.800.000	65.058.800.000
396	Kota Makassar	718.799.534.000	718.799.534.000	60.898.100.000	60.898.100.000
397	Kota Palopo	298.099.718.000	298.099.718.000	28.169.000.000	28.169.000.000
398	Kab. Luwu Timur	293.680.096.000	293.680.096.000	41.591.900.000	41.591.900.000
399	**Provinsi Sulawesi Barat**	**441.578.798.000**	**441.578.798.000**	**35.860.700.000**	**35.860.700.000**
400	Kab. Majene	300.811.441.000	300.811.441.000	47.602.900.000	47.602.900.000
401	Kab. Mamuju	422.652.587.000	422.652.587.000	76.023.700.000	76.023.700.000
402	Kab. Polewali Mandar	400.635.194.000	400.635.194.000	53.733.000.000	53.733.000.000
403	Kab. Mamasa	290.163.285.000	290.163.285.000	52.380.700.000	52.380.700.000
404	Kab. Mamuju Utara	227.777.163.000	227.777.163.000	34.781.600.000	34.781.600.000
405	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**700.836.557.000**	**700.836.557.000**	**33.804.600.000**	**33.804.600.000**
406	Kab. Buton	382.426.101.000	382.426.101.000	47.602.800.000	47.602.800.000
407	Kab. Konawe	473.778.515.000	473.778.515.000	55.124.000.000	55.124.000.000
408	Kab. Kolaka	450.584.108.000	450.584.108.000	33.268.000.000	33.268.000.000
409	Kab. Muna	425.648.391.000	425.648.391.000	65.755.000.000	65.755.000.000
410	Kota Kendari	399.702.724.000	399.702.724.000	31.327.900.000	31.327.900.000
411	Kota Bau-bau	317.920.877.000	317.920.877.000	24.674.800.000	24.674.800.000
412	Kab. Konawe Selatan	362.304.553.000	362.304.553.000	57.365.600.000	57.365.600.000
413	Kab. Bombana	282.286.386.000	282.286.386.000	41.146.400.000	41.146.400.000
414	Kab. Konawe Utara	289.562.449.000	289.562.449.000	47.830.500.000	47.830.500.000
415	Kab. Buton Utara	250.484.842.000	250.484.842.000	41.591.900.000	31.194.675.000
416	Kab. Wakatobi	252.088.407.000	252.088.407.000	30.730.600.000	30.730.600.000
417	Kab. Kolaka Utara	273.275.706.000	273.275.706.000	35.129.200.000	35.129.200.000
418	**Provinsi Bali**	**560.673.539.000**	**560.673.539.000**	**21.221.700.000**	**15.916.275.000**
419	Kab. Badung	157.052.376.000	157.052.376.000	290.900.000	218.175.000
420	Kab. Bangli	321.578.191.000	321.578.191.000	29.352.400.000	29.352.400.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
421	Kab. Buleleng	568.406.307.000	568.406.307.000	54.728.700.000	54.728.700.000
422	Kab. Gianyar	435.103.918.000	435.103.918.000	41.076.300.000	41.076.300.000
423	Kab. Jembrana	339.721.785.000	339.721.785.000	35.494.800.000	35.494.800.000
424	Kab. Karangasem	410.037.739.000	410.037.739.000	41.734.700.000	41.734.700.000
425	Kab. Klungkung	319.814.056.000	319.814.056.000	29.886.200.000	22.416.150.000
426	Kab. Tabanan	463.294.443.000	463.294.443.000	41.524.200.000	41.524.200.000
427	Kota Denpasar	381.538.038.000	381.538.038.000	3.556.900.000	3.556.900.000
428	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**646.671.083.000**	**646.671.083.000**	**45.964.400.000**	**45.964.400.000**
429	Kab. Bima	515.830.728.000	515.830.728.000	54.220.900.000	54.220.900.000
430	Kab. Dompu	340.657.285.000	340.657.285.000	42.496.800.000	42.496.800.000
431	Kab. Lombok Barat	466.594.063.000	466.594.063.000	53.265.600.000	53.265.600.000
432	Kab. Lombok Tengah	589.768.958.000	589.768.958.000	57.211.600.000	57.211.600.000
433	Kab. Lombok Timur	697.489.073.000	697.489.073.000	69.351.800.000	69.351.800.000
434	Kab. Sumbawa	496.158.922.000	496.158.922.000	58.735.900.000	58.735.900.000
435	Kota Mataram	367.095.372.000	367.095.372.000	25.487.000.000	25.487.000.000
436	Kab. Lombok Utara	246.572.267.000	246.572.267.000	35.120.000.000	35.120.000.000
437	Kota Bima	268.001.565.000	268.001.565.000	23.036.500.000	23.036.500.000
438	Kab. Sumbawa Barat	214.927.297.000	214.927.297.000	25.143.800.000	25.143.800.000
439	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**752.057.444.000**	**752.057.444.000**	**47.399.400.000**	**47.399.400.000**
440	Kab. Alor	360.447.337.000	360.447.337.000	50.351.600.000	50.351.600.000
441	Kab. Belu	427.871.241.000	427.871.241.000	63.134.400.000	63.134.400.000
442	Kab. Ende	376.131.456.000	376.131.456.000	57.646.400.000	57.646.400.000
443	Kab. Flores Timur	372.359.575.000	372.359.575.000	49.608.800.000	49.608.800.000
444	Kab. Kupang	407.688.523.000	407.688.523.000	66.211.700.000	66.211.700.000
445	Kab. Lembata	263.583.846.000	263.583.846.000	45.973.300.000	45.973.300.000
446	Kab. Manggarai	319.679.873.000	319.679.873.000	61.192.000.000	61.192.000.000
447	Kab. Ngada	287.115.923.000	287.115.923.000	42.245.800.000	42.245.800.000
448	Kab. Sikka	362.434.160.000	362.434.160.000	47.417.000.000	47.417.000.000
449	Kab. Sumba Barat	238.492.879.000	238.492.879.000	44.171.700.000	44.171.700.000
450	Kab. Sumba Timur	385.899.303.000	385.899.303.000	48.358.100.000	48.358.100.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	459.454.363.000	459.454.363.000	76.392.400.000	76.392.400.000
452	Kab. Timor Tengah Utara	334.409.729.000	334.409.729.000	60.569.900.000	60.569.900.000
453	Kota Kupang	377.792.563.000	377.792.563.000	40.732.900.000	40.732.900.000
454	Kab. Rote Ndao	236.407.490.000	236.407.490.000	34.115.300.000	34.115.300.000
455	Kab. Nagekeo	251.101.794.000	251.101.794.000	50.740.100.000	50.740.100.000
456	Kab. Sumba Tengah	207.842.141.000	207.842.141.000	51.495.300.000	51.495.300.000
457	Kab. Sumba Barat Daya	277.618.206.000	277.618.206.000	54.962.500.000	54.962.500.000
458	Kab. Manggarai Timur	286.150.561.000	286.150.561.000	62.128.500.000	62.128.500.000
459	Kab. Sabu Raijua	195.911.747.000	195.911.747.000	54.201.400.000	54.201.400.000
460	Kab. Manggarai Barat	287.008.667.000	287.008.667.000	47.839.600.000	47.839.600.000
461	**Provinsi Maluku**	**703.993.953.000**	**703.993.953.000**	**44.657.700.000**	**44.657.700.000**
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	318.329.722.000	318.329.722.000	50.781.000.000	50.781.000.000
463	Kab. Maluku Tengah	549.558.383.000	549.558.383.000	58.660.900.000	58.660.900.000
464	Kab. Maluku Tenggara	254.149.048.000	254.149.048.000	43.042.600.000	43.042.600.000
465	Kab. Pulau Buru	274.961.724.000	274.961.724.000	55.136.600.000	55.136.600.000
466	Kota Ambon	411.355.104.000	411.355.104.000	36.720.500.000	36.720.500.000
467	Kab. Seram Bagian Barat	323.727.809.000	323.727.809.000	43.232.000.000	43.232.000.000
468	Kab. Seram Bagian Timur	262.855.512.000	262.855.512.000	44.468.200.000	44.468.200.000
469	Kab. Maluku Barat Daya	302.514.663.000	302.514.663.000	47.674.500.000	35.758.525.000
470	Kab. Buru Selatan	222.107.273.000	222.107.273.000	43.774.700.000	43.774.700.000
471	Kab. Kepulauan Aru	302.931.395.000	302.931.395.000	35.687.600.000	26.768.625.000
472	Kota Tual	196.885.900.000	196.885.900.000	53.698.200.000	53.698.200.000
473	**Provinsi Maluku Utara**	**540.389.811.000**	**540.389.811.000**	**51.233.800.000**	**51.233.800.000**
474	Kab. Halmahera Tengah	255.879.015.000	255.879.015.000	39.916.000.000	39.916.000.000
475	Kab. Halmahera Barat	263.223.050.000	263.223.050.000	48.610.200.000	48.610.200.000
476	Kota Ternate	314.020.637.000	314.020.637.000	29.522.900.000	29.522.900.000
477	Kab. Halmahera Timur	242.818.772.000	242.818.772.000	40.221.500.000	40.221.500.000
478	Kota Tidore Kepulauan	313.516.331.000	313.516.331.000	40.727.000.000	40.727.000.000
479	Kab. Kepulauan Sula	296.452.813.000	296.452.813.000	54.960.400.000	54.960.400.000
480	Kab. Pulau Morotai	203.956.615.000	203.956.615.000	53.034.100.000	53.034.100.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
481	Kab. Halmahera Selatan	364.163.238.000	364.163.238.000	50.593.600.000	50.593.600.000
482	Kab. Halmahera Utara	290.478.880.000	290.478.880.000	54.722.900.000	54.722.900.000
483	Kab. Yalimo	299.082.295.000	299.082.295.000	126.798.900.000	126.798.900.000
484	Kab. Lanny Jaya	323.394.599.000	323.394.599.000	106.575.500.000	106.575.500.000
485	**Provinsi Papua**	**1.276.285.908.000**	**1.276.285.908.000**	**96.154.200.000**	**72.115.650.000**
486	Kab. Biak Numfor	363.097.861.000	363.097.861.000	64.854.400.000	64.854.400.000
487	Kab. Jayapura	410.483.253.000	410.483.253.000	49.271.600.000	49.271.600.000
488	Kab. Jayawijaya	408.441.790.000	408.441.790.000	96.775.100.000	96.775.100.000
489	Kab. Merauke	754.829.983.000	754.829.983.000	102.798.600.000	102.798.600.000
490	Kab. Mimika	316.335.501.000	316.335.501.000	53.575.100.000	53.575.100.000
491	Kab. Nabire	428.579.722.000	428.579.722.000	71.783.600.000	71.783.600.000
492	Kab. Paniai	384.779.134.000	384.779.134.000	89.280.300.000	89.280.300.000
493	Kab. Puncak Jaya	413.704.652.000	413.704.652.000	90.837.800.000	90.837.800.000
494	Kab. Kepulauan Yapen	304.815.361.000	304.815.361.000	60.089.200.000	60.089.200.000
495	Kota Jayapura	392.664.839.000	392.664.839.000	46.373.800.000	46.373.800.000
496	Kab. Sarmi	430.994.888.000	430.994.888.000	39.170.000.000	39.170.000.000
497	Kab. Keerom	329.653.119.000	329.653.119.000	44.832.900.000	44.832.900.000
498	Kab. Yahukimo	428.267.102.000	428.267.102.000	66.188.000.000	66.188.000.000
499	Kab. Pegunungan Bintang	494.685.364.000	494.685.364.000	78.518.900.000	78.518.900.000
500	Kab. Tolikara	378.438.060.000	378.438.060.000	97.352.100.000	97.352.100.000
501	Kab. Boven Digoel	531.912.344.000	531.912.344.000	52.693.600.000	52.693.600.000
502	Kab. Mappi	499.129.572.000	499.129.572.000	75.562.400.000	75.562.400.000
503	Kab. Asmat	589.993.333.000	589.993.333.000	62.047.800.000	62.047.800.000
504	Kab. Waropen	316.615.827.000	316.615.827.000	45.827.300.000	45.827.300.000
505	Kab. Mamberamo Raya	438.951.482.000	438.951.482.000	52.612.600.000	52.612.600.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	291.037.176.000	291.037.176.000	88.002.800.000	88.002.800.000
507	Kab. Nduga	350.094.019.000	350.094.019.000	127.624.100.000	95.720.700.000
508	Kab. Dogiyai	280.084.219.000	280.084.219.000	62.338.000.000	62.338.000.000
509	Kab. Intan Jaya	419.415.561.000	419.415.561.000	124.892.200.000	124.892.200.000
510	Kab. Puncak	460.452.765.000	460.452.765.000	109.807.100.000	109.807.100.000
511	Kab. Deiyai	322.332.648.000	322.332.648.000	92.131.800.000	92.131.800.000
512	Kab. Supiori	275.955.292.000	275.955.292.000	41.762.700.000	41.762.700.000
513	**Provinsi Papua Barat**	**700.444.910.000**	**700.444.910.000**	**40.538.900.000**	**40.538.900.000**
514	Kab. Sorong	360.929.803.000	360.929.803.000	74.414.400.000	74.414.400.000
515	Kab. Manokwari	444.344.531.000	444.344.531.000	60.694.400.000	60.694.400.000
516	Kab. Fak Fak	404.103.587.000	404.103.587.000	55.316.500.000	55.316.500.000
517	Kota Sorong	269.780.833.000	269.780.833.000	44.669.000.000	44.669.000.000
518	Kab. Sorong Selatan	255.252.462.000	255.252.462.000	55.172.900.000	55.172.900.000
519	Kab. Raja Ampat	372.441.509.000	372.441.509.000	66.824.900.000	66.824.900.000
520	Kab. Teluk Bintuni	391.764.892.000	391.764.892.000	44.661.500.000	44.661.500.000
521	Kab. Teluk Wondama	270.181.889.000	270.181.889.000	52.843.400.000	52.843.400.000
522	Kab. Tambrauw	223.388.735.000	223.388.735.000	61.764.200.000	61.764.200.000
523	Kab. Maybrat	278.553.707.000	278.553.707.000	70.446.700.000	70.446.700.000
524	Kab. Kaimana	392.068.119.000	392.068.119.000	39.938.300.000	39.938.300.000
525	Dana Cadangan				
	JUMLAH	**225.533.712.048.000**	**225.533.712.048.000**	**25.232.800.900.000**	**24.803.509.925.000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**4.545.783.067.500**	**4.510.656.496.500**	**34.778.571.000**	**4.545.435.067.500**
2	Kab. Aceh Barat	42.725.388.520	0	42.725.388.520	42.725.388.520
3	Kab. Aceh Besar	85.423.799.200	0	85.423.799.200	85.423.799.200
4	Kab. Aceh Selatan	50.966.910.920	0	50.966.910.920	50.966.910.920
5	Kab. Aceh Singkil	62.691.813.160	0	62.691.813.160	62.691.813.160
6	Kab. Aceh Tengah	106.331.597.320	0	106.331.597.320	106.331.597.320
7	Kab. Aceh Tenggara	100.854.652.080	0	100.854.652.080	100.854.652.080
8	Kab. Aceh Timur	92.186.262.160	0	92.186.262.160	92.186.262.160
9	Kab. Aceh Utara	127.493.964.360	0	127.493.964.360	127.493.964.360
10	Kab. Bireun	104.523.344.880	0	104.523.344.880	104.523.344.880
11	Kab. Pidie	133.384.058.280	0	133.384.058.280	133.384.058.280
12	Kab. Simeulue	47.586.550.240	0	47.586.550.240	47.586.550.240
13	Kota Banda Aceh	128.887.734.760	0	128.887.734.760	128.887.734.760
14	Kota Sabang	62.949.019.460	0	62.949.019.460	62.949.019.460
15	Kota Langsa	71.609.085.880	0	71.609.085.880	71.609.085.880
16	Kota Lhokseumawe	63.695.002.840	0	63.695.002.840	63.695.002.840
17	Kab. Nagan Raya	60.504.786.040	0	60.504.786.040	60.504.786.040
18	Kab. Aceh Jaya	58.153.591.880	0	58.153.591.880	58.153.591.880
19	Kab. Pidie Jaya	66.046.204.840	0	66.046.204.840	66.046.204.840
20	Kab. Aceh Barat Daya	40.925.922.040	0	40.925.922.040	40.925.922.040
21	Kab. Gayo Lues	66.798.254.600	0	66.798.254.600	66.798.254.600
22	Kab. Aceh Tamiang	78.863.745.280	0	78.863.745.280	78.863.745.280
23	Kab. Bener Meriah	60.911.260.600	0	60.911.260.600	60.911.260.600
24	Kota Subulussalam	58.858.997.040	0	58.858.997.040	58.858.997.040
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**3.577.572.000**	**0**	-	**0**
26	Kab. Asahan	123.883.886.000	0	123.883.886.000	123.883.886.000
27	Kab. Dairi	67.885.506.540	0	67.366.384.340	67.366.384.340
28	Kab. Deli Serdang	215.292.670.760	0	215.292.670.760	215.292.670.760
29	Kab. Tanah Karo	79.145.301.160	0	72.812.158.160	72.812.158.160
30	Kab. Labuhan Batu	116.841.637.880	0	116.841.637.880	116.841.637.880
31	Kab. Langkat	144.273.312.140	0	144.273.312.140	144.273.312.140
32	Kab. Mandailing Natal	84.131.369.320	0	84.131.369.320	84.131.369.320
33	Kab. Nias	56.731.991.860	0	56.731.991.860	56.731.991.860
34	Kab. Simalungun	153.032.466.600	0	153.032.466.600	153.032.466.600
35	Kab. Tapanuli Selatan	91.625.100.040	0	91.625.100.040	91.625.100.040
36	Kab. Tapanuli Tengah	86.012.199.680	0	81.062.199.680	81.062.199.680
37	Kab. Tapanuli Utara	130.216.075.080	0	130.216.075.080	130.216.075.080
38	Kab. Toba Samosir	62.425.027.640	0	62.425.027.640	62.425.027.640
39	Kota Binjai	113.953.417.880	0	113.953.417.880	113.953.417.880
40	Kota Medan	341.784.638.440	0	339.166.438.940	339.166.438.940
41	Kota Pematang Siantar	80.050.435.520	0	80.050.435.520	80.050.435.520
42	Kota Sibolga	66.888.104.180	0	66.888.104.180	66.888.104.180
43	Kota Tanjung Balai	38.113.896.240	0	38.113.896.240	38.113.896.240
44	Kab. Batu Bara	78.632.856.360	0	76.108.356.360	76.108.356.360
45	Kab. Labuhan Batu Utara	92.828.809.280	0	92.828.809.280	92.828.809.280
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	40.090.881.600	0	40.090.881.600	40.090.881.600
47	Kab. Padang Lawas Utara	37.089.367.440	0	37.089.367.440	37.089.367.440
48	Kab. Padang Lawas	40.150.921.720	0	39.327.909.720	39.327.909.720
49	Kab. Nias Utara	31.311.541.200	0	31.311.541.200	31.311.541.200
50	Kab. Nias Barat	20.525.664.760	0	20.525.664.760	20.525.664.760
51	Kota Tebing Tinggi	60.711.327.530	0	60.711.327.530	60.711.327.530
52	Kota Padang Sidempuan	77.971.928.760	0	77.971.928.760	77.971.928.760
53	Kab. Pakpak Bharat	59.354.458.220	0	59.354.458.220	59.354.458.220
54	Kab. Nias Selatan	57.688.736.760	0	57.688.736.760	57.688.736.760
55	Kab. Humbang Hasundutan	51.614.456.320	0	51.614.456.320	51.614.456.320
56	Kab. Serdang Bedagai	124.363.903.600	0	124.363.903.600	124.363.903.600
57	Kab. Samosir	40.887.287.080	0	40.887.287.080	40.887.287.080
58	Kota Gunung sitoli	40.201.735.240	0	40.201.735.240	40.201.735.240
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**18.835.500.000**	**0**	**18.835.500.000**	**18.835.500.000**
60	Kab. Limapuluh Kota	101.445.706.560	0	101.445.706.560	101.445.706.560
61	Kab. Agam	125.404.379.760	0	125.404.379.760	125.404.379.760
62	Kab. Kepulauan Mentawai	25.966.900.200	0	20.248.945.700	20.248.945.700
63	Kab. Padang Pariaman	144.793.341.240	0	144.793.341.240	144.793.341.240
64	Kab. Pasaman	106.904.913.800	0	106.904.913.800	106.904.913.800
65	Kab. Pesisir Selatan	113.599.779.240	0	113.599.779.240	113.599.779.240
66	Kab. Sijunjung	83.968.049.720	0	83.968.049.720	83.968.049.720
67	Kab. Solok	86.301.452.720	0	86.301.452.720	86.301.452.720
68	Kab. Tanah Datar	99.899.159.440	0	99.899.159.440	99.899.159.440
69	Kota Bukit Tinggi	39.591.625.480	0	39.591.625.480	39.591.625.480
70	Kota Padang Panjang	35.048.563.080	0	35.048.563.080	35.048.563.080
71	Kota Padang	178.009.844.160	0	178.009.844.160	178.009.844.160
72	Kota Payakumbuh	45.079.598.520	0	45.079.598.520	45.079.598.520
73	Kota Sawahlunto	77.149.162.600	0	67.249.162.600	67.249.162.600
74	Kota Solok	49.708.419.870	0	49.708.419.870	49.708.419.870
75	Kota Pariaman	67.020.414.520	0	67.020.414.520	67.020.414.520
76	Kab. Pasaman Barat	69.591.956.720	0	69.591.956.720	69.591.956.720
77	Kab. Dharmasraya	88.622.818.760	0	78.722.818.760	78.722.818.760
78	Kab. Solok Selatan	72.466.517.160	0	65.165.267.160	65.165.267.160
79	**Provinsi Riau**	**3.473.322.000**	**0**	**3.473.322.000**	**3.473.322.000**
80	Kab. Bengkalis	95.066.098.160	0	95.066.098.160	95.066.098.160
81	Kab. Indragiri Hilir	92.871.642.160	0	92.871.642.160	92.871.642.160

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
82	Kab. Indragiri Hulu	69.752.824.480	0	69.752.824.480	69.752.824.480
83	Kab. Kampar	124.524.529.120	0	124.524.529.120	124.524.529.120
84	Kab. Kuantan Singingi	63.311.086.080	0	63.311.086.080	63.311.086.080
85	Kab. Pelalawan	57.801.005.780	0	57.801.005.780	57.801.005.780
86	Kab. Rokan Hilir	86.655.124.160	0	81.682.513.160	81.682.513.160
87	Kab. Rokan Hulu	80.105.262.480	0	80.105.262.480	80.105.262.480
88	Kab. Siak	67.079.475.040	0	67.079.475.040	67.079.475.040
89	Kota Dumai	50.821.143.080	0	50.821.143.080	50.821.143.080
90	Kota Pekanbaru	160.383.735.880	0	160.383.735.880	160.383.735.880
91	Kab. Kepulauan Meranti	59.384.816.320	0	39.124.464.820	39.124.464.820
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**9.073.500.000**	**0**	**9.073.500.000**	**9.073.500.000**
93	Kab. Bintan	28.341.153.120	0	28.341.153.120	28.341.153.120
94	Kab. Natuna	17.588.332.600	0	17.588.332.600	17.588.332.600
95	Kab. Karimun	47.632.066.640	0	47.632.066.640	47.632.066.640
96	Kota Batam	78.399.634.010	0	78.399.634.010	78.399.634.010
97	Kab. Kepulauan Anambas	45.226.645.200	0	36.748.179.200	36.748.179.200
98	Kota Tanjung Pinang	35.314.242.760	0	35.314.242.760	35.314.242.760
99	Kab. Lingga	28.018.318.320	0	28.018.318.320	28.018.318.320
100	**Provinsi Jambi**	**18.000.000.000**	**0**	**18.000.000.000**	**18.000.000.000**
101	Kab. Batanghari	57.707.037.800	0	57.707.037.800	57.707.037.800
102	Kab. Bungo	70.886.348.320	0	70.886.348.320	70.886.348.320
103	Kab. Kerinci	80.191.735.160	0	80.191.735.160	80.191.735.160
104	Kab. Merangin	72.763.637.880	0	72.763.637.880	72.763.637.880
105	Kab. Muaro Jambi	94.095.210.360	0	94.095.210.360	94.095.210.360
106	Kab. Sarolangun	80.267.122.320	0	80.267.122.320	80.267.122.320
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	47.236.939.600	0	47.236.939.600	47.236.939.600
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	39.871.229.160	0	39.871.229.160	39.871.229.160
109	Kab. Tebo	58.032.581.120	0	58.032.581.120	58.032.581.120
110	Kota Jambi	118.034.840.840	0	118.034.840.840	118.034.840.840
111	Kota Sungai Penuh	47.304.224.080	0	47.304.224.080	47.304.224.080
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**38.422.173.000**	**0**	**38.422.173.000**	**38.422.173.000**
113	Kab. Lahat	104.037.842.560	0	104.037.842.560	104.037.842.560
114	Kab. Musi Banyuasin	82.903.254.960	0	82.903.254.960	82.903.254.960
115	Kab. Musi Rawas	106.564.221.240	0	106.564.221.240	106.564.221.240
116	Kab. Muara Enim	118.905.362.560	0	118.905.362.560	118.905.362.560
117	Kab. Ogan Komering Ilir	140.104.144.000	0	140.104.144.000	140.104.144.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	84.406.387.160	0	84.406.387.160	84.406.387.160
119	Kota Palembang	284.798.457.480	0	284.798.457.480	284.798.457.480
120	Kota Pagar Alam	39.614.729.480	0	39.614.729.480	39.614.729.480
121	Kota Lubuk Linggau	100.507.483.340	0	94.319.983.340	94.319.983.340
122	Kota Prabumulih	37.098.710.480	0	37.098.710.480	37.098.710.480
123	Kab. Empat Lawang	41.926.580.960	0	41.926.580.960	41.926.580.960
124	Kab. Banyuasin	102.216.862.800	0	102.216.862.800	102.216.862.800
125	Kab. Ogan Ilir	87.078.774.400	0	87.078.774.400	87.078.774.400
126	Kab. OKU Timur	120.490.764.080	0	120.490.764.080	120.490.764.080
127	Kab. OKU Selatan	84.741.144.560	0	84.741.144.560	84.741.144.560
128	**Provinsi Bangka Belitung**	**33.778.571.000**	**0**	**33.778.571.000**	**33.778.571.000**
129	Kab. Bangka	44.739.037.040	0	44.739.037.040	44.739.037.040
130	Kab. Belitung	32.829.834.120	0	32.829.834.120	32.829.834.120
131	Kota Pangkal Pinang	38.196.974.750	0	38.196.974.750	38.196.974.750
132	Kab. Bangka Selatan	28.003.513.560	0	28.003.513.560	28.003.513.560
133	Kab. Bangka Tengah	43.518.488.080	0	43.518.488.080	43.518.488.080
134	Kab. Bangka Barat	36.508.910.960	0	36.508.910.960	36.508.910.960
135	Kab. Belitung Timur	24.651.642.640	0	24.651.642.640	24.651.642.640
136	**Provinsi Bengkulu**	**9.240.071.000**	**0**	**9.240.071.000**	**9.240.071.000**
137	Kab. Bengkulu Selatan	67.011.032.760	0	67.011.032.760	67.011.032.760
138	Kab. Bengkulu Utara	156.992.730.890	0	156.982.551.465	156.982.551.465
139	Kab. Rejang Lebong	87.932.714.160	0	87.932.714.160	87.932.714.160
140	Kota Bengkulu	98.992.942.200	0	98.985.404.700	98.985.404.700
141	Kab. Kaur	41.363.433.080	0	41.363.433.080	41.363.433.080
142	Kab. Seluma	77.492.288.800	0	77.492.288.800	77.492.288.800
143	Kab. Mukomuko	52.192.488.440	0	52.192.488.440	52.192.488.440
144	Kab. Lebong	73.744.842.100	0	73.744.842.100	73.744.842.100
145	Kab. Bengkulu Tengah	40.575.543.580	0	40.575.543.580	40.575.543.580
146	Kab. Kepahiang	71.768.356.020	0	71.721.798.665	71.721.798.665
147	**Provinsi Lampung**	**43.563.000.000**	**0**	**43.200.000.000**	**43.200.000.000**
148	Kab. Lampung Barat	115.478.018.960	0	115.478.018.960	115.478.018.960
149	Kab. Lampung Selatan	169.432.696.840	0	169.432.696.840	169.432.696.840
150	Kab. Lampung Tengah	215.552.245.440	0	215.552.245.440	215.552.245.440
151	Kab. Lampung Utara	158.575.073.320	0	158.575.073.320	158.575.073.320
152	Kab. Lampung Timur	192.850.226.760	0	184.481.120.760	184.481.120.760
153	Kab. Tanggamus	130.626.480.200	0	130.626.480.200	130.626.480.200
154	Kab. Tulang Bawang	86.757.644.760	0	86.757.644.760	86.757.644.760
155	Kab. Way Kanan	107.536.088.800	0	107.536.088.800	107.536.088.800
156	Kab. Pesawaran	109.683.784.960	0	109.683.784.960	109.683.784.960
157	Kab. Pringsewu	99.218.159.080	0	99.218.159.080	99.218.159.080
158	Kab. Mesuji	139.348.370.320	0	139.348.370.320	139.348.370.320
159	Kab. Tulang Bawang Barat	69.941.333.800	0	69.941.333.800	69.941.333.800
160	Kota Bandar Lampung	213.608.129.740	0	213.608.129.740	213.608.129.740
161	Kota Metro	96.336.172.800	0	96.336.172.800	96.336.172.800
162	**Provinsi DKI Jakarta**	**1.321.503.051.360**	**0**	**1.313.254.447.360**	**1.313.254.447.360**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
163	**Provinsi Jawa Barat**	**8.154.072.000**	**0**	**8.154.072.000**	**8.154.072.000**
164	Kab. Bandung	445.459.218.440	0	445.459.218.440	445.459.218.440
165	Kab. Bekasi	279.275.381.640	0	276.636.563.640	276.636.563.640
166	Kab. Bogor	498.068.510.320	0	498.068.510.320	498.068.510.320
167	Kab. Ciamis	269.880.250.440	0	269.880.250.440	269.880.250.440
168	Kab. Cianjur	316.907.351.540	0	316.907.351.540	316.907.351.540
169	Kab. Cirebon	283.483.387.080	0	283.483.387.080	283.483.387.080
170	Kab. Garut	386.701.374.080	0	386.701.374.080	386.701.374.080
171	Kab. Indramayu	235.926.810.560	0	235.926.810.560	235.926.810.560
172	Kab. Karawang	261.615.332.400	0	261.555.109.140	261.555.109.140
173	Kab. Kuningan	212.932.243.080	0	212.932.243.080	212.932.243.080
174	Kab. Majalengka	194.276.851.160	0	194.276.851.160	194.276.851.160
175	Kab. Purwakarta	158.611.526.960	0	158.611.526.960	158.611.526.960
176	Kab. Subang	202.843.117.360	0	202.843.117.360	202.843.117.360
177	Kab. Sukabumi	307.938.491.560	0	307.938.491.560	307.938.491.560
178	Kab. Sumedang	210.369.340.720	0	210.369.340.720	210.369.340.720
179	Kab. Tasikmalaya	266.978.513.160	0	266.978.513.160	266.978.513.160
180	Kab. Bandung Barat	207.201.613.380	0	207.201.613.380	207.201.613.380
181	Kota Bandung	367.318.642.980	0	362.755.454.980	362.755.454.980
182	Kota Bekasi	277.188.149.720	0	277.188.149.720	277.188.149.720
183	Kota Bogor	162.152.649.040	0	162.152.649.040	162.152.649.040
184	Kota Cirebon	80.442.792.860	0	80.442.792.860	80.442.792.860
185	Kota Depok	168.948.452.400	0	168.948.452.400	168.948.452.400
186	Kota Sukabumi	62.633.369.640	0	62.633.369.640	62.633.369.640
187	Kota Cimahi	90.996.071.520	0	90.996.071.520	90.996.071.520
188	Kota Tasikmalaya	133.585.128.320	0	133.585.128.320	133.585.128.320
189	Kota Banjar	63.756.704.600	0	63.756.704.600	63.756.704.600
190	**Provinsi Banten**	**9.456.000.000**	**0**	**4.956.000.000**	**4.956.000.000**
191	Kab. Lebak	240.952.242.720	0	240.952.242.720	240.952.242.720
192	Kab. Pandeglang	245.366.698.280	0	245.366.698.280	245.366.698.280
193	Kab. Serang	189.368.530.120	0	189.368.530.120	189.368.530.120
194	Kab. Tangerang	307.126.685.000	0	299.251.655.500	299.251.655.500
195	Kota Cilegon	91.061.082.130	0	91.061.082.130	91.061.082.130
196	Kota Tangerang	237.804.793.800	0	236.396.432.300	236.396.432.300
197	Kota Serang	145.795.836.540	0	145.795.836.540	145.795.836.540
198	Kota Tangerang Selatan	149.045.673.740	0	149.045.673.740	149.045.673.740
199	**Provinsi Jawa Tengah**	**32.054.260.000**	**0**	**32.054.260.000**	**32.054.260.000**
200	Kab. Banjarnegara	179.171.633.520	0	179.171.633.520	179.171.633.520
201	Kab. Banyumas	287.637.866.000	0	287.637.866.000	287.637.866.000
202	Kab. Batang	136.741.714.880	0	136.741.714.880	136.741.714.880
203	Kab. Blora	166.799.485.080	0	166.799.485.080	166.799.485.080
204	Kab. Boyolali	179.730.049.200	0	174.722.743.794	174.722.743.794
205	Kab. Brebes	224.467.999.360	0	224.467.999.360	224.467.999.360
206	Kab. Cilacap	283.364.180.240	0	283.364.180.240	283.364.180.240
207	Kab. Demak	180.789.937.640	0	180.789.937.640	180.789.937.640
208	Kab. Grobogan	193.272.367.280	0	193.272.367.280	193.272.367.280
209	Kab. Jepara	147.446.324.240	0	147.446.324.240	147.446.324.240
210	Kab. Karanganyar	187.055.955.040	0	187.055.955.040	187.055.955.040
211	Kab. Kebumen	214.426.960.200	0	214.426.960.200	214.426.960.200
212	Kab. Kendal	182.230.162.360	0	182.230.162.360	182.230.162.360
213	Kab. Klaten	262.115.328.680	0	262.115.328.680	262.115.328.680
214	Kab. Kudus	111.802.593.600	0	111.802.593.600	111.802.593.600
215	Kab. Magelang	156.967.529.500	0	156.398.664.450	156.398.664.450
216	Kab. Pati	184.299.039.960	0	180.150.456.635	180.150.456.635
217	Kab. Pekalongan	127.053.638.640	0	126.483.485.640	126.483.485.640
218	Kab. Pemalang	235.870.036.660	0	235.870.036.660	235.870.036.660
219	Kab. Purbalingga	184.484.827.640	0	184.484.827.640	184.484.827.640
220	Kab. Purworejo	173.573.408.160	0	173.573.408.160	173.573.408.160
221	Kab. Rembang	115.419.194.560	0	112.347.728.300	112.347.728.300
222	Kab. Semarang	154.884.585.000	0	154.884.585.000	154.884.585.000
223	Kab. Sragen	190.926.873.880	0	190.926.873.880	190.926.873.880
224	Kab. Sukoharjo	156.696.565.280	0	156.696.565.280	156.696.565.280
225	Kab. Tegal	212.357.726.680	0	208.929.169.680	208.929.169.680
226	Kab. Temanggung	122.342.105.320	0	122.342.105.320	122.342.105.320
227	Kab. Wonogiri	212.692.777.080	0	212.692.777.080	212.692.777.080
228	Kab. Wonosobo	149.538.177.080	0	149.538.177.080	149.538.177.080
229	Kota Magelang	55.037.101.720	0	50.379.975.720	50.379.975.720
230	Kota Pekalongan	58.640.531.720	0	58.640.531.720	58.640.531.720
231	Kota Salatiga	63.852.958.960	0	63.852.958.960	63.852.958.960
232	Kota Semarang	239.992.018.350	0	237.340.130.150	237.340.130.150
233	Kota Surakarta	170.724.549.440	0	170.724.549.440	170.724.549.440
234	Kota Tegal	74.752.623.880	0	74.752.623.880	74.752.623.880
235	**Provinsi DI Yogyakarta**	**9.142.321.000**	**0**	**9.142.321.000**	**9.142.321.000**
236	Kab. Bantul	243.734.530.400	0	243.734.530.400	243.734.530.400
237	Kab. Gunung Kidul	185.897.339.240	0	185.897.339.240	185.897.339.240
238	Kab. Kulon Progo	164.558.350.440	0	164.558.350.440	164.558.350.440
239	Kab. Sleman	206.591.421.360	0	206.591.421.360	206.591.421.360
240	Kota Yogyakarta	125.374.128.480	0	125.374.128.480	125.374.128.480
241	**Provinsi Jawa Timur**	**37.475.102.000**	**0**	**37.475.102.000**	**37.475.102.000**
242	Kab. Bangkalan	194.810.236.060	0	194.810.236.060	194.810.236.060
243	Kab. Banyuwangi	234.887.226.920	0	234.887.226.920	234.887.226.920

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
244	Kab. Blitar	215.928.055.640	0	215.928.055.640	215.928.055.640
245	Kab. Bojonegoro	184.412.086.400	0	184.412.086.400	184.412.086.400
246	Kab. Bondowoso	153.327.786.800	0	153.327.786.800	153.327.786.800
247	Kab. Gresik	151.733.182.320	0	151.733.182.320	151.733.182.320
248	Kab. Jember	324.447.293.520	0	321.544.541.520	321.544.541.520
249	Kab. Jombang	185.658.353.640	0	185.658.353.640	185.658.353.640
250	Kab. Kediri	209.877.676.800	0	209.877.676.800	209.877.676.800
251	Kab. Lamongan	241.439.570.320	0	241.439.570.320	241.439.570.320
252	Kab. Lumajang	156.268.606.720	0	156.268.606.720	156.268.606.720
253	Kab. Madiun	120.950.320.360	0	120.950.320.360	120.950.320.360
254	Kab. Magetan	169.826.591.240	0	169.826.591.240	169.826.591.240
255	Kab. Malang	315.572.115.000	0	315.572.115.000	315.572.115.000
256	Kab. Mojokerto	148.098.310.160	0	148.098.310.160	148.098.310.160
257	Kab. Nganjuk	191.403.545.440	0	191.403.545.440	191.403.545.440
258	Kab. Ngawi	187.410.904.520	0	181.580.479.100	181.580.479.100
259	Kab. Pacitan	175.238.937.160	0	175.238.937.160	175.238.937.160
260	Kab. Pamekasan	145.505.685.560	0	145.505.685.560	145.505.685.560
261	Kab. Pasuruan	207.663.397.520	0	207.663.397.520	207.663.397.520
262	Kab. Ponorogo	164.095.758.320	0	164.095.758.320	164.095.758.320
263	Kab. Probolinggo	172.322.514.160	0	172.322.514.160	172.322.514.160
264	Kab. Sampang	152.867.920.400	0	152.867.920.400	152.867.920.400
265	Kab. Sidoarjo	259.720.623.920	0	259.720.623.920	259.720.623.920
266	Kab. Situbondo	105.196.446.560	0	94.968.590.560	94.968.590.560
267	Kab. Sumenep	125.461.860.400	0	125.461.860.400	125.461.860.400
268	Kab. Trenggalek	173.888.007.800	0	173.888.007.800	173.888.007.800
269	Kab. Tuban	167.658.593.880	0	167.658.593.880	167.658.593.880
270	Kab. Tulungagung	193.757.169.960	0	193.757.169.960	193.757.169.960
271	Kota Blitar	94.082.817.960	0	94.082.817.960	94.082.817.960
272	Kota Kediri	70.016.067.440	0	70.016.067.440	70.016.067.440
273	Kota Madiun	67.000.323.960	0	66.460.006.160	66.460.006.160
274	Kota Malang	148.927.460.600	0	148.927.460.600	148.927.460.600
275	Kota Mojokerto	36.466.974.220	0	36.466.974.220	36.466.974.220
276	Kota Pasuruan	70.111.122.360	0	70.111.122.360	70.111.122.360
277	Kota Probolinggo	78.229.091.040	0	78.229.091.040	78.229.091.040
278	Kota Surabaya	386.951.310.320	0	386.951.310.320	386.951.310.320
279	Kota Batu	47.495.658.450	0	47.495.658.450	47.495.658.450
280	**Provinsi Kalimantan Barat**	**78.055.000.000**	**0**	**77.800.000.000**	**77.800.000.000**
281	Kab. Bengkayang	59.070.597.440	0	59.070.597.440	59.070.597.440
282	Kab. Landak	83.222.277.900	0	83.222.277.900	83.222.277.900
283	Kab. Kapuas Hulu	64.367.735.880	0	50.507.735.880	50.507.735.880
284	Kab. Ketapang	86.117.750.240	0	86.117.750.240	86.117.750.240
285	Kab. Pontianak	77.206.585.280	0	77.206.585.280	77.206.585.280
286	Kab. Sambas	103.776.490.680	0	103.776.490.680	103.776.490.680
287	Kab. Sanggau	67.465.309.400	0	67.465.309.400	67.465.309.400
288	Kab. Sintang	81.204.756.160	0	76.254.756.160	76.254.756.160
289	Kota Pontianak	128.565.075.280	0	128.565.075.280	128.565.075.280
290	Kota Singkawang	77.218.113.840	0	77.218.113.840	77.218.113.840
291	Kab. Kayong Utara	20.460.584.520	0	20.460.584.520	20.460.584.520
292	Kab. Kubu Raya	83.574.105.360	0	83.574.105.360	83.574.105.360
293	Kab. Sekadau	44.229.155.400	0	44.229.155.400	44.229.155.400
294	Kab. Melawi	38.356.841.320	0	38.356.841.320	38.356.841.320
295	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**7.053.571.000**	**0**	**7.053.571.000**	**7.053.571.000**
296	Kab. Barito Selatan	47.277.391.980	0	42.108.672.100	42.108.672.100
297	Kab. Barito Utara	54.541.368.800	0	48.353.868.800	48.353.868.800
298	Kab. Kapuas	111.361.719.160	0	111.361.719.160	111.361.719.160
299	Kab. Kotawaringin Barat	34.947.004.180	0	34.947.004.180	34.947.004.180
300	Kab. Kotawaringin Timur	57.186.295.480	0	57.186.295.480	57.186.295.480
301	Kota Palangkaraya	98.100.465.480	0	98.100.465.480	98.100.465.480
302	Kab. Barito Timur	49.943.901.120	0	49.943.901.120	49.943.901.120
303	Kab. Murung Raya	22.100.987.440	0	22.100.987.440	22.100.987.440
304	Kab. Pulang Pisau	68.391.886.240	0	68.391.886.240	68.391.886.240
305	Kab. Gunung Mas	57.139.164.900	0	57.139.164.900	57.139.164.900
306	Kab. Lamandau	42.284.396.300	0	42.284.396.300	42.284.396.300
307	Kab. Sukamara	13.309.680.440	0	13.077.162.200	13.077.162.200
308	Kab. Katingan	31.301.779.960	0	31.301.779.960	31.301.779.960
309	Kab. Seruyan	22.116.891.000	0	22.116.891.000	22.116.891.000
310	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**68.579.038.000**	**0**	**68.579.038.000**	**68.579.038.000**
311	Kab. Banjar	80.797.276.440	0	80.797.276.440	80.797.276.440
312	Kab. Barito Kuala	94.833.266.760	0	94.833.266.760	94.833.266.760
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	49.339.481.200	0	49.339.481.200	49.339.481.200
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	90.833.912.160	0	83.408.912.160	83.408.912.160
315	Kab. Hulu Sungai Utara	51.331.481.080	0	51.331.481.080	51.331.481.080
316	Kab. Kotabaru	54.377.101.120	0	54.377.101.120	54.377.101.120
317	Kab. Tabalong	60.293.789.200	0	60.293.789.200	60.293.789.200
318	Kab. Tanah Laut	63.788.926.480	0	63.788.926.480	63.788.926.480
319	Kab. Tapin	42.489.338.520	0	42.489.338.520	42.489.338.520
320	Kota Banjarbaru	78.237.474.120	0	78.237.474.120	78.237.474.120
321	Kota Banjarmasin	118.959.815.590	0	118.959.815.590	118.959.815.590
322	Kab. Balangan	27.231.103.120	0	27.231.103.120	27.231.103.120
323	Kab. Tanah Bumbu	45.517.039.000	0	45.517.039.000	45.517.039.000
324	**Provinsi Kalimantan Timur**	**3.449.322.000**	**0**	**3.103.572.000**	**3.103.572.000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
325	Kab. Berau	34.971.562.180	0	34.971.562.180	34.971.562.180
326	Kab. Bulungan	27.735.015.660	0	27.735.015.660	27.735.015.660
327	Kab. Kutai Kartanegara	106.416.441.800	0	104.236.562.300	104.236.562.300
328	Kab. Kutai Barat	34.263.135.120	0	34.263.135.120	34.263.135.120
329	Kab. Kutai Timur	46.080.897.600	0	46.080.897.600	46.080.897.600
330	Kab. Malinau	59.034.443.720	0	49.496.879.720	49.496.879.720
331	Kab. Nunukan	32.043.397.140	0	32.043.397.140	32.043.397.140
332	Kab. Pasir	79.584.291.320	0	74.578.157.820	74.578.157.820
333	Kota Balikpapan	88.147.637.290	0	88.147.637.290	88.147.637.290
334	Kota Bontang	33.245.879.820	0	33.245.879.820	33.245.879.820
335	Kab. Tana Tidung	14.982.703.000	0	9.427.593.000	9.427.593.000
336	Kota Samarinda	113.799.359.520	0	113.799.359.520	113.799.359.520
337	Kota Tarakan	52.244.331.200	0	52.244.331.200	52.244.331.200
338	Kab. Penajam Paser Utara	33.960.321.020	0	33.960.321.020	33.960.321.020
339	**Provinsi Sulawesi Utara**	**100.884.249.000**	**0**	**100.684.749.000**	**100.684.749.000**
340	Kab. Bolaang Mongondow	84.627.878.400	0	84.627.878.400	84.627.878.400
341	Kab. Minahasa	141.624.052.800	0	141.624.052.800	141.624.052.800
342	Kab. Sangihe	75.981.482.040	0	75.981.482.040	75.981.482.040
343	Kota Bitung	94.813.015.560	0	94.813.015.560	94.813.015.560
344	Kota Manado	140.792.512.640	0	140.792.512.640	140.792.512.640
345	Kab. Kepulauan Talaud	41.439.831.160	0	41.439.831.160	41.439.831.160
346	Kab. Minahasa Selatan	102.403.506.560	0	102.403.506.560	102.403.506.560
347	Kab. Minahasa Tenggara	78.866.793.160	0	78.866.793.160	78.866.793.160
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	96.174.283.400	0	96.174.283.400	96.174.283.400
349	Kota Kotamubagu	111.662.241.840	0	111.662.241.840	111.662.241.840
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	59.954.295.640	0	59.954.295.640	59.954.295.640
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	59.511.987.760	0	59.511.987.760	59.511.987.760
352	Kota Tomohon	57.987.546.740	0	57.987.546.740	57.987.546.740
353	Kab. Minahasa Utara	82.255.310.000	0	82.255.310.000	82.255.310.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	88.568.645.080	0	88.568.645.080	88.568.645.080
355	**Provinsi Gorontalo**	**19.073.250.000**	**0**	**18.900.000.000**	**18.900.000.000**
356	Kab. Boalemo	47.000.770.160	0	47.000.770.160	47.000.770.160
357	Kab. Gorontalo	143.701.567.960	0	143.701.567.960	143.701.567.960
358	Kota Gorontalo	133.720.786.160	0	133.720.786.160	133.720.786.160
359	Kab. Pohuwato	87.426.915.520	0	87.426.915.520	87.426.915.520
360	Kab. Gorontalo Utara	102.035.471.920	0	102.035.471.920	102.035.471.920
361	Kab. Bone Bolango	104.849.036.440	0	104.849.036.440	104.849.036.440
362	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**22.541.250.000**	**0**	**22.541.250.000**	**22.541.250.000**
363	Kab. Banggai	130.251.080.840	0	116.391.080.840	116.391.080.840
364	Kab. Banggai Kepulauan	83.968.499.080	0	82.917.882.980	82.917.882.980
365	Kab. Buol	89.868.825.840	0	89.868.825.840	89.868.825.840
366	Kab. Toli-Toli	80.464.958.260	0	80.464.958.260	80.464.958.260
367	Kab. Donggala	119.384.849.240	0	119.384.849.240	119.384.849.240
368	Kab. Morowali	71.793.956.920	0	71.793.956.920	71.793.956.920
369	Kab. Poso	126.976.073.360	0	126.976.073.360	126.976.073.360
370	Kota Palu	97.978.088.680	0	97.978.088.680	97.978.088.680
371	Kab. Parigi Moutong	79.736.204.600	0	79.736.204.600	79.736.204.600
372	Kab. Sigi	87.027.658.500	0	87.027.658.500	87.027.658.500
373	Kab. Tojo Una Una	54.447.721.400	0	54.447.721.400	54.447.721.400
374	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**44.061.750.000**	**0**	**44.061.750.000**	**44.061.750.000**
375	Kab. Bantaeng	98.518.702.320	0	98.518.702.320	98.518.702.320
376	Kab. Barru	127.968.714.800	0	127.968.714.800	127.968.714.800
377	Kab. Bone	214.939.746.840	0	214.939.746.840	214.939.746.840
378	Kab. Bulukumba	145.467.320.000	0	145.467.320.000	145.467.320.000
379	Kab. Enrekang	124.984.684.920	0	124.984.684.920	124.984.684.920
380	Kab. Gowa	139.529.603.240	0	130.658.631.600	130.658.631.600
381	Kab. Jeneponto	126.382.749.480	0	126.382.749.480	126.382.749.480
382	Kab. Luwu	142.001.558.560	0	142.001.558.560	142.001.558.560
383	Kab. Luwu Utara	110.507.975.380	0	110.507.975.380	110.507.975.380
384	Kab. Maros	125.445.205.800	0	125.445.205.800	125.445.205.800
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	149.657.158.680	0	149.657.158.680	149.657.158.680
386	Kab. Pinrang	146.431.683.520	0	146.431.683.520	146.431.683.520
387	Kab. Selayar	67.977.644.400	0	67.977.644.400	67.977.644.400
388	Kab. Sidenreng Rappang	126.786.730.120	0	126.786.730.120	126.786.730.120
389	Kab. Sinjai	118.387.008.120	0	118.387.008.120	118.387.008.120
390	Kab. Soppeng	102.511.671.080	0	102.511.671.080	102.511.671.080
391	Kab. Takalar	136.541.530.280	0	136.541.530.280	136.541.530.280
392	Kab. Tana Toraja	119.233.874.640	0	119.233.874.640	119.233.874.640
393	Kab. Wajo	159.837.241.560	0	159.837.241.560	159.837.241.560
394	Kota Pare-pare	88.759.987.400	0	88.759.987.400	88.759.987.400
395	Kab. Toraja Utara	78.599.157.120	0	78.599.157.120	78.599.157.120
396	Kota Makassar	262.927.499.880	0	262.927.499.880	262.927.499.880
397	Kota Palopo	98.634.121.850	0	98.634.121.850	98.634.121.850
398	Kab. Luwu Timur	68.083.688.880	0	68.083.688.880	68.083.688.880
399	**Provinsi Sulawesi Barat**	**92.093.250.000**	**0**	**91.800.000.000**	**91.800.000.000**
400	Kab. Majene	75.869.265.400	0	75.869.265.400	75.869.265.400
401	Kab. Mamuju	117.149.781.180	0	117.149.781.180	117.149.781.180
402	Kab. Polewali Mandar	136.620.109.240	0	136.620.109.240	136.620.109.240
403	Kab. Mamasa	50.872.485.880	0	50.872.485.880	50.872.485.880
404	Kab. Mamuju Utara	74.415.664.800	0	74.415.664.800	74.415.664.800
405	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**39.095.321.000**	**0**	**39.003.635.000**	**39.003.635.000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
406	Kab. Buton	146.980.353.360	0	146.980.353.360	146.980.353.360
407	Kab. Konawe	73.040.605.560	0	73.040.605.560	73.040.605.560
408	Kab. Kolaka	74.025.919.960	0	74.025.919.960	74.025.919.960
409	Kab. Muna	146.330.448.880	0	146.330.448.880	146.330.448.880
410	Kota Kendari	139.218.684.750	0	139.218.684.750	139.218.684.750
411	Kota Bau-bau	85.714.502.060	0	85.714.502.060	85.714.502.060
412	Kab. Konawe Selatan	104.469.097.560	0	104.469.097.560	104.469.097.560
413	Kab. Bombana	53.347.347.800	0	53.347.347.800	53.347.347.800
414	Kab. Konawe Utara	34.634.125.160	0	34.634.125.160	34.634.125.160
415	Kab. Buton Utara	53.134.909.520	0	46.936.159.520	46.936.159.520
416	Kab. Wakatobi	83.664.747.320	0	83.664.747.320	83.664.747.320
417	Kab. Kolaka Utara	49.053.629.240	0	49.053.629.240	49.053.629.240
418	**Provinsi Bali**	**5.239.821.000**	**0**	**5.239.821.000**	**5.239.821.000**
419	Kab. Badung	94.548.772.760	0	94.548.772.760	94.548.772.760
420	Kab. Bangli	91.782.184.200	0	91.782.184.200	91.782.184.200
421	Kab. Buleleng	170.700.113.360	0	170.700.113.360	170.700.113.360
422	Kab. Gianyar	115.360.137.280	0	115.360.137.280	115.360.137.280
423	Kab. Jembrana	63.266.895.760	0	63.266.895.760	63.266.895.760
424	Kab. Karangasem	125.207.281.360	0	125.207.281.360	125.207.281.360
425	Kab. Klungkung	54.932.465.640	0	47.715.909.140	47.715.909.140
426	Kab. Tabanan	127.082.202.320	0	127.082.202.320	127.082.202.320
427	Kota Denpasar	141.271.936.140	0	141.271.936.140	141.271.936.140
428	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**87.300.000.000**	**0**	**87.300.000.000**	**87.300.000.000**
429	Kab. Bima	170.271.651.680	0	170.271.651.680	170.271.651.680
430	Kab. Dompu	103.133.393.400	0	103.133.393.400	103.133.393.400
431	Kab. Lombok Barat	144.801.893.640	0	144.801.893.640	144.801.893.640
432	Kab. Lombok Tengah	137.510.489.920	0	137.510.489.920	137.510.489.920
433	Kab. Lombok Timur	200.708.021.360	0	200.708.021.360	200.708.021.360
434	Kab. Sumbawa	126.369.708.680	0	126.369.708.680	126.369.708.680
435	Kota Mataram	107.550.967.800	0	107.550.967.800	107.550.967.800
436	Kab. Lombok Utara	46.992.806.880	0	46.992.806.880	46.992.806.880
437	Kota Bima	91.748.749.480	0	78.786.634.093	78.786.634.093
438	Kab. Sumbawa Barat	34.008.261.500	0	34.008.261.500	34.008.261.500
439	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**42.300.000.000**	**0**	**42.300.000.000**	**42.300.000.000**
440	Kab. Alor	56.500.480.160	0	56.500.480.160	56.500.480.160
441	Kab. Belu	107.794.702.160	0	107.794.702.160	107.794.702.160
442	Kab. Ende	88.757.207.520	0	79.065.699.020	79.065.699.020
443	Kab. Flores Timur	71.564.674.620	0	71.564.674.620	71.564.674.620
444	Kab. Kupang	74.953.907.920	0	69.859.392.920	69.859.392.920
445	Kab. Lembata	44.156.828.760	0	44.156.828.760	44.156.828.760
446	Kab. Manggarai	75.038.086.240	0	75.038.086.240	75.038.086.240
447	Kab. Ngada	85.210.866.120	0	85.210.866.120	85.210.866.120
448	Kab. Sikka	90.967.667.080	0	90.967.667.080	90.967.667.080
449	Kab. Sumba Barat	74.387.491.080	0	74.387.491.080	74.387.491.080
450	Kab. Sumba Timur	89.765.772.000	0	89.765.772.000	89.765.772.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	85.604.490.640	0	85.604.490.640	85.604.490.640
452	Kab. Timor Tengah Utara	58.978.186.360	0	58.978.186.360	58.978.186.360
453	Kota Kupang	94.401.870.740	0	94.401.870.740	94.401.870.740
454	Kab. Rote Ndao	38.235.623.900	0	38.235.623.900	38.235.623.900
455	Kab. Nagekeo	46.868.146.940	0	46.868.146.940	46.868.146.940
456	Kab. Sumba Tengah	65.024.920.040	0	65.024.920.040	65.024.920.040
457	Kab. Sumba Barat Daya	95.655.803.880	0	95.655.803.880	95.655.803.880
458	Kab. Manggarai Timur	99.963.744.120	0	99.963.744.120	99.963.744.120
459	Kab. Sabu Raijua	21.125.299.040	0	19.392.799.040	19.392.799.040
460	Kab. Manggarai Barat	77.784.459.900	0	77.784.459.900	77.784.459.900
461	**Provinsi Maluku**	**87.032.250.000**	**0**	**86.850.000.000**	**86.850.000.000**
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	82.696.369.120	0	82.696.369.120	82.696.369.120
463	Kab. Maluku Tengah	122.890.941.620	0	122.890.941.620	122.890.941.620
464	Kab. Maluku Tenggara	70.978.621.480	0	70.978.621.480	70.978.621.480
465	Kab. Pulau Buru	84.650.672.120	0	84.650.672.120	84.650.672.120
466	Kota Ambon	135.860.839.360	0	135.860.839.360	135.860.839.360
467	Kab. Seram Bagian Barat	81.227.127.840	0	81.227.127.840	81.227.127.840
468	Kab. Seram Bagian Timur	50.660.405.360	0	50.660.405.360	50.660.405.360
469	Kab. Maluku Barat Daya	33.332.634.960	0	32.207.634.960	32.207.634.960
470	Kab. Buru Selatan	30.334.278.720	0	30.334.278.720	30.334.278.720
471	Kab. Kepulauan Aru	66.873.055.120	0	57.344.305.120	57.344.305.120
472	Kota Tual	37.462.651.200	0	37.462.651.200	37.462.651.200
473	**Provinsi Maluku Utara**	**46.411.571.000**	**0**	**46.153.571.000**	**46.153.571.000**
474	Kab. Halmahera Tengah	56.953.448.360	0	56.953.448.360	56.953.448.360
475	Kab. Halmahera Barat	46.421.292.000	0	46.421.292.000	46.421.292.000
476	Kota Ternate	85.416.616.880	0	85.416.616.880	85.416.616.880
477	Kab. Halmahera Timur	62.618.724.280	0	62.618.724.280	62.618.724.280
478	Kota Tidore Kepulauan	64.541.155.600	0	64.541.155.600	64.541.155.600
479	Kab. Kepulauan Sula	68.009.775.760	0	68.009.775.760	68.009.775.760
480	Kab. Pulau Morotai	27.035.632.300	0	27.035.632.300	27.035.632.300
481	Kab. Halmahera Selatan	75.484.671.240	0	75.484.671.240	75.484.671.240
482	Kab. Halmahera Utara	37.147.150.280	0	37.147.150.280	37.147.150.280
483	Kab. Yalimo	38.135.830.500	0	38.135.830.500	38.135.830.500
484	Kab. Lanny Jaya	53.723.027.000	0	53.723.027.000	53.723.027.000
485	**Provinsi Papua**	**3.971.246.797.550**	**3.957.459.547.550**	**13.500.000.000**	**3.970.959.547.550**
486	Kab. Biak Numfor	38.526.581.440	0	38.526.581.440	38.526.581.440

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
487	Kab. Jayapura	87.187.429.400	0	87.187.429.400	87.187.429.400
488	Kab. Jayawijaya	76.801.627.360	0	76.801.627.360	76.801.627.360
489	Kab. Merauke	43.634.556.960	0	43.634.556.960	43.634.556.960
490	Kab. Mimika	73.903.021.440	0	52.715.521.440	52.715.521.440
491	Kab. Nabire	74.556.792.080	0	74.556.792.080	74.556.792.080
492	Kab. Paniai	53.887.130.920	0	53.887.130.920	53.887.130.920
493	Kab. Puncak Jaya	56.018.623.040	0	56.018.623.040	56.018.623.040
494	Kab. Kepulauan Yapen	55.176.882.240	0	55.176.882.240	55.176.882.240
495	Kota Jayapura	86.541.748.040	0	86.541.748.040	86.541.748.040
496	Kab. Sarmi	35.266.198.920	0	35.266.198.920	35.266.198.920
497	Kab. Keerom	82.730.171.020	0	82.730.171.020	82.730.171.020
498	Kab. Yahukimo	24.552.327.000	0	24.552.327.000	24.552.327.000
499	Kab. Pegunungan Bintang	34.172.907.000	0	34.172.907.000	34.172.907.000
500	Kab. Tolikara	31.254.457.000	0	31.254.457.000	31.254.457.000
501	Kab. Boven Digoel	36.611.883.280	0	34.617.784.000	34.617.784.000
502	Kab. Mappi	55.642.303.040	0	55.642.303.040	55.642.303.040
503	Kab. Asmat	61.598.677.850	0	61.598.677.850	61.598.677.850
504	Kab. Waropen	54.265.466.320	0	54.265.466.320	54.265.466.320
505	Kab. Mamberamo Raya	15.340.974.000	0	12.172.674.000	12.172.674.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	13.243.811.000	0	12.130.811.000	12.130.811.000
507	Kab. Nduga	54.313.458.000	0	31.887.842.000	31.887.842.000
508	Kab. Dogiyai	27.732.429.520	0	27.732.429.520	27.732.429.520
509	Kab. Intan Jaya	47.130.749.000	0	46.493.999.000	46.493.999.000
510	Kab. Puncak	14.339.585.000	0	11.603.085.000	11.603.085.000
511	Kab. Deiyai	17.515.869.000	0	17.515.869.000	17.515.869.000
512	Kab. Suplori	28.583.045.600	0	28.583.045.600	28.583.045.600
513	**Provinsi Papua Barat**	**2.074.989.826.102**	**1.953.196.948.950**	**103.657.877.152**	**2.056.854.826.102**
514	Kab. Sorong	30.495.132.880	0	30.495.132.880	30.495.132.880
515	Kab. Manokwari	66.231.650.600	0	66.231.650.600	66.231.650.600
516	Kab. Fak Fak	25.204.903.080	0	25.204.903.080	25.204.903.080
517	Kota Sorong	46.348.095.640	0	46.348.095.640	46.348.095.640
518	Kab. Sorong Selatan	17.351.121.440	0	17.351.121.440	17.351.121.440
519	Kab. Raja Ampat	13.311.133.380	0	13.311.133.380	13.311.133.380
520	Kab. Teluk Bintuni	52.329.634.160	0	52.329.634.160	52.329.634.160
521	Kab. Teluk Wondama	46.541.192.000	0	46.541.192.000	46.541.192.000
522	Kab. Tambrauw	61.262.705.000	0	61.262.705.000	61.262.705.000
523	Kab. Maybrat	14.107.429.000	0	14.107.429.000	14.107.429.000
524	Kab. Kaimana	18.937.074.800	0	18.937.074.800	18.937.074.800
525	Dana Cadangan	0	0	-	0
JUMLAH		**64.465.576.668.602**	**10.421.312.993.000**	**53.657.237.684.474**	**64.078.550.677.474**

RINCIAN SUSPEN BELANJA BERDASARKAN KEMENTERIAN NEGARA DAN JENIS BELANJA (AUDITED)

BA	Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal			Belanja Bunga Utang			Belanja Sosial		
	SAU NETTO	SAI NETTO	SELISIH	SAU NETTO	SAI NETTO	SELISIH	SAU NETTO	SAI NETTO	SELISIH	SAU NETTO	SAI NETTO	SELISIH	SAU NETTO	SAI NETTO	SELISIH
001	18,664,844,282	18,664,844,282	-	282,206,190,286	282,206,190,286	-	19,695,529,722	19,695,529,722	-	0	-	-	0	-	-
002	481,288,180,871	481,473,680,871	(175,500,000)	1,154,722,563,609	1,154,722,563,609	-	106,720,009,221	106,720,009,221	-	0	-	-	0	-	-
004	575,538,741,844	575,538,741,844	-	877,433,969,789	877,435,418,289	(1,448,500)	634,292,868,916	634,292,868,916	-	0	-	-	0	-	-
005	2,973,673,572,435	2,973,676,563,971	(2,991,536)	686,120,110,288	686,120,110,288	-	1,175,144,663,066	1,175,144,663,066	-	0	-	-	0	-	-
006	1,617,501,708,903	1,617,487,333,250	14,375,653	1,037,756,628,842	1,037,755,075,455	(8,446,653)	656,059,543,432	656,065,842,432	(6,299,000)	0	-	-	0	-	-
007	304,554,148,850	304,554,148,850	-	1,108,882,116,660	1,108,882,116,660	-	198,104,691,520	198,104,691,520	-	0	-	-	0	-	-
010	292,061,916,830	292,056,559,730	(4,642,900)	3,085,113,421,288	3,085,191,518,739	(78,097,450)	1,954,908,569,131	1,954,908,569,131	-	0	-	-	1,462,475,000	1,462,475,000	-
011	1,748,813,617,055	1,748,815,647,584	(2,030,929)	2,078,633,442,153	2,078,636,685,078	(3,242,925)	177,997,588,199	177,997,588,199	-	0	-	-	8,054,087,111,836	8,054,096,651,836	(9,550,000)
012	27,375,671,156,507	27,414,104,248,092	(38,433,091,585)	10,116,585,588,842	10,116,482,958,635	102,630,207	13,666,451,101,272	13,671,005,223,626	(4,554,122,354)	0	-	-	0	-	-
013	2,890,625,409,015	2,890,996,749,741	(371,340,726)	2,149,349,452,152	2,149,969,120,505	(620,668,353)	1,334,165,219,789	1,333,874,219,789	291,000,000	0	-	-	0	-	-
015	7,489,942,718,542	7,490,514,041,094	(571,322,552)	5,277,813,407,122	5,277,837,278,247	(23,871,125)	2,084,628,784,561	2,084,582,028,561	46,756,000	1,224,744,351,397	1,247,399,871,387	(22,655,520,000)	0	-	-
018	1,017,428,193,041	1,017,365,626,604	62,566,437	5,504,173,745,635	5,504,239,870,938	(66,125,303)	706,607,234,124	706,630,473,974	(23,239,850)	0	-	-	0	-	-
019	293,155,865,822	293,155,865,822	-	1,301,255,122,640	1,301,255,628,640	(506,000)	363,554,215,341	363,554,215,341	-	0	-	-	8,757,513,408,441	8,757,750,908,441	(237,500,000)
020	499,007,321,848	499,012,632,048	(5,310,100)	2,395,082,371,493	2,395,083,091,493	(720,000)	6,123,405,392,007	6,123,405,392,007	-	0	-	-	0	-	-
022	1,328,412,513,238	1,328,418,456,631	(5,943,393)	3,519,190,630,934	3,519,221,932,184	(31,301,250)	15,267,640,975,673	15,264,402,844,999	3,238,131,674	0	-	-	0	-	-
023	7,763,666,375,931	7,763,165,912,166	500,463,765	16,927,369,416,465	16,939,570,282,770	(12,200,866,305)	9,039,508,108,091	9,040,691,041,954	(1,182,933,863)	0	-	-	0	-	-
024	3,669,732,978,436	3,669,772,819,590	(39,841,154)	11,269,326,248,302	11,266,754,842,529	2,571,405,773	5,523,950,320,049	5,523,934,779,049	115,541,000	0	-	-	27,315,154,205,976	27,317,100,967,574	(1,946,761,598)
025	15,844,626,258,600	15,845,666,787,785	(1,040,529,185)	5,581,025,597,272	5,585,188,101,508	(4,162,504,234)	3,045,903,835,728	3,045,969,015,978	(65,380,250)	0	-	-	6,407,054,954,120	6,410,932,497,282	(3,877,543,162)
026	235,089,433,448	235,093,677,198	(4,243,749)	2,578,368,396,578	2,578,448,155,602	(79,759,024)	867,791,879,504	867,798,115,904	(6,236,400)	0	-	-	8,730,309,784,186	8,731,493,395,451	(1,183,611,265)
027	205,725,000,134	205,725,000,134	-	1,277,208,490,946	1,277,225,057,956	(16,567,110)	148,723,648,933	148,723,648,933	-	0	-	-	809,462,000	786,007,000	19,445,000
029	785,564,909,002	785,565,446,502	(537,500)	3,526,559,044,134	3,526,259,943,484	300,094,650	340,366,049,520	340,366,049,520	-	0	-	-	2,324,738,159,286	2,324,774,829,390	(35,670,104)
032	451,654,239,038	451,654,239,038	-	3,332,239,790,383	3,332,234,354,362	2,436,021	983,731,037,892	983,732,610,442	(1,572,550)	0	-	-	104,515,386,200	104,515,386,200	-
033	1,104,493,923,307	1,104,493,828,307	95,000	7,623,498,394,544	7,626,316,479,193	(2,820,084,649)	39,328,779,057,375	39,344,867,389,399	(16,088,342,024)	0	-	-	408,182,122,500	408,182,122,500	-
034	33,772,186,496	33,772,186,496	-	222,552,677,129	222,552,677,129	-	211,129,392,927	211,129,392,927	-	0	-	-	3,230,255,953,463	3,230,255,953,463	-
035	32,659,493,537	32,659,493,537	-	187,166,214,285	187,166,214,285	-	15,630,298,462	15,630,298,462	-	0	-	-	0	-	-
036	19,184,912,887	19,184,912,887	-	99,961,156,330	99,961,156,330	-	92,170,030,947	92,170,030,947	-	0	-	-	0	-	-
040	271,643,244,864	271,636,006,864	7,238,000	1,414,200,617,155	1,414,236,822,165	(36,205,010)	176,936,735,930	176,936,735,930	-	0	-	-	33,800,000	33,800,000	-
041	16,539,910,190	16,539,910,190	-	84,483,895,109	84,483,895,109	-	8,945,967,592	8,945,967,592	-	0	-	-	43,190,000,000	43,190,000,000	-
042	29,535,246,264	29,534,621,264	625,000	276,608,753,042	276,020,493,067	588,259,975	324,564,631,211	324,625,286,686	(60,537,475)	0	-	-	0	-	-
043	48,247,181,557	48,247,181,557	-	743,575,242,903	743,575,242,903	-	63,841,331,662	63,841,331,662	-	0	-	-	0	-	-
044	47,075,951,483	47,075,951,483	-	568,037,141,390	568,037,141,390	-	166,505,063,350	166,505,063,350	-	0	-	-	0	-	-
047	13,760,036,496	13,760,036,496	-	137,680,959,341	137,680,959,341	-	3,276,590,050	3,276,590,050	-	0	-	-	156,630,182,241	156,630,182,241	-
048	24,427,122,391	24,427,747,391	(625,000)	80,846,349,491	80,846,349,491	-	8,141,978,020	8,141,978,020	-	0	-	-	1,397,953,000	1,397,953,000	-
050	70,581,993,040	70,581,993,040	-	885,302,744,794	885,302,744,794	-	341,889,997,190	341,889,997,190	-	0	-	-	0	-	-
051	41,952,303,203	41,952,303,203	-	107,398,923,815	107,398,923,815	-	569,810,498,648	569,810,498,648	-	0	-	-	0	-	-
052	5,851,043,045	5,851,043,045	-	26,385,518,314	26,385,518,314	-	4,034,191,360	4,034,191,360	-	0	-	-	0	-	-
054	674,851,220,122	674,851,220,122	-	1,467,997,711,139	1,468,004,025,014	(6,313,875)	336,365,421,857	339,385,421,857	-	0	-	-	0	-	-
055	90,380,868,746	90,388,212,746	(7,344,000)	413,107,767,658	413,100,423,658	7,344,000	38,601,997,955	38,601,997,955	-	0	-	-	0	-	-
056	990,355,247,988	990,357,107,988	(1,860,000)	1,396,522,146,439	1,396,522,146,439	-	271,019,859,973	271,019,859,973	-	0	-	-	0	-	-
057	37,005,090,916	37,005,090,916	-	309,584,818,939	309,584,818,939	-	55,260,405,675	55,260,405,675	-	0	-	-	0	-	-
059	182,027,760,160	182,027,910,160	(150,000)	2,121,201,496,825	2,121,203,316,825	(1,820,000)	320,090,860,135	320,090,860,135	-	0	-	-	18,802,824,608	18,802,824,608	-
060	23,319,510,992,406	23,329,211,360,786	(9,700,368,380)	7,097,277,786,669	7,095,002,549,972	2,275,236,697	3,975,597,101,536	3,970,435,465,663	5,161,635,873	0	-	-	0	-	-
063	164,660,021,610	164,660,021,610	-	367,460,977,784	367,460,977,784	-	232,701,239,383	232,701,239,383	-	0	-	-	0	-	-
064	24,640,619,233	24,640,619,233	-	84,970,898,302	84,970,898,302	-	95,651,911,195	95,651,911,195	-	0	-	-	0	-	-
065	33,766,460,095	33,766,460,095	-	411,284,579,388	411,284,579,388	-	11,592,389,969	11,592,389,969	-	0	-	-	2,635,000,000	2,635,000,000	-
066	27,620,560,612	27,620,560,612	-	285,041,887,432	285,041,978,432	(91,000)	457,714,290,658	457,714,290,658	-	0	-	-	0	-	-
067	15,021,858,537	15,109,458,537	(87,600,000)	448,238,332,099	448,194,452,099	44,880,000	3,011,508,595	3,011,508,595	-	0	-	-	0	-	-
068	178,143,896,559	178,143,896,559	-	2,081,356,508,492	2,081,356,508,492	-	93,810,457,394	93,801,577,394	8,880,000	0	-	-	547,054,358,615	547,065,871,484	(11,512,869)
074	18,270,412,809	18,270,412,809	-	38,604,347,763	35,424,529,513	3,179,818,250	1,827,614,705	1,783,823,705	43,791,000	0	-	-	0	-	-
075	189,624,188,613	189,624,188,613	-	418,000,870,320	418,000,870,320	-	500,934,799,472	500,934,799,472	-	0	-	-	0	-	-
076	336,914,876,203	336,895,040,203	19,836,000	396,765,597,933	396,765,597,933	-	28,005,539,831	28,005,539,831	-	0	-	-	0	-	-
077	10,807,804,808	10,807,804,808	-	198,761,957,421	198,761,957,421	-	27,601,510,615	27,601,510,615	-	0	-	-	0	-	-
078	16,842,778,687	16,842,778,687	-	24,323,118,688	24,323,118,688	-	6,456,935,506	6,456,935,506	-	0	-	-	0	-	-
079	231,699,250,370	231,699,250,370	-	292,742,445,536	292,784,445,536	(42,000,000)	138,827,853,379	138,827,953,379	(100,000)	0	-	-	0	-	-
080	203,391,817,831	203,390,317,831	1,500,000	206,169,971,718	206,169,971,718	-	162,370,373,789	162,370,373,789	-	0	-	-	0	-	-
081	177,850,234,803	177,850,234,803	-	396,407,534,606	396,407,534,606	-	427,173,130,431	427,173,130,431	-	0	-	-	0	-	-
082	63,591,219,990	63,591,219,990	-	153,506,625,911	153,506,625,911	-	186,220,478,290	186,220,478,290	-	0	-	-	0	-	-
083	33,387,915,284	33,387,915,284	-	123,433,881,750	123,433,881,750	-	279,656,954,384	279,656,954,384	-	0	-	-	0	-	-
084	11,088,186,190	11,088,186,190	-	62,979,520,032	62,979,520,032	-	890,653,367	890,653,367	-	0	-	-	0	-	-
085	23,114,186,332	23,114,186,332	-	39,708,278,480	39,708,278,480	-	6,504,624,952	6,504,624,952	-	0	-	-	0	-	-
086	40,907,632,826	40,907,632,826	-	124,794,457,410	124,794,457,410	-	84,663,127,638	84,663,127,638	-	0	-	-	0	-	-
087	28,154,764,041	28,154,764,041	-	77,376,202,687	77,376,202,687	-	35,226,746,199	35,226,746,199	-	0	-	-	0	-	-
088	152,252,722,776	152,252,722,776	-	143,354,800,275	143,354,800,275	-	154,956,675,757	154,956,675,757	-	0	-	-	0	-	-
089	361,138,496,692	361,138,496,692	-	361,518,545,802	361,516,245,802	2,300,000	17,351,591,997	17,351,591,997	-	0	-	-	0	-	-
090	196,761,970,079	196,761,970,079	-	1,404,715,884,588	1,404,717,969,188	(2,084,600)	788,956,410,622	788,956,410,622	-	0	-	-	1,476,845,000	1,476,845,000	-
091	25,853,258,104	25,853,258,104	-	415,619,117,005	415,531,847,005	87,270,000	1,360,360,190,591	1,360,447,460,591	(87,270,000)	0	-	-	560,377,745,294	560,377,745,294	-
092	29,163,033,743	29,163,033,743	-	3,556,196,422,533	3,556,170,297,533	(3,875,000)	439,288,416,187	439,288,416,187	-	0	-	-	1,300,000,000	1,300,000,000	-
093	179,116,718,923	179,116,718,923	-	102,433,595,841	102,433,595,841	-	18,678,101,661	18,678,101,661	-	0	-	-	0	-	-
095	140,356,022,145	140,356,022,145	-	382,458,803,568	382,458,803,568	-	30,266,151,956	30,266,151,956	-	0	-	-	0	-	-
100	7,520,168,706	7,520,168,706	-	56,273,811,267	56,268,448,617	5,362,650	4,822,930,922	4,822,930,922	-	0	-	-	0	-	-
103	11,508,048,215	11,508,048,215	-	666,203,110,443	664,248,061,843	1,955,058,600	113,054,864,316	113,054,864,316	-	0	-	-	0	-	-
104	37,506,885,760	37,506,885,760	-	284,255,298,718	284,255,298,718	-	48,779,293,974	48,778,293,974	-	0	-	-	443,916,040,340	444,088,471,533	(172,431,193)
105	12,473,984,200	12,473,984,200	-	110,749,911,737	110,749,911,737	-	445,482,546,137	445,482,546,137	-	0	-	-	4,457,748,250	4,457,748,250	-
106	9,341,694,593	9,341,694,593	-	84,835,571,581	84,835,571,581	-	77,291,972,718	77,291,972,718	-	0	-	-	3,187,352,000	3,187,352,000	-
107	117,762,768,290	117,762,768,290	-	248,040,281,105	248,040,281,105	-	697,951,715,416	697,951,715,416	-	0	-	-	0	-	-
108	21,206,274,158	21,206,274,158	-	44,818,394,857	44,818,394,857	-	2,040,096,980	2,040,096,980	-	0	-	-	0	-	-
109	4,126,440,000	4,126,440,000	-	55,507,519,896	55,507,519,896	-	9,566,050,423	9,566,050,423	-	0	-	-	0	-	-
110	6,338,694,361	6,338,694,361	-	8,486,982,100	8,486,982,100	-	742,535,470	742,535,470	-	0	-	-	0	-	-
111	1,933,990,205	1,933,990,205	-	163,267,895,578	163,267,895,578	-	146,977,312,090	146,977,312,090	-	0	-	-	0	-	-
999	67,789,622,580,980	67,731,755,188,957	57,877,394,023	-1,319,777,595	-	(1,319,777,595)	0	-	-	92,035,517,112,958	92,014,519,939,499	20,997,173,459	3,957,750,360,812	3,978,333,154,800	(20,582,793,988)
Sub Total	**175,745,347,140,204**	**175,737,518,419,915**	**8,028,721,189**	**124,629,978,224,166**	**124,539,478,502,304**	**(10,403,278,138)**	**117,841,371,623,113**	**117,854,532,971,332**	**(13,160,448,219)**	**93,260,261,464,345**	**93,261,519,819,885**	**(1,658,349,541)**	**71,076,290,233,168**	**71,184,328,162,347**	**(28,037,929,179)**

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
1	510.000267.980	REKENING KHUSUS DEPKEU (RUPIAH) UNTUK MONETISASI NON PROJECT TYPE GRANT AID 2000	0	0
2	510.000270.980	REKENING KHUSUS DEPKEU (RUPIAH) UNTUK MONETISASI NON PROJECT TYPE GRANT AID 2001	77.640.179.179	120.706.463.171
3	510.000275.980	NON PROJECT GRANT AID TAHUN 2002	160.575.085.837	160.575.085.837
4	510.000276.980	NON PROJECT GRANT AID TAHUN 2003	77.218.454.364	77.218.454.364
5	519.000121.980	REKENING PENERIMAAN HIBAH JEPANG MELALUI PROGRAM SECOND KENNEDY ROUND CSKR	24.520.844.564	42.342.180.057
6	601.001311.980	REKSUS DEPKEU U/ CONST. OF JUNIOR SECONDARY SCHOOL FACILITIES UNDER THE BASIC EDUCATION PROGRAM, LOAN AIPRD L-001	22.954.230.548	22.804.173.390
7	601.002311.980	REKSUS DEPKEU U/ LOAN EASTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (EINRIP), AIPRD L-002	147.945.024.337	222.563.068.780
8	601.041111.980	REKSUS DEPKEU U/PROY. GAJAH MADA UNIVERSITY DEV. IP-494 OECF	302.333.306	285.462.120
9	601.045111.980	REKSUS DEPKEU U/ PROY. PENGEMB. PRAS. PEDESAAN (P2D) RURAL AREAS INFRAST.DEVELOPMENT PROJECT (III) IP-506 JBIC DLM VAL. JPY	2.629.377.040	2.482.649.214
10	601.048111.980	REKSUS DEPKEU U/ PROFESIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECT-III (OVERSEAS PROGRAM) PROJECT LOAN JBIC 535 A	21.626.257.199	9.443.515.222
11	601.049111.980	REKSUS DEPKEU U/ PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECT-III (DOMESTIC PROGRAM) PROJECT LOAN JBIC IP-535 B	7.998.342.583	28.954.504.630
12	601.050111.980	REKSUS DEPKEU U/ DEVELOPMENT OF FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCIES OF SYARIF HIDAYATULLAH STATE ISLAMIC UNIV	833.890.983	3.650.945.006
13	601.053111.980	REKSUS DEPKEU U/ PROYEK PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDIN LOAN JBIC IP-541 DLM VALUTA JPY	129.159.226	5.514.259.890
14	601.055111.980	REKSUS DEPKEU U/ REGIONAL INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT, LOAN JBIC IP-543 A DALAM VALUTA JPY	207.376.482.383	237.074.227.157
15	601.056111.980	REKSUS DEPKEU U/ REGIONAL INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT, LOAN JBIC IP-543 B DALAM VALUTA JPY	0	0
16	601.078411.980	REKSUS DEPKEU U/ PROYEK OZONE PROJECT TRUST FUND	0	8.093.003.106
17	601.205411.980	REKSUS DEPKEU U/ PEMBIY SECOND WATER & SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT	0	1.491.803.803
18	601.206411.980	REKSUS DEPKEU U/ PROYEK COMMUNITY EMPOWERMENT FOR RURAL DEVELOPMENT PROJECT ADB NO. 1765-INO	157.058	155.724
19	601.208411.980	REKSUS DEPKEU U/ PARTICIPATORY INTREGRATED DEV. IN RAINFED AREAS PROJ PIDRA 539-ID IFAD	33.098	32.817
20	601.209411.980	REKSUS DEPKEU U/ PROYEK DECENTRALIZED HEALTH SERVICES	70.005	69.411
21	601.213411.980	REKSUS DEPKEU U/ TECHNOLOGICAL AND PROFESSIONAL SKILLS DEVELOP.SECTOR PROJ	87.869	87.123
22	601.214411.980	REKSUS DEPKEU U/ MARINE & COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT	15.763.992	15.315.809
23	601.219411.980	REKSUS DEPKEU U/ SECOND KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT IBRD NO. 4627-IND/IDA CR. NO. 3535 IND/TF051369	310.852.400	308.212.829
24	601.221411.980	REKSUS DEPKEU U/ DECENTRALIZED BASIC EDUCATION PROJECT	366.801	363.686

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

25	601.224411.980	REKSUS DEPKEU U/ SECOND URBAN POVERTY PROJECT LOAN IBRD NO. 4664-IND/CREDIT IDA 3658-IND DALAM VALUTA USD	5.919.490.289	23.539.345.372
26	601.229411.980	REKSUS DEPKEU U/ POOR FARMER INCOME IMPROVEMENT THROUGH INNOVATIONT PROJ (PF13P)	34.873.986	34.577.858
27	601.230411.980	REKSUS DEPKEU U/ CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROJECT PHASE II (COREMAP II)	3.362.957.210	314.775
28	601.232411.980	REKSUS DEPKEU U/ GOVERNMENT FINANCE MANAGEMENT REVENUE ADMINISTRATION PROJECT 4762 IND	86.411.198.104	141.976.115.596
29	601.233411.980	REKSUS DEPKEU U/ HEALTH WORKFORCE AND SERVICE PROJECT LOAN IBRD 4702-IND/IDA CR. 3784-IND	491.075.001	484.299.046
30	601.236411.980	REKSUS DEPKEU LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT LOAN/CREDIT NO. 4731/3884-IND.DLM.VAL.USD	0	113.288.578
31	601.238411.980	REKSUS DEPKEU U/ SECOND EASTERN INDONESIA TRANSPORT PROJECT (EIRTP-2)	4.294.355.249	68.331.890.499
32	601.240411.980	REKSUS DEPKEU U/ THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT	438.475.160	434.751.893
33	601.241411.980	REKSUS DEPKEU U/ THE IMPROVEMENT O/ LAND & IRRIGATION SYSTEM AT FARM LEVEL PROJECT IDB NO. IND-0080	16.712.737.864	16.970.544.958
34	601.242411.980	REKSUS DEPKEU U/ CORAL REEF REHABILITATION & MANAGEMENT PROJ PHASE II (COREMEP II)	58.398	40.334.100.815
35	601.243411.980	REKSUS DEPKEU U/ SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT	1.287.293	427.882
36	601.244411.980	REKSUS DEPKEU U/ SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT	206.932	79.660
37	601.245411.980	REKSUS DEPKEU U/ STATE AUDIT REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROG	0	343.186
38	601.246411.980	REKSUS DEPKEU U/ SUPPORT FOR POOR & DISADVANTAGED AREAS PROJECT	26.146.197.850	41.245.343.700
39	601.247411.980	REKSUS DEPKEU U/ INDONESIA MANAGING HIGH EDUCATION F/ RELEVANCE & EFFICIENC PROJ. IBRD NO. 4789-IND/IDA NO. 4077-IND	41.702.191.528	169.376.449.644
40	601.248411.980	REKSUS DEPKEU U/ NEIGHBORHOOD UPGRADING SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP)	0	0
41	601.251411.980	REKSUS DEPKEU U/ THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE II	4.676.730	4.637.018
42	601.252411.980	REKSUS DEPKEU U/ THIRD URBAN POVERTY PROJECT LOAN IBRD NO. 4779-IND/IDA CR. 4063	8.750.509.008	13.213.276.817
43	601.254411.980	REKSUS DEPKEU U/ LOCAL GOVERNMENT FINANCE AND GOVERNANCE REFORM SEC. DEV. PROGRAM (LGFGRSDP) LOAN ADB NO. 2193-INO	0	0
44	601.255411.980	REKSUS DEPKEU U/ INITATIVES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECT (ILGRP)	3.104.793	832.926
45	601.256411.980	REKSUS DEPKEU U/ WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MNGMNT PRJ-WISMP	68.806.443	13.799.403.523
46	601.257411.980	REKSUS DEPKEU U/ COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH PROJECT	12.151	609.770
47	601.258411.980	REKSUS DEPKEU U/ COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH PROJECT LOAN NO. 2164-INO (SF)	1.632	137.382
48	601.259411.980	REKSUS DEPKEU U/ URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT 4786-IND	123.706.744	69.389.177.524
49	601.260411.980	REKSUS DEPKEU U/ PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR (PISP)	454	20.140
50	601.261411.980	REKSUS DEPKEU U/ PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR (PISP)	7.799	1.888

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

51	601.264411.980	REKSUS DEPKEU U/ EARLY CHILDHOOD EDUC & DEV PROJ (ECED) 4205	13.047.911.830	52.621.838.517
52	601.268411.980	REKSUS DEPKEU U/ PROYEK READ, LOAN IFAD 645-IP	667.133	15.284.742.707
53	601.269411.980	REKSUS DEPKEU U/ SUSTAINABLE AQUACULTURE DEV.FOR FOOD SECURITY AND POVERTY REDUCTION PROJECT	1.639.767	3.633.443
54	601.270411.980	REKSUS DEPKEU U/ MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT	126.407	127.860.741
55	601.271411.980	REKSUS DEPKEU U/ P. FARMER EMPOWNT THROUGH AGRICULTURAL TECH & INFORMATION PROJECT	59.840.560.272	27.777.303.392
56	601.274411.980	REKSUS DEPKEU U/ LOAN STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT (SRIP)	662.327	358.779.112
57	601.278411.980	REKSUS DEPKEU U/ BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MANAGEMENT AND UNIVERSAL TEACHER UPGRADING PROJECT (BERMUTU)	9.765.327.296	26.378.922.642
58	601.279411.980	REKSUS DEPKEU U/ NUTRITION IMPROVEMENT THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT PROJECT (NICE),	3.339.835	223.105.821
59	601.280411.980	REKSUS DEPKEU U/ THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT-PAMSIMAS (4204)	92.312	118.774,374.362
60	601.282411.980	REKSUS DEPKEU U/ NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS PROJECT	41.319.595.197	246.421.415.297
61	601.283411.980	REKSUS DEPKEU U/ LOAN IBRD NO.7504-ID/CREDIT IDA NO. 4384-ID (NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN URBAN AREAS PROJECT)/7664-ID	2.735.091	127.918.498.375
62	601.284411.980	REKSUS DEPKEU U/ VOCATIONAL EDUCATION STRENGTHENING PROJECT (INVEST)	66.467.080	1.953.295
63	601.285411.980	REKSUS DEPKEU U/ RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT PNPM MANDIRI	0	13.240.112.704
64	601.286411.980	REKSUS DEPKEU U/ NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWEMENT IN RURAL AREAS PROJECT LOAN NO. 755-ID	13.061.949.547	1.304.594.999
65	601.287411.980	REKSUS DEPKEU U/ INTEGRATED COMMUNITY -DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT IDB LOAN NO. IND-131 (1ST)/132 (LN) DLM VAL USD	42.111.960.846	68.411.825.254
66	601.288411.980	REKSUS DEPKEU U/ INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MGT INVESTM PROGRAM-PROJECT 1 (ICWRMIP), LOAN ADB NO. 2501-INO (SF)	10.455.771.617	2.385.081.681
67	601.289411.980	REKSUS DEPKEU LOAN IBRD 7669-ID(DAM OPERASIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT/DOISP)	21.227.521.955	3.706.899
68	601.290411.980	REKSUS DEPKEU UNTUK HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY PROJECT LOAN 7737-IND	2.125.721	351.458
69	601.291411.980	REKSUS DEPKEU UNTUK RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO THE PNPM MANDIRI PROJECT II (RIS PNPM II) LOAN ADB NO. 2575-INO	58.018.333	11.565.303
70	601.292411.980	REKSUS DEPKEU UNTUK URBAN WATER SUPPLY AND SANITATION PROJECT IBRD LOAN NO 7730 ID	726.943.656	13.486.500.000
71	601.293111.980	REKSUS DEPKEU UTK DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY (III) LOAN JICA NO. IP-553 DLM VALUTA JPY	1.693.342.478	4.411.408.000
72	601.294411.980	REKSUS DEPKEU UTK INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP) LOAN ADB NO. 2264-INO(SF)	0	0
73	601.295411.980	REKSUS DEPKEU U/ THIRD NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS - PNPM MANDIRI PEDESAAN (LOAN IBRD 7867-ID)	65.022.559.007	5.662.712

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

74	601.296411.980	REKSUS KEMENTRIAN KEUANGAN UTK PROJECT FOR INDONESIAN TAX ADMINISTRATION REFORM LOAN IBRD NO. 7631-ID	0	0
75	601.297411.980	REKSUS KEMENKEU U/TNP FOR COMM.EMPOW IN URBAN AREAS LOAN 7866-ID	8.840.951.244	0
76	601.298411.980	REKSUS KEMENKEU UTK SCHOLARSHIPS PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS PROJECT IBRD 8010-ID	59.215.224.734	0
77	601.299411.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK PROYEK SOLID LOAN IFAD NO. L-1-835-ID DALAM VALUTA USD	1.659.171	0
78	601.300411.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK PROYEK INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT (ICDD) PHASE II LOAN IDB DALAM VALUTA USD	284.741.884.748	0
79	601.301411.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK FOURTH NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS PROJECT DALAM VALUTA USD	228.045.149.024	0
80	602.001311.980	REKSUS KEMENKEU U/ HIBAH BOS TRAINING NO. EP-58059 DALAM VALUTA AUD	32.663.220.775	0
81	602.001991.980	REKSUS KEMENKEU U/ TSP II HIBAH UNI EROPA NO. DCI-ASIE/2008/020-069 DALAM VALUTA EURO	286.431.356	0
82	602.002311.980	REKSUS KEMENKEU U/ HIBAH KFW NO. 2007 66089 DALAM VALUTA EURO	51.534.952.000	0
83	602.002991.980	REKSUS KEMENKEU U/ HIBAH KFW NO. 2007 66089 DALAM VALUTA EURO	4.635.741.824	0
84	602.079411.980	REKSUS DEPKEU U/ CORAL REEF REHABILITION AND MANAGEMENT PROJ. PHASE II (COREMAP II)	9.589.791.218	5.215.692.587
85	602.080411.980	REKSUS DEPKEU U/ GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT & REVENUE ADMINISTRATION PROJECT TF 053556	1.669.888.069	1.655.708.384
86	602.082411.980	REKSUS DEPKEU U/ EARTHQUAKE AND TSUNAMI EMERGENCY SUPPORT PROJECT	527.185.682	522.709.138
87	602.084411.980	REKSUS DEPKEU U/ COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH ACEH/NIAS NORTH SUMATERA PROJECT	33.370	33.087
88	602.085411.980	REKSUS DEPKEU U/ STATE AUDIT REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT	0	3.997.039
89	602.086411.980	REKSUS DEPKEU U/ INITIATIVES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECT (ILGRP)	18.134.549	24.025.951.778
90	602.087411.980	REKSUS DEPKEU U/ WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MNGMNT PROJECT WISMP	1.239.323	40.370
91	602.089411.980	REKSUS DEPKEU U/ SEARCH AND TSUNAMI EMERGENCY SUPP.PRJ D/ HBH.PEM.BELANDA SEC.FDCRY.OVSGHT.	308.345.008	305.726.727
92	602.091411.980	REKSUS DEPKEU U/ URBAN SECTOR DEVELOPMENT PROJECT TF 53555	846.769	4.053.342.850
93	602.092411.980	REKSUS DEPKEU U/ EUROPEAN UNION GRANT F/N USA TENGG.BRT. WTR. RSRC.MNG.PROGRAM	223.796.607	252.557
94	602.095411.980	REKSUS DEPKEU U/ PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT	4.896	5.485
95	602.096411.980	REKSUS DEPKEU U/ EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT TF056841	26.387.515.376	8.631.967.882
96	602.097411.980	REKSUS DEPKEU U/ SEISMICALLY UPGRADED HOUSING IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM AND NORTH SUMATERA	62.281.110	61.752.256
97	602.098411.980	REKSUS DEPKEU U/ PROYEK DEUTCH GRANT	366.971.985	1.393.719.276
98	602.099411.980	REKSUS DEPKEU U/ PROYEK FROM BEST PRACTICE POLICY FORMULATION PROJECT IDF TF 57276	0	9.007.184
99	602.100411.980	REKSUS DEPKEU U/ PROYEK KECAMATAN BASED RECONSTR AND REHABILITATION PLANNING PROJECT (KRRP) TF 057307-IND	0	52.034.637.206

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

100	602.102411.980	REKSUS DEPKEU U/ STRENGTHENING ACCOUNTABILITY FOR AND AUDIT OF DISASTER RELATED AID, IDF GRANT NO. TF-57426	0	0
101	602.104411.980	REKSUS DEPKEU GRANT IDA NO. TF-057955 (MDTF FOR ACEH AND NORTH SUMATERA, SUPP. FOR POOR AND DISADVANTAGE AREAS PROJ.)	4.410.886.575	8.210.799.142
102	602.105411.980	REKSUS DEPKEU U/ INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT FACILITY IMPREST ACCOUNT F/ DUTCH GRANT AGREEMENT 0064-INO	0	0
103	602.106411.980	REKSUS DEPKEU U/ PROYEK READ, GRANT IFAD 726-ID	32.288.155	6.199.564
104	602.107411.980	REKSUS DEPKEU U/ PROYEK MDTFANS-INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION FINANCING FACILITY TF 057657	10.280.016.003	816.335.328
105	602.108411.980	REKSUS DEPKEU U/ PROY JAVA RECONSTRUCTION FUND (JRF) GRANT IBRD TF090014-IND	1.045.957.710	30.293.817.578
106	602.109411.980	REKSUS DEPKEU GRANT FOR PILOT STUDY ON TEACHER SERTIF. EMPLOYMENT AND DEPLOYM. UNDER THE DUTCH EDUC. SUPP. PROG. TF-057271	0	0
107	602.110411.980	REKSUS DEPKEU U/ MDTF TO SUPPORT PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION REFORM PROJECT TF 090047 IND	79.270.279	14.841.893
108	602.112411.980	REKSUS DEPKEU U/ KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT AND ENVIRONMENT IN SULAWESI PROJECT	0	6.131.323
109	602.114411.980	REKSUS DEPKEU U/ THIRD KEC. DEV. PROJ. PHASE II FOR SMALLHOLDER AGRIBUS. DEV. INITIATIVE (SADI)	0	0
110	602.115411.980	REKSUS DEPKEU GRANT NO. 057574 STREAMLING DATA FLOWS FROM REGION TO THE CENTER UNDER DECENTRALIZATION PROJECT	0	0
111	602.121411.980	REKSUS DEPKEU U/ NETHERLANDS TRUST FUND FOR THE BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MGT AND UNIV. TEACHER UPGRADING PROJ.	26.063.811.171	18.787.817.566
112	602.122411.980	REKSUS DEPKEU U/ TECH. ASS. TO IND. NAT.SGL WINDOW, MULTI DONOR TRUST FUND TO SUP. PUBL. FIN. MGT & REV. ADM. REFORM GRANT TF 091414	362.720.000	9.348.212
113	602.123411.980	REKSUS DEPKEU U/ BASIC EDUCATION PROJECT TF-091895-IND	6.338.469.430	3.016.581.829
114	602.124411.980	REKSUS DEPKEU U/ P GEOTHERMAL POWER GENERATION DEV. PROJECT TF 092324	895.347.932	2.239.976.561
115	602.125411.980	REKSUS DEPKEU U/ IDF GRANT F/ THE INPROV LINK BETWEEN GOV FIN REPORT & SOURCE OF FP TF 92618	68.847.792	359.640.000
116	602.126411.980	REKSUS DEPKEU U/ DUTCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM BOS - KITA TF 093613	0	0
117	602.129411.980	MULTI-DONOR SUPPORT FACILITY F/ NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT CO-FINANCING GRANT F/ DECENTRALIZED MGT O/ NATURAL RESOURCES & RENEWABLE ENERGY	1.593.791	60.769.333.556
118	602.130411.980	REKSUS DEPKEU U/ HIBAH TF 093358 ACEH ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING FACILITY (EDFF)	54.519.622.727	105.019.528.617
119	602.131411.980	REKSUS DEPKEU U/ GLOBAL PARTNERSHIP ON OUTPUT BASIC AND EXPANDING PIPE AND WATER SUPPLY TO SURABAYA'S URBAN POOR PROJECT	3.549.657.809	4.495.500.000
120	602.132411.980	REKSUS DEPKEU U/ NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS PROJECT GRANT NO. 1053-ID	0	0
121	602.133411.980	REKSUS DEPKEU UNTUK HIBAH TF 093092 (THE PREPARATION OF STRENGTH THE NATIONAL STATISTICAL SYSTEM OF INDONESIA PROJECT	0	1.238.919.520
122	602.134411.980	PROYEK MULTI DONOR TRADE AND INVESMENT CLIMATE FACILITY TF-094088	1.203.233	357.158.124

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

123	602.135411.980	REKSUS DEPKEU U/ SUPPORT FOR THE THIRD WATER SUPPLY & SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITY PROJECT PANSIMAS (TF 094792)	14.759.434.623	90.180
124	602.136411.980	REKSUS DEPKEU U/DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY II CAPACITY STRENGTHENING PROG. FOR LOCAL GOVERNMENT LEGISLATURES (TF 095584)	413.771.479	534.208.627
125	602.137411.980	REKSUS DEPKEU U/ WEST INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT GRANT TF-094760	0	1.095.358.155
126	602.138411.980	REKSUS DEPKEU UNTUK INDONESIA WATER AND SANITATION PROGRAM SUB PROGRAM D- SANITATION COMMUNITY & MUNICIPAL PILOTS PROJECT TF 094270	858.383.499	3.596.400.000
127	602.139411.980	REKSUS DEPKEU U/ INDONESIA WATER AND SANITATION PROGRAM SUB PROGRAM J - TECHNICAL ASSISTANCE FOR FLOOD MITIGATION PROJECT (TF 092649)	34.110.732	599.615.814
128	602.140411.980	REKSUS DEPKEU U/ JFPR ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR, GRANT NO. 9132-INO DLM VAL. USD	62.082.249	1.168.423.157
129	602.141411.980	REKSUS DEPKEU UNTUK DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY II: GOVT TRAINING AND EDUCATION CENTER DEV:INT.CBSIPSD(TF-095995)	3.620.580	5.415.459
130	602.142311.980	REKSUS DEPKEU UTK URBAN HOUSEHOLD WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAM DLM VAL. AUD (DIRECT FUNDING AGREE NO. 54184)	269.270.307	113.228.145.048
131	602.143411.980	REKSUS KEMENKEU UTK IND TECH ASSISTANCE TO IND TAX ADM REFORM UNDER THE SUPP TO PUBLIC FIN MNGMT N REV ADM MULTI DONOR TF093998	239.861.023	0
132	602.144411.980	SUPPORTING THE INDONESIAN CORRUPTION ERADICATION CORRUPTION PREVENTION STRATEGY TF - 094467	8.561.189	222.629.657
133	602.145411.980	REKSUS DEPKEU UTK DSF II:NSPK FOR LOCAL GOVERNMENT SERVICE DELIVERY TF 096670	228.882.848	0
134	602.146411.980	MDTF FOR ACEH AND NORTH SUMATRA TF 096865	325.813	14.385.600.000
135	602.147411.980	REKSUS DEPKEU UNTUK IDF GRANT FOR SUPPORT TO BPK FOR PREPARATION OF NEW STRATEGIC PLAN PROJECT TF-096643	34.678.933	59.284.946
136	602.148411.980	WATER AND SANITATION POLICY AND ACTION PLANNING FACILITY PROJECT (WASPOLA) TF-095502	1.007.721.037	2.247.750.000
137	602.150411.980	REKSUS KEMENKEU UTK GRANT AGREEMENT PNPM SUPPORT FACILITY TRUST FUND (PSF)	136.617.643.497	91.708.200.000
138	602.151411.980	REKSUS KEMENKEU U/ INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION FINANCING FACILITY PROJECT-ADDITIONAL FINIANCING TF-098082	48.729.326.591	0
139	602.152411.980	REKSUS KEMENKEU GLOBAL PARTNERSHIP ON OUTPUT BASED AID: EXTENDING TELECOMMUNICATION IN RURAL INDONESIA PROJECT TF092629	269.167.348	0
140	602.153411.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK CITARUM WATERSHED MANAGEMENT AND BIODIVERSITY CONSERVATION (0216-INO)	693.382.987	0
141	602.154411.980	REKSUS KEMENKEU U/ IDF GRANT FOR SUPPORT TO BPKP ON PILOT IMPLEMENETATION OF COSO FRAMEWORK PROJECT TF-096644	37.292.150	0
142	602.155411.980	REKSUS KEMENKEU U/ THIRD NATIONAL PROG FOR COMM EMPOWERMENT IN RURAL AREAS DISASTER MGT SP I TF098862 & TF098819	22.225.481.924	0
143	602.156411.980	REKSUS KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK KTF SUPPORT FOR STATISTICAL CAPACITY BUILDING (TF 98283)	317.380.000	0

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

144	602.157411.980	REKSUS KEMENTERIAN KE U/MDTF FOR ACEH & NORTH SUMATRA-INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION ENABLING PROJECT DLM VALUTA USD TF056894-IND	0	0
145	602.158411.980	REKSUS KEMENKEU UTK TF-099083 INTEGRATED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) FOR PNPM MANDIRI-SIMPADU DLM VALUTA USD	2.397.397	0
146	602.159411.980	REKSUS KEMENKEU UTK TF-098863 PNPM SUPPORT FACILITY TRUST FUND (PSF) COMM- BASED SETTLEMENT (REKOMPAK-PSF) DALAM VALUTA USD	3.627.200.000	0
147	602.160411.980	REKSUS KEMENKEU UTK TF-098869 PNPM SUPPORT FACILITY TRUST FUND (PSF) COMM- BASED SETTLEMENT (REKOMPAK-PSF) DALAM VALUTA USD	24.253.487.620	0
148	602.161411.980	REKSUS KEMENKEU UTK TF-098870 PNPM SUPPORT FACILITY TRUST FUND (PSF)- THIRD NAT PROG FOR COMM EMP IN UADMSP DLM VAL USD	6.347.600.000	0
149	602.162411.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK SUPPORT FOR THE EITI IN INDONESIA TF-99302	1.715.250.013	0
150	602.163411.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK SOLID GRANT IFAD NO. G-I-C-835-ID DALAM VALUTA USD	368.932.577	0
151	602.164411.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK THIRD NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS-PSF FINANCING TF-099616-ID	82.662.126.722	0
152	601.302411.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK PROYEK PENGADAAN SENJATA DAN AMUNISI SUKHOI 27 SK/30 MK DLM VALUTA USD	0	0
153	601.294111.980	REKENING KEMENKEU UTK PROYEK JAKARTA MASS RAPID TRANSIT SYSTEM (MRT) LOAN JICA NO. IP-536	0	0
154	602.165411.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK FCPF : REDD + READINESS PREPARATION DALAM VALUTA USD	2.505.991.311	0
155	602.003311.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK PROYEK EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAM (ESPP) GRANT NO. 60472 DLM VALUTA AUD	0	0
156	601.304411.980	REKSUS KEMENKEU U/ URBAN SANITATION & RURAL INFRASTRUCTURE (USRI) SUPPORT TO PNPM MANDIRI PROJECT 2768-INO DLM VAL USD	0	0
157	601.303411.980	REKSUS KEMENKEU UNTUK WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MGT PROGRAM PHASE II 8027-ID DLM VAL USD	0	0
	JUMLAH		**2.390.016.547.054**	**2.824.334.833.972**

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

No.	KANWIL/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
	I. ACEH		**188.416.495.674**	**158.799.520.207**
1	BANDA ACEH	001	86.077.181.048	69.279.610.531
2	LANGSA	002	15.082.906.830	11.636.293.800
3	MEULABOH	003	21.953.058.037	19.845.267.400
4	TAPAK TUAN	074	9.171.385.471	8.184.706.600
5	LHOKSEUMAWE	089	40.342.405.921	35.958.796.400
6	KUTACANE	105	8.129.876.402	7.310.669.100
7	TAKENGON	122	7.659.681.965	6.584.176.376
8	BANDA ACEH (KHUSUS)	175	0	0
	II. MEDAN		**321.199.207.671**	**261.707.843.368**
9	MEDAN I	004	116.517.432.750	82.788.363.062
10	PEMATANG SIANTAR	005	30.558.035.281	29.310.370.663
11	PADANG SIDEMPUAN	006	16.732.965.415	10.460.237.700
12	GUNUNG SITOLI	007	4.830.717.821	7.435.536.902
13	RANTAU PRAPAT	075	6.934.925.218	6.226.059.100
14	TANJUNG BALAI	076	13.244.293.422	8.090.398.700
15	SIBOLGA	106	18.576.597.817	13.958.146.065
16	SIDIKALANG	119	7.209.056.200	11.346.555.250
17	MEDAN II	123	76.539.868.893	70.098.119.603
18	TEBING TINGGI	124	15.918.964.206	13.019.053.200
19	BALIGE	125	14.136.350.648	8.975.003.123
	III. PADANG		**200.126.914.179**	**120.930.980.543**
20	PADANG	010	116.372.676.317	66.358.488.656
21	BUKIT TINGGI	011	45.115.347.189	30.543.225.150
22	SIJUNJUNG	077	7.688.869.045	5.604.746.300
23	SOLOK	090	15.246.445.955	8.641.479.178
24	LUBUK SIKAPING	091	8.885.623.905	5.540.324.974
25	PAINAN	142	6.817.951.768	4.242.716.285
	IV. PEKANBARU		**253.137.514.313**	**139.676.345.121**
26	PEKANBARU	008	95.759.045.711	70.689.678.308
27	TANJUNG PINANG	009	26.410.968.448	23.569.641.458
28	RENGAT	092	16.864.617.718	10.258.507.900
29	DUMAI	120	93.484.930.241	18.563.688.395
30	BATAM	137	20.617.952.195	16.594.829.060
	V. JAMBI		**107.874.425.306**	**65.428.219.656**
31	JAMBI	012	60.822.369.565	42.719.521.928
32	SUNGAI PENUH	013	7.283.391.670	6.679.261.435
33	MUARA BUNGO	078	7.738.691.912	5.867.042.500
34	KUALA TUNGKAL	143	14.646.910.168	4.618.757.700
35	BANGKO	159	17.383.061.991	5.543.636.093
	VI. PALEMBANG		**199.873.562.625**	**131.414.215.424**
36	PALEMBANG	014	117.280.832.748	89.250.270.202
37	LUBUK LINGGAU	070	8.510.828.352	6.114.924.700
38	BATURAJA	109	13.395.919.424	8.239.070.900
39	LAHAT	144	34.394.220.638	20.714.164.122
40	SEKAYU	160	26.291.761.463	7.095.785.500

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

	VII. BANDAR LAMPUNG		**124.991.607.152**	**120.854.023.068**
41	BANDAR LAMPUNG	017	83.916.071.055	83.001.302.395
42	KOTABUMI	116	20.121.342.334	13.445.863.870
43	METRO	126	17.587.616.363	21.285.466.803
44	LIWA	145	3.366.577.400	3.121.390.000
	VIII. BENGKULU		**76.262.812.730**	**52.805.218.171**
45	BENGKULU	016	50.038.651.771	36.755.737.282
46	MANNA	121	8.872.744.151	5.828.997.186
47	CURUP	146	14.007.964.217	7.758.494.792
48	MUKO MUKO	181	3.343.452.591	2.461.988.911
	IX. PANGKAL PINANG		**34.964.306.343**	**20.580.451.900**
49	PANGKAL PINANG	015	30.228.474.436	16.891.877.000
50	TANJUNG PANDAN	107	4.735.831.907	3.688.574.900
	X. SERANG		**163.509.005.823**	**109.766.370.199**
51	SERANG	020	69.621.389.505	52.700.161.622
52	TANGERANG	127	87.599.894.052	51.094.486.119
53	RANGKASBITUNG	161	6.287.722.266	5.971.722.458
	XII. JAKARTA		**6.215.661.070.268**	**4.865.355.613.664**
54	JAKARTA I	018	342.318.039.905	138.565.085.870
55	JAKARTA II	019	4.888.636.130.973	4.044.192.732.452
56	JAKARTA III	088	466.379.021.887	298.109.352.538
57	JAKARTA IV	133	241.609.957.073	159.730.457.353
58	JAKARTA V	139	276.717.920.430	224.757.985.451
59	JAKARTA VI	140	0	0
	XII. BANDUNG		**739.473.513.121**	**603.847.251.714**
60	PURWAKARTA	021	41.779.439.077	37.769.941.508
61	BANDUNG I	022	115.247.800.077	105.043.047.169
62	BOGOR	023	118.026.272.859	96.708.402.566
63	CIREBON	024	54.875.582.926	45.978.090.542
64	TASIKMALAYA	025	43.239.923.479	37.160.758.682
65	KARAWANG	086	14.161.787.144	9.128.427.184
66	SUMEDANG	087	22.641.355.778	14.213.335.237
67	BANDUNG II	095	172.003.296.805	142.411.613.819
68	GARUT	096	24.293.491.939	22.212.816.861
69	SUKABUMI	128	44.982.917.708	36.702.180.462
70	KUNINGAN	147	24.401.377.157	14.209.302.830
71	BEKASI	171	63.820.268.172	42.309.334.854
	XIII. SEMARANG		**575.464.671.600**	**445.130.621.281**
72	SEMARANG I	026	78.317.416.517	67.825.798.398
73	PURWOREJO	027	19.736.629.948	14.723.621.424
74	SURAKARTA	028	81.908.231.762	71.019.783.188
75	PURWOKERTO	029	44.959.483.849	39.061.760.300
76	PEKALONGAN	072	17.481.832.807	14.056.161.000
77	PATI	097	31.528.953.352	24.461.643.696
78	MAGELANG	115	56.162.920.834	40.099.444.652
79	TEGAL	118	38.403.745.347	31.596.568.009

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

80	KUDUS	129	41.665.343.266	19.050.357.720
81	CILACAP	130	13.792.898.270	11.084.024.200
82	SEMARANG II	134	69.058.848.620	57.238.358.580
83	KLATEN	148	30.224.375.137	18.554.550.600
84	SRAGEN	162	16.125.845.424	13.093.900.666
85	PURWODADI	163	16.043.618.721	12.033.276.600
86	BANJARNEGARA	164	20.054.527.746	11.231.372.248
	XIV. YOGYAKARTA		**148.845.090.854**	**134.330.668.061**
87	YOGYAKARTA	030	133.298.807.618	120.677.832.561
88	WONOSARI	149	7.608.087.687	6.824.425.300
89	WATES	176	7.938.195.549	6.828.410.200
	XV. SURABAYA		**780.833.712.442**	**629.817.075.077**
90	SURABAYA I	031	153.914.701.187	135.528.355.246
91	MALANG	032	131.275.728.795	108.359.385.704
92	MADIUN	033	66.487.469.748	55.721.588.206
93	KEDIRI	034	49.418.890.010	42.375.296.851
94	BONDOWOSO	035	28.447.897.869	18.345.195.902
95	PAMEKASAN	036	33.979.855.463	28.126.904.367
96	BOJONEGORO	073	50.312.400.150	14.506.923.979
97	MOJOKERTO	098	36.372.233.735	32.497.789.300
98	PACITAN	099	4.447.470.212	4.044.453.800
99	BANYUWANGI	100	21.771.804.309	8.489.909.891
100	JEMBER	131	44.893.609.790	40.414.869.300
101	SURABAYA II	135	96.338.089.695	86.276.671.818
102	BLITAR	150	20.073.786.082	16.741.989.635
103	SIDOARJO	165	31.623.690.537	25.466.827.100
104	TUBAN	166	11.476.084.860	12.920.913.978
	XVI. PONTIANAK		**118.459.122.694**	**93.401.279.084**
105	PONTIANAK	042	65.165.853.136	50.475.757.034
106	SINTANG	079	12.595.983.260	11.540.863.600
107	SINGKAWANG	093	23.681.592.452	15.799.036.550
108	KETAPANG	094	5.152.825.982	4.720.980.400
109	PUTUSSIBAU	117	3.631.276.400	3.412.686.100
110	SANGGAU	167	8.231.591.464	7.451.955.400
	XVII. PALANGKARAYA		**71.579.888.714**	**49.123.077.600**
111	PALANGKARAYA	043	46.198.599.855	30.257.493.700
112	SAMPIT	044	8.119.043.616	6.832.070.400
113	BUNTOK	080	10.815.901.393	6.748.490.500
114	PANGKALAN BUN	102	6.446.343.850	5.285.023.000
	XVIII. BANJARMASIN		**112.667.726.943**	**91.314.602.379**
115	BANJARMASIN	045	66.483.972.764	59.009.472.267
116	KOTABARU	081	7.244.064.506	7.507.729.124
117	BARABAI	110	16.610.321.737	12.946.778.300
118	TANJUNG	151	17.488.812.949	8.499.710.400
119	PELAIHARI	168	4.840.554.987	3.350.912.288
	XIX. SAMARINDA		**175.948.396.725**	**94.120.161.669**
120	SAMARINDA	046	84.901.238.253	39.182.330.119

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

121	BALIKPAPAN	047	53.184.666.832	35.815.933.550
122	TARAKAN	048	19.656.905.709	14.147.366.600
123	NUNUKAN	152	7.128.688.881	2.253.634.800
124	TANJUNG REDEP	153	11.076.897.050	2.720.896.600
	XX. DENPASAR		**132.471.879.720**	**118.202.483.000**
125	DENPASAR	037	99.165.506.726	87.462.167.700
126	SINGARAJA	132	21.881.463.265	20.500.988.000
127	AMLAPURA	154	11.424.909.729	10.239.327.300
	XXI. MATARAM		**111.106.739.455**	**71.924.511.673**
128	MATARAM	038	65.409.009.387	49.728.708.702
129	BIMA	071	27.736.875.370	10.264.447.961
130	SUMBAWA BESAR	101	9.215.617.194	5.976.532.610
131	SELONG	169	8.745.237.504	5.954.822.400
	XXII. KUPANG		**85.000.812.969**	**77.714.049.577**
132	KUPANG	039	50.917.913.971	49.151.398.694
133	ENDE	040	9.667.891.305	8.225.288.084
134	WAINGAPU	041	6.173.899.892	5.311.214.999
135	RUTENG	111	6.939.434.227	6.535.062.000
136	ATAMBUA	172	6.668.597.450	5.990.826.800
137	LARANTUKA	174	4.633.076.124	2.500.259.000
	XXIII. MAKASAR		**281.388.541.016**	**237.837.252.518**
138	MAKASSAR I	054	94.684.199.384	88.297.347.212
139	WATAMPONE	055	21.540.286.521	19.244.963.263
140	BANTAENG	056	12.930.842.139	11.299.187.328
141	PARE-PARE	057	33.129.220.883	26.508.383.638

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

142	PALOPO	058	11.215.487.221	9.628.539.435
143	MAJENE	059	8.021.147.900	7.491.566.490
144	MAKASAR II	136	74.148.684.755	61.106.971.179
145	BENTENG	155	2.327.701.472	2.297.534.368
146	MAKALE	170	4.092.372.091	3.387.245.417
147	SINJAI	177	2.984.796.443	3.220.090.578
148	MAMUJU	178	16.313.802.207	5.355.423.610
	XXIV. PALU		**83.627.539.607**	**66.633.008.753**
149	PALU	051	63.238.366.826	46.823.739.561
150	POSO	052	8.912.525.305	9.514.251.600
151	LUWUK	053	6.169.225.472	5.404.819.151
152	TOLI-TOLI	082	5.307.422.004	4.890.198.441
	XXV. KENDARI		**72.601.273.699**	**52.202.420.524**
153	KENDARI	060	46.995.964.344	37.224.833.064
154	BAU-BAU	103	12.926.099.127	6.729.208.900
155	KOLAKA	156	8.852.652.540	4.681.296.500
156	RAHA	157	3.826.557.688	3.567.082.060
	XXVI. GORONTALO		**41.068.814.727**	**31.012.655.374**
157	GORONTALO	050	36.890.096.058	27.357.048.274
158	MARISA	180	4.178.718.669	3.655.607.100
	XXVII. MANADO		**117.985.820.918**	**77.048.916.819**
159	MANADO	049	86.266.916.410	60.256.510.919
160	TAHUNA	083	3.502.929.182	3.213.286.300
161	KOTAMOBAGU	158	10.207.836.284	5.381.882.000
162	BITUNG	179	18.008.139.042	8.197.237.600
	XXVIII. TERNATE		**33.803.319.339**	**29.349.664.300**
163	TERNATE	062	30.439.383.635	26.992.122.600
164	TOBELO	112	3.363.935.704	2.357.541.700
	XXIX. AMBON		**80.767.163.265**	**73.757.452.601**
165	AMBON	061	64.196.813.365	58.164.122.147
166	TUAL	084	6.472.561.900	5.999.585.454
167	SAUMLAKI	104	2.807.300.200	2.511.079.200
168	MASOHI	173	7.290.487.800	7.082.665.800
	XXX. JAYAPURA		**221.445.997.769**	**194.526.934.407**
169	JAYAPURA	063	87.468.959.472	103.420.624.596
170	BIAK	064	16.121.899.746	15.171.341.200
171	MANOKWARI	065	16.635.786.830	14.002.759.725
172	SORONG	066	19.375.235.800	17.255.413.900
173	FAK-FAK	067	6.512.654.739	4.054.947.900
174	MERAUKE	068	30.156.700.640	16.517.788.700
175	NABIRE	085	5.646.511.805	4.923.921.100
176	WAMENA	113	5.880.640.500	5.461.425.300
177	SERUI	138	5.346.098.271	3.383.541.486
178	TIMIKA	141	28.301.509.966	10.335.170.500
JUMLAH KPPN			**11.870.556.947.661**	**9.218.612.887.732**

REKENING PEMERINTAH LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

Dalam Rupiah

NO	NO REKENING	NAMA REKENING	31 Desember 2011	31 DESEMBER 2010
A.	DI BANK INDONESIA			
1	513000000	Rekening Dana Investasi	0,00	0,00
2	519000102	Rekening Pembangunan Daerah	0,00	0,00
3	607000111	RDI JPY	0,00	105,87
4	607000311	RDI AUD	0,00	0,00
5	607000411	RDI USD	0,00	0,00
6	607000511	RDI GBP	0,00	0,00
7	607000990	RDI SDR	0,00	0,00
8	607000991	RDI EUR	0,00	0,00
9	600000411	Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing	6.237.138.752.226,00	7.308.488.402.783,01
10	508000071	Penerimaan Pertambangan dan perikanan	123.745.646.379,00	61.921.102.334,71
11	508000084	Penerimaan Panas Bumi	197.960.188.008,00	208.604.971.388,00
12	500000001	Menteri Keuangan Cq.Direktur Jenderal Anggaran utk menampung dana talangan reksus kosong dan reimbursement dari lender	0,00	0,00
13	500000003	Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk pengelolaan Surat Utang Negara	0,00	0,00
14	502000001	Menteri Keuangan Pengeluaran Untuk Surat Berharga Negara	0,00	21.194.964.000,00
15	510000271	Rek. Pinjamanan Luar Negeri untuk menampung sisa saldo SPL XI INP 22 dan SPL XII INP 23	0,00	0,00
16	600500411	Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing (USD)	0,00	0,00
17	609001991	Menkeu utk Penerimaan Hibah Educt.Sector Support Prog (ESSP)	0,00	0,00
18	519000119	Rek. Penerimaan Hasil Penjualan Beras Pemerintah	0,00	0,00
		JUMLAH I	**6.558.844.586.613**	**7.600.209.440.611,59**
B.	REKENING PENEMPATAN DI BANK UMUM			
1	0155117558	BNI Cab. Pecenongan	0,00	0,00
2	0329-01-002277-30-4	BRI Cab. Jkt Veteran	0,00	0,00
3	070-00668888889	Bank Mandiri Cab. Jkt Plaza Mandiri	0,00	0,00
		JUMLAH II	**0,00**	**0,00**

C.	REKENING RETUR			
1	0188659184	Bank BNI Cabang Jakarta Pusat	0,00	12.432.337.620,00
2	0329-01-002685-30-3	Bank BRI Cabang Jakarta Veteran	0,00	0,00
3	119-00-0002345-5	Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir	0,00	62.841.009.232,00
4	001.01.03.03595-4	BPD Bengkulu Cabang Utama Bengkulu	0,00	615.351,00
5	1000000325	BPD Kalbar Cabang Utama Pontianak	0,00	0,00
6	0101005508	BPD Maluku Cabang Utama Ambon	0,00	4.083.356.105,00
7	130-002-000026718.8	BPD Sulsel Cabang Utama Makassar	0,00	0,00
8	100.01.06.019845-5	BPD Sumut Cabang Utama Medan	0,00	0,00
9	502.000.005	Bank Indonsia	0,00	373.326.198.859,00
10	501001000	Rekening rr KBI KPPN Banda Aceh	0,00	0,00
11	501001000	Rekening rr KBI KPPN Medan I	0,00	0,00
12	501001000	Rekening rr KBI KPPN PADANG	0,00	0,00
13	501001000	Rekening rr KBI KPPN Pekanbaru	0,00	0,00
14	501001000	Rekening rr KBI KPPN Bandar Lampung	0,00	0,00
15	501001000	Rekening rr KBI KPPN Pematangsiantar	0,00	0,00
16	501001000	Rekening rr KBI KPPN Pontianak	0,00	0,00
17	501001000	Rekening rr KBI KPPN Samarinda	0,00	0,00
18	501001000	Rekening rr KBI KPPN Manado	0,00	0,00
19	501001000	Rekening rr KBI KPPN Kendari	0,00	0,00
20	501001000	Rekening rr KBI KPPN Kupang	0,00	0,00
21	501001000	REKENING rr KBI KPPN Ambon	0,00	0,00
22	501001000	Rekening RR KPBI KPPN Jakarta I	0,00	0,00
23	501001002	Rekening RR KPBI KPPN Jakarta II	0,00	0,00
24	501001003	Rekening RR KPBI KPPN Jakarta III	0,00	0,00
25	501001004	Rekening RR KPBI KPPN Jakarta IV	0,00	0,00
26	501001005	REKENING RR KPBI KPPN JAKARTA V	0,00	0,00
27	501001006	REKENING RR KPBI KPPN JAKARTA VI	0,00	0,00
		JUMLAH	**0,00**	**452.683.517.167,00**
		GRAND TOTAL	**6.558.844.586.613,00**	**8.052.892.957.778,59**

SALDO PEMERINTAH LAINNYA DI BANK UMUM
PER 31 DESEMBER 2011

No.	Nama Rekening	Saldo Awal 1 Januari 2011	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Rek Induk Dana Lingk Bergulir	19.704.684.185,78	4.343.401.989,81	16.934.841.250,00	7.113.244.925,59
2.	Kredit Listrik Pedesaan	9.460.188.342,84	38.153.367,00	9.485.818.771,84	12.522.938,00
3.	Rek KKPA Bagi Hasil BMI	13.372.133,71	432.128.919,23	435.530.784,33	9.970.268,61
4.	Rek K U M K	760.788.981.475,43	186.285.273.625,90	906.298.452.875,00	40.775.802.226,33
5.	Proyek Distribusi Ternak	13.726.478,70	10.220.836,20	13.718.264,00	10.229.050,90
6.	Proyek P 3 Bali	18.158.678,28	156.810,00	8.164.408,00	10.151.080,28
7.	Rek Recoveri KUT 1999/2000	14.491.152,28	567.275.239,27	571.765.659,00	10.000.732,55
8.	Dana Cadangan KUT 99/2000	10.757.981,98	22.615.778,00	23.373.673,00	10.000.086,98
9.	Rekening GLK - KUD	32.887.069,87	267.810.419,07	184.648.543,36	116.048.945,58
10.	Prov Pengem Akuntansi (P2A)	7.666.191,91	110.721,00	113.030,00	7.663.882,91
11.	PIR/UPP Perkebn (5%) BRI	206.509.783,58	1.135.491.068,39	996.666.417,00	345.334.434,97
12.	PIR/UPP Perkebn (92%) BRI	3.683.810.522,11	21.231.603.517,08	18.733.955.514,53	6.181.458.524,66
13.	PIR/UPP Perkebn (3%) BRI	148.644.540,76	795.706.243,32	677.538.561,00	266.812.223,08
14.	PIR/UPP Perkebn (92%) Mandiri	56.297.199,03	1.086.867.649,56	751.657.457,75	391.507.390,84
15.	PIR/UPP Perkebn (5%) Mandiri	13.687.947,06	73.768.156,55	42.090.924,98	45.365.178,63
16.	PIR/UPP Perkebn (92%) Mandiri	559.677.971,57	2.794.644.118,61	2.033.425.699,99	1.320.896.390,19
17.	PIR/UPP Perkebn (5%) Mandiri	40.917.019,04	128.453.101,66	88.244.801,09	81.125.319,61
Jumlah		**794.774.458.673,93**	**219.213.681.560,65**	**957.280.006.634,87**	**56.708.133.599,71**

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	10.591.022	78.652.646	17.700.000	44.689.875	3.044.874.479	1.925.258.480
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	4.004.839.807	4.925.873.263				
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	15.805.535.379	12.861.631.482	132.571.641	1.195.839.643	2.510.592.423	389.630.542
4	005	Mahkamah Agung	636.667.521	1.261.149.772	-	332.202.990	6.194.083.868	717.937.978
5	006	Kejaksaan Agung	703.832.326	487.189.213	5.877.625.188	4.404.766.934	56.727.015.418	511.342.900
6	007	Sekretariat Negara	3.035.136.669	7.867.837.362	488.075.654	4.125.000	15.182.785.648	7.739.337.498
7	010	Kementerian Dalam Negeri	6.415.690.382	4.260.025.153	22.372.149.618	67.215.928.241	11.137.702.626	3.635.543.096
8	011	Kementerian Luar Negeri	89.237.337.975	355.550.551.237	14.544.581	138.112.045	165.351.188	114.058.152
9	012	Kementerian Pertahanan	3.033.990.995	-	6.629.895.698	4.831.423.918	119.999.965.000	4.145.785.970
10	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	2.517.872.150	1.820.431.927	3.060.880.248	4.068.349.035	2.155.885.364	1.392.378.886
11	015	Kementerian Keuangan	1.439.660.756	2.253.756.843	970.359.615	416.590.875	8.115.195.871	2.149.709.968
12	018	Kementerian Pertanian	6.029.889.911	7.105.679.699	312.270.855	280.192.962	6.708.498.077	6.722.647.329
13	019	Kementerian Perindustrian	5.152.527.913	532.773.094	23.887.118.524	2.108.256.492	159.994.850	5.546.919.227
14	020	Kementerian ESDM	707.394.298	142.416.490	10.024.539.870	345.809.190.529	24.471.542.175	1.572.590.125
15	022	Kementerian Perhubungan	473.989.973	854.093.528	99.365.904.969	104.877.778.462	1.873.343.972	126.491.895
16	023	Kementerian Pendidikan Nasional	29.057.547.642	27.089.509.578	1.426.762.912	1.910.102.873	227.389.900.696	79.591.894.944
17	024	Kementerian Kesehatan	6.014.567.167	15.037.882.568	2.579.653.331	2.931.949.230	380.514.581.981	772.403.090.194
18	025	Kementerian Agama	2.772.512.926	9.723.647.912	9.837.150.157	11.228.028.167	10.104.236.574	10.915.757.698
19	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.015.981.617	18.361.918.789	60.459.150	314.561	17.559.844	9.673.275
20	027	Kementerian Sosial	1.176.994.982	304.696.345	48.365.486.680	63.275.181.111	119.950.889.291	72.418.176.820
21	029	Kementerian Kehutanan	21.898.190.391	7.967.015.361	83.426.415	34.268.976	31.840.821.036	18.374.300.494
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.477.383.772	3.623.498.421	135.000.000	-	1.148.074.146	367.815.807
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	895.824.764	462.337.441			23.732.861.771	34.970.061.983
24	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan						
25	035	Kemenko Bidang Perekonomian					809.363.470	403.403.516
26	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	850.727.715	199.701.548	11.415.000	7.159.000	306.900.481	207.397.138
27	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	2.740.697.216	432.696.848	5.829	6.236	590.087	46.560.341
28	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	203.531.790	509.018.639	50.000	-	349.089.104	15.177.075
29	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	1.273.164.777	122.437.700			2.791.517.085	3.348.760.932
30	044	Kementerian Negara KUKM	4.528.000	358.654.350			2.771.410.906	2.650.797.179
31	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	734.989.171	1.558.193.545			291.408.075	163.628.069
32	048	Kementerian Negara PAN	900	-				
33	050	Badan Intelijen Negara					-	816.709
34	051	Lembaga Sandi Negara			49.152	612.697.408	311.794.000	35.698.500
35	054	Badan Pusat Statistik	986.006.527	1.105.973.357			6.110.643.451	2.914.260.792

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

			KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
36	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	800	26.481.042	1.906.740.306	6.897.324.937	4.953.263.921	6.065.584.912
37	056	Badan Pertanahan Nasional	531.237.399	3.468.773.330	38.957.292	23.975.577	1.534.150.828	642.074.558
38	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	40.959.025	26.260.717	126.699.000	68.380.000		
39	059	Kementerian Kominfo	984.785.932	713.714.893	7.836.183.000	3.091.348.924	1.368.981.516	33.158.330
40	060	Kepolisian RI	2.891.198.021	2.377.562.072	86.935.000	68.445.000	329.225.730.631	202.291.266.798
41	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	19.783.547	177.209.851			994.856.264	1.136.125.160
42	064	Lembaga Ketahanan Nasional	2.642.800	-			6.201.000	-
43	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2.135.186.973	598.877.365	-	19.466.200	6.835.628	812.773.212
44	066	Badan Narkotika Nasional	158.705.840	-			8.056.788.253	1.930.197.422
45	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	120.382.875	376.766.375	6.253	6.253	69.980.000	69.238
46	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	6.972.725.190	3.043.143.972			367.839.400	1.418.702.072
47	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	24.890.442	-	1.769.500	5.373.427	5.782.675.437	2.916.856.432
48	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	54.790.671	48.817.942			258.441.291	3.390.424.469
49	076	Komisi Pemilihan Umum	734.812.937	1.271.412.045	113.839.657	47.409.183	2.248.807	18.637.727
50	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	3.319.350	13.181.600	93.108.876	1.684.684	197.889.230	98.754.014
51	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	-	55.105.894	686.634.055	2.163.951.684		
52	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	602.399.087	878.930.591			1.763.476.489	50.212.959
53	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	89.071.600	7.306.000	1.691.678.894	583.428.176	45.777.154	50.477.125
54	083	Bakosurtanal	5.214.500	62.790.620	2.287.222	2.522.257		
55	084	Badan Standardisasi Nasional			7.257.500	8.486.500		
56	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir			989.778.988	674.864.490		
57	086	Lembaga Administrasi Negara	-	84.015.791	16.482.806	25.919.389	12.390.200	15.389.000
58	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	341.292.393	36.488.036			254.719.000	4.871.181
59	088	Badan Kepegawaian Negara	22.068.116	100.247.627				
60	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	10.083.900	147.672.366	3.552.348.988	2.618.905.402	177.063.744	212.313.200
61	090	Kementerian Perdagangan	12.489.197.859	10.640.726.397			117.542.817	38.579.342
62	091	Kemen Perumahan Rakyat	86.383.250	32.344.425	96.518.700	194.453.600	2.777.737.911	60.778
63	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	222.424.000	697.639.750			5.106.380.031	3.453.648.544
64	093	Komisi Pemberantasan Korupsi					114.918.513	-
65	095	Dewan Perwakilan Daerah	6.721.342.129	1.191.037.367			7.027.164.917	1.621.474.226
66	100	Komisi Yudisial	40.747	-			365.408	558.839
67	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana					391.580.106.838	65.916.855.034
68	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	695.086.374	254.342.352			9.457.658	76.240.300
69	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	18.912.929	5.105.000	-	121.254.000	7.240.000	841.446.362
70	107	Badan SAR	238.092.195	170.000			279.739.094	-
71	110	Ombudsman Republik Indonesia	10.921.755	-			20.176.878	-
72	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3.235.900	-			1.716.751.838	-
73	999.03	BUN (Investasi)					1.912.974.670	-
74	999.05	BUN (DJPK)					393.906.986.740	-
75	999.07	BUN (Subsidi)					1.371.744.022.079	-
75	999.08	BUN (Belanja lainnya)	29.257.142.989	5.723.660.621			3.158.586.431.299	7.323.616.344.465
JUMLAH			**292.795.937.959**	**518.919.028.152**	**252.900.321.124**	**632.344.354.246**	**6.756.875.778.441**	**8.652.179.999.211**

PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PIUTANG BUKAN PAJAK			
			31 Desember 2011 Audited			31 Desember 2010 Audited
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
1	002	Dewan Perwakilan Rakyat	8.684.884.505	(756.250)	8.684.128.255	-
2	004	Badan Pemeriksa Keuangan	111.159.818	(555.798)	110.604.020	-
3	005	Mahkamah Agung	87.408.524	(139.937)	87.268.587	182.284.554
4	007	Sekretariat Negara	-		-	469.161.461
5	010	Kementerian Dalam Negeri	51.901.629.359	(9.736.163)	51.891.893.196	4.522.063.005
6	011	Kementerian Luar Negeri	50.876.235.365		50.876.235.365	28.274.369.493
7	012	Kementerian Pertahanan	71.678.009.885		71.678.009.885	326.833.705.155
8	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	18.343.360.446		18.343.360.446	1.324.369.150
9	015	Kementerian Keuangan	85.849.145.052	(44.869.379.520)	40.979.765.532	59.128.826.922
10	018	Kementerian Pertanian	1.553.735.162	(17.399.416)	1.536.335.746	2.438.724.455
11	019	Kementerian Perindustrian	4.284.175.541	(898.894.113)	3.385.281.428	3.430.521.116
12	020	Kementerian ESDM	8.504.284.454.650	(7.593.672.145.927)	910.612.308.723	564.507.846.259
13	022	Kementerian Perhubungan	187.044.736.967	(253.331.744)	186.791.405.223	222.641.909.452
14	023	Kementerian Pendidikan Nasional	240.867.185.876	(20.160.332.345)	220.706.853.531	324.800.000
15	024	Kementerian Kesehatan	8.487.337.460	(28.434.954)	8.458.902.506	1.580.617.575
16	025	Kementerian Agama	3.565.993.353		3.565.993.353	1.616.400.187
17	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.305.136	(26.525)	5.278.611	755.710
18	027	Kementerian Sosial	249.573.600		249.573.600	678.240.191
19	029	Kementerian Kehutanan	1.502.665.036.007	(1.289.590.938.725)	213.074.097.282	470.256.773.173
20	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.092.048.911	(25.436.754)	5.066.612.157	463.047.926
21	033	Kementerian Pekerjaan Umum	2.124.894.294	(5.852.624)	2.119.041.670	15.441.951.115
22	036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.045.249.040		2.045.249.040	-
23	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	282.400.000	(1.408.000)	280.992.000	3.910.950.685
24	041	Kementerian Negara BUMN	1.709.508.000		1.709.508.000	1.304.894.000
25	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	1.059.796.000	(5.298.980)	1.054.497.020	73.747.500
26	044	Kementerian Negara KUKM	53.644.833		53.644.833	-
27	054	Badan Pusat Statistik	167.452.574	(837.263)	166.615.311	28.747.675
28	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	-		-	8.351.640
29	056	Badan Pertanahan Nasional	1.675.448.928	(8.377.245)	1.667.071.683	42.349.532
30	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	3.600.000		3.600.000	-
31	059	Kementerian Kominfo	2.442.864.218.815	(847.712.671.962)	1.595.151.546.853	1.508.237.777.297
32	060	Kepolisian RI	12.958.853.609	(201.809.325)	12.757.044.284	2.486.761.230
33	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	6.272.000	(31.360)	6.240.640	370.000
34	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	-		-	448.583.873
35	066	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2.814.006.110		2.814.006.110	747.484.481
36	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8.499.808.374		8.499.808.374	6.080.431.968
37	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	9.913.911.993		9.913.911.993	12.269.295.826
38	076	Komisi Pemilihan Umum	17.378.350		17.378.350	71.221.620
39	077	Mahkamah Konstitusi RI	34.894.202	(174.471)	34.719.731	-
40	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-		-	1.715.120.293
41	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	377.542.612	(79.087.935)	298.454.677	242.829.992
42	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.436.574.741	(7.175.873)	1.429.398.868	406.679.500
43	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	34.998.226.149	(21.430.865.142)	13.567.361.007	18.121.996.244
44	082	LAPAN	-		-	167.624.107
45	083	Bakosurtanal	7.602.799.948	(7.549.436.874)	53.363.074	63.631.230
46	084	BSN	65.329.500		65.329.500	2.407.550
47	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	915.559.500	(69.015.253)	846.544.247	819.037.500
48	086	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	88.500.000	(442.500)	88.057.500	4.068.700.000
49	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	-		-	936.917.625
50	088	Badan Kepegawaian Negara	657.337.450		657.337.450	-
51	090	Kementerian Perdagangan	1.648.413.124	(27.508.894)	1.620.904.230	1.211.652.188
52	091	Kemen Perumahan Rakyat	1.681.770.379	(8.408.852)	1.673.361.527	-
53	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	319.912.000	(31.991.200)	287.920.800	-
54	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	441.671.318.958	(61.728.819.808)	379.942.499.150	454.853.776
55	095	Dewan Perwakilan Daerah	82.771.503	(413.858)	82.357.645	13.401.000
56	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indones	2.164.151.250	(10.820.757)	2.153.330.493	1.211.344.012
57	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	2.773.751.395	(13.868.757)	2.759.882.638	75.000.000
58	107	Badan SAR	15.429.322.590		15.429.322.590	563.492.600
59	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	48.923.261.920	(46.930.774.420)	1.992.487.500	173.026.011.105
60	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3.827.012.418	(19.135.062)	3.807.877.356	-
61	999.03	BUN (Investasi)	54.914.355.161	(51.548.429.777)	3.365.925.384	-
62	999.05	BUN (Transfer ke Daerah)		-		-
63	999.07	BUN (Subsidi)	878.939.094.800	(4.394.695.474)	874.544.399.326	960.768.242.276
64	999.08	BUN (Belanja lainnya)	7.438.160.200	-	7.438.160.200	167.584.222.817
65	999.99	BUN (Transaksi Khusus)	5.148.072.494.298	(262.082.042.787)	4.885.990.451.511	4.447.576.476.057
66	999.993	BUN (PT PPA)				2.121.512.481
JUMLAH			**19.885.890.412.635**	**(10.253.396.902.624)**	**9.632.493.510.011**	**9.020.978.486.579**

BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI			
			31 Desember 2011 Audited			31 Desember 2010 Audited
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
1	004	Badan Pemeriksa Keuangan	82.032.037	(2.895.554)	79.136.483	35.597.037
2	005	Mahkamah Agung	227.287.079	(1.136.435)	226.150.644	179.153.600
3	007	Sekretariat Negara	46.434.000	(232.170)	46.201.830	49.067.350
4	010	Kementerian Dalam Negeri	86.972.704	(434.864)	86.537.840	3.504.614.365
5	011	Kementerian Luar Negeri	31.295.078.475	(31.173.416.510)	121.661.965	413.350.307
6	012	Kementerian Pertahanan	6.737.920		6.737.920	4.914.880
7	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	168.980.500		168.980.500	-
8	015	Kementerian Keuangan	9.874.029.786	(9.478.786.128)	395.243.658	327.204.855
9	018	Kementerian Pertanian	595.311.033	(276.954.567)	318.356.466	2.087.042.347
10	019	Kementerian Perindustrian	66.349.821	(331.749)	66.018.072	7.200.000
11	020	Kementerian ESDM	94.562.000	(472.810)	94.089.190	15.000.000
12	022	Kementerian Perhubungan	46.170.400	(230.852)	45.939.548	6.308.896.481
13	023	Kementerian Pendidikan Nasional	97.661.170		97.661.170	102.171.170
14	024	Kementerian Kesehatan	270.131.114	(9.762.818)	260.368.296	24.127.237
15	027	Kementerian Sosial	13.499.996	(67.500)	13.432.496	20.516.000
16	029	Kementerian Kehutanan	9.580.872.359	(9.290.724.411)	290.147.948	9.756.839.765
17	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	17.466.664	(87.500)	17.379.164	710.000
18	033	Kementerian Pekerjaan Umum	261.430.000	(2.275.616)	259.154.384	435.065.030
19	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	6.840.000	(34.200)	6.805.800	6.840.000
20	035	Kemenko Bidang Perekonomian			-	11.000.000
21	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata			-	75.075.000
22	041	Kementerian Negara BUMN	4.083.338		4.083.338	-
23	044	Kementerian Negara KUKM	48.958.800		48.958.800	62.526.642
24	050	Badan Intelijen Negara			-	4.037.000
25	054	Badan Pusat Statistik	362.276.673	(80.644.009)	281.632.664	14.226.368.566
26	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	36.090.000	(180.450)	35.909.550	85.200.000
27	056	Badan Pertanahan Nasional	58.301.770	(3.261.509)	55.040.261	19.024.050
28	059	Kementerian Kominfo	194.576.406		194.576.406	93.712.843
29	060	Kepolisian RI	44.565.702		44.565.702	56.879.627
30	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan			-	2.500.000
31	067	Kementerian Negara PDT	17.250.000	(8.250.000)	9.000.000	9.000.000
32	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	52.380.607	(261.903)	52.118.704	45.167.499
33	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	4.217.591.028	(378.450.243)	3.839.140.785	11.200.000
34	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	21.340.008	(2.134.001)	19.206.007	16.749.000
35	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	2.400.000	(12.000)	2.388.000	42.956.250
36	083	Bakosurtanal	7.200.000	(36.000)	7.164.000	7.200.000
37	084	Badan Standardisasi Nasional			-	15.840.000
38	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	6.000.000	(30.000)	5.970.000	6.000.000
	086	Lembaga Administrasi Negara	1.553.078.099	(7.765.390)	1.545.312.709	
39	087	Arsip Nasional Republik Indonesia			-	73.925.838
41	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	11.835.000	(59.175)	11.775.825	250.000
42	090	Kementerian Perdagangan	399.900.208	(354.896.753)	45.003.455	199.287.716
43	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	9.469.148	(47.346)	9.421.802	-
44	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	170.498.732	(852.494)	169.646.238	143.604.428
45	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	173.000.207	(169.020.207)	3.980.000	-
46	999.08	BUN (Belanja lainnya)	242.297.208	(1.211.486)	241.085.722	105.596.080
TOTAL			**60.470.939.992**	**(51.244.956.650)**	**9.225.983.342**	**38.591.410.963**

UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dalam Rupiah)

No.	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*
1	Badan Pemeriksa Keuangan	1.866.471.405	2.731.358.438
2	Mahkamah Agung	1.192.330.134	1.194.187.308
3	Kejaksaan Agung		79.980.000.000
4	Sekretariat Negara	68.052.473	51.306.792
5	Kementerian Dalam Negeri	51.141.529.275	-
6	Kementerian Luar Negeri	5.208.141.664	
7	Kementerian Pertahanan		317.408.269.448
8	Kementerian Hukum dan HAM RI	1.005.479.251	-
9	Kementerian Keuangan	26.926.848.502	30.201.365.733
10	Kementerian Pertanian	19.694.386	29.933.350
11	Kementerian Perhubungan	511.735.738	3.372.081.629
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	17.218.005.484	
13	Kementerian Kesehatan	77.435.394.571	83.074.641.336
14	Kementerian Agama	1.774.516.357	3.666.667.259
15	Kementerian Sosial	5.670.248.230	
16	Kementerian Kehutanan	977.416.167	152.697.428
17	Kementerian KDP	53.730.494	126.981.635
18	Kementerian Pekerjaan Umum	60.375.000	39.618.357
19	Kementerian Budpar	6.069.122.250	2.589.148.125
20	Kemen Lingkungan Hidup		-
21	Badan Pusat Statistik	476.950.889	1.095.359.112
22	Badan Pertanahan Nasional	61.021.064	1.250.000
23	Kementerian Komunikasi dan Informatika	947.992.197.260	160.984.302
24	Kepolisian RI	163.391.100	
25	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	7.941.663.771	36.666.667
26	Badan Narkotika Nasional	451.200.000	636.296.233
27	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	6.537.000	-
28	Komisi Pemilihan Umum	15.000.000	-
29	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	11.657.910	5.520.590
30	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	77.308.639.323	-
31	Badan Standardisasi Nasional		-
32	Lembaga Administrasi Negara		197.713
33	Badan Kepegawaian Negara	137.775.000	12.085.426.264
34	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	606.542.517	-
35	Kementerian Perdagangan	34.152.707.602	37.875.466.975
36	Kementerian Perumahan Rakyat	92.400.000	-
37	Komisi Pemberantasan Korupsi	511.512.225	33.181.500
38	BRR NAD - Nias		26.695.788.910
39	Dewan Perwakilan Daerah	377.546.250	-
40	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.225.666.667	-
41	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	201.080.000	-
42	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8.034.861.313	7.520.502.350
43	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.197.873.875	
44	BUN (Belanja lainnya)		3.357.734.901
TOTAL		**1.279.165.315.147**	**614.122.632.355**

KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN BERUPA HAK TAGIH PEMERINTAH KEPADA BDL

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Jumlah Hak Tagih			Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000						Total Pengembalian s.d. Desember 2011	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2011
			Dana Talangan*)	Giro Debet	Total (Saldo Awal)	Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Tahun 2007	Pengembalian Tahun 2008	Pengembalian Tahun 2009*	Pengembalian Tahun 2010	Pengembalian Tahun 2011			
1	2		3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11			12=5-(6+7+8+9+10+11)
	BDL eks Dana Talangan													
1	PT. Bank Anrico	07 Juni 2007	200.277.000.000,00	9.803.728.375,73	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	9.502.388.722,00	357.853.052,78	1.609.203.328,00	6.540.713.343,00	12.619.581.693,00	40.162.697.478,85	140.797.811.123,91	169.918.030.896,88
2	PT. Bank Guna Internasional	08 Maret 2007	251.055.008.000,00	0,00	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	17.316.896.847,89	2.660.283.085,82	2.048.426.605,69	2.996.154.673,00	3.859.090.506,92	212.435.859.719,32	106.107.201.031,41	38.619.148.280,68
3	PT. Bank Harapan Sentosa	29 Maret 2007	2.296.138.048.061,00	1.570.044.264.791,07	3.866.182.312.852,07	585.728.056.498,00	41.314.533.283,56	5.204.191.984,61	5.106.988.512,65	8.779.090.328,44	3.495.995.672,14	649.628.856.280,40	136.297.409.195,04	3.216.553.456.571,67
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	08 Maret 2007	43.398.000.000,00	158.404.166.935,30	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	6.315.060.527,00	385.357.786,00	190.370.760,00	0,00	0,00	31.988.977.910,19	172.736.782.621,00	169.813.189.025,11
5	PT. Bank Kesagraha Semesta	08 Maret 2007	46.872.202.071,00	154.940.412.220,48	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	30.746.092.410,83	7.878.883.538,00	2.046.975.489,00	3.296.914.583,00	974.999.999,00	91.816.068.090,83	157.450.001.984,00	109.996.546.200,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	08 Maret 2007	53.498.000.000,00	283.265.209.866,98	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	4.018.000.000,00	3.193.944.737,00	0,00	0,00	0,00	38.397.944.737,00	6.760.484.884,70	298.365.265.129,98
7	PT. Bank Pasific	08 Maret 2007	290.023.076.268,00	1.843.343.358.571,63	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	29.347.497.898,00	111.657.561.420,00	14.675.177.662,50	19.726.988.659,30	1.960.001.520,16	509.390.303.427,76	1.638.279.007.000,00	1.623.976.131.411,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	08 Maret 2007	1.483.617.626.147,00	203.731.889.225,53	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	550.081.483,46	66.997.186.362,78	29.687.774.331,00	37.982.436.510,76	28.020.046.077,00	1.020.624.742.158,65	1.015.640.110.944,00	666.724.773.213,88
9	PT. South East Asia Bank	08 Maret 2007	166.082.000.000,00	733.317.023.305,99	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	28.197.078.896,79	134.453.227,00	3.489.512.824,00	230.736.340,00	27.808.545.454,00	159.163.046.122,68	181.953.841.474,06	740.235.977.183,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	17 Januari 2008	6.970.134.589,81	103.135.862.541,06	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	0,00	27.300.000.000,00	0,00	0,00	329.500.000,00	34.599.634.600,00	114.546.599.155,04	75.506.362.530,87
11	PT. Astria Raya Bank	31 Maret 2008	121.949.000.000,00	456.969.260.698,77	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	0,00	51.742.862.725,42	0,00	0,00	1.299.224.575,00	184.991.690.900,42	56.733.811.676,21	393.926.569.798,35
12	PT. Bank Pinaesaan	05 Maret 2008	269.966.000.000,00	411.118.490.919,58	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	745.723.907,00	24.308.490.543,00	3.590.996.621,00	4.534.212.586,00	1.303.214.409,00	52.939.318.166,11	92.182.282.117,24	628.145.172.753,47
13	PT. Bank Jakarta	Belum BAST	210.994.000.000,00	0,00	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	60.000.000.000,00	21.323.394.608,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	204.283.324.669,67	81.323.394.608**	6.710.675.330,33
14	PT. Bank Industri	Sudah BAST	279.124.000.000,00	232.346.229.326,68	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	0,00	0,00	78.318.742.617,00	88.420.788,00	47.841.145,00	357.579.004.550,00	238.376.301.422,00	153.891.224.776,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	TL Bubar Sebelum BAST	7.971.008.175,00	583.781.467,67	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	6.054.789.642,67
Total BDL Eks Dana Talangan			5.727.935.103.311,81	6.161.003.678.246,47	11.888.938.781.558,30	2.730.645.774.151,38	228.053.353.976,53	323.144.463.070,41	140.764.168.750,84	84.175.667.811,50	83.718.041.051,22	3.590.501.468.811,88	4.057.861.644.628,61	8.298.437.312.746,40

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000						Saldo Hak Tagih 31 Desember 2011
		Total (Saldo Awal)	Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Tahun 2007	Pengembalian Tahun 2008	Pengembalian Tahun 2009	Pengembalian Tahun 2010	Pengembalian Tahun 2011	
	BDL eks Dana Penjaminan								
1	PT Bank Asiatic	886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	18.500.000.000,00	5.000.000.000,00	31.500.000.000,00	0,00	0,00	826.579.224.443,83
2	PT Bank Dagang Bali	1.331.516.911.477,24	0,00	0,00	0,00	269.906.630.005,00	123.389.652.865,00	0,00	938.220.628.607,24
3	PT Bank Global Internasional	804.234.270.395,51	0,00	0,00	0,00	62.260.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00	641.974.270.395,51
4	PT Bank Ratu	71.817.985.352,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	41.817.985.352,00
5	PT Bank Prasidha Utama	227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	16.497.034.464,52	0,00	0,00	206.637.524.679,48
Total BDL Eks Dana Penjaminan		3.321.282.950.812,58	9.000.000.000,00	28.500.000.000,00	15.000.000.000,00	380.163.664.469,52	133.389.652.865,00	100.000.000.000,00	2.655.229.633.478,06

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dalam Rupiah)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 *(Audited)*
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2.004.238.360	3.101.970.083
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	14.613.978.819	10.382.651.284
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	14.149.867.432	16.727.245.089
4	005	Mahkamah Agung	12.794.906.024	12.917.870.065
5	006	Kejaksaan Agung	278.962.662.823	81.193.453.787
6	007	Sekretariat Negara	194.626.516.842	181.989.406.735
7	007	BLU Sekretariat Negara	74.100.536.302	73.746.641.748
8	010	Kementerian Dalam Negeri	31.310.707.268	4.455.932.428
9	011	Kementerian Luar Negeri	73.281.389.166	17.106.286.913
10	012	Kementerian Pertahanan	46.209.249.007.353	26.108.623.637.798
11	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	274.318.672.069	140.654.554.121
12	015	Kementerian Keuangan	282.731.013.941	251.167.008.102
13	015	BLU Kementerian Keuangan	1.107.526.185	1.553.923.824
14	018	Kementerian Pertanian	148.145.904.916	48.571.333.053
15	018	BLU Kementerian Pertanian	10.992.397.374	-
16	019	Kementerian Perindustrian	6.169.596.666	5.221.091.691
17	020	Kementerian ESDM	397.942.386.202	268.850.939.683
18	022	Kementerian Perhubungan	749.249.628.830	1.050.708.835.328
19	022	BLU Kementerian Perhubungan	1.170.208.683	768.924.273
20	023	Kementerian Pendidikan Nasional	143.290.602.535	178.683.176.335
21	023	BLU Kementerian Pendidikan Nasional	147.733.438.587	73.995.442.441
22	024	Kementerian Kesehatan	490.573.034.841	366.468.047.766
23	024	BLU Kementerian Kesehatan	339.699.336.087	297.390.991.519
24	025	Kementerian Agama	61.710.862.838	29.644.935.134
25	025	BLU Kementerian Agama	3.632.598.518	7.637.474.822
26	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	167.195.865.597	78.926.962.435
27	026	BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi	603.425.378	225.618.224
28	027	Kementerian Sosial	265.005.062.599	262.998.966.476
29	029	Kementerian Kehutanan	27.257.932.644	25.588.067.792
30	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	745.794.093.746	81.005.152.652
31	033	Kementerian Pekerjaan Umum	401.248.691.555	775.314.675.138
32	033	BLU Kementerian Pekerjaan Umum	-	6.244.300
33	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	148.727.855	199.172.256
34	035	Kemenko Bidang Perekonomian	897.875.501	915.223.607
35	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	624.294.167	3.196.417
36	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	150.587.198.880	18.152.944.711
37	041	Kementerian Negara BUMN	1.352.572.937	621.058.265
38	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	8.288.334.452	4.705.709.542
39	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	17.284.283.255	5.900.352.651
40	044	Kementerian Negara KUKM	280.780.075	24.926.375
41	044	BLU Kementerian Negara KUKM	437.460.065	300.839.638
42	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	3.036.142.921	4.109.066.323
43	048	Kementerian Negara PAN	664.284.347	734.272.866
44	050	Badan Intelijen Negara	3.273.027.297	2.976.853.027
45	051	Lembaga Sandi Negara	9.671.455.164	1.637.810.816
46	052	Dewan Ketahanan Nasional	2.414.500	4.478.500
47	054	Badan Pusat Statistik	18.293.548.809	20.780.532.941
48	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	1.535.774.403	1.460.245.803
49	056	Badan Pertanahan Nasional	55.673.263.969	50.530.757.429
50	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1.411.256.784	1.087.908.645
51	059	Kementerian Kominfo	36.273.736.429	24.587.577.953
52	059	BLU Kementerian Kominfo	11.179.209.616	1.973.840.750
53	060	Kepolisian RI	2.458.580.229.680	1.322.552.761.774
54	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	63.592.759.532	48.524.016.300
55	064	Lembaga Ketahanan Nasional	358.844.130	1.105.022.789
56	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	6.150.770.586	3.496.149.692
57	066	Badan Narkotika Nasional	18.551.276.514	10.187.401.398

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dalam Rupiah)

58	067	Kementerian Negara PDT	12.310.609.780	1.247.413.144
59	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	666.545.768.411	531.437.671.466
60	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	63.402.986	93.236.760
61	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	23.246.417.366	35.350.514.442
62	076	Komisi Pemilihan Umum	485.017.642.483	425.220.524.572
63	077	Mahkamah Konstitusi RI	1.475.252.202	1.704.525.837
64	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	595.620.672	475.657.120
65	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	5.746.377.474	3.514.057.270
66	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	55.993.169.179	42.368.394.773
67	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	11.082.574.374	18.446.804.488
68	081	BLU Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	10.759.155	-
69	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	23.197.781.964	13.315.172.819
70	082	BLU Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	94.270.840	83.087.650
71	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	131.034.968.365	78.726.946.004
72	084	Badan Standardisasi Nasional	150.922.750	121.289.820
73	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	789.995.836	460.332.070
74	086	Lembaga Administrasi Negara	1.566.980.318	1.181.661.329
75	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	864.181.177	251.889.901
76	088	Badan Kepegawaian Negara	10.229.132.916	34.970.696.413
77	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	5.864.852.211	4.406.684.636
78	090	Kementerian Perdagangan	8.388.960.571	5.205.950.840
79	091	Kemen Perumahan Rakyat	151.612.155.419	100.839.988.733
80	091	BLU Kemen Perumahan Rakyat	34.155.000	-
81	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	72.788.130.273	7.219.753.815
82	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	12.190.358.475	16.911.868.460
83	094	BRR NAD - Nias	78.951.123.713	78.951.123.713
84	095	Dewan Perwakilan Daerah	1.572.238.972	1.550.517.677
85	100	Komisi Yudisial RI	945.879.061	1.088.965.680
86	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	355.460.776.110	110.093.374.723
87	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indones	70.078.320.865	24.387.745.217
88	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	3.431.763	31.865.500
89	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.996.296.501	1.138.940.461
90	107	Badan SAR	8.599.198.546	5.674.112.827
91	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1.140.552.598	767.058.291
92	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	9.408.500	-
93	110	Ombudsman Republik Indonesia	69.182.560	-
94	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	452.272.208	-
95	999.07	BUN (Subsidi)	4.841.100.000	175.307.190.305
96	999.08	BUN (Belanja lainnya)	2.571.016.619.518	2.661.316.082.742
JUMLAH			**59.214.846.453.160**	**36.366.060.681.005**

IHKTISAR PERUSAHAAN NEGARA DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN PER 31 DESEMBER 2011

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPBYDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
					1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
1	Perkebunan	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2011		115.770	735.563		851.333	392.937	304.306	697.243		120.000	-	-	48.442	(14.352)	154.090	100%	154.090
2		PT Perkebunan Nusantara II	Audited 2011		679.496	1.749.461	55.955	2.484.912	938.882	1.286.389	2.225.271		327.606	-	-		(67.965)	259.641	100%	259.641
3		PT Perkebunan Nusantara III	Audited 2011		2.421.826	6.664.478		9.086.304	2.141.028	2.437.003	4.578.031	6.250	315.000			(22.895)	4.209.918	4.502.024	100%	4.502.024
4		PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2011		1.874.276	5.833.453	453.616	8.161.344	1.469.735	2.602.271	4.072.005	173.809	975.000	235	-	-	2.940.295	3.915.530	100%	3.915.530
5		PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2011		944.775	2.831.099	186.602	3.962.476	1.071.966	1.189.720	2.261.686		820.000	-	-		880.789	1.700.789	100%	1.700.789
6		PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2011		512.375	1.196.229	3.561	1.712.165	507.014	341.464	848.478	8.714	200.000			473.203	181.770	854.974	100%	854.974
7		PT Perkebunan Nusantara VII	Audited 2011		1.827.646	4.209.899	-	6.037.546	1.556.040	2.947.455	4.503.495		365.000	10.203	-	8.889	1.149.959	1.534.051	100%	1.534.051
8		PT Perkebunan Nusantara VIII	Audited 2011		742.020	1.791.506		2.533.526	663.134	732.050	1.395.184		270.000	-	-	(5.093)	873.436	1.138.342	100%	1.138.342
9		PT Perkebunan Nusantara IX	Audited 2011		1.113.326	1.099.992	24.139	2.237.456	1.351.486	87.441	1.438.926	(10.764)	165.000				644.294	809.294	100%	809.294
10		PT Perkebunan Nusantara X	Audited 2011		1.228.705	670.694	376.526	2.275.925	918.034	262.797	1.180.831	3.071	250.000	-		10.062	831.962	1.092.024	100%	1.092.024
11		PT Perkebunan Nusantara XI	Audited 2011		698.784	785.622	175.924	1.660.330	826.105	247.213	1.073.318		165.000	-			422.013	587.013	100%	587.013
12		PT Perkebunan Nusantara XII	Audited 2011		289.200	1.073.860	1.094	1.364.154	279.792	357.664	637.456		200.000	-	-	391.496	135.203	726.698	100%	726.698
13		PT Perkebunan Nusantara XIII	Audited 2011		909.624	2.671.087	45.863	3.626.574	1.175.616	1.097.181	2.272.798	62.825	460.000				830.952	1.290.952	100%	1.290.952
14		PT Perkebunan Nusantara XIV	Audited 2011		248.315	448.092	121.629	818.036	824.343	438.632	1.262.975		235.000	-	-	30.591	(710.529)	(444.938)	100%	(444.938)
15		PT Rajawali Nusantara Indonesia	Unaudited 2011		3.236.002	1.441.204	1.348.670	6.025.876	2.507.294	2.563.445	5.070.739	256.424	352.425	-	-		346.288	698.713	100%	698.713
16	Kehutanan	Perum Perhutani	Unaudited 2011		1.701.035	724.601	104.639	2.530.276	408.328	140.596	548.924	17.343	700.000	-	-	925.118	338.891	1.964.009	100%	1.964.009
17		PT Inhutani I	Audited 2011		83.478	159.181		242.658	80.398	104.223	184.621		450.333	16.001			(408.297)	58.037	100%	58.037
18		PT Inhutani II	Audited 2011		51.193	164.038	-	215.231	52.894	43.594	96.488		183.083	6.785	-	-	(71.125)	118.743	100%	118.743
19		PT Inhutani III	Unaudited 2011		39.329	8.270	128.528	176.127	4.240	10.098	14.338		324.120	-	-	21.694	(184.024)	161.790	100%	161.790
20		PT Inhutani IV	Audited 2011		58.555	6.379	6.167	71.101	8.179	4.181	12.360		92.253	2.301	-		(35.813)	58.741	100%	58.741
21		PT Inhutani V	Unaudited 2011		5.604	177.317	2.246	185.167	159.134	5.655	164.789		132.659	44.861	-	-	(157.142)	20.378	100%	20.378
22	Perikanan	PT Perikanan Nusantara	Audited 2011		25.756	166.081	125.459	317.296	20.173	171.442	191.615		110.895	6.074	-	4.262	4.449	125.680	100%	125.680
23		Perum PPS	Audited 2011		52.820	72.546		125.366	14.467	28.106	42.573	-	24.498	4.400	47.037		6.859	82.794	100%	82.794
24	Penunjang Pertanian	Perum Bulog	Audited 2011		13.522.383	2.876.719	2.272.927	18.672.029	12.914.637	830.791	13.745.428		6.847.136		670.114		(2.590.648)	4.926.601	100%	4.926.601
25		PT Sang Hyang Seri	Audited 2011		1.505.846	220.777		1.726.622	1.320.100	119.290	1.439.391		134.000	-			153.232	287.232	100%	287.232
26		PT Pertani	Audited 2011		1.126.666	89.194	-	1.215.860	943.237	123.703	1.066.940	197	51.315	35.952			61.456	148.724	100%	148.724
27	Pupuk	PT Pusri	Audited 2011		24.187.530	15.118.522		39.306.052	9.572.074	9.221.475	18.793.549	164.445	11.948.054	-	-		8.400.006	20.348.059	100%	20.348.059
28	Jasa Pengairan	Perum Jasa Tirta I	Audited 2011		177.197	63.931	5.482	246.610	59.022	3.888	62.910		30.570	-	1.131	108.562	43.437	183.701	100%	183.701
29		Perum Jasa Tirta II	Audited 2011		239.461	235.083	23.463	498.007	70.124	26.173	96.297		164.548	-	-	218.828	18.335	401.711	100%	401.711
30	Pertambangan	PT Antam Tbk	Audited 2011		9.108.020	6.093.215		15.201.235	855.830	3.573.362	4.429.192	9	953.846	2.526		128.626	9.687.036	10.772.034	65%	7.001.822
31		PT Timah Tbk	Audited 2011		4.631.418	1.938.389		6.569.807	1.421.976	550.036	1.972.012	335	251.651	120.792		9.285	4.215.732	4.597.460	65%	2.988.349
32		PT Bukit Asam Tbk	Audited 2011		8.859.260	2.647.844		11.507.104	1.912.423	1.429.679	3.342.102	76.743	1.152.066	30.485	-	(783)	6.906.491	8.088.259	65,02%	5.258.986
33		PT Sarana Karya	Audited 2011		49.709	2.388	-	52.097	46.680	2.566	49.246		5.000	7.432	-		(9.580)	2.852	100%	2.852
34	Energi	PT Pertamina	Audited 2011		156.819.485	155.179.619		311.999.104	113.276.035	80.383.426	193.659.461	657.136	82.569.779		520.918	(21.715.263)	56.307.073	117.682.507	100%	117.682.507
35		PT PGN Tbk	Audited 2011		13.656.295	17.320.150		30.976.445	2.483.317	11.308.417	13.791.734	1.344.957	2.424.151	1.709.791		(551.385)	12.257.199	15.839.756	56,97%	9.023.909
36		PT Energy Management Indonesia	Audited 2011		14.180	40.905	1.739	56.825	26.165	1.465	27.630	-	15.555		-	36.465	(22.826)	29.194	100%	29.194
37		PT Batan Tek	Audited 2011		18.733	7.385		26.118	6.366	1.421	7.788		27.200				(8.870)	18.330	100%	18.330
38	Industri semen	PT Semen Gresik Tbk	Audited 2011		7.646.145	12.015.458	-	19.661.603	2.889.137	2.157.369	5.046.506	150.466	593.152	1.458.258	-	5.821	12.407.400	14.464.631	51,01%	7.377.769
39		PT Semen Baturaja	Audited 2011		612.064	370.991		983.056	148.353	120.683	267.036		60.414	1	-		655.604	716.019	100,00%	716.019
40		PT Semen Kupang	Unaudited 2011		20.854	365	607.329	628.548	174.817	521.417	696.234		133.713	-	-	-	(201.399)	(67.686)	61,48%	(41.613)
41	Industri Pertahanan	PT Dirgantara Indonesia	Unaudited 2011		2.529.951	389.521	68.506	2.987.978	2.454.803	794.498	3.249.301	-	4.204.718	749.745	-	24.757	(5.240.543)	(261.322)	92,76%	(242.403)
42		PT PAL Indonesia	Audited 2011		2.320.763	838.369		3.159.133	3.033.873	721.134	3.755.007	14	1.137.331	648.330	-	14.822	(2.396.371)	(595.888)	100%	(595.888)
43		PT Pindad	Audited 2011		1.012.938	399.758		1.412.697	818.730	295.830	1.114.560	2	70.000	297.542	-	(92.091)	22.684	298.134	100%	298.134
44		PT Dahana	Audited 2011		415.046	404.615	-	819.661	310.531	189.355	499.886		76.090	6.398	-	13.735	223.553	319.776	100%	319.776
45	Ind. Baja, Manufaktur, &	PT Krakatau Steel Tbk	Audited 2011		13.213.392	8.298.170		21.511.562	9.204.702	1.951.867	11.156.569	174.005	7.887.500	1.015.514		(14.200)	1.292.174	10.180.988	80%	8.144.790
46	Rekayasa Rnc Bangun	PT INKA	LK Audited 2010		607.342	64.094	27.073	698.509	386.600	16.934	403.534	-	251.843	8.083	-	-	35.047	294.973	100%	294.973
47		PT Barata Indonesia	Audited 2011		595.858	55.385	15.642	666.885	564.983	17.144	582.127		128.203	15.000	-	98.482	(156.927)	84.758	100%	84.758
48		PT Boma Bisma Indra	Audited 2011		144.165	17.820	42.192	204.176	233.794	88.830	322.624	(16)	295.372	13.245	-	10.429	(437.478)	(118.432)	100%	(118.432)
49	Industri Dok dan Perkapala	PT Dok dan Kodja Bahari	Audited 2011		720.692	451.553		1.172.245	3.018.339	16.685	3.035.024		76.600	85	-		(1.939.463)	(1.862.779)	100%	(1.862.779)
50		PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Audited 2011		419.708	139.345	1.518	560.571	414.561	45.669	460.230	3.724	40.535	402		3.466	52.214	96.617	100%	96.617
51		PT Industri Kapal Indonesia	LK Audited 2010		49.758	99.338	151.909	301.005	58.134	248.523	306.657	-	3.521	56.694	-	-	(65.867)	(5.652)	100%	(5.652)
52	Aneka Industri	PT Industri Sandang Nusantara	Audited 2011		14.250	658.902	1.213	674.365	353.436	62.130	415.565	-	197.500	1.369	-	463.842	(403.911)	258.800	100%	258.800
53		PT Garam	Audited 2011		170.088	204.811		374.899	149.102	53.222	202.324		200.000	-	-		(27.425)	172.575	100%	172.575
54		PT Primissima	Audited 2011		47.740	8.112		55.851	49.395	8.573	57.968		13.000	121	-	1.756	(16.994)	(2.117)	53%	(1.122)
55		PT Iglas	Audited 2011		88.384	206.036	-	294.420	367.646	152.365	520.011	-	47.007	-	-	94.583	(367.181)	(225.591)	100%	(225.591)
56		PT Industri Soda Indonesia (dalam L	Audited 2005		12.956	143.335	4.803	161.094	100.687	130.795	231.482	-	15.000	-	-	-	(85.388)	(70.388)	100%	(70.388)
57	Ind. Kertas, Percetakan	Perum Peruri	LK Audited 2010		1.277.892	1.137.882	161.534	2.577.308	642.427	776.966	1.419.393	-	363.573	-	-	-	794.341	1.157.914	100%	1.157.914
58	dan Penerbitan	PT Balai Pustaka	Unaudited 2011		112.674	8.156	82	120.912	226.578	487	227.065	-	10.000	-		(121.598)	5.446	(106.152)	100%	(106.152)
59		Perum PNRI	Unaudited 2011		88.058	59.748	6.487	154.293	54.420	6.537	60.957		43.243	-	1.003	43.969	5.121	93.336	100%	93.336
60		PT Pradnya Paramita	Unaudited 2011		1.276	1.739	9	3.025	1.968	749	2.717	-	1.871	-	-	-	(1.563)	308	100%	308
61		PT Kertas Leces	Audited 2011		66.228	879.888	62.814	1.008.931	600.143	956.756	1.556.899		415.073	1.976		496.770	(1.461.788)	(547.968)	100%	(547.968)
62		PT Kertas Kraft Aceh	Unaudited 2011		78.896	195.581	165.050	439.527	860.772	-	860.772	-	798.994	-	-	45.000	(1.265.238)	(421.245)	97,00%	(408.607)

DAFTAR 14.A 1

IHKTISAR PERUSAHAAN NEGARA DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN PER 31 DESEMBER 2011

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPBYDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
					1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
63	Industri Farmasi	PT Indofarma Tbk	Audited 2011		706.558	408.343		1.114.902	459.404	46.304	505.708	1	309.927	75.100		203.344	20.821	609.192	80,66%	491.375
64		PT Kimia Farma Tbk	Audited 2011		1.263.030	477.012	54.261	1.794.242	459.694	82.042	541.737	3	555.400	43.580			653.523	1.252.503	90,03%	1.127.628
65		PT Bio Farma	Audited 2011		814.712	912.689	6.103	1.733.504	220.879	34.525	255.403		450.000	-	-	-	1.028.100	1.478.100	100%	1.478.100
66	Telekomunikasi dan Media	PT Telkom Tbk	Audited 2011		21.258.000	81.796.000		103.054.000	22.189.000	19.884.000	42.073.000	13.471.000	5.040.000	1.073.000		(5.657.000)	47.054.000	47.510.000	53,24%	25.294.324
67		PT INTI	Audited 2011		922.334	78.534	138	1.001.006	538.305	39.918	578.223	3.114	350.000	-	-	69.670	-	419.670	100%	419.670
68		PT LEN Industri	Audited 2011		800.962	129.904	-	930.866	660.251	65.507	725.759	2.568	45.601	0	-	81.007	75.931	202.539	100%	202.539
69		Perum LKBN Antara	Audited 2011		46.620	49.599		96.220	38.472	8.017	46.490		9.116	25.928			14.686	49.730	100%	49.730
70		Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2011		1.472	28.979		30.451	9.317	-	9.317		41.879		14.904		(36.648)	21.135	100%	21.135
71	Listrik	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	Audited 2011		58.252.342	358.467.765	-	416.720.107	62.918.962	208.250.734	271.169.696	96.391	46.197.380		29.049.436	1.202.016,00	69.005.188	145.454.020	100%	145.454.020
72	Pelabuhan	PT Pelabuhan Indonesia I	Audited 2011		600.297	2.846.278		3.446.575	595.983	860.446	1.456.429		455.059	48.168	435.790		1.051.129	1.990.146	100%	1.990.146
73		PT Pelabuhan Indonesia II	Unaudited 2011		2.216.861	6.625.864	131.826	8.974.550	1.099.781	780.737	1.880.518	45.530	1.009.958	0	0	34.479	6.004.065	7.048.502	100%	7.048.502
74		PT Pelabuhan Indonesia III	Unaudited 2011		1.591.336	3.874.685	42.185	5.508.406	798.849	548.562	1.347.411	327.534	809.222	-	209.731	2.103.523	710.985	3.833.461	100%	3.833.461
75		PT Pelabuhan Indonesia IV	Audited 2011		521.254	1.626.963		2.148.217	302.882	181.229	484.112		350.625	252.524	68.176	(3.801)	996.581	1.664.105	100%	1.664.105
76	Bandar Udara	PT ANGKASA PURA I	Audited 2011		3.480.616	6.655.513		10.136.129	704.257	521.640	1.225.898		1.806.000		2.964.125	3.601.880	544.227	8.910.231	100%	8.910.231
77		PT ANGKASA PURA II	Audited 2011		2.995.486	5.022.792	1.956.946	9.975.224	551.756	320.313	872.069	1	1.900.000	174.578	2.221.583	3.699.529	1.107.464	9.103.154	100%	9.103.154
78	Angkutan Darat, Udara	PT Kereta Api Indonesia	Audited 2011		1.824.495	4.241.914		6.066.410	1.237.591	880.623	2.118.215	43.767	2.470.000		826.546	968	606.914	3.904.428	100%	3.904.428
79	dan Laut	PERUM PPD	Unaudited 2011		21.205	85.981	1.563	88.749	81.514	29.699	111.213		231.769	153.873	67.771	12.596	(488.473)	(22.464)	100%	(22.464)
80		PERUM DAMRI	Audited 2011		95.890	436.760	0	532.650	81.241	182.274	263.514	0	19.700	111.297	161.462	539	(23.863)	269.135	100%	269.135
81		PT MERPATI NUSANTARA AIRLINE	Unaudited 2011		858.927	1.787.523	791.823	3.438.273	2.835.266	2.749.921	5.585.187	-	1.403.556	561.000	-	2	(4.111.472)	(2.146.914)	95,79%	(2.056.568)
82		PT GARUDA INDONESIA	Audited 2011		6.784.092	11.225.875		18.009.967	5.866.978	4.595.856	10.462.834	14.914	11.320.498	995.422	-	1.190.522	(5.974.223)	7.532.220	69,14%	5.207.777
83		PT PELNI	Audited 2011		1.401.103	4.163.559	215.270	5.779.933	686.241	406.555	1.092.796	373	359.000	3.194.908	2.997.874	55.532	(1.920.550)	4.686.764	100%	4.686.764
84		PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU PE	Audited 2011		777.064	1.458.629	43.860	2.279.554	145.404	39.428	184.832		405.753	7.742	1.304.919		376.308	2.094.722	100%	2.094.722
85		PT Djakarta Lloyd	Unaudited 2011		94.187	711.833	223.459	1.029.479	1.011.934	86.374	1.098.308		180.640	-	667.189	363.513	(1.280.171)	(68.829)	100,00%	(68.829)
87	Konstruksi	PT Amarta Karya	Audited 2011		160.907	16.620		177.527	111.455	50.469	161.924		11.250	-	-	5.363	(1.010)	15.603	100%	15.603
88		PT Adhi Karya Tbk	Audited 2011		5.377.660	717.140	18.154	6.112.954	4.875.488	247.098	5.122.586	6.791	180.132	19.144		(6.484)	790.784	983.576	52,28%	514.214
89		PT Istaka Karya	Unaudited 2010		595.646	118.351	50.350	764.346	463.261	293.838	757.099		50.000			(59.871)	17.119	7.248	100%	7.248
90		PT Pembangunan Perumahan Tbk	Audited 2011		6.636.861	296.492		6.933.354	5.095.837	411.977	5.507.914	0	484.244	462.166			479.030	1.425.440	51%	726.974
91		PT Nindya Karya	Unaudited 2011		1.188.032	59.208	50.380	1.297.620	1.086.884	100.000	1.186.884		59.500	-	-	-	51.237	110.737	100%	110.737
92		PT Hutama Karya	Audited 2011		3.788.740	281.564		4.071.303	2.981.574	471.010	3.452.584	159	200.000				418.560	618.560	100%	618.560
93		PT Wijaya Karya Tbk	Audited 2011		5.838.852	2.067.122	417.006	8.322.980	5.127.209	976.395	6.103.604	147.815	602.727	611.572		2.581	854.681	2.071.561	66,37%	1.374.895
94		Perum Perumnas	Audited 2011		1.471.673	726.275	17.793	2.215.741	623.557	929.085	1.552.641	564	1.000	469.901	5.068	55.036	131.530	662.535	100%	662.535
95		PT Brantas Abipraya	Audited 2011		386.407	253.708		640.116	272.638	205.981	478.619		10.000	151.554		7.585	(7.643)	161.497	100%	161.497
96	Konsultan Konstruksi	PT Bina Karya	Audited 2011		37.857	26.259		64.116	24.152	22.227	46.379		2.728	-	-	9.636	5.373	17.737	100%	17.737
97		PT Indah Karya	Audited 2011		13.657	7.046		20.703	17.796	1.363	19.159		7.000	-			(5.455)	1.545	100%	1.545
98		PT Yodya Karya	Audited 2011		78.233	4.171	1.925	84.329	54.263	5.584	59.847		8.000		-	11.356	5.127	24.482	100%	24.482
99		PT Indra Karya	Audited 2011		62.519	17.257		79.775	49.577	23.476	73.053	-	2.000	-	-	-	4.723	6.723	100,00%	6.723
100		PT Virama Karya	Audited 2011		34.362	20.761		55.122	34.161	5.359	39.521		10.000	-	-		5.602	15.602	100%	15.602
101	Kawasan	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2011		182.027	528.229	8.858	719.114	66.408	29.672	96.080	-	363.945		-	112.505	146.584	623.033	73,15%	455.749
102		PT Kawasan Industri Makassar	Audited 2011		47.482	25.118	1.467	74.066	7.269	1.458	8.726		40.000	-	-	13.491	11.850	65.341	60%	39.205
103		PT Kawasan Industri Medan	Audited 2011		133.469	38.717	2.525	174.711	16.681	18.131	34.812		30.000			109.900		139.900	60%	83.940
104		PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Audited 2011		34.613	16.295		50.908	7.978		7.978		25.863	-	-		17.067	42.930	51,09%	21.933
105		PT PDIP Batam	Audited 2011		34.401	59.567		93.968	7.662	35.766	43.428	-	18.000	7.184	-	26.442	(2.086)	50.540	100%	50.540
106	Pergudangan	PT Varuna Tirta Prakasya	Audited 2011		66.240	16.262	3	82.505	88.338	4.922	93.260		11.000				(21.755)	(10.755)	100%	(10.755)
107		PT Bhanda Ghara Reksa	Audited 2011		217.602	51.636	27.477	296.715	109.405	6.151	115.556		60.000				121.159	181.159	100%	181.159
108	Perbankan	PT Bank Mandiri Tbk	Audited 2011		120.723.005	423.818.798	7.249.901	551.891.704	454.707.167	34.530.129	489.237.296	861.189	11.666.667	17.195.760	-	(574.735)	33.505.527	61.793.219	60,00%	37.075.931
109		PT Bank BRI Tbk	Audited 2011		161.441.996	303.163.783	5.293.505	469.899.284	395.324.538	24.754.417	420.078.955	45.769	6.167.291	2.773.858	-	814.157	40.019.254	49.774.560	56,75%	28.247.053
110		PT Bank BNI Tbk	Audited 2011		80.144.968	213.562.438	5.350.755	299.058.161	238.819.032	22.396.104	261.215.136	109.870	9.054.807	14.568.468	-	(312.172)	14.422.051	37.733.154	60%	22.639.892
111		PT Bank BTN Tbk	Audited 2011		28.086.499	58.133.487	2.901.473	89.121.459	63.763.830	18.035.986	81.799.816		4.417.985	794.518		35.181	2.073.959	7.321.643	71,91%	5.264.993
112	Asuransi	PT JIWASRAYA	Audited 2011		7.229.325	303.811	432.342	7.965.478	129.119	6.483.012	6.612.131	430	235.000	-	-	721.075	396.842	1.352.917	100%	1.352.917
113		PT ASABRI	Audited 2011		231.765	7.800.143	4.300	8.036.208	54.537	6.568.266	6.622.803		200.000			265.440	947.965	1.413.405	100%	1.413.405
114		PT JAMSOSTEK	Audited 2011		114.506.122	517.097	1.351.820	116.375.039	100.739.473	10.814.577	111.554.050	2	1.000.000	808.782	-	1.059.984	1.952.221	4.820.986	100%	4.820.986
115		PT TASPEN	Audited 2011		18.371.747	81.562.208	63.513	99.997.469	4.422.226	89.547.637	93.969.863	3.857	100.000	-	-	2.810.526	3.113.222	6.023.748	100%	6.023.748
116		PT ASKES	Audited 2011		6.614.290	6.473.228	2.366	13.089.884	4.398.645	173.849	4.572.494	8.680	1.000.000			(3.245)	7.511.955	8.508.710	100%	8.508.710
117		PT JASINDO	Audited 2011		3.113.084	161.945	49.307	3.324.337	1.018.563	996.549	2.015.512	4.858	425.000	-	-	625.654	253.312	1.303.966	100%	1.303.966
118		PT RUI	Audited 2011		1.137.930	42.249	1.823	1.182.002	694.922	435.281	1.130.203	5	40.000	-	-	11.276	519	51.794	100%	51.794
119		PT JASA RAHARJA	Audited 2011		283.770	6.285.678		6.569.448	2.018.993	52.560	2.071.553	24.053	1.800.000			88.408	2.584.434	4.473.842	100%	4.473.842
120		PT ASEI	Audited 2011		195.911	771.549		967.460	210.170	64.405	274.575		300.000	-	-	2.044	390.840	692.885	100%	692.885
121		PT ASKRINDO	Audited 2011		542.921	3.472.585		4.015.505	772.727	233.749	1.006.476	3	3.200.000	-	-	18.351	(209.324)	3.009.027	100%	3.009.027
122	Pembiayaan	PERUM JAMKRINDO	Audited 2011		4.622.670	301.205	5.300	4.929.175	676.535	819.010	1.495.544		1.849.733	1.200.000	-	11.526	372.371	3.433.630	100%	3.433.630
123		PT PPA	Audited 2011		6.407.845	1.764.070	60.780	8.232.695	4.784.179	100.308	4.884.487	6.231	2.801.359			(123.391)	664.009	3.341.977	100%	3.341.977
124		PT Danareksa	Audited 2011		2.887.560	133.400	29.486	3.050.446	553.327	1.955.858	2.509.185	101	701.480	85.927	-		(246.246)	541.161	100%	541.161
125		PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2011		3.593.201	85.058	8.246	3.686.505	2.337.790	821.326	3.159.116	4.934	300.000			(270)	222.725	522.455	100%	522.455

DAFTAR 14.A 1

IHKTISAR PERUSAHAAN NEGARA DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN PER 31 DESEMBER 2011

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPBYDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
					1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
126		Perum Pegadaian	Audited 2011		25.537.221	682.132	-	26.219.353	17.689.388	4.453.602	22.142.990		205.000	46.252			3.825.111	4.076.363	100%	4.076.363
127		PT PANN Multi Finance	Audited 2011		2.952.918	59.262	259.918	3.272.098	533.773	5.659.681	6.193.455		45.997	192.066	-	86.850	(3.246.269)	(2.921.356)	93%	(2.718.030)
128		PT Bahana PUI	Audited 2011		2.365.125	782.827	54.373	3.202.325	982.008	2.218.977	3.200.985	369.703	22.500	-	-	(101.186)	(289.678)	(368.364)	100%	(368.364)
129	Perdagangan	PT Perusahaan Perdagangan Indone	Audited 2011		554.950	405.269	-	960.219	823.820	572.538	1.396.358	643	156.200	86	-		(593.069)	(436.782)	100%	(436.782)
130		PT Sarinah	Audited 2011		115.089	106.314	14.333	235.736	85.700	22.652	108.352	2	46.850	-	-		80.532	127.382	100%	127.382
131	Sertifikasi	PT Surveyor Indonesia	Audited 2011		472.710	87.406		560.117	129.768	67.212	196.980		25.000	-	-		338.136	363.136	85,12%	309.102
132		PT Sucofindo	Audited 2011		683.481	250.656	63.406	997.542	350.937	105.785	456.722		300.000			740	240.080	540.820	95%	513.779
133		PT BKI	Audited 2011		152.024	80.269	-	232.293	51.827	5.780	57.607		45.000	-	-	-	129.686	174.686	100%	174.686
134	Perhotelan dan Pariwisata	PT Hotel Indonesia Natour	Audited 2011		311.288	297.936	32.310	641.534	69.990	454.629	524.619	-	101.700	82	-	12.704	2.428	116.914	100%	116.914
135		PT TWC PBR	Audited 2011		50.918	96.664	16.324	163.906	20.721	4.444	25.165		79.502	106	-	(1.230)	60.365	138.742	100%	138.742
136		PT Pengembangan Pariwisata Bali	Audited 2011		233.396	88.520	614.865	936.781	19.128	57.151	76.279	616	707.660			106.480	45.747	859.887	100%	859.887
137	Lain-lain	PT Berdikari	LK Audited 2010		628.800	130.183	-	758.983	514.010	67.121	581.131	15	75.000			99.837	2.999	177.836	100%	177.836
138		PT Jasa Marga Tbk	Audited 2011		3.996.741	17.435.393		21.432.134	3.768.596	8.423.258	12.191.853	911.490	3.400.000	2.335.525	-	(9.504)	2.602.769	8.328.790	70%	5.830.153
139		PT Pengerukan Indonesia	Audited 2011		136.059	366.405		502.464	176.029	25.106	201.135		482.923	58.699	-	4.165	(244.458)	301.329	100%	301.329
140		PT Pos Indonesia	Audited 2011		3.347.059	846.601		4.193.660	3.282.739	317.425	3.600.164	(30.532)	425.000	-	29.936		169.092	624.028	100%	624.028
141		PT Kliring Berjangka Indonesia	Audited 2011		720.963	20.138	5.317	746.418	523.825	2.915	526.740		102.000	-	-	74.343	43.336	219.679	100%	219.679
142		PT Survai Udara Penas	Unaudited 2011		1.997	6.063	-	8.060	16.131	720	16.851	-	13.000	-	-	-	(21.791)	(8.791)	100%	(8.791)
		GRAND TOTAL	141		1.021.155.647	1.892.199.509	34.709.464	2.948.064.620	1.618.474.955	619.990.220	2.238.465.174	19.572.135	260.263.121	54.769.369	42.264.714	(5.820.487)	338.550.597	690.027.316		573.340.019

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = (10-11)	13	14 = (12-13)
1	Perkebunan	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2011	717.509	651.212	66.297	66.595	59.824	73.068		73.068	18.903	54.165	(48.442)	102.607		102.607
2		PT Perkebunan Nusantara II	Audited 2011	1.617.745	1.431.323	186.422	291.428	304.537	173.313	85.304	88.009	4.844	83.165		83.165		83.165
2		PT Perkebunan Nusantara III	Audited 2011	6.538.893	4.868.251	1.670.642	95.665		1.766.307	80.282	1.686.025	425.752	1.260.273		1.260.273	(142)	1.260.414
3		PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2011	5.611.630	4.230.130	1.381.500	152.576	165.477	1.368.598	150.712	1.217.886	330.780	887.106	-	887.106	2.810	884.296
3		PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2011	4.980.710	4.438.390	542.320	44.477	86.249	500.548	63.283	437.265	117.259	320.006		320.006		320.006
4		PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2011	2.298.614	2.051.308	247.306	32.070	18.702	260.673	23.034	237.639	59.464	178.175		178.175	3.379	174.796
4		PT Perkebunan Nusantara VII	Audited 2011	4.923.295	4.544.836	378.459	57.870	19.314	417.015	203.296	213.720	60.310	153.410		153.410		153.410
5		PT Perkebunan Nusantara VIII	Audited 2011	2.081.881	1.699.055	382.826	14.799	56.314	341.311	13.979	327.331	97.988	229.344	5.456	223.888	367	223.521
5		PT Perkebunan Nusantara IX	Audited 2011	1.536.450	1.028.892	507.558	77.797	105.089	480.265	66.033	414.233	99.130	315.103		315.103	10.764	304.338
6		PT Perkebunan Nusantara X	Audited 2011	2.118.368	1.846.079	272.289	69.177	87.191	254.275	43.467	210.808	55.068	155.740		155.740	543	155.197
6		PT Perkebunan Nusantara XI	Audited 2011	1.557.990	1.641.649	(83.659)	49.209	68.613	(103.063)	49.836	(152.899)	(17.875)	(135.024)	-	(135.024)	-	(135.024)
7		PT Perkebunan Nusantara XII	Audited 2011	1.201.843	1.016.582	185.261			185.261		185.261	50.058	135.203	-	135.203	-	135.203
7		PT Perkebunan Nusantara XIII	Audited 2011	3.616.398	3.360.034	256.364	154.397	133.551	277.209	32.459	244.750	60.357	184.393		184.393	(6.175)	190.568
8		PT Perkebunan Nusantara XIV	Audited 2011	427.236	521.047	(93.811)	9.934	16.644	(100.521)	43.702	(144.223)	(6.790)	(137.433)	-	(137.433)	-	(137.433)
8		PT Rajawali Nusantara Indonesia	Unaudited 2011	4.343.850,93	4.074.365,92	269.485	52.985,36	126.441,39	196.029		196.029	76.294,83	119.734		119.734	47.099,36	72.635
9	Kehutanan	Perum Perhutani	Unaudited 2011	3.167.647	2.837.739	329.908	145.552	26.719	448.742		448.742	111.264	337.477		337.477	(1.414)	338.891
9		PT Inhutani I	Audited 2011	172.958	172.625	332	27.800	18.473	9.659		9.659		9.659		9.659		9.659
10		PT Inhutani II	Audited 2011	45.862	89.749	(43.888)	9.044	2.666	(37.509)	-	(37.509)	(688)	(36.821)	-	(36.821)		(36.821)
10		PT Inhutani III	Unaudited 2011	17.478	21.015	(3.537)	3.893	315	41	99	(58)		(58)		(58)		(58)
11		PT Inhutani IV	Audited 2011	31.268	30.075	1.193	9.202	4.202	6.193		6.193	(27)	6.220		6.220		6.220
11		PT Inhutani V	Unaudited 2011	-	4.990	(4.990)	9.578	408	4.180	3.946	234	36	198		198		198
12	Perikanan	PT Perikanan Nusantara	Audited 2011	63.353	59.093	4.260	2.715	1.203	5.772	-	5.772	223	5.549	-	5.549	-	5.549
12		Perum PPS	Audited 2011	134.560	114.860	19.699	3.242	19.117	3.824		3.824	(401)	4.225	-	4.225		4.225
13	Penunjang Pertanian	Perum Bulog	Audited 2011	24.823.383	23.238.582	1.584.801	1.155.784	1.614.972	1.125.613		1.125.613	189.072	936.541		936.541		936.541
13		PT Sang Hyang Seri	Audited 2011	2.931.658	2.818.836	112.822	47.655	13.043	147.433	42.064	105.369	25.763	79.606		79.606		79.606
14		PT Pertani	Audited 2011	2.168.516	2.084.160	84.356	16.449	59.230	41.575		41.575	10.009	31.566		31.566	2	31.564
14	Pupuk	PT Pusri	Audited 2011	40.773.954	29.938.326	10.835.628	941.434	6.311.682	5.465.380		5.465.380	1.355.811	4.109.569	-	4.109.569		4.109.569
15	Jasa Pengairan	Perum Jasa Tirta I	Audited 2011	259.659	209.055	50.604	7.233	1.715	56.122		56.122	12.685	43.437		43.437		43.437
15		Perum Jasa Tirta II	Audited 2011	349.335	336.592	12.743	14.717	2.569	24.891		24.891	6.556	18.335		18.335		18.335
16	Pertambangan	PT Antam Tbk	Audited 2011	10.346.433	8.333.555	2.012.878	669.339	90.713	2.591.504	22.723	2.568.781	640.889	1.927.892	3.153	1.924.739	2	1.924.737
16		PT Timah Tbk	Audited 2011	8.749.617	6.776.336	1.973.281	39.029	726.559	1.285.751	17.666	1.268.085	371.279	896.806	(320)	897.126	26	897.100
17		PT Bukit Asam Tbk	Audited 2011	10.581.570	5.302.592	5.278.978	421.236	1.641.110	4.059.104	-	4.059.104	971.037	3.088.067	2.205	3.085.862	2.231	3.083.631
17		PT Sarana Karya	Audited 2011	46.591	38.795	7.796	3.651	1.009	10.438	-	10.438	2.507	7.931	-	7.931	-	7.931
18	Energi	PT Pertamina	Audited 2011	589.765.881	541.602.526	48.163.355	2.808.573	9.500.602	41.471.326	2.545.744	38.925.582	18.399.899	20.525.683	(721.586)	21.247.269	54.967	21.192.302
18		PT PGN Tbk	Audited 2011	19.567.407	11.845.029	7.722.378	477.534	545.723	7.654.189		7.654.189	1.535.979	6.118.210	45.253	6.072.957	199.090	5.873.867
19		PT Energy Management Indonesia	Audited 2011	13.866	19.616	(5.749)	11	2.339	(8.077)		(8.077)	-	(8.077)		(8.077)		(8.077)
19		PT Batan Tek	Audited 2011	23.733	27.274	(3.541)	1.172	1.511	(3.880)		(3.880)	(2.298)	(1.582)		(1.582)		(1.582)
20	Industri semen	PT Semen Gresik Tbk	Audited 2011	16.448.772	11.556.641	4.892.131	225.422	27.601	5.089.952		5.089.952	1.134.680	3.955.273	(5.332)	3.960.605	29.831	3.930.774
20		PT Semen Baturaja	Audited 2011	1.050.277	743.267	307.010	27.375	1.276	333.109	62	333.048	81.410	251.638		251.638		251.638
21		PT Semen Kupang	Unaudited 2011	9.713	2.340	7.373	324	-	7.697	25.358	(17.661)	-	(17.661)	-	(17.661)	-	(17.661)
21	Industri Pertahanan	PT Dirgantara Indonesia	Unaudited 2011	1.365.614	1.514.961	(149.348)	15.056	189.512	(323.804)	28.655	(352.459)	4.068	(356.527)	-	(356.527)	-	(356.527)
22		PT PAL Indonesia	Audited 2011	336.840	580.781	(243.941)	36.116	999.187	(1.207.012)	145.110	(1.352.122)	(28.749)	(1.323.373)	(1.723)	(1.321.650)	(1)	(1.321.649)
22		PT Pindad	Audited 2011	1.265.862	1.147.614	118.248	50.848	62.964	106.132	37.929	68.203	21.003	47.200		47.200	0	47.200
23		PT Dahana	Audited 2011	635.512	584.317	51.196	4.828	-	56.023	-	56.023	10.854	45.169	(2.241)	47.410	-	47.410
23	Ind. Baja, Manufaktur, & Rekayasa	PT Krakatau Steel Tbk	Audited 2011	17.915.382	17.556.811	358.571	1.134.657	372.361	1.120.867		1.120.867	98.024	1.022.843		1.022.843	(2.175)	1.025.018
24	Rnc Bangun	PT INKA	LK Audited 2010	630.836	568.523	62.313	3.981	4.661	61.633	21.280	40.353	11.064	29.289	-	29.289	-	29.289
24		PT Barata Indonesia	Audited 2011	675.483	637.077	38.406	3.450	15.409	26.447	3.119	23.328	8.374	14.954	-	14.954	-	14.954
25		PT Boma Bisma Indra	Audited 2011	175.729	179.810	(4.082)	3.418	925	(1.589)	5.747	(7.336)	-	(7.336)	-	(7.336)	-	(7.336)
25	Industri Dok dan Perkapalan	PT Dok dan Kodja Bahari	Audited 2011	470.067	480.012	(9.944)	56.677		46.733		46.733	3.267	43.466		43.466		43.466
26		PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Audited 2011	365.542	331.968	33.574	4.140	12.677	25.037	9.654	15.384	5.542	9.841		9.841	550	9.292
26		PT Industri Kapal Indonesia	LK Audited 2010	45.978	46.783	(805)	-	-	(805)	-	(805)	-	(805)	-	(805)	-	(805)

DAFTAR 14.A 2

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = (10-11)	13	14 = (12-13)
27	Aneka Industri	PT Industri Sandang Nusantara	Audited 2011	64.689	109.733	(45.044)	201.852	16.248	140.560		140.560	(5.102)	145.662	-	145.662	-	145.662
27		PT Garam	Audited 2011	178.302	169.760	8.542	6.537	3.336	11.743	5.604	6.139	2.503	3.635		3.635		3.635
28		PT Primissima	Audited 2011	150.320	148.826	1.493	2.534	2.137	1.890		1.890		1.890		1.890		1.890
28		PT Iglas	Audited 2011	151.703	219.454	(67.751)	34.824	21.692	(54.618)	22.268	(76.886)	(10.027)	(66.859)	-	(66.859)	-	(66.859)
29		PT Industri Soda Indonesia (dalam Likuidasi)	Audited 2005	33.718	51.344	(17.626)	11.790	734	(6.570)	15.435	(22.005)	432	(22.437)	-	(22.437)	-	(22.437)
29	Ind. Kertas, Percetakan dan Penerbitan	Perum Peruri	LK Audited 2010	1.921.017	1.633.254	287.763	67.832	94.222	261.373	-	261.373	56.566	204.807	(36.900)	241.707	-	241.707
30		PT Balai Pustaka	Unaudited 2011	81.577	61.622	19.955	2.246	5.692	16.509	11.946	4.563	(883)	5.446	-	5.446	-	5.446
30		Perum PNRI	Unaudited 2011	41.196	68.525	(27.329)	44.318	9.138	7.851	2.729	5.122	-	5.122	-	5.122	-	5.122
31		PT Pradnya Paramita	Unaudited 2011	330	2.276	(1.946)	1.623	-	(323)	-	(323)	1	(324)	-	(324)	-	(324)
31		PT Kertas Leces	Audited 2011	14.532	55.035	(40.503)	14.208	88.219	(114.514)	8.035	(122.549)	(28.997)	(93.552)	(10.347)	(83.206)	-	(83.206)
32		PT Kertas Kraft Aceh	Unaudited 2011	-	27.974	(27.974)	230	633	(28.377)	36.827	(65.205)	-	(65.205)	-	(65.205)	-	(65.205)
32	Industri Farmasi	PT Indofarma Tbk	Audited 2011	1.203.467	1.111.508	91.959	2.269	17.748	76.480	21.277	55.203	18.283	36.919	(51)	36.970	0	36.970
33		PT Kimia Farma Tbk	Audited 2011	3.481.166	3.259.162	222.004	22.063		244.067	12.059	232.008	60.244	171.764		171.764	2	171.762
33		PT Bio Farma	Audited 2011	1.328.729	941.973	386.756	62.660	41.643	407.772		407.772	105.353	302.419	0	302.419		302.419
34	Telekomunikasi dan Media	PT Telkom Tbk	Audited 2011	71.253.000	49.778.000	21.475.000	1.211.000	1.829.000	20.857.000		20.857.000	5.387.000	15.470.000	(11.000)	15.481.000	4.505.000	10.976.000
34		PT INTI	Audited 2011	723.117	697.433	25.684	14.964	12.781	27.866	4.390	23.477	13.047	10.430	-	10.430	-	10.430
35		PT LEN Industri	Audited 2011	1.384.028	1.287.418	96.610	11.067	20.591	87.086	27.969	59.117	19.413	39.704	(3.159)	42.863	359	42.503
35		Perum LKBN Antara	Audited 2011	147.417	142.605	4.812		1.543	3.269		3.269	1.551	1.718		1.718		1.718
36		Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2011	6.020	7.114	(1.094)	314		(780)		(780)		(780)		(780)		(780)
36	Listrik	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	Audited 2011	208.017.823	193.397.299	14.620.524	2.331.229	1.325.217	15.626.536	7.754.126	7.872.410	678.784	7.193.626		7.193.626	(244)	7.193.870
37	Pelabuhan	PT Pelabuhan Indonesia I	Audited 2011	1.163.631	840.858	322.772	18.211	60.787	280.196		280.196	68.861	211.335		211.335		211.335
37		PT Pelabuhan Indonesia II	Unaudited 2011	4.468.693	2.906.041	1.562.652	655.916	149.269	2.069.299	13	2.069.286	426.272	1.643.014	-	1.643.014	16.570	1.626.443
38		PT Pelabuhan Indonesia III	Unaudited 2011	3.537.153	2.223.013	1.314.140	89.403	67.810	1.335.733	400	1.335.333	376.323	959.010	-	959.010	248.025	710.985
38		PT Pelabuhan Indonesia IV	Audited 2011	967.966	630.278	337.688	35.509	11.898	361.298		361.298	91.893	269.405		269.405		269.405
39	Bandar Udara	PT ANGKASA PURA I	Audited 2011	2.666.202	2.196.093	470.109	304.660	118.416	656.353		656.353	112.126	544.227		544.227		544.227
39		PT ANGKASA PURA II	Audited 2011	3.495.410	2.183.313	1.312.097	224.071	56.329	1.479.839	-	1.479.839	389.646	1.090.193	(6.724)	1.096.917	0,2	1.096.917
40	Angkutan Darat, Udara dan Laut	PT Kereta Api Indonesia	Audited 2011	6.094.095	5.953.706	140.389	183.536		323.925	25.868	298.057	96.812	201.244		201.244	(664)	201.908
40		PERUM PPD	Unaudited 2011	84.651	79.499	5.152	2.884	100	7.936	697	7.239		7.239		7.239		7.239
41		PERUM DAMRI	Audited 2011	660.435	642.677	17.758	9.320	1.462	25.615	-	25.615	21.036	4.579		4.579		4.579
41		PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES	Unaudited 2011	1.616.065	2.103.326	(487.261)	120.840	412.228	(778.649)	-	(778.649)	-	(778.649)	-	(778.649)	-	(778.649)
42		PT GARUDA INDONESIA	Audited 2011	27.164.570	26.152.842	1.011.727	262.276	271.346	1.002.657		1.002.657	193.992	808.665	(50.130)	858.795	3.382	855.413
42		PT PELNI	Audited 2011	2.480.976	2.464.650	16.326	115.980	70.044	62.262	30.863	31.399	30.005	1.395		1.395	84	1.311
43		PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN	Audited 2011	1.162.335	1.064.441	97.894	45.082	4.142	138.833		138.833	10.974	127.859		127.859		127.859
43		PT Djakarta Lloyd	Unaudited 2011	11.400	87.423	(76.023)	1.747	22.012	(96.288)	6.194	(102.481)	68	(102.549)	-	(102.549)	-	(102.549)
44	Konstruksi	PT Amarta Karya	Audited 2011	306.392	287.457	18.936	364	51	19.249	1.272	17.977	8.677	9.300		9.300		9.300
44		PT Adhi Karya Tbk	Audited 2011	6.695.112	6.315.668	379.444	77.609	43.509	413.544	87.164	326.380	143.687	182.693		182.693	577	182.116
45		PT Istaka Karya	Unaudited 2010	406.225	384.444	21.781	6.076	295	27.562	20.131	7.431	5.430	2.001	-	2.001	-	2.001
45		PT Pembangunan Perumahan Tbk	Audited 2011	6.312.058	5.657.117	654.941	28.282	86.241	596.982	178.506	418.476	178.253	240.223		240.223	0	240.223
46		PT Nindya Karya	Unaudited 2011	989.154	897.290	91.864	6.118	-	97.983	56.229	41.753	24.632	17.121	-	17.121	-	17.121
46		PT Hutama Karya	Audited 2011	3.643.411	3.393.708	249.703	35.354	631	284.426	56.259	228.167	111.874	116.293		116.293	81	116.212
47		PT Wijaya Karya Tbk	Audited 2011	7.843.349	7.189.608	653.741	57.186	81.320	629.607		629.607	238.660	390.947	10.881	380.066	35.453	344.613
47		Perum Perumnas	Audited 2011	1.021.204	867.449	153.754	35.446	25.446	163.754	54.998	108.757	42.589	66.168	-	66.168	364	65.804
48		PT Brantas Abipraya	Audited 2011	731.687	666.195	65.492	19.707	6.446	78.753	38.745	40.007	13.995	26.013		26.013		26.013
48	Konsultan Konstruksi	PT Bina Karya	Audited 2011	54.121	49.719	4.402	3.194	679	6.917	1.086	5.831	1.162	4.669	-	4.669	-	4.669
49		PT Indah Karya	Audited 2011	21.817	20.962	855	738	466	1.128	634	493	225	269	-	269	-	269
49		PT Yodya Karya	Audited 2011	121.715	110.080	11.634	850	3.524	8.960		8.960	3.833	5.127	-	5.127	-	5.127
50		PT Indra Karya	Audited 2011	90.814	84.679	6.236	527	1.969	4.793		4.793	2.846	1.947	-	1.947	-	1.947
50		PT Virama Karya	Audited 2011	68.188	59.593	8.595	289	4.778	4.106		4.106	1.649	2.457		2.457		2.457
51	Kawasan	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2011	263.197	213.025	50.172	16.957	9.394	57.735	-	57.735	16.045	41.690	-	41.690	-	41.690
51		PT Kawasan Industri Makassar	Audited 2011	26.564	14.896	11.668	563	-	12.231	-	12.231	381	11.850	-	11.850	-	11.850
52		PT Kawasan Industri Medan	Audited 2011	100.602	53.073	47.529	944	10.843	37.630	-	37.630	3.321	34.309		34.309		34.309
52		PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Audited 2011	17.160	12.114	5.046	587	25	5.608		5.608	1.078	4.530	(503)	5.033		5.033
53		PT PDIP Batam	Audited 2011	64.356	67.622	(3.266)	1.797	792	(2.261)	-	(2.261)	(56)	(2.205)	-	(2.205)	-	(2.205)
53	Pergudangan	PT Varuna Tirta Prakasya	Audited 2011	254.536	249.184	5.352	333	4.686	999		999	425	574		574		574

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = (10-11)	13	14 = (12-13)
54	-	PT Bhanda Ghara Reksa	Audited 2011	527.043	472.098	54.945	4.419	4.638	54.726		54.726	15.113	39.614		39.614		39.614
54	Perbankan	PT Bank Mandiri Tbk	Audited 2011	42.536.106	18.945.151	23.590.955	12.530.771	19.609.691	16.512.035		16.512.035	3.816.150	12.695.885	216.429	12.479.456	449.841	12.029.615
55		PT Bank BRI Tbk	Audited 2011	48.164.348	13.737.272	34.427.076	7.206.089	22.877.285	18.755.880	-	18.755.880	3.667.884	15.087.996	208.505	14.879.491	8.206	14.871.285
55		PT Bank BNI Tbk	Audited 2011	20.691.795	7.495.982	13.195.813	7.716.033	13.450.538	7.461.308		7.461.308	1.653.090	5.808.218	(182.926)	5.991.144	(16.673)	6.007.817
56		PT Bank BTN Tbk	Audited 2011	8.068.121	6.542.372	1.525.749		3.489	1.522.260		1.522.260	403.599	1.118.661	92.460	1.026.201		1.026.201
56	Asuransi	PT JIWASRAYA	Audited 2011	5.454.525	5.094.393	360.133	41.839	4.423	397.549	-	397.549	679	396.870	-	396.870	28	396.842
57		PT ASABRI	Audited 2011	1.566.366	1.489.947	76.419			76.419		76.419	14	76.405	(120.098)	196.503		196.503
57		PT JAMSOSTEK	Audited 2011	15.598.258	13.433.720	2.164.538	30.099		2.194.637		2.194.637	161.114	2.033.523		2.033.523		2.033.523
58		PT TASPEN	Audited 2011	15.079.887	14.494.522	585.365		402	584.963		584.963	5.878	579.085	(1.371.971)	1.951.056	579.085	1.371.971
58		PT ASKES	Audited 2011	9.242.911	8.548.833	694.079	978.171	94.577	1.577.672		1.577.672	138.814	1.438.858	1.285	1.437.573	845	1.436.728
59		PT JASINDO	Audited 2011	1.353.414	1.041.392	312.022	6.954	-	318.976	-	318.976	64.946	254.030	-	254.030	718	253.312
59		PT RUI	Audited 2011	977.085	906.658	70.427	1.256	-	71.683	-	71.683	5.330	66.353	-	66.353	-	66.353
60		PT JASA RAHARJA	Audited 2011	3.824.632	2.763.532	1.061.100	691.221		1.752.321		1.752.321	328.054	1.424.267	54.479	1.369.788	(163)	1.369.952
60		PT ASEI	Audited 2011	231.585	164.071	67.514	182		67.695		67.695	(149)	67.844	6.910	60.934		60.934
61		PT ASKRINDO	Audited 2011	357.567	221.753	135.814	-	26.093	109.721		109.721	8.601	101.121	34.089	67.032	0	67.032
61	Pembiayaan	PERUM JAMKRINDO	Audited 2011	910.987	597.841	313.145	68.129	2.286	378.988		378.988	6.616	372.371	(172)	372.544		372.544
62		PT PPA	Audited 2011	7.564.453	7.004.591	559.862	47.085	153.849	453.098		453.098	164.941	288.157	27.827	260.330	1.720	258.610
62		PT Danareksa	Audited 2011	157.688	242.382	(84.694)	45.417	-	(39.277)	210.617	(249.894)	37.476	(287.371)	-	(287.371)	-	(287.371)
63		PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2011	697.572	654.458	43.114	8.306	2.077	49.343		49.343	17.174	32.169	1.475	30.694	1.033	29.661
63		Perum Pegadaian	Audited 2011	6.600.928	4.674.269	1.926.659	77.475	1.883	2.002.252		2.002.252	526.016	1.476.235		1.476.235		1.476.235
64		PT PANN Multi Finance	Audited 2011	309.405	201.100	108.304	28.533	33.013	103.825	-	103.825	20.298	83.526	-	83.526	-	83.526
64		PT Bahana PUI	Audited 2011	617.801	517.582	100.218	59.769	-	159.988	-	159.988	23.785	136.202	272.409	(136.207)	45.151	(181.358)
65	Perdagangan	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Audited 2011	2.276.747	2.237.830	38.917	-	5.504	33.413	-	33.413	8.682	24.731	-	24.731	47	24.684
65		PT Sarinah	Audited 2011	283.849	269.506	14.343	16.896	12.480	18.759		18.759	3.110	15.649	-	15.649	7	15.642
66	Sertifikasi	PT Surveyor Indonesia	Audited 2011	649.757	572.085	77.672	14.266	9.099	82.838		82.838	25.156	57.682	(586)	58.268		58.268
66		PT Sucofindo	Audited 2011	1.479.616	1.371.058	108.557	5.946	-	114.503	6.586	107.918	33.690	74.228	10.166	64.062	(230)	64.292
67		PT BKI	Audited 2011	334.085	267.297	66.788	3.351	1.796	68.343		68.343	16.983	51.360		51.360		51.360
67	Perhotelan dan Pariwisata	PT Hotel Indonesia Natour	Audited 2011	293.332	286.949	6.383	33.335	4.596	35.122	-	35.122	9.196	25.926	-	25.926	-	25.926
68		PT TWC PBR	Audited 2011	111.135	83.957	27.178	2.280	10.641	18.817		18.817	5.001	13.816		13.816		13.816
68		PT Pengembangan Pariwisata Bali	Audited 2011	84.491	53.075	31.416	21.200	6.963	45.652		45.652	19	45.633	(114)	45.747	(411)	46.158
69	Lain-lain	PT Berdikari	LK Audited 2010	681.389	671.913	9.475	5.993	9.323	6.146	8.844	(2.699)	(5.693)	2.994	-	2.994	(5)	2.999
69		PT Jasa Marga Tbk	Audited 2011	4.960.473	2.679.084	2.281.388	230.789	45.302	2.466.875	740.400	1.726.475	407.651	1.318.824	(2.758)	1.321.582	(20.638)	1.342.220
70		PT Pengerukan Indonesia	Audited 2011	383.164	342.479	40.685	24.523	37.488	27.720		27.720	7.670	20.050		20.050		20.050
70		PT Pos Indonesia	Audited 2011	3.030.642	2.899.143	131.499	48.144	23.176	156.468		156.468	11.487	144.981	545	144.436	444	143.992
71		PT Kliring Berjangka Indonesia	Audited 2011	53.302	30.724	22.578	26.040	1.322	47.296	-	47.296	6.909	40.387	-	40.387	-	40.387
71		PT Survai Udara Penas	Unaudited 2011	1.205	3.201	(1.996)	152	532	(2.375)	-	(2.375)	(485)	(1.890)	-	(1.890)	-	(1.890)
		GRAND TOTAL	141	1.378.941.906	1.159.540.058	219.401.848	45.930.691	84.970.384	180.362.155	13.212.716	167.149.439	46.920.356	120.229.083	(1.583.555)	121.812.638	6.199.748	115.612.891

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2011
PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam juta Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2011		26.038.282	51.567	231.672	26.321.521	211.034	19.146.543	19.357.577		6.321.586			4.909	637.449	6.963.944	100%	6.963.944
2	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2011		2.199.093	2.617.737		4.816.830	1.405.301	903.522	2.308.823		2.000.000				508.008	2.508.008	100%	2.508.008
3	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2011		1.817.180	396.148		2.213.329	14.751	3.049	17.800	-	2.000.000	-		180	195.348	2.195.528	100%	2.195.528
4	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2011		3.721.523	17.108		3.738.631	34.177	665	34.843		3.500.000			516	203.272	3.703.788	100%	3.703.788
5	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2011		172.987	1.463.150		1.636.137	15.042	4.919	19.960	-	662.001	-	1.670.877	-	(716.701)	1.616.177	66,67%	1.077.505
							38.726.449			21.739.003							16.987.446		16.448.774

PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam juta Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10-11)	13	14=(12-13)
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2011	1.690.848	1.149.599	541.249	2.511		543.760	-	543.760	83.116	460.644	(5.382)	466.026		466.026
										-		-		-		-
2	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2011	111.410	28.566	82.844	2.002		84.847	-	84.847	4.348	80.499		80.499		80.499
					-					-		-		-		-
3	PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2011	173.312	67.411	105.901	(6.842)	107	98.952	-	98.952	1.554	97.398	-	97.398	-	97.398
												-		-		-
4	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2011	228.349	40.770	187.580	3.748	197	191.131		191.131	33.990	157.141	(516)	157.657		157.657
								-		-		-		-		-
5	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2011	76.122	156.179	(80.058)	11.629	1.640	(70.068)	-	(70.068)	9.318	(79.386)	-	(79.386)	-	(79.386)

Daftar BPYBDS pada BUMN
PER 31 Desember 2011

No.	BUMN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
1	Perum DAMRI	161.462.000.000,00	145.910.132.570,00
2	Perum PPD	67.770.841.819,00	67.770.841.819,00
3	PT Kereta Api Indonesia	826.546.294.645,00	826.546.294.645,00
4	PT Perusahaan Listrik Negara	29.049.436.783.477,00	36.029.022.757.584,00
5	Perum Jasa Tirta I	1.131.342.305,00	1.131.342.305,00
6	PT Angkasa Pura I	3.393.090.807.000,00	1.658.928.139.178,01
7	PT Angkasa Pura II	2.221.583.000.000,00	2.065.258.136.834,68
8	Perum BULOG	670.113.824.005,00	751.619.346.391,00
9	PT Pelindo I	435.790.297.506,00	56.900.915.000,00
10	PT Pelindo II	0,00	7.652.976.000,00
11	PT Pelindo III	209.730.528.118,00	209.730.528.118,00
12	PT Pelindo IV	68.176.454.500,00	320.700.155.600,00
13	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	1.304.919.497.954,00	1.047.255.575.783,00
14	Perum Percetakan Negara Indonesia	1.003.285.000,00	506.280.000,00
15	Perum Prasarana Perikanan Samudra	47.036.685.555,00	47.036.685.555,00
16	PT Djakarta Lloyd	667.188.771.346,05	667.188.771.346,05
17	PT Pelayaran Nasional Indonesia	2.997.874.185.088,93	2.931.814.461.210,00
18	Perum Perumnas	5.068.434.600,00	5.068.434.600,00
19	PT Pos Indonesia	29.936.024.480,00	21.325.953.360,00
20	Perum LKBN Antara	0,00	25.927.671.602,00
21	PT Pengerukan Indonesia	0,00	58.698.972.481,05
22	Perum produksi film Negara (PFN)	14.903.777.061,00	14.903.777.061,00
23	PT Pertamina	520.917.962.842,46	566.201.837.308,47
24	PT Geo Dipa Energi	1.670.877.372.176,00	0,00
Jumlah		**44.364.558.169.478,40**	**47.527.099.986.351,20**

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PERUSAHAAN NEGARA MINORITAS PER 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rp)

No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	% Saham Kepemilikan RI	Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah Per 31 Desember 2011
1	PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM)	Audited 2011 (31 Maret 2011)	41,12%	8.388.009.577.712	3.449.149.538.355
2	PT Surabaya Indah Estate Rungkut (SIER)	Audited 2011	50,00%	229.367.676.116	114.683.838.058
3	PT Jayakarta Indah Estate Pulogadung (JIEP)	Unaudited 2011	50,00%	210.052.236.000	105.026.118.000
4	PT Asean Aceh Fertilizer	Proses Likuidasi			-
5	PT Asean Copper Product	n.a.			-
Jumlah I					**3.668.859.494.413**

No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	Saham	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilkan Pemerintah
1	PT Bank Bukopin	Audited 2011	A	0,06%	4.736.255	47.362.550.000
		Audited 2011	B	13,00%	1.034.232.376	103.423.237.600
2	PT Rekayasa Industri (REKIND)	Audited 2011		4,97%	22.366	22.366.000.000
3	PT Freeport Indonesia	Unaudited 2011	Biasa	9,36%	21.300	19.314.840.000
4	Kertas Padalarang	Unaudited 2011		7,74%	25.000	25.000.000.000
5	PT Indosat, Tbk	Audited 2011	Seri B	14,29%	776.624.999	77.662.499.900
6	PT Waskita Karya	Audited 2011		1,00%	180.000	180.000.000.000
7	PT Socfindo	Unaudited 2011	Seri B		1	265.000
		Unaudited 2011	Seri C		2.999	794.735.000
		Unaudited 2011	Seri D		2.000	3.430.000.000
		Unaudited 2011	Total	10%	42.250.000.000	
8	PT Prasadha pamunah Limbah Industri (PPLI)	Audited 2010		5%	49.578.225.000	2.478.911.250
9	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2010		13%	39.000	111.264.075.000
JUMLAH II						**593.097.113.750**
JUMLAH I + II						**4.261.956.608.163**

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL
PER 31 DESEMBER 2011

NO	LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL	TOTAL PENYERTAAN MODAL				Penyertaan yang masih Berbentuk Promissory
		Mata Uang		USD	IDR[1]	
1	Asian Development Bank	SDR	196.604.000,00	301.839.436,66	2.737.080.011.669,15	
2	International Monetary Fund	SDR	2.079.300.000,00	3.192.278.593,80	28.947.582.288.578,40	25.871.090.740.488,80
	World Bank Group					
3	International Bank for Reconstruction and Development	USD		110.275.770,97	999.980.691.155,96	39.174.191.965,20
4	International Development Association	USD		15.557.837,00	141.078.465.916,00	5.173.139.667,81
5	International Finance Corporation	USD		28.539.000,00	258.791.652.000,00	
6	Multilateral Investment Guarantee Agency	USD		3.797.820,00	34.438.631.760,00	10.292.343.224,00
7	Islamic Development Bank Group	ID	124.260.000,00	190.772.153,16	1.729.921.884.854,88	
8	International Islamic Trade Finance Corporation	USD		2.060.000,00	18.680.080.000,00	
9	Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit	ID	125.140,32	192.123,68	1.742.177.516,87	
10	International Fund for Agricultural Development	USD		49.959.000,00	453.028.212.000,00	
11	Common Fund for Commodities	USD		1.318.023,51	11.951.837.158,59	2.623.080.659,06
12	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD		5.225.000,00	47.380.300.000,00	
13	Credit Guarantee and Investment Facility	USD		12.600.000,00	114.256.800.000,00	
	Jumlah total			**3.914.414.758,78**	**35.495.913.032.609,90**	**25.928.353.496.005**

Catatan:

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) IMF adalah kurs official IMF per 30 Desember 2011, SDR1 = USD 1.535266
2. Kurs USD adalah kurs tengah BI pada tanggal 30 Desember 2011, yaitu USD 1 = Rp 9068
3. Kurs Euro adalah kurs tengah BI pada tanggal 30 Desember 2011, yaitu, EUR1 = USD 11738,99
4. Kurs Islamic Dinar (ID) sama dengan kurs Special Drawing Right (SDR) IMF pada tanggal 30 Desember 2011
5. Kurs franc Perancis ke Euro adalah tetap sebesar EUR 1 = 6.55957
6. Kurs Euro ke USD adalah kurs IMF per 30 Desember 2011, EUR1 = USD 1.2939
7. Pada tahun 2012 Indonesia akan membayar hutang promissory note IBRD sebesar Rp 39.174.191.965,2.
8. Hutang ke BI adalah dana talangan BI kepada Pemerintah ketika BI masih menjadi bagian dari Pemerintah (sebelum berlakukan UU tentang independensi BI tahun 2009). Kemenkeu dan BI sedang membahas proses penyelesaiannya.

ASET TETAP PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dalam Rupiah)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	TANAH		PERALATAN DAN MESIN		GEDUNG DAN BANGUNAN		JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN		ASET TETAP LAINNYA		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	
			31-Des-11	31-Des-10	31-Des-11	31-Des-10	31-Des-11	31-Des-10	31-Des-11	31-Des-10	31-Des-11	31-Des-10	31-Des-11	31-Des-10
1	001	MPR	111.698.322.605	95.441.090.000	89.614.499.751	77.674.855.854	202.142.541.298	195.159.011.611	9.790.961.500	9.790.961.500	55.795.990.929	56.134.799.341		-
2	002	DPR	184.836.337.000	184.836.337.000	574.671.231.599	485.137.366.111	806.703.452.083	798.622.129.057	64.901.869.781	60.118.130.781	371.137.337.145	372.016.765.445	7.225.560.000	-
3	004	BPK	1.432.088.569.622	1.217.453.857.475	922.631.310.356	721.992.421.346	1.505.477.580.313	1.248.902.204.243	230.309.891.623	173.304.414.775	15.486.419.936	27.610.384.347	61.788.162.680	55.799.339.600
4	005	MA	4.060.494.388.804	3.820.854.577.204	1.645.039.566.093	1.363.007.357.428	3.873.858.219.689	3.434.423.788.252	143.083.680.145	134.548.320.088	38.445.291.145	37.146.049.957	409.891.237.319	233.491.355.808
5	006	Kejaksaan Agung	3.182.151.556.795	3.174.586.692.129	1.396.856.827.367	1.224.826.489.872	2.087.096.708.997	1.851.740.605.447	37.171.571.460	27.564.441.991	9.323.923.702	9.391.413.169	541.315.091.766	157.670.458.765
6	007	Sekretariat Negara	12.430.268.582.320	8.349.353.505.320	1.646.608.325.141	1.461.319.582.715	1.276.323.185.252	1.210.951.202.419	109.983.853.135	107.097.177.165	227.573.120.164	38.952.345.369	105.768.400.000	-
7	007	BLU Sekretariat Negara	72.952.681.862.609	72.952.681.862.609	76.802.399.004	85.574.599.493	1.082.283.396.508	1.078.682.720.520	464.095.125.985	453.353.096.735	8.063.698.732	1.405.260.076	7.980.686.772	6.531.033.650
8	010	Kementerian Dalam Negeri	2.251.934.294.484	2.251.934.294.484	1.460.704.794.390	831.299.723.018	1.812.603.000.049	1.529.506.671.405	196.811.683.980	180.194.376.169	232.178.792.363	270.303.559.279	557.237.679.091	168.770.483.598
9	011	Kementerian Luar Negeri	10.335.783.877.802	10.222.758.601.494	969.913.670.494	924.700.930.594	5.426.515.357.056	5.146.185.714.216	44.737.038.187	42.103.666.012	84.614.535.581	86.003.671.388	17.802.533.368	6.273.484.779
10	012	Kementerian Pertahanan	215.261.887.232.490	190.817.884.618.175	58.568.746.953.715	48.928.608.344.467	25.081.548.555.619	21.221.693.072.813	4.297.784.721.612	3.777.717.286.675	166.048.602.587	156.927.893.864	2.014.668.151.687	786.608.641.965
11	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	9.987.890.512.711	11.476.794.150.178	2.132.584.242.102	1.565.364.111.324	5.215.456.871.085	4.539.090.311.256	136.860.127.534	100.886.330.673	24.002.893.923	21.323.194.681	790.109.622.574	640.218.338.326
12	015	Kementerian Keuangan	17.210.633.268.536	17.154.828.794.908	8.021.195.465.644	7.306.062.037.508	10.635.543.677.167	9.880.476.902.813	332.477.687.395	316.775.657.845	21.169.879.443	20.496.576.201	698.283.768.910	615.651.377.375
13	015	BLU Kementerian Keuangan	545.192.062.827	545.192.062.827	43.188.928.397	31.697.703.142	194.255.849.179	144.672.506.225	18.437.121.332	16.745.701.264	11.467.292.040	7.486.585.860	-	18.321.966.185
14	018	Kementerian Pertanian	7.794.036.418.871	8.221.039.099.372	3.229.881.428.624	2.805.237.991.171	2.756.689.693.877	2.385.322.052.778	341.655.950.567	303.226.059.178	254.569.207.378	224.637.262.937	17.707.194.937	7.719.956.138
15	018	BLU Kementerian Pertanian	647.183.099.926	-	45.133.278.350	-	34.096.584.226	-	9.281.942.730	-	606.916.141	-		
16	019	Kementerian Perindustrian	2.135.917.809.989	-	1.938.487.076.538	1.370.318.938.524	796.124.758.846	771.346.708.650	44.777.921.364	19.608.862.149	16.336.647.468	17.015.229.531	1.850.043.500	-
17	020	Kementerian ESDM	2.976.586.676.832	2.133.790.142.988	3.245.064.748.535	2.800.537.311.966	1.410.574.925.484	1.127.829.088.569	1.949.430.762.906	1.766.010.205.745	308.868.898.659	260.593.519.492	12.579.258.730.541	9.318.323.470.330
18	022	Kementerian Perhubungan	49.298.586.933.502	2.848.899.218.882	13.345.181.983.197	9.931.624.671.639	5.578.033.760.765	6.990.892.130.747	47.945.880.057.181	31.688.821.624.773	2.291.839.961.600	1.904.414.529.788	13.861.192.285.655	9.879.614.271.189
19	022	BLU Kementerian Perhubungan	1.223.489.280.480	14.677.800.582.743	643.140.909.230	335.420.378.662	1.199.196.158.350	433.894.968.413	38.866.982.003	14.244.555.248	11.326.948.158	4.861.295.540	52.457.751.434	21.285.498.700
20	023	Kementerian Pendidikan Nasional	31.332.016.450.985	1.085.197.712.958	9.700.101.318.400	7.187.932.901.155	12.374.182.093.421	10.841.320.984.264	598.766.831.910	488.349.581.858	509.736.803.341	446.872.192.775	3.421.826.821.452	1.972.761.351.913
21	023	BLU Kementerian Pendidikan Nasional	19.748.903.112.894	31.225.416.010.125	4.822.497.805.960	3.126.536.452.623	6.863.452.466.565	5.395.604.283.998	227.338.833.007	162.750.377.522	287.082.383.865	281.603.063.590	2.371.217.228.208	1.560.123.076.403
22	024	Kementerian Kesehatan	2.828.659.753.254	20.298.034.270.461	7.622.606.557.042	4.417.844.205.955	2.816.021.785.084	2.225.183.704.625	165.308.672.696	48.711.209.041	62.456.681.984	54.281.456.400	1.514.015.849.104	526.654.490.141
23	024	BLU Kementerian Kesehatan	10.260.958.840.661	3.092.105.645.535	5.346.653.056.414	3.881.133.250.405	4.358.478.222.446	3.785.110.329.149	274.611.207.518	247.118.341.556	68.914.725.618	69.541.822.334	736.197.739.066	400.956.585.184
24	025	Kementerian Agama	7.120.538.505.013	9.487.543.713.744	2.639.418.104.688	2.046.077.682.947	11.552.572.043.252	9.638.800.689.872	156.205.096.293	109.254.023.572	470.257.745.288	350.085.500.172	631.775.729.469	740.209.726.510
25	025	BLU Kementerian Agama	2.996.569.510.060	6.914.314.239.874	1.104.118.591.618	862.468.281.043	2.145.299.077.879	1.593.320.149.429	88.282.422.911	67.171.209.469	68.224.230.158	61.835.405.417	311.772.974.466	543.961.883.405
26	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.439.141.652.884	3.296.541.100.387	1.128.728.563.357	740.518.499.194	620.633.687.141	586.492.660.686	64.561.127.686	59.434.242.293	8.942.870.247	22.569.437.529	111.391.109.436	58.176.345.043
27	026	BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi	318.592.354.000	1.439.521.993.786	90.312.109.832	67.308.778.278	123.330.439.447	116.373.473.847	7.785.658.558	6.678.654.078	545.354.941	377.267.941		
28	027	Kementerian Sosial	3.403.244.658.909	312.602.531.000	804.857.117.925	737.577.658.566	660.499.022.989	647.914.148.949	51.704.900.664	50.947.995.709	31.578.151.388	24.703.699.379	34.569.525.695	270.591.000
29	029	Kementerian Kehutanan	2.165.630.006.523	3.269.993.944.109	1.652.236.164.546	1.597.743.229.562	1.290.802.682.039	1.119.544.814.675	123.686.637.858	103.003.889.903	42.751.027.237	41.315.376.482	6.380.911.228	13.190.754.294
30	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.845.228.836.530	2.145.764.770.462	2.842.865.098.888	2.312.015.473.266	2.452.653.479.134	1.943.293.218.271	1.392.404.703.328	1.179.848.665.519	51.224.785.825	37.981.353.565	236.299.868.341	299.765.530.352
31	033	Kementerian Pekerjaan Umum	234.174.373.623.852	1.526.867.505.817	5.099.489.107.029	3.715.205.539.574	5.945.558.164.359	4.509.547.815.352	282.171.744.628.038	226.304.983.632.441	3.684.133.347.829	1.714.849.041.723	19.159.207.817.174	12.501.431.679.958
32	033	BLU Kementerian Pekerjaan Umum		59.584.188.616.541			29.805.284.987							
33	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	3.391.595.600	1.591.595.600	479.418.637.633	300.809.013.994	19.733.715.055	6.819.863.250	10.452.187.000	10.450.807.000	20.597.963.642	22.978.931.922		
34	035	Kemenko Bidang Perekonomian			43.487.482.262	34.325.954.355		2.631.969.000			67.526.925	67.526.925		
35	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat			30.149.963.733	27.495.891.962	148.974.650	148.974.650	144.386.000	144.386.000	19.174.263.571	19.174.263.571	88.339.316.757	-
36	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	2.511.281.399.826	2.485.591.412.515	336.429.183.846	281.464.696.953	833.319.258.068	768.536.829.751	60.450.194.620	58.516.600.369	119.907.910.572	80.911.850.200	118.352.100.117	117.692.684.857
37	041	Kementerian Negara BUMN	273.198.404.650	273.413.532.500	95.639.801.582	87.678.870.475	173.858.682.561	173.061.604.631	3.201.056.420	3.136.035.090	759.716.566	723.634.091		
38	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1.980.636.227.808	1.980.636.227.808	394.896.909.147	434.152.395.539	236.375.305.508	236.560.749.208	30.974.525.986	29.100.508.511	22.002.250.990	18.791.890.524		
39	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	40.772.187.225	25.293.152.225	251.166.979.874	204.483.814.008	53.425.997.647	53.313.130.847	2.181.250.920	2.143.104.120	18.367.014.718	15.285.672.161		
40	044	Kementerian Negara KUKM	874.645.027.087	874.645.027.087	131.715.482.706	102.997.025.474	286.374.649.146	185.344.965.890	16.667.790.300	6.185.246.507	528.025.930	250.579.434	13.016.547.500	22.471.807.900
41	044	BLU Kementerian Negara KUKM			86.434.634.339	81.856.646.239	535.660.599.784	535.660.599.784	226.308.500	152.808.500	1.851.431.800	1.385.163.800		
42	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	294.120.000	294.120.000	29.388.928.085	27.589.644.516	240.425.660	240.425.660	255.108.000	255.108.000	232.492.736	3.894.825.586		
43	048	Kementerian Negara PAN			41.102.884.348	38.923.968.526	17.357.383.437	11.560.018.437	1.395.216.550	1.395.216.550	5.400.477.630	5.195.506.280		
44	050	BIN	807.176.015.835	789.222.732.635	1.824.583.021.298	1.556.381.620.144	261.098.988.545	204.517.671.912	111.685.563.685	104.426.463.612	2.066.545.445	2.093.245.445		
45	051	LSN	95.999.709.127	95.595.009.427	4.267.679.259.393	3.717.468.101.997	98.900.925.074	93.462.666.842	35.899.696.994	35.381.263.963	3.548.134.400	3.439.849.181		
46	052	Dewan Ketahanan Nasional			16.913.445.132	14.153.447.735					647.472.654	499.995.704		
47	054	BPS	538.270.175.770	527.754.916.460	781.344.735.333	702.284.104.795	1.083.370.186.839	881.654.320.255	17.646.163.934	16.591.773.811	24.172.331.665	4.152.226.428	32.158.955.080	22.216.671.367
48	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	179.478.885.560	179.478.885.560	105.804.071.003	79.613.344.036	80.474.923.029	75.544.577.471	2.236.131.639	1.850.191.639	1.477.089.588	1.359.505.238		
49	056	Badan Pertanahan Nasional	1.643.533.056.806	1.648.660.316.806	1.104.223.359.607	984.199.709.854	745.556.726.528	712.678.074.377	7.257.370.650	10.572.314.012	533.692.392.731	36.534.631.889	10.038.122.971	13.214.916.095
50	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	317.661.875.000	317.661.875.000	170.173.561.755	156.970.930.820	202.162.433.406	193.097.933.186	101.150.000	-	221.511.190.201	210.607.542.496		
51	059	Kementerian Kominfo	923.947.925.492	891.653.861.707	1.076.643.170.142	926.434.328.729	915.922.765.974	893.483.164.503	31.155.068.217	27.624.444.263	12.818.608.449	14.261.694.400	69.881.202.191	29.558.607.524
52	059	BLU Kementerian Kominfo			8.209.758.608	17.807.593.920			-	96.905.600	504.433.662	504.433.662	27.602.395.052	-
53	060	Kepolisian RI	42.232.970.492.903	42.159.612.438.270	16.132.701.824.239	13.856.436.749.046	11.860.223.834.245	14.413.395.582.205	624.026.389.976	963.336.893.113	38.719.573.169	46.467.496.426	1.721.215.500.588	1.137.551.209.363
54	063	BPOM	81.533.131.769	47.309.480.070	897.697.594.195	654.113.762.113	254.205.727.805	253.837.040.572	15.183.491.778	8.897.885.256	103.259.461.070	83.750.843.347	57.691.449.275	8.533.123.849
55	064	Lembaga Ketahanan Nasional	101.438.100.000	101.438.100.000	89.897.346.954	83.928.831.869	28.856.209.885	26.520.223.917	1.369.996.087	1.369.996.087	1.612.484.328	1.490.995.672	110.315.344.937	25.462.711.810
56	065	BKPM	333.830.014.000	333.830.014.000	143.263.884.909	138.622.058.531	196.168.112.609	196.067.668.159	4.943.133.473	4.943.133.473	1.019.886.203	966.453.038		
57	066	BNN	26.910.975.000	-	389.319.917.903	266.104.178.678	509.152.091.308	283.511.987.858	36.823.968.520	34.739.535.520	3.124.950.835	3.008.363.815	15.153.378.189	79.975.000
58	067	Kementerian Negara PDT			40.373.845.333	37.386.529.037	8.682.342.200	8.682.342.200	840.551.700	840.551.700	7.622.147.209	7.654.147.209		
59	068	BKKBN	376.910.735.193	377.754.240.518	261.094.306.212	222.741.572.491	230.581.555.126	216.952.721.703	15.278.142.051	13.672.949.891	3.916.407.657	4.003.175.122	8.571.413.091	2.348.845.000
60	074	Komnas HAM			13.734.283.540	12.460.927.305					8.515.373.340	8.318.411.170		
61	075	BMG	827.214.373.964	825.852.112.854	1.714.546.727.699	1.316.425.852.270	813.849.341.728	792.037.934.686	208.145.313.065	178.736.366.871	4.045.179.460	3.575.995.790	8.428.241.226	985.804.100
62	076	KPU	80.517.951.175	75.621.063.175	487.948.284.337	456.358.574.078	200.372.564.790	180.499.895.352	1.387.404.145	480.413.745	2.071.728.087	5.328.420.920	2.401.153.772	7.970.879.088
63	077	Mahkamah Konstitusi RI	89.075.216.326	77.368.883.316	171.177.014.723	116.169.156.176	187.136.608.095	268.370.367.977	39.031.009.925	1.771.272.060	13.838.650.246	13.445.607.141	658.679.300	-
64	078	PPATK	67.881.000.000	67.881.000.000	44.881.792.874	40.097.647.745	78.082.032.958	59.489.256.394			477.765.114	499.097.614	-	18.663.547.569
65	079	LIPI	6.013.110.485.132	6.008.416.115.737	791.460.363.386	737.177.952.422	610.821.876.258	589.130.132.038	170.364.796.283	165.745.489.883	41.448.699.309	40.207.741.978	72.705.100.311	7.016.842.600
66	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.789.648.034.766	1.789.067.482.420	394.122.297.751	283.869.737.698	463.480.276.106	450.415.770.352	37.509.218.090	36.844.782.664	7.446.382.002	5.346.286.994	41.807.537.090	-
67	081	BPPT	734.936.529.500	734.771.352.600	1.397.101.821.691	1.042.402.261.208	357.265.662.760	350.751.537.341	60.658.813.077	44.795.277.284	44.067.438.319	40.262.103.675	105.943.596.600	25.117.976.000
68	081	BLU BPPT			5.129.694.075						1.611.350	3.960.000		
69	082	LAPAN	274.697.160.497	273.294.510.777	438.714.628.797	289.336.268.309	133.827.260.697	115.950.762.988	27.502.818.120	17.599.656.296	10.290.616.406	14.701.415.720	5.061.665.824	697.549.000
70	082	BLU LAPAN			926.099.095	861.735.628								

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	TANAH		PERALATAN DAN MESIN		GEDUNG DAN BANGUNAN		JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN		ASET TETAP LAINNYA		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	
			31-Des-11	31-Des-10	31-Des-11	31-Des-10	31-Des-11	31-Des-10	31-Des-11	31-Des-10	31-Des-11	31-Des-10	31-Des-11	31-Des-10
71	083	Bakosurtanal	27.226.540.000	27.226.540.000	257.357.289.470	244.723.468.506	72.681.570.175	70.680.319.635	3.136.964.000	3.136.964.000	5.717.470.575	4.987.285.075	106.100.000	106.100.000
72	084	BSN			24.558.221.772	24.652.924.978			72.685.040	61.643.040	1.318.220.961	1.255.469.594	-	
73	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	20.484.294.000	20.484.294.000	45.079.646.953	40.149.184.394	19.345.053.312	19.320.949.144	2.054.571.842	1.807.099.635	2.694.099.377	2.061.882.882	-	
74	086	LAN	510.365.738.729	489.104.858.729	120.914.165.860	97.900.908.887	386.051.686.811	325.171.202.605	13.334.721.910	11.364.027.362	3.117.262.060	3.291.554.680	7.577.055.567	24.164.828.173
75	087	ANRI	215.554.860.398	215.109.462.000	153.677.534.384	131.808.371.589	171.740.978.274	122.050.456.259	13.407.469.629	6.153.735.214	7.626.074.103	7.605.321.035	-	20.558.247.650
76	088	BKN	405.116.266.569	379.070.092.400	272.467.576.232	181.914.553.300	423.341.857.150	389.363.990.641	17.541.491.870	10.273.361.270	750.936.091	1.768.701.246	-	14.572.245.389
77	089	BPKP	1.092.321.261.440	1.092.258.728.440	231.390.995.303	224.599.129.316	614.582.795.730	607.674.094.200	10.579.958.145	9.910.113.891	2.117.282.385	2.031.651.524	-	705.078.889
78	090	Kementerian Perdagangan	644.835.572.202	617.612.554.202	634.061.383.330	598.572.749.280	2.132.435.519.759	1.437.286.230.670	19.536.342.892	19.323.097.392	26.817.280.684	9.712.783.215		17.772.900.920
79	091	Kemen Perumahan Rakyat			35.604.907.043	25.497.137.108	1.908.308.766.910	1.012.489.742.947	748.778.806.202	75.108.572.930				220.710.488.849
80	091	BLU Kemen Perumahan Rakyat			2.533.794.700				8.756.628.136					
81	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	9.238.075.100	9.238.075.100	349.173.336.780	226.966.541.255	269.318.248.659	232.156.498.766						
82	093	KPK	119.363.101.000	119.363.101.000	168.612.565.621	151.890.411.266	106.500.000	-	52.273.044.234	52.273.044.234	44.525.665.290	43.657.175.338		
83	094	BRR NAD - Nias	526.785.787.623	537.280.018.542	771.847.366.434	1.218.014.961.326	1.191.902.923.099	1.883.717.025.421	1.894.182.520.918	2.663.434.576.446	20.906.386.326	17.482.905.274	1.026.146.271.124	926.854.586.811
84	095	DPD	6.768.230.000	-	87.897.485.434	63.958.257.587	368.676.000	-			36.176.598.439	30.875.049.643	4.776.470.776	3.364.786.512
85	100	Komisi Yudisial RI	47.188.389.400	47.188.389.400	29.796.908.077	26.363.320.178	69.839.350.735	68.674.690.857	3.421.134.028	3.421.134.028	557.717.423	557.717.423		
86	103	BNPB	75.865.180.100	-	147.171.025.450	55.672.902.947	7.722.338.200	7.722.338.200	784.107.913	784.107.913	56.401.653.774	4.495.565.120		
87	104	BNP2TKI	11.774.454.050	7.591.566.550	79.452.268.964	39.748.857.300	40.559.234.372	39.447.427.182	5.212.789.609	3.632.757.300	8.938.079.783	7.285.130.733	1.687.814.000	-
88	105	BPLS	795.069.274.203	667.424.782.404	81.077.308.407	78.166.297.459	857.083.100	115.339.100	382.925.034.036	11.797.549.538	412.756.054.162	53.316.739.068	351.711.791.200	845.615.361.619
89	106	LKPP	71.603.260.000	-	33.560.303.859	29.731.002.410					6.868.196.480	6.826.013.310		
90	107	Badan SAR	163.958.935.372	122.484.191.122	1.530.560.632.941	892.143.495.035	320.602.563.525	279.638.267.299	12.803.122.803	7.690.409.172	3.574.108.598	9.297.345.798	-	6.979.772.646
91	108	KPPU			20.094.938.259	2.390.112.130					1.725.221.227	66.796.763		
92	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu			8.242.836.330	-	904.315.000	-			5.703.592.050	-	5.099.881.393	-
93	110	Ombudsman Republik Indonesia			742.935.470	-	14.285.657.624						12.512.710.283	
94	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan		-	26.974.472.350	-		-	93.279.757.300	-	377.777.040	-		-
95	999.07	BUN (Subsidi)			-	15.440.232.672								
96	999.08	BUN (Belanja lainnya)	7.014.566.178.769	4.801.177.817.545	2.400.713.948.863	4.214.115.720.411	893.831.639.647	921.583.657.732	568.813.247.115	3.992.357.542.056	29.426.173.464	187.834.278.027	1.061.688.059.670	1.624.358.631.404
JUMLAH			806.436.356.598.744	565.920.545.473.098	184.852.199.595.042	150.868.673.195.411	152.223.086.918.162	137.042.921.053.205	347.164.628.245.235	276.682.171.786.874	11.517.129.897.802	7.748.128.219.456	65.780.773.332.765	46.038.727.718.084

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2011 Audited			31 Desember 2010 Audited
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
1	004	BPK	1.778.343.870	(1.778.343.870)	-	1.438.766.353
2	005	MA	1.927.628.763	(1.503.819.849)	423.808.914	417.187.715
3	006	Kejaksaan Agung	349.936.815		349.936.815	4.194.000
4	007	Sekretariat Negara	56.095.000	(280.475)	55.814.525	
5	010	Kementerian Dalam Negeri	18.470.089.235		18.470.089.235	243.145.278
6	011	Kementerian Luar Negeri	1.626.260.460	(397.873)	1.625.862.587	4.159.604.528
7	012	Kementerian Pertahanan	4.243.256.085		4.243.256.085	755.434.799
8	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	423.564.049		423.564.049	5.402.005.376
9	015	Kementerian Keuangan	26.443.698	(132.218)	26.311.480	839.473.076
10	018	Kementerian Pertanian	2.157.094.620	(1.500.763.276)	656.331.344	7.949.821
11	019	Kementerian Perindustrian	181.095.000	(905.475)	180.189.525	50.788.940
12	020	Kementerian ESDM	93.357.000	(38.042.960)	55.314.040	489.841.857
13	022	Kementerian Perhubungan	423.135.811	(1.312.745)	421.823.066	-
14	023	Kementerian Pendidikan Nasional	12.350.000		12.350.000	130.000.000
15	023	BLU Kementerian Pendidikan Nasional	124.000.000			
16	024	Kementerian Kesehatan	635.083.757	(67.828.367)	567.255.390	619.468.757
17	024	BLU Kementerian Kesehatan	28.900.000		28.900.000	29.900.000
18	025	Kementerian Agama	-		-	4.099.200
19	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi			-	-
20	027	Kementerian Sosial	659.024.331	(654.206.900)	4.817.431	7.304.000
21	029	Kementerian Kehutanan	-		-	34.960.481
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	-		-	56.866.672
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	59.038.536.783	(359.388.709)	58.679.148.074	13.836.900.470
24	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	39.121.044	(195.605)	38.925.439	46.372.620
25	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	195.289.055	(170.339.055)	24.950.000	200.743.055
26	041	Kementerian Negara BUMN	65.916.662		65.916.662	-
27	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	1.650.000.000		1.650.000.000	1.500.000.000
28	044	Kementerian Negara KUKM	114.403.034		114.403.034	114.403.034
29	054	BPS	149.631.949	(24.754.534)	124.877.415	168.215.253
30	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	-		-	14.200.000
31	056	Badan Pertanahan Nasional	3.299.478.133	(2.190.500.825)	1.108.977.308	2.684.362.999
32	059	Kementerian Kominfo	781.663.184		781.663.184	548.776.102
33	060	Kepolisian RI	439.231.908	(205.540.514)	233.691.394	258.773.094
34	063	BPOM	-		-	15.480.000
35	067	Kementerian Negara PDT	67.000.000		67.000.000	76.000.000
36	079	LIPI	53.496.444.530	(53.479.479.764)	16.964.766	18.030.621
37	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20.265.332.478	(20.223.716.603)	41.615.875	3.029.824.262
38	081	BPPT	49.718.310.377	(49.647.786.384)	70.523.993	-
39	082	LAPAN	1.173.602.576	(75.925)	1.173.526.651	53.385.000
40	083	Bakosurtanal	22.500.000	(112.500)	22.387.500	29.700.000
41	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	34.676.256	(173.381)	34.502.875	40.676.256
42	087	ANRI	-		-	2.944.162
43	088	BKN	305.950.945	(305.950.945)	-	-
44	089	BPPK	24.843.968.482	(24.843.968.482)	-	14.000.000
45	090	Kementerian Perdagangan	699.881.250	(3.428.881)	696.452.369	866.488.652
46	108	KPPU	9.827.278	(8.633.278)	1.194.000	-
47	999.08	BUN (Belanja lainnya)	-	-	-	14.477.928
TOTAL			**249.626.424.418**	**(157.010.079.393)**	**92.492.345.025**	**38.224.744.361**

ASET TAK BERWUJUD DAN ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	ASET TAK BERWUJUD		ASET LAIN-LAIN	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited
1	001	MPR	933.829.540	797.032.440	807.641.200	204.743.200
2	002	DPR	9.277.485.378	9.074.295.579	27.486.408.656	27.486.408.656
3	004	BPK	46.281.373.781	24.641.047.711	26.300.729.803	15.128.960.140
4	005	MA	16.585.257.378	10.770.367.358	14.826.970.294	12.307.983.577
5	006	Kejaksaan Agung	2.494.978.123	2.118.506.877	5.917.865.224	11.746.951.479.945
6	007	Sekretariat Negara	12.662.391.404	10.424.156.289	1.948.657.588.647	2.022.784.610.814
7	007	BLU Sekretariat Negara	224.599.000	140.981.500	651.885.105.326	683.753.623.846
8	010	Kementerian Dalam Negeri	751.443.921.142	209.441.563.034	107.135.811.691	20.965.348.383
9	011	Kementerian Luar Negeri	10.758.120.581	5.498.699.711	187.706.944.536	302.743.716.598
10	012	Kementerian Pertahanan	262.525.510.568	141.059.729.324	3.598.464.347.679	3.098.320.272.974
11	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	239.237.022.128	154.267.912.424	28.952.931.315	5.174.124.353
12	015	Kementerian Keuangan	474.893.975.396	360.495.002.682	248.393.281.860	548.617.378.647
13	015	BLU Kementerian Keuangan	2.898.446.790	808.658.790	75.164.492.014	70.416.164.384
14	018	Kementerian Pertanian	19.234.185.300	18.203.123.745	251.030.604.245	297.702.764.931
15	018	BLU Kementerian Pertanian	4.432.790	-	240.818.015	
16	019	Kementerian Perindustrian	9.309.730.559	4.947.804.558	6.518.045.709	4.210.124.340
17	020	Kementerian ESDM	1.631.499.801.236	1.591.551.685.286	712.189.250.764	7.908.591.570.983
18	020	BLU Kementerian ESDM			-	1.993.187.600
19	022	Kementerian Perhubungan	1.465.590.727.842	1.174.669.428.410	1.197.499.645.717	144.219.272.102
20	022	BLU Kementerian Perhubungan	24.093.295.916	15.999.395.216	112.200.000	-
21	023	Kementerian Pendidikan Nasional	290.717.673.533	218.851.094.814	13.912.326.313.272	13.409.756.256.271
22	023	BLU Kementerian Pendidikan Nasional	63.824.711.360	24.824.973.156	19.613.463.891	9.822.491.729
23	024	Kementerian Kesehatan	42.517.391.731	30.921.566.051	8.788.274.613.189	8.867.996.267.030
24	024	BLU Kementerian Kesehatan	23.372.871.313	22.082.784.495	66.105.923.633	38.627.525.470
25	025	Kementerian Agama	40.990.665.207	27.180.911.757	46.617.514.732	24.247.056.900
26	025	BLU Kementerian Agama	15.851.399.401	10.743.020.664	3.114.844.489	2.573.328.963
27	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.357.200.673	6.944.287.499	2.291.751.851.101	2.723.866.310.357
28	026	BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi	233.452.200	4.270.000	139.136.000	139.136.000
29	027	Kementerian Sosial	16.620.459.754	8.709.543.585	21.488.713.387	25.488.943.500
30	029	Kementerian Kehutanan	53.811.575.679	36.928.890.597	33.879.700.436	1.891.868.394.313
31	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	25.670.748.726	16.745.228.671	95.378.157.264	47.548.968.261
32	033	Kementerian Pekerjaan Umum	4.251.358.800.389	3.292.582.454.785	475.711.122.701	375.876.824.911
33	033	BLU Kementerian Pekerjaan Umum	-	616.990.000		
34	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	25.090.001.130	16.824.975.580	1.277.717.821	282.085.440
35	035	Kemenko Bidang Perekonomian	217.680.750	169.492.000	-	
36	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.182.335.590	905.443.000		207.104.000
37	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	12.132.642.500	7.617.556.000	8.483.623.341	8.458.675.461
38	041	Kementerian Negara BUMN	15.253.927.692	13.881.435.692	4.696.412.561	8.309.794.751
39	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	41.678.449.646	41.266.892.966	34.041.634.991	28.562.529.880
40	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	12.324.441.685	5.294.998.600	5.229.223.412	3.359.504.049
41	044	Kementerian Negara KUKM	10.222.932.609	1.611.100.000	61.818.508.592	64.526.612.621
42	044	BLU Kementerian Negara KUKM	13.030.938.000	12.760.249.500	25.909.000	25.909.000
43	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	7.250.505.800	5.230.502.800	344.949.647	1.469.942.596
44	048	Kementerian Negara PAN	2.004.023.720	1.976.023.720	236.261.898	1.096.893.983
45	050	BIN	379.007.042.708	370.423.530.078	3.183.187.009	-
46	051	LSN	96.884.035.889	93.526.460.291		
47	052	Dewan Ketahanan Nasional	3.576.883.314	2.450.166.311	-	4.464.150.937
48	054	BPS	62.265.274.936	56.159.351.204	35.205.833.268	27.846.906.848
49	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	19.363.875.078	18.996.808.368	69.073.284.203	64.275.549.979
50	056	Badan Pertanahan Nasional	136.381.563.351	65.312.100.571	20.422.991.234	7.395.621.452
51	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	53.787.976.992	45.855.109.542	583.937.583	583.937.583
52	059	Kementerian Kominfo	89.461.851.871	57.642.763.759	39.460.355.542	28.619.058.739
53	059	BLU Kementerian Kominfo	4.910.128.300	4.374.290.800		
54	060	Kepolisian RI	208.820.615.494	85.907.403.165	244.662.565.080	149.028.670.636
55	063	BPOM	8.072.253.591	3.969.278.825	5.625.280.748	5.328.909.088
56	064	Lembaga Ketahanan Nasional	75.497.112.203	75.497.112.203	1.621.497.045	80.922.000
57	065	BKPM	83.041.567.078	76.127.693.978	76.615.072	76.615.072
58	066	BNN	52.616.875.958	11.815.378.208	98.515.035.915	98.517.488.446
59	067	Kementerian Negara PDT	14.000.000	14.000.000	2.541.108.400	2.541.108.400
60	068	BKKBN	17.073.786.308	10.714.523.000	2.765.612.169	2.410.165.506
61	074	Komnas HAM	1.667.352.089	1.359.577.089		
62	075	BMG	97.524.923.063	54.981.080.131	16.467.950.870	15.130.688.435
63	076	KPU	903.866.495	150.634.295	8.044.921.229	1.788.308.577
64	077	Mahkamah Konstitusi RI	5.479.346.974	3.625.357.250	3.633.832.467	3.005.724.467
65	078	PPATK	4.725.432.026	8.430.829.231	48.437.300	
66	079	LIPI	7.576.012.881	8.472.678.875	16.685.127.770	24.265.455.335
67	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	23.243.139.814	18.145.375.230	6.036.509.332	25.170.014.900
68	081	BPPT	58.113.195.929	28.068.832.367	2.801.395.090	70.570.822.802
69	081	BLU BPPT	34.727.000	-	2.647.606.204	757.472.375

ASET TAK BERWUJUD DAN ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

			ASET TAK BERWUJUD		ASET LAIN-LAIN	
70	082	LAPAN	6.463.404.447	992.304.847	167.348.384	118.222.863
71	082	BLU LAPAN	3.362.000	3.362.000		
72	083	Bakosurtanal	398.981.655.253	342.561.778.731	681.042.662	7.704.531.609
73	084	BSN	1.239.937.750	1.031.162.750	962.310.206	109.747.000
74	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	230.203.450	103.330.820	1.639.059.940	1.422.982.940
75	086	LAN	2.970.828.600	2.642.111.800	260.685.379	1.397.949.748
76	087	ANRI	11.324.654.375	9.319.902.575	8.282.196.849	8.282.196.849
77	088	BKN	145.791.342.374	10.352.359.050	6.391.879.179	120.240.933.031
78	089	BPKP	9.726.730.615	9.708.080.615	4.290.136.128	48.732.344.172
79	090	Kementerian Perdagangan	114.569.882.280	50.116.365.597	2.989.840.702	804.372.852
80	091	Kemen Perumahan Rakyat	46.486.627.553	20.785.952.253	542.230.677.038	544.253.548.508
81	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	17.468.139.900	17.057.839.900	129.981.308.254	122.200.656.654
82	093	KPK	12.154.550.178	11.169.779.728	1.098.530.337	378.996.590.651
83	093	BRR NAD - Nias			485.603.480.566	669.869.028.122
84	095	DPD	4.224.326.072	2.353.628.580	3.025.000	83.301.000
85	100	Komisi Yudisial RI	1.306.201.600	1.300.201.600	209.275.875	
86	103	BNPB	23.844.661.884	22.865.116.816	129.924.581.806	32.680.335.000
87	104	BNP2TKI	5.957.914.170	3.987.006.145	5.940.000	
88	105	BPLS	449.256.147	145.009.147	160.952.430	381.675.855
89	106	LKPP	6.444.211.246	5.166.858.746	66.473.000	
90	107	Badan SAR	23.761.391.102	1.415.150.000	52.021.000.336	51.688.284.109
91	108	KPPU	6.988.859.346	1.258.809.074	1.988.511.148	-
92	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	16.326.182.650	-		
93	110	Ombudsman Republik Indonesia	85.000.000	-		
94	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	55.377.790.710	-		
95	999.03	BUN (Investasi)			142.127.657.545	-
96	999.04	BUN (RDI+DIT. SMI)			19.419.108.122.985	23.032.603.595.202
98	999.08	BUN (Belanja lainnya)			46.701.991.689	21.012.193.813
99	999.99	BUN (Transaksi Khusus)			49.476.131.894.229	-
100	999.993	BUN (PT PPA)			-	2.614.411.741.232
101	999.994	BUN (Eks PPA yang diserahkan ke MK)			-	1.749.873.770.941
102	999.995	BUN (DJKN)				29.203.047.197.602
103	999.996	BUN (KKKS)				145.503.297.541.523
104	999.997	BUN (ASET PERTAMINA)	-	215.379.000		44.283.237.799.177
105	999.08	BUN (Belanja lainnya)	23.734.946.611	195.292.149.235		
TOTAL			**12.406.618.813.595**	**9.351.448.050.646**	**105.992.977.283.250**	**303.373.990.422.989**

ASET TANAH KKKS YANG DICATAT PADA NERACA LKPP 2011

No.	UNIT / KKKS	LOKASI/BLOCK	SALDO PER DESEMBER 2011		KETERANGAN
			LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	TOTAL INDONESIA E&P	BALIKPAPAN	9.705.925	546.054.937.372,00	
2	VICO SANGA SANGA	SANGA-SANGA	1.154.632	44.075.198.000,00	
3	PT. MEDCO E & P TARAKAN	TARAKAN	340.635	28.962.632.000,00	
4	PT PERTAMINA EP AREA CEPU	AREA CEPU	42.055	6.392.360.000,00	
5	PT. CHEVRON INDONESIA COMPANY	BALIKPAPAN	14.459.988	261.863.240.500,00	
6	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	ROKAN	437.675.097	10.592.439.949.130,00	
7	PT. KONDUR PETROLEUM SA	PEKANBARU	6.981.158	230.121.681.000,00	
8	PT. PETROSELAT LTD	SELAT PANJANG	411.388	10.602.840.000,00	
9	PT. MEDCO E & P INDONESIA	PEKANBARU - PELALAWAN	6.195.852	84.653.336.280,00	
10	PT. KALILA (BENTU) LTD.	PELALAWAN & PEKANBARU	361.235	1.945.175.000,00	
11	PT. KALILA (KORINCI BARU) LTD.	PEKANBARU	464.088	7.592.592.400,00	
12	PT. PETROCHINA INT. BERMUDA	SORONG	3.862.621	7.307.770.750,00	
13	PT. PETROCHINA SALAWATI	SALAWATI	1.660.974	2.654.097.310,00	
14	KANGEAN ENERGY	KANGEAN BLOCK	898.504	40.817.865.860,00	
15	PT. MEDCO E & P RIMAU	RIMAU BLOCK	1.497.087	5.562.224.000,00	
16	MOBIL CEPU LTD	BLORA & BOJONEGORO	587.573	49.679.658.000,00	
17	EXXONMOBIL OIL INDONESIA	BLOCK B ACEH	504.273	10.501.230.000,00	
18	PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA	SUMATERA	12.540.916	932.092.427.000,00	
19	CONOCOPHILLIPS SOUTH JAMBI LTD	JAMBI	25.887.874	3.400.038.160,00	
20	VICO UNIT SEMBERAH	SEMBERAH	12.392.826	51.415.100.000,00	
21	VICO UNIT MUTIARA	LAPANGAN PAMAGUAN	5.689.285	20.536.437.113,00	
22	VICO UNIT MUTIARA	LAPANGAN MUTIARA	11.686.331	64.787.724.558,00	
23	VICO UNIT BADAK & NILAM	BADAK DAN NILAM	79.897.257	186.273.424.543,00	
24	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO	BANGKO BLOCK	1.014.425	19.021.937.352,00	
25	PT. MEDCO E & P INDONESIA	LEMATANG BLOCK	962.044	3.549.632.633,00	
26	JOB HESS JAMBI MERANG	JAMBI	871.217	6.029.860.000,00	
27	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE - PENDOPO	PENDOPO	955.055	31.627.815.000,00	
28	JOB PERTAMINA JAVA - TUBAN	TUBAN	569.945	66.459.346.700,00	
29	CONOCOPHILLIPS GRISSIK LTD	GRISSIK - MUSI BANYUASIN	685.838	502.869.000,00	
30	PT. MEDCO E & P INDONESIA	CENTRAL SUMATERA/MUSI RAWAS	289.342	2.112.767.000,00	
31	JOB PERTAMINA TALISMAN	OGAN KOMERING	482.923	2.258.798.000,00	
32	PT. BOB BUMI SIAK PUSAKO	SIAK - PEKANBARU	132.829	4.100.448.000,00	
33	TAC PERTAMINA BWP MERUAP LTD	SAROLANGUN	301.743	3.657.675.075,00	
34	PT. LAPINDO BRANTAS INC.	SIDOARJO	447.275	33.296.382.882,00	
35	JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI	BLOCK TOILI- SULAWESI	343.689	3.274.558.000,00	
36	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA - SIAK	SIAK - PEKANBARU	4.254.516	9.403.683.400,00	
37	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG)	SENGKANG	567.485	23.890.286.000,00	
38	PEARL OIL TUNGKAL LTD	TUNGKAL BLOCK - JAMBI	353.137	1.041.880.133,00	
39	PT. PETROCHINA INT JABUNG	JABUNG BLOCK - JAMBI	8.449.765	323.833.352.258,00	
40	KODECO ENERGY LTD.	GRESIK	39.520	1.068.469.575,00	
41	HESS INDONESIA PANGKAH	GRESIK	286.675	63.497.000.000,00	
	TOTAL			**13.788.358.699.984,00**	
42	PT PERTAMINA EP REGION JAWA BAGIAN E	JAWA BAGIAN BARAT	-	68.597.208.000,00	Hasil IP 2011
43	Chevron Indonesia Company	East Kalimantan	11.924.889	475.008.806.000,00	Hasil IP 2011
44	PT PERTAMINA EP Cepu		89.369	30.319.456.000,00	Hasil IP 2011
	TOTAL			**573.925.470.000,00**	
	TOTAL		**667.919.254**	**14.362.284.169.984,00**	

kurs 1 US$ = Rp9.400

DAFTAR ASET NON TANAH KKKS

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Aset Non Tanah	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KKKS PRODUKSI					
1	BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Coastal Plain Pekanbaru	6.765	223.156.225	962.528.383.135
2	BP Berau Ltd.	Berau	221	625.356.492	6.420.196.686.910
3	BP Muturi Ltd.	Muturi			
4	BP WIRIAGAR	Wiriagar			
5	Camar Resources Canada Ltd.	Bawean	159	47.546.153	207.800.598.620
6	Chevron Indonesia Company (Cico)*	East Kalimantan	4.201	736.851.012	3.705.065.244.719
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait	97	435.514.026	2.373.190.921.407
8	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	701	65.428.478	355.539.808.623
9	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	1.681	704.397.899	4.307.496.957.285
10	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	1.141	867.098.247	5.402.435.174.739
11	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B	255	47.765.930	278.741.845.786
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	1.972	2.288.497.258	20.830.850.030.970
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.	Sengkang	501	17.159.299	74.092.281.835
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Block B	4.865	1.122.134.334	4.977.143.088.940
15	Hess (Indonesia Pangkah) Ltd.	Pangkah	272	347.575.097	3.519.113.744.796
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo	41	8.098.151	75.912.082.730
17	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd.	North Gebang	188	39.865.582	167.223.579.061
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro-Toili	28	10.653.763	116.093.590.199
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	1.007	103.963.783	696.119.418.879
20	JOB Pertamina-PetroChina Salawati	Kepala Burung	205	22.220.684	129.918.609.542
21	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering	1.001	53.971.488	302.934.160.227
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang	285	590.664	5.575.792.147
23	Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru	102	10.269.906	88.309.436.143
24	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Bula	900	6.028.908	31.338.286.668
25	Kangean Energy Indonesia	Kangean	383	339.216.478	962.929.613.541
26	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	339	221.500.439	2.090.598.649.436
27	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	1.314	170.678.511	870.230.911.831
28	Lapindo Brantas Inc.	Brantas	219	18.810.200	128.101.350.329
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu	1.317	88.533.669	826.944.954.045
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	589	437.154.022	2.429.479.131.736
31	MontD'Or Tungkal Oil Ltd.	Tungkal	57	14.310.596	132.233.579.776
32	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	Offshore Northwest Java	15	358.564.948	2.085.904.759.378
33	Perusda Benuo Taka	Wailawi	521	8.141.964	38.980.990.984
34	PetroChina International (Bangko) Ltd.	Bangko	23	409.011	3.827.014.250
35	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin	2.863	76.970.452	386.189.722.754
36	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	5.632	520.951.856	4.379.413.803.338
37	Petroselat Ltd.	Selat Panjang	80	4.795.594	36.406.235.432
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A	614	305.126.859	1.930.334.016.637
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak	300	11.355.965	48.073.381.431
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	49.437	3.081.069.208	17.533.562.672.650
41	PT.SPR Langgak	Mountain Front Kuantan	90	3.689.212	21.743.118.651
42	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera	1.123	125.149.323	945.928.371.658
43	PT Medco E&P Lematang	Lematang	27	72.692.535	632.459.522.762
44	PT Medco E&P Malaka	Block A	1	32.080	113.338.000
45	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau	2.411	179.939.127	1.257.192.761.282
46	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	186	30.446.205	211.008.547.572
47	PT Pertamina EP*	Indonesia	3.963	639.296.217	5.666.761.000.475
48	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura	13	15.988.607	148.694.046.377
49	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang	43	94.343.073	904.968.630.104
50	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	707	379.049.130	1.881.318.722.421
51	Total E&P Indonesie	Mahakam	7.032	3.237.019.830	28.778.336.795.030
52	Total E&P Indonesie	Tengah Area	54	22.335.338	212.193.394.037
53	Triangle Pase Inc	Pase	37	60.313.435	427.090.461.000
54	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	3.672	1.199.777.816	6.125.994.488.706
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			109.650	19.501.805.079	136.124.633.708.984
KKKS EKSPLORASI					
55	Anadarko Indonesia Company	North East Madura II	12	30.121,00	274.366.543,00
56	Anadarko Indonesia Nunukan Company	Nunukan	5	151.231,00	1.687.112.240,00
57	Anadarko Papalang Ltd.	Papalang	14	23.778	215.381.124
58	Anadarko Popodi Ltd.	Popodi	14	23.778	215.381.124

59	Bungamas International Co.	Bungamas	23	186.894	1.673.658.210
60	Elnusa Bangkanai Energy Ltd.	Bangkanai	21	25.053,00	193.042.264,00
61	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat			
62	ENI Bukat Ltd.	Bukat	77	295.765	1.888.014.066
63	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh	9	49.646,00	298.009.358
64	ENI Muara Bakau B.V.	Muara Bakau	5	7.639	69.692.883
65	ENI Bulungan B.V	Bulungan			
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mandar)	Mandar	1	313.721,59	3.435.251.410,50
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Suruman	Surumana	4	319.798,48	3.493.282.376,00
68	Husky Oil (Madura) Ltd.	Madura Strait	95	31.590	304.215.294
69	Husky Oil North Sumbawa Ltd	North Sumbawa	64	158.276	1.508.064.422
70	Inpex Masela Ltd	Masaela	43	104.713	885.568.533
71	Irian Petroleum Ltd	Manokwari	50	45.813	379.235.780
72	Kalila (Bentu) Ltd.	Bentu Block	31	78.098	697.871.754
73	AED Rombebai B.V	Rombebai	90	177.080	1.636.022.894
74	Pearl Oil (Sebuku)	Sebuku	18	240.684	2.264.167.432
75	Transworld Seruway Exploration LTD.		89	100.221	944.079.540
76	BP Bomberai Ltd	Bomberai			
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			665	2.363.900	22.062.417.248
TOTAL ASET			110.315	19.504.168.979	136.146.696.126.232

SUMUR TIDAK DIGUNAKAN

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Sumur Tidak Digunakan	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KKKS PRODUKSI					
1	BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Coastal Plain Pekanbaru			
2	BP Berau Ltd.	Berau			
3	BP Muturi Ltd.	Muturi	1	2.716.113	31.439.004.734
4	BP WIRIAGAR	Wiriagar			
5	Camar Resources Canada Ltd.	Bawean			
6	Chevron Indonesia Company (Cico)*	East Kalimantan	2	2.611.557	11.813.911.128
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait			
8	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	11	3.720.663	11.493.492.728
9	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	125	41.544.710	113.843.971.891
10	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	15	2.193.677	6.100.083.943
11	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B			
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	2	374.762	947.188.387
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.	Sengkang			
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Block B	12	10.331.467	36.029.977.761
15	Hess (Indonesia Pangkah) Ltd.	Pangkah			
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo			
17	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd.	North Gebang			
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro-Toili			
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban			
20	JOB Pertamina-PetroChina Salawati	Kepala Burung			
21	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering			
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang			
23	Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru			
24	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Bula			
25	Kangean Energy Indonesia	Kangean			
26	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	11	3.805.010	34.872.916.650
27	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	2	523.322	2.311.117.255
28	Lapindo Brantas Inc.	Brantas			
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu			
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore			
31	MontD'Or Tungkal Oil Ltd.	Tungkal			
32	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	Offshore Northwest Java	4	1.002.456	1.521.997.115
33	Perusda Benuo Taka	Wailawi			
34	PetroChina International (Bangko) Ltd.	Bangko	15	1.504.467	13.867.595.915
35	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin			
36	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	2	329.981	3.157.272.500
37	Petroselat Ltd.	Selat Panjang	1	96.045	442.817.603
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A			
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak			
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	255	13.653.673,00	34.841.928.737,00
41	PT.SPR Langgak	Mountain Front Kuantan			
42	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera			
43	PT Medco E&P Lematang	Lematang			
44	PT Medco E&P Malaka	Block A			
45	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau			
46	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan			
47	PT Pertamina EP*	Indonesia			
48	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura			
49	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang			
50	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	21	13.782.983	60.608.368.588
51	Total E&P Indonesie	Mahakam	131	96.026.008	750.802.929.482
52	Total E&P Indonesie	Tengah Area			
53	Triangle Pase Inc	Pase			
54	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	13	2.058.840	5.877.521.789
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			623	196.275.734	1.119.972.096.205
KKKS EKSPLORASI					
55	Anadarko Indonesia Company	North East Madura II			
56	Anadarko Indonesia Nunukan Company	Nunukan			
57	Anadarko Papalang Ltd.	Papalang			
58	Anadarko Popodi Ltd.	Popodi			

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Sumur Tidak Digunakan	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
59	Bungamas International Co.	Bungamas			
60	Elnusa Bangkanai Energy Ltd.	Bangkanai			
61	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat			
62	ENI Bukat Ltd.	Bukat			
63	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh			
64	ENI Muara Bakau B.V.	Muara Bakau			
65	ENI Bulungan B.V	Bulungan			
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mandar)	Mandar			
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Suruman	Surumana			
68	Husky Oil (Madura) Ltd.	Madura Strait			
69	Husky Oil North Sumbawa Ltd	North Sumbawa			
70	Inpex Masela Ltd	Masaela			
71	Irian Petroleum Ltd	Manokwari			
72	Kalila (Bentu) Ltd.	Bentu Block			
73	AED Rombebai B.V	Rombebai			
74	Pearl Oil (Sebuku)	Sebuku			
75	Transworld Seruway Exploration LTD.				
76	BP Bomberai Ltd	Bomberai			
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			-	-	-
TOTAL ASET			623	196.275.734	1.119.972.096.205

SUBSEQUENT EXPENDITURE

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Subsequent Expenditure	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KKKS PRODUKSI					
1	BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Coastal Plain Pekanbaru			
2	BP Berau Ltd.	Berau			
3	BP Muturi Ltd.	Muturi			
4	BP WIRIAGAR	Wiriagar			
5	Camar Resources Canada Ltd.	Bawean			
6	Chevron Indonesia Company (Cico)*	East Kalimantan	263	28.194.139	120.452.191.193
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait	3	146.166	1.624.895.985
8	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	935	41.668.123	223.138.019.700
9	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	1.488	582.443.438	1.961.449.898.421
10	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	209	63.759.728	542.311.928.143
11	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B	5	130.870	735.882.869
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	682	2.365.756.506	8.206.056.396.895
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.	Sengkang	2	1.990	10.900.152
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Block B	761	144.943.768	599.051.006.339
15	Hess (Indonesia Pangkah) Ltd.	Pangkah			
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo			
17	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd.	North Gebang			
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro-Tolli			
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	86	3.031.300	7.847.750.451
20	JOB Pertamina-PetroChina Salawati	Kepala Burung	4	1.384.838	12.855.330.061
21	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering	111	3.772.002	20.828.753.318
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang			
23	Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru	5	747.131	7.136.577.595
24	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Bula	2	41.155	201.974.467
25	Kangean Energy Indonesia	Kangean	88	342.203	3.138.526.334
26	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	27	14.223.847	140.742.033.423
27	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	558	44.034.331	225.539.973.243
28	Lapindo Brantas Inc.	Brantas	13	1.862.015	17.055.044.587
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu	3	6.764	41.262.952
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	11	1.213.919	8.191.499.850
31	MontD'Or Tungkal Oil Ltd.	Tungkal	14	243.351	2.374.006.133
32	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	Offshore Northwest Java	5.036	2.046.606.392	8.586.206.989.619
33	Perusda Benuo Taka	Wailawi			
34	PetroChina International (Bangko) Ltd.	Bangko			
35	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin	437	41.166.063	145.816.269.059
36	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	1.270	148.154.702	1.399.370.950.720
37	Petroselat Ltd.	Selat Panjang	1	3.790	35.000.650
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A	162	114.834.929	1.610.055.947.049
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak			
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan			
41	PT.SPR Langgak	Mountain Front Kuantan			
42	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera			
43	PT Medco E&P Lematang	Lematang			
44	PT Medco E&P Malaka	Block A			
45	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau	9	1.515.128	16.527.649.948
46	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan			
47	PT Pertamina EP*	Indonesia			
48	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura	10	12.199.946	113.459.502.248
49	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang	1	1.475	16.217.625
50	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	6	26.495	27.320.718
51	Total E&P Indonesie	Mahakam	1.555	2.869.068.268	19.998.774.266.861
52	Total E&P Indonesie	Tengah Area	3	20.829.854	196.196.396.145
53	Triangle Pase Inc	Pase			
54	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	133	37.069.898	178.227.862.741
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			13.893	8.589.424.524	44.345.498.225.493
KKKS EKSPLORASI					
55	Anadarko Indonesia Company	North East Madura II			
56	Anadarko Indonesia Nunukan Company	Nunukan			
57	Anadarko Papalang Ltd.	Papalang			
58	Anadarko Popodi Ltd.	Popodi			
59	Bungamas International Co.	Bungamas			
60	Elnusa Bangkanai Energy Ltd.	Bangkanai			
61	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat			
62	ENI Bukat Ltd.	Bukat			
63	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh			
64	ENI Muara Bakau B.V.	Muara Bakau			
65	ENI Bulungan B.V	Bulungan			
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mandar) Limit	Mandar			

SUBSEQUENT EXPENDITURE

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Subsequent Expenditure	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surumana Limi	Surumana			
68	Husky Oil (Madura) Ltd.	Madura Strait			
69	Husky Oil North Sumbawa Ltd	North Sumbawa			
70	Inpex Masela Ltd	Masaela			
71	Irian Petroleum Ltd	Manokwari			
72	Kalila (Bentu) Ltd.	Bentu Block			
73	AED Rombebai B.V	Rombebai			
74	Pearl Oil (Sebuku)	Sebuku	4	6.179	57.124.884
75	Transworld Seruway Exploration LTD.				
76	BP Bomberai Ltd	Bomberai			
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			4	6.179	57.124.884
TOTAL ASET			**13.897**	**8.589.430.703**	**44.345.555.350.377**

ASET RUSAK BERAT

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Aset Rusak Berat	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KKKS PRODUKSI					
1	BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Coastal Plain Pekanbaru	979	18.667.081	29.583.750.371
2	BP Berau Ltd.	Berau	7	687.823	835.940.459
3	BP Muturi Ltd.	Muturi			
4	BP WIRIAGAR	Wiriagar			
5	Camar Resources Canada Ltd.	Bawean	26	1091276	1627215306
6	Chevron Indonesia Company (Cico)*	East Kalimantan	1.446	10.154.570	27.078.758.965
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait			
8	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	56	1.004.502	1.413.888.767
9	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	1.164	25.495.803	43.732.641.273
10	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	26,00	2.678.951,00	4.317.686.254,18
11	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B	1	1.295	1.663.298
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	1.958,00	11.020.689,00	23.997.017.678
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.	Sengkang	69	995107,05	1520561964
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Block B	1.697	76.377.427	117.377.647.479
15	Hess (Indonesia Pangkah) Ltd.	Pangkah			
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo	10	1.107.629	10.252.883.251
17	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd.	North Gebang	3	4.404	7.795.000
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro-Toili			
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	232	723.431	1.272.693.074
20	JOB Pertamina-PetroChina Salawati	Kepala Burung	101	3.274.604	13.949.906.189
21	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering	314	2339618	3419681606
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang	31	29.093	272.586.687
23	Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru			
24	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Bula	524	2.356.035,21	5.336.633.286,70
25	Kangean Energy Indonesia	Kangean	98	1.682.082	2.039.641.273
26	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	83	29.936.465	130.715.199.760
27	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	54	308.736	1.470.408.642
28	Lapindo Brantas Inc.	Brantas	20	111.186,00	182.741.529,00
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu	37	264.432	438.698.838
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	13,00	37.173.535,82	56.565.504.881,08
31	MontD'Or Tungkal Oil Ltd.	Tungkal			
32	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	Offshore Northwest Java	5,00	143.308.095,00	217.169.663.104
33	Perusda Benuo Taka	Wailawi			
34	PetroChina International (Bangko) Ltd.	Bangko			
35	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin	619	4.164.022,58	7.136.416.368,00
36	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	456	3.674.564,00	8.007.919.882
37	Petroselat Ltd.	Selat Panjang	65	118.537	142.878.748
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A	89,00	373.497,33	276.558.568,44
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak	13	1.741.120	2.631.649.862
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	9.046	199.048.040,89	339.964.862.902,76
41	PT.SPR Langgak	Mountain Front Kuantan			
42	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera	283,00	952.461,57	1.381.652.019,00
43	PT Medco E&P Lematang	Lematang	6	2.336.571	3.506.379.367
44	PT Medco E&P Malaka	Block A	46	363.366	344.621.000
45	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau	178	3.960.450	7.131.641.551
46	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	39	395.357	878.498.152
47	PT Pertamina EP*	Indonesia	217	6858099,447	40.706.601.782,88
48	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura			
49	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang			
50	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	221	910.478	1.756.675.853
51	Total E&P Indonesie	Mahakam	312,00	22.443.423,42	73.756.730.463,13
52	Total E&P Indonesie	Tengah Area			
53	Triangle Pase Inc	Pase	17	9.876.713	18.410.547.185
54	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	858	58.832.439	111.929.946.792
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			21.419	686.843.001	1.312.544.389.430
KKKS EKSPLORASI					
55	Anadarko Indonesia Company	North East Madura II			
56	Anadarko Indonesia Nunukan Company	Nunukan			
57	Anadarko Papalang Ltd.	Papalang			
58	Anadarko Popodi Ltd.	Popodi			
59	Bungamas International Co.	Bungamas			
60	Elnusa Bangkanai Energy Ltd.	Bangkanai			
61	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat	2	4.310	5.255.989
62	ENI Bukat Ltd.	Bukat	11	137.432	165.413.966
63	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh	46	245.635	299.866.658
64	ENI Muara Bakau B.V.	Muara Bakau			
65	ENI Bulungan B.V	Bulungan			
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mandar) Limit	Mandar			

ASET RUSAK BERAT

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Aset Rusak Berat	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surumana Limi	Surumana			
68	Husky Oil (Madura) Ltd.	Madura Strait			
69	Husky Oil North Sumbawa Ltd	North Sumbawa	2	2.562	24.586.781
70	Inpex Masela Ltd	Masaela	4	3.835	26.483.037
71	Irian Petroleum Ltd	Manokwari	18	23.633	215.740.729
72	Kalila (Bentu) Ltd.	Bentu Block			
73	AED Rombebai B.V	Rombebai	1	977	1.084.954
74	Pearl Oil (Sebuku)	Sebuku	1	2.275	20.083.700
75	Transworld Seruway Exploration LTD.		1	552	6.008.154
76	BP Bomberai Ltd	Bomberai			
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			86	421.212	764.523.968
TOTAL ASET			21.505	687.264.212	1.313.308.913.398

ASET PEROLEHAN KKKS TAHUN 2011

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Per 31 Desember 2011 Nilai Perolehan
KKKS PRODUKSI			
1	BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Coastal Plain Pekanbaru	1.029.159,95
2	BP Berau Ltd.	Berau	2.155.336,21
3	BP Muturi Ltd.	Muturi	
4	BP WIRIAGAR	Wiriagar	
5	Camar Resources Canada Ltd.	Bawean	220.523,64
6	Chevron Indonesia Company (Cico)	East Kalimantan	42.116.715,43
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait	37.542.390,36
8	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	1.756.858,98
9	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	954.928.239,11
10	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	58.628.000,00
11	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B	42.962,00
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	72.761.297,00
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.	Sengkang	504.468,12
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Block B	1.173.815,48
15	Hess (Indonesia Pangkah) Ltd.	Pangkah	83.779.427,70
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo	-
17	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd.	Gebang	-
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro-Toili	-
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	109.354,45
20	JOB Pertamina-PetroChina Salawati	Kepala Burung	-
21	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering	4.418.071,30
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang	66.740,44
23	Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru	1.163,19
24	Kalila (Bentu) Ltd.	Bentu Block	2.517.919,03
25	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Bula	53.827,98
26	Kangean Energy Indonesia	Kangean	2.012,00
27	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	5.907.761,65
28	Lapindo Brantas Inc.	Brantas	50.006,34
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu	4.260.280,44
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	682.779,41
31	MontD'Or Tungkal Oil Ltd.	Tungkal	65.941,23
32	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	Offshore Northwest Java	16.886.799,20
33	Perusda Benuo Taka	Wailawi	1.471,00
34	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin	2.699.419,47
35	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	15.905.297,78
36	PetroChina International (Bangko) Ltd.	Bangko	-
37	Petroselat Ltd.	Selat Panjang	56.196,68
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A	552.565.876,01
39	PT Pertamina Hulu Energi WMO	West Madura	42.321.348,18
40	PT. SPR Langgak	Mountain Front Kuantan	-
41	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak	1.281.705,51
42	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	126.579.560,86
43	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera	653.806,69
44	PT Medco E&P Lematang	Lematang	126.991,60
45	PT Medco E&P Malaka	Block A	-
46	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau	8.549.165,67
47	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	8.250,00
48	PT Pertamina EP	Indonesia	67.173.381,57
49	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura	-
50	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang	-
51	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	850.000,00
52	Total E&P Indonesie	Mahakam	224.838.861,92
53	Total E&P Indonesie	Tengah	768.941,50
54	Triangle Pase Inc	Pase	1.118.663,59
55	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	45.402.359,00
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			**2.382.563.147,67**
KKKS EKSPLORASI			

ASET PEROLEHAN KKKS TAHUN 2011

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Per 31 Desember 2011 Nilai Perolehan
KKKS PRODUKSI			
56	Anadarko Indonesia Company	North East Madura II	-
57	Anadarko Indonesia Nunukan Company	Nunukan	-
58	Anadarko Papalang Ltd.	Papalang	-
59	Anadarko Popodi Ltd.	Popodi	-
60	Bungamas International Co.	Bungamas	245.308,00
61	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat	-
62	ENI Bukat Ltd.	Bukat	-
63	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh	-
64	ENI Muara Bakau B.V	Muara Bakau	2.901,42
65	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Man	Mandar	-
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surui	Surumana	-
67	Husky Oil (Madura) Ltd.	Madura Strait	-
68	Husky Oil North Sumbawa Ltd	North Sumbawa III	3.000,00
69	Inpex Masela Ltd	Masaela	374.003,60
70	Ecosse Energy	Manokwari	-
71	AED Rombebai B.V	Rombebai	-
72	Salamander Energy (Bangkanai) Limited	Bangkanai	106.115,83
73	Seruway Offshore Exploration Limited	Seruwai Offshore	-
74	Pearloil (Sebuku) Limited	Sebuku	34.703,50
75	Pearloil (Satria) Limited	Bulu	
76	Pearloil (K) limited	Karana	
77	Pearloil (East Muriah) Ltd	East Muriah	
78	Pearloil (Tachylyte) Limited	Kerapu	
75	BP Bomberai Ltd	Bomberai	-
80	ENI Bulungan B.V	Tarakan	
81	ConocoPhillips (Warim) Ltd	Warim	
82	ConocoPhillips (Kuma) Ltd	Kuma / West Sulawesi	
83	ConocoPhillips (Amborip VI) Ltd	Amborip VI / Arafura Sea	
84	ConocoPhillips (Arafura Sea BLK IND) Ltd	Arafura Sea / Maluku	
76	Star energy (sekayu)	Sekayu	-
77	Star energy (sebatik)	Sebatik	-
87	Star Energy (Banyumas)	Banyumas	
88	PT.Mosesa Petroleum		
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			**766.032,35**
TOTAL ASET KAPITAL			**2.383.329.180,02**

SISA ASET EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
Per 31 Desember 2011

Nilai dalam matauang rupiah, kecuali dinyatakan lain

No.	JENIS ASET	Per 31 Desember 2005*		Per 31 Desember 2010		Hasil Inventarisasi dan Penilaian		Koreksi (+/-)		Per 31 Desember 2011 (*Audited*)		
		JUMLAH	NILAI PENGALIHAN	JUMLAH	NILAI (Rp)	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	NILAI (setelah konversi ke
1	Surat Berharga											
	- Surat Berharga Treasury	37	286.574.211.485									
	- Surat Berharga Non Treasury	121	169.269.366.213									
	- Surat Berharga terkait PKPS	2	18.100.848.909									
2	Penyertaan di Bank Lainnya	8	0									
3	Penyertaan Non Bank	21	25.321.044.355									
4	Pinjaman yang Diberikan											
	- Dikelola BPPN	11.785	2.129.067.262.645	16.051	4.083.423.025.982,22	7.811	21.234.418.492.623,50	(249)	(66.725.462.426,29)	5.087	21.167.693.030.197,20	21.167.693.030.197,20
					USD 232.633.139,50		USD 1.479.593.941,49		USD (7.426.018,01)		USD 1.472.167.923,48	13.349.618.730.116,60
					JPY 9.610.910,20		JPY 6.644.744.692,87				JPY 6.644.744.692,87	776.127.443.310,23
					DEM 500.000,00		DEM 500.000,00				DEM 500.000,00	-
							EUR 13.263.365,67				EUR 13.263.365,67	155.698.516.966,47
							AUD 1.332.783,73				AUD 1.332.783,73	12.265.182.176,40
							GBP 266.124,00				GBP 266.124,00	3.717.558.009,48
	- Dikelola BDI**	1	19.489.668.884									
5	Aktiva Non Inti											
	- NCA Properti	365	31.594.228.599	1.128	1.462.099.189.630,00	1.643	1.995.763.024.993,00	-	(14.533.219.840,00)	1.643	1.981.229.805.153,00	1.981.229.805.153,00
	- NCA Non Properti	7	293.510.290.511									
	- Inventaris***	76.413	8.134.769.815	58.937	16.247.173.622,00			(21.952)	(4.111.698.514,00)	36.985	12.135.475.108,00	12.135.475.108,00
6	Tagihan PKPS	17	2.235.982.000.000									
	1) Telah diserahkan kepada PUPN			8	12.967.404.025.762,90			-	(143.406.199.826,36)	8	12.823.997.825.936,50	12.823.997.825.936,50
	2) Eks Kepolisian Negara RI			8	8.099.131.770.000,00				3.374.286.230.000,00	8	11.473.418.000.000,00	11.473.418.000.000,00
	3) Eks Kejaksaan Agung RI****			7				-	5.309.460.899.431,10	7	5.309.460.899.431,10	5.309.460.899.431,10
7	Piutang Bank	13	1.249.659.000.000									
8	Piutang Non Bank	3	20.000.000									
9	Penempatan Antar Bank dan N	2	83.698.000.000	n.a.	478.622.000.000,00					n.a.	478.622.000.000,00	478.622.000.000,00
10	Aktiva Lainnya	7	93.971.000.000									
	Jumlah	**88.802**	**6.644.391.691.416**	**76.139**	**27.106.927.184.997,10**					**43.738**		**67.543.984.466.405,10**
					USD 232.633.139,50							
					JPY 9.610.910,20							
					DEM 500.000,00							

Keterangan:

* Sumber data berasal dari Surat Tim Audit LKPP BPK RI No. 08/ST-6 LKPP/06/2006 tanggal 12 Juni 2006

** Telah disatukan dalam pinjaman yang dikelola BPPN

*** Nilai koreksi aset inventaris merupakan nilai tercatat aset inventaris yang dialihkan

**** Nilai indikasi

***** Menggunakan kurs tengah per 30 Desember 2011, kecuali matauang DEM

RINGKASAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA
PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011

NO.	JENIS ASET	SATUAN ASET	SALDO PER 01 JANUARI 2011			MUTASI PERIODE BERJALAN							SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2011		
						MUTASI SERAH KELOLA			MUTASI TRANSAKSI						
			ITEM ASET	NILAI ASET		ITEM ASET	NILAI ASET		ITEM ASET	PROCEEDS		NILAI ASET		ITEM ASET	NILAI ASET	
				Original CCY	Ekv. Rupiah*)		Original CCY	Ekv. Rupiah		Original CCY	Ekv. Rupiah	Original CCY	Ekv. Rupiah		Original CCY	Ekv. Rupiah**)
1	Saham Bank	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	1	7.912.600.000,00	7.912.600.000,00				(1)	16.447.430.000		(24.360.030.000)		0	0,00 [1]	0,00
2	Saham Bank	Bank Panin, PT	1	199.401.132,00	199.401.132,00							291.104.004,00		1	490.505.136,00 [2]	490.505.136,00
3	Saham Bank	PT Bank Permata, Tbk	1	4.424.712.345,00	4.424.712.345,00							31.524.548.201,00		1	35.949.260.546,00 [3]	35.949.260.546,00
		Sub Total	*3*	*12.536.713.477,00*	*12.536.713.477,00*									*2*	*36.439.765.682,00*	*36.439.765.682,00*
4	Saham Non Bank	Sejahtera Eka Graha, PT	1	22.470.000.000,00	22.470.000.000,00									1	22.470.000.000,00	22.470.000.000,00
	Saham Non Bank	PT Tugu Pratama Indonesia	0	0,00	0,00									0	0,00	0,00
5	Saham Non Bank	PT Tugu ReAsuransi Indonesia	1	28.415.673.000,00	28.415.673.000,00									1	28.415.673.000,00	28.415.673.000,00
6	Saham Non Bank	PT Asia Natural Resources Tbk	1	194.895.066,00	194.895.066,00							1.015.462.434,00		1	1.210.357.500,00 [4]	1.210.357.500,00
7	Saham Non Bank	PT Jembo Cable Company Tbk	1	276.497.157,00	276.497.157,00							130.248.843,00		1	406.746.000,00 [5]	406.746.000,00
		Sub Total	*4*	*51.357.065.223,00*	*51.357.065.223,00*									*4*	*52.502.776.500,00*	*52.502.776.500,00*
8	Hak Tagih	Polysindo Eka Perkasa, PT	1	459.555.536,00	459.555.536,00									1	459.555.536,00	459.555.536,00
	Hak Tagih	Polysindo Eka Perkasa, PT		$960.092,00	8.632.187.172,00										$ 960.092,00	8.706.114.256,00
9	Hak Tagih	Texmaco Jaya, PT	1	365.572.613,00	365.572.613,00									1	365.572.613,00	365.572.613,00
	Hak Tagih	Texmaco Jaya, PT		$2.435,00	21.893.085,00										$ 2.435,00	22.080.580,00
10	Hak Tagih	Wastra Indah, PT	1	10.493.948,00	10.493.948,00									1	10.493.948,00	10.493.948,00
11	Hak Tagih	Jaya Perkasa Engineering, PT	1	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00									1	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00
	Hak Tagih	Jaya Perkasa Engineering, PT		$38.822.432,00	349.052.486.112,00										$ 38.822.432,00	352.041.813.376,00
		Sub Total	*4*	*152.202.696.847,00*	*509.909.263.216,00*									*4*	*152.202.696.847,00*	*512.972.705.059,00*
				$39.784.959,00											*$39.784.959,00*	
12	Saham & Kredit	Bina Prima Perdana, PT	1	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00									1	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00
	Saham & Kredit	Bina Prima Perdana, PT		$25.540.008,00	229.630.211.928,00										$ 25.540.008,00	231.596.792.544,00
13	Saham & Kredit	Tuban Petrochemical Industries	1	1.340.578.773.902,64	1.340.578.773.902,64									1	1.340.578.773.902,64	1.340.578.773.902,64
		Sub Total	*2*	*1.810.978.487.388,64*	*2.040.608.699.316,64*									*2*	*1.810.978.487.388,64*	*2.042.575.279.932,64*
				$25.540.008,00											*$25.540.008,00*	
		Jumlah Total	*13*	*2.027.074.962.935,64*	*2.614.411.741.232,64*									*12*	*2.052.123.726.417,64*	*2.644.490.527.173,64*
				$65.324.967,00											*$65.324.967,00*	

Catatan:

*) Menggunakan kurs tengah BI tgl 31 Desember 2010 $1 = Rp8.991

**) Menggunakan kurs tengah BI tgl 30 Desember 2011 $1 = Rp9.068

[1] Nilai aset PT Bank Maybank Syariah Indonesia (d.h. PT Bank Maybank Indocorp) disesuaikan dengan KMK 327/KM.06/2011 dan sudah terjual di bulan 19 Desember 2011.

[2] Nilai aset PT Bank Pan Indonesia (Panin), Tbk disesuaikan dengan KMK 310/KM.06/2011.

[3] Nilai aset PT Bank Permata, Tbk disesuaikan dengan KMK 309/KM.06/2011.

[4] Nilai aset PT Asia Natural Resources, Tbk (d.h. PT Asia Grain International) disesuaikan dengan KMK 344/KMK.06/2011.

[5] Nilai aset PT Jembo Cable Company disesuaikan dengan KMK 311/KM.06/2011.

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

(Dalam Rupiah)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	102.093.063	1.094.198.831		
2	004	Badan Pemeriksa Keuangan	27.009.591.017	2.191.341.392	189.313.796	290.014.900
3	005	Mahkamah Agung	7.122.222.207	3.517.543.774	295.004.531	-
4	006	Kejaksaan Agung	52.575.145.987	1.845.635.750		
5	007	Sekretariat Negara	58.484.424.331	36.845.718.358	99.400.454	10.681.239.117
6	010	Kementerian Dalam Negeri	240.630.523	3.250.629.696	375.304.509	49.633.994
7	011	Kementerian Luar Negeri	6.377.506.628	6.144.858.402	134.087.731	-
8	012	Kementerian Pertahanan	3.238.769.595.999	848.472.444.569		
9	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	11.601.007.436	10.271.046.636	60.618.001.500	45.840.000
10	015	Kementerian Keuangan	17.174.929.541	202.674.045.731	1.583.445.635	1.657.970.182
11	018	Kementerian Pertanian	6.125.215.601	5.681.134.174	396.576.000	50.839.938
12	019	Kementerian Perindustrian	952.352.095	1.076.418.319	506.916.100	342.941.500
13	020	Kementerian ESDM	26.996.099.190	18.855.590.946	42.459.875	88.475.000
14	022	Kementerian Perhubungan	131.518.928.284	139.725.858.192	19.480.696.134	12.249.090
15	023	Kementerian Pendidikan Nasional	355.436.295.118	68.560.459.557	51.063.936.616	-
16	024	Kementerian Kesehatan	757.292.903.523	480.417.525.175	99.880.268.663	75.455.159.412
17	025	Kementerian Agama	3.557.037.840.052	334.119.122.227	9.154.923.970	2.962.989.081
18	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	789.017.524	1.108.764.679	600.986.660	474.281.346
19	027	Kementerian Sosial	429.229.942	2.844.045.420		
20	029	Kementerian Kehutanan	1.595.997.772	20.076.067.215		
21	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.565.102.403	3.077.645.469		
22	033	Kementerian Pekerjaan Umum	90.256.723.878	129.943.580.652	464.723.968	924.648.291
23	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	89.281.032	34.792.984	67.500.000	52.500.000
24	035	Kemenko Bidang Perekonomian	80.660.791	472.555.219		
25	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	502.912.927	65.173.284		
26	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1.770.921.240	2.198.627.671	18.333.333	38.333.333

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited
27	041	Kementerian Negara BUMN	16.772.500	16.772.500		
28	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	821.660.991	639.279.862		
29	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	73.607.371	70.121.689	109.200.000	12.000.000
30	044	Kementerian Negara KUKM	2.908.617.548	2.746.160.312	7.485.950.149	7.530.870.448
31	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	96.293.000	374.468.888		
32	048	Kementerian Negara PAN	123.191.960	293.140		
33	050	Badan Intelijen Negara	-	62.641.824.097		
34	051	Lembaga Sandi Negara	311.794.000	157.734.520		
35	052	Dewan Ketahanan Nasional		-		
36	054	Badan Pusat Statistik	2.774.401.823	4.728.495.565		
37	056	Badan Pertanahan Nasional	9.885.856.284	3.945.776.871	17.406.378.211	14.515.577.014
38	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia			-	15.000.000
39	059	Kementerian Kominfo	1.713.855.113	1.146.033.884	6.040.228.256.095	46.533.667
40	060	Kepolisian RI	83.127.696.097	198.832.881.549	9.252.117.772	1.417.354.316
41	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	926.332.863	1.895.860.838	16.380.000	30.940.000
42	064	Lembaga Ketahanan Nasional	6.201.000	-		
43	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	626.741.873	355.247.980		
44	066	Badan Narkotika Nasional	8.118.498.620	1.005.568.234		
45	067	Kementerian Negara PDT	133.951.193	157.424.221		
46	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	223.609.345	399.336.993		
47	074	Komnas HAM		37.005.485		
48	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	655.648.487	4.578.579.279		
49	076	Komisi Pemilihan Umum	369.770.658	860.777.048		
50	077	Mahkamah Konstitusi RI	10.055.990	93.870.566	93.108.000	93.108.000
51	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	19.320.000	18.089.388	2.500.000
52	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	502.174.953	1.681.937.825	2.513.590	-
53	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.655.754.362	2.485.122.018	177.566.250	6.875.000
54	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1.499.328.181	7.851.174.147		
55	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	356.453.745	1.343.557.271		
56	084	Badan Standardisasi Nasional	15.625.618	19.620.196	248.500.000	466.190.000

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited
57	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	300.260.443	235.049.038		
58	086	Lembaga Administrasi Negara	191.746.148	308.592.561	903.678.988	629.779.488
59	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	1.589.126.556	15.794.775		
60	088	Badan Kepegawaian Negara	165.842.208	678.208.678	96.000.000	-
61	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.468.435.491	2.745.925.873	112.224.813	410.963.916
62	090	Kementerian Perdagangan	141.236.531	735.348.021	652.345.859	715.182.887
63	091	Kemen Perumahan Rakyat	9.866.226.118	7.960.000		
64	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	1.225.169.654	290.693.054	1.650.000	-
65	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	3.828.046.940	3.891.752.442		
66	095	Dewan Perwakilan Daerah	341.437.793	417.038.789		
67	100	Komisi Yudisial RI	19.500.000	63.430.625	9.798.000	9.798.000
68	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	364.836.512.063	38.309.959.050		
69	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	707.847.172	1.055.457.130	87.677.562	86.763.748
70	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		17.507.000		
71	107	Badan SAR Nasional	492.047.967	-		
72	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	24.560.405	151.692.061		
73	110	Ombudsman Republik Indonesia	41.580.400	-		
74	999.03				2.318.040.768.528	-
75	999.05	BUN (DJPK)	18.292.725.677.411	15.798.435.847.230		
76	999.08	BUN (Belanja lainnya)	3.495.984.368.048	8.709.596.834.582		
77	999.992	BUN (Dit. PKN)	1.137.834.225.993	639.059.754.870		
78	999.999	BUN (BAPERTARUM)		3.551.726.799.482		
JUMLAH			**31.780.634.369.020**	**31.370.392.714.561**	**8.639.914.082.680**	**119.116.551.668**

BAGIAN LANCAR UTANG OBLIGASI DALAM NEGERI
Per 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			**27.683.468.000.000**		**(67.374.007.000)**	**27.616.093.993.000**
1	FR0017	15-Jan-12	7.531.263.000.000	13,15000%	2.913.060.000	7.534.176.060.000
2	FR0018	15-Jul-12	5.430.062.000.000	13,17500%	-	5.430.062.000.000
3	FR0023	15-Dec-12	14.722.143.000.000	11,00000%	(70.287.067.000)	14.651.855.933.000
VARIABEL RATE			**4.368.483.000.000**		-	**4.368.483.000.000**
1	VR0018	25-Oct-12	4.368.483.000.000	4,81038%	-	4.368.483.000.000
ORI			**21.026.495.000.000**		-	**21.026.495.000.000**
1	ORI004	12-Mar-12	12.839.765.000.000	9,50000%	-	12.839.765.000.000
2	ORI006	15-Aug-12	8.186.730.000.000	9,35000%	-	8.186.730.000.000
ZERO COUPON			**1.249.000.000.000**		**(100.267.864.000)**	**1.148.732.136.000**
1	ZC003	20-Nov-12	1.249.000.000.000		(100.267.864.000)	1.148.732.136.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			**4.184.803.289.456**			**4.184.803.289.456**
1	SU002	1-Apr-12	343.553.612.698	0,10000%	-	343.553.612.698
2	SU002	1-Oct-12	360.731.293.333	0,10000%	-	360.731.293.333
3	SU004	1-Jun-12	868.131.934.015	0,10000%	-	868.131.934.015
4	SU004	1-Dec-12	911.538.530.716	0,10000%	-	911.538.530.716
5	SU007	1-Feb-12	829.681.911.558	0,10000%		829.681.911.558
6	SU007	1-Aug-12	871.166.007.136	0,10000%		871.166.007.136
BAGIAN LANCAR SUN JK PJG			**58.512.249.289.456**		**(167.641.871.000)**	**58.344.607.418.456**
SPN			**29.900.000.000.000**		**(699.956.940.000)**	**29.200.043.060.000**
1	SPN20120209	9-Feb-12	3.800.000.000.000	-	(25.643.701.000)	3.774.356.299.000
2	SPN20120309	9-Mar-12	3.450.000.000.000	-	(39.409.330.000)	3.410.590.670.000
3	SPN20120406	6-Apr-12	950.000.000.000	-	(14.442.936.000)	935.557.064.000
4	SPN20120504	4-May-12	700.000.000.000	-	(13.344.135.000)	686.655.865.000
5	SPN20120608	8-Jun-12	4.150.000.000.000	-	(96.380.792.000)	4.053.619.208.000
6	SPN20120706	6-Jul-12	2.200.000.000.000	-	(55.273.968.000)	2.144.726.032.000
7	SPN03120105	1-May-12	750.000.000.000	-	(553.799.000)	749.446.201.000
8	SPN03120119	19-Jan-12	200.000.000.000	-	(494.870.000)	199.505.130.000
9	SPN03120202	2-Feb-12	1.100.000.000.000	-	(4.638.542.000)	1.095.361.458.000
10	SPN03120223	23-Feb-12	300.000.000.000	-	(1.960.979.000)	298.039.021.000
11	SPN12120818	18-Aug-12	1.800.000.000.000	-	(48.239.034.000)	1.751.760.966.000
12	SPN12120914	14-Sep-12	2.050.000.000.000	-	(64.109.341.000)	1.985.890.659.000
13	SPN12121005	10-May-12	4.100.000.000.000		(164.132.808.000)	3.935.867.192.000
14	SPN12121102	11-Feb-12	4.350.000.000.000	-	(171.332.705.000)	4.178.667.295.000
SUN JANGKA PENDEK (b)			**29.900.000.000.000**		**(699.956.940.000)**	**29.200.043.060.000**
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH			**1.320.000.000.000**		**(10.151.163.000)**	**1.309.848.837.000**
1	SPNS03022012	3-Feb-12	570.000.000.000	-	(1.980.519.000)	568.019.481.000
2	SPNS12042012	12-Apr-12	420.000.000.000	-	(6.150.438.000)	413.849.562.000
3	SPNS24022012	24-Feb-12	330.000.000.000	-	(2.020.206.000)	327.979.794.000
SBSN			**5.556.290.000.000**			**5.556.290.000.000**
1	SR001	25-Feb-12	5.556.290.000.000	12,000%	-	5.556.290.000.000
SDHI			**3.342.000.000.000**		-	**3.342.000.000.000**
1	SDHI 2012A	3-Mar-12	3.342.000.000.000	7,61000%	-	3.342.000.000.000
SBSN JANGKA PENDEK (c)			**8.898.290.000.000**		-	**8.898.290.000.000**
TOTAL SBN JANGKA PENDEK			**98.630.539.289.456**		**(877.749.974.000)**	**97.752.789.315.456**

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
FIXED RATE BOND			**474.525.756.000.000**		**13.328.508.988.302**
1	FR0017	15/01/2012	7.531.263.000.000	13,15000%	457.501.633.461
2	FR0018	15/07/2012	5.430.062.000.000	13,17500%	330.489.863.506
3	FR0019	15/06/2013	11.456.341.000.000	14,25000%	75.829.521.079
4	FR0020	15/12/2013	10.061.751.000.000	14,27500%	66.709.409.130
5	FR0023	15/12/2012	14.722.143.000.000	11,00000%	75.215.428.587
6	FR0026	15/10/2014	13.455.749.000.000	11,00000%	315.443.123.807
7	FR0027	15/06/2015	19.554.000.000.000	9,50000%	86.291.802.000
8	FR0028	15/07/2017	14.221.766.000.000	10,00000%	656.988.702.136
9	FR0030	15/05/2016	10.657.000.000.000	10,75000%	147.919.160.000
10	FR0031	15/11/2020	17.899.000.000.000	11,00000%	254.219.497.000
11	FR0032	15/07/2018	1.434.000.000.000	15,00000%	99.366.162.000
12	FR0033	15/03/2013	9.400.474.000.000	12,50000%	348.644.779.712
13	FR0034	15/06/2021	16.756.400.000.000	12,80000%	99.616.798.000
14	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	66.054.310.000
15	FR0036	15/09/2019	10.735.500.000.000	11,50000%	366.305.995.500
16	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	87.229.800.000
17	FR0038	15/08/2018	2.920.757.000.000	11,60000%	127.972.967.955
18	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	185.294.850.000
19	FR0040	15/09/2025	26.474.000.000.000	11,00000%	864.031.938.000
20	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	699.568.409.100
21	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	682.659.367.000
22	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	534.475.380.000
23	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	80.569.600.000
24	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	739.698.530.000
25	FR0047	15/02/2028	20.840.000.000.000	10,00000%	787.168.480.000
26	FR0048	15/09/2018	5.675.970.000.000	9,00000%	151.565.426.910
27	FR0049	15/09/2013	4.786.607.000.000	9,00000%	127.816.766.721
28	FR0050	15/07/2038	15.686.000.000.000	10,50000%	760.849.430.000
29	FR0051	15/05/2014	2.336.123.000.000	11,25000%	33.934.522.698
30	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	932.010.000.000
31	FR0053	15/07/2021	19.622.000.000.000	8,25000%	747.814.042.000
32	FR0054	15/07/2031	27.096.000.000.000	9,50000%	1.189.135.056.000
33	FR0055	15/09/2016	15.400.000.000.000	7,37500%	336.982.800.000
34	FR0056	15/09/2026	17.164.000.000.000	8,37500%	426.508.236.000
35	FR0057	15/05/2041	13.550.000.000.000	9,50000%	166.204.300.000
36	FR0058	15/06/2032	9.400.000.000.000	8,25000%	36.020.800.000
37	FR0059	15/05/2027	7.850.000.000.000	7,00000%	70.948.300.000
38	FR0060	15/04/2017	3.700.000.000.000	6,25000%	49.284.000.000
39	FR0061	15/05/2022	7.100.000.000.000	7,00000%	64.169.800.000
ORI			**42.616.370.000.000**		**180.003.432.785**
1	ORI004	12/03/2012	12.839.765.000.000	9,50000%	65.585.519.620
2	ORI005	15/09/2013	2.666.875.000.000	11,45000%	13.955.756.875
3	ORI006	15/08/2012	8.186.730.000.000	9,35000%	34.981.897.290
4	ORI007	15/08/2013	7.923.000.000.000	7,95000%	28.784.259.000
5	ORI008	15/10/2014	11.000.000.000.000	7,30000%	36.696.000.000
VARIABLE RATE BOND			**135.063.416.000.000**		**723.777.587.150**
1	VR0018	25/10/2012	4.368.483.000.000	4,81038%	38.831.445.387
2	VR0019	25/12/2014	12.656.226.000.000	4,46740%	10.871.698.134

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah)

3	VR0020	25/04/2015	9.899.007.000.000	4,81038%	87.992.273.223
4	VR0021	25/11/2015	7.446.328.000.000	4,46740%	33.448.905.376
5	VR0022	25/03/2016	9.266.749.000.000	4,46740%	7.960.137.391
6	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	4,81038%	76.908.125.784
7	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	4,46740%	44.512.575.600
8	VR0025	25/09/2017	6.909.300.000.000	4,46740%	5.935.088.700
9	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	4,81038%	48.375.200.238
10	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	4,81038%	48.375.200.238
11	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	4,46740%	31.596.701.048
12	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	4,46740%	54.857.741.440
13	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	4,46740%	9.022.089.885
14	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	4,81038%	225.090.404.706
SU DAN SRBI			**244.636.437.364.007**		**82.027.721.892**
1	SU002	01/04/2025	18.781.775.893.847	0,10000%	4.734.036.664
2	SU004	01/12/2025	50.701.147.130.899	0,10000%	4.306.124.825
3	SU007	01/08/2025	48.455.566.511.832	0,10000%	20.311.511.442
4	SRBI01	01/08/2033	126.697.947.827.429	0,10000%	52.676.048.961
SBSN			**61.451.260.000.000**		**796.615.939.740**
1	IFR001	15/08/2033	2.714.700.000.000	11,80000%	120.996.893.700
2	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	89.596.945.000
3	IFR003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	72.235.240.000
4	IFR004	15/10/2013	550.000.000.000	9,00000%	10.549.000.000
5	IFR005	15/01/2017	1.171.000.000.000	9,00000%	48.685.496.000
6	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	66.146.100.000
7	IFR007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%	73.251.997.000
8	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	6.579.720.000
9	IFR010	15/02/2036	3.710.000.000.000	10,00000%	140.134.120.000
10	SDHI2012A	03/03/2012	3.342.000.000.000	7,61000%	19.828.086.000
11	SDHI2013A	17/05/2013	4.250.000.000.000	7,55000%	12.937.000.000
12	SDHI2014A	09/08/2014	2.855.000.000.000	7,36000%	12.993.105.000
13	SDHI2014B	25/08/2014	336.000.000.000	7,30000%	461.664.000
14	SDHI2014C	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,13000%	9.584.000.000
15	SDHI2014D	11/02/2014	6.000.000.000.000	7,85000%	26.586.000.000
16	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,00000%	9.032.000.000
16	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,16000%	8.661.000.000
15	SR-001	25/02/2012	5.556.290.000.000	12,00000%	12.546.102.820
16	SR-002	10/02/2013	8.033.860.000.000	8,70000%	41.334.209.700
17	SR-003	23/02/2014	7.341.410.000.000	8,15000%	14.477.260.520
INTERNATIONAL BOND			**195.629.800.000.000**		**4.163.545.829.445**
1	RI0014	10/03/2014	11.788.400.000.000	6,75000%	245.346.075.000
2	RI0015	20/04/2015	9.068.000.000.000	7,25000%	129.659.805.556
3	RI0016	15/01/2016	8.161.200.000.000	7,50000%	282.241.500.000
4	RI0017	09/03/2017	9.068.000.000.000	6,87500%	193.954.444.444
5	RI0018	17/01/2018	17.229.200.000.000	6,87500%	539.608.972.222
6	RI0035	12/10/2035	14.508.800.000.000	8,50000%	270.629.422.222
7	RI0037	17/02/2037	13.602.000.000.000	6,62500%	335.421.541.667
8	RI0038	17/01/2038	18.136.000.000.000	7,75000%	640.301.555.556
9	RI0320	13/03/2020	18.136.000.000.000	5,87500%	319.647.000.000
10	RI140504	04/05/2014	9.068.000.000.000	10,37500%	148.960.791.667
11	RI190304	04/03/2019	18.136.000.000.000	11,62500%	685.200.750.000
12	SNI14	23/04/2014	5.894.200.000.000	8,80000%	97.974.702.222
13	SNI18	21/11/2018	9.068.000.000.000	4,00000%	40.302.222.222
14	JPYSH1907	29/07/2019	4.088.000.000.000	2,73000%	47.121.013.333
15	JPYSB2010	12/11/2020	7.008.000.000.000	1,60000%	15.261.866.667
16	RI0521	05/05/2021	22.670.000.000.000	4,87500%	171.914.166.667
TOTAL			**1.153.923.039.364.010**		**19.274.479.499.314**

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (30 Desember 2011) adalah Rp116.80
* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (30 Desember 2011) adalah Rp9.068

Surat Berharga Negara Jangka Pendek
Per 31 Desember 2011

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			**27.683.468.000.000**		**(67.374.007.000)**	**27.616.093.993.000**
1	FR0017	15-Jan-12	7.531.263.000.000	13,15000%	2.913.060.000	7.534.176.060.000
2	FR0018	15-Jul-12	5.430.062.000.000	13,17500%	-	5.430.062.000.000
3	FR0023	15-Dec-12	14.722.143.000.000	11,00000%	(70.287.067.000)	14.651.855.933.000
VARIABEL RATE			**4.368.483.000.000**		-	**4.368.483.000.000**
1	VR0018	25-Oct-12	4.368.483.000.000	4,81038%	-	4.368.483.000.000
ORI			**21.026.495.000.000**		-	**21.026.495.000.000**
1	ORI004	12-Mar-12	12.839.765.000.000	9,50000%	-	12.839.765.000.000
2	ORI006	15-Aug-12	8.186.730.000.000	9,35000%	-	8.186.730.000.000
ZERO COUPON			**1.249.000.000.000**		**(100.267.864.000)**	**1.148.732.136.000**
1	ZC003	20-Nov-12	1.249.000.000.000		(100.267.864.000)	1.148.732.136.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			**4.184.803.289.456**			**4.184.803.289.456**
1	SU002	1-Apr-12	343.553.612.698	0,10000%	-	343.553.612.698
2	SU002	1-Oct-12	360.731.293.333	0,10000%	-	360.731.293.333
3	SU004	1-Jun-12	868.131.934.015	0,10000%	-	868.131.934.015
4	SU004	1-Dec-12	911.538.530.716	0,10000%	-	911.538.530.716
5	SU007	1-Feb-12	829.681.911.558	0,10000%		829.681.911.558
6	SU007	1-Aug-12	871.166.007.136	0,10000%		871.166.007.136
BAGIAN LANCAR SUN JK PJG (a)			**58.512.249.289.456**		**(167.641.871.000)**	**58.344.607.418.456**
SPN			**29.900.000.000.000**		**(699.956.940.000)**	**29.200.043.060.000**
1	SPN20120209	9-Feb-12	3.800.000.000.000	-	(25.643.701.000)	3.774.356.299.000
2	SPN20120309	9-Mar-12	3.450.000.000.000	-	(39.409.330.000)	3.410.590.670.000
3	SPN20120406	6-Apr-12	950.000.000.000	-	(14.442.936.000)	935.557.064.000
4	SPN20120504	4-May-12	700.000.000.000	-	(13.344.135.000)	686.655.865.000
5	SPN20120608	8-Jun-12	4.150.000.000.000	-	(96.380.792.000)	4.053.619.208.000
6	SPN20120706	6-Jul-12	2.200.000.000.000	-	(55.273.968.000)	2.144.726.032.000
7	SPN03120105	1-May-12	750.000.000.000	-	(553.799.000)	749.446.201.000
8	SPN03120119	19-Jan-12	200.000.000.000	-	(494.870.000)	199.505.130.000
9	SPN03120202	2-Feb-12	1.100.000.000.000	-	(4.638.542.000)	1.095.361.458.000
10	SPN03120223	23-Feb-12	300.000.000.000	-	(1.960.979.000)	298.039.021.000
11	SPN12120818	18-Aug-12	1.800.000.000.000	-	(48.239.034.000)	1.751.760.966.000
12	SPN12120914	14-Sep-12	2.050.000.000.000	-	(64.109.341.000)	1.985.890.659.000
13	SPN12121005	10-May-12	4.100.000.000.000		(164.132.808.000)	3.935.867.192.000
14	SPN12121102	11-Feb-12	4.350.000.000.000	-	(171.332.705.000)	4.178.667.295.000
SUN JANGKA PENDEK (b)			**29.900.000.000.000**		**(699.956.940.000)**	**29.200.043.060.000**
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH			**1.320.000.000.000**		**(10.151.163.000)**	**1.309.848.837.000**
1	SPNS03022012	3-Feb-12	570.000.000.000	-	(1.980.519.000)	568.019.481.000
2	SPNS12042012	12-Apr-12	420.000.000.000	-	(6.150.438.000)	413.849.562.000
3	SPNS24022012	24-Feb-12	330.000.000.000	-	(2.020.206.000)	327.979.794.000
SBSN			**5.556.290.000.000**			**5.556.290.000.000**
1	SR001	25-Feb-12	5.556.290.000.000	12,000%	-	5.556.290.000.000
SDHI			**3.342.000.000.000**		-	**3.342.000.000.000**
1	SDHI 2012A	3-Mar-12	3.342.000.000.000	7,61000%	-	3.342.000.000.000
SBSN JANGKA PENDEK (c)			**8.898.290.000.000**		-	**8.898.290.000.000**
TOTAL SBN JANGKA PENDEK			**98.630.539.289.456**		**(877.749.974.000)**	**97.752.789.315.456**

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	Book Value
FIXED RATE BOND			**446.842.288.000.000**		**(4.169.639.225.000)**	**442.672.648.775.000**
1	FR0019	15/06/2013	11.456.341.000.000	14,25000%	-	11.456.341.000.000
2	FR0020	15/12/2013	10.061.751.000.000	14,27500%	-	10.061.751.000.000
3	FR0026	15/10/2014	13.455.749.000.000	11,00000%	(158.734.642.000)	13.297.014.358.000
4	FR0027	15/06/2015	19.554.000.000.000	9,50000%	92.466.988.000	19.646.466.988.000
5	FR0028	15/07/2017	14.221.766.000.000	10,00000%	270.477.068.000	14.492.243.068.000
6	FR0030	15/05/2016	10.657.000.000.000	10,75000%	(168.705.534.000)	10.488.294.466.000
7	FR0031	15/11/2020	17.899.000.000.000	11,00000%	(385.583.120.000)	17.513.416.880.000
8	FR0032	15/07/2018	1.434.000.000.000	15,00000%	(38.107.687.000)	1.395.892.313.000
9	FR0033	15/03/2013	9.400.474.000.000	12,50000%	(9.556.283.000)	9.390.917.717.000
10	FR0034	15/06/2021	16.756.400.000.000	12,80000%	205.540.984.000	16.961.940.984.000
11	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	(22.269.323.000)	11.001.480.677.000
12	FR0036	15/09/2019	10.735.500.000.000	11,50000%	(3.957.961.000)	10.731.542.039.000
13	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	(115.929.790.000)	2.334.070.210.000
14	FR0038	15/08/2018	2.920.757.000.000	11,60000%	(17.283.734.000)	2.903.473.266.000
15	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	(41.380.682.000)	4.133.619.318.000
16	FR0040	15/09/2025	26.474.000.000.000	11,00000%	1.219.986.942.000	27.693.986.942.000
17	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	(108.062.518.000)	14.666.037.482.000
18	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	(102.104.289.000)	14.314.895.711.000
19	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	(1.349.100.666.000)	16.664.899.334.000
20	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	(24.329.643.000)	6.375.670.357.000
21	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	(2.028.921.983.000)	14.826.078.017.000
22	FR0047	15/02/2028	20.840.000.000.000	10,00000%	(1.459.143.052.000)	19.380.856.948.000
23	FR0048	15/09/2018	5.675.970.000.000	9,00000%	(264.998.155.000)	5.410.971.845.000
24	FR0049	15/09/2013	4.786.607.000.000	9,00000%	(183.353.365.000)	4.603.253.635.000
25	FR0050	15/07/2038	15.686.000.000.000	10,50000%	(445.586.096.000)	15.240.413.904.000
26	FR0051	15/05/2014	2.336.123.000.000	11,25000%	(39.832.070.000)	2.296.290.930.000
27	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	(297.661.168.000)	23.202.338.832.000
28	FR0053	15/07/2021	19.622.000.000.000	8,25000%	665.273.591.000	20.287.273.591.000
29	FR0054	15/07/2031	27.096.000.000.000	9,50000%	17.093.002.000	27.113.093.002.000
30	FR0055	15/09/2016	15.400.000.000.000	7,37500%	(39.430.525.000)	15.360.569.475.000
31	FR0056	15/09/2026	17.164.000.000.000	8,37500%	(368.934.078.000)	16.795.065.922.000
32	FR0057	15/05/2041	13.550.000.000.000	9,50000%	607.860.193.000	14.157.860.193.000
33	FR0058	15/06/2032	9.400.000.000.000	8,25000%	196.004.246.000	9.596.004.246.000
34	FR0059	15/05/2027	7.850.000.000.000	7,00000%	(64.843.159.000)	7.785.156.841.000
35	FR0060	15/04/2017	3.700.000.000.000	6,25000%	60.616.230.000	3.760.616.230.000
36	FR0061	15/05/2022	7.100.000.000.000	7,00000%	232.851.054.000	7.332.851.054.000
ORI			**21.589.875.000.000**		-	**21.589.875.000.000**
1	ORI005	15/09/2013	2.666.875.000.000	11,45000%	-	2.666.875.000.000
2	ORI007	15/08/2013	7.923.000.000.000	7,95000%	-	7.923.000.000.000
3	ORI008	15/10/2014	11.000.000.000.000	7,30000%	-	11.000.000.000.000
ZERO COUPON			**1.263.000.000.000**		**(104.765.143.000)**	**1.158.234.857.000**
1	ZC0005	20/02/2013	1.263.000.000.000	-	(104.765.143.000)	1.158.234.857.000
VARIABLE RATE BOND			**130.694.933.000.000**		-	**130.694.933.000.000**
1	VR0019	25/12/2014	12.656.226.000.000	4,46740%	-	12.656.226.000.000
2	VR0020	25/04/2015	9.899.007.000.000	4,81038%	-	9.899.007.000.000
3	VR0021	25/11/2015	7.446.328.000.000	4,46740%	-	7.446.328.000.000
4	VR0022	25/03/2016	9.266.749.000.000	4,46740%	-	9.266.749.000.000
5	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	4,81038%	-	8.652.056.000.000
6	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	4,46740%	-	9.909.300.000.000
7	VR0025	25/09/2017	6.909.300.000.000	4,46740%	-	6.909.300.000.000
8	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	4,81038%	-	5.442.142.000.000
9	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	4,81038%	-	5.442.142.000.000
10	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	4,46740%	-	7.033.994.000.000
11	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	4,46740%	-	12.212.320.000.000
12	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	4,46740%	-	10.503.015.000.000
13	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	4,81038%	-	25.322.354.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			**240.451.634.074.551**		-	**240.451.634.074.551**
1	SU002	01/04/2025	18.077.490.987.816	0,10000%	-	18.077.490.987.816

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah)

2	SU004	01/12/2025	48.921.476.666.168	0,10000%	-	48.921.476.666.168
3	SU007	01/08/2025	46.754.718.593.138	0,10000%	-	46.754.718.593.138
4	SRBI01	01/08/2033	126.697.947.827.429	0,10000%	-	126.697.947.827.429
Total SUN Jangka Panjang (a)			**840.841.730.074.551**		**(4.274.404.368.000)**	**836.567.325.706.551**
SBSN			**52.552.970.000.000**		**300.326.346.000**	**52.853.296.346.000**
1	IFR0001	15/08/2015	2.714.700.000.000	11,80000%	-	2.714.700.000.000
2	IFR0002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	-	1.985.000.000.000
3	IFR0003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	43.044.124.000	2.675.044.124.000
4	IFR0004	15/10/2013	550.000.000.000	9,00000%	(3.333.946.000)	546.666.054.000
5	IFR0005	15/01/2017	1.171.000.000.000	9,00000%	37.714.412.000	1.208.714.412.000
6	IFR0006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	14.970.747.000	2.189.970.747.000
7	IFR0007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%	4.385.178.000	1.551.385.178.000
8	IFR0008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	(268.626.000)	251.731.374.000
9	IFR0010	15/02/2036	3.710.000.000.000	10,00000%	203.814.457.000	3.913.814.457.000
10	SDHI2013A	17/05/2013	4.250.000.000.000	7,55000%	-	4.250.000.000.000
11	SDHI2014A	09/08/2014	2.855.000.000.000	7,36000%	-	2.855.000.000.000
12	SDHI2014B	25/08/2014	336.000.000.000	7,30000%	-	336.000.000.000
13	SDHI2014C	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,13000%	-	2.000.000.000.000
14	SDHI2014D	11/02/2014	6.000.000.000.000	7,85000%	-	6.000.000.000.000
15	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,00000%	-	2.000.000.000.000
16	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,16000%	-	3.000.000.000.000
17	SR-002	10/02/2013	8.033.860.000.000	8,70000%	-	8.033.860.000.000
18	SR-003	23/02/2014	7.341.410.000.000	8,15000%	-	7.341.410.000.000
Total SBSN Jangka Panjang (b)			**52.552.970.000.000**		**300.326.346.000**	**52.853.296.346.000**
TOTAL SBN Jangka Panjang (a+b)			**893.394.700.074.551**		**(3.974.078.022.000)**	**889.420.622.052.551**

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Luar Negeri (Valas)
Per 31 Desember 2011

(Dalam Rp)

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
SUN VALAS (USD)			**181.024.465.579.150**		**-11.452.865.579.150**	**169.571.600.000.000**	**274.123.698.000**	**169.845.723.698.000**
1	RI0014	10-Mar-14	11.330.165.221.750	6,75%	458.234.778.250	11.788.400.000.000	-11.263.179.000	11.777.136.821.000
2	RI0015	20-Apr-15	9.613.000.000.000	7,25%	-545.000.000.000	9.068.000.000.000	-25.761.411.000	9.042.238.589.000
3	RI0016	15-Jan-16	9.099.000.000.000	7,50%	-937.800.000.000	8.161.200.000.000	-27.429.039.000	8.133.770.961.000
4	RI0017	9-Mar-17	9.370.000.000.000	6,88%	-302.000.000.000	9.068.000.000.000	-38.855.548.000	9.029.144.452.000
5	RI0018	17-Jan-18	17.804.549.364.750	6,88%	-575.349.364.750	17.229.200.000.000	-174.764.026.000	17.054.435.974.000
6	RI0035	12-Oct-35	15.436.000.000.000	8,50%	-927.200.000.000	14.508.800.000.000	904.513.271.000	15.413.313.271.000
7	RI0037	17-Feb-37	13.575.648.587.500	6,63%	26.351.412.500	13.602.000.000.000	-181.792.127.000	13.420.207.873.000
8	RI0038	17-Jan-38	18.729.115.845.000	7,75%	-593.115.845.000	18.136.000.000.000	-365.252.498.000	17.770.747.502.000
9	RI0320	13-Mar-20	18.550.000.000.000	5,88%	-414.000.000.000	18.136.000.000.000	0	18.136.000.000.000
10	RI 140504	4-May-14	12.025.000.000.000	10,38%	-2.957.000.000.000	9.068.000.000.000	-29.694.486.000	9.038.305.514.000
11	RI 190304	4-Mar-19	24.050.000.000.000	11,63%	-5.914.000.000.000	18.136.000.000.000	-124.917.757.000	18.011.082.243.000
12	RI0521	5-May-21	21.441.986.560.150	4,88%	1.228.013.439.850	22.670.000.000.000	349.340.498.000	23.019.340.498.000
SBSN VALAS (USD)			**16.066.798.522.903**		**-1.104.598.522.903**	**14.962.200.000.000**	**0**	**14.962.200.000.000**
13	SNI14	23-Apr-14	7.031.748.227.903	8,80%	-1.137.548.227.903	5.894.200.000.000	0	5.894.200.000.000
14	SNI18	21-Nov-18	9.035.050.295.000	4,00%	32.949.705.000	9.068.000.000.000	0	9.068.000.000.000
SUN VALAS (JPY)			**10.186.748.000.000**		**909.900.000.000**	**11.096.000.000.000**	**0**	**11.096.000.000.000**
14	RIJPY0719	29-Jul-19	3.695.300.000.000	2,73%	392.700.000.000	4.088.000.000.000	0	4.088.000.000.000
15	RIJPY1120	20-Nov-20	6.490.800.000.000	1,60%	517.200.000.000	7.008.000.000.000	0	7.008.000.000.000
Jumlah SBSN Valas			**16.066.798.522.903**		**-1.104.598.522.903**	**14.962.200.000.000**	**0**	**14.962.200.000.000**
Jumlah SUN Valas			**191.211.213.579.150**		**-10.542.965.579.150**	**180.667.600.000.000**	**274.123.698.000**	**180.941.723.698.000**
TOTAL			**207.278.012.102.053**		**-11.647.564.102.053**	**195.629.800.000.000**	**274.123.698.000**	**195.903.923.698.000**

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2011) adalah 11680,00%

* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2011) adalah 906800,00%

IKHTISAR LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011

NO	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KOREKSI SATGAS	KOREKSI K/L	SELISIH KOREKSI ABSOLUT
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	40.757.932.306	40.757.932.306	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	286.109.778.878	286.109.778.878	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	543.831.559.292	543.831.559.292	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.950.105.368.333	2.902.215.000.954	47.890.367.379
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2.914.585.329.072	2.914.585.329.072	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	8.728.075.828.643	8.691.792.606.914	36.283.221.729
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.185.433.326.313	2.152.285.934.437	33.147.391.876
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	12.172.100.783.749	12.172.094.967.753	5.815.996
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	102.075.796.507.334	102.075.796.507.334	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6.256.673.625.779	6.234.056.770.135	22.616.855.644
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	17.068.835.893.098	16.909.016.355.112	159.819.537.987
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.875.329.191.147	7.873.675.305.565	1.653.885.582
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.641.341.601.296	1.641.341.601.296	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.102.295.451.223	1.842.814.312.492	259.481.138.731
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	17.714.067.127.665	17.573.146.275.027	140.920.852.638
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.042.004.758.380	45.971.178.160.923	70.826.597.457
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	11.527.882.906.981	11.474.017.340.339	53.865.566.642
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	8.620.432.331.451	8.571.767.857.373	48.664.474.078
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.305.785.722.044	1.347.473.096.325	41.687.374.281
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	4.734.275.428.877	4.738.450.319.560	4.174.890.683
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.334.898.044.380	2.330.802.289.365	4.095.755.015
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.199.357.327.452	1.248.592.476.212	49.235.148.760
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	132.533.238.608.356	132.428.097.217.556	105.141.390.800
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	(881.857.911)	(881.857.911)	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERKONOMIAN	(4.225.575.304)	(4.225.575.304)	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	(4.880.468.733)	(4.880.468.733)	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.824.326.843.506	1.812.801.968.013	11.524.875.493
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	(8.924.581.782)	(8.924.581.782)	-
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	2.053.861.895.638	2.053.899.014.091	37.118.453
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	(5.948.553.910)	(5.956.377.832)	7.823.922
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	824.679.150.746	824.456.862.632	222.288.114
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(2.742.261.681)	(2.742.261.681)	-
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	(6.577.861.751)	(6.577.863.502)	1.751
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	722.179.567.356	722.179.567.356	-
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	36.929.127.943	36.929.127.943	-
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	(1.020.104.341)	(1.020.104.341)	-
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	501.414.980.136	497.453.876.782	3.961.103.354
38	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	322.205.984.837	322.205.984.837	-
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.463.002.962.768	1.467.653.321.155	4.650.358.387
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	287.847.560.198	287.847.560.315	117
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	311.680.341.771	311.584.864.579	95.477.192
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	22.370.408.038.723	21.980.896.587.601	389.511.451.122
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	(3.271.638.680)	(30.096.379.931)	26.824.741.251
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	(12.381.528.148)	(12.381.528.148)	-
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	329.467.545.775	329.467.545.833	58
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	(42.295.121.272)	(42.295.121.272)	-
47	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	(4.133.861.756)	(4.133.861.756)	-
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	427.022.852.345	426.484.611.828	538.240.517
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	(341.407.813)	(341.407.813)	-
50	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	698.615.433.681	698.824.113.164	208.679.483
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	64.204.050.470	64.169.085.000	34.965.470
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	(6.621.927.918)	(6.621.927.918)	-
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	66.090.187.544	66.090.187.544	-
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.036.293.995.926	6.035.298.557.237	995.438.689
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.785.168.758.442	1.785.168.758.442	-
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	696.522.781.571	697.855.711.161	1.332.929.590
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	337.438.406.169	337.438.408.136	1.967
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	(93.995.370.940)	(93.995.370.940)	-
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	(2.519.772.253)	(2.519.772.253)	-
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	(16.701.815.248)	(16.701.815.248)	-
61	086	LEMBAGA ADMINISTARASI NEGARA	344.222.513.258	344.222.513.258	-
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	228.549.103.080	228.563.560.230	14.457.150
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	359.937.786.533	359.937.787.396	863
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.188.766.767.231	1.188.766.767.231	-
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	378.060.163.009	381.044.418.836	2.984.255.827
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	67.575.084.826	67.575.084.826	-
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	(6.497.923.875)	(6.497.923.875)	-
69	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	5.890.200.085.755	5.890.200.085.755	-
70	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	(4.245.353.621)	(4.245.353.621)	-
71	100	KOMISI YUDISIAL	16.748.000	16.748.000	-
72	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	(2.104.777.953)	(2.104.777.953)	-
73	104	BNP2TKI	12.439.626.401	-	12.439.626.401
74	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-
75	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-
76	107	BADAN SAR NASIONAL	(23.401.159.076)	(23.157.044.362)	244.114.714
77	108	KOMISI PERSAINGAN PENGAWAS USAHA	-	-	-
TOTAL			**442.228.629.851.720**	**440.902.630.297.224**	**1.535.138.215.162**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011
BERDASARKAN SAK

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/SATKER	ASET												KEWAJIBAN				EKUITAS DANA	
			Aset Lancar			Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap							Aset Lainnya			Utang Jk Pendek		Utang Jk. Panjang			
			Kas & Setara Kas	Piutang	Persediaan		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	Total Aset Tetap	Aset tak Berwujud	Aset Lain-lain	Pihak Ke-3	Utang Jk. Pendek Lainnya	Utang Jk. Panjang	Utang Lainnya	Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Penyediaan Barang dan/atau Jasa	KEMENTERIAN KESEHATAN (024)																				
		1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	174.807.285.727	107.489.848.337	47.547.585.894		790.382.582.445	684.788.772.349	623.985.955.058		135.862.850.925	21.254.063.907	409.191.180.951	1.828.980.734.632	87.313.167	2.350.149.845		98.001.578.204	471.820.328		230.553.343.854	1.828.636.397.617
		2 RSUP Fatmawati, Jakarta	29.339.840.638	35.771.963.198	11.847.070.347		104.330.840.000	209.864.557.701	158.258.211.852				186.502.823.137	293.950.648.688				50.929.302.722			25.829.201.257	293.950.646.366
		3 RSUP Persahabatan, Jakarta	25.972.176.893	57.309.592.795	14.710.172.341		2.256.585.000	136.259.267.285	54.913.713.988			1.261.158.330	91.117.866.617	103.773.065.886				29.501.458.501			99.490.482.518	106.291.316.144
		4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta	140.365.467.961	78.816.309.299	34.061.791.282		27.910.640.000	383.016.579.857	111.715.422.126	393.161.663	2.534.304.500	432.000.000		505.999.107.960	3.592.574.257	27.938.886.235		42.586.881.818			210.673.878.006	532.528.498.452
		5 RSAB Harapan Kita, Jakarta	25.950.378.000	9.245.441.000	11.206.063.000		983.956.516.000	105.413.078.000	218.724.463.000					324.137.541.000				22.227.628.000			24.124.254.000	1.241.592.555.000
		6 RS Kanker Dharmais, Jakarta	48.510.597.217	29.978.449.785	7.983.382.857		505.675.440.000	198.838.817.829	382.157.978.989	42.780.244.041			157.390.125.189	781.223.346.270	250.550.000						85.473.438.888	952.922.346.370
		7 RS. Hasan Sadikin, Bandung	70.977.883.488	29.318.317.343	20.333.738.014		438.182.318.120	387.192.191.447	278.258.824.274		21.628.123.081		305.995.282.899	920.453.875.033							33.814.312.649	820.453.875.033
		8 RS Kariadi, Semarang	136.018.459.440	134.592.706.824	16.676.980.400		700.548.782.400	252.037.840.897	155.143.489.244		43.324.213.880		232.839.542.407	919.242.763.964		156.581.818		137.011.506.178			257.660.379.600	919.399.385.818
		9 RS Sardjito, Yogyakarta	66.667.008.113	57.527.596.549	26.122.921.676			338.074.149.227	222.306.618.301	28.280.538.779	17.545.083.500	28.440.031.810	88.172.821.010	587.498.777.407		12.348.450.498		32.165.858.064			79.801.843.941	599.848.227.815
		10 RSUP Sanglah, Denpasar	73.951.077.471	29.824.325.317	7.592.775.223		246.885.258.000	281.274.772.153	118.505.020.245	573.065.000	12.301.693.250	35.731.168.524		675.270.945.172	255.500.000	987.884.750	99.589.559.980	37.083.352.424			292.414.846.250	678.514.030.922
		11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar	66.894.064.760	61.571.381.131	9.954.237.817		85.777.504.000	225.814.729.765	238.845.560.779		40.890.696.851	16.853.333.176	83.050.809.141	526.132.215.434				71.180.497.295			70.319.185.240	526.132.215.434
		12 RS Djamil, Padang	23.972.831.811	18.234.205.224	6.938.840.800		196.630.000.000	222.223.276.064	86.319.720.715		23.282.412.800	11.601.978.000	215.438.409.711	248.038.980.988		4.895.007.995		34.740.471.442			14.101.406.193	250.924.079.981
		13 RS Muhammad Hoesin, Palembang	62.355.180.157	67.274.457.311	8.838.064.052		861.719.582.500	184.158.319.287	129.992.982.004	58.123.000	14.096.534.874	5.410.096.986	144.357.988.908	930.768.938.783	819.337.571	457.049.364		34.251.107.597			102.214.572.023	932.043.225.886
		14 RSPI Prof.DR. Sulianti Saroso, Jakarta	5.461.248.063	2.451.300.823	10.821.500.171			87.833.181.109	85.063.028.881	98.871.945				173.995.081.935							17.818.548.664	153.728.085.919
		15 RSO Prof.DR.R.Soeharso, Surakarta	28.984.807.045	2.816.782.275	4.755.916.870		201.269.570.000	139.984.985.255	85.103.942.375	58.672.000	9.554.468.800	2.181.564.576		341.322.882				352.337.202.075			35.867.987.192	416.822.920.216
		16 RSD Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado	27.099.850.740	13.117.723.811	5.971.899.793		12.076.257.878	127.308.714.257	75.419.712.820		111.160.518.385	12.893.820.950	80.229.895.987	415.953.320.106	367.200.000	502.019.110	360.599.028	25.500.000			33.261.500.438	258.654.828.313
		17 RSU Dr. Soetomo/Tutanegara, Cabang	40.804.978.994	14.859.487.858	8.543.306.823		83.715.305.000	112.469.874.542	48.228.073.252	9.229.861.130			80.038.870.886	174.932.943.227		196.971.188		12.925.295.898			58.144.200.593	174.838.214.434
		18 RS Paru Ade Motawwas, Salatiga	11.578.214.342	1.612.067.529	5.924.316.078		34.506.676.000	39.913.902.264	30.714.707.882	895.468.970			23.000.334.258	83.130.722.640	174.798.300			5.883.482.962			19.133.587.848	83.305.518.940
		19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	16.950.898.217	541.132.441	2.998.700.088		178.280.000.000	30.706.807.804	30.741.959.800	255.184.500		902.000		227.983.865.964							32.425.570.739	195.425.618.833
		20 RS Mata Cicendo, Bandung	25.409.098.527	7.821.075.128	6.195.599.064		35.097.990.000	100.957.792.933	52.866.111.563	11.530.050		265.821.480	83.777.537.973	125.478.818.933			809.436.464	1.888.702.944			11.594.281.194	374.484.582.204
		21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta	4.899.838.825	3.720.817.504	3.720.817.504		335.598.750.000	78.256.590.037	201.189.999			5.539.891.200		619.585.239.240							17.318.717.137	602.267.122.103
		22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang	13.284.125.631	456.252.218	4.819.288.939		555.824.500.000	30.554.858.305	52.324.124.092			5.539.891.200		373.883.610.284	50.600.000	730.753.000		657.010.838			979.957.848	617.400.178
		23 RS. DR. H. Marzoeki Mahdi, Bogor	6.348.001.117	10.227.440.838	6.717.400.178		387.952.507.820	57.123.343.586	64.500.500.881	440.032.559	59.537.500	6.672.821.186	45.546.093.382	471.402.660.454	3.261.280.791			5.972.580.580			24.240.224.554	472.283.010.900
		24 RS Adam Malik, Medan	111.319.984.851	69.570.646.825	22.023.193.165		47.367.084.000	230.190.478.200	258.146.865.729	42.315.524.916	150.829.495.500		262.738.438.981	467.141.327.448	838.911.051	487.020.588	83.592.564.459	47.142.848.737			72.206.663.465	468.516.259.097
		25 RS Ketergantungan Obat, Jakarta	523.122.799	281.132.865	1.812.925.039			8.182.685.902	67.049.601.071					73.232.586.933							2.398.180.533	73.232.586.833
		26 RS Paru Dr. M. Goeswan, Cisarua Bogor	19.726.961.074	5.738.349.918	5.121.012.818		17.051.953.000	43.158.911.927	28.709.587.200	12.150.000		5.811.387.125	35.539.981.988	55.834.813.389				4.587.674.734			19.898.398.074	55.834.813.389
		27 RSUP Rahkan Stroke Medical, Rehittingi																				
		28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang	24.987.879.561	2.837.486.838	5.043.796.085		80.685.900.000	52.488.118.188	27.925.833.305	6.852.087.087		1.858.122.000	40.825.495.281	129.973.378.309		101.045.107		8.606.087.204			23.983.076.280	129.074.421.416
		29 RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makassar	206.965.205	777.091.190	775.213.582		42.053.220.000	25.456.191.016	24.316.417.850	2.806.059.500			20.603.481.931	70.024.425.829				8.606.087.204			1.525.163.588	70.024.425.829
		30 RS Kusta Dr. Niwi Abdulah Palembang	5.069.271.805	1.401.886.957	1.337.038.559		7.772.630.400	19.488.877.258	14.904.522.227	121.771.000		2.187.811.251	13.482.027.527	30.954.585.108	3.450.000	24.169.000	37.099.295	15.259.000			7.765.848.138	30.982.724.106
		31 RS Kusta Sitanala Tangerang	7.217.165.572	2.285.837.295	2.307.498.451		315.174.345.000	27.180.702.998	37.189.188.500	25.000.000		79.258.000	13.821.237.672	365.927.288.824	3.576.883	165.848.000		97.065.428			11.813.215.840	365.987.113.507
		32 Poltekkes Kemenkes Jakarta III	2.284.242.087	1.800.144.037	430.787.777		38.417.156.000	94.906.585.768	44.162.281.441	398.285.842		220.066.700	5.881.447.902	172.126.870.881	298.485.000			2.000.381.278			2.504.802.653	172.413.455.881
		33 Poltekkes Kemenkes Bandung	14.901.783.608		287.874.764		323.471.187.707	54.462.478.389	115.027.064.717	2.018.718.005		1.288.755.679		496.258.162.497		13.450.000		1.892.712.500			13.328.955.813	496.271.487.497
		34 Poltekkes Kemenkes Medan	113.896.959	155.981.440	52.854.350		11.558.700.450	61.283.839.592	42.226.443.537	1.611.844.100				118.780.918.679				1.298.420.000			(965.798.151)	118.780.918.679
		35 Poltekkes Kemenkes Semarang	18.384.887.344		455.283.021		165.824.884.775	92.923.102.512	68.987.482.045	3.035.592.028		70.543.539.727		410.514.381.085				3.779.430.000			18.040.725.365	410.514.381.085
		36 Poltekkes Kemenkes Makassar	11.088.606.147	114.624.000	103.930.950		70.503.898.850	33.511.760.302	107.845.445.502	911.825.595				312.573.031.359		823.545.500		1.592.487.373			8.995.992.774	311.980.543.859
		37 Poltekkes Kemenkes Jakarta II	9.739.154.415	718.929.788	542.301.408		21.548.480.000	48.231.453.265	32.038.728.887	897.904.885	903.021.815			102.619.598.860	38.974.500	31.988.000					10.997.585.629	102.588.560.160
		38 Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang																				
		39 Poltekkes Kemenkes Surakarta	4.034.207.040	3.296.871.103	157.458.552		123.813.840.000	47.070.344.516	37.448.084.543	8.528.081.244				216.858.340.303							7.491.537.695	216.858.340.303
		40 Poltekkes Kemenkes Malang	2.705.022.297	20.815.400	224.425.575		16.801.371.875	17.542.332.005	21.279.881.830	2.886.685.768		891.120.051		58.181.171.819	48.282.500	23.800.000					2.950.283.272	58.251.254.119
		41 Poltekkes Kemenkes Pontianak																				
		42 Poltekkes Kemenkes Bengkulu																				
		43 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta																				
		44 Poltekkes Kemenkes Surabaya																				
		45 Balai Besar Labkes Palembang	1.223.400.828	138.329.213	107.800.493																	
		46 Balai Besar Laboratorium Kesehatan	313.194.200	117.770.000	54.072.000			15.598.649.762	3.019.958.893				609.028.000	4.956.504.805	14.448.131.850		28.300.000				1.474.338.314	14.474.437.850
		47 Balai Besar Laboratorium Kesehatan	1.458.944.958	43.905.000	260.515.892			13.597.584.131	8.760.291.000	288.703.920				20.964.086.051							485.038.700	20.964.086.051
		48 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat	1.008.187.558	60.883.300	482.517.028		4.940.000.000	11.716.985.030	8.450.581.700	595.807.000			7.534.637.543	18.098.951.187				2.881.881			1.758.274.270	18.098.951.187
		49 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat					20.848.780.000	17.238.128.097	10.188.289.800	725.000		315.000.000	2.737.083.864	41.054.834.283	1.200.000	35.452.400		354.247.489			1.287.150.368	41.091.598.603
		50 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat	757.512.720		1.042.675.312		29.981.872.000	12.672.950.954				25.676.000		43.960.548.954							3.779.430.000	43.960.548.954
		51 Balai Besar Laboratorium Kesehatan	1.781.518.099	4.801.500	1.091.717.205		24.705.802.000	10.571.965.649	3.112.462.000					38.390.067.849		179.484.277	97.100.000	757.513.730			280.182.841	43.890.548.954
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)						17.357.585.844	2.314.000.000					4.941.511.254	197.000.000	658.230.800					945.575.112	38.588.545.928
		1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)	18.770.035.060	3.458.482.853	1.078.885.520		545.192.063.827	30.989.388.254	198.200.831.979	9.069.023.880		18.364.548.013	14.710.074.710	4.941.511.254							2.857.837.274	5.794.742.034
		KEMENTERIAN PERTANIAN (019)											52.727.017.375	749.208.436.258								
		1 Pusat Veterinaria Farma Surabaya	978.120.955		1.280.280.184		813.309.596.928	32.851.018.445	19.760.555.239	18.294.000						7.514.000		1.111.810.236			28.194.773.217	749.215.950.358
		2 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	2.488.038.775	1.884.737.000	2.712.197.190		33.973.500.000	11.855.722.610	12.588.519.868	181.940.101		1.182.340.753	6.186.197.255	980.843.101.089	2.216.395						2.150.943.822	980.845.317.484
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)										7.844.226.240		86.843.187.647	2.216.395	237.823.184		216.498.750			13.874.583.215	87.183.027.226
		1 Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor	3.648.081.319	27.005.720	1.741.606.131																	
		2 Balai Besar Industri Agro	11.186.798.782	422.972.550	152.378.822		6.980.780.130	18.201.580.883	14.809.401.752	921.468.487		156.802.045	12.739.721.884	28.730.128.413	66.953.667	28.300.000						
		3 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik					40.851.148.958	49.450.480.774	20.025.395.550	742.852.570		112.278.800	11.820.194.007	86.381.764.645			1.159.400				5.415.513.760	29.825.282.080
		4 Balai Besar Tek Pencegahan & Pengamanan	372.858.907	1.076.493.883	237.255.343												14.500.000	169.980.000			11.584.889.275	89.361.764.645
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)					15.178.000.000	12.240.273.062	2.998.044.100	35.825.000		21.882.500		30.479.975.662		61.000.000						
		1 Universitas Diponegoro, Semarang	256.282.397.676	29.841.986.883	6.981.830.960													54.231.901			1.834.486.132	30.534.975.882
		2 Universitas Padjadjaran, Bandung	110.817.206.568	5.489.016.697	7.928.709.774		1.424.284.539.295	290.077.410.302	349.819.717.853	19.357.119.753	425.282.523.882	14.299.300.933		2.522.950.913.788	888.248.500	780.360.171					292.885.587.398	2.524.504.329.488
		3 Universitas Negeri Malang	78.403.779.676	1.230.515.000	2.218.645.538		1.423.917.725.044	388.286.191.101	493.077.287.450	24.251.333.468	128.484.902.085	10.851.007.112	567.877.052.585	1.821.082.650.723	2.185.948.612	102.925.535	39.303.475.231	15.784.870.933			89.134.791.875	1.823.391.322.470
		4 Universitas Hasanuddin, Makassar	75.888.954.115	27.892.359.999	7.704.236.473		332.722.245.000	157.482.549.830	174.165.759.826	11.254.181.390	128.942.980.072	11.898.837.463	106.342.784.803	790.190.573.478	567.398.500	2.733.016.580		4.947.529.500			77.008.410.712	711.460.788.566
		5 Universitas Brawijaya, Malang	84.206.487.425	47.246.067.944	7.178.163.799		1.888.215.673.625	378.330.881.340	328.141.037.328	8.870.671.575	553.019.810.898	4.370.157.201	202.988.295.491	2.732.922.226.545	1.870.265.453	16.280.455.368	528.450.115	7.485.955.788	11.134.784.388		103.540.544.878	2.738.698.721.998
		6 Universitas Negeri Semarang	82.500.357.186	918.884.488	1.848.081.509		1.932.738.821.949	234.836.841.025	589.238.887.338	61.240.222.838	84.186.489.560	10.312.845.481		2.902.323.994.271	1.338.978.500	80.923.000	3.142.700	62.257.014.087	441.666.668		58.365.812.379	2.903.300.211.155
		7 Institut Teknologi Sepuluh Nopember	43.319.470.208	7.837.425.621	3.490.370.178		444.926.276.000	129.782.223.958	185.009.115.202	15.775.002.061	140.143.014.893	12.139.437.231		926.775.194.817	2.001.328.000						85.267.302.195	910.778.514.217
		8 Universitas Mulawarman Samarinda	224.849.817.586	472.595.000	586.280.469		1.413.714.589.200	194.430.379.100	305.380.591.180	5.347.848.889		18.627.084.156		1.937.500.573.335	2.900.575.467	18.479.732.710	18.025.131.426	249.339.788			38.161.795.891	1.950.580.881.532
		9 Universitas Sebelas Maret Surakarta	127.521.302.927	11.598.895.100	9.843.475.491											1.159.744.444	2.039.781.517	65.866.875.073			157.752.838.447	1.135.764.444
		10 Universitas Lampung	43.407.033.825	1.313.548.991	2.418.906.991		1.835.395.815.000	217.352.441.231	300.923.984.780	13.271.566.447	713.957.800	4.847.716.810	290.408.823.358	2.171.298.038.112	642.540.500	2.639.510.818		24.716.945.411			124.246.469.107	2.174.580.489.428
		11 Universitas Negeri Yogyakarta	93.136.628.532	2.160.310.282	1.179.392.100		221.059.395.400	222.135.256.075	153.210.131.450	4.302.891.600	81.305.276.100	2.248.694.882		681.912.849.507	257.287.750	780.206.320	9.261.253.308	84.376.741			34.791.858.756	662.960.454.577
		12 Universitas Negeri Gorontalo	9.411.051.705		583.117.074		1.266.215.673.625	198.739.870.729	249.808.113.394	39.468.575.864	97.541.441.800	7.170.769.900	35.051.419.079	1.851.812.972.192	1.024.192.200	11.101.000		38.903.723.360			57.802.892.504	1.852.544.284.392
		13 Universitas Bengkulu	29.303.809.591	4.000.000.000	2.894.981.908		81.284.870.842	127.247.345.478	128.868.714.225	9.204.115.957	9.008.714.815	2.773.912.589		351.276.847.818	4.974.777.600			1.529.955.830			8.461.212.398	335.303.425.218
		14 Universitas Sriwijaya	201.933.481.825	3.348.864.152	2.906.752.744		62.845.908.000	98.385.950.836	106.228.515.980	7.766.165.280	45.686.582.160	10.098.795.260		325.022.803.506	1.248.878.330	233.402.068		477.290.850			35.721.500.347	328.505.083.924
		15 Universitas Negeri Jakarta	27.884.151.663	179.880.189	2.489.488.576		1.725.494.316.000	301.755.108.554	413.788.313.452	9.544.110.984	165.324.654.239	7.986.812.590	252.982.814.196	2.372.031.131.874	4.863.448.131			55.853.534.089			162.535.584.432	2.376.724.548.785
		16 Universitas Andalas	9.561.452.441		5.913.930.891		1.284.777.948.381	216.093.227.816	405.913.476.595	12.331.054.880	3.444.373.515	2.835.609.485		1.905.395.895.582	13.528.437.167	824.488.061	151.102.592				30.411.378.068	1.919.748.821.830
		17 Universitas Negeri Malang	78.403.779.676	1.230.515.000	2.218.645.538		1.000.892.319.068	240.122.583.159	706.957.844.068	22.869.443.524	190.506.453.801	15.482.291.254		2.175.787.905.902	4.576.690.700	345.437.250		4.007.840.733	13.398.810.118		11.467.243.588	2.187.120.392.734
		18 Universitas Negeri Surabaya	41.041.145.396	4.789.858.000	593.512.220		1.234.022.457.382	297.451.522.347	194.751.928.808	11.547.524.937	78.182.760.154	21.402.788.764	105.342.784.803	1.835.758.012.382	8.906.858.880	451.108.512	50.611.418.800	4.947.529.500			77.006.410.712	711.490.788.566
																					(4.188.906.184)	1.942.818.977.754

DAFTAR 28.A

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA	ASET												KEWAJIBAN				EKUITAS DANA	
			Aset Lancar			Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap							Aset Lainnya			Utang Jk Pendek		Utang Jk. Panjang			
			Kas & Setara Kas	Piutang	Persediaan		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	Total Aset Tetap	Aset tak Berwujud	Aset Lain-lain	Pihak Ke-3	Utang Jk. Pendek Lainnya	Utang Jk. Panjang	Utang Lainnya	Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		19 Universitas Jenderal Soedirman	80.890.900.750	9.547.943.794	867.930.114	-	1.452.233.486.951	217.276.389.829	227.505.523.085	5.068.798.398	1.889.553.850	5.253.128.292	104.391.406.890	1.804.877.434.605	700.990.000	-	-	11.826.913.490	-	-	78.705.761.189	1.805.576.424.805
		20 Universitas Sebelas Maret	10.286.498.798	-	280.413.701		141.085.871.500	212.498.033.473	400.284.382.855	-	3.506.226.401	5.270.086.675		771.734.401.874	1.571.356.000	1.572.498.800	-	-	-	-	10.868.912.499	774.888.167.874
		21 Universitas Terbuka	201.878.965.702	29.350.000	81.352.840.346		232.125.947.800	324.851.955.195	551.158.251.278	1.851.887.857	40.182.364.200	20.577.300.584	-	1.190.567.613.884	5.735.818.087	79.800.000	-	7.120.255.701	-	-	381.938.720.345	1.186.322.332.081
		22 Universitas Riau	10.833.844.586	3.596.579.804	988.482.977		3.408.787.122.400	97.287.596.138	137.064.671.751	8.547.213.715	28.830.287.586	19.878.888.229	-	1.895.854.788.817	407.525.800	-	-	40.000	-	-	16.464.647.467	1.896.582.294.517
		KEMENTERIAN AGAMA (025)												-								-
		1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	28.756.981.957	30.200.675	195.841.313		499.216.980.800	150.250.290.147	384.349.809.784	3.911.835.866	2.983.573.758	2.724.845.200		1.033.419.143.357	4.724.805.500	31.540.000	210.752.774	6.776.971.518	-	-	21.963.481.355	1.039.175.489.857
		2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	51.373.824.810	1.868.528.810	554.573.885		464.868.599.000	205.102.400.320	560.272.357.305	20.027.255.481	76.696.767.657	4.665.399.170	272.518.856.007	1.091.643.809.976	2.933.158.101	638.844.087	2.077.106.030	3.958.251.668	-	-	47.578.585.377	1.095.619.612.144
		3 UIN Malang	10.552.553.447	-	1.314.629.626		182.876.481.814	54.582.511.921	168.230.100.567	14.032.818.039	91.871.769.828	5.207.885.000	-	516.014.386.788	494.708.043	40.000.000	10.700.317	4.614.543	-	-	11.851.859.515	535.548.076.811
		4 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	1.520.879.577	1.458.253.000	857.556.812		238.940.610.949	45.477.942.866	28.727.500.322	1.724.070.458	41.348.726.848	776.012.925	30.093.583.198	316.894.700.956	189.767.250	117.400.000	-	222.953.881	-	-	3.412.054.506	319.221.388.206
		5 UIN Ahmadin, Makassar	12.962.257.977	11.806.235	16.354.000		296.890.779.000	400.384.576.503	314.075.322.158	10.555.071.068	48.178.442.434	24.218.748.800	-	1.106.096.940.961	1.827.865.600	1.216.334.000	9.747.621	-	-	-	13.700.960.581	1.089.205.160.581
		6 UIN Walisongo Semarang	13.298.797.580	44.845.000	118.412.018		161.627.072.572	29.369.715.218	76.425.458.089	2.344.770.228	8.544.451.800	6.816.475.000	-	303.328.903.086	34.000.000	886.048.200	-	40.287.570	-	-	2.728.531.788	304.246.651.288
		7 UIN Sultan Syarif Kasim Riau	22.329.682.888	-	151.292.170		304.205.061.125	101.691.983.209	231.816.164.436	2.612.939.636	5.347.581.180	7.953.632.700	-	581.424.412.295	197.406.845	17.821.000	1.052.886.151	-	-	-	13.477.548.163	325.277.737.817
		8 UIN Sultan Thaha Saifuddin	228.548.258	585.100.000	90.824.267		40.947.740.000	21.460.949.838	60.989.245.431	2.765.089.217	-	7.727.606.575	-	133.910.632.785	-	-	48.321.995	-	-	-	21.428.998.587	661.638.840.130
		9 UIN Sunan Ampel	13.106.994.388	-	254.454.332		389.328.832.391	34.815.290.277	85.987.875.921	2.993.700.583	77.382.280.150	3.818.390.384	-	574.894.578.706	34.000.000	-	6.007.232.000	2.281.584	-	-	8.892.541.150	856.551.250	133.810.822.765
		10 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	6.823.311.329	-	59.195.065		113.878.831.000	13.542.484.329	32.981.764.225	2.256.586.450	-	2.718.239.000	-	165.185.884.995	843.365.000	37.906.500	23.715.264	76.250.000	-	-	7.351.925.934	574.836.376.729
		11 UIN Raden Intan Lampung	3.772.058.241	-	283.122.502		141.881.351.950	23.231.934.066	60.742.496.298	3.029.788.040	-	14.439.896.100	43.291.524.923	290.123.993.843	7.480.000	421.986.000	-	17.371.000	-	-	8.892.541.150	168.067.188.495
		12 UIN Raden Fatah Palembang	3.257.953.213	-	167.842.168		122.878.846.200	24.254.094.164	113.278.398.975	698.820.064	-	785.571.000	-	281.896.930.403	38.500.000	-	-	-	-	-	4.037.808.743	200.553.341.442
		13 UIN Alauddin Makassar	3.747.868.780	-	74.366.910		38.051.866.500	15.962.913.480	25.225.757.000	2.581.599.147	35.864.580.400	308.525.000	-	117.744.856.527	83.050.000	-	37.112.205	-	-	-	3.435.795.379	281.838.333.402
		14 IAIN Materan	524.753.859	1.429.720.000	-		148.707.179.587	28.068.194.357	69.411.386.000	1.148.152.488	152.415.236.271	1.587.952.000	-	401.398.060.673	-	-	-	4.691.291.306	-	-	1.821.942.917	323.530.942	405.957.371.873
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN												-								-
		1 Balai Besar Pengembangan Latihan Dalam	374.811.980	117.004.400	12.923.295		585.434.370.000	35.887.283.078	27.554.339.623	173.884.941		1.827.948.883		250.772.325.705	145.200.000	-	-	-	-	-	503.838.865	350.917.522.707
		2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja	544.097	-	-		94.827.603.000	35.057.923.104	54.989.945.882	90.388.000	-	3.347.114.840	-	190.067.974.828	-	-	-	-	-	-	544.097	190.067.974.828
		3 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang	280.567.432	-	582.898.827		19.914.022.000	17.544.828.888	24.168.098.000	213.948.000	-	1.883.785.500	-	63.527.492.168	88.252.000	-	-	-	-	-	843.467.359	63.810.734.388
		KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN												-								-
		1 PP PTTG	1.421.394.112	45.286.150	340.768.998			8.725.301.268		785.420.950				8.786.992.665	2.691.929.551	57.475.000	-	-	-	-	1.807.427.281	2.748.104.551
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)												-								-
		1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM	10.585.214.375	258.832.487	10.617.705.306		-	75.882.864.390	535.680.599.784	1.998.015.500	-	55.322.500	89.495.883.390	523.906.158.284	10.585.214.375	259.832.487	10.617.705.306	-	-	-	10.845.046.862	534.754.205.148
		BADAN PENGAKJIAN DAN PENERAPAN												-								-
		1. BPPT Lojoring	18.781.783.328	5.784.060.930	10.759.155			5.131.729.075		1.811.350			323.892.589	4.899.447.836	8.881.754	2.647.606.234	11.881.150.741	-	-	-	12.715.452.372	7.465.735.794
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)												-								-
		1. RS. Sheyangkara R. Said Sukanto Jakarta	6.975.704.747	2.831.395.310	4.475.063.725			98.344.182.845	27.895.871.186	160.180.022		8.133.217.882		133.533.441.925	-	115.875.000	1.891.743.508	-	-	-	13.291.330.274	133.649.316.835
		2. RS Sheyangkara Tk.II Kediri	8.162.713.892	4.894.416.711	2.048.761.608		478.400.000	16.883.567.148	7.528.471.198	-				24.890.438.344	34.945.276	-	2.832.204.853	-	105.354.000	-	12.475.087.378	24.590.029.814
		3 RS Sheyangkara Tk.II R.S. Samarinda	1.734.878.000	840.951.191	3.548.594.577		-	41.134.981.905	-	3.598.610.751				44.733.592.659	-	-	1.717.271.481	-	-	-	4.205.272.198	44.733.592.659
		4 RS Sheyangkara Tk.II Moyna Godang	11.178.122.624	1.904.864.077	2.502.821.037		32.934.960.800	20.460.885.414	5.979.740.000	11.882.800	1.230.500.000	79.800.000		60.797.776.314	95.000.000	-	5.488.526.531	8.898.000	-	-	10.048.110.802	50.873.760.814
		5 RS Sheyangkara, Semarang	1.179.481.327	1.312.006.733	5.436.329.335		15.078.410.780	13.159.060.000	1.325.000	-		24.800.000		28.238.804.780	-	97.359.815	712.960.000	-	-	-	7.216.837.365	28.324.164.395
		6. RS Sheyangkara Tk.III, Palembang	414.151.816	338.349.393	1.316.837.325		30.100.229.358	10.725.037.248	5.602.582.849	28.710.000				46.690.159.585	-	-	382.981.498	-	-	-	1.705.356.928	46.690.159.585
		7 RS Sheyangkara Baubing	-	-	-									-								-
		8 RS Sheyangkara / Lembaga STUKPA	-	-	823.743.083			6.433.357.841	5.612.184.130	2.875.000		677.250.000		12.935.676.771							823.743.083	12.935.676.771
		9 RS Sheyangkara Tk.III, Tebata Polda Sab	74.478.048	48.236.500	1.558.888.037		8.982.000.000	7.402.506.833	3.892.500.000	4.722.018		3.447.926.700		21.384.157.543							1.882.603.586	21.384.157.543
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA												-								-
		1 Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	2.275.344.029	103.899.447	94.270.840									-								-
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN						927.338.095					333.757.803	593.581.292	2.934.799	-	214.598.849	-	-	-	2.258.914.968	585.616.091
		1 Balai Besar Pendidikan Penyegaran &	59.567.583.853	-	785.128.258		46.909.109.000	48.800.393.805	45.485.976.899	354.920.800		814.985.176	43.047.030.552	98.483.337.219	-	-	-	-	-	-	80.075.220.111	98.483.357.238
		2 Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu	10.065.811.299	-	62.236.852		36.811.338.000	81.801.971.453	456.998.105.186	1.332.481.164		17.370.158.975	22.847.224.278	573.657.310.402	741.857.583	-	3.827.901.200	277.500.000	-	-	8.390.147.149	574.379.467.985
		3 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	35.981.347.353	450.173.524	201.597.050		519.471.406.800	60.313.126.204	209.787.548.788	2.578.771.450	1.168.188.700	8.558.916.820		708.987.381.570	2.132.029.716	1.185.107.000	-	2.182.228.800	-	-	33.429.849.127	800.204.518.388
		4 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	9.880.857.450	28.850.000	119.665.900		145.642.185.358	93.848.205.288	37.714.285.881	1.306.914.890	29.007.200.000	3.434.332.358	13.054.449.248	258.991.764.849	12.474.333.687	-	-	1.827.600.980	-	-	8.406.586.280	301.468.098.107
		5 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	-	-	-									-								-
		6 Akademi Teknik dan Keselamatan	2.619.174.805	-	678.930		50.546.100.000	182.181.006.024	235.971.542	724.451.531				-								-
		7 Kadar Hidup Transportasi Darat (KPPTD)	1.547.269.824	-	753.019.197		35.402.500.000	35.437.445.217	39.418.448.421	1.998.251.000		3.744.339.881		116.000.453.519	-	-	-	-	-	-	2.523.476.000	237.431.588.087
		KEMENTERIAN ESDM										1.998.251.000		237.431.588.087	-	-	-	-	-	-	2.257.475.443	114.240.068.838
		1 Pusat Penelitian Teknologi Minyak & Gas Bumi	18.007.003.178	11.438.292.200	1.822.645.003		922.283.508.385	306.248.281.748	7.077.259.100	-	14.357.929.405	-	-	112.229.898.938	1.488.000.000	112.200.000	42.874.578	-	-	-	-	-
		KEMENTERIAN PERUSAHAAN RAKYAT (091)												950.005.086.837	3.057.040.000	-	-	-	-	-	31.067.840.381	953.062.108.837
		1 Pusat Pemiliharaan Perumahan Jakarta	145.053.998.297	170.054.044.597				2.495.458.247						-								-
		TOTAL PER DEPARTEMEN												2.495.458.247		2.381.883.857.820		1.333.290			315.088.677.574	2.384.388.115.887
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	16.770.835.080	3.456.682.853	1.078.985.529		545.192.062.827	38.849.388.354	158.300.931.979	5.680.032.660		18.764.048.013	52.727.017.375	749.208.436.258	-	7.514.000	-	1.111.510.238	-	-	20.194.772.217	749.215.950.258
		KEMENTERIAN PERTANIAN (016)	3.465.159.734	1.984.777.000	16.982.397.374		647.183.858.928	44.567.741.055	33.347.374.925	303.724.181		8.826.545.593	6.186.197.255	727.866.788.745	4.432.730	237.623.184	-	317.967.067	-	-	16.625.327.017	728.178.244.729
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	15.207.716.913	1.526.473.162	2.137.246.406		65.063.915.688	77.592.784.519	37.832.841.482	1.639.954.067		293.775.345	24.153.515.781	159.585.938.726	7.514.000	1.111.510.238	-	317.967.067	-	-	20.194.772.217	749.215.950.258
		KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	1.282.473.617.472	911.027.816.142	325.775.999.150		7.859.217.174.210	5.208.273.577.599	4.298.515.589.591	156.838.873.129	594.886.585.957	287.805.887.280	2.724.864.289.755	15.536.071.577.765	10.794.861.820	51.855.551.996	185.358.980.898	796.278.004.589	471.826.328	-	1.827.587.347.216	15.711.252.571.254
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	1.276.423.559.247	161.416.788.806	152.852.708.643		20.895.492.711.972	4.625.482.616.484	6.516.245.984.731	298.373.519.435	2.321.361.323.389	227.228.707.372	1.564.404.853.573	32.343.788.519.500	56.846.675.997	41.282.371.373	117.912.755.459	298.635.694.863	24.946.241.150	-	1.974.898.616.774	32.416.951.726.630
		KEMENTERIAN AGAMA (025)	175.682.967.812	5.236.548.529	3.855.278.561		3.422.250.867.108	1.193.516.323.711	2.271.244.521.577	72.815.512.949	542.143.460.116	82.795.919.724	371.391.103.973	7.215.799.521.580	11.588.723.889	8.437.419.667	9.448.572.052	12.758.716.414	-	-	1.827.587.347.216	15.711.252.571.254
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN	635.722.519	117.084.400	595.223.128		101.975.500.000	58.284.634.648	186.710.380.435	448.241.941		6.958.527.223		594.377.781.697	233.452.250	-	-	-	-	-	1.974.898.616.774	32.416.951.726.630
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042)	1.421.394.112	45.286.150	340.768.998		-	8.725.301.268	-	785.420.950	-	-	-	8.786.992.665	2.691.929.551	57.475.000	-	-	-	-	1.807.427.281	2.748.104.551
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	10.585.214.375	258.832.487	10.617.705.306		-	75.882.864.390	535.680.599.784	1.998.015.500	-	55.322.500	89.495.883.390	523.906.158.284	10.585.214.375	259.832.487	10.617.705.306	-	-	-	10.845.046.862	534.754.205.146
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	23.671.591.664	12.978.619.825	21.512.982.891		88.287.900.963	211.921.576.116	55.570.184.373	3.907.800.787	1.330.500.000	11.257.894.562	-	272.072.059.421	118.945.278	203.234.615	12.905.708.187	-	-	-	1.807.427.281	2.748.104.551
		BADAN PENGAKJIAN DAN PENERAPAN	18.781.783.328	5.784.060.930	10.759.155		-	5.131.729.075	-	1.811.350	-	-	323.892.589	4.899.447.836	8.881.754	2.647.606.234	11.881.150.741	-	-	-	10.845.046.862	534.754.205.146
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA	2.275.344.029	103.899.447	94.270.840		-	927.338.095	-	-	-	-	333.757.803	593.581.292	2.934.799	-	214.598.849	-	114.352.000	-	51.243.871.592	372.250.878.208
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	119.672.055.482	457.023.524	1.827.292.285		832.782.658.859	502.482.158.012	787.598.376.822	8.018.676.935	21.285.498.700	35.611.484.103	78.747.764.174	2.305.942.855.356	16.844.920.555	1.257.367.069	3.870.725.778	5.184.988.453	-	-	12.715.452.372	2.465.735.794
		KEMENTERIAN ESDM	18.997.002.178	11.438.292.200	1.822.645.003		822.283.508.385	306.248.281.748	7.077.259.100	-	14.357.929.405	-	-	950.005.086.837	3.057.040.000	-	-	-	-	-	2.256.214.606	595.616.091
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	145.053.998.297	170.054.044.597	-		-	2.495.458.247	-	-	-	-	-	317.603.501.141	-	-	-	-	-	-	112.995.737.026	2.127.195.197.322
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN	2.918.998.130.843	1.265.773.390.713	532.310.112.695		-	-	-	-	-	-	-	2.495.458.247	-	2.381.883.857.820	-	1.333.290	-	-	31.067.840.381	953.062.108.837
2	Pengelolaan Wilayah/Kawasan	SEKRETARIAT NEGARA (067)					35.298.708.891.460	12.774.587.286.417	14.885.505.529.189	554.855.578.109	3.485.295.178.072	884.424.112.135	4.826.011.808.583	67.229.318.846.765	188.712.813.427	2.488.190.418.149	352.188.858.471	1.115.533.416.553	25.522.412.478	-	315.088.677.574	2.384.388.115.887
		1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Senq	113.586.648.427	1.137.825.146	814.238.758	8.637.184.500	49.128.014.145.300	57.153.335.948	928.894.029.295	963.339.358	6.595.978.750	55.383.339.718	-	50.174.914.168.389	15.647.500	16.894.699.899	4.240.887.826	8.872.028.273	-	-	1.263.458.471.728	64.852.696.664.895
		2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.268.458.268.828	64.852.696.664.895
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAANWILA	113.586.648.427	1.137.825.146	814.238.758	8.637.184.500	49.128.014.145.300	57.153.335.948	928.894.029.295	963.339.358	6.595.978.750	55.383.339.718	-	50.174.914.168.389	15.647.500	16.894.699.899	4.240.887.826	8.872.028.273	-	-	101.976.114.418	50.198.261.870.057
3	Pengelolaan Dana Khusus	KEMENTERIAN KEUANGAN (015)												-								-
		1. Pusat Investasi Pemerintah	12.504.475.162.893	37.707.906.948	27.660.585	4.654.758.763.496	-	8.765.283.332	-	-	-	-	-	8.765.283.332	475.637.806	3.692.656.978.015	3.692.656.978.015	316.321.012	-	-	8.848.532.430.179	8.356.956.692.648
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)												-								-
		1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Kotan	2.025.037.884.878	4.222.568.054	39.815.750		-	1.998.957.250	175.500.000	5.861.250	-	-	-	780.322.518	1.398.115.898	-	-	45.577.248.209	-	-	1.583.723.828.271	32.291.235.428
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)												-								-
		1. SID. PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN	4.243.212.896.487	2.264.782.880.027	32.278.350		-	3.102.327.822	-	-	-	-	-	4.481.981.926	2.853.245.696	643.390.000	-	-	-	-	6.506.026.065.844	3.296.735.696
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN												-								-
		1. BPSTI	3.437.349.747.152	1.119.620.806.736	11.170.707.000		-	23.271.747.504	28.004.828.842	-	-	-	-	51.276.576.346	13.148.140.719	38.127.235.627	-	30.901.119.438	-	-	4.594.562.248.224	99.028.355.063
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)												-								-
		1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	840.857.779.181	1.197.771.258.989	371.091.065		-	11.129.321.948	-	-	-	-	-	4.473.680.982	6.955.640.964	2.118.297.000	-	4.078.011.854	-	-	2.038.000.127.235	8.773.857.667
		TOTAL PER DEPARTEMEN												-								-
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	12.504.475.162.893	37.707.906.948	27.660.585	4.654.758.763.496	-	8.765.283.332	-	-	-	-	-	8.765.283.332	475.637.806	3.692.656.978.015	3.692.656.978.015	316.321.012	-	-	8.848.532.430.179	8.356.956.692.648
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	2.025.037.884.878	4.222.568.054	39.815.750		-	1.998.957.250	175.500.000	5.861.250	-	-	-	780.322.518	1.398.115.898	-	-	45.577.248.209	-	-	1.583.723.828.271	32.291.235.428
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	4.243.212.896.487	2.264.782.880.027	32.278.350		-	3.102.327.822	-	-	-	-	-	4.481.981.926	2.853.245.696	643.390.000	-	-	-	-	6.506.026.065.844	3.296.735.696
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	3.437.349.747.152	1.119.620.806.736	11.170.707.000		-	23.271.747.504	28.004.828.842	-	-	-	-	51.276.576.346	13.148.140.719	38.127.235.627	-	30.901.119.438	-	-	4.594.562.248.224	99.028.355.063
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	840.857.779.181	1.197.771.258.989	371.091.065		-	11.129.321.948	-	-	-	-	-	4.473.680.982	6.955.640.967	2.118.297.000	-	4.078.011.854	-	-	2.038.000.127.235	8.773.857.667
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN	21.050.933.280.269	4.522.601.414.454	11.641.352.829	4.654.758.763.496	-	48.257.637.357	28.180.328.842	5.861.250	-	-	-	13.148.140.719	24.127.235.627	-	30.901.119.438	-	-	-	23.343.344.480.783	8.473.241.944.501
		TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN	27.082.678.358.539	5.910.512.540.311	545.765.703.281	4.681.395.957.996	84.406.723.136.760	12.441.893.238.723	15.813.489.886.317	555.824.398.715	3.491.891.156.922	939.807.451.854	4.826.011.808.583	112.552.925.856.477	112.965.785.743	6.259.544.244.721	4.043.297.704.124	1.175.134.826.161	25.522.412.478	-	28.314.488.472.908	132.561.193.231.454

DAFTAR 28.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
Per 31 Desember 2011
BERDASARKAN SAK

No	Jenis Layanan	KEMENTERIAN/SATKER	Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat				Total Pendapatan	Beban Usaha	Surplus (Defisit) Sblm Disetor ke Kas Negara	Setor Ke Kas Negara	Surplus (Defisit) dengan APBN	Surplus (Defisit) Tanpa APBN	Keterangan
			Operasional	Non Operasional	APBN	Hibah							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	9	10=8-9	11	12	13	14
1	Pengadaan Barang dan/atau Jasa	**KEMENTERIAN KESEHATAN (024)**											
		1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	657,953,394,957	31,525,468,342	244,668,270,142	299,841,600	934,346,975,081	892,178,933,504	52,168,041,577		52,168,041,577	(192,500,228,585)	
		2 RSUP Fatmawati, Jakarta	335,696,717,077	3,385,167,196	107,922,960,640	11,545,886,191	458,560,531,104	455,931,176,951	2,629,354,153		2,629,354,153	(105,293,606,487)	
		3 RSUP Persahabatan, Jakarta	164,476,976,025	40,737,527,854	120,832,129,580		328,046,633,459	262,250,621,108	63,796,012,351		63,796,012,351	(57,036,117,229)	
		4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta	445,522,608,412	504,098,408	75,794,165,832	-	521,820,872,652	512,103,084,438	9,717,788,214		9,717,788,214	(66,076,377,618)	
		5 RSAS Harapan Kita, Jakarta	139,545,120,000	8,010,001,000	95,273,521,000		242,828,642,000	236,325,101,000	6,503,541,000		6,503,541,000	(88,769,980,000)	
		6 RS Kanker Dharmais, Jakarta	263,830,725,888	7,207,684,424	93,461,543,240		364,499,953,552	336,835,915,302	27,464,038,250		27,464,038,250	(65,957,504,990)	
		7 RS. Hasan Sadikin, Bandung	445,269,290,823	15,355,731,275	165,976,487,801		646,621,489,899	606,994,766,309	39,626,723,390		39,626,723,390	(146,348,744,211)	
		8 RS Kariadi, Semarang	340,525,735,826	16,106,382,851	115,647,717,488		472,279,836,165	395,637,775,317	76,642,060,848		76,642,060,848	(38,005,658,640)	
		9 RS Sardjito, Yogyakarta	311,785,584,611	4,359,971,145	148,389,721,117	3,725,548,467	468,239,705,540	417,571,381,074	50,668,324,466		50,668,324,466	(97,700,395,651)	
		10 RSUP Sanglah, Denpasar	278,106,980,798	10,702,681,423	88,930,927,289	39,328,508,509	417,039,108,020	367,070,984,669	49,968,143,360		49,968,143,360	(58,932,783,929)	
		11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar	247,755,091,262	7,574,547,784	156,352,785,575	601,659,690	412,284,104,311	338,171,451,438	74,112,652,875		74,112,652,875	(62,240,112,700)	
		12 RS Dijenal, Padang	140,876,204,411	6,398,420,930	74,081,204,288	169,656,000	221,525,485,239	236,195,525,300	(14,670,040,061)		(14,670,040,061)	(88,751,244,359)	
		13 RS Muhammad Hoesin, Palembang	300,693,617,089	10,014,541,911	116,910,520,004	31,186,442,100	458,705,121,104	350,486,162,313	108,218,958,791		108,218,958,791	(8,591,591,213)	
		14 RSPI Prof.DR. Sulianti Saroso, Jakarta	20,083,457,207	105,001,740	78,656,109,492		98,854,568,439	98,806,920,131	47,648,308		47,648,308	(78,608,461,184)	
		15 RSO Prof.DR.R.Soeharso, Surakarta	68,339,765,857	572,685,118	78,540,710,173		147,453,141,158	154,084,861,914	(6,641,720,756)		(6,641,720,756)	(85,182,430,929)	
		16 RSU Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado	108,306,950,513	(23,501,120,420)	85,159,676,716		170,965,506,809	195,151,832,687	(24,186,325,878)		(24,186,325,878)	(109,346,002,594)	
		17 RSU Dr. Soerachi Tirtonegoro, Klaten	84,407,531,809	21,881,068,177	64,181,875,034	1,270,031,350	151,740,504,170	132,695,314,209	19,045,189,961		19,045,189,961	(45,136,685,073)	
		18 RS Paru Ario Wirawan, Salatiga	21,385,617,261	938,169,775	26,900,552,013	-	49,135,339,049	42,569,192,764	6,566,146,285		6,566,146,285	(20,234,405,728)	
		19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	15,524,710,761		25,915,999,133	-	41,440,709,894	38,089,643,514	3,351,066,380		3,351,066,380	(22,564,932,753)	
		20 RS Mata Cicendo, Bandung	62,658,889,848	68,072,319	72,170,349,825	14,938,647,000	149,835,958,992	82,895,282,843	66,939,776,149		66,939,776,149	(5,230,573,676)	
		21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta	15,665,173,506	81,691,747	39,616,789,287	-	54,363,654,539	52,890,836,843	1,502,817,696		1,502,817,696	(37,113,971,591)	
		22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang	29,915,870,185	1,586,617,708	57,327,180,000	99,001,333	88,918,989,226	94,135,845,343	(5,216,876,117)		(5,216,876,117)	(62,544,056,117)	
		23 RS. DR. H. Marzoeki Mahdi, Bogor	48,489,903,105	16,598,975,729	58,340,376,000		123,398,254,828	129,242,440,127	(5,844,185,299)		(5,844,185,299)	(64,184,561,299)	
		24 RS Adam Malik, Medan	305,921,315,902	10,131,034,160	223,625,046,662		539,677,396,944	420,653,238,342	119,024,158,602		119,024,158,602	(104,500,888,260)	
		25 RS Ketergantungan Obat, Jakarta	9,402,878,448	112,625,952	30,886,756,595	-	40,202,260,956	28,483,103,124	11,719,157,832		11,719,157,832	(18,967,598,723)	
		26 RS Paru Dr. M. Gunawan, Cisarua Bogor	29,035,523,595	5,016,860,115	31,479,327,462	-	65,534,731,172	52,581,563,691	12,952,767,481		12,952,767,481	(16,526,559,961)	
		27 RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi				-	-	-	-		-	-	
		28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang	29,180,053,075	2,891,633,327	58,179,427,507	-	90,051,113,909	70,097,412,737	19,953,701,172		19,953,701,172	(38,225,726,335)	
		29 RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makassar	7,427,851,809	378,176,830	22,864,791,282	305,527,500	31,008,347,421	28,508,558,550	2,497,748,871		2,497,748,871	(20,397,042,411)	
		30 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang	7,226,825,741	1,383,600,414	22,529,535,012	5,890,000	31,145,851,167	27,717,527,898	3,428,423,271		3,428,423,271	(19,101,111,741)	
		31 RS Kusta Sitanala Tangerang	15,193,782,024	201,826,638	40,936,965,185		56,332,613,857	50,624,705,431	5,707,908,426		5,707,908,426	(35,229,086,769)	
		32 Politeknik Kesehatan Jakarta III	14,835,460,425	105,516,210	38,057,655,660		52,798,632,295	37,802,891,241	14,995,741,054		14,995,741,054	(23,061,914,606)	
		33 Politeknik Kesehatan Bandung	17,477,845,364	388,845,948	58,013,203,789		75,880,895,101	40,661,827,794	35,229,067,307		35,229,067,307	(22,784,136,482)	
		34 Politeknik Kesehatan Medan	14,135,878,481		34,199,647,558		48,335,526,039	42,488,590,151	5,866,937,888		5,866,937,888	(28,332,709,570)	
		35 Politeknik Kesehatan Semarang	24,783,628,615	69,597,512	55,340,549,497		80,193,775,624	58,911,277,011	21,282,498,613		21,282,498,613	(34,053,050,884)	
		36 Politeknik Kesehatan Makassar	12,089,866,740	-	58,008,216,849		70,096,083,589	40,556,482,160	29,539,601,429		29,539,601,429	(28,466,615,420)	
		37 Politeknik Kesehatan Jakarta II	16,804,898,141		34,605,508,914		51,410,207,055	48,675,770,456	2,734,436,599		2,734,436,599	(31,871,072,315)	
		38 Politeknik Kesehatan Tanjung Karang					-		-		-	-	
		39 Politeknik Kesehatan Surakarta	13,502,936,000	1,287,697,000	35,811,953,937		50,602,586,937	27,824,064,894	-		-	(35,811,953,937)	
		40 Politeknik Kesehatan Malang	15,551,190,500	7,119,579	29,508,000,610		45,066,310,689	36,507,821,722	-		-	(29,508,000,610)	
		41 Politeknik Kesehatan Pontianak					-		-		-	-	
		42 Politeknik Kesehatan Bengkulu					-		-		-	-	
		43 Politeknik Kesehatan Yogyakarta					-		-		-	-	
		44 Politeknik Kesehatan Surabaya					-		-		-	-	
		45 Balai Besar Labkes Palembang	3,781,102,448	21,720,886	10,062,296,456		13,865,119,800	11,137,401,873	2,727,717,927		2,727,717,927	(7,334,578,529)	
		46 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	1,738,137,000	-	7,534,576,548		9,272,715,548	7,620,436,623	1,652,278,925		1,652,278,925	(5,882,239,623)	
		47 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	2,109,684,738	54,042,435	9,920,056,387		12,083,783,560	10,240,689,681	1,843,093,879		1,843,093,879	(8,076,962,508)	
		48 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta	2,010,548,000	909,605,219	8,895,198,667	170,584,159	11,979,937,036	12,650,815,686	(670,878,650)		(670,878,650)	(9,565,878,317)	
		49 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	1,477,508,560	685,990	10,282,543,735		11,770,738,185	11,609,507,325	161,230,870		161,230,870	(10,131,312,865)	
		50 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung	2,311,406,000	25,954,727	9,417,195,015		11,754,555,742	11,978,022,655	(223,466,913)		(223,466,913)	(9,640,681,928)	
		51 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	4,778,222,857	171,412,535	12,742,865,450		17,692,500,842	16,650,921,720	1,041,579,122		1,041,579,122	(11,701,286,328)	
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)											
		1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta	17,000,174,575	138,754,856	89,754,521,462	64,244,785	106,957,695,678	67,075,706,315	39,881,989,363		39,881,989,363	(49,872,532,099)	
		KEMENTERIAN PERTANIAN (013)											
		1 Pusat Veterinaria Farma Surabaya	3,780,394,220	150,725,183	16,712,221,079	-	20,623,330,482	26,073,414,780	(5,450,084,318)		(5,450,084,318)	(22,162,305,397)	
		2 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang	12,660,313,451	52,867,533	20,396,646,435	-	33,112,857,419	28,950,581,394	4,162,276,025	-	4,162,276,025	(16,237,370,410)	
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)											
		1 Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor	6,332,103,000	140,196,229	10,045,063,041	-	16,517,392,270	16,589,899,220	(72,506,950)		(72,506,950)	(10,117,599,991)	
		2 Balai Besar Industri Agro	17,749,417,818	-	12,488,512,223	-	30,237,930,041	30,340,410,590	(102,480,549)	-	(102,480,549)	(12,590,992,772)	
		3 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung					-		-		-	-	
		4 Balai Besar Tek Pencegahan & Penanggan Industri Semarang					-		-		-	-	
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)	5,847,839,514	21,569,280	9,078,768,730		14,947,976,503	12,861,843,709	2,086,132,794		2,086,132,794	(6,182,162,985)	
		1 Universitas Diponegoro, Semarang	324,558,254,883	10,174,155,212	295,371,869,924	-	630,104,280,019	636,360,578,941	(6,256,298,922)		(6,256,298,922)	(301,628,168,846)	
		2 Universitas Padjadjaran, Bandung	453,668,631,341	14,001,198,107	344,042,170,139	3,914,525,930	815,626,525,517	826,745,028,731	(11,118,503,214)		(11,118,503,214)	(355,160,673,353)	
		3 Universitas Negeri Malang	119,331,352,924	98,086,963,546	223,557,478,431	-	441,985,794,901	404,816,213,563	37,169,581,338		37,169,581,338	(186,387,897,093)	
		4 Universitas Hasanuddin, Makassar	203,653,600,045	41,871,611,425	683,461,060,510	70,541,293,116	999,527,565,096	1,006,106,807,788	(6,579,242,692)	-	(6,579,242,692)	(680,040,300,202)	
		5 Universitas Brawijaya, Malang	398,725,133,370	80,209,737,553	362,233,772,802	5,324,143,928	817,492,787,653	886,050,783,880	(121,442,003,773	-	(121,442,003,773	(241,791,769,029)	
		6 Universitas Negeri Semarang	128,379,724,295	56,400,123,781	284,181,424,702	-	468,961,272,778	306,823,917,968	157,037,354,810		157,037,354,810	(127,144,069,892)	
		7 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	154,783,911,995	113,050,303,273	276,514,815,451	-	544,349,030,719	434,351,351,127	109,997,679,592		109,997,679,592	(165,517,135,859)	
		8 Universitas Mulawarman Samarinda	100,111,114,025	1,928,874,138	131,575,117,795	154,023,499,256	387,638,605,215	266,931,266,694	120,707,338,611		120,707,338,611	(10,857,781,185)	
		9 Universitas Sebelas Maret Surakarta	201,594,852,380	15,119,589,718	261,911,440,793	10,463,143,720	489,089,026,611	407,195,275,560	81,893,751,051		81,893,751,051	(180,017,589,742)	
		10 Universitas Lampung	92,348,512,736	3,741,033,939	323,530,858,889	-	419,620,405,564	410,269,242,598	9,351,663,066	-	9,351,663,066	(314,179,195,823)	
		11 Universitas Negeri Yogyakarta	258,079,916,850	10,956,472,980	298,078,987,044	3,289,657,250	570,405,014,124	482,163,644,451	88,241,369,673	-	88,241,369,673	(209,837,597,371)	
		12 Universitas Negeri Gorontalo	48,983,215,250	1,016,015,299	178,859,214,080	-	228,858,444,629	229,892,295,506	66,158,703		66,158,703	(178,793,055,357)	
		13 Universitas Bengkulu	82,205,805,342	750,354,825	139,346,936,394	3,847,068,879	206,150,186,430	143,740,202,744	62,409,983,686		62,409,983,686	(76,936,972,698)	
		14 Universitas Sriwijaya	184,653,637,604	21,905,127,665	407,389,184,402	1,819,226,752	615,777,176,423	398,641,044,087	217,136,132,336		217,136,132,336	(190,263,052,086)	
		15 Universitas Negeri Jakarta	221,103,676,018	68,024,488,838	274,256,986,705	3,176,248,815	596,561,411,381	340,194,152,908	256,367,258,472		256,367,258,472	(17,895,728,233)	
		16 Universitas Andalas	141,651,281,143	2,136,640,568	310,528,130,823	2,000,000,000	456,316,052,534	325,183,453,357	131,152,599,177	-	131,152,599,177	(179,375,521,646)	
		17 Universitas Negeri Malang	168,828,320,920	48,493,995,550	223,557,478,431	-	441,985,794,901	404,816,213,563	37,169,581,338	-	37,169,581,338	(186,387,897,093)	
		18 Universitas Negeri Surabaya	98,373,593,392	28,690,566,054	379,708,276,333	-	504,772,435,788	225,728,100,681	279,044,335,088	-	279,044,335,088	(100,663,941,245)	
		19 Universitas Jenderal Soedirman	123,515,803,729	4,257,959,739	325,459,148,757	22,123,659,383	475,356,571,599	374,852,493,549	100,504,078,050	-	100,504,078,050	(224,955,970,707)	
		20 Universitas Halueleo Kendari	63,945,954,975	11,378,208,000	274,599,371,164	-	349,921,534,139	338,748,772,092	10,272,762,047		10,272,762,047	(264,326,609,117)	
		21 Universitas Terbuka	456,513,320,911	5,564,362,939	4,111,709,043	-	466,189,392,893	97,385,714,011	368,803,678,882	-	368,803,678,882	364,691,969,839	
		22 Universitas Riau	144,362,682,397	865,168,514	149,471,616,738	-	294,719,444,649	280,283,260,150	14,436,184,490		14,436,184,490	(135,035,432,248)	
		KEMENTERIAN AGAMA (025)											
		1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	38,760,680,864	17,885,085,989	134,387,294,708	-	191,033,041,561	134,643,172,018	56,389,869,523	-	56,389,869,523	(77,997,425,185)	
		2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	111,583,065,671	8,372,233,321	234,757,465,464	58,000,000	354,770,764,456	386,610,047,716	(31,839,283,260)	-	(31,839,283,260)	(266,596,748,724)	

DAFTAR 28.B

ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
Per 31 Desember 2011
BERDASARKAN SAK

		3 UIN Malang	39.808.420.134	-	104.066.298.855	-	143.874.718.989	-	143.874.718.989		143.874.718.989	39.808.420.134	
		4 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	28.354.355.000	398.110.678	165.527.684.301	2.274.797.509	197.554.947.479	156.007.082.138	41.547.865.341	-	41.547.865.341	(123.979.818.960)	
		5 UIN Alauddin, Makassar	33.622.329.348	4.401.481.883	146.262.097.798	-	184.285.908.029	131.993.804.782	52.322.104.267	-	52.322.104.267	(93.939.993.531)	
		6 IAIN Sumatera Utara	18.418.920.400	286.262.924	92.974.233.381	2.000.000.000	111.891.416.665	76.664.238.535	35.017.178.150	-	35.017.178.150	(57.957.055.211)	
		7 IAIN Walisongo Semarang	17.730.893.551	2.065.066.301	104.309.240.440	24.452.632.714	148.577.833.006	122.030.405.807	26.547.427.399	-	26.547.427.399	(77.761.813.041)	
		8 IAIN Sultan Syarif Kasim Riau	58.067.507.406		111.470.818.000	-	167.538.325.406	157.661.867.352	9.876.458.054	-	9.876.458.054	(101.594.359.946)	
		9 IAIN Sulthan Thoha Saifudin	11.520.845.163	24.950.000	59.520.296.097	-	71.066.091.260	58.758.234.650	11.307.856.610	-	11.307.856.610	(48.212.439.487)	
		10 IAIN Sunan Ampel	25.941.896.290	2.813.543.360	153.045.853.158	-	181.801.292.808	110.242.209.699	71.559.083.109	-	71.559.083.109	(81.486.770.049)	
		11 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	12.807.703.522	3.541.580.576	43.970.458.665	1.366.965.000	61.686.707.764	54.753.396.435	6.933.311.329	-	6.933.311.329	(37.037.147.336)	
		12 IAIN Raden Intan Lampung	12.835.733.427	134.006.803	71.531.039.292	-	84.500.779.522	61.866.823.825	22.634.155.697		22.634.155.697	(48.926.683.595)	
		13 IAIN Raden Fatah Palembang	19.307.558.952	635.804.347	-	-	19.943.362.699	16.705.409.486	3.237.953.213		3.237.953.213	3.237.953.213	
		14 IAIN Ar Raniry Banda Aceh	9.137.219.583	100.169.848	-	-	7.522.489.146	7.447.541.901	74.957.245		74.957.245	74.957.245	
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026)		-	189.664.369.711	-	198.801.589.294	78.219.644.565	120.582.944.709		120.582.944.709	(69.081.425.002)	
		1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri, Bandung	2.835.429.835	25.412.175	18.925.872.212								
		2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Cakung	2.742.297.746		38.039.527.537		23.786.514.222	18.923.064.983	2.863.449.239		2.863.449.239	(16.062.772.953)	
		3 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang	417.631.764	112.089.000	14.474.441.473	-	40.751.825.085	28.715.427.548	12.036.397.537		12.036.397.537	(25.979.129.800)	
		KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042)	-			-	15.004.162.237	14.839.863.073	164.299.164	139.731.236	24.567.928	(14.448.873.545)	
		1 PP IPTEK	4.604.532.000	416.330.478	4.068.149.040	1.051.785.605							
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)					10.138.897.123	9.723.936.668	414.960.455		414.960.455	(3.651.188.585)	
		1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM	26.610.568.165	484.744.182	15.112.491.210	-							
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (050)					42.187.801.557	67.378.681.799	(25.191.880.242)		(25.191.880.242)	(40.304.371.452)	
		1 RS. Bhayangkara R. Said Sukanto Jakarta	34.320.219.376	27.958.819.292	86.475.628.803								
		2 RS. Bhayangkara Tk.III Kediri	50.493.978.296	1.539.532.389	9.355.630.391	-	148.755.686.671	151.397.208.158	(2.641.541.487)		(2.641.541.487)	(89.117.169.490)	
		3 RS Bhayangkara Tk.II H.S. Samsoeri, Mertojoso, Surabaya	8.558.892.090	10.937.220.037	11.625.368.853		61.189.741.077	54.919.616.964	6.270.124.113		6.270.124.113	(3.085.706.278)	
		4 RS Bhayangkara Tk.II Mappa Oudang, Makassar	40.979.165.487	2.066.628.727	1.859.028.020	558.400.000	28.121.191.040		28.121.191.040		28.121.191.040	17.485.822.087	
		5 RS Bhayangkara, Semarang	10.538.536.645	5.577.367.357	7.334.495.455		45.483.220.234	37.590.633.643	7.892.586.591		7.892.586.591	6.033.558.571	
		6 RS Bhayangkara Tk.III, Palembang	5.943.995.398	2.774.049.790			23.451.401.457	22.247.440.074	1.203.961.383		1.203.961.383	(6.130.534.072)	
		7 RS Bhayangkara Bandung					8.718.045.186	8.649.139.488	68.905.698		68.905.698	68.905.698	
		8 RS Bhayangkara / Lemdikpol STUKPA Sukabumi	647.453.951	1.475.486.924	3.282.613.015	-	-	-	-		-	-	
		9 RS Bhayangkara Tk.III, Trilatsi Polda Bali	3.419.813.864	1.263.887.330	7.700.416.012	-	5.385.553.690	3.259.626.373	2.125.927.517		2.125.927.517	(1.136.685.498)	
							12.384.127.226	12.477.541.375	(93.414.149)		(93.414.149)	(7.793.830.161)	
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)											
		1 BPPT Enjinering	83.968.478.252	5.480.917.586	1.171.414.215								
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082)					90.621.810.053	80.295.938.846	10.325.871.207		10.325.871.207	9.154.456.992	
		1 Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (PATEKGAN)	3.332.574.691	77.585.102	-	-							
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					3.410.159.793	3.111.696.983	298.462.810	-	298.462.810	298.462.810	
		1 Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BPIP)	53.683.921.000	2.599.697.591	30.614.655.884								
		2 Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya	30.311.538.500	19.045.562	135.398.378.834	2.465.854.712	87.698.674.475	52.626.668.399	35.072.006.086	-	35.072.006.086	4.457.359.202	
		3 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	50.618.975.000	3.048.905.375	100.539.761.590		168.194.818.598	77.281.259.130	90.913.559.468		90.913.559.468	(44.484.820.366)	
		4 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	21.286.948.040	620.195.300	52.953.228.286		154.208.841.965	102.391.217.676	51.817.424.289		51.817.424.289	(48.722.337.301)	
		5 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang					74.870.371.626	48.173.086.739	26.697.284.887		26.697.284.887	(26.255.843.399)	
		6 Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya					-	-	-		-	-	
		7 Badan Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Tegal					-	-	-		-	-	
		KEMENTERIAN ESDM					-	-	-		-	-	
		1 Pusdiklat Teknologi Minyak & Gas Bumi	45.129.799.217	1.089.110.154	270.026.116.790	-							
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091)					316.245.026.181	- 313.681.210.061	2.563.816.100		2.563.816.100	(267.462.300.690)	
		1 Pusat Pembiayaan Perumahan Jakarta	7.082.487.563	146.369.353.872									
		TOTAL PER DEPARTEMEN					153.451.841.435	19.662.955.938	133.788.885.497		133.788.885.497	133.788.885.497	
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	17.000.174.575	138.754.858	89.754.521.462	64.244.785							
		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	16.420.697.671	203.622.686	37.111.857.514	-	108.957.695.678	87.075.706.315	39.881.989.363	-	39.881.989.363	(49.872.532.098)	
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	30.729.151.232	161.745.489	30.812.371.993	-	53.736.187.881	55.023.986.174	(1.287.808.293)	-	(1.287.808.293)	(38.399.675.807)	
		KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	5.979.132.493.745	203.158.439.447	3.052.539.883.436	102.637.163.890	61.703.269.814	59.781.652.549	1.921.616.265	-	1.921.616.265	(28.990.755.728)	
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)	3.971.219.625.109	669.771.794.149	6.003.285.412.683	280.522.467.033	8.437.467.940.519	7.514.057.889.650	893.873.039.659	-	893.873.039.659	(2.158.666.843.777)	
		KEMENTERIAN AGAMA (025)	442.319.438.212	40.680.255.808	1.611.487.149.850	30.152.395.214	10.924.798.298.975	8.759.986.046.109	2.164.813.252.865	-	2.164.813.252.865	(3.838.472.159.918)	
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042)	4.604.532.000	416.330.478	4.068.149.040	1.051.785.605	2.124.639.279.084	1.554.602.678.709	570.036.600.375	-	570.036.600.375	(1.041.450.549.475)	
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	26.610.568.165	484.744.182	15.112.491.210	-	10.138.897.123	9.723.936.668	414.960.455	-	414.960.455	(3.651.188.585)	
		POLISI REPUBLIK INDONESIA (050)	153.002.767.087	53.314.399.845	127.613.379.848	559.400.000	42.187.801.557	67.379.681.799	(25.191.880.242)	-	(25.191.880.242)	(40.304.371.452)	
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)	83.968.478.252	5.480.917.586	1.171.414.215	-	334.488.946.781	280.541.206.075	43.947.740.706	-	43.947.740.706	(83.665.599.143)	
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082)	3.332.574.691	77.585.102	-	-	90.621.810.053	80.295.938.846	10.325.871.207	-	10.325.871.207	9.154.456.992	
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	156.111.382.540	6.289.143.818	319.508.025.594	2.465.854.712	3.410.159.793	3.111.696.983	298.462.810	-	298.462.810	298.462.810	
		KEMENTERIAN ESDM	45.129.799.217	1.089.110.154	270.026.116.790	-	484.372.408.664	279.872.131.934	204.500.274.730	-	204.500.274.730	(115.005.750.864)	
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	7.082.487.563	146.369.353.872	-	-	316.245.026.181	313.681.210.061	2.563.816.100	-	2.563.816.100	(267.462.300.690)	
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA	10.036.685.228.160	1.127.616.237.483	11.562.488.783.635	417.452.311.239	153.451.841.435	19.662.955.938	133.788.885.497	-	133.788.885.497	133.788.885.497	
2	Pengelolaan Wilayah Kawasan	**SEKRETARIAT NEGARA (007)**					23.144.220.560.518	19.074.798.728.011	4.069.886.821.497	-	4.069.886.821.497	(7.522.599.982.139)	
		1 Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Jkt											
		2 Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	106.477.147.705	18.832.710.168	-	-							
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLA WIL/KAWASAN					123.309.857.871	89.406.003.248	33.903.854.623	-	33.903.854.623	33.903.854.623	
3	Pengelolaan Dana Khusus	**KEMENTERIAN KEUANGAN (015)**	106.477.147.705	18.832.710.168	-	-	-	-	-		-	-	
		1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	68.472.600.671	1.070.425.583.695	4.227.366.313	-	123.309.857.871	89.406.003.248	33.903.854.623	-	33.903.854.623	33.903.854.623	
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)					1.143.125.550.869	73.139.857.962	1.069.985.692.907	26.439.721	1.069.959.253.186	1.065.731.886.873	
		1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan		110.938.709.240	9.141.443.678								
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)					120.080.152.918	9.248.679.355	110.831.473.563		110.831.473.563	101.690.029.885	
		1. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	199.600.576.726	3.750.000	-	-	199.804.326.726	10.351.805.017	189.252.521.709	-	189.252.521.709	189.252.521.709	
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)											
		1. BP3TI	1.423.253.539.139	198.053.312.169	1.384.406.803		1.822.691.258.111	795.926.489.738	826.764.768.373	-	826.764.768.373	825.380.361.570	
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)											
		1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	111.047.482.886	-	3.203.420.429	-	114.250.903.415	30.206.131.081	84.044.772.324	-	84.044.772.324	80.841.351.895	
		TOTAL PER DEPARTEMEN											
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	68.472.600.671	1.070.425.583.695	4.227.366.313	-	1.143.125.550.869	73.139.857.962	1.069.985.692.907	26.439.721	1.069.959.253.186	1.065.731.886.873	
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	-	110.938.709.240	9.141.443.678	-	120.080.152.918	9.248.679.355	110.831.473.563	-	110.831.473.563	101.690.029.885	
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)	199.600.576.726	3.750.000	-	-	199.804.326.726	10.351.805.017	189.252.521.709	-	189.252.521.709	189.252.521.709	
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(059)	1.423.253.539.139	198.053.312.169	1.384.406.803	-	1.822.691.258.111	795.926.489.738	826.764.768.373	-	826.764.768.373	825.380.361.570	
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	111.047.482.886	-	3.203.420.429	-	114.250.903.415	30.206.131.081	84.044.772.324	-	84.044.772.324	80.841.351.895	
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS	1.802.374.198.722	1.379.421.355.094	17.956.637.223	-	3.199.752.192.038	918.872.983.183	2.280.879.228.878	26.439.721	2.280.852.789.155	2.262.896.151.932	
		TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN	11.945.516.575.587	2.523.670.302.743	11.580.443.420.859	417.452.311.239	26.467.282.610.428	20.083.075.694.422	6.354.668.904.996	26.439.721	6.354.643.465.275	(5.225.799.955.584)	

PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA 65 SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
SESUAI DENGAN KMK NOMOR 53/KMK.06/2012
PER 31 DESEMBER 2011 (*Audited*)

(rupiah)

No	Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Setelah Disusutkan
024	KEMENTERIAN KESEHATAN			
1	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo	2.236.151.895.883	409.191.160.951	1.826.960.734.932
2	RSUP Fatmawati	470.453.449.823	186.502.803.137	283.950.646.686
3	RSUP Persahabatan	194.890.732.503	93.599.313.833	101.291.418.670
4	RSJPD Harapan Kita	485.331.075.750	273.614.331.629	211.716.744.121
5	RSAB Harapan Kita	1.306.094.055.000	64.752.050.000	1.241.342.005.000
6	RS Kanker Dharmais	1.110.292.481.559	157.369.135.189	952.923.346.370
7	RSUP Dr. Hasan Sadikin	1.104.621.134.841	305.995.282.889	798.625.851.952
8	RSUP Dr. Kariadi	1.152.052.326.401	232.809.542.407	919.242.783.994
9	RSUP Dr. Sardjito	685.671.398.416	98.172.621.010	587.498.777.406
10	RSUP Dr. M. Hoesin	1.075.124.827.671	144.357.988.908	930.766.838.763
11	RSUP Dr. M. Djamil	461.477.390.697	215.438.409.711	246.038.980.986
12	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	608.426.099.792	83.050.608.141	525.375.491.651
13	RSUP Sanglah Denpasar	692.652.971.352	224.773.984.782	467.878.986.569
14	RSUP H. Adam Malik	729.869.766.439	262.728.438.991	467.141.327.448
15	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro	254.869.913.925	80.036.970.688	174.832.943.237
16	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou	338.859.022.300	80.229.895.987	258.629.126.313
17	RS Mata Cicendo	189.251.206.606	63.772.537.973	125.478.668.633
18	RSO Prof. Dr. R. Soeharso	415.299.549.744	62.703.134.256	352.596.415.488
19	RSP Dr. H. A. Rotinsulu	233.464.449.444	26.770.661.469	206.693.787.975
20	RSP Dr. Ario Wirawan	106.131.056.896	23.000.334.256	83.130.722.640
21	RSP Dr. Goenawan Partowidigdo	90.544.695.355	35.509.881.966	55.034.813.389
22	RSSN Bukittinggi	72.637.470.560	12.759.964.828	59.877.505.732
23	RSJ Dr. Soeharto Heerdjan	386.108.251.247	27.669.501.860	358.438.749.387
24	RSJ Dr. Marzoeki Mahdi	516.948.743.786	45.546.083.382	471.402.660.404
25	RSJ Prof. Dr. Soeroyo	645.152.852.594	30.820.831.900	614.332.020.694
26	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat	169.598.861.590	40.625.485.281	128.973.376.309
27	RSKO Jakarta	73.232.586.933	41.723.638.377	31.508.948.556
28	RS Kusta Sitanala	379.648.526.496	15.711.154.672	363.937.371.824
29	RSPI Soelianti Saroso	153.728.065.918	19.345.330.069	134.382.735.849
	Sub Jumlah	**16.338.584.859.520**	**3.358.581.078.542**	**12.980.003.780.978**
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM			
1	Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	3.102.327.625	448.981.927	2.653.345.698
	Sub Jumlah	**3.102.327.625**	**448.981.927**	**2.653.345.698**
015	KEMENTERIAN KEUANGAN			
1	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	802.732.706.234	52.727.017.375	750.005.688.859
2	Pusat Investasi Pemerintah	12.713.220.331	3.607.308.457	9.105.911.874
	Sub Jumlah	**815.445.926.565**	**56.334.325.832**	**759.111.600.733**
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan	51.276.376.346	13.149.140.719	38.127.235.627
	Sub Jumlah	**51.276.376.346**	**13.149.140.719**	**38.127.235.627**
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM			
1	Lembaga Pengelola Dana Bergulir	10.951.263.249	3.693.765.906	7.257.497.343
	Sub Jumlah	**10.951.263.249**	**3.693.765.906**	**7.257.497.343**
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN			
1	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	5.498.591.254	790.322.510	4.708.268.744
	Sub Jumlah	**5.498.591.254**	**790.322.510**	**4.708.268.744**
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI			
1	Pusat Peragaan IPTEK	9.548.197.216	6.799.092.666	2.749.104.551
	Sub Jumlah	**9.548.197.216**	**6.799.092.666**	**2.749.104.550**
042	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI			
1	BPPT Enjiniring	1.611.350	201.419	1.409.931
	Sub Jumlah	**1.611.350**	**201.419**	**1.409.931**
025	KEMENTERIAN AGAMA			
1	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	1.369.903.523.850	272.365.629.007	1.097.537.894.843
2	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	316.648.037.308	39.090.563.198	277.557.474.110
	Sub Jumlah	**1.686.551.561.158**	**311.456.192.205**	**1.375.095.368.953**
082	LAPAN			
1	Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (FATEKGAN)	927.339.095	333.757.803	593.581.292
	Sub Jumlah	**927.339.095**	**333.757.803**	**593.581.292**
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			
1	Akademi Kimia Analisis Bogor	42.168.885.103	12.275.517.361	29.893.367.742
2	Balai Besar Industri Agro	111.181.958.652	11.820.194.007	99.361.764.645
3	Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	33.986.205.562	12.182.485.706	21.803.719.856
	Sub Jumlah	**187.337.049.317**	**36.278.197.074**	**151.058.852.243**
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA			
1	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK), Jakarta	50.118.305.484.618	179.424.115.897	49.938.881.368.721
2	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran(PPKK), Jakarta	24.486.784.898.614	7.664.436.272	24.479.120.462.342
	Sub Jumlah	**74.605.090.383.232**	**187.088.552.169**	**74.418.001.831.063**
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL			
1	Universitas Diponegoro	2.522.850.613	171.586.047	2.351.264.566
2	Universitas Padjajaran	1.821.062.850	-	1.821.062.850
3	Universitas Negeri Malang	813.532.638	105.342.265	708.190.373
4	Universitas Hasanudin	2.934.748.532	202.696.295	2.732.052.237
5	Universitas Brawijaya	3.174.031.333	96.175.341	3.077.855.992
6	Universitas Negeri Semarang	908.775.195	-	908.775.195
7	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.947.733.925	-	1.947.733.925
8	Universitas Negeri Surabaya	1.835.359.012	-	1.835.359.012
9	Universitas Mulawarman	300.599.177	-	300.599.177
10	Universitas 11 Maret Surakarta	2.371.704.862	200.406.824	2.171.298.038

PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA 65 SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM SESUAI DENGAN KMK NOMOR 53/KMK.06/2012 PER 31 DESEMBER 2011 (*Audited*)

(rupiah)

No	Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Setelah Disusutkan
11	Universitas Negeri Yogyakarta	1.886.864.392	35.051.419	1.851.812.973
12	Universitas Negeri Gorontalo	335.303.426	-	335.303.426
13	Universitas Negeri Bengkulu	325.050.860	-	325.050.860
14	Universitas Sriwijaya	2.622.993.716	250.962.614	2.372.031.102
15	Universitas Halu Oleo	771.724.402	-	771.724.402
	Sub Jumlah	**24.572.334.933**	**1.062.220.805**	**23.510.114.128**
022	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**			
1	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran(BP3IP)	142.571.796.667	37.377.565.828	105.194.230.839
2	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	856.752.109.657	55.471.632.648	801.280.477.009
3	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	404.942.454.486	23.275.455.375	381.666.999.111
4	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	581.212.733.635	45.121.450.802	536.091.282.833
	Sub Jumlah	**1.985.479.094.445**	**161.246.104.653**	**1.824.232.989.792**
091	**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT**			
1	Pusat Pembiayaan Perumahan	2.534.062.700	38.604.453	2.495.458.247
	Sub Jumlah	**2.534.062.700**	**38.604.453**	**2.495.458.247**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2011
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET BERSIH	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	8.692.307	606.000	5.404.196	661.911	-	6.672.107	2.020.200	1.357.936	-	TA. 2011	Satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	16.313.705	40.312.976	TA. 2011	APBN/Non APBN	025
3	Badan Intelijen Negara (BOTASUPAL)	2.900.269	-	2.900.269	-	-	2.900.269	-	-	-	TA. 2011	Satker	050
4	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	-	-	-	-	-	-	-				BA Baru	
5	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	
6	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	25.000.000	3.050.132	16.174.149	-	-	19.224.281	5.775.719	5.652.200	-	TA. 2011	Satker	026
7	Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional (BKP4N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	033
8	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)	356.830.000	5.503.295	68.421.781	199.617.114	-	273.542.190	83.287.810	471.208.029	-	TA. 2011	Satker	034
9	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	1.498.500	237.000	1.186.418	-	-	1.423.418	75.082	1.498.500	-	TA. 2011	Kegiatan	055
10	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	15.000.000	8.190.776	3.595.560	3.188.664	25.000	15.000.000	-	60.366.531	-	TA. 2011	Kegiatan	025
11	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM	38.628.745	918.119	32.139.918	3.721.288	-	36.779.325	1.849.420	24.038.674	-	TA. 2011	Kegiatan	033
12	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	235.913.473	9.686.850	116.221.211	8.213.752	-	134.121.813	101.791.660	829.547.324	-	TA. 2011	Satker	020
13	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2009	Tdk dpt alokasi dana	
14	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	-	-	-	-	-	-	-	2.077.597.299	352.847.834	TA. 2011	Non APBN	025
15	Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	7.650.000	-	5.454.798	-	-	5.454.798	2.195.202	3.551.698	-	TA. 2011	Satker	033
16	Badan Pengelola KAPET Batui - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.400.000		1.389.997	-	-	1.389.997	10.003	2.428.331	-	Smt I TA 2011	kegiatan	033
17	Badan Pengelola KAPET Batulicin - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	4.350.438	-	3.430.819	-	-	3.430.819	919.619	-	-	TA. 2009	kegiatan	033
18	Badan Pengelola KAPET Biak - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Smt 1 2009	kegiatan	033
19	Badan Pengelola KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.300.000	-	1.057.123	-	-	1.057.123	242.877	-	-	Smt 1 2008	kegiatan	033
20	Badan Pengelola KAPET Bukari - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.000.000	-	211.917	-	-	211.917	788.083	-	-	TA. 2009	kegiatan	033
21	Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	7.000.000	-	7.000.000	-	-	7.000.000	-	4.823.034	-	TA. 2011	kegiatan	033
22	Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	6.409.000	-	6.334.299	-	-	6.334.299	74.701	3.672.540	-	TA. 2011	kegiatan	033
23	Badan Pengelola KAPET Manado Bitung - Pembinaan Manajemen Pengelolaa	2.850.000	-	2.787.244	-	-	2.787.244	62.756	-	-	TA. 2009	Satker	033
24	Badan Pengelola KAPET Mbay - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.000.000	-	-	-	982.970	982.970	17.030	-	-	TA. 2009	kegiatan	033
25	Badan Pengelola KAPET Parepare - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.227.460	-	1.213.365	-	-	1.213.365	14.095	-	-	TA. 2009	Satker	033
26	Badan Pengelola KAPET Sasamba - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	8.809.000	-	8.446.276	67.400	-	8.513.676	295.324	5.333.974	-	TA. 2011	Satker	033
27	Badan Pengelola KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.500.000	690.000	679.384	-	-	1.369.384	130.616	-	-	TA. 2009	kegiatan	033
28	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BP-SURAMADU)		-	-	-		-	-		-	TA. 2011	BA Baru	109
29	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bat	140.000.000	-			139.429.899	139.429.899	570.101	14.704.594.148	580.474.000	TA. 2011	APBN/Non APBN	999
30	Badan Pengembangan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)	424.894.700	-	-	-	409.902.468	409.902.468	14.992.232	1.575.926.835	-	TA. 2011	Satker	999
31	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	14.810.550	3.174.310	7.638.437	699.476	-	11.512.223	3.298.327	-	-	TA. 2011	Satker	090
32	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1.169.667	251.710	173.045	153.189	523.603	1.101.547	68.120	-	-	TA. 2011	Kegiatan	088
33	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	024
34	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)	48.385.876	-	-	-	47.795.485	47.795.485	590.391	8.455.326		Smt I TA 2011	Kegiatan	040
35	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	-	-	-	-	-	-	-	3.946.777.286	347.608.904	TA. 2011	Non APBN	033
36	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	4.500.631	1.538.968	2.961.032	-	-	4.500.000	631	1.709.818	83.655	TA. 2011	APBN/Non APBN	025
37	Dewan Buku Nasional (DBN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	023
38	Dewan Energi Nasional (DEN)	52.307.396	5.184.637	38.110.736	2.386.553	-	45.681.926	6.625.470	14.299.449	-	TA. 2011	Satker	020
39	Dewan Gula Indonesia (DGI)	1.500.020	-	-	-	1.355.121	1.355.121	144.899	-	-	TA. 2011	Kegiatan	018
40	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Blm dpt dana dr APBN	-
41	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Blm dpt dana dr APBN	-
42	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Blm dpt dana dr APBN	-
43	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	10.880.900	-	10.617.487	64.902	-	10.682.389	197.611	1.439.937	-	TA. 2011	Satker	032

DAFTAR 29.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2011
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET BERSIH	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	5.108.860	-	4.277.227	-	-	4.277.227	831.633	164.304	-	TA. 2011	Kegiatan	018
45	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	57.862.899	-	-	-	57.342.152	57.342.152	520.747	42.670	-	TA 2010	Kegiatan	007
46	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Satker	035
47	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	-
48	Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)	130.000.000	-	107.396.143	183.650	-	107.579.793	22.420.207	6.355.465	-	TA. 2011	Satker	043
49	Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (DEPANRI/LAPAN)	338.980	-	328.980		-	328.980	10.000	-	-	TA. 2011	Kegiatan	082
50	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DPKTI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	
51	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	703.568	498.800	95.918	-	108.850	703.568	-	-	-	TA. 2011	Kegiatan	026
52	Dewan Pers	17.760.000	1.326.618	13.126.664	901.211	-	15.354.493	2.405.507	4.380.751	-	TA 2011	Satker	059
53	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	3.607.710	-	2.090.104	-	-	2.090.104	1.517.606	-	-	TA. 2011	Kegiatan	010
54	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	44.284.945	2.971.890	26.540.778	1.648.725	-	31.161.393	13.123.552	9.848.674	-	TA 2011	Satker	007/999
55	Dewan Riset Nasional (DRN)	3.915.000	-	3.826.094	-	-	3.826.094	88.906	1.236	-	TA. 2011	Satker	042
56	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	6.945.043	155.646	6.197.195	109.426	-	6.462.267	482.776	1.489.579	-	TA. 2011	Satker	033
57	Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (DETIKNAS)	3.000.000	1.336.000	205.000	-	1.025.000	2.566.000	434.000	-	-	TA. 2011	Kegiatan	059
58	Komisi Banding Merek	537.200.000	-	70.915.000	-	-	70.915.000	466.285.000	-	-	TA. 2011	Kegiatan	013
59	Komisi Banding Paten	451.000.000	-	74.231.000	-	-	74.231.000	376.769.000	-	-	TA. 2011	Kegiatan	013
60	Komisi Hukum Nasional (KHN)	11.147.029	778.500	7.625.570	86.597	-	8.490.667	2.656.362	1.559.686	-	Smt I TA 2011	Satker	007
61	Komisi Informasi Pusat (KIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Satker	059
62	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	
63	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	6.149.784	1.558.192	2.511.328	224.399	-	4.293.919	1.855.865	3.589.254	-	TA. 2011	Satker	006
64	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	11.608.213	3.402.967	7.208.996	-	-	10.611.963	996.250	7.125.678	-	TA. 2011	Satker	060
65	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	10.438.793	3.338.400	5.075.725	75.525	-	8.489.650	1.949.143	-	8.766.721	TA. 2011	Kegiatan	074
66	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	3.556.700	1.058.860	668.730	-	1.728.625	3.456.215	100.485	-	-	TA 2011	Kegiatan	027 / 999
67	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	24.796.884	-	-	-	20.242.072	20.242.072	4.554.812	38.438.599	59.408.294	TA. 2011	Kegiatan	036
68	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	025
69	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		BA Baru	108
70	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	27.900.000	3.563.312	20.929.879	680.904	-	25.174.095	2.725.905	8.278.272	-	TA. 2011	Satker	059
71	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	8.600.000	1.414.000	6.206.923	78.400	-	7.699.323	900.677	3.839.114	-	TA. 2011	Satker	047
72	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	6.945.237	-	6.663.636	-	-	6.663.636	281.601	-	-	TA. 2011	Kegiatan	084
73	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Tdk ada dana	026
74	Komite Ekonomi Nasional (KEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Smt I TA 2011	Belum Aktif	
75	Komite Inovasi Nasional (KIN)	3.824.834.000	-	-	-	3.527.232.260	3.527.232.260	297.601.740	604.332.900	-	Smt I TA 2011	Kegiatan	999
76	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	
77	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	675.000	349.081	181.683	-	75.240	606.004	68.996	1.961.670	-	TA. 2009	Kegiatan	055
78	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	34.829.089	-	20.688.261	7.834.899	-	28.523.160	6.305.929	36.306.529	-	TA. 2011	Satker	022
79	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (KOMNAS FBPI)	2.106.166	-	-	-	1.440.203	1.440.203	665.963	-	-	TA 2010	Kegiatan	036
80	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	12.600.000	5.200.637	1.038.960	-	3.563.635	9.803.232	2.796.768	4.959.653	-	TA 2010	Satker	092
81	Komite Pengarahan Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	
82	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)	586.913	135.000	4.417	5.600	-	145.017	441.896	-	-	TA. 2011	Kegiatan	041
83	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3.896.140		3.800.505	-	-	3.800.505	95.635	913.598	-	TA. 2011	Satker	015
84	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)	713.178	-	608.797	-	-	608.797	104.381	-	-	TA. 2011	Kegiatan	084
85	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	42.745.000	-	25.422.364	5.504.028	-	30.926.392	11.818.608	39.871.858	-	TA. 2011	Satker	024

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2011
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET BERSIH	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Kegiatan	088
87	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.321.035	899.400	262.937	-	-	1.162.337	158.698	-	-	TA. 2011	Kegiatan	026
88	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS Paca)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Belum Aktif	027
89	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	-	-	-	-	-	-	-			TA. 2011	Non APBN	-
90	Lembaga Penyiaran Publik RRI (LPP RRI)	706.101.000	-	-	-	676.904.143	676.904.143	29.196.857	4.484.555.684	-	TA. 2011	Satker	999
91	Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI)	696.917.000	-		-	682.947.340	682.947.340	13.969.660	4.498.970.508	-	TA. 2011	Satker	999
92	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	007
93	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	789.190	-	523.790	-	252.000	775.790	13.400	-	-	Smt I TA 2011	Kegiatan	026
94	Lembaga Sensor Film (LSF)	20.750.000	2.610.824	9.003.964	6.086.447	-	17.701.235	3.048.765	28.501.270	-	TA 2011	Satker	040
95	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	024
96	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)					-	-	-		-		BA Baru	110
97	Otorita Asahan	-	-	-	-	-	-	-	746.947.319	46.746.678	TA. 2011	Non APBN	-
98	Sekretariat Pengadilan Pajak	52.408.667	19.392.705	5.074.843	1.587.680	-	26.055.228	26.353.439	12.080.607	-	TA. 2011	Satker	015
99	Staf Khusus Presiden	24.840.958	-	14.862.084	-	-	14.862.084	9.978.874	-	-	TA. 2011	Kegiatan	007
100	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)	70.754.012	11.336.341	23.234.265	12.730.166	-	47.300.771	23.453.241	-	-	TA. 2011	Satker	007
101	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Belum Aktif	029
	JUMLAH	**8.300.145.025**	**100.358.970**	**814.377.221**	**256.511.906**	**5.575.876.066**	**6.747.124.162**	**1.553.020.863**	**34.305.107.452**	**1.436.249.062**			

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2011

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Badan Hukum Milik Negara	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	67.750.900	-	67.750.900	65.921.227	1.944.552	67.865.779	(114.879)
2	Yayasan Sarana Wana Jaya/ Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti	48.061.307	1.734.931	49.796.238	44.315.644	4.381.406	48.697.050	1.099.188
3	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	4.907.533	-	4.907.533	3.588.257	146.754	3.735.011	1.172.522
4	Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna	-	-	-	-	-	-	-
5	Yayasan Gedung Arsip Nasional RI	-	-	-	-	-	-	-
6	Yayasan Yustisia Dharmayukti Karini	-	-	-	-	-	-	-
7	Yayasan Purna Bhakti (YARNATI)	-	-	-	-	-	-	-
8	Yayasan Pengembangan BUMN	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**120.719.740**	**1.734.931**	**122.454.671**	**113.825.128**	**6.472.712**	**120.297.840**	**2.156.831**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2011
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA YAYASAN	Kementerian/Lembaga	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi	TOTAL Aset	Kewajiban Jk Pendek	Kewajiban Jk Panjang	TOTAL Kewajiban	TOTAL Ekuitas Dana	Total Kewajiban & Ekuitas Dana	KET
1	2	2a	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	Sekretariat Negara	19.363.461	30.623.221	11.520.586		61.507.268	4.453.139	14.005.252	18.458.391	43.048.877	61.507.268	TA. 2011
2	Yayasan Sarana Wana Jaya/ Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti	Kementerian Kehutanan	35.693.842	8.631.795	68.794		44.394.431	11.839.044	11.202.397	23.041.441	21.352.990	44.394.431	TA. 2011
3	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	Sekretariat Negara	10.950.632	183.279			11.133.911	13.325		13.325	11.120.586	11.133.911	T.A 2011
4	Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna	BPN	7.074.511	608.082			7.682.593			7.682.593	-	7.682.593	T.A 2008
5	Yayasan Gedung Arsip Nasional RI	Arsip Nasional RI									-		
6	Yayasan Yustisia Dharmayukti Karini	MA									-		
7	Yayasan Purna Bhakti (YARNATI)	Kementerian dalam Negeri	49.326.792	44.126.923	3.288.080	16.786.650	113.528.445	455.788	40.473.915	40.929.703	72.598.742	113.528.445	T.A 2008
8	Yayasan Pengembangan BUMN	Kementerian BUMN	14.117.777	12.854			14.130.631				14.130.631	14.130.631	T.A 2008
TOTAL			**136.527.015**	**84.186.154**	**14.877.460**	**16.786.650**	**252.377.279**	**16.761.296**	**65.681.564**	**90.125.453**	**162.251.826**	**252.377.279**	

DAFTAR ASET BEKAS MILIK ASING/CINA YANG BELUM SELESAI
BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.06/2008
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011

No.	Kanwil	Provinsi	Petunjuk Penyelesaian									Jumlah
			Disertifikatkan a.n. Pemerintah RI	Disertifikatkan a.n. Pemda	Kompensasi	Ditukar	Hibah	Dikembalikan	Dikeluarkan	Beberapa Alternatif Petunjuk	Penelitian	
1	I Banda Aceh	Nangroe Aceh Darussalam	0	3	3	5	0	0	0	4	0	15
2	II Medan	Sumatera Utara	11	44	48	0	0	0	0	24	6	133
3	III Pekanbaru	Sumatera Barat	1	2	1	0	0	0	0	3	4	11
4		Riau	0	5	0	0	0	0	0	2	0	7
5		Kepulauan Riau	3	47	0	0	0	0	0	6	2	58
6	IV Palembang	Sumatera Selatan	2	16	5	2	0	0	0	6	10	41
7		Bangka Belitung	4	10	1	2	0	0	0	12	1	30
8		Jambi	2	9	1	0	0	0	0	0	0	12
9	V Bandar Lampung	Lampung	1	8	1	0	0	0	0	4	1	15
10		Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	VI Serang	Banten	0	4	1	0	0	0	0	1	2	8
12	VII Jakarta	DKI Jakarta	3	13	13	0	0	0	0	1	13	43
13	VIII Bandung	Jawa Barat	7	47	34	0	0	0	0	1	1	90
14	IX Semarang	Jawa Tengah	5	16	16	0	0	0	0	9	0	46
15		D.I Yogyakarta	0	1	3	0	0	0	0	0	3	7
16	X Surabaya	Jawa timur	27	69	26	3	0	0	0	25	10	160
17	XI Pontianak	Kalimantan Barat	15	74	45	0	0	0	0	6	17	157
18	XII Banjarmasin	Kalimantan Selatan	2	2	5	0	0	0	0	0	0	9
19		Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	XIII Samarinda	Kalimantan Timur	0	5	6	0	0	0	0	0	3	14
21	XIV Denpasar	Bali	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5
22		Nusa Tenggara Barat	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
23		Nusa Tenggara Timur	0	3	4	1	0	0	0	2	0	10
24	XV Makassar	Sulawesi Selatan	3	10	13	0	0	0	0	7	3	36
25		Sulawesi Tenggara	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
26		Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	XVI Manado	Sulawesi Tengah	1	4	1	0	0	0	0	0	0	6
28		Gorontalo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29		Maluku Utara	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
30		Sulawesi Utara	0	2	1	0	1	0	0	6	1	11
31	XVII Jayapura	Papua	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
32		Maluku	0	6	0	0	0	0	0	5	0	11
33		Irian Jaya Barat	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah			88	409	230	15	1	0	0	129	77	949

Keterangan:
Dari total aset sebanyak 1.010 dalam lampiran PMK 188/PMK.06/2008, tersisa 949 karena selama tahun 2009 s.d. 2010 telah diselesaikan ABMA/C sebanyak 36 aset yaitu:
1. Pemantapan status ABMA/C menjadi BMN sebanyak 15 aset
2. Pemantapan status ABMA/C menjadi BMD sebanyak 42 aset
3. Pelepasan ABMA/C kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi sebanyak 4 aset

Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan dengan surat nomor S-320/MK.6/2009 tanggal 28 Oktober 2009 telah menetapkan kompensasi atas ABMA/C di Jalan M.T. Haryono Nomor 94 Kutoarjo sebesar Rp 1.081.320.500,00 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Yayasan Pendidikan Kristen Kutoarjo dengan diberikan keringanan sebesar 50%, pembayaran kompensasi telah dilunasi oleh YPPK Kutoarjo

CAPAIAN KINERJA PENYELESAIAN ABMA/C TAHUN 2011
PER TIM Asistensi DAERAH
PER KANWIL DJKN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011

No.	Kanwil	Petunjuk Penyelesaian					Jumlah
		Dimantapkan sebagai BMN	Dimantapkan sebagai BMD	Kompensasi	Dikembalikan	Dikeluarkan	
1	I Banda Aceh	0	1	0	0	0	1
2	II Medan	0	4	0	0	0	4
3	III Pekanbaru	0	0	0	0	0	0
4	IV Palembang	0	0	0	0	0	0
5	V Bandar Lampung	0	1	0	0	0	1
6	VI Serang	0	1	0	0	0	1
7	VII Jakarta	0	4	0	0	0	4
8	VIII Bandung	0	3	0	0	0	3
9	IX Semarang	1	4	0	0	0	5
10	X Surabaya	0	6	1	0	0	7
11	XI Pontianak	0	2	0	0	0	2
12	XII Banjarmasin	3	1	0	0	0	4
13	XIII Samarinda	0	0	0	0	0	0
14	XIV Denpasar	2	1	0	0	0	3
15	XV Makassar	0	0	0	0	0	0
16	XVI Manado	1	0	0	0	0	1
17	XVII Jayapura	0		0	0	0	0
Jumlah		7	28	1	0	0	36

Keterangan:
Penyelesaian di Tahun 2009:
2 aset menjadi BMN, dan 3 aset dilepaskan ke pihak ketiga/swasta (total 5 aset)

Penyelesaian di Tahun 2010:
6 aset menjadi BMN, dan 14 aset menjadi BMND (total 20 aset)

Penyelesaian di Tahun 2011
7 aset menjadi BMN, 28 menjadi BMD, dan 1 aset dilepaskan ke pihak ketiga (total 36 aset)
Kompensasi pelepasan ABMA/C Tahun 2011 sebesar Rp 881.320.500,00
ABMA/C di Jalan M.T. Haryono No. 94 Kutoarjo kepada Yayasan Pendidikan Kristen Kutoarjo

Sehingga dari total ABMA/C sebanyak 1.010 dalam lampiran PMK 188/PMK.06/2008, 61 aset telah diselesaikan statusnya, masih sisa 949 aset yang belum diselesaikan status hukumnya.